



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 88, dan Pasal 89 serta Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan guna pedoman perumusan, penyusunan dan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022, serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;

- d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022;
- e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 7 Juli 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	<b>I.1</b>
A. Latar Belakang.....	I.1
B. Dasar Hukum Penyusunan.....	I.4
C. Hubungan Antar Dokumen.....	I.8
D. Maksud dan Tujuan.....	I.9
E. Sistematika Dokumen RKPD.....	I.9
<b>BAB II</b> GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	<b>II.1</b>
A. Kondisi Umum Daerah.....	II.1
1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
a. Karakteristik lokasi dan Wilayah.....	II.1
b. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.14
c. Aspek Demografi.....	II.28
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.30
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II.30
b. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II.51
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II.69
3. Aspek Pelayanan Umum.....	II.70
a. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	II.70
b. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II.97
c. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II.124
d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II.135
4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II.144
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II.145
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II.150
c. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II.152
d. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II.152
B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2020.....	II.156
C. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.158
1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran serta Isue Strategis Pembangunan Daerah.....	II.158
2. Rangkuman Identifikasi Permasalahan hasil Evaluasi RKPD 2020 dan Data Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	II.162
3. Rumusan Permasalahan hasil Evaluasi RKPD 2020 dan Data Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	II.170
<b>BAB III</b> KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	<b>III.1</b>
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.1
1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional.....	III.1
2. Tantangan Pembangunan 2021 dan 2022.....	III.5
3. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2022.....	III.6
a. Pertumbuhan Ekonomi.....	III.6
b. Kemiskinan dan Pengangguran.....	III.7
c. Inflasi .....	III.8
d. Produk Domestik Regional Bruto.....	III.8
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita .....	III.10
f. Nilai Investasi.....	III.11

	B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III.12
	1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III.15
	2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III.19
	3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III.22
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.....	IV.1
	A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV.1
	1. RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2025.....	IV.1
	2. Visi Misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026.....	IV.13
	3. Isu Strategis Dokumen Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026.....	IV.16
	B. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV.21
	1. Sasaran dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 .....	IV.21
	2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ...	IV.31
	3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022	IV.36
	4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pekalongan.....	IV.44
	5. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2022	IV.46
	6. Inovasi Daerah dalam Pencapaian Target dan Sasaran Tahun 2022.....	IV.63
	C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan.....	IV.75
	1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.....	IV.75
	2. Arah kebijakan Pengembangan Wilayah Provisni Jawa Tengah di Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan (Petanglong).....	IV.78
	3. Integrasi WP dalam Quickwin Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri (KI) Batang.....	IV.81
	4. Kebijakan Penataan Ruang untuk Pengembangan Wilayah kabupaten Pekalongan.....	IV.83
	5. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang.....	IV.84
	6. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang.....	IV.85
	7. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pekalongan.....	IV.86
	8. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.....	IV.89
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V.1
	A. Kerangka Pendanaan Tahun 2022.....	V.1
	B. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022.....	V.5
	1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	V.10
	2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	V.14
	3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	V.23
	4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	V.26
	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V.27
	6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	V.29
	7. Unsur Kewilayahan.....	V.29
	8. Unsur Pemerintahan Umum.....	V.30
	9. Non Urusan (Program setiap Perangkat Daerah) .....	V.30
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI.1
BAB VII	PENUTUP.....	VII.1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan .....	II.2
Tabel 2.2	Ketinggian wilayah per kecamatan dari permukaan laut .....	II.4
Tabel 2.3	Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan .....	II.7
Tabel 2.4	Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.9
Tabel 2.5	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019.....	II.10
Tabel 2.6	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairandi Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019.....	II.12
Tabel 2.7	Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Pengairandi Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019.....	II.13
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 .....	II.29
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.31
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.31
Tabel 2.11	Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.32
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pekalongan Tahun 2016 -2020 .....	II.33
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.34
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.35
Tabel 2.15	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.36
Tabel 2.16	Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.37
Tabel 2.17	Indeks Gini Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.38
Tabel 2.18	Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.39
Tabel 2.19	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.40
Tabel 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.41
Tabel 2.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.41
Tabel 2.22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.42
Tabel 2.23	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.43
Tabel 2.24	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.44
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.45
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.46
Tabel 2.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.47
Tabel 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.48



Tabel 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.49
Tabel 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.51
Tabel 2.31	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.53
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.53
Tabel 2.33	Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 ...	II.54
Tabel 2.34	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.55
Tabel 2.35	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.55
Tabel 2.36	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II.56
Tabel 2.37	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.57
Tabel 2.38	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kab.Pekalongan dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2016–2020 .....	II.57
Tabel 2.39	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.58
Tabel 2.40	Pengeluaran Perkapita (Disesuaikan) Kab. Pekalongan dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II.59
Tabel 2.41	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.60
Tabel 2.42	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah sekitar Tahun 2016-2020 ....	II.61
Tabel 2.43	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2016-2020.....	II.61
Tabel 2.44	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.62
Tabel 2.45	Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.63
Tabel 2.46	Usia Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.63
Tabel 2.47	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.64
Tabel 2.48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.65
Tabel 2.49	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan kab/kota sekitar Tahun 2016-2020 .....	II.65
Tabel 2.50	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II.66
Tabel 2.51	Persentase Kasus Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.68
Tabel 2.52	Jumlah Kasus <i>Stunting</i> Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 .....	II.69
Tabel 2.53	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.70
Tabel 2.54	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.70
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020....	II.71
Tabel 2.56	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020....	II.71
Tabel 2.57	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020....	II.72

Tabel 2.58	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.72
Tabel 2.59	Angka Putus Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.73
Tabel 2.60	Angka Kelulusan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.74
Tabel 2.61	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.75
Tabel 2.62	Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.75
Tabel 2.63	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.76
Tabel 2.64	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.77
Tabel 2.65	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.77
Tabel 2.66	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.78
Tabel 2.67	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.78
Tabel 2.68	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.79
Tabel 2.69	Persentase Guru Berkualifikasi SI/D4 Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.79
Tabel 2.70	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.81
Tabel 2.71	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.82
Tabel 2.72	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II.83
Tabel 2.73	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.84
Tabel 2.74	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 ...	II.85
Tabel 2.75	Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.85
Tabel 2.76	Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.86
Tabel 2.77	Rasio Tenaga Medis Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.86
Tabel 2.78	Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.87
Tabel 2.79	Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.87
Tabel 2.80	Kondisi Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.88
Tabel 2.81	Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.88
Tabel 2.82	Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.89
Tabel 2.83	Jenis dan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.89
Tabel 2.84	Capaian Layanan Bidang Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.90
Tabel 2.85	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.90
Tabel 2.86	Capaian Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.91
Tabel 2.87	Capaian Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.91
Tabel 2.88	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.93

Tabel 2.89	Jumlah Unjuk Rasa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016–2020 .....	II.94
Tabel 2.90	Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.95
Tabel 2.91	Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.95
Tabel 2.92	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.96
Tabel 2.93	Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.96
Tabel 2.94	Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.97
Tabel 2.95	Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.97
Tabel 2.96	Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.99
Tabel 2.97	Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.101
Tabel 2.98	Capaian Pelayanan Urusan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.101
Tabel 2.99	Jumlah Lumbung Pangan Kabupaten Pekalongan .....	II.102
Tabel 2.100	Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.103
Tabel 2.101	Perkembangan Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.104
Tabel 2.102	Penanganan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.105
Tabel 2.103	Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.105
Tabel 2.104	Capaian Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.107
Tabel 2.105	Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.108
Tabel 2.106	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.109
Tabel 2.107	Tingkat Kecelakaan dan Jumlah Korban Kecelakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019 .....	II.111
Tabel 2.108	Capaian Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.112
Tabel 2.109	Perkembangan Pelayanan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.113
Tabel 2.110	Perkembangan Pelayanan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.115
Tabel 2.111	Perkembangan Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.116
Tabel 2.112	Perkembangan Pelayanan Urusan Statistik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.117
Tabel 2.113	Perkembangan Pelayanan Urusan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.119
Tabel 2.114	Capaian Perkembangan Pelayanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.121
Tabel 2.115	Capaian Pelayanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.122
Tabel 2.116	Capaian Pengelolaan Pelayanan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.123
Tabel 2.117	Capaian Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.124

Tabel 2.118	Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 -2020 .....	II.125
Tabel 2.119	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.125
Tabel 2.120	Perkembangan Produksi Pengolahan Ikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.126
Tabel 2.121	Capaian Pelayanan Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.127
Tabel 2.122	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.128
Tabel 2.123	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.130
Tabel 2.124	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.131
Tabel 2.125	Jumlah Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.132
Tabel 2.126	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.133
Tabel 2.127	Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.133
Tabel 2.128	Jumlah Nilai Produksi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.134
Tabel 2.129	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.134
Tabel 2.130	Capaian Pelayanan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.136
Tabel 2.131	Capaian Pelayanan Bidang Keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.137
Tabel 2.132	Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.137
Tabel 2.133	Perkembangan Jumlah dan Nilai Aset Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.138
Tabel 2.134	Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2020 .....	II.139
Tabel 2.135	Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2020.....	II.139
Tabel 2.136	Capaian Pelayanan Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.140
Tabel 2.137	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.140
Tabel 2.138	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang Telah Ditindaklanjuti di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.141
Tabel 2.139	Capaian Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.142
Tabel 2.140	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.143
Tabel 2.141	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	II.145
Tabel 2.142	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	II.146
Tabel 2.143	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 .....	II.146
Tabel 2.144	Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.148

Tabel 2.145	Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.149
Tabel 2.146	Nilai Tukar Petani Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.149
Tabel 2.147	Panjang Jalan Kabupaten Pekalongan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2018-2020.....	II.150
Tabel 2.148	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.153
Tabel 2.149	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.153
Tabel 2.150	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.154
Tabel 2.151	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Generasi dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 .....	II.156
Tabel 2.152	Rekapitulasi Rata-rata Realiasi Ketercapaian Kinerja RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan. ....	II.156
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2018-2022.....	III.4
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2022.....	III.7
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	III.7
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 .....	III.8
Tabel 3.5	Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	III.8
Tabel 3.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022 .....	III.9
Tabel 3.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022 ....	III.9
Tabel 3.8	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2021 .....	III.10
Tabel 3.9	Data Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022.....	III.11
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	III.16
Tabel 3.11	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	III.16
Tabel 3.12	Target Tahun 2021, Proyeksi Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan.....	III.17
Tabel 3.13	Proporsi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 .....	III.17
Tabel 3.14	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....	III.18
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	III.20
Tabel 3.16	Pagu Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, Proyeksi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan.....	III.21
Tabel 3.17	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020 .....	III.22
Tabel 3.18	Proyeksi Pembiayaan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2023 .....	III.26
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap IV RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025.....	IV.4
Tabel 4.2	Keterkaitan Masalah Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....	IV.44
Tabel 4.3	Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2022 .....	IV.47

Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten Pekalongan serta Pagu Tahun 2022...	IV.49
Tabel 4.5	Keterkaitan Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan Target Sasaran Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2022.....	IV.63
Tabel 4.6	Rekapitulasi Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) KabupatenPekalongan Tahun 2020.....	IV.64
Tabel 4.7	Lokasi Desa Laboratorium Kemiskinan Di Kabupaten Pekalongan .....	IV.67
Tabel 4.8	Dampak Inovasi Jagad Di Kabupaten Pekalongan.....	IV.70
Tabel 4.9	Program dan Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Petanglong sesuai Perpres 79 Tahun 2019 .....	IV.76
Tabel 4.10	Dukungan daerah terhadap Rencana Induk Pembangunan Kab Pekalongan sesuai Perpres 79 Tahun 2019 .....	IV.77
Tabel 4.11	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPTdan IPM WP Petanglong Tahun 2020 .....	IV.81
Tabel 4.12	Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT dan IPM WP Petanglong Tahun 2022 .....	IV.82
Tabel 5.1	Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .....	V.2
Tabel 5.2	Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Per Perangkat Daerah tahun 2022 .....	V.3
Tabel 5.3	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....	V.5
Tabel 6.1	Target Capaian Indikator Kinerja Uatama Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....	VI.1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .....	VI.2
Tabel 6.3	Indikator dan Target yang mendukung Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan PusatTahun 2022 .....	VI.7

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .....	I.3
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Pekalongan 2022 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya .....	I.8
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan RKPD .....	I.9
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah .....	II.1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan .....	II.3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Pekalongan .....	II.4
Gambar 2.4	Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan .....	II.5
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan .....	II.8
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan .....	II.10
Gambar 2.7	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 .....	II.11
Gambar 2.8	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 .....	II.12
Gambar 2.9	Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 .....	II.14
Gambar 2.10	Tugu Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kab. Banjarnegara ....	II.15
Gambar 2.11	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan .....	II.16
Gambar 2.12	Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan .....	II.18
Gambar 2.13	Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan .....	II.20
Gambar 2.14	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan .....	II.22
Gambar 2.15	Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan .....	II.24
Gambar 2.16	Peta Rencana Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Pekalongan ...	II.25
Gambar 2.17	Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan .....	II.27
Gambar 2.18	Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kab. Pekalongan .....	II.28
Gambar 2.19	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020 .....	II.30
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.34
Gambar 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.35
Gambar 2.22	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.36
Gambar 2.23	PDRB Perkapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 .....	II.36
Gambar 2.24	Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.37
Gambar 2.25	Indeks Gini Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.38
Gambar 2.26	Indeks Ketimpangan <i>Williamson</i> Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.38
Gambar 2.27	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.39
Gambar 2.28	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.40
Gambar 2.29	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.41
Gambar 2.30	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan, dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.42
Gambar 2.31	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.42
Gambar 2.32	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan, dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.43

Gambar 2.33	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.44
Gambar 2.34	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020.....	II.45
Gambar 2.35	Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.46
Gambar 2.36	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020.....	II.47
Gambar 2.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.48
Gambar 2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.48
Gambar 2.39	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.49
Gambar 2.40	Diagram Pohon Isu Pengangguran Kabupaten Pekalongan tahun 2019 ..	II.50
Gambar 2.41	Rata-rata Usia Penduduk Menganggur (2017-2020) .....	II.50
Gambar 2.42	Klasifikasi Ketrampilan Penduduk Menganggur (2017-2020).....	II.50
Gambar 2.43	Jenis Kelamin Penduduk Menganggur (2017-2020) .....	II.51
Gambar 2.44	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.51
Gambar 2.45	Pertumbuhan IPM kabupaten/kota se Jawa Tengah Tahun 2020.....	II.52
Gambar 2.46	IPM kabupaten/kota se-Jawa Tengah Tahun 2020 .....	II.53
Gambar 2.47	IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II.53
Gambar 2.48	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.54
Gambar 2.49	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.55
Gambar 2.50	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020.....	II.56
Gambar 2.51	Harapan Lama Sekolah Kabupaten(HLS)Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.56
Gambar 2.52	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 .....	II.57
Gambar 2.53	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.58
Gambar 2.54	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020.....	II.58
Gambar 2.55	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.59
Gambar 2.56	Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II.59
Gambar 2.57	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 .....	II.60
Gambar 2.58	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.61
Gambar 2.59	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020.....	II.62
Gambar 2.60	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.62
Gambar 2.61	Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.63
Gambar 2.62	Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020 .....	II.64
Gambar 2.63	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	II.64



Gambar 2.64	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.65
Gambar 2.65	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kab/Kota Sekitar Tahun 2020 .....	II.66
Gambar 2.66	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020.....	II.66
Gambar 2.67	Jumlah Balita Gizi Buruk di Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 .....	II.67
Gambar 2.68	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.68
Gambar 2.69	Persentase Kasus Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II.68
Gambar 2.70	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.73
Gambar 2.71	Target Gerakan KUDU SEKOLAH.....	II.74
Gambar 2.72	Ketimpangan Keberlanjutan Sekolah Tahun 2020 .....	II.75
Gambar 2.73	APK PAUD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.80
Gambar 2.74	Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2020 .....	II.81
Gambar 2.75	Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2020.....	II.82
Gambar 2.76	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .....	II.83
Gambar 2.77	Angka Kematian Bayi menurut Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II.84
Gambar 2.78	Persentase Jalan Baik dan Sedang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.88
Gambar 2.79	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.89
Gambar 2.80	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.92
Gambar 2.81	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II.93
Gambar 2.82	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.93
Gambar 2.83	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Per Kuintil Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II.94
Gambar 2.84	Jumlah Unjuk Rasa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020 .....	II.95
Gambar 2.85	Penduduk Bekerja Berdasar Pendidikan (2017 – 2020) .....	II.99
Gambar 2.86	Penduduk Bekerja Status Pekerjaan (2017-2020) .....	II.99
Gambar 2.87	Terminal Bus Kajian Kab. Pekalongan .....	II.110
Gambar 2.88	Gedung Baru Dinkominfo Kab. Pekalongan .....	II.112
Gambar 2.89	E-data Sektoral Kab. Pekalongan .....	II.118
Gambar 2.90	Kesenian Tari Sintren Kabupaten Pekalongan.....	II.120
Gambar 2.91	Pagelaran Wayang Kulit di Kabupaten Pekalongan.....	II.121
Gambar 2.92	Perpustakaan Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .....	II.122
Gambar 2.93	Telaga Sigebyar Mangunan Kec.Petungkriyono Kabupaten Pekalongan .....	II.128
Gambar 2.94	Penyerahan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020.....	II.137
Gambar 2.95	Penyerahan SAKIP AWARD 2020 .....	II.142
Gambar 2.96	Penyerahan RB AWARD 2020 .....	II.144
Gambar 2.97	Nilai Tukar Petani Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.150
Gambar 2.98	Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang Melewati Kabupaten Pekalongan ....	II.151

Gambar 2.99	Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan .....	II.151
Gambar 2.100	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.154
Gambar 2.101	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 .....	II.154
Gambar 2.102	Generasi Penduduk berdasarkan kelompok umur .....	II.156
Gambar 2.103	Genangan permanen di Desa Jeruksari .....	II.161
Gambar 2.104	Rumah yang tergenang permanen dan ditinggalkan di Desa Karangjampo.....	II.161
Gambar 2.105	Kondisi permukiman Desa Tratebang yang berdampingan dengan genangan air .....	II.162
Gambar 2.106	Pembangunan Tanggul Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan .....	II.162
Gambar 2.107	Rumusan Masalah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .....	II.170
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia .....	III.1
Gambar 3.2	Rencana Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.....	III.3
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Sebagian Negara di Dunia .....	III.3
Gambar 3.4	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022 .....	III.11
Gambar 3.5	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022.....	III.11
Gambar 3.6	Sinergi Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah.....	III.14
Gambar 4.1	Perumusan Isu Strategis Teknokratik RPJMD 2021-2026 .....	IV.17
Gambar 4.2	Rumusan Isu Strategis Teknokratik RPJMD 2021-2026.....	IV.21
Gambar 4.3	Tema Pembangunan dalam RKP 2022 .....	IV.22
Gambar 4.4	Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RKP 2022 .....	IV.31
Gambar 4.5	Prioritas Nasional RKP 2022 .....	IV.31
Gambar 4.6	Mekanisme Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV.46
Gambar 4.7	Keterkaitan Target Isu Strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 .....	IV.63
Gambar 4.8	Kunjungan Ke Rumah ATS sebagai upaya Pendampingan ATS yang akan Dikembalikan ke Sekolah .....	IV.64
Gambar 4.9	Data dan Target Jumlah Anak yang Harus Sekolah dalam Gerakan "Kudu Sekolah".....	IV.65
Gambar 4.10	Implementasi Pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 .....	IV.67
Gambar 4.11	Inovasi Sapu Jagad dalam mendukung SDGs.....	IV.68
Gambar 4.12	Tahapan Munculnya Inovasi Sapu Jagad di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.....	IV.69
Gambar 4.13	Tahapan Pelaksanaan Inovasi Sapu Jagad di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.....	IV.69
Gambar 4.14	Pelayanan Unggulan "Sinta Sah Bu".....	IV.72
Gambar 4.15	Ilustrasi Rencana Pembangunan Kolam Retensi .....	IV.73
Gambar 4.16	Asset Gedung Eks Pendopo Nusantara .....	IV.74
Gambar 4.17	Rencana Pengembangan Gedung Eks DPU .....	IV.74
Gambar 4.18	Keterkaitan Prioritas dengan Inovasi .....	IV.75
Gambar 4.19	Pembagian Pengembangan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah .....	IV.78
Gambar 4.20	Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah.....	IV.80
Gambar 4.21	Sebaran Proyek Strategis Nasional Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Di Jawa Tengah.....	IV.80
Gambar 4.22	Arah Pengembangan Wilayah Petanglong.....	IV.81
Gambar 4.23	Peta Rencana Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	IV.84
Gambar 4.24	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pekalongan .....	IV.85
Gambar 4.25	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan .....	IV.86
Gambar 4.26	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pekalongan .....	IV.87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD disusun melalui pendekatan (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (*top-down*) dan (5) bawah-atas (*bottom up*) serta orientasi substansi secara *Tematik, Holistik, Integratif* dan *Spasial (THIS)* dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara Teknis Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten.

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ** Tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten 2022 karena RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 belum ditetapkan, maka penyusunan rencana pembangunan tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan ketentuan Pasal 147 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (RPJPD kab/kota, RPJMD Provinsi) dan Pasal 8 Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (RPJPD kab/kota, RPJMD Provinsi, RKP, evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan RKPD Tahun 2020, visi misi dan program kepala daerah terpilih.

Berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor : 02/PL.02.7-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2021** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 yaitu **FADIA ARAFIQ, SE, MM** dan **H. RISWADI, SH** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan **tahap Lima Tahun Keempat (2020-2025)** pada RPJPD 2005-2025 dengan arah pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah berlandaskan keunggulan SDM, pelayanan dasar semakin luas, infrastruktur wilayah berkualitas, kondusivitas wilayah yang mantap serta kemampuan Iptek yang meningkat. Sehubungan dengan itu, seluruh kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi RPJPD serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Tahap Lima Tahun Keempat (2020 – 2025). Di samping itu, juga untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta Proyek Strategis Nasional.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sehingga disusun melalui enam tahapan, yaitu:

1. **Persiapan Penyusunan RKPD;**

Pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.

2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD;**

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. **Penyusunan Rancangan RKPD;**

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan program strategis nasional.

4. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD;**

Musrenbang RKPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan; mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada pemerintah daerah melalui forum musrenbang kecamatan;

mempertajam indikator dan target kinerja program; menyepakati prioritas pembangunan daerah serta pendanaan kegiatan pembangunan daerah; menyepakati usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh DPRD.

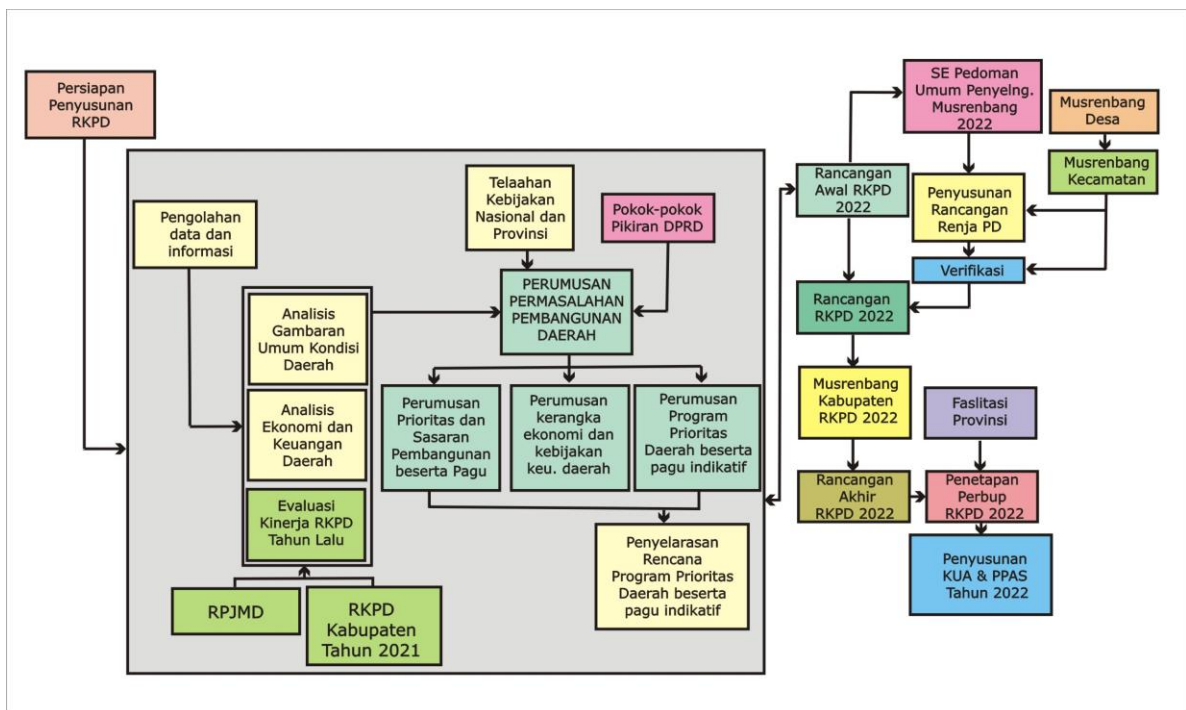
5. **Perumusan Rancangan Akhir RKP**; dan

Perumusan rancangan akhir RKP merupakan proses penyempurnaan rancangan RKP menjadi rancangan akhir RKP berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKP. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah, bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKP. Rancangan akhir RKP yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKP dan dikirim kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Serta diajukan ke APIP untuk dilakukan reviu sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Hasil fasilitasi dan Reviu APIP menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKP.

6. **Penetapan RKP Tahun 2022.**

Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang RKP yang telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi gubernur dan hasil reviu APIP disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Secara rinci proses penyusunan RKP Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 disajikan pada Gambar 1.1



**Gambar 1.1**

**Proses Penyusunan RKP Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKP Kabupaten Pekalongan tahun 2022 ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, kesiapsiagaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKP serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten. Substansi penting dalam RKP ini

merupakan gambaran investasi pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti Pendapatan Daerah, Dana transfer, Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan dokumen ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Selain itu sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 dan 395 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yg terdiri atas informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**. SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. SIPD lebih lanjut telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  32. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025



- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Kajen" Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022.

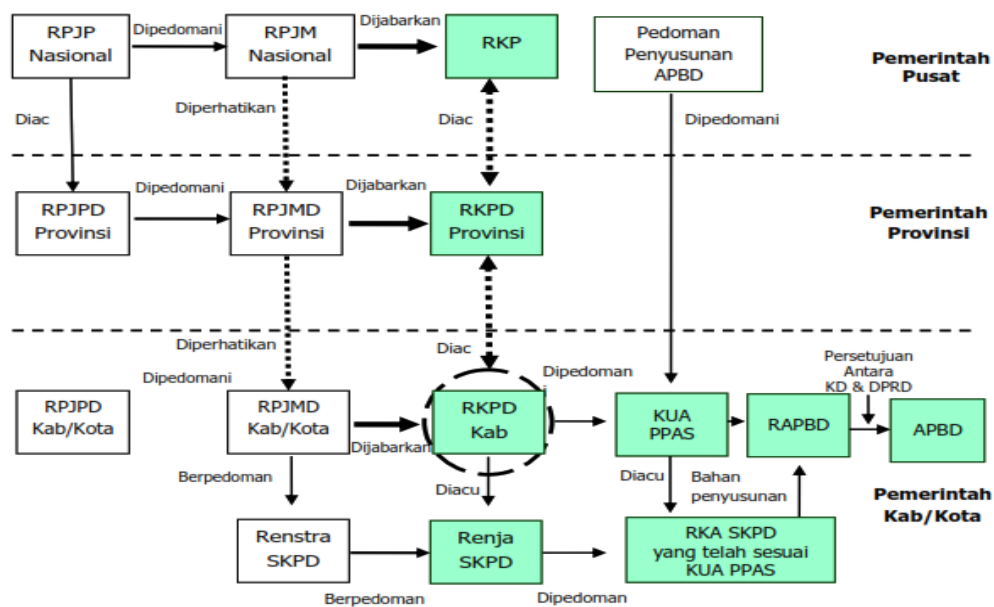
**C. Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk sinkronisasi dan keselarasan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi.

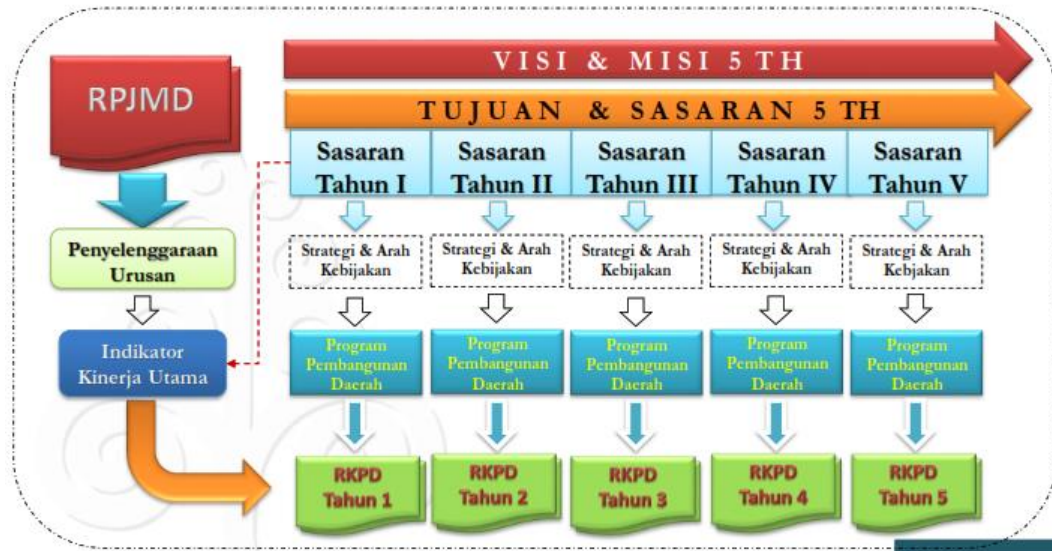
RKPD Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2022.

Pada tingkatan perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Pekalongan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk seperti pada Gambar 1.2 dan gambar 1.3.



**Gambar 1.2**  
**Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**  
**dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya**



**Gambar 1.3**  
**Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**

#### D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022;
2. Mewujudkan harmonisasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2022; dan
3. Memastikan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD telah memuat indikator dan target kinerja (*outcome dan output*), kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan mendukung prioritas nasional.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah untuk :

1. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2022;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022;
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 bagi Perangkat Daerah;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; dan
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ.

#### E. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah,

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Diuraikan menurut urusan sesuai OPD.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### A. Kondisi Umum Daerah

#### 1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pekalongan.

##### a. Karakteristik lokasi dan Wilayah

###### 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa yang memanjang ke selatan dengan Kota Kajen sebagai ibukota pusat pemerintahan.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.1**  
**Peta Orientasi Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah**

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan seluas 836,15 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 11 desa yang merupakan desa pesisir dan 274 desa bukan termasuk desa pesisir.

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.592 RW, dan 4.454 RT. Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi dengan jumlah desa terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 24 desa dan 23 desa. Untuk kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Kajen, Sragi, Kedungwuni, Buaran, dan Wiradesa, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Wiradesa sebanyak 5 kelurahan. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Kajen sebanyak 96 dusun. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Kesesi sebanyak 181 RW sedangkan untuk RT dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sragi sebanyak 402 RT. Kabupaten Pekalongan memiliki batas administrasi meliputi :

- Sebelah Utara : Laut Jawa & Kota Pekalongan;
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang & Kota Pekalongan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;  
dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Administrasi**  
**di Wilayah Kabupaten Pekalongan**

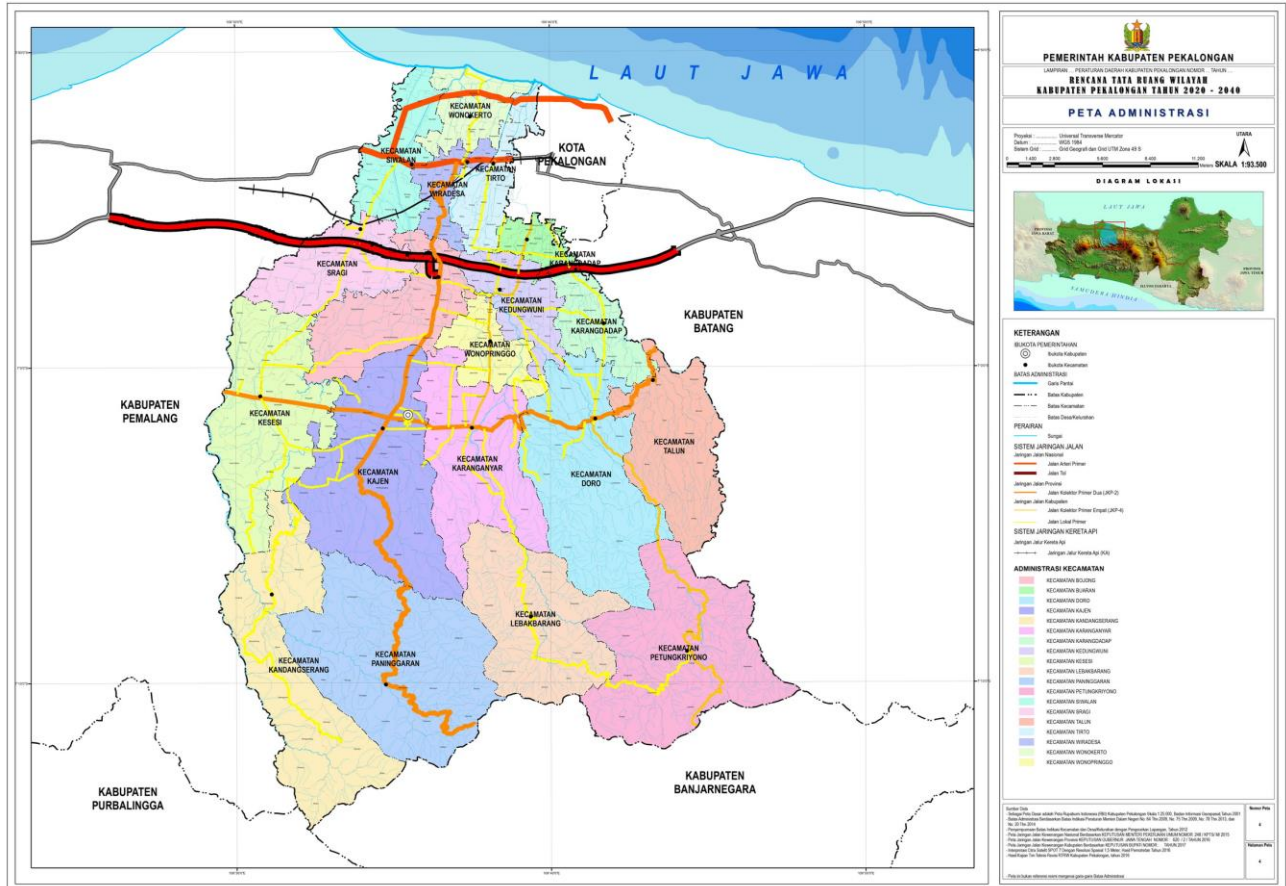
No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Kandangserang	60,55	14	-	68	56	153
2	Paninggaran	92,99	15	-	65	64	206
3	Lebakbarang	58,20	11	-	35	29	86
4	Petungkriyono	73,58	9	-	40	41	91
5	Talun	58,57	10	-	67	30	140
6	Doro	68,45	14	-	48	62	213
7	Karanganyar	63,48	15	-	67	75	203
8	Kajen	75,15	24	1	96	123	321
9	Kesesi	68,52	23	-	65	181	380
10	Sragi	32,40	16	1	75	155	402
11	Siwalan	25,91	13	-	60	97	272
12	Bojong	40,06	22	-	74	92	288
13	Wonopringgo	18,80	14	-	43	42	141
14	Kedungwuni	22,94	16	3	69	133	399
15	Karangdadap	20,99	11	-	56	68	171
16	Buaran	9,54	7	3	26	122	237
17	Tirto	17,39	16	-	41	63	250
18	Wiradesa	12,71	11	5	30	93	296
19	Wonokerto	15,90	11	-	33	66	205
<b>Jumlah</b>		<b>836,13</b>	<b>272</b>	<b>13</b>	<b>1.058</b>	<b>1.592</b>	<b>4.454</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2020

## 2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6° - 7° 23' Lintang Selatan dan antara 109° - 109° 78' Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai.

Adapun peta administrasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.2**  
**Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan**

**3) Topografi**

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat **66 desa/kelurahan (23,16%)** yang terdapat di dataran tinggi dan sebanyak **219 desa/kelurahan (76,84%)** berada di dataran rendah.

Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi. Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan dibagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan Bervariasi mulai dari 0-2 % yang meliputi bagian utara sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan, 0-15 % bagian tengah Pekalongan (Kecamatan Doro dan Talun), 15-40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran serta kelerengan lebih dari 40 % yang meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paninggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.

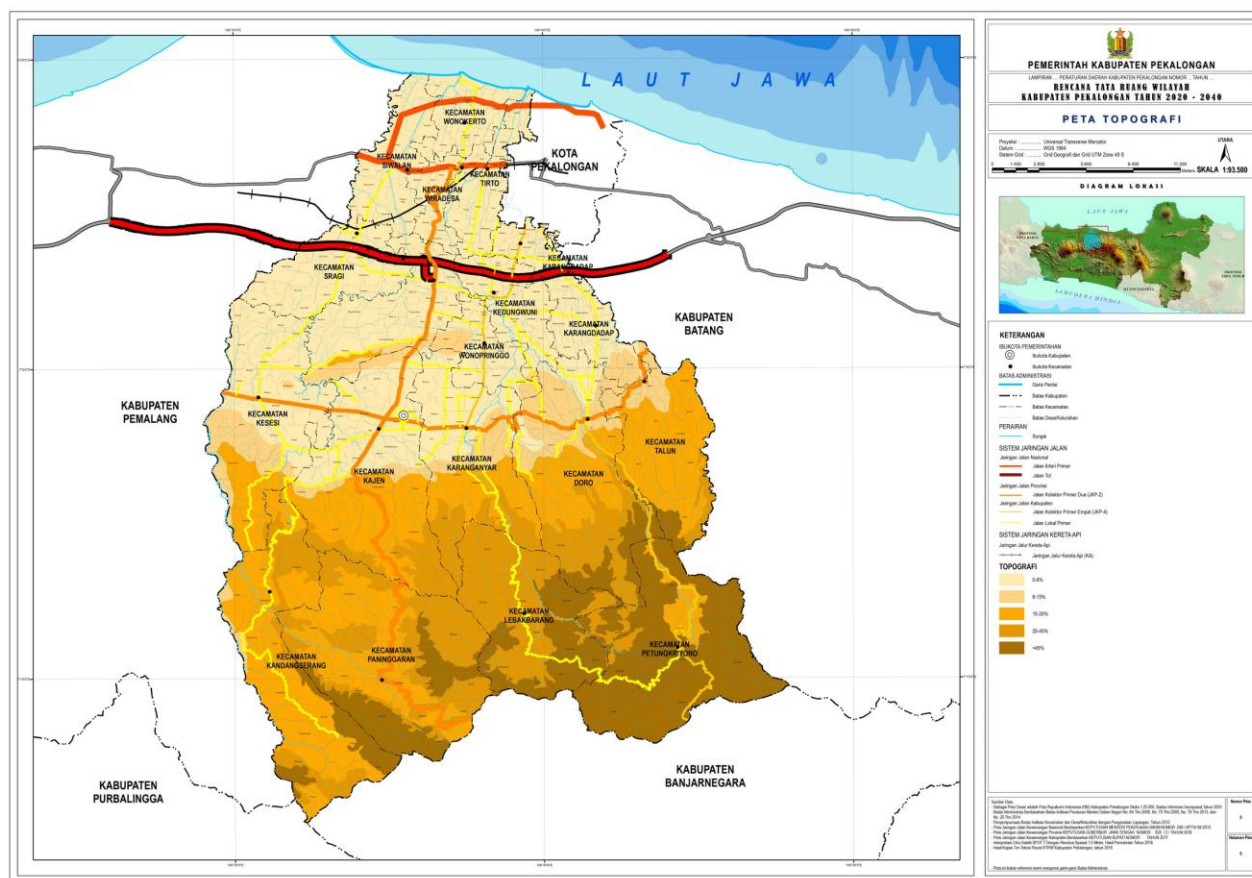
Adapun tabel ketinggian wilayah per kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Ketinggian wilayah per kecamatan**  
**Dari permukaan laut**

No	Kecamatan	Tinggi dari permukaan laut (mdpl)
1	Kandangserang	276
2	Paniggaran	850
3	Lebakbarang	691
4	Petungkriyono	1.294
5	Talun	300
6	Doro	381
7	Karanganyar	70
8	Kajen	60
9	Kesesi	40
10	Sragi	9
11	Siwalan	9
12	Bojong	50
13	Wonopringgo	20
14	Kedungwuni	11
15	Karangdadap	11
16	Buaran	8
17	Tirto	4
18	Wiradesa	4
19	Wonokerto	-

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2019

Sedangkan peta topografi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2.3.



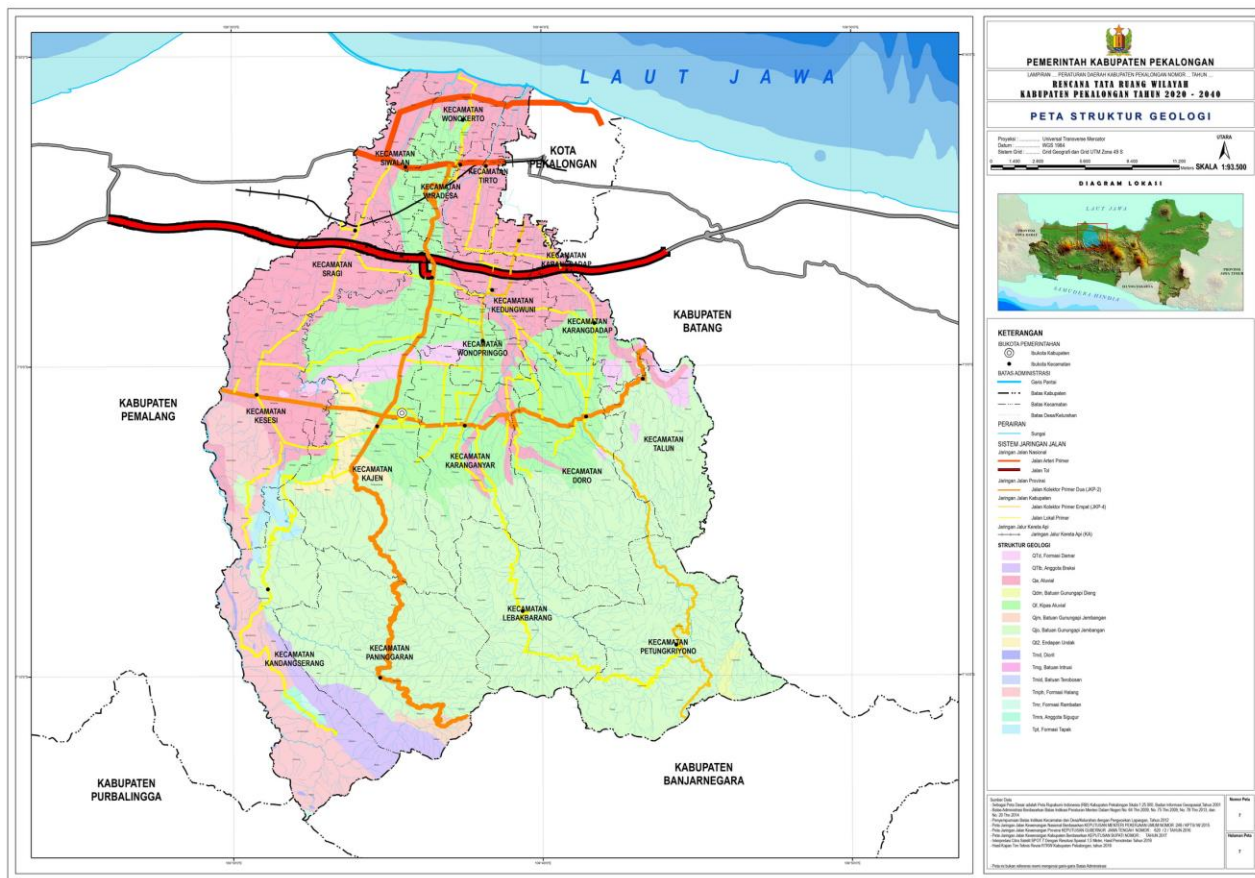
Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.3**  
**Peta Topografi Kabupaten Pekalongan**



4) Geologi

Kondisi geologi lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara umum dapat dijelaskan dalam gambar 2.4 sebagai berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.4**  
**Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan**

a) Daerah Endapan *Aluvial*

- (1) Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Aluvium Facies Gunung Api, terletak pada ketinggian antara 25 - 500 dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriyono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air. Namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya nanti tetap harus memperhatikan kelayakan lahannya.

**b) Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua**

Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta mengurangi dan mencegah kekritisian lahan dengan pengembangan kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat.

**c) Daerah *Miosen Facies Sedimen***

Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m atau-pun lebih dari 1000 m dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Karanganyar, Kajen dan sebagian kecil Kecamatan Kesesi. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada pengembangan kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat.

**d) Daerah geologi lain****(1) Daerah Hasil Gunung Api**

Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,8333 Ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

**(2) Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan**

Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni.

**(3) Daerah Pra Tertier Sedimen**

Terdapat di Kecamatan Petungkriono dengan luasan sekotar 2.020 Ha atau sekitar 2,25 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

**(4) Daerah Pliosen Facies Sedimen**

Terdapat di kecamatan kesesi dan Kajen dengan luasan sekitar 572 Ha atau 0,64 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

**(5) Daerah Oligosen**

Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 Ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

**(6) Daerah Granit**

Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

## 5) Hidrologi

Sumber air di Kabupaten Pekalongan dapat berasal dari :

### a) Mata air

Terdapat 63 mata air di Kabupaten Pekalongan dengan debit otal 911,8 liter/detik. Air dari mata air ini digunakan terutama untuk irigasi.

### b) Air Permukaan

Terdapat 4 sungai besar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air kebutuhan rumah tangga, irigasi dan industri di Kabupaten Pekalongan, yaitu Sungai Sragi, Sungai Sengkarang, Sungai Layangan dan Sungai Kupang.

#### (1) Sungai Sragi

Sungai Sragi melalui wilayah Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Siwalan dengan panjang ± 39,39 km.

#### (2) Sungai Sengkarang

Sungai Sengkarang melalui wilayah Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto dan kecamatan Wonokerto dengan panjang ± 51,50 km.

#### (3) Sungai Layangan

Sungai Layangan melalui wilayah Kecamatan Panninggaran dan Kecamatan kandangserang dengan panjang ± 19,25 km

#### (4) Sungai Kupang

Sungai Kupang melalui wilayah Kecamatan Talun, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Buaran dengan panjang ± 15,50 km

### c) Air Tanah

#### (1) Bagian Utara

Bagian Utara meliputi Kecamatan Siwalan, Wiradesa, Tirto dan Wonokerto. Potensi air tanah di wilayah ini untuk dimanfaatkan sebagai sumur dangkal dan sumur dalam sangat kecil karena sudah terintrusi air laut.

#### (2) Bagian Tengah

Bagian tengah meliputi Kecamatan Sragi, Bojong, Kedunwuni, Karangdadap, Wonopringgo, Kesesi, Kajen, Talun Karanganyar dan Doro. Di wilayah bagian tengah ini potensi air tanah untuk sumur dangkal sudah semakin kecil dan sumur dalam semakin terbatas,

#### (3) Bagian Selatan

Bagian selatan meliputi Kecamatan Kandangserang, Panninggaran, Lebakbarang dan Petungkriyono. Potensi air tanah di wilayah ini untuk sumur dangkal masih cukup besar dan untuk sumur dalam sudah terbatas.

## 6) Jenis Tanah

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

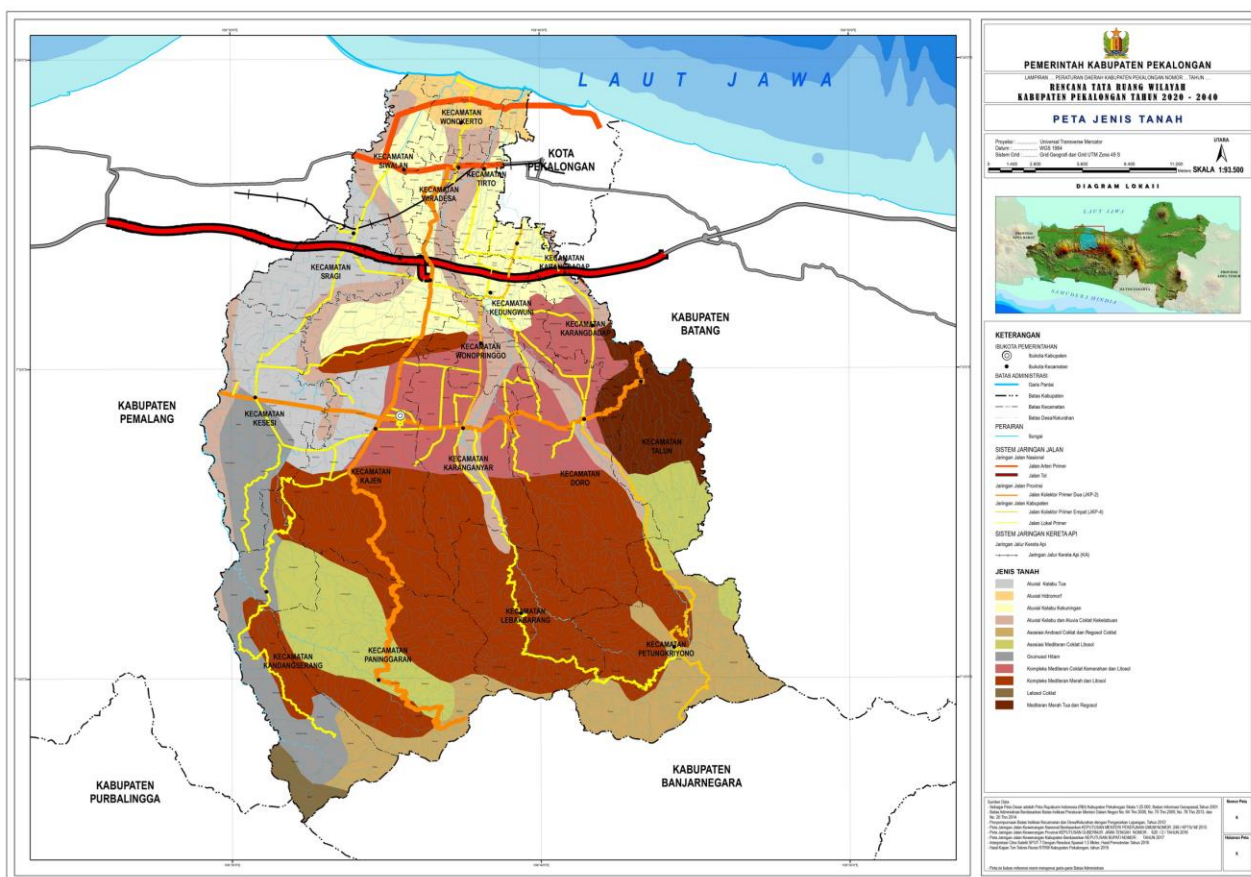
**Tabel 2.3**  
**Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan**

No.	Jenis Tanah	Kecamatan
1	<i>latosol coklat</i>	Kec. Panninggaran, Kandangserang, Doro
2	<i>aluvial kelabu tua</i>	Kec. Sragi dan Kedungwuni
3	<i>kompleks gromosol mediteran</i>	Kec. Kandangserang

No.	Jenis Tanah	Kecamatan
4	latosol coklat	Kec. Paniggaran, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni
5	alluvial kelabu	Kec. Sragi, Kajen, Kesesi, Bojong, Buaran, Tirto, Wiradesa
6	alluvial coklat	Kec. Sragi, Bojong, Wonopringgi, Kedungwuni, Buaran, Tirto
7	alluvial hidromorf	Kec. Sragi, Wiradesa, Tirto
8	kompleks latosol merah kekuning-kuningan dan latosol coklat kemerahan	Kec. Kandangserang, Paniggaran, Lebakbarang, Petungkriyono
9	andosol coklat	Kec. Kandangserang, Paniggaran, Lebakbarang, Petungkriyono

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2020

Adapun peta jenis tanah dapat dilihat pada gambar 2.5.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.5**  
**Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan**

**7) Klimatologi**

Iklm Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 2016-2020, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2017 dengan hari hujan sebanyak 150 hari dan curah hujan sebanyak 3.560 mm, sedangkan penurunan paling signifikan curah hujan terjadi pada tahun 2020 dengan hari hujan sebanyak 149 hari dan curah hujan sebanyak 737 mm.

Pada tahun 2020, Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata curah hujan 73,7 mm, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 192,8 mm. Untuk rata-rata hari hujan tahun 2020 adalah 15 hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 11 hari.

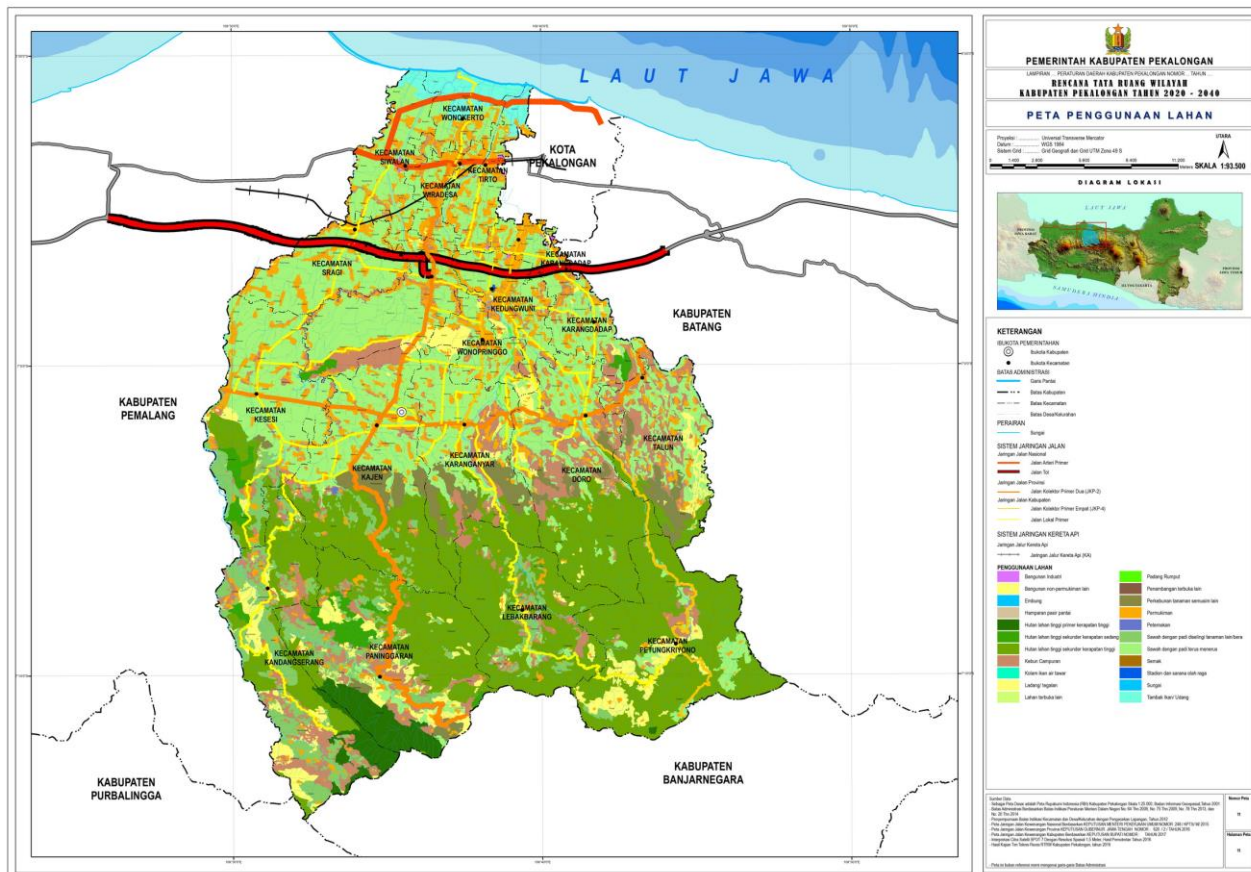
**Tabel 2.4**  
**Hari Hujan dan Curah Hujan**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Kandangserang	-	-
2	Paninggaran	-	-
3	Lebakbarang	-	-
4	Petungkriyono	-	-
5	Talun	-	-
6	Doro	-	-
	• Tapak Menjangan	188	896
	• Kutosari	168	724
7	Karanganyar	-	-
	• Karangsari	165	798
	• Karanggondang	143	913
8	Kajen	157	800
9	Kesesi	-	-
	• Gembro	150	699
	• Ponolawen	154	736
	• Brondong	153	587
10	Sragi		
	• Sumub Kidul	134	589
	• Sragi	138	594
11	Siwalan	-	-
12	Bojong	119	741
13	Wonopringgo	-	-
14	Kedungwuni	-	-
15	Karangdadap	-	-
16	Buaran	-	-
17	Tirto	-	-
18	Wiradesa	113	762
19	Wonokerto	-	-
	<b>Tahun 2020</b>	<b>149</b>	<b>737</b>
	2019	108	1.928
	2018	113	2.412
	2017	150	2.735
	2016	126	3.560

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

## 8) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai aktivitas manusia terhadap lahan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat merubah suatu fungsi lahan tersebut. Luas lahan sebesar 83615 Ha atau 836,15 Km<sup>2</sup> memiliki perbandingan lahan pertanian dan hutan yang seimbang. Berdasarkan bentuk bentang lahan Kabupaten Pekalongan yang sedikit memiliki lahan perairan (*maritime*) namun juga memiliki daerah dataran tinggi. Berdasarkan data penggunaan lahan dan perubahannya dari tahun 2015 - 2019, tidak berubah cepat dalam perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam gambar 2.6.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.6**  
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan**

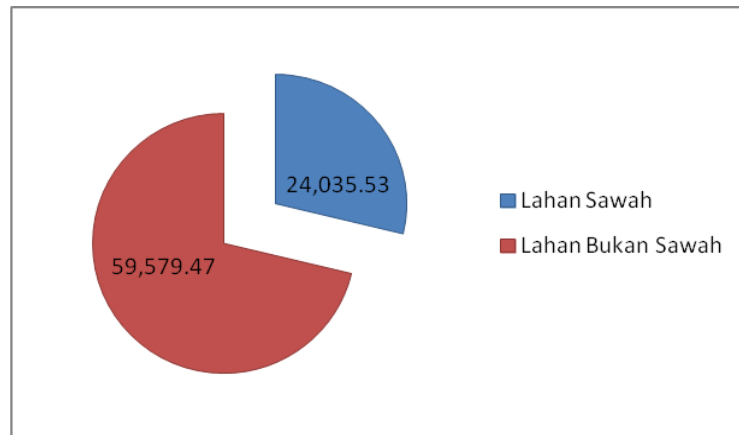
Dari gambar 2.6, dapat dijelaskan bahwa Luas total Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 adalah 83.615 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 24.035,53 ha (28,75%) dan lahan bukan sawah seluas 59.579,47 Ha (71,25%). Luasan lahan sawah sebagian besar terdapat di Kecamatan Kesesi seluas 3.373,94 Ha, Kecamatan Kajen seluas 2.276,24 Ha, dan Kecamatan Sragi seluas 2.241,45 Ha. Untuk lahan bukan sawah dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Paninggaran seluas 7.960 dan Kecamatan Petungkriyono seluas 7.142 Ha. Luasan wilayah yang paling luas di Kabupaten Pekalongan terdapat di Kecamatan Paninggaran seluas 8.814,03 Ha. Luas penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.5 dan gambar 2.7.

**Tabel 2.5**  
**Luas Penggunaan Lahan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019**

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
1	Kandangserang	1.561,02	4.305,00	5.866,02
2	Paninggaran	854,03	7.960,00	8.814,03
3	Lebakbarang	675,85	5,357,00	6.032,85
4	Petungkriyono	450,45	7.142,00	7.592,45
5	Talun	1.377,47	4.460,47	5.837,94
6	Doro	1.809,88	5.223,30	7.033,18
7	Karanganyar	1.619,30	4.577,98	6.197,27
8	Kajen	2.276,24	5.220,31	7.496,55
9	Kesesi	3.373,94	3.613,98	6.987,93
10	Sragi	2.241,45	1.084,49	3.325,94
11	Siwalan	1.531,72	1.068,56	2.600,28
12	Bojong	2.147,67	1.819,44	3.967,10

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
13	Wonopringgo	603,87	1.348,40	1.952,26
14	Kedungwuni	900,25	1.507,00	2.407,25
15	Karangdadap	994,53	999,00	1.993,53
16	Buaran	340,11	614,45	954,56
17	Tirto	540,60	1.340,43	1.881,03
18	Wiradesa	464,14	799,68	1.263,81
19	Wonokerto	273,02	1.138,00	1.411,02
	<b>Jumlah 2019</b>	<b>24.035,53</b>	<b>59.579,47</b>	<b>83.615,00</b>
	2018	23.906,00	59.709,00	83.615,00
	2017	24.381,00	58.637,00	83.018,00
	2016	24.392,00	59.223,00	83.615,00
	2015	24.789,54	58.823,53	83.613,07

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

**Gambar 2.7**

### **Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019**

Luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 adalah 24.035,53 Ha. Jenis sawah di Kabupaten Pekalongan meliputi sawah irigasi, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi desa/non PU, dan sawah tadah hujan. Lahan sawah sebagian besar di Kabupaten Pekalongan adalah sawah irigasi seluas 14.699,05 Ha (61,16%).

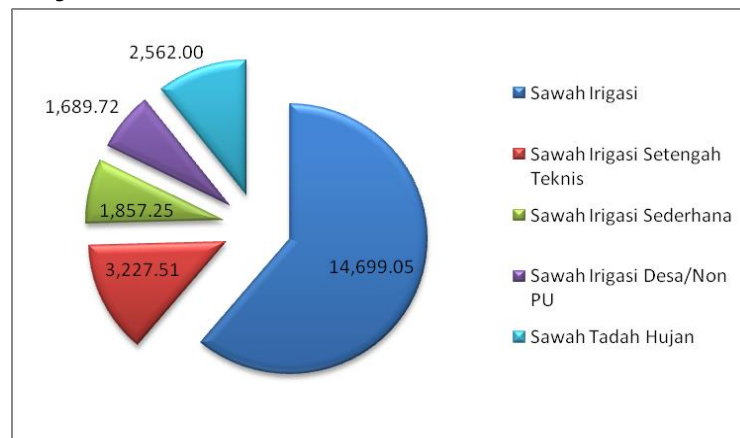
Sawah irigasi di Kabupaten Pekalongan hampir terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, dan Petungkriyono. Luas sawah irigasi paling luas di Kecamatan Kesesi seluas 2.647,87 Ha dan Kecamatan Sragi seluas 2.236,11 Ha. Sawah irigasi setengah teknis tidak terdapat di semua kecamatan, paling luas terdapat di Kecamatan Talun seluas 1.126,13 Ha dan Kecamatan Kajen seluas 588,89 Ha. Luas sawah irigasi sederhana paling luas yaitu di Kecamatan Paninggaran seluas 564,36 Ha. Luas sawah irigasi desa/non PU paling luas terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 594,02 Ha sedangkan untuk sawah tadah hujan paling luas terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 967,00 Ha.

Adapun luas lahan sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan gambar 2.8.

**Tabel 2.6**  
**Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019**

No.	Kecamatan	Sawah Irigasi	Sawah Irigasi Setengah Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Desa/Non PU	Sawah Tadah Hujan	Jumlah
1	Kandangserang	-	-	-	594,02	967,00	1.561,02
2	Paninggaran	-	-	564,36	51,67	238,00	854,03
3	Lebakbarang	-	67,02	184,69	95,13	329,00	675,85
4	Petungkriyono	-	-	234,45	-	216,00	450,45
5	Talun	33,00	1.126,13	218,34	-	-	1.377,47
6	Doro	958,38	343,63	144,12	339,76	24,00	1.809,88
7	Karanganyar	1.070,52	223,86	99,25	179,67	46,00	1.619,30
8	Kajen	1.245,60	588,89	170,75	10,00	261,00	2.276,24
9	Kesesi	2.647,87	272,13	163,10	13,84	277,00	3.373,84
10	Sragi	2.236,11	5,34	-	-	-	2.241,45
11	Siwalan	1.211,64	137,26	28,70	135,12	9,00	1.531,72
12	Bojong	2.026,40	70,27	-	-	51,00	2.147,67
13	Wonopringgo	451,88	76,53	-	60,46	15,00	603,87
14	Kedungwuni	818,14	27,06	12,00	42,05	1,00	900,25
15	Karangdadap	630,30	262,73	37,50	64,00	-	994,53
16	Buaran	276,11	-	-	-	64,00	340,11
17	Tirto	401,60	17,00	-	104,00	18,00	540,60
18	Wiradesa	414,47	9,67	-	-	40,00	464,14
19	Wonokerto	267,02	-	-	-	6,00	273,02
	<b>Jumlah 2019</b>	<b>14.699,05</b>	<b>3.227,51</b>	<b>1.857,25</b>	<b>1.689,72</b>	<b>2.562,00</b>	<b>24.035,53</b>
	2018	13.196,00	4.444,00	1.364,00	1.401,00	3.501,00	23.906,00
	2017	14.070,00	3.609,00	1.510,00	1.398,00	3.794,00	24.381,00
	2016	14.067,00	3.597,00	1.514,00	1.423,00	3.791,00	24.392,00
	2015	19.796,28	-	-	-	3.791,00	23.587,28

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

**Gambar 2.8**  
**Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019**

Sedangkan luas lahan bukan sawah Tahun 2019 seluas 59.579,47 ha. Lahan bukan sawah meliputi tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang, padang/Penggembalaan, sementara tak diusahakan, rumah/bangunan dan halaman sekitarnya dan hutan negara.

Kemudian tegal/kebun paling luas terdapat di Kecamatan Petungkriyono seluas 1.490 ha dan Kecamatan Kandangserang seluas 1.438 Ha. Lahan tegal/kebun tersebar di semua kecamatan. Untuk lahan ladang di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 hanya terdapat di Kecamatan Paninggaran seluas 385 ha dan Kecamatan Kesesi seluas 6 ha. Perkebunan di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 seluas 3.332 ha, yang terluas terdapat di Kecamatan Karanganyar seluas 1.114 ha. Lahan hutan rakyat di Kabupaten Pekalongan seluas 3.911 ha, yang terluas terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 768 ha. Sedangkan



luas penggunaan lahan padang penggembalaan/rumput sebesar 2.060 ha dengan wilayah terluas di Kecamatan Talun sebesar 1.923 ha.

Lahan tambak terdapat di Kecamatan Wonokerto, Siwalan, dan Tirta dengan total luas 834 ha, yang terluas terdapat di Kecamatan Wonokerto seluas 458 ha. Lahan kolam/tebat/empang dengan total luas 163 ha, yang terluas di Kecamatan Doro seluas 100 ha. Untuk lahan rumah, bangunan dan halaman sekitarnya di Kabupaten Pekalongan memiliki total luas 11.987 ha, sebagian besar terdapat di Kecamatan Kedungwuni seluas 1.107 ha, Kecamatan Kesesi seluas 1.045 ha, Kecamatan Bojong seluas 1.031 ha, dan Kecamatan Kajen seluas 1.000 ha.

Adapun luas lahan bukan sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.7 dan gambar 2.9.

**Tabel 2.7**  
**Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Pengairan**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019**

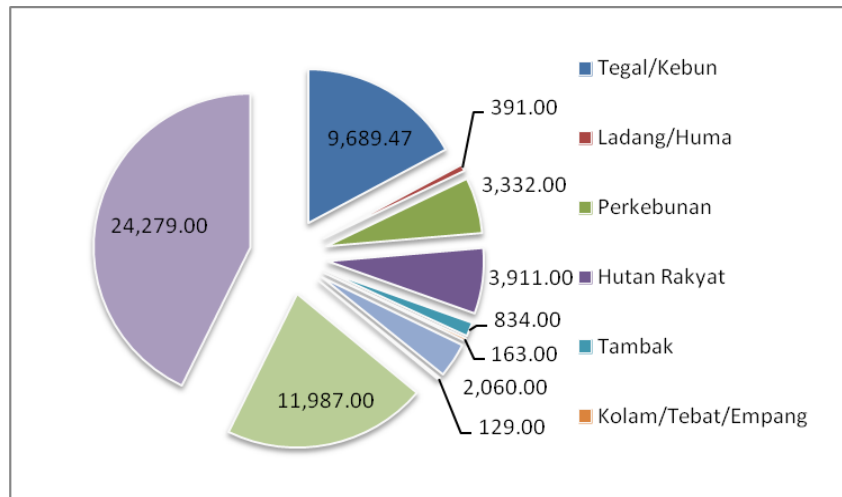
No.	Kecamatan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Tambak	Kolam/Tebat/Empang	Padang/Penggembalaan/rumput
1	Kandangserang	1.438,00	-	-	768,00	-	3,00	-
2	Paninggaran	735,00	385,00	725,00	450,00	-	8,00	35,00
3	Lebakbarang	480,00	-	-	179,00	-	1,00	-
4	Petungkriyono	1.490,00	-	104,00	158,00	-	8,00	-
5	Talun	746,47	-	582,00	374,00	-	3,00	1.923,00
6	Doro	714,30	-	246,00	535,00	-	100,00	-
7	Karanganyar	783,98	-	1.114,00	61,00	-	4,00	-
8	Kajen	827,31	-	398,00	360,00	-	1,00	-
9	Kesesi	444,98	6,00	-	560,00	-	20,00	102,00
10	Sragi	70,49	-	-	-	-	-	-
11	Siwalan	174,56	-	8,00	-	150,00	-	-
12	Bojong	583,44	-	-	-	-	-	-
13	Wonopringgo	298,40	-	77,00	231,00	-	15,00	-
14	Kedungwuni	57,00	-	-	184,00	-	-	-
15	Karangdadap	264,00	-	-	20,00	-	-	-
16	Buaran	80,45	-	-	-	-	-	-
17	Tirta	143,43	-	78,00	31,00	226,00	-	-
18	Wiradesa	87,68	-	-	-	-	-	-
19	Wonokerto	270,00	-	-	-	458,00	-	-
	<b>Jumlah 2019</b>	<b>9.689,47</b>	<b>391,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>3.911,00</b>	<b>834,00</b>	<b>163,00</b>	<b>2.060,00</b>
	2018	9.819,00	391,00	3.322,00	3.911,00	834,00	163,00	2.060,00
	2017	9.716,00	391,00	3.255,00	3.655,00	834,00	163,00	2.069,00
	2016	9.843,00	385,00	3.379,00	3.400,00	813,00	64,00	152,00
	2015	9.843,00	385,00	3.379,00	3.400,00	813,00	64,00	152,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

No.	Kecamatan	Sementara Tak Diusahakan	Lainnya	Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya	Hutan Negara	Rawa-rawa tidak ditanami	Lain-Lain	Jumlah
1	Kandangserang	-	88,00	238,00	1.621,00	-	149,00	4.305,00
2	Paninggaran	60,00	1,00	507,00	4.887,00	-	167,00	7.960,00
3	Lebakbarang	-	-	172,00	4.448,00	-	77,00	5.357,00
4	Petungkriyono	17,00	9,00	97,00	5.190,00	-	69,00	7.142,00
5	Talun	-	-	683,00	-	-	149,00	4.460,47
6	Doro	-	38,00	849,00	2.621,00	-	120,00	5.223,30
7	Karanganyar	-	48,00	879,00	1.595,00	-	93,00	4.577,98
8	Kajen	1,00	-	1.000,00	2.364,00	-	269,00	5.220,31
9	Kesesi	1,00	5,00	1.045,00	1.271,00	-	159,00	3.613,98
10	Sragi	-	1,00	868,00	-	-	145,00	1.084,49
11	Siwalan	-	170,00	398,00	-	-	168,00	1.068,56
12	Bojong	-	-	1.031,00	90,00	-	115,00	1.819,44
13	Wonopringgo	11,00	-	538,00	-	-	178,00	1.348,40
14	Kedungwuni	-	-	1.107,00	-	-	159,00	1.507,00
15	Karangdadap	-	-	423,00	192,00	-	100,00	999,00

No.	Kecamatan	Sementara Tak Diusahakan	Lainnya	Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya	Hutan Negara	Rawa-rawa tidak ditanami	Lain-Lain	Jumlah
16	Buaran	-	22,00	447,00	-	-	65,00	614,45
17	Tirto	39,00	-	733,00	-	-	90,00	1.340,43
18	Wiradesa	-	-	635,00	-	-	77,00	7,99
19	Wonokerto	-	73,00	337,00	-	-	-	1.138,00
	<b>Jumlah 2019</b>	<b>129,00</b>	<b>455,00</b>	<b>11.987,00</b>	<b>24.279,00</b>	<b>-</b>	<b>2.349,00</b>	<b>59.579,47</b>
	2018	129,00	455,00	11.987,00	24.279,00	-	2.349,00	59.709,00
	2017	123,00	597,00	11.907,00	24.279,00	20,00	2.225,00	59.234,00
	2016	96,00	630,00	12,077,00	26.219,00	20,00	2.145,00	59.223,00
	2015	96,00	630,00	12,077,00	26.219,00	20,00	2.145,00	59.223,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020



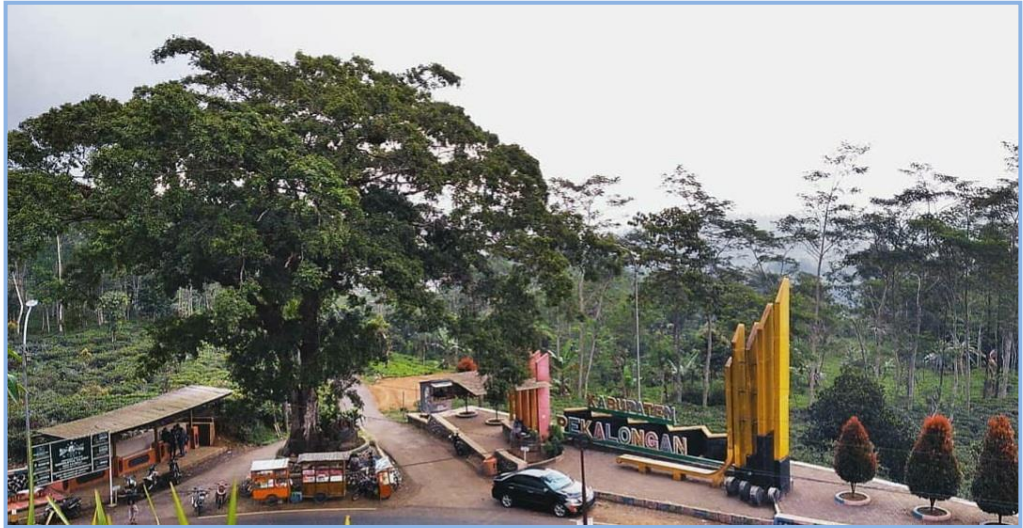
Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

**Gambar 2.9**  
**Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019**

#### b. Potensi Pengembangan Wilayah

Keterkaitan Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain antara lain interaksi yang cukup kuat terutama terjadi dengan Kota Pekalongan yang dihubungkan dengan jalur pantura dan Jalan Kedungwuni-Buaran-Kota Pekalongan. Interaksi yang terjadi berupa kegiatan perdagangan dan jasa, industri tekstil dan pelayanan seperti PDAM dan Telkom. Sedangkan dengan Kabupaten Batang dan Pemalang selain dihubungkan dengan jalur pantura juga dihubungkan dengan jalur tengah Batang-Kajen-Pemalang. Interaksi antara Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Batang akan meningkatkan aktivitas sepanjang jalur tersebut untuk Kabupaten Pekalongan terutama terjadi di Kecamatan Talun, Doro, Karanganyar, Kajen dan Kesesi. Perkembangan jalur ini diharapkan mampu mendukung pemerataan perkembangan di Kabupaten Pekalongan terutama di wilayah tengah dan selatan. Untuk Kabupaten Banjarnegara interaksi yang terjadi lebih mengarah pada aktivitas wisata, karena wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Wisata Dieng. Berdasarkan kondisi tersebut Jalur Pekalongan-Banjarnegara dapat dikembangkan sebagai pintu masuk menuju Kawasan Wisata Dieng. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat memacu aktivitas wisata di Kabupaten Pekalongan.

Adapun Tugu Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada gambar 2.10.



**Gambar 2.10**  
**Tugu Perbatasan Kabupaten Pekalongan**  
**dengan Kabupaten Banjarnegara**

Kawasan kerjasama antar kabupaten untuk lingkup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan masuk dalam kawasan strategis **Petanglong** (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan ini dilalui oleh jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Potensi alam yang menonjol adalah potensi wisata alam berupa pantai dan goa-goa serta daerah perbukitan sebagai tempat agrowisata. Potensi lainnya adalah bidang perikanan. Adanya Sungai Comal dapat digunakan untuk irigasi sawah-sawah penduduk dan pengendalian banjir.

Dalam kawasan kerjasama tersebut terdapat tiga kota utama di Kabupaten Pekalongan yang termasuk dalam lingkup kerjasama yaitu Kecamatan Wiradesa, Kedungwuni dan Kajen. Dalam perkembangannya ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang perkembangannya sangat pesat di Kabupaten Pekalongan. Dalam mendukung perkembangan kerjasama antar kawasan tersebut maka pengembangan kegiatan transportasi yang dapat dilakukan antara lain :

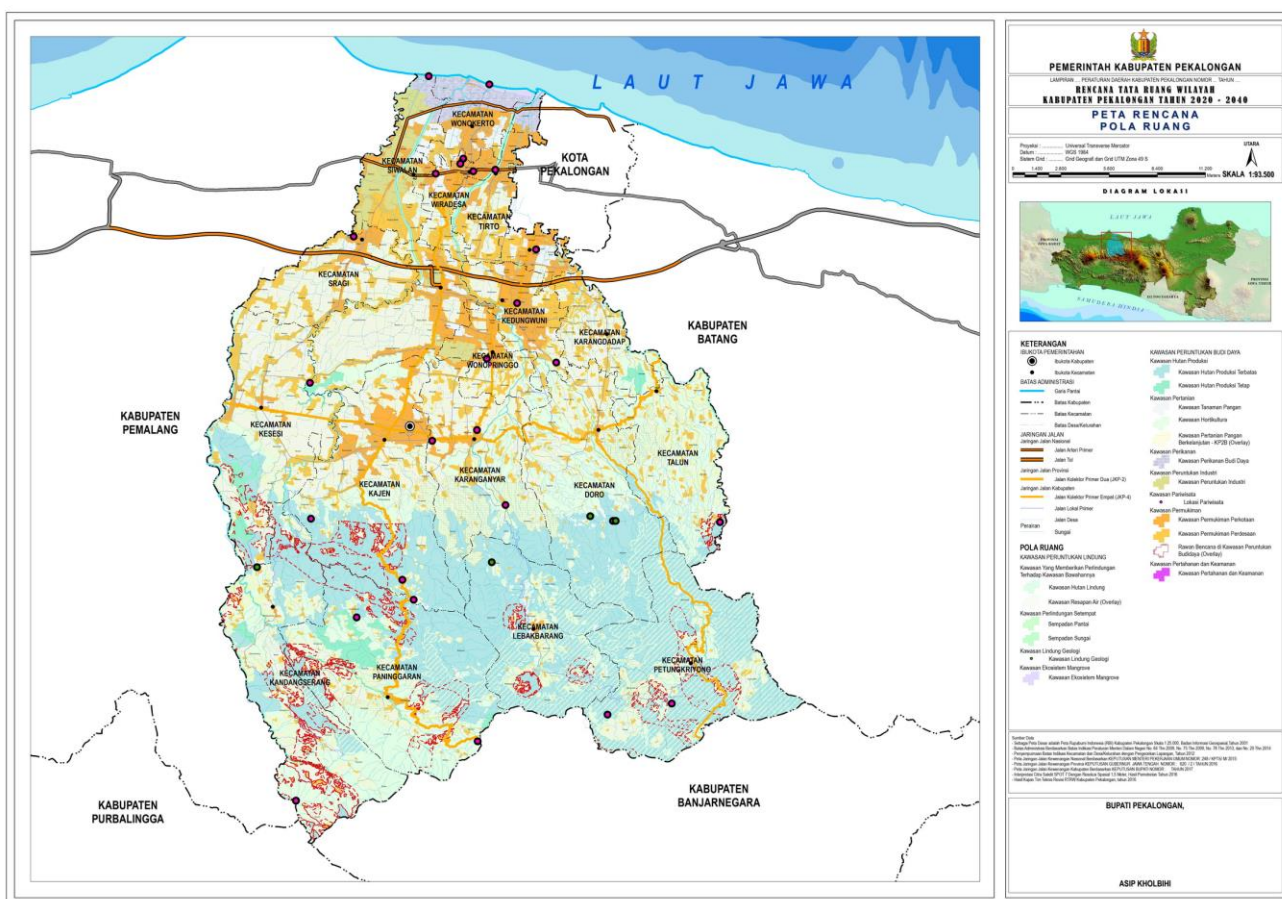
- 1) Pengembangan jaringan jalan, berupa: pembangunan jalan lingkar Pemalang-Pekalongan (Lingkar utara Petanglong);
- 2) Pengembangan sistem terminal regional sebagai titik transit pergerakan manusia di Propinsi Jawa Tengah berupa pemantapan fungsi terminal pada jalur regional Pantura. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pekalongan pengembangannya di arahkan di Kota Wiradesa.

Sedangkan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan dirumuskan sebagai pedoman dalam mengarahkan rencana pengembangannya. Berdasarkan kondisi dan permasalahan, tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama perhubungan dan prasarana wilayah;
- 2) menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan membuka wilayah yang secara geografis relatif terisolir dibandingkan dengan wilayah lainnya;
- 3) menjaga dan melestarikan lingkungan dengan pemantapan kawasan yang berfungsi lindung dan pengarah pemanfaatan kawasan budidaya;
- 4) mengembangkan perekonomian berbasis potensi ekonomi lokal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan

- kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- 5) mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, didukung oleh pengembangan pertanian dan perikanan/kelautan yang mantap;
  - 6) mengembangkan sistem prasarana wilayah terpadu, sehingga tercipta suatu susunan interrelasi dan interkoneksi jaringan masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah; dan
  - 7) pengembangan kawasan-kawasan khusus yang perlu mendapat perhatian/ seperti kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya, maupun kawasan yang perlu dipacu perkembangannya.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang **RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040** mengenai Rencana Pola Ruang sesuai gambar 2.11.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.11**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan**

Dari gambar 2. 11 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Kawasan Peruntukkan Lindung**

**a) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya**

- (1) Kawasan hutan lindung; dan  
Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung dengan luas 1.899,96 hektar berada di :
  - (a) Kecamatan Kandangserang;
  - (b) Kecamatan Panninggaran; dan
  - (c) Kecamatan Petungkriyono.

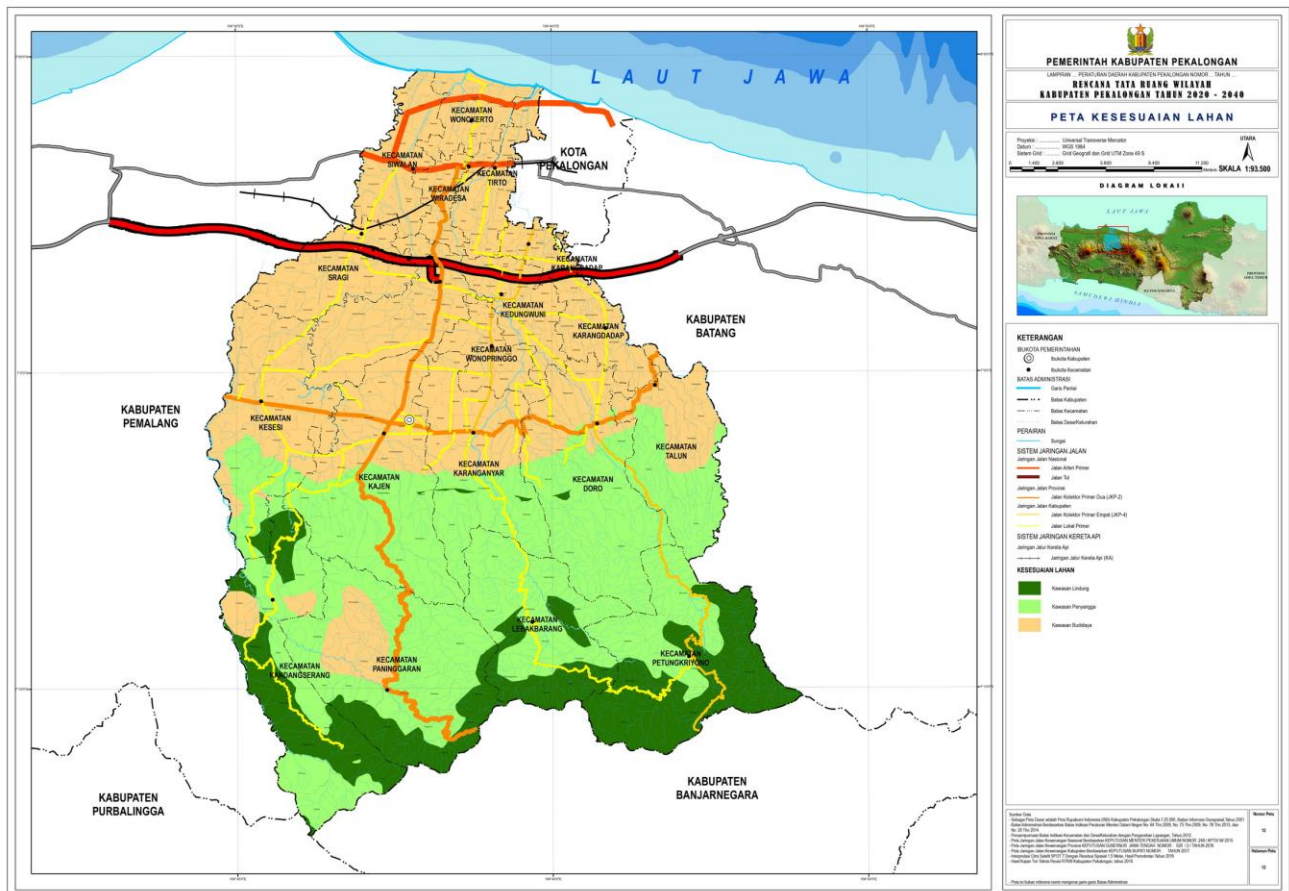
- (2) Kawasan resapan air  
Kawasan resapan air berupa kawasan yang memiliki kelerengan diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar. Kawasan resapan air berada di:
- (a) Kecamatan Doro;
  - (b) Kecamatan Kajen;
  - (c) Kecamatan Kandangserang;
  - (d) Kecamatan Lebakbarang;
  - (e) Kecamatan Paninggaran;
  - (f) Kecamatan Petungkriyono; dan
  - (g) Kecamatan Talun

**b) Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- (1) Sempadan pantai;  
Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai dengan luas kurang lebih 70 hektar berada di :
- (a) Kecamatan Siwalan;
  - (b) Kecamatan Tirto; dan
  - (c) Kecamatan Wonokerto.
- (2) Sempadan sungai; dan  
Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.226 hektar meliputi :
- (a) Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
  - (b) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
  - (c) Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
  - (d) Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
  - (e) Sungai yang terpengaruh pasang air laut
- Sempadan sungai meliputi :
- (a) Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi :
    - (1) Sungai Boro;
    - (2) Sungai Camprang/Menjangan;
    - (3) Sungai Genteng.
    - (4) Sungai Gosek;
    - (5) Sungai Gutomo, Sukoyoso, Kajen/Luwuk;
    - (6) Sungai Layangan;
    - (7) Sungai Paingan;
    - (8) Sungai Siwedus;
    - (9) Sungai Tengah; dan
    - (10) Sungai Winong.
  - (b) Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi :
    - (1) Sungai Blimbing;
    - (2) Sungai Dondong;
    - (3) Sungai Gubangan;
    - (4) Sungai Jangkar;
    - (5) Sungai Jurang Garung;
    - (6) Sungai Kemuning / Wisnu;
    - (7) Sungai Kumenyeb;
    - (8) Sungai Meduri;
    - (9) Sungai Mendolo;
    - (10) Sungai Mrican.
    - (11) Sungai Ngalian;

- (12) Sungai Parangan;
  - (13) Sungai Pucung;
  - (14) Sungai Punduran;
  - (15) Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng);
  - (16) Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis);
  - (17) Sungai Tanjung;
  - (18) Sungai Wadas; dan
  - (19) Sungai Welo.
- (c) Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi :
- (1) Sungai Gawe; dan
  - (2) Sungai Sumilir.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.12**  
**Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan**

- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk  
Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi :
- (a) Sempadan waduk;  
Sempadan waduk ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat.
  - (b) Sempadan embung; dan
  - (c) Sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob.  
Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi konstruksi.

**c) Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang

**d) Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan rawan bencana alam meliputi:

## (1) Kawasan rawan banjir dan genangan;

Kawasan rawan banjir dan genangan meliputi:

- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Buaran;
- (c) Kecamatan Kajen;
- (d) Kecamatan Karanganyar;
- (e) Kecamatan Karangdadap;
- (f) Kecamatan Kedungwuni;
- (g) Kecamatan Kesesi;
- (h) Kecamatan Siwalan;
- (i) Kecamatan Sragi;
- (j) Kecamatan Tirto;
- (k) Kecamatan Wiradesa;
- (l) Kecamatan Wonokerto; dan
- (m) Kecamatan Wonopringgo

## (2) Kawasan rawan tanah longsor; dan

Kawasan rawan tanah longsor meliputi:

## (a) Rawan longsor perbukitan meliputi :

- (1) Kecamatan Doro;
- (2) Kecamatan Kajen;
- (3) Kecamatan Karangayar;
- (4) Kecamatan Kandangserang;
- (5) Kecamatan Kesesi;
- (6) Kecamatan Labakbarang;
- (7) Kecamatan Panninggaran;
- (8) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (9) Kecamatan Talun.

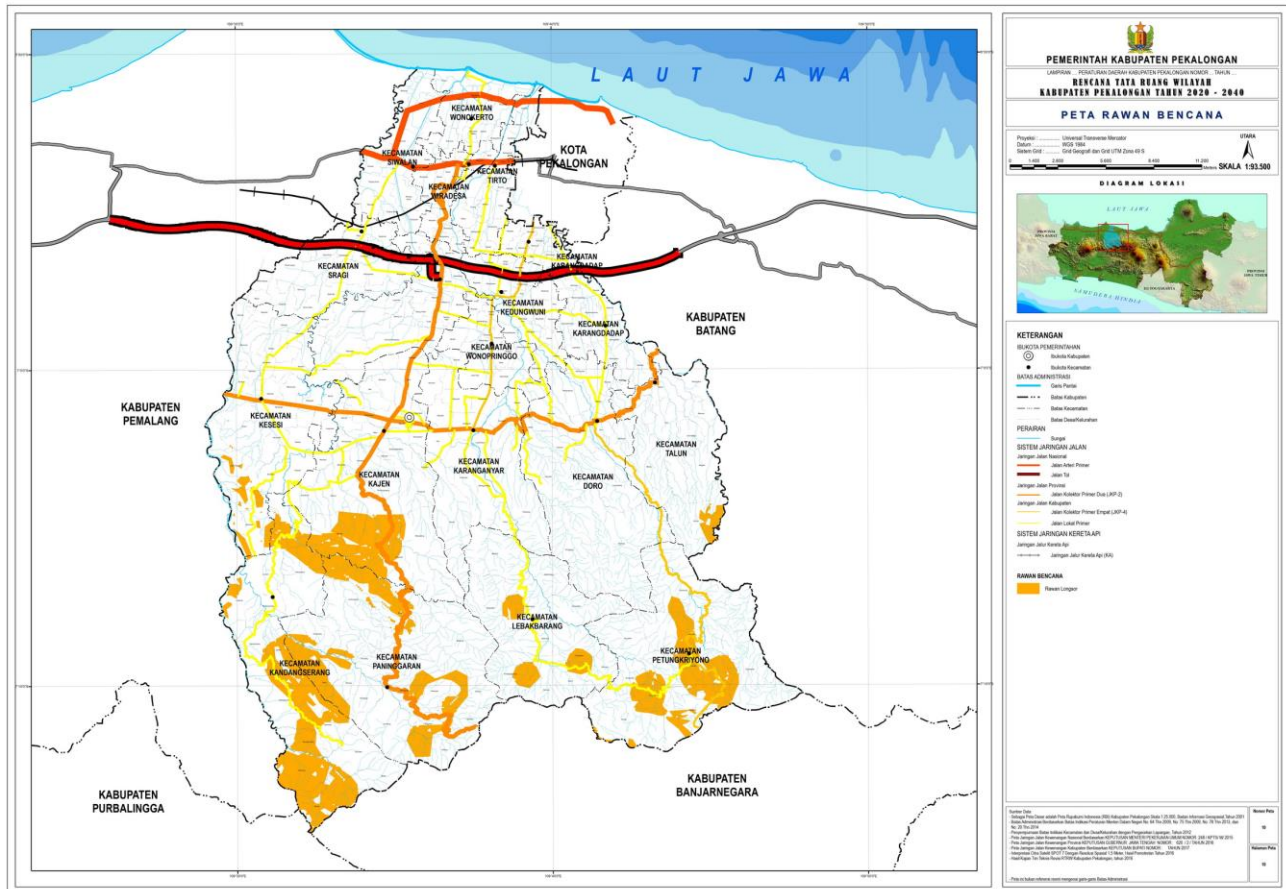
## (b) Rawan longsor sungai meliputi:

- (1) Kecamatan Karanganyar;
- (2) Kecamatan Kedungwuni;
- (3) Kecamatan Kesesi;
- (4) Kecamatan Sragi; dan
- (5) Kecamatan Wonopringgo

## (3) Kawasan rawan bencana lainnya

Kawasan rawan bencana lainnya berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peta rawan bencana Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.13.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.13**  
**Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan**

**e) Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan cagar budaya dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati

**f) Kawasan Ekosistem Mangrove**

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 66 hektar meliputi:

- (1) Kawasan muara sungai (estuari)  
Kawasan muara sungai (estuari) meliputi:
  - (a) Kecamatan Siwalan;
  - (b) Kecamatan Tirto; dan
  - (c) Kecamatan Wonokerto.

- (2) Kawasan pantai berhutan mangrove.  
Kawasan pantai berhutan mangrove meliputi:
  - (a) Kecamatan Siwalan;
  - (b) Kecamatan Tirto; dan
  - (c) Kecamatan Wonokerto

**2) Kawasan Peruntukkan Budidaya**

Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Kawasan peruntukkan budidaya meliputi :

**a) Kawasan hutan produksi**

Kawasan hutan produksi dengan luas ± 26.264,72 hektar meliputi:

- (1) Kawasan hutan produksi terbatas



Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 25.065,82 hektar meliputi :

- (a) Kecamatan Doro;
  - (b) Kecamatan Kajen;
  - (c) Kecamatan Kandangserang;
  - (d) Kecamatan Karanganyar;
  - (e) Kecamatan Kesesi;
  - (f) Kecamatan Lebakbarang;
  - (g) Kecamatan Panninggaran;
  - (h) Kecamatan Petungkriyono; dan
  - (i) Kecamatan Talun
- (2) Kawasan hutan produksi tetap  
Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.198,9 hektar meliputi :
- (a) Kecamatan Bojong;
  - (b) Kecamatan Kandangserang;
  - (c) Kecamatan Karangdadap;
  - (d) Kecamatan Kesesi;
  - (e) Kecamatan Lebakbarang;
  - (f) Kecamatan Panninggaran; dan
  - (g) Kecamatan Talun

**b) Kawasan pertanian**

Kawasan pertanian meliputi:

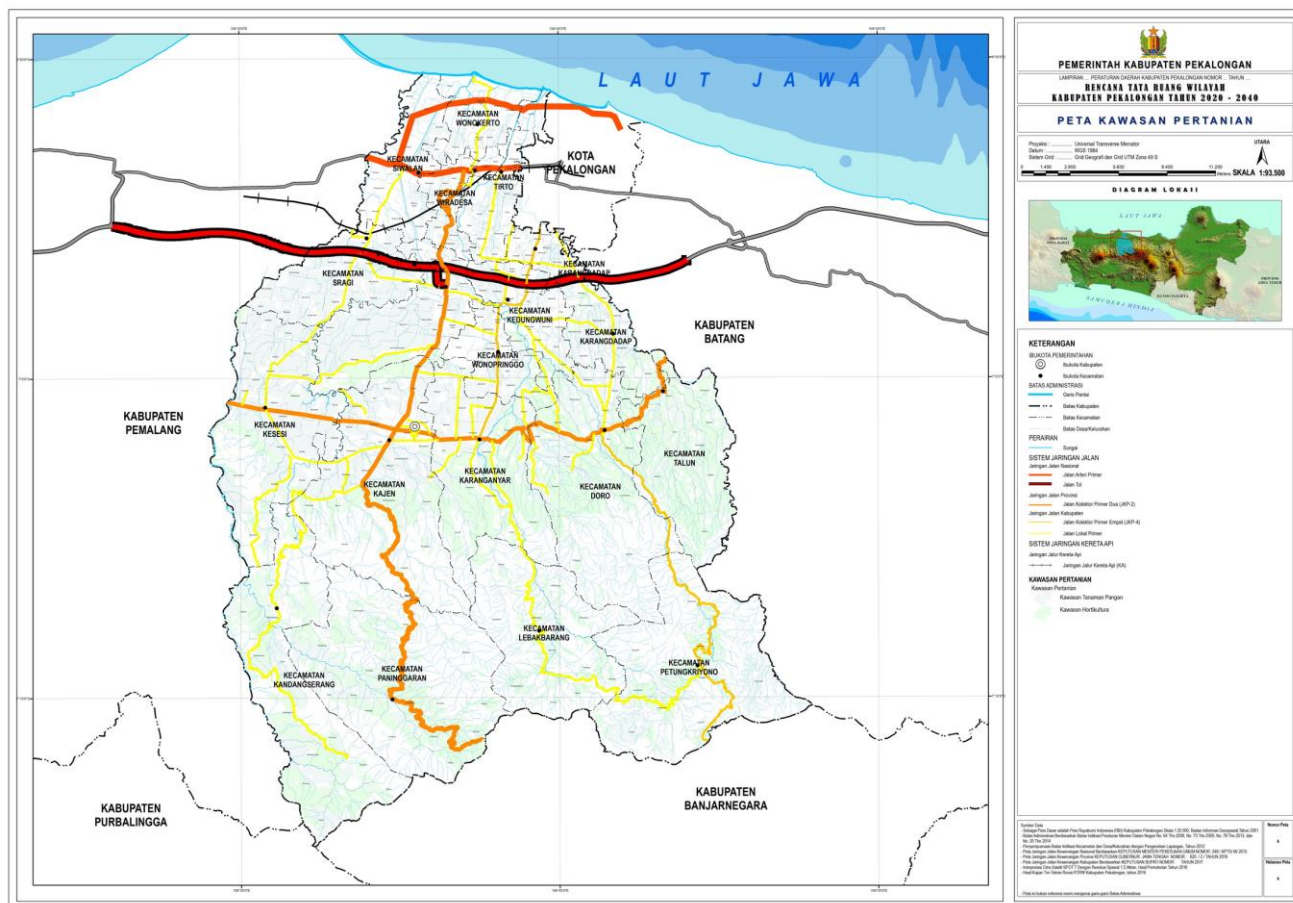
- (1) Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan dengan luas  $\pm$  23.404 hektar meliputi :

- (a) Kecamatan Bojong;
  - (b) Kecamatan Buaran;
  - (c) Kecamatan Doro;
  - (d) Kecamatan Kajen;
  - (e) Kecamatan Kandangserang;
  - (f) Kecamatan Karanganyar;
  - (g) Kecamatan Karangdadap;
  - (h) Kecamatan Kedungwuni;
  - (i) Kecamatan Kesesi;
  - (j) Kecamatan Lebakbarang;
  - (k) Kecamatan Panninggaran;
  - (l) Kecamatan Petungkriyono;
  - (m) Kecamatan Petungkriyono;
  - (n) Kecamatan Siwalan;
  - (o) Kecamatan Sragi;
  - (p) Kecamatan Talun;
  - (q) Kecamatan Tirto;
  - (r) Kecamatan Wiradesa;
  - (s) Kecamatan Wonokerto; dan
  - (t) Kecamatan Wonopringgo.
- (2) Kawasan hortikultura  
Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 17.249 hektar meliputi :
- (a) Kecamatan Bojong;
  - (b) Kecamatan Buaran;
  - (c) Kecamatan Doro;
  - (d) Kecamatan Kajen;

- (e) Kecamatan Kandangserang;
  - (f) Kecamatan Karanganyar;
  - (g) Kecamatan Karangdadap;
  - (h) Kecamatan Kedungwuni;
  - (i) Kecamatan Kesesi;
  - (j) Kecamatan Lebakbarang;
  - (k) Kecamatan Panninggaran;
  - (l) Kecamatan Petungkriyono;
  - (m) Kecamatan Sragi;
  - (n) Kecamatan Talun;
  - (o) Kecamatan Tirto;
  - (p) Kecamatan Wonokerto; dan
  - (q) Kecamatan Wonopringgo.
- (3) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.  
 Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ± 22.211 hektar meliputi :
- (a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 hektar; dan
  - (b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 hektar.

Selengkapnya peta kawasan pertanian Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2.14.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.14**  
**Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan**

**c) Kawasan perikanan**

Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi :

## (1) Budidaya tambak

Budidaya tambak dengan luas  $\pm$  1.120 hektar meliputi:

- (a) Kecamatan Siwalan;
- (b) Kecamatan Tirto; dan
- (c) Kecamatan Wonokerto

## (2) Budidaya air tawar

Budidaya air tawar meliputi seluruh wilayah kecamatan.

## (3) Fasilitas perikanan tangkap

Fasilitas perikanan tangkap meliputi:

- (a) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto;
- (b) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan
- (c) Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.

## (4) Pengolahan perikanan

Pengembangan pengolahan perikanan meliputi:

- (a) Kecamatan Karangdadap;
- (b) Kecamatan Kedungwuni;
- (c) Kecamatan Siwalan;
- (d) Kecamatan Sragi;
- (e) Kecamatan Tirto;
- (f) Kecamatan Wonokerto; dan
- (g) Kecamatan lainnya.

**d) Kawasan pertambangan dan energi**

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:

## (1) Kawasan pertambangan

Kawasan pertambangan meliputi:

## (a) Kawasan pertambangan mineral logam

Kawasan pertambangan mineral logam meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

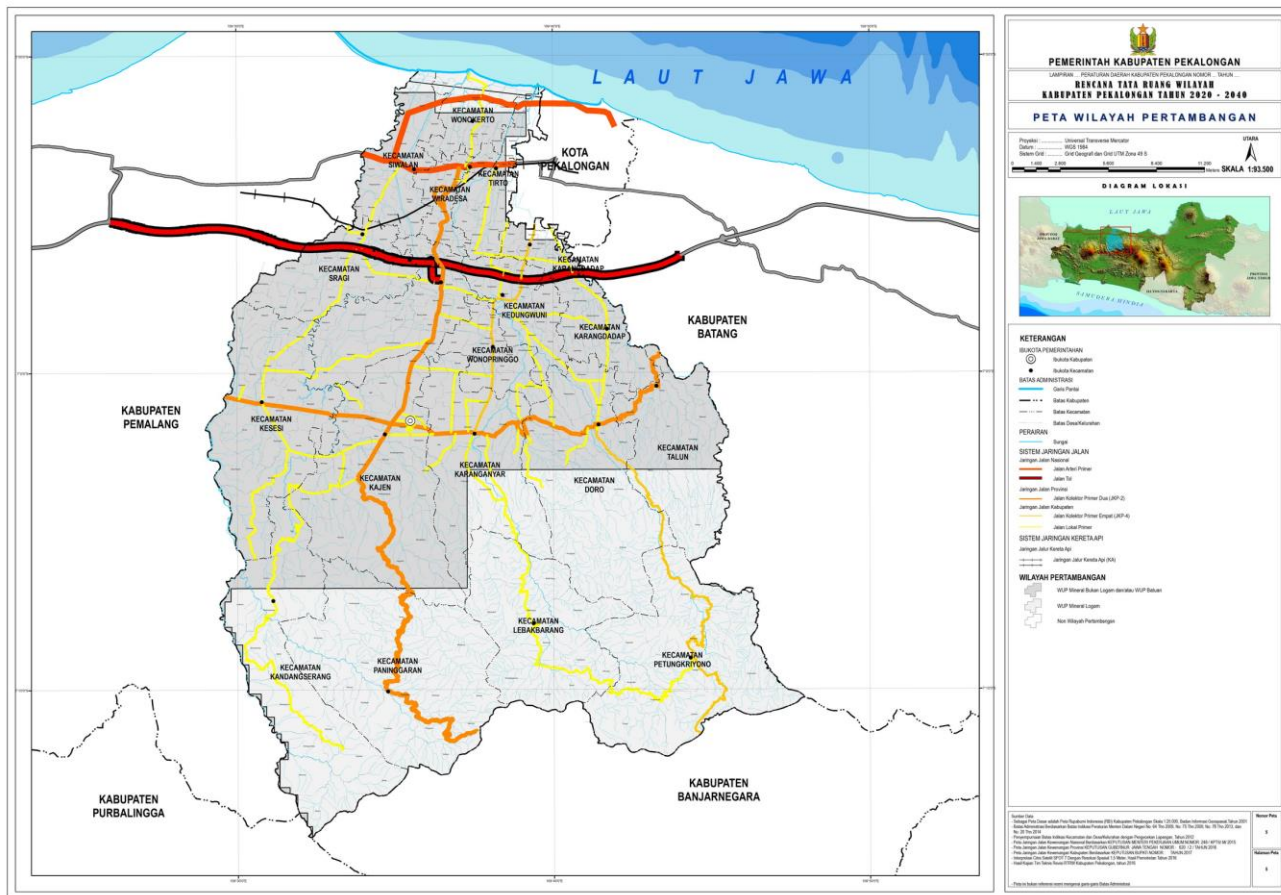
- (1) Kecamatan Doro;
- (2) Kecamatan Kandangserang;
- (3) Kecamatan Karanganyar;
- (4) Kecamatan Lebakbarang;
- (5) Kecamatan Paninggaran;
- (6) Kecamatan Petungkriyono;
- (7) Kecamatan Siwalan;
- (8) Kecamatan Talun;
- (9) Kecamatan Tirto; dan
- (10) Kecamatan Wonokerto.

## (b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Doro;
- (4) Kecamatan Kajen;

- (5) Kecamatan Kandangserang;
  - (6) Kecamatan Karanganyar;
  - (7) Kecamatan Karangdadap;
  - (8) Kecamatan Kedungwuni;
  - (9) Kecamatan Kesesi;
  - (10) Kecamatan Panninggaran;
  - (11) Kecamatan Siwalan;
  - (12) Kecamatan Sragi;
  - (13) Kecamatan Talun;
  - (14) Kecamatan Tirto;
  - (15) Kecamatan Wiradesa;
  - (16) Kecamatan Wonokerto; dan
  - (17) Kecamatan Wonopringgo.
- (2) Kawasan panas bumi;
- Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng. Wilayah kerja panas bumi dataran tinggi dieng meliputi :
- (a) Kecamatan Lebakbarang; dan
  - (b) Kecamatan Petungkriyono.
- Selengkapnya peta wilayah pertambangan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2.15.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

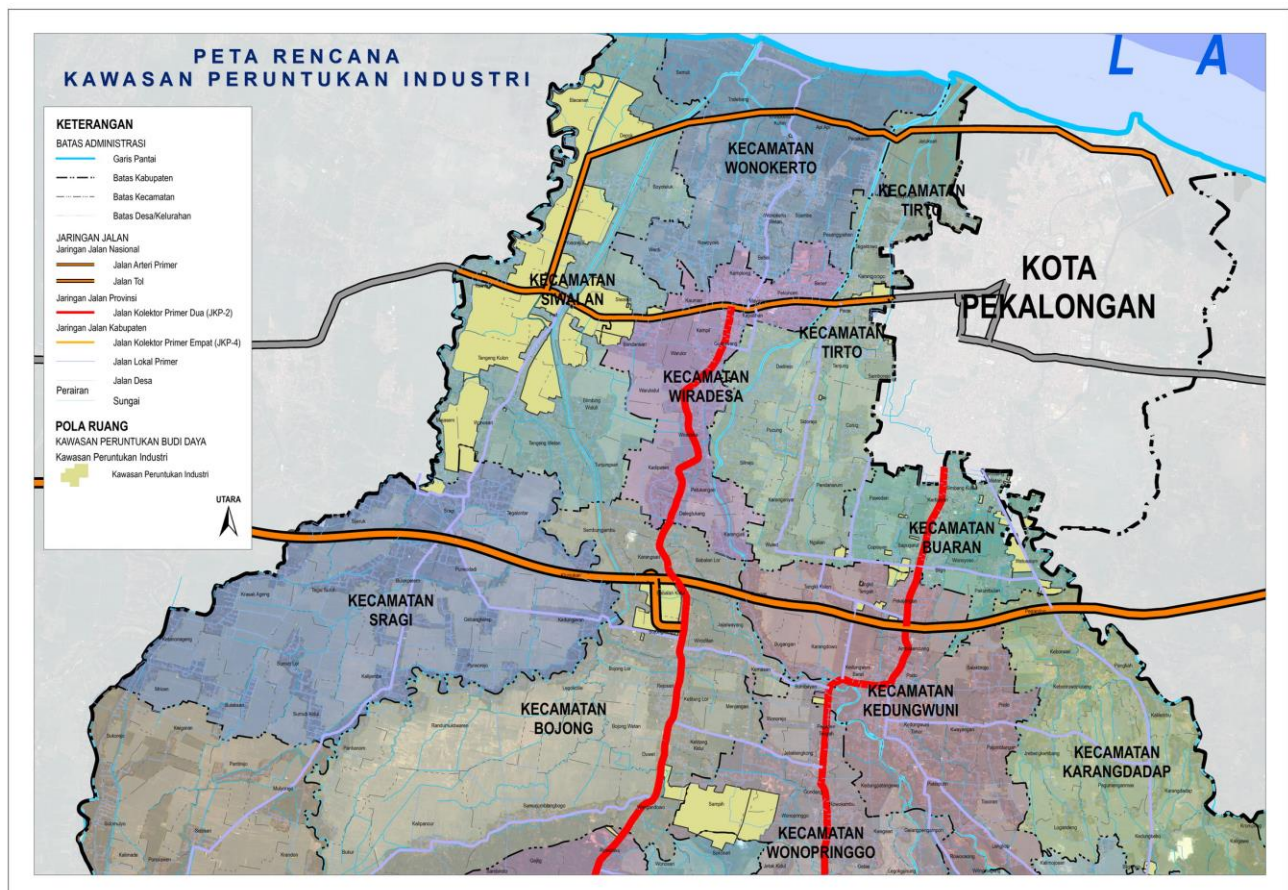
**Gambar 2.15**  
**Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan**

### e) Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas  $\pm$  1.533 hektar berada di :

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Doro;
- (4) Kecamatan Kajen;
- (5) Kecamatan Karanganyar;
- (6) Kecamatan Karangdadap;
- (7) Kecamatan Kedungwuni;
- (8) Kecamatan Panninggaran;
- (9) Kecamatan Siwalan;
- (10) Kecamatan Sragi;
- (11) Kecamatan Tirto;
- (12) Kecamatan Wiradesa;
- (13) Kecamatan Wonokerto; dan
- (14) Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Perusahaan industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi diluar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sentra industri kecil menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri. Selengkapnya peta rencana peruntukkan industri Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2.16.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.16**  
**Peta Rencana Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Pekalongan**

**f) Kawasan pariwisata**

Kawasan pariwisata meliputi :

**(1) Pariwisata alam**

Pariwisata alam meliputi:

- (a) Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
- (b) Curug Cinde Lebakbarang;
- (c) Curug Siwatang – Lambanggalun di Kecamatan Paninggaran;
- (d) Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran;
- (e) Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong) Karanganyar;
- (f) Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur);
- (g) Kawasan wisata Linggoasri;
- (h) Kawasan wisata Petungkriono;
- (i) Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran;
- (j) Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
- (k) Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto;
- (l) Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro;
- (m) Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi;
- (n) Wisata air sungai Pencongan; dan
- (o) Obyek Wisata Alam lainnya.

**(2) Pariwisata budaya**

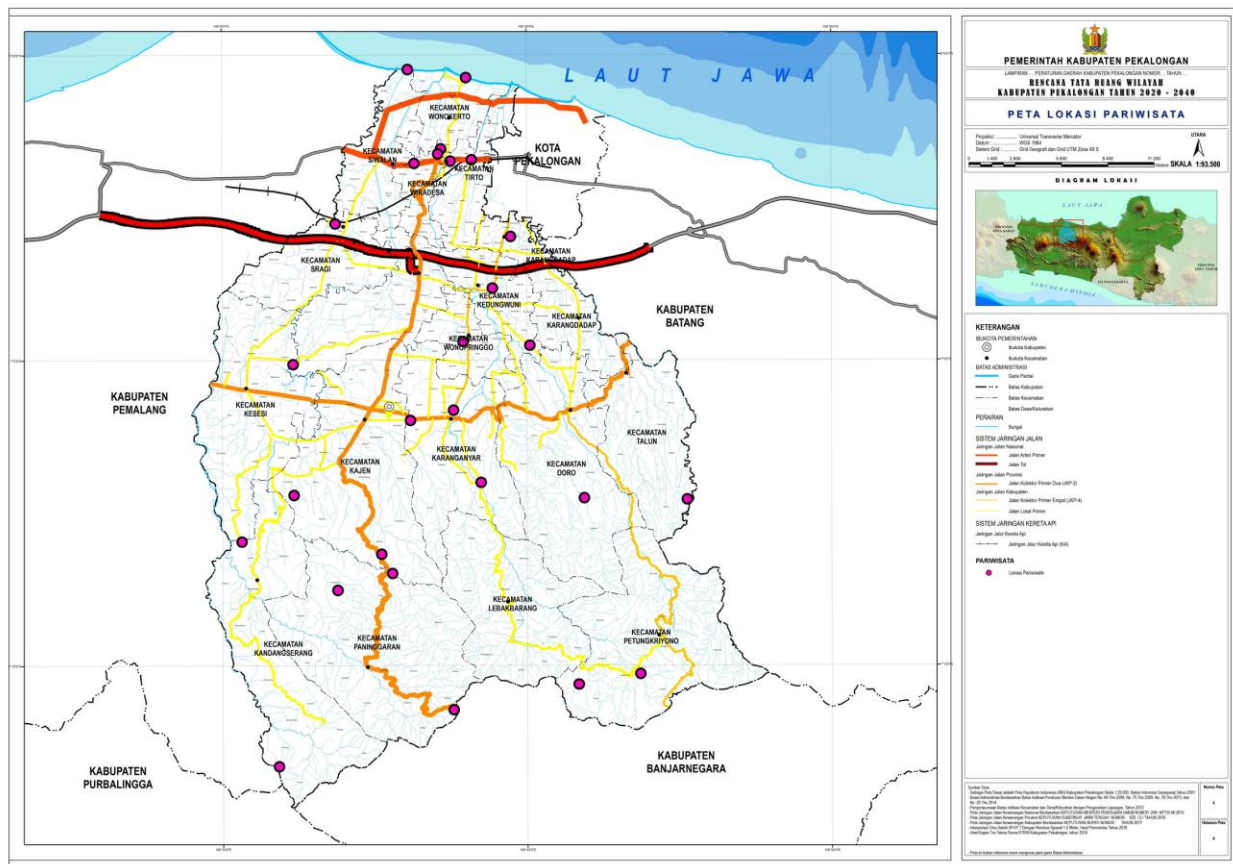
Pariwisata Budaya meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar diseluruh wilayah daerah

**(3) Pariwisata buatan**

Pariwisata buatan meliputi:

- (a) International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa;
- (b) Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa;
- 3) Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
- 4) Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
- 5) Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
- 6) Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar;
- 7) Pabrik Gula di Kecamatan Sragi;
- 8) Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;
- 9) Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
- 10) Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni;
- 11) Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan
- 12) Wisata buatan lainnya.

Selengkapnya peta lokasi pariwisata Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2.17.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.17**  
**Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan**

**g) Kawasan peruntukkan permukiman**

Kawasan peruntukkan permukiman dengan luas ± 15.403 hektar meliputi :

(1) Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas ± 7.194 hektar meliputi :

- (a) Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong;
- (b) Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran;
- (c) Permukiman Perkotaan Kecamatan Doro;
- (d) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen;
- (e) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang;
- (f) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar;
- (g) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap;
- (h) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni;
- (i) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- (j) Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang;
- (k) Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
- (l) Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono;
- (m) Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan;
- (n) Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi;
- (o) Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun;
- (p) Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto;
- (q) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa;
- (r) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan
- (s) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.

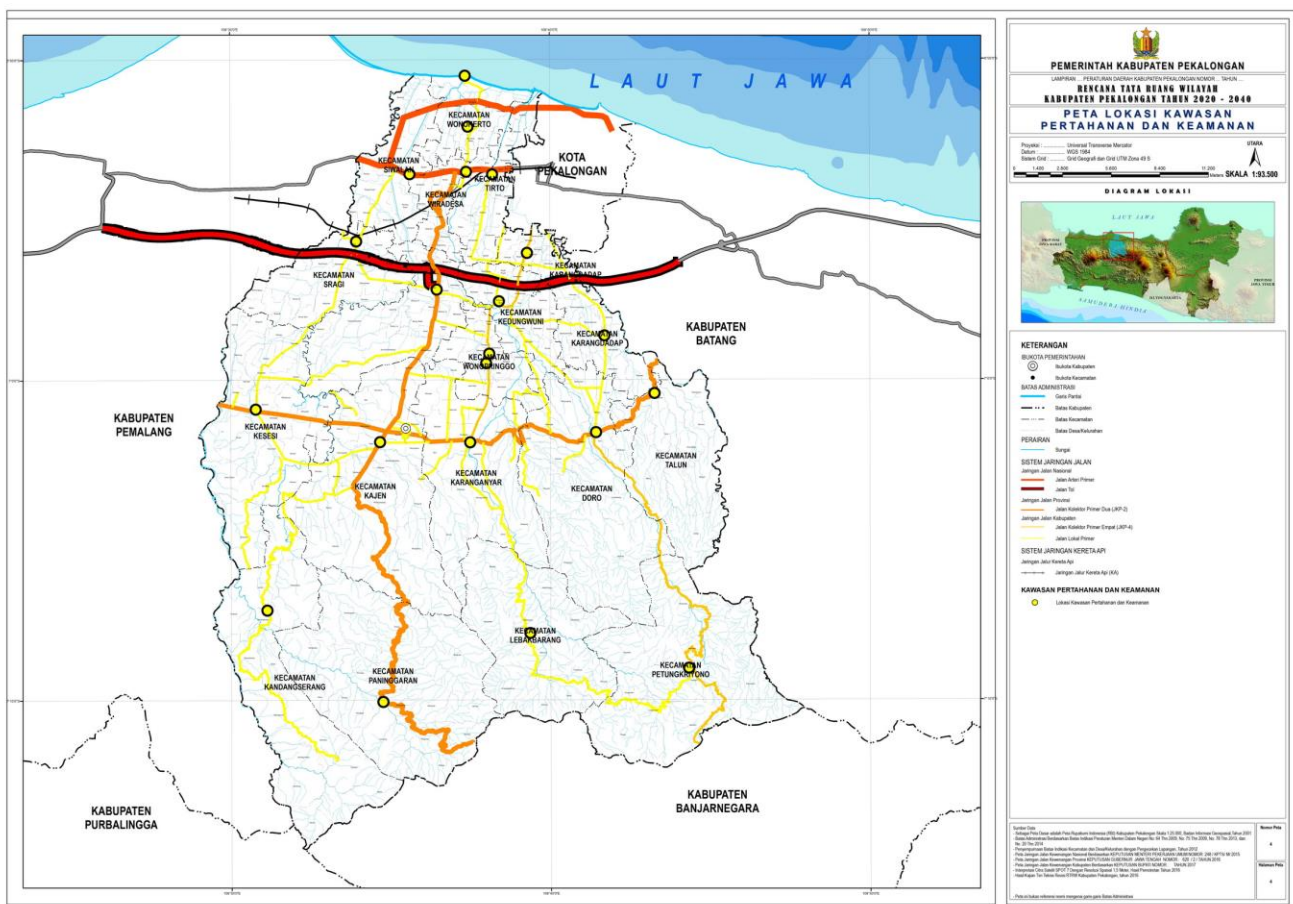
- (2) Kawasan permukiman perdesaan.  
Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.209 hektar berada di seluruh wilayah daerah diluar kawasan permukiman perkotaan

**h) Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan**

Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan dengan luas ± 15 hektar meliputi :

- (1) Kantor militer yang meliputi:
  - (a) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan;
  - (b) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
  - (c) Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.
- (2) Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dilihat pada gambar 2.18.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 2.18**  
**Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan**

**c. Aspek Demografi**

Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada 2030, tak terkecuali Kabupaten Pekalongan. Tentu ini akan berdampak besar bagi berbagai lini kehidupan. Ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan. Bonus demografi adalah meledaknya jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia nonproduktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Jawa Tengah diprediksi akan mengalami hal tersebut, bahkan dari data BPS Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa usia produktif terus bertambah setiap tahunnya.

Menurut data dari BPS, pertumbuhan usia produktif cukup bergerak cepat di beberapa kota/kabupaten. Bahkan, Jawa Tengah sendiri kemungkinan pada 2035 akan



mengalami hal tersebut. Sebab itu pemerintah daerah dan stakeholder segera mengambil langkah strategis. Sehingga ketika ledakan demografi ini terjadi, Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pekalongan sudah siap mengarahkan. Kondisi demikian, tentunya diperlukan langkah antisipasi untuk mengelola dan memanfaatkan momentum bonus demografi di Kabupaten Pekalongan, mengingat bonus demografi tidak hanya membawa peluang sebagai modal pembangunan tetapi juga membawa tantangan bahkan ancaman jika tidak dikelola dengan baik.

Guna mengelola dan memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju, BPS melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan berbagai tantangan di tengah pandemi COVID-19. SP2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi, telah diterapkan beberapa inovasi yang salah satunya digunakan metode kombinasi yang baru pertama kali diimplementasikan dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia. Metode kombinasi adalah penggunaan data administrasi kependudukan (adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

SP2020 mencatat penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 968.821 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sebanyak 130.000an jiwa atau rata-rata sebanyak 13.000 setiap tahun. Selanjutnya jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 seperti dilihat dalam tabel 2.8.

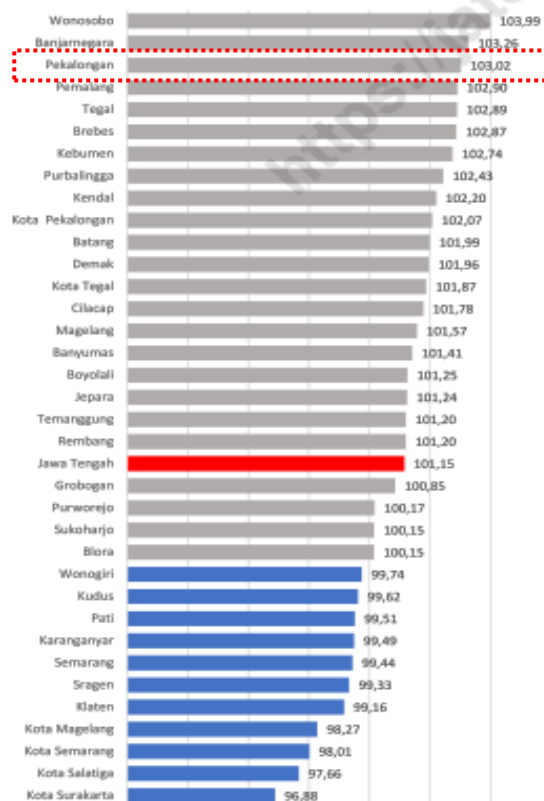
**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan**  
**Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan penduduk
1.	Kandangserang	18.005	17.740	35.745	60,55	590
2.	Paninggaran	21.259	20.578	41.837	92,99	450
3.	Lebakbarang	5.602	5.514	11.116	58,20	191
4.	Petungkriyono	6.706	6.473	13.179	73,58	179
5.	Talun	15.740	14.927	30.667	58,57	524
6.	Doro	23.063	22.144	45.207	68,45	660
7.	Karanganyar	22.903	22.185	45.088	63,48	710
8.	Kajen	36.964	36.103	73.067	75,15	972
9.	Kesesi	36.160	35.548	71.708	68,52	1.047
10.	Sragi	32.816	32.635	65.451	32,40	2.020
11.	Siwalan	20.726	20.721	41.447	25,91	1.600
12.	Bojong	37.970	36.711	74.681	40,06	1.864
13.	Wonopringgo	24.079	23.577	47.656	18,80	2.535
14.	Kedungwuni	51.341	49.455	100.796	22,94	4.394
15.	Karangdadap	21.209	20.046	41.255	20,99	1.965
16.	Buaran	23.956	23.066	47.022	9,54	4.929
17.	Tirto	38.175	36.512	74.687	17,39	4.295
18.	Wiradesa	31.438	30.701	62.139	12,71	4.889
19.	Wonokerto	23.495	22.578	46.073	15,91	2.896
	<b>JUMLAH 2020</b>	<b>491.607</b>	<b>477.214</b>	<b>968.821</b>	<b>836.13</b>	<b>1.159</b>
	2019	445.790	451.921	897.711	836.13	1.074
	2018	443.009	448.883	891.892	836.13	1.067
	2017	441.086	445.111	886.197	836.13	1.060
	2016	437.203	442.889	880.092	836,13	1.053

Sumber : BPS Kab. Pekalongan 2021

Berdasarkan tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebanyak 968.821 jiwa terdiri dari laki-laki 491.607 jiwa (50,74%) dan perempuan 454.733 jiwa (49,26%) dengan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** sebesar 1,53% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,65%. Dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 103,02, jumlah penduduk tahun 2020 lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.159 jiwa/km<sup>2</sup> di tahun 2020. Penyebaran penduduk di Kabupaten Pekalongan untuk masing-masing kecamatan belum merata. Ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya sekitar 200 jiwa/km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/km<sup>2</sup> yakni Kecamatan Kedungwuni, Buaran, Tirto dan Wiradesa.

Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2020



Gambar 2.19

### Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020

## 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2016	2017	2018	2019*	2020**
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.443,49	3.487.876,97	3.638.653,84	3.767.422,28	3.878.724,67
B	Pertambangan & Penggalian	642,61	805.190,25	903.875,42	997.946,51	990.308,79
C	Industri pengolahan	5.705,51	6.119.953,38	6.641.106,17	7.102.497,93	7.010.931,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,66	28.668,94	31.067,82	32.819,31	33.647,77
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	6,98	7.392,55	7.719,01	8.185,04	8.522,81
F	Konstruksi	1.148,00	1.314.975,53	1.488.508,36	1.589.755,34	1.546.617,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.442,29	2.636.675,00	2.856.931,40	3.086.285,19	3.059.501,22
H	Transportasi dan Pergudangan	441,99	481.792,59	506.830,37	556.439,53	450.822,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	946,28	1.020.685,12	1.111.495,08	1.212.678,69	1.197.711,76
J	Informasi dan Komunikasi	342,99	407.503,07	449.099,23	506.397,62	588.205,40
K	Jasa keuangan dan Asuransi	459,32	505.748,44	539.748,73	565.543,16	568.637,08
L	Real Estat	248,04	269.826,45	286.386,08	303.510,41	307.621,10
M,N	Jasa Perusahaan	53,08	59.399,15	67.212,43	76.016,78	76.339,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,93	651.705,32	681.073,38	717.233,71	722.214,45
P	Jasa Pendidikan	1.117,81	1.236.802,46	1.361.804,90	1.520.663,23	1.509.296,68
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,90	269.839,03	295.719,26	320.311,14	363.879,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	369,42	405.19,45	447.080,43	493.357,73	490.208,96
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>18.256,30</b>	<b>19.709.225,70</b>	<b>21.314.311,91</b>	<b>22.857.063,60</b>	<b>22.803.192,93</b>

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 \*) angka sementara \*\*)Angka sangat sementara

Dari tabel 2.9, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 telah bergeser dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke sektor ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranannya terhadap pembentukan PBRD Kabupaten Pekalongan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 22,80 trilyun **lebih rendah (mengalami perlambatan)** akibat pandemi COVID-19 dari Tahun 2019 sebesar Rp 22,86 trilyun dengan sumbangan sektor terbesar dari industri pengolahan sebesar Rp 7,01 trilyun (30,75%), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 3,88 trilyun (17,01%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 3,06 trilyun (13,42%) dan sektor konstruksi sebesar Rp 1,55 trilyun (6,78%).

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.10

**Tabel 2.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Sektor	2016	2017	2018	2019*	2020**
		(Juta Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.307,52	2.308.782,63	2.347.930,82	2.390.852,86	2.415.676,92
B	Pertambangan & Penggalian	424,87	515.228,93	572.036,43	623.600,70	607.289,51
C	Industri pengolahan	4.448,10	4.651.905,35	4.915.972,98	5.150.118,50	4.948.693,19
D	Pengadaan Listrik & Gas	24,53	25.752,73	27.160,19	28.580,06	29.770,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	6,53	6.828,60	7.105,57	7.406,29	7.610,70
F	Konstruksi	874,50	976.784,58	1.059.213,80	1.107.473,11	1.072.809,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.069,47	2.177.767,85	2.309.667,37	2.441.492,14	2.391.408,72
H	Transportasi dan Pergudangan	388,21	412.989,96	430.582,50	464.279,40	365.315,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	736,71	785.629,02	846.571,56	910.006,35	889.405,96
J	Informasi dan Komunikasi	381,95	426.739,37	470.251,82	524.677,12	608.707,47
K	Jasa keuangan dan Asuransi	338,28	357.783,65	371.949,67	384.021,32	389.211,30
L	Real Estat	218,21	231.598,13	240.734,60	250.930,66	252.244,64

No	Sektor	2016	2017	2018	2019*	2020**
		(Juta Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
M,N	Jasa Perusahaan	40,18	43.410,38	47.738,38	52.669,75	51.598,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453,81	464.972,11	480.746,87	499.436,96	493.818,97
P	Jasa Pendidikan	725,69	772.483,11	830.022,50	904.962,74	885.186,15
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,21	199.358,06	216.294,70	231.709,69	260.337,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	297,86	321.114,26	351.071,18	384.133,34	378.427,21
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>13.921,63</b>	<b>14.679.128,72</b>	<b>15.525.050,94</b>	<b>16.356.350,99</b>	<b>16.047.511,77</b>

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 \*) angka sementara \*\*)Angka sangat sementara

Dari tabel 2.10, Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp 16,05 trilyun lebih rendah/mengalami perlambatan dari Tahun 2019 sebesar Rp 16,36 trilyun akibat adanya pandemi COVID-19 dengan sumbangan sektor terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 4,95 trilyun (30,84%), kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 2,42 trilyun (15,05%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 2,39 trilyun (14,90%) dan sektor konstruksi sebesar Rp 1,07 trilyun (6,69%).

Adapun Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel 2.11.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Sektor	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,86	16,58	17,70	15,73	17,07	15,12	16,48	14,62	17,01	15,05
B	Pertambangan & Penggalian	3,52	3,05	4,09	3,51	4,24	3,68	4,37	3,81	4,34	3,78
C	Industri pengolahan	31,25	31,95	31,05	31,69	31,16	31,66	31,07	31,49	30,75	30,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,18	0,15	0,18	0,15	0,17	0,14	0,17	0,15	0,19
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
F	Konstruksi	6,29	6,28	6,67	6,65	6,98	6,82	6,96	6,77	6,78	6,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,38	14,87	13,38	14,84	13,40	14,88	13,50	14,93	13,42	14,90
H	Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,79	2,44	2,81	2,38	2,77	2,43	2,84	1,98	2,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,18	5,29	5,18	5,35	5,21	5,45	5,31	5,56	5,25	5,54
J	Informasi dan Komunikasi	1,88	2,74	2,07	2,91	2,11	3,03	2,22	3,21	2,58	3,79
K	Jasa keuangan dan Asuransi	2,52	2,43	2,57	2,44	2,53	2,40	2,47	2,35	2,49	2,43
L	Real Estat	1,36	1,57	1,37	1,58	1,34	1,55	1,33	1,53	1,35	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,33	0,32	0,33	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,37	3,26	3,31	3,17	3,20	3,10	3,14	3,05	3,17	3,08
P	Jasa Pendidikan	6,12	5,21	6,28	5,26	6,39	5,35	6,65	5,53	6,62	5,52
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,33	1,37	1,36	1,39	1,39	1,40	1,42	1,60	1,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	2,14	2,06	2,19	2,10	2,26	2,16	2,35	2,15	2,36
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 \*) Angka sementara \*\*)Angka sangat sementara

Dari tabel 2.11, perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 30,75%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,01%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,42% dan sektor konstruksi sebesar 6,78%.

Sedangkan perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 30,84%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,052%, sektor perdagangan

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,90% dan sektor konstruksi sebesar 6.69%.

## 2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel 2.12.

**Tabel 2.12**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2020**

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,00	0,05	1,70	1,83	1,04
B	Pertambangan & Penggalian	7,05	21,27	11,03	9,01	-2,62
C	Industri pengolahan	4,31	4,58	5,68	4,76	-3,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,11	4,98	5,47	5,23	4,17
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	2,16	4,65	4,06	4,23	2,76
F	Konstruksi	8,99	11,70	8,44	4,56	-3,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,41	5,23	6,06	5,71	-2,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,00	6,38	4,26	7,83	-21,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	6,64	7,76	7,49	-2,26
J	Informasi dan Komunikasi	8,89	11,73	10,20	11,57	16,02
K	Jasa keuangan dan Asuransi	8,20	5,76	3,96	3,25	1,35
L	Real Estate	7,87	6,13	3,94	4,24	0,52
M.N	Jasa Perusahaan	7,94	8,03	9,97	10,33	-2,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,91	2,46	3,39	3,89	-1,12
P	Jasa Pendidikan	4,03	6,45	7,45	9,03	-2,19
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,33	7,64	8,50	7,13	12,35
R.S.T.U	Jasa lainnya	6,55	7,81	9,33	9,42	-1,49
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,19</b>	<b>5,44</b>	<b>5,76</b>	<b>5,35</b>	<b>-1,89</b>

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.12, Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh sulitnya produksi baik barang maupun jasa di masa pandemi COVID-19. Nilai PDRB Kabupaten Pekalongan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,05 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 16,36 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar **-1,89 persen**, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai **5,35 persen**.

Pertumbuhan ekonomi selama 2020 masih terjaga oleh adanya peningkatan produksi pada sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Real Estate.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 16,02 persen. Salah satu penyebabnya adalah seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, sebagian besar mengalami pertumbuhan yang negatif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yang cukup dalam. Sedangkan tujuh

lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif. Tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga enam belas persen tersebut antara lain: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 16,02 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,35 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,17 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,76 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,35 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,04 persen; dan Real Estate sebesar 0,52 persen.

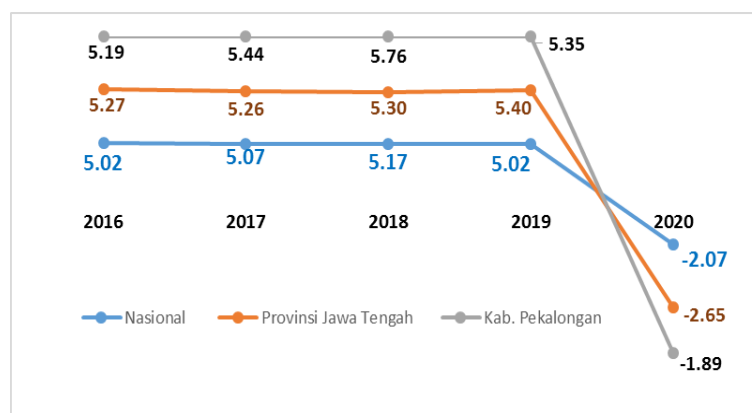
Sedangkan sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi agak dalam adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -1,12 persen; Jasa lainnya sebesar -1,49 persen; Jasa Perusahaan sebesar 2,03 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -2,05 persen; Jasa Pendidikan sebesar -2,19 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -2,26 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar -2,62 persen; Konstruksi sebesar -3,13 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,91 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar -21,32 persen. Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Pekalongan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.13 dan gambar 2.20.

**Tabel 2.13**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07
2	Provinsi Jawa Tengah	5,27	5,26	5,30	5,40	-2,65
3	<b>Kab. Pekalongan</b>	<b>5,19</b>	<b>5,44</b>	<b>5,76</b>	<b>5,35</b>	<b>-1,89</b>

Sumber: BPS Kab. Pekalongan. BPS Prov. Jawa Tengah . 2021



**Gambar 2.20**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.13 dan gambar 2.20, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 mencapai minus 1,89 persen lebih tinggi dari Provinsi

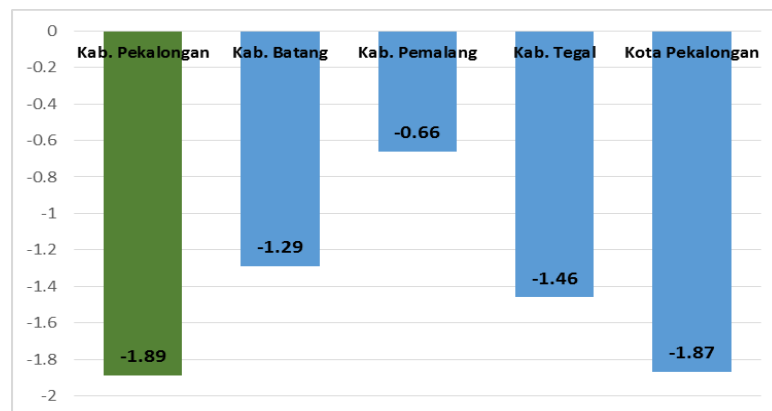
Jawa Tengah sebesar minus 2,65 persen dan nasional sebesar minus 2,07 persen. Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali di Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan.

Kemudian capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.14 dan gambar 2.21.

**Tabel 2.14**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan**  
**dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	5,19	5,44	5,76	5,35	-1,89
2	Kab. Batang	5,03	5,55	5,72	5,39	- 1,29
3	Kab. Pemalang	5,43	5,61	5,70	5,80	- 0,66
4	Kab. Tegal	5,92	5,38	5,51	5,58	- 1,46
5	Kota Pekalongan	5,36	5,32	5,69	5,50	- 1,87

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.21**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan**  
**dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020**

Dapat dilihat dari gambar 2.21 dapat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebesar minus 1,89 persen lebih rendah dari Kabupaten Batang sebesar minus 1,29 persen, Kabupaten Pemalang sebesar minus 0,66 persen, Kabupaten Tegal sebesar minus 1,46 persen dan Kota Pekalongan sebesar minus 1,87 persen. 0

### 3) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.

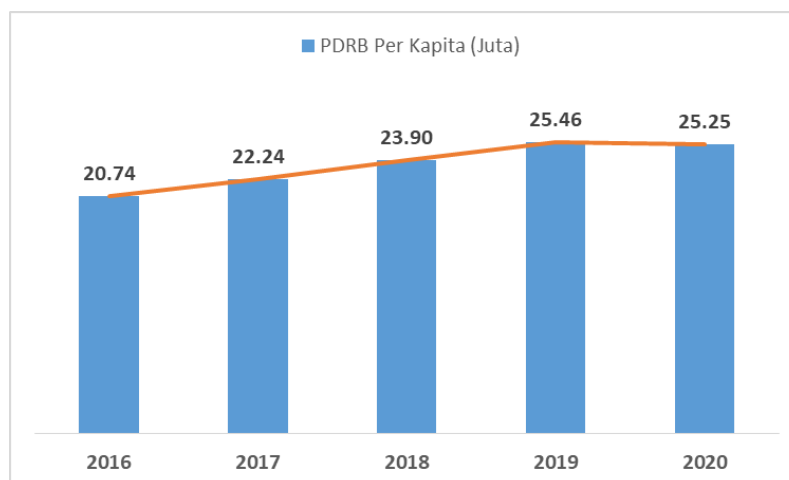
Nilai PDRB per kapita Kabupaten pekalongan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016-2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 20,74 juta rupiah naik menjadi 25,25 juta rupiah di tahun 2020. Kenaikan angka PDRB perkapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian PDRB perkapita menurun dari tahun 2019-2020 karena

adanya pandemi COVID-19. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.15 dan gambar 2.22.

**Tabel 2.15**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

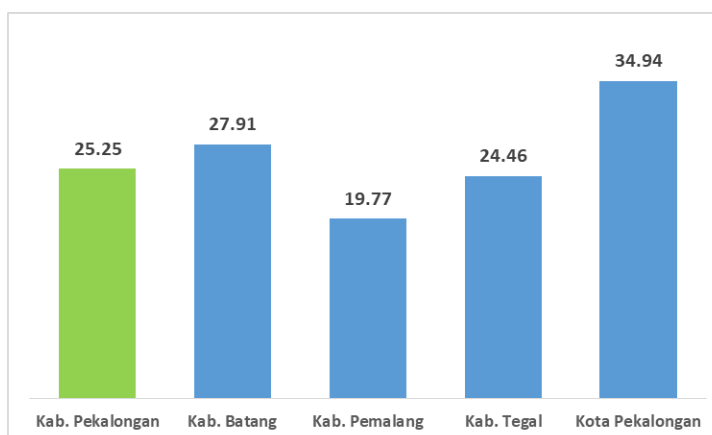
No.	Tahun	PDRB Per Kapita (Juta)
1.	2016	20.743,62
2.	2017	22.240,23
3.	2018	23.897,86
4.	2019	25.461,49
5.	2020	25.249,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2021



**Gambar 2.22**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Sedangkan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.23.



**Gambar 2.23**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan**  
**dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020**

Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan mencapai 25,25 juta rupiah lebih baik dari Kabupaten Pemasang sebesar 19,77 juta rupiah dan Kabupaten Tegal sebesar 24,46 juta rupiah, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang sebesar 27,91 juta rupiah dan Kota Pekalongan sebesar 34,94 juta rupiah.



#### 4) Inflasi

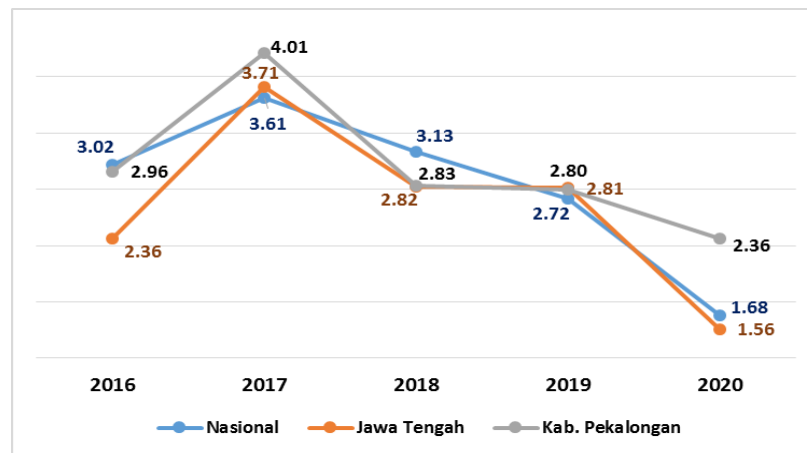
Inflasi Kabupaten Pekalongan tahun 2020 tercatat sebesar 2,36 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019 yang sebesar 2,80 persen. Rekreasi, olahraga dan budaya merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi di tahun 2020. Sementara komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah cabai merah.

Capaian inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.16 dan gambar 2.24.

**Tabel 2.16**  
**Inflasi Kabupaten Pekalongan,**  
**Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68
2.	Jawa Tengah	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56
3.	Kab. Pekalongan	2,96	4,01	2,83	2,80	2,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.24**  
**Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan,**  
**Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.16 dan gambar 2.24, dapat dijelaskan dapat dijelaskan tingginya inflasi di Kabupaten Pekalongan dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disebabkan adanya kenaikan harga komoditas cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan tomat. Sedangkan penurunan harga komoditas bawang merah, emas perhiasan, ikan laut/air tawar, tarif kereta api, dan tariff kendaraan roda 2 online menjadi penahan inflasi di Kabupaten Pekalongan.

#### 5) Indeks Gini

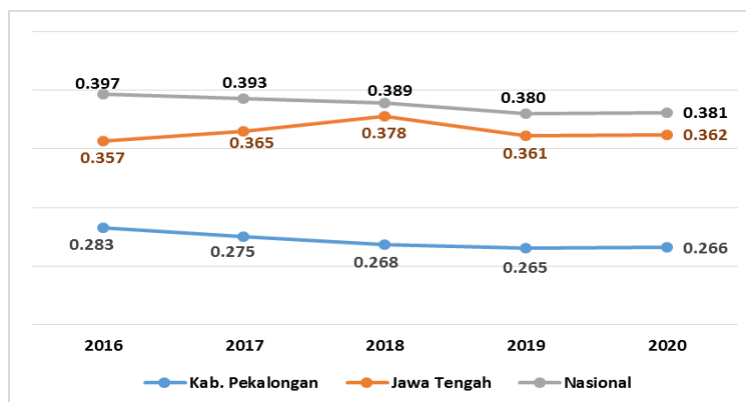
Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi". Kondisi ketimpangan di Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada akhir tahun 2020, indeks gini di Kabupaten Pekalongan mencapai 0,266, sementara di Provinsi Jawa Tengah indeks gini

menyentuh angka 0,362 sementara Nasional di angka 0,381. Selengkapnya perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.17 dan gambar 2.25.

**Tabel 2.17**  
**Indeks Gini Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	0,283	0,275	0,268	0,265	0,266
2.	Jawa Tengah	0,357	0,365	0,378	0,361	0,362
3.	Nasional	0,397	0,393	0,389	0,380	0,381

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021

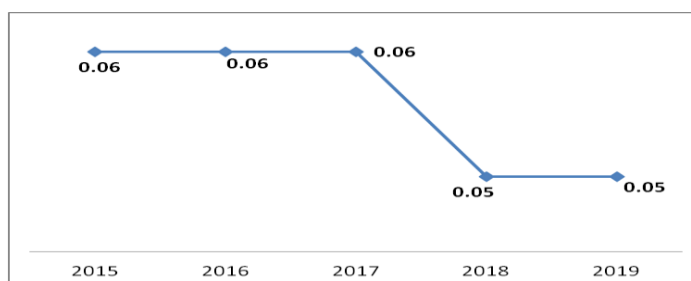


**Gambar 2.25**  
**Indeks Gini Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

#### 6) Indeks Ketimpangan *Williamson*

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks *Williamson*. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kecamatan.

Indeks ketimpangan *Williamson* yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan *Williamson* mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Pekalongan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan *Williamson* mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Pekalongan adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar 2.26.



**Gambar 2.26**  
**Indeks Ketimpangan *Williamson* Kabupaten Pekalongan 2015-2019**

Dari gambar 2.26, nilai ketimpangan *williamson* Tahun 2019 sebesar 0,05 (mendekati 0), maka di Kabupaten Pekalongan terjadi ketimpangan distribusi yang rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang merata. Kondisi ini sama jika dibandingkan dengan indeks pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang sebesar 0,05 artinya pemerataan pembangunan mengalami perbaikan. Indeks *williamson* yang terus mengalami perbaikan juga bisa diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

## 7) Kemiskinan

Definisi umum kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Konsep kemiskinan makro adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*diukur dari sisi pengeluaran*). Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a) Garis Kemiskinan (GK)

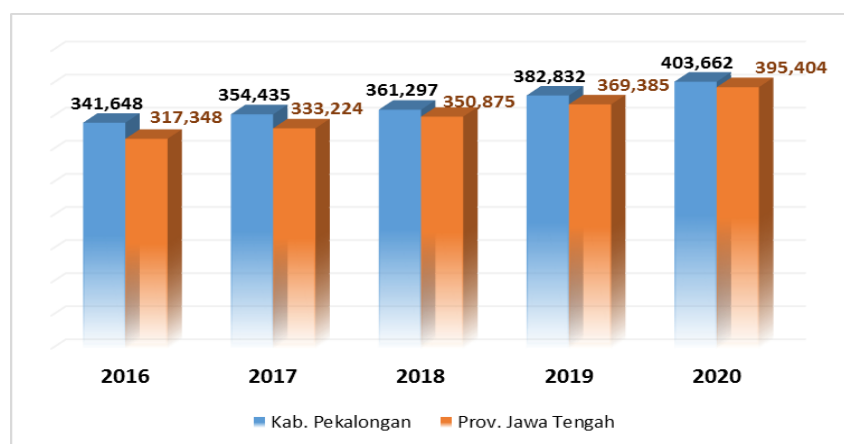
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2016-2020

Adapun Garis Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.18 dan gambar 2.27.

**Tabel 2.18**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	341.648	354.435	361.297	382.832	403.662
2	Prov. Jawa Tengah	317.348	333.224	350.875	369.385	395.407

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



**Gambar 2.27**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

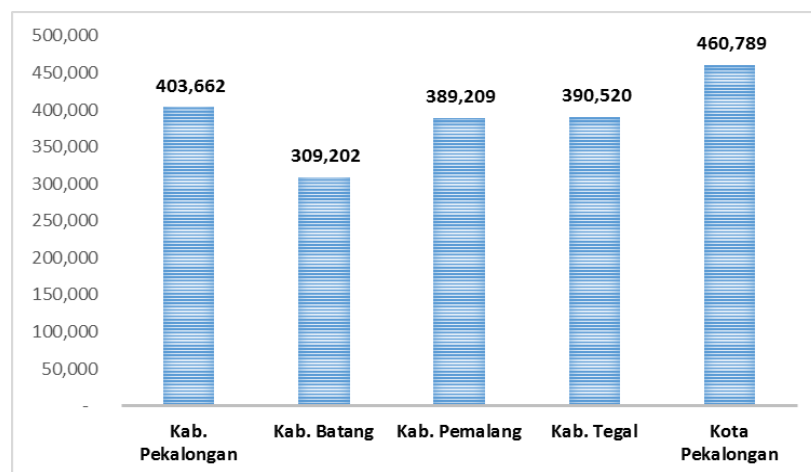
Dari Tabel 2.18 dan gambar 2.27, garis kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 2016-2020 selalu naik setiap tahun. Hal ini terjadi karena *trend* akan kebutuhan setiap saat berubah. Tabel di atas juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 maksimal sebesar Rp. 403.662,00.

Selama periode 2016-2020 rata-rata kenaikan Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar 4,27 persen. Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 lebih besar dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 395.407,00 per kapita hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah seiring dengan semakin berkurangnya tingkat dan jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain, Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kelompok Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tergolong memiliki **Garis Kemiskinan Sedang**. Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.19 dan gambar 2.28.

**Tabel 2.19**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan**  
**dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	341.648	354.435	361.297	382.832	403.662
2	Kab. Batang	240.541	249.292	256.549	286.116	309.202
3	Kab. Pemalang	319.434	331.584	351.183	372.115	389.209
4	Kab. Tegal	308.270	319.758	332.298	365.334	390.520
5	Kota Pekalongan	375.600	390.555	415.172	425.026	460.789

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



**Gambar 2.28**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan,**  
**Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari tabel 2.19 dan gambar 2.28, garis Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 403.662,- lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Pemalang dan Tegal dan lebih rendah dari Kota Pekalongan. Dengan kata lain, dapat diketahui apabila penduduk Kabupaten Pekalongan tinggal di 3 (tiga) kabupaten tersebut diatas tidak termasuk kategori warga miskin.

#### b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

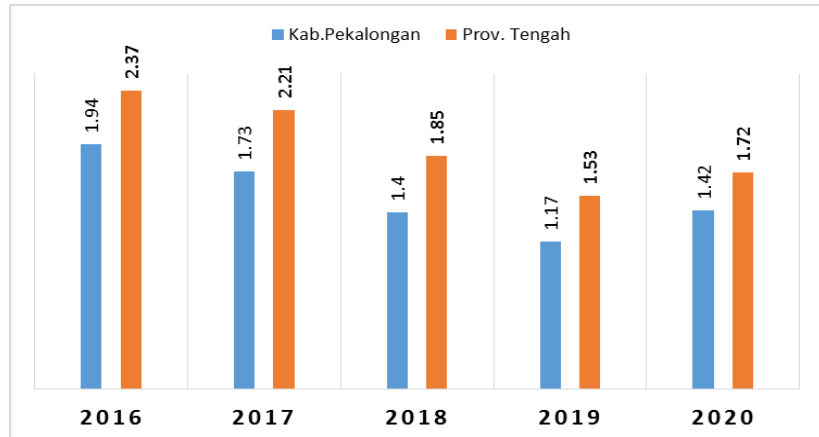
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel 2.20 dan gambar 2.29.

**Tabel 2.20**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**  
**Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab.Pekalongan	1,94	1,73	1,40	1,17	1,42
2	Prov. Tengah	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



**Gambar 2.29**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

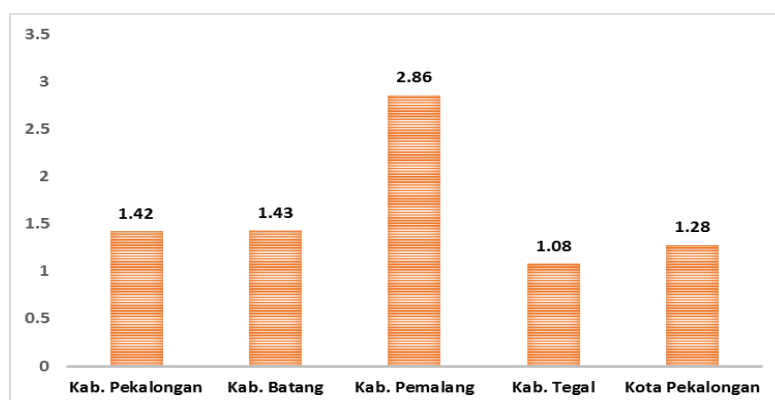
Dari tabel 2.20 dan gambar 2.29, Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan. Angka P1 dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan dari 1,17 menjadi 1,42. Hal ini diakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun garis kemiskinan naik, pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan. Rata-rata capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2016-2020 Kabupaten Pekalongan masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Rendah**.

Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.21 dan gambar 2.30.

**Tabel 2.21**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	1,94	1,73	1,40	1,17	1,42
2	Kab. Batang	1,65	1,51	1,08	0,69	1,43
3	Kab. Pemalang	3,04	3,52	2,96	2,55	2,86
4	Kab. Tegal	1,03	1,27	1,41	0,64	1,08
5	Kota Pekalongan	0,80	0,92	1,01	0,92	1,28

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



**Gambar 2.30**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari gambar 2.30, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan sebesar 1,42 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 1,08 dan Kota Pekalongan sebesar 1,28. Sedangkan capaian P1 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 1,43 dan Kabupaten Pemalang sebesar 2,86. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik disebabkan masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang dan Pemalang.

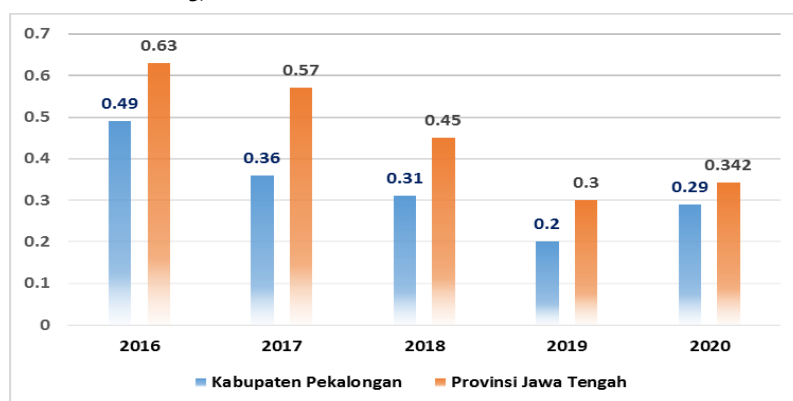
### c) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tak berbeda jauh dengan P1, P2 juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan adanya pandemi COVID-19. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel 2.22 dan gambar 2.31.

**Tabel 2.22**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Pekalongan	0,49	0,36	0,31	0,20	0,29
2	Provinsi Jawa Tengah	0,63	0,57	0,45	0,30	0,342

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.31**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.22 dan gambar 2.31, capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan cenderung menurun dalam 4 tahun terakhir, namun mengalami peningkatan di tahun 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan naik dari 0,20 pada tahun 2019 menjadi 0,29 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan distribusi pengeluaran diantara masyarakat di bawah garis kemiskinan. Ada penurunan pendapatan di antara penduduk miskin dengan adanya pandemi COVID-19. Adanya perubahan tingkat pengeluaran pada masyarakat di bawah garis kemiskinan yang tidak merata sehingga penanganan kepada penduduk miskin harus lebih fokus dan tepat sasaran. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2020 Kabupaten Pekalongan secara umum masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Rendah**.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.23 dan gambar 2.32.

**Tabel 2.23**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	0,49	0,36	0,31	0,20	0,29
2	Kab. Batang	0,39	0,31	0,23	0,08	0,32
3	Kab. Pemalang	0,80	1,00	0,83	0,57	0,68
4	Kab. Tegal	0,21	0,27	0,44	0,09	0,19
5	Kota Pekalongan	0,13	0,20	0,22	0,18	0,30

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.32**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari tabel 2.23 dan gambar 2.32, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,29 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 0,19. Sedangkan capaian P2 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 0,32, Kabupaten Pemalang sebesar 0,68 dan Kota Pekalongan sebesar 0,30. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik disebabkan masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang, Pemalang dan Kota Pekalongan.

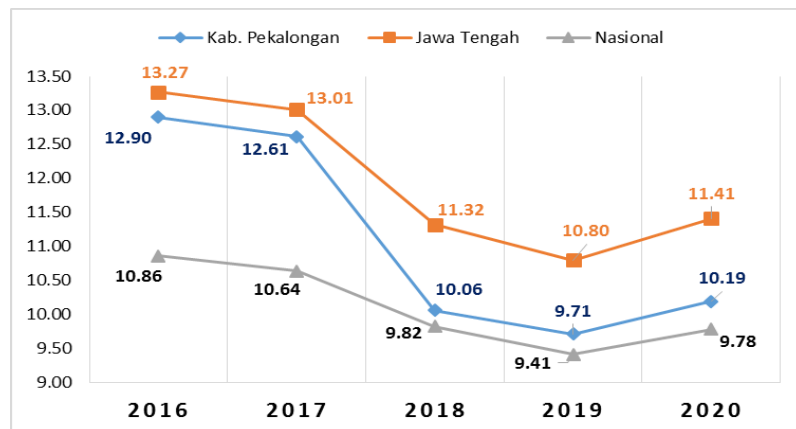
#### d) Persentase Penduduk Miskin

Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.24 dan gambar 2.33.

**Tabel 2.24**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	12,90	12,61	10,06	9,71	10,19
2	Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41
3	Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.33**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.24 dan gambar 2.33, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 9,71 persen naik menjadi 10,19 persen di Tahun 2020, dengan rata-rata capaian di bawah provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional.

Dikabupaten pekalongan terjadi peningkatan persentase kemiskinan di 2020 sebesar 10,19% naik dari 9,71% (2019). Hal dindikasikan akibat pandemi Covid-19. Jika mengikuti tren peningkatan kemiskinan di nasional maka **peningkatan kemiskinan terjadi di perkotaan**, sementara di perdesaan trennya masih menurun.

Adanya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat;
- (2) Disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan juga masih tinggi. Dari hasil survei BPS, masyarakat berpendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan. Begitu pula untuk yang berpendapatan tinggi mengaku hal yang sama. Bukan hanya soal jumlah penduduk miskin yang meningkat, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat;
- (3) Selain pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, terdapat tiga faktor lain yang turut menyumbang kemiskinan. Yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan,



terpuruknya sektor pariwisata, serta harga eceran komoditas pokok yang naik;

Namun demikian, adanya penurunan kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2019 yang mencapai *single digit* perlu mendapatkan apresiasi karena dampak intervensi mendasarkan analisis data Basis Data Terpadu yang merupakan bagian kerja Pemerintah Daerah dan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Salah satu usaha dalam percepatan penurunan angka kemiskinan adalah **Laboratorium Penanganan Kemiskinan**. Terhitung selama 2,5 tahun, Laboratorium Kemiskinan, sebuah program pengentasan kemiskinan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mampu mengentaskan 70 persen penduduk sasaran. Prinsip kerja program ini adalah melakukan pemotretan, pendataan, dan penanganan penduduk miskin, seperti masyarakat miskin di perkotaan, buruh dan nelayan di pesisir pantai, dan para petani atau peladang di hutan.

Selanjutnya persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.25 dan gambar 2.34 dan 2.35.

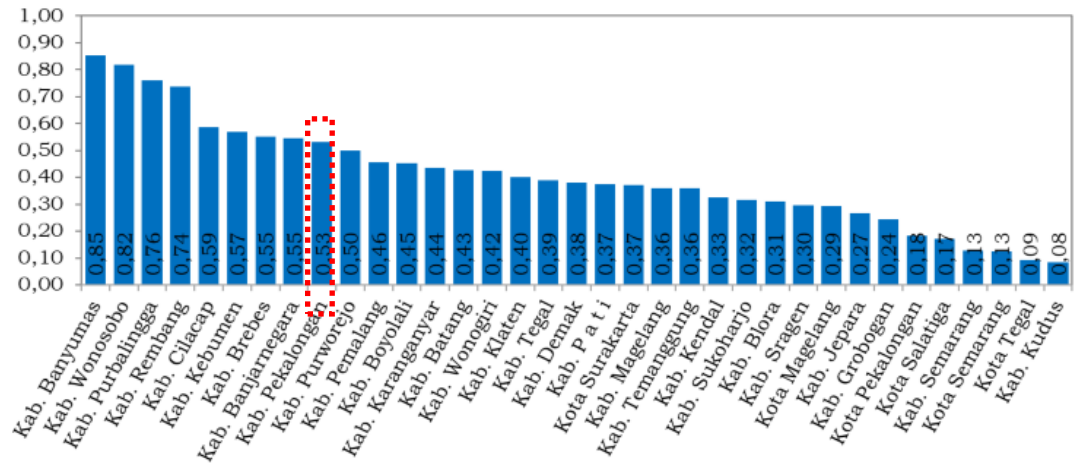
**Tabel 2.25**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	12,90	12,61	10,06	9,71	10,19
2	Kab. Batang	11,04	10,80	8,69	8,35	9,13
3	Kab. Pemalang	17,58	17,37	16,04	15,41	16,02
4	Kab. Tegal	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14
5	Kota Pekalongan	7,92	7,47	6,75	6,60	7,17

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.34**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**



**Gambar 2.35**  
**Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Dari gambar 2.34 dan 2.35, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 10,19 persen hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang sebesar 16,02 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 9,13 persen, Kabupaten Tegal sebesar 8,14 persen dan Kota Pekalongan sebesar 7,17 persen. Namun demikian Kabupaten Pekalongan berhasil menurunkan angka kemiskinan rata-rata sebesar 0,53 persen, paling besar di bandingkan dengan kabupaten/kota sekitar selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan **masih perlu percepatan dan inovasi kegiatan** dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan seiring dengan masih adanya pandemi COVID-19.

#### e) Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir dari 113.310 jiwa di Tahun 2016 menjadi 87.010 jiwa di Tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 91.860 jiwa di tahun 2020 seiring adanya pandemi COVID-19. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.26 dan gambar 2.36.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	113.310	111.580	89.540	87.010	91.860
2	Kab. Batang	82.600	81.500	66.100	64.070	70.570
3	Kab. Pemalang	227.100	225.000	208.300	200.670	209.030
4	Kab. Tegal	144.200	141.800	114.100	109.940	117.500
5	Kota Pekalongan	23.600	22.500	20.500	20.210	22.160
6.	Prov. Jawa Tengah	4.506.890	4.450.720	3.897.200	3.743.230	3.980.900

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.36**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari tabel 2.27 dan gambar 2.36, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 91.860 jiwa lebih rendah dari Kabupaten Pemasang sebesar 209.030 jiwa dan Kabupaten Tegal sebesar 117.500 jiwa dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 70.570 jiwa dan Kota Pekalongan sebesar 22.160 jiwa.

#### 8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

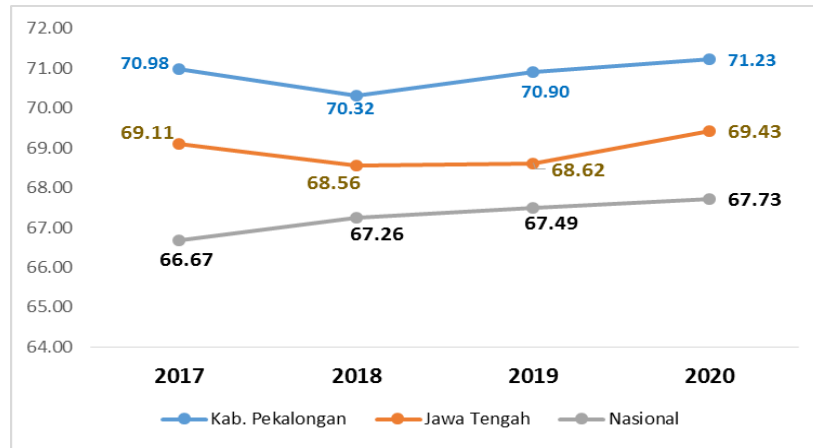
Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi; semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.27 dan gambar 2.37.

**Tabel 2.27**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	64,80	70,98	70,32	70,90	71,23
2.	Jawa Tengah	67,15	69,11	68,56	68,62	69,43
3.	Nasional	66,34	66,67	67,26	67,49	67,73

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.37**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

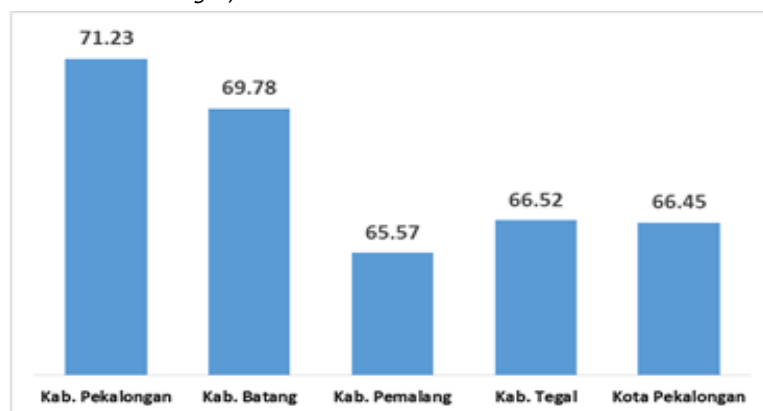
Berdasarkan tabel 2.27 dan gambar 2.37, TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 71,23 persen naik dibandingkan dengan TPAK 2019 sebesar 70,90 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa sehingga berpengaruh kepada nilai TPT. Namun demikian analisis TPAK ini tanpa dibarengi dengan variabel lainnya belum dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.28 dan gambar 2.38.

**Tabel 2.28**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	64,80	70,98	70,32	70,90	71,23
2	Kab. Batang	-	67,70	70,05	68,53	69,78
3	Kab. Pemalang	-	65,57	65,01	66,14	65,57
4	Kab. Tegal	-	66,41	65,26	66,24	66,52
5	Kota Pekalongan	-	69,28	70,21	72,32	66,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.38**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari tabel 2.28 dan gambar 2.38, TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 71,23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 69,78 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 65,57 persen, Kabupaten Tegal sebesar 66,52 persen dan Kota Pekalongan sebesar 66,45 persen.

### 9) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

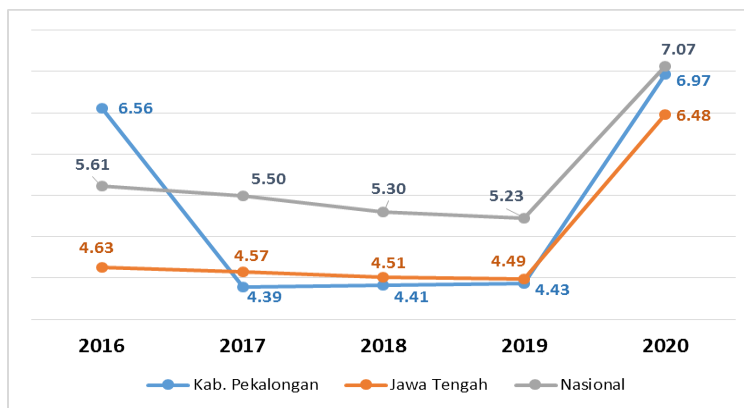
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.29 dan gambar 2.39.

**Tabel 2.29**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan,**  
**Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

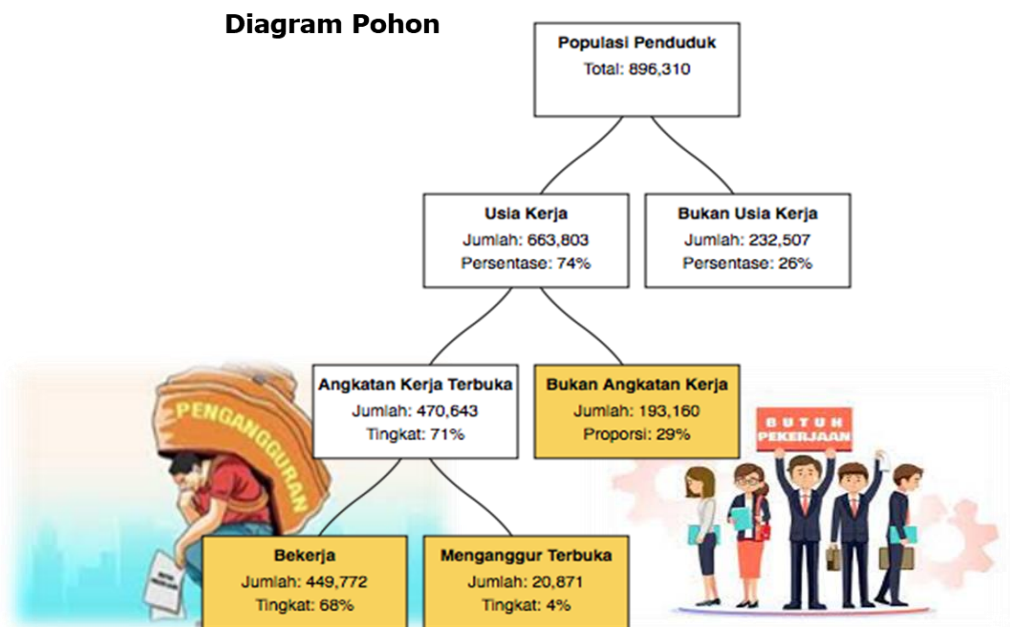
No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	6,56	4,39	4,41	4,43	6,97
2.	Jawa Tengah	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48
3.	Nasional	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



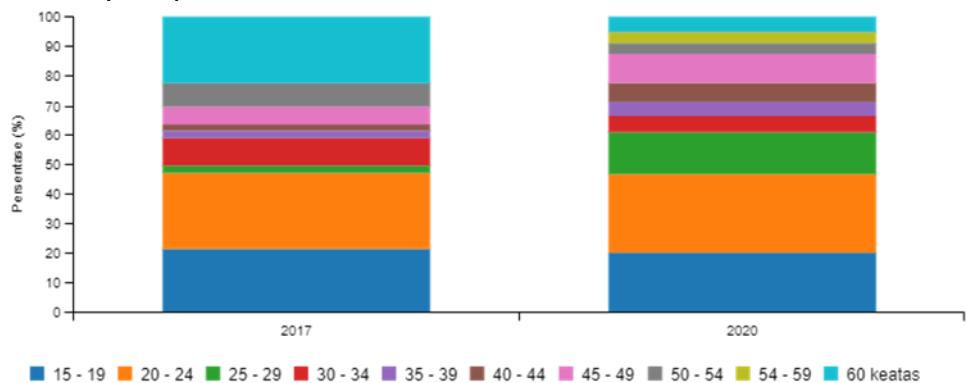
**Gambar 2.39**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan,**  
**dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Perkembangan TPT di Kabupaten Pekalongan selama periode 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2017 sebesar 4,39 persen naik tajam menjadi 6,97 persen di Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Kemudian dilihat dari capaian nilai TPT Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 menggambarkan adanya dampak pengangguran dari lokasi, bahwa peningkatan pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibandingkan desa. Pandemi ini dampaknya jauh tajam untuk di kota.

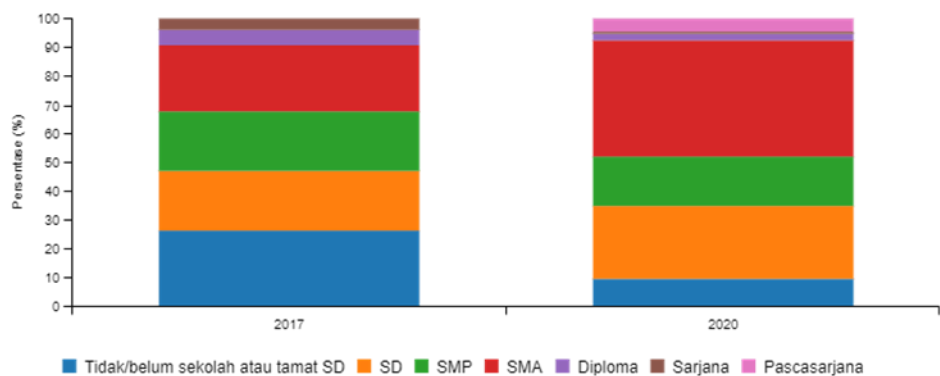


**Gambar 2.40**  
**Diagram Pohon Isu Pengangguran Kabupaten Pekalongan tahun 2019**

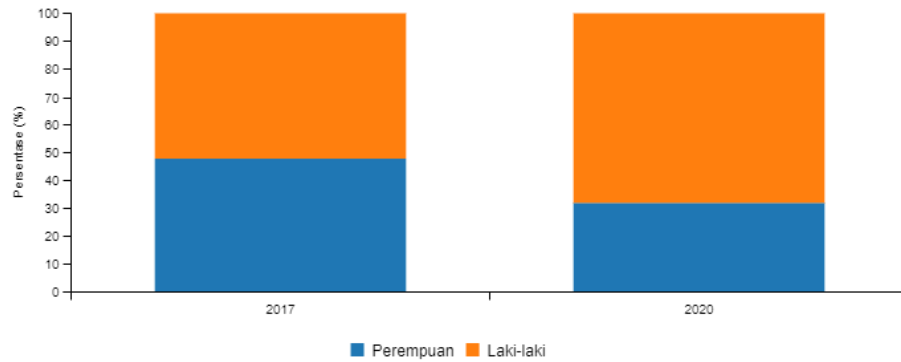
Pengangguran terbuka 2019 sebesar 4,43%, dan meningkat menjadi 6,97% di 2020. Salah satunya akibat Pandemi Covid-19, Dengan tingkat kemiskinan 10,19 %, diasumsikan terdapat 3% orang bekerja tetapi tetap saja miskin. Hal ini mengindikasikan: selain ada **persoalan pengangguran**, ada juga **persoalan rendahnya produktivitas kerja dan pendapatan penduduk**. Untuk mengetahui siapa pengangguran pada usia berapa dan pendidikannya dapat dilihat dari data bawah ini.



**Gambar 2.41**  
**Rata-rata Usia Penduduk Menganggur (2017-2020)**



**Gambar 2.42**  
**Klasifikasi Ketrampilan Penduduk Menganggur (2017-2020)**



**Gambar 2.43**  
**Jenis Kelamin Penduduk Menganggur**  
**(2017-2020)**

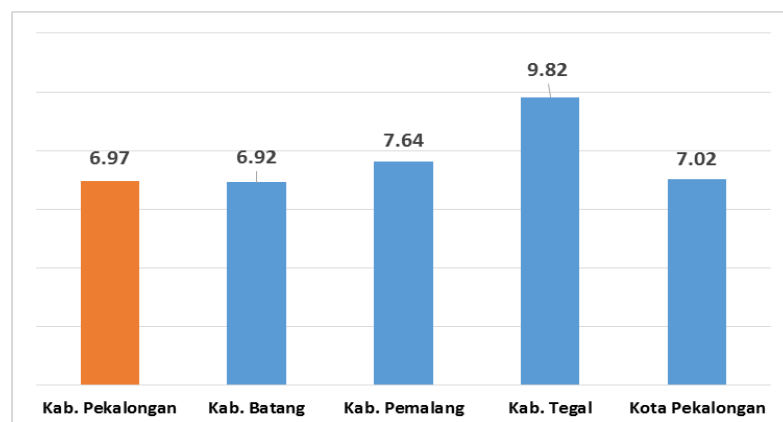
**Profil Pengangguran:** Penduduk menganggur usia muda (15-29 tahun) sebesar 80,93%; 68% adalah laki-laki dan 40% berpendidikan SMA.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.30 dan gambar 2.44.

**Tabel 2.30**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pekalongan**  
**dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	6,56	4,39	4,41	4,43	6,97
2	Kab. Batang	-	5,82	4,23	4,16	6,92
3	Kab. Pemasang	-	5,59	6,21	6,50	7,64
4	Kab. Tegal	-	7,33	8,45	8,21	9,82
5	Kota Pekalongan	-	5,05	6,13	5,77	7,02

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.44**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan**  
**Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari tabel 2.30 dan gambar 2.44, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 6,97 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 6,92 persen dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemasang sebesar 7,64 persen, Kabupaten Tegal sebesar 9,82 persen dan Kota Pekalongan sebesar 7,02 persen.

## b. Fokus Kesejahteraan Sosial

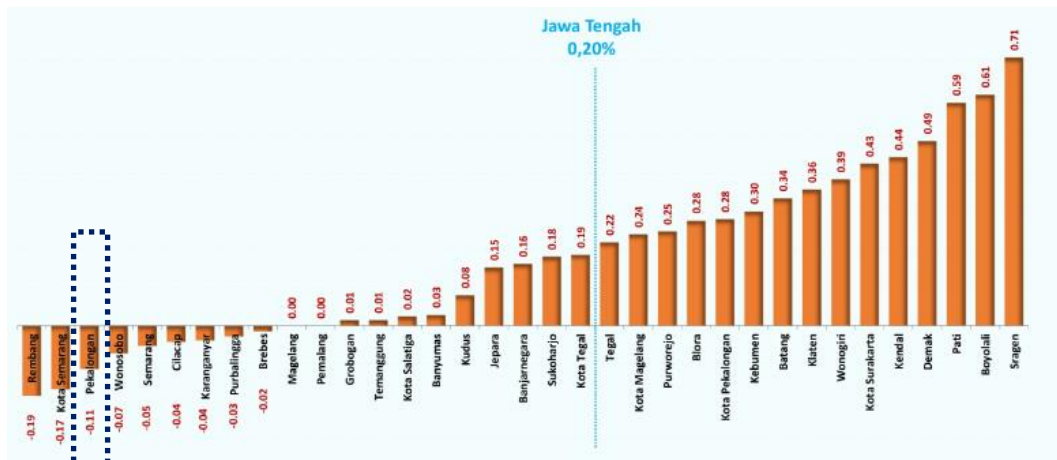
### 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Manfaat

IPM antara lain : (1)**UKURAN KEBERHASILAN**; IPM merupakan indikator penting untuk *mengukur keberhasilan* dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); (2)**TARGET PEMBANGUNAN**; IPM merupakan salah satu indikator *target pembangunan* pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI (Rancangan RKP dan RAPBN); (3)**DANA ALOKASI UMUM**; IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan *Dana Alokasi Umum (DAU)*; (4)**DANA INSENTIF DAERAH**; Komponen IPM (HLS, RLS dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan *Dana Insentif Daerah (DID)*.

IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. KEMAJUAN pembangunan manusia dapat dilihat dari (1)KECEPATAN IPM; kecepatan IPM menggambarkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode dan (2)STATUS IPM; status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

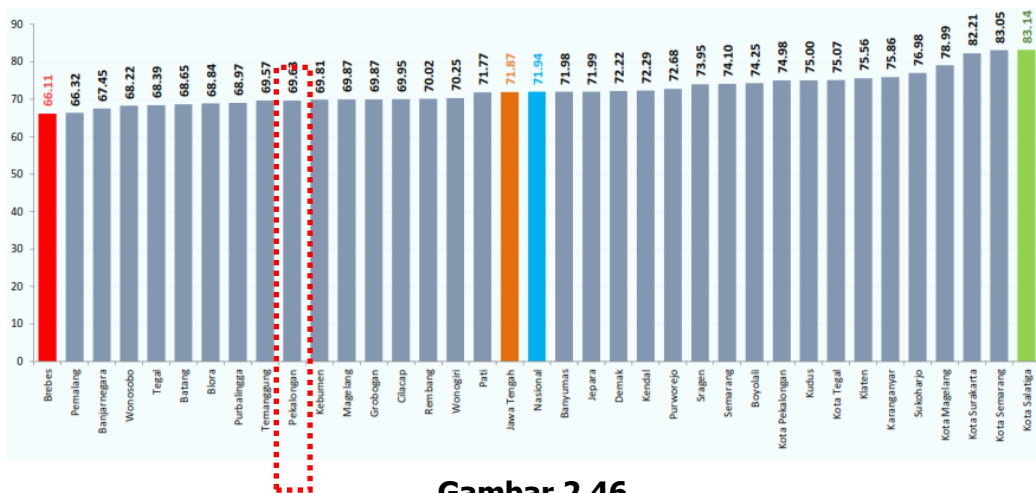
Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat walaupun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020. IPM Kabupaten Pekalongan meningkat dari 68,97 pada tahun 2018 menjadi 69,63 pada tahun 2020. Dari kecepatan IPM Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019-2020, Kabupaten Pekalongan (-0,11%) termasuk **3 besar** Kabupaten/kota yang mengalami penurunan paling tinggi bersama-sama Kabupaten Rembang (-0,19%) dan Kota Semarang (-0,17%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.45.



**Gambar 2.45**  
**Pertumbuhan IPM kabupaten/kota se Jawa Tengah Tahun 2020**

Meskipun selama periode 2016-2020 IPM Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih berstatus "sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )", dan masih sama sejak tahun 2014. Secara umum capaian IPM Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selisih antara IPM tertinggi dan terendah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 17,03 poin, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang besarnya 17,07 poin. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 2.46.





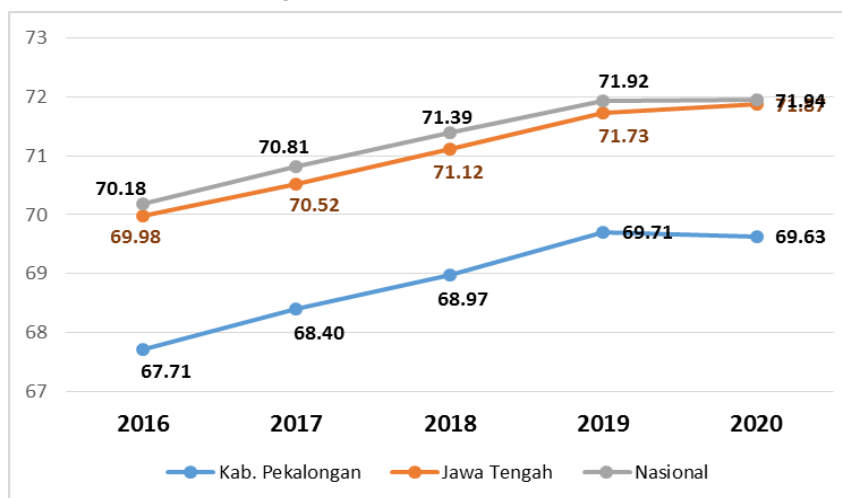
**Gambar 2.46**  
**IPM kabupaten/kota se-Jawa Tengah Tahun 2020**

Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.31 dan gambar 2.47.

**Tabel 2.31**  
**Perbandingan IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	67,71	68,40	68,97	69,71	69,63
2.	Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87
3.	Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.47**  
**IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

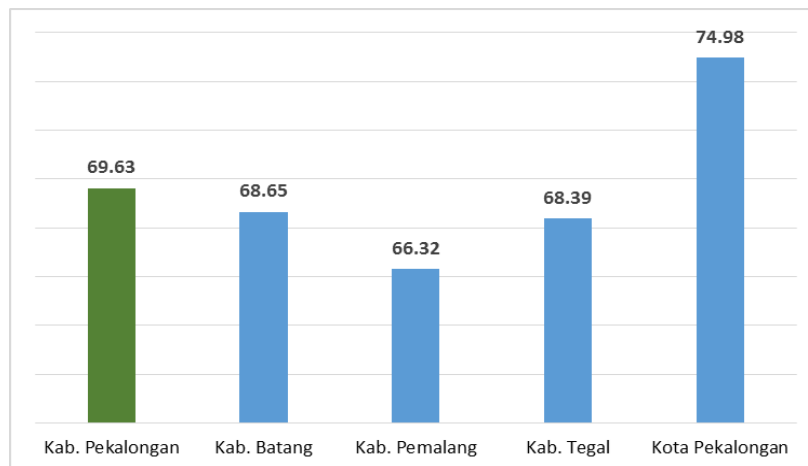
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.32 dan gambar 2.44.

**Tabel 2.32**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	67,71	68,40	68,97	69,71	69,63
2	Kab. Batang	66,38	67,35	67,86	68,42	68,65
3	Kab. Pemalang	64,17	65,04	65,67	66,32	66,32

4	Kab. Tegal	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
5	Kota Pekalongan	73,32	73,77	74,24	74,77	74,98

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.48**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Dari gambar tabel 2.32 dan gambar 2.48, IPM Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 69,63% lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 68,65%, Kabupaten Pemasang sebesar 66,32% dan Kabupaten Tegal sebesar 68,39% dan lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pekalongan sebesar 74,98%. Salah satu penyebab IPM kabupaten Pekalongan cukup tinggi diantaranya adanya **Gerakan KUDU Sekolah** (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah) sebagai salah satu upaya terobosan untuk memperkuat indeks pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan IPM Kabupaten Pekalongan.

Adapun komponen pembentuk IPM secara lengkap yang meliputi meliputi Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH); pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita dapat dijabarkan dalam tabel 2.33.

**Tabel 2.33**

**Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	UHH (th)	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu Rp)	IPM
2016	73,41	12,15	6,56	9.300	67,71
2017	73,46	12,16	6,73	9.702	68,40
2018	73,53	12,17	6,74	10.221	68,97
2019	73,57	12,40	6,88	10.508	69,71
2020	73,69	12,41	6,91	10.312	69,63

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021

**a) Usia Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir**

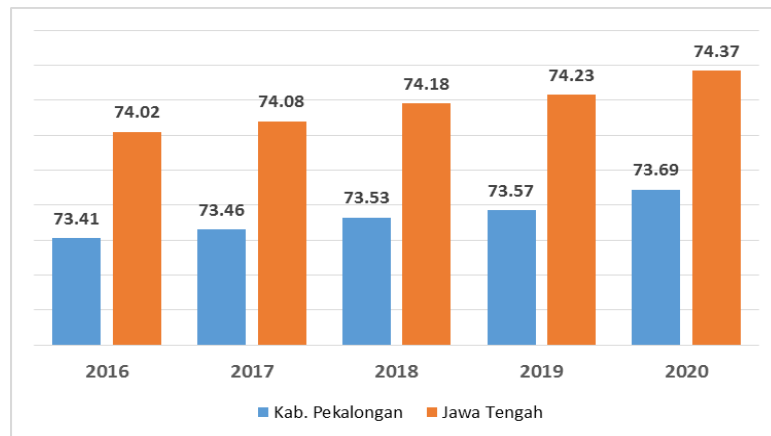
UHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang.

Perkembangan UHH Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.34 dan gambar 2.49.

**Tabel 2.34**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (tahun)	73,41	73,46	73,53	73,57	73,69
2.	Jawa Tengah (tahun)	74,02	74,08	74,18	74,23	74,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.49**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Berdasarkan tabel 2.34 dan gambar 2.49, dapat dijelaskan bahwa Usia Harapan hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,57 tahun di tahun 2019 menjadi sebesar 73.69 tahun di Tahun 2020. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,37 tahun. Pertumbuhan ekonomi pada sub kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2020 sebesar 12,35% ikut andil mendorong tumbuhnya komponen AHH disamping program kesehatan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.35 dan gambar 2.50.

**Tabel 2.35**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	73,41	73,46	73,53	73,57	73,69
2	Kab. Batang	74,46	74,50	74,56	74,59	74,69
3	Kab. Pemasang	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40
4	Kab. Tegal	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
5	Kota Pekalongan	74,15	74,19	74,25	74,28	74,38

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.50**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020**

Dari gambar 2.50, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 73,69 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pemalang sebesar 73,40 tahun dan Kabupaten Tegal sebesar 71,60 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 74,69 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 74,38 tahun.

**b) Harapan Lama Sekolah (HLS)**

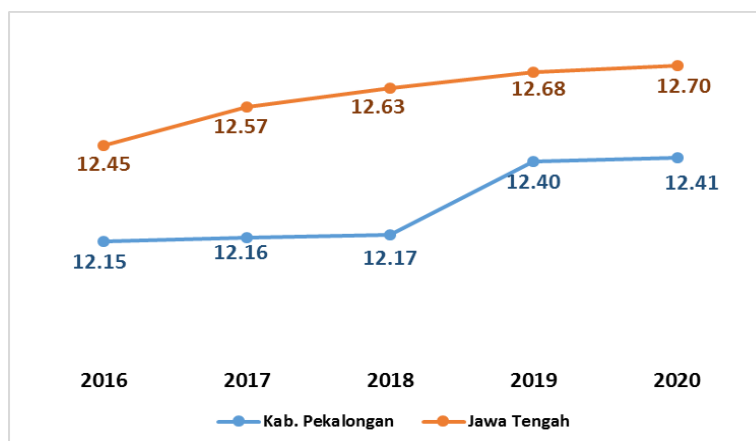
HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan HLS Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.36 dan gambar 2.51.

**Tabel 2.36**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (tahun)	12,15	12,16	12,17	12,40	12,41
2.	Jawa Tengah (tahun)	12,45	12,57	12,63	12,68	12,70

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.51**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Berdasarkan tabel 2.36 dan gambar 2.51, dapat dijelaskan bahwa HLS di Kabupaten Pekalongan meningkat sebesar 12,40 tahun di Tahun 2019 menjadi 12,41 tahun di Tahun 2020. Namun demikian rata-rata capaian HLS Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,70.

Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.37 dan gambar 2.52.

**Tabel 2.37**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	12,15	12,16	12,17	12,40	12,41
2	Kab. Batang	11,51	11,87	11,88	12,00	12,01
3	Kab. Pemasang	11,87	11,88	11,95	11,94	11,95
4	Kab. Tegal	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
5	Kota Pekalongan	12,77	12,78	12,79	12,83	12,84

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.52**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020**

Dari gambar 2.52, HLS Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 12,41 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 12,01 tahun dan Kabupaten Pemasang sebesar 11,95 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tegal sebesar 12,67 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 12,84 tahun.

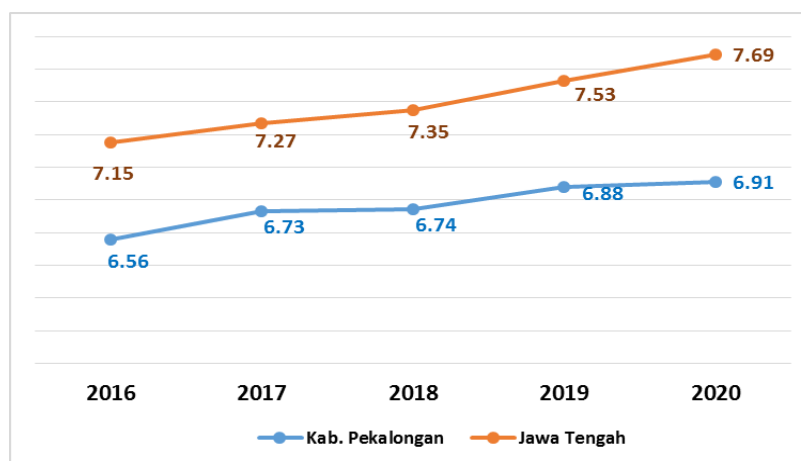
### c) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.38 dan gambar 2.53.

**Tabel 2.38**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (tahun)	6,56	6,73	6,74	6,88	6,91
2.	Jawa Tengah (tahun)	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.53**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

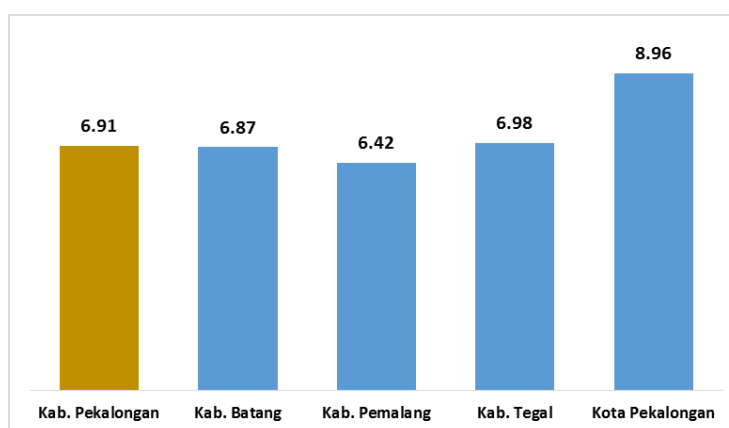
Berdasarkan tabel 2.38 dan gambar 2.53, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pekalongan meningkat dari 6,88 tahun di Tahun 2019 menjadi 6,91 tahun di Tahun 2020. Namun demikian rata-rata capaian RLS Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,69 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.39 dan gambar 2.54.

**Tabel 2.39**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	6,56	6,73	6,74	6,88	6,91
2	Kab. Batang	6,42	6,61	6,62	6,63	6,87
3	Kab. Pemasang	6,05	6,31	6,32	6,41	6,42
4	Kab. Tegal	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
5	Kota Pekalongan	8,29	8,56	8,57	8,71	8,96

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.54**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020**

Dari gambar 2.54, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 6,91 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 6,87 tahun, dan Kabupaten Pemasang sebesar

6,42 tahun dan lebih rendah dengan Kabupaten Tegal sebesar 6,98 tahun serta Kota Pekalongan sebesar 8,96 tahun.

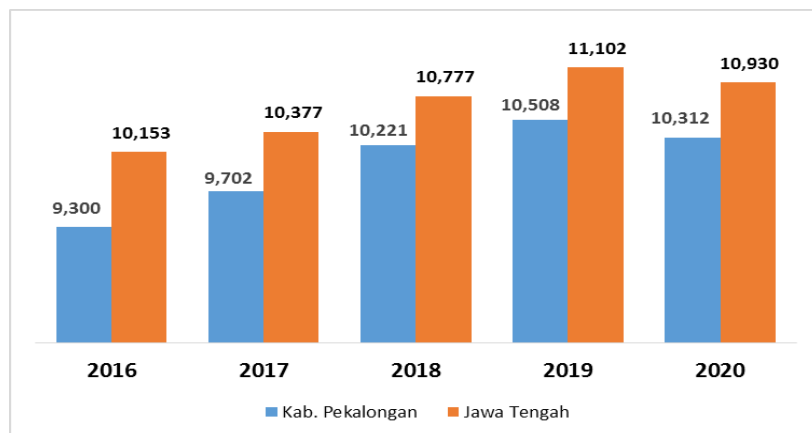
#### d) Pengeluaran per kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Pekalongan menurun dari Rp. 10.508.000,- di tahun 2019 menjadi Rp.10.312.000.00 di tahun 2020. Capaian Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dari 2016-2020 secara umum di bawah pencapaian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, namun peningkatan daya beli rumah tangga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan pengeluaran perkapita (d disesuaikan) Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.40 dan gambar 2.55.

**Tabel 2.40**  
**Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

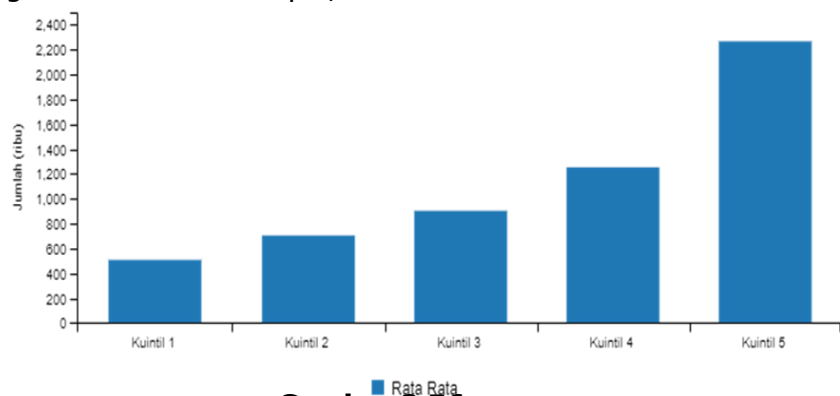
No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (ribu Rp/org/th)	9.300	9.702	10.221	10.508	10.312
2.	Jawa Tengah (Ribu Rp/org/th)	10.153	10.377	10.777	11.102	10.930

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



**Gambar 2.55**  
**Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Selain kemiskinan, isu ketimpangan juga masih menjadi persoalan yang serius dan juga berpotensi meningkat di kabupaten pekalongan berikut hasil data analisa rata – rata pengeluaran penduduk dapat dilihat pada gambar dibawah ini dimana Penduduk kuintil 1 berpenghasilan rerata hanya Rp 508 rb, sedangkan kuintil 5 rerata Rp 2,265 Juta



**Gambar 2.56**  
**Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.41 dan gambar 2.57.

**Tabel 2.41**  
**Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan**  
**Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	9.300	9.702	10.221	10.508	10.312
2	Kab. Batang	8.568	8.805	9.203	9.573	9.431
3	Kab. Pemalang	7.447	7.785	8.186	8.546	8.461
4	Kab. Tegal	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612
5	Kota Pekalongan	11.721	11.800	12.312	12.680	12.467

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2016-2020



**Gambar 2.57**  
**Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan**  
**Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020**

Dari gambar 2.57, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp.10.312.000,- lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar Rp.9.431.000,-, Kabupaten Batang sebesar Rp. 9.431.000,-, Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 8.461.000,- dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tegal sebesar Rp.9.612.000,- dan Kota Pekalongan sebesar Rp.12.467.000,-.

## 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Upaya mewujudkan kesetaraan gender di segala bidang pembangunan, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh bidang pembangunan. Terkait pelaksanaan PUG, tolok ukur untuk melihat keberhasilan peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

### a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG).



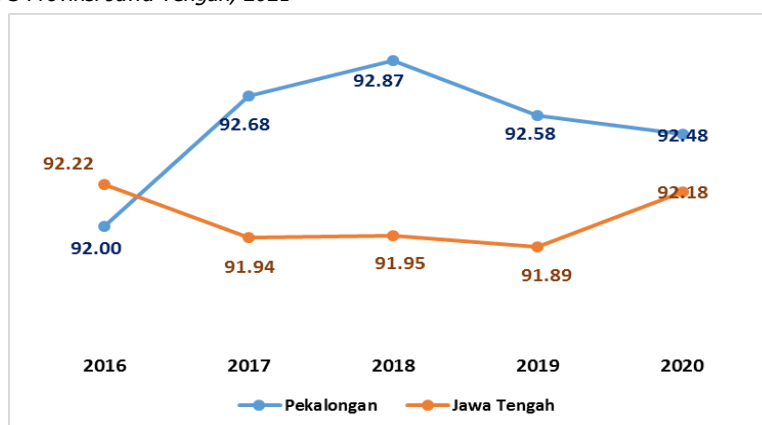
yang didukung peningkatan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

Perbandingan IPG Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.42 dan gambar 2.58.

**Tabel 2.42**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	92,00	92,68	92,87	92,58	92,48
2	Jawa Tengah	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



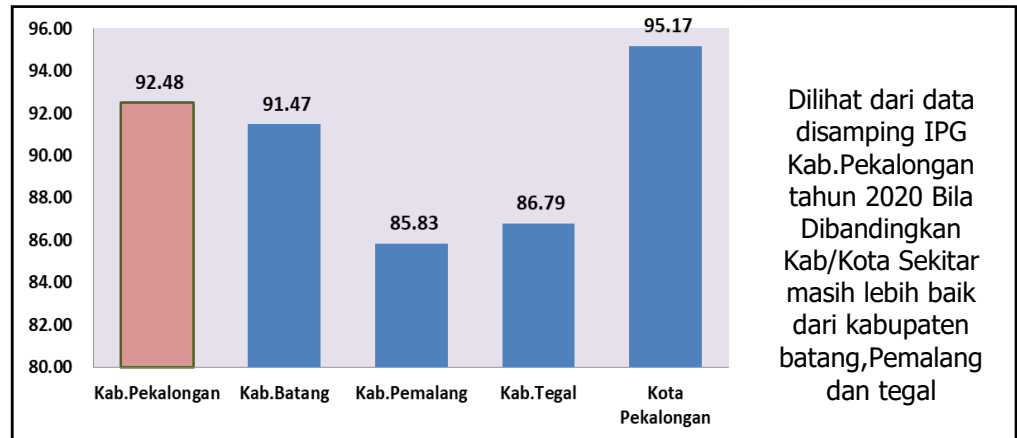
**Gambar 2.58**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Berdasarkan tabel 2.42 dan gambar 2.58, capaian IPG Kabupaten Pekalongan capaian rata-rata di atas Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.43**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	91,84	92,68	92,87	92,58	92,48
2	Kab. Batang	90,99	90,49	90,65	91,08	91,47
3	Kab. Pemasang	84,46	85,47	85,49	85,81	85,83
4	Kab. Tegal	87,03	87,52	86,95	86,74	86,79
5	Kota Pekalongan	94,71	94,43	94,59	94,92	95,17

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.59**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

Adapun faktor-faktor pembentuk IPG di Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

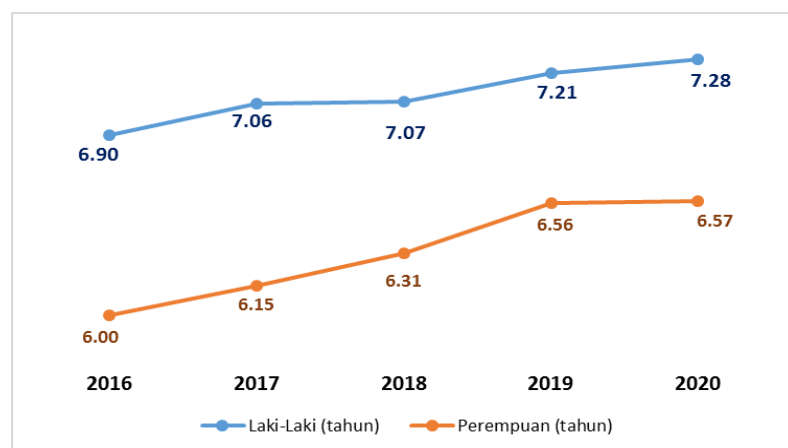
**1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin**

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin, dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki selama kurun waktu tahun 2016-2020 lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020 RLS penduduk laki-laki sebesar 7,28 tahun sedangkan perempuan sebesar 6,57 tahun. Tentunya perlu ada peningkatan partisipasi pendidikan penduduk perempuan agar tercipta kesetaraan lama sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.44 dan gambar 2.60.

**Tabel 2.44**  
**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (tahun)	6,90	7,06	7,07	7,21	7,28
2	Perempuan (tahun)	6,00	6,15	6,31	6,56	6,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.60**  
**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

Dari tabel 2.44 dan gambar 2.60, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih

melekatnya budaya patriarki (menempatkan kedudukan/hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) termasuk hak mendapatkan pendidikan formal, serta masih dijumpainya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan.

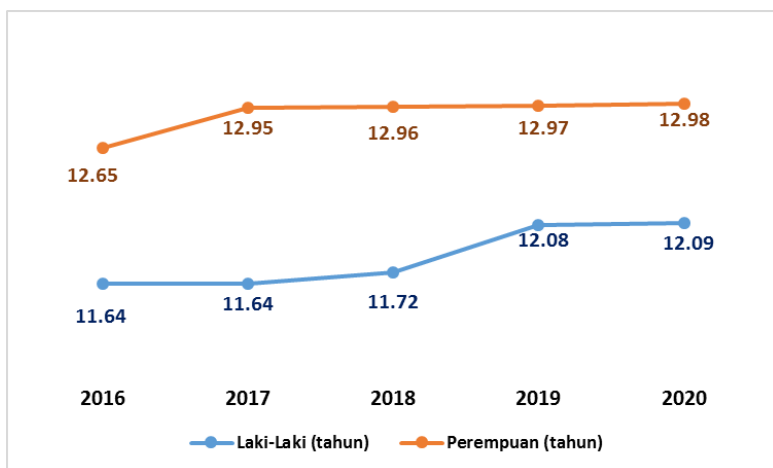
## 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin

Kondisi Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 untuk penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020 HLS perempuan sebesar 12,98 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 12,09 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.45 dan gambar 2.61.

**Tabel 2.45**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin**  
**Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (tahun)	11,64	11,64	11,72	12,08	12,09
2	Perempuan (tahun)	12,65	12,95	12,96	12,97	12,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.61**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin**  
**Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

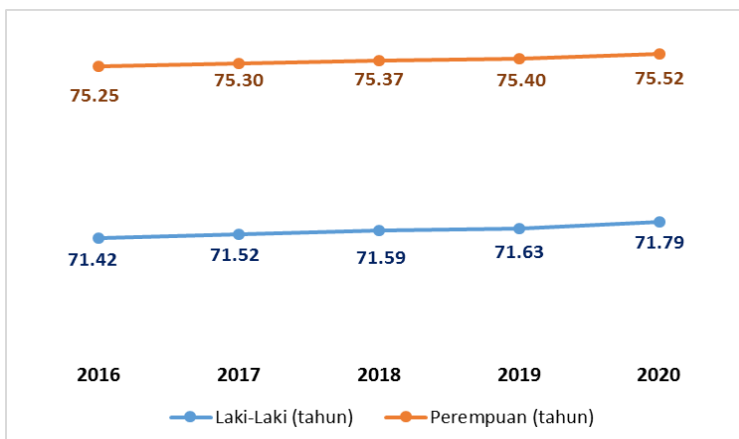
## 3) Usia Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin

Capaian Usia Harapan Hidup (UHH), perempuan dari tahun 2017-2020 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) Laki-laki. Pada Tahun 2016 UHH perempuan sebesar 75,25 tahun naik menjadi 75,52 tahun pada tahun 2020. Sedangkan UHH laki-laki pada tahun 2016 sebesar 71,42 tahun naik menjadi 71,79 tahun pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.46 dan gambar 2.62.

**Tabel 2.46**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin**  
**Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (tahun)	71,42	71,52	71,59	71,63	71,79
2	Perempuan (tahun)	75,25	75,30	75,37	75,40	75,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.62**  
**Usia Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin**  
**Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

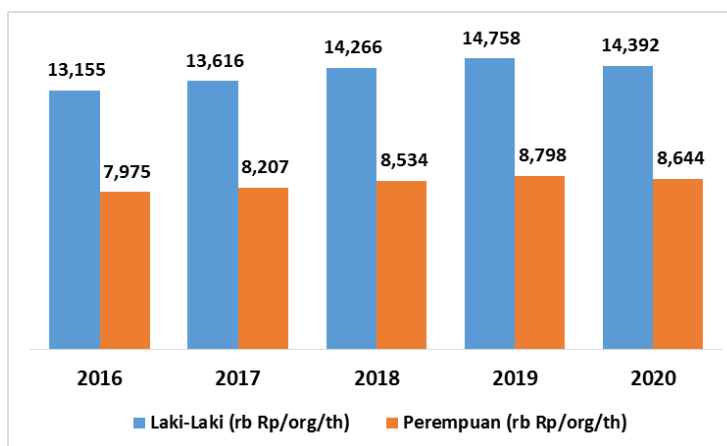
**4) Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin**

Capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan dari Tahun 2016-2020 untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pengeluaran perkapita penduduk laki-laki meningkat dari sebesar 13.155 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2016 menjadi 14.392 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2020. Sementara itu pengeluaran perkapita penduduk perempuan naik dari sebesar 7.975 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2016 menjadi 8.644 ribu rupiah/orang/tahun di tahun 2020. Ketimpangan pengeluaran perkapita yang disesuaikan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Selain itu capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan adanya pandemi COVID-10. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.47 dan gambar 2.63.

**Tabel 2.47**  
**Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut**  
**jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (rb Rp/org/th)	13.155	13.616	14.266	14.758	14.392
2	Perempuan (rb Rp/org/th)	7.975	8.207	8.534	8.798	8.644

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.63**  
**Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut**  
**jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

**b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

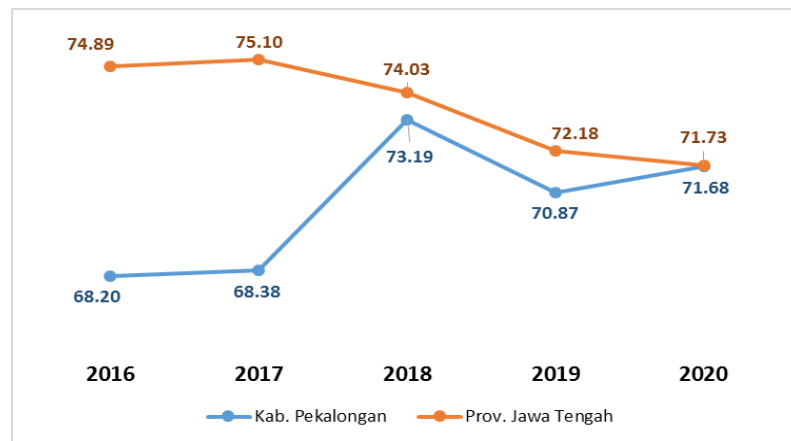
Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen pembentuk IDG tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan antara lain : keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

IDG Kabupaten Pekalongan naik dari 70,87 di tahun 2019 menjadi 71,68 di Tahun 2020. Rata-rata capaian IDG masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.48 dan gambar 2.64.

**Tabel 2.48**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekalongan	68,20	68,38	73,19	70,87	71,68
2	Jawa Tengah	74,89	75,10	74,03	72,18	71,73

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



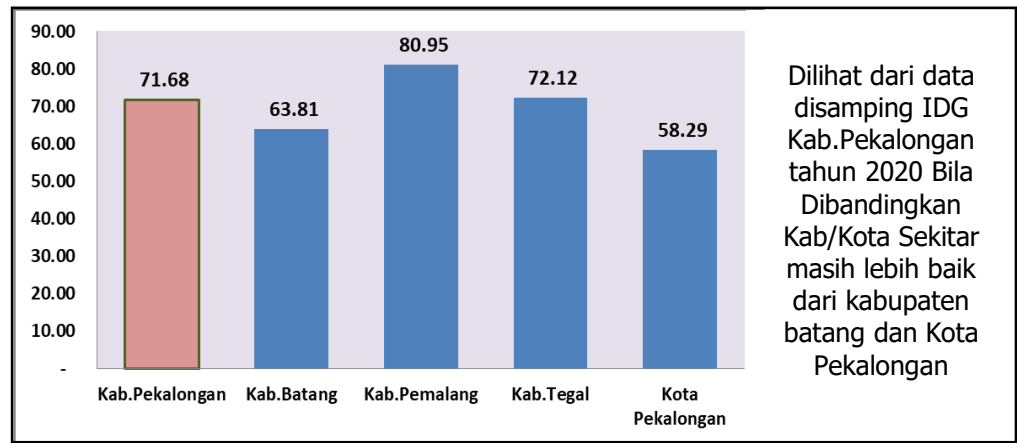
**Gambar 2.64**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.48 dan gambar 2.64. apabila dianalisis lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pekalongan ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

**Tabel 2.49**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	68,09	68,38	73,19	70,87	71,68
2	Kab. Batang	68,12	66,58	66,29	63,78	63,81
3	Kab. Pemasang	68,73	70,52	68,95	80,08	80,95
4	Kab. Tegal	77,06	68,90	69,25	72,58	72,12
5	Kota Pekalongan	67,44	65,11	68,62	60,95	58,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.65**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020**

**3) Persentase Balita Gizi Buruk**

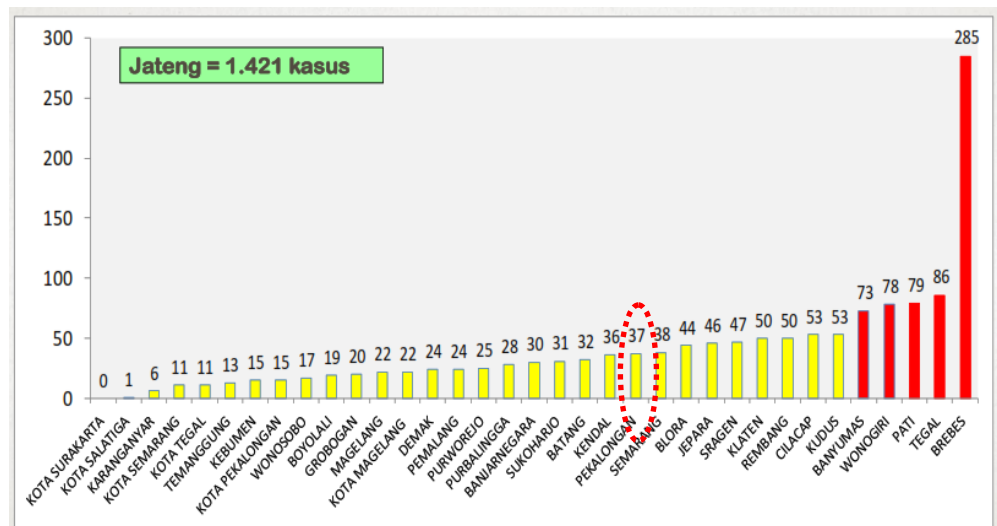
**a) Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk**

Pendataan gizi buruk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu kategori pertama dengan membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Pemeriksaan pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Secara rinci Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.50 dan gambar 2.66.

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (kasus)	49	53	48	45	37
2.	Jawa Tengah (kasus)	982	922	961	1.216	1.421

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021

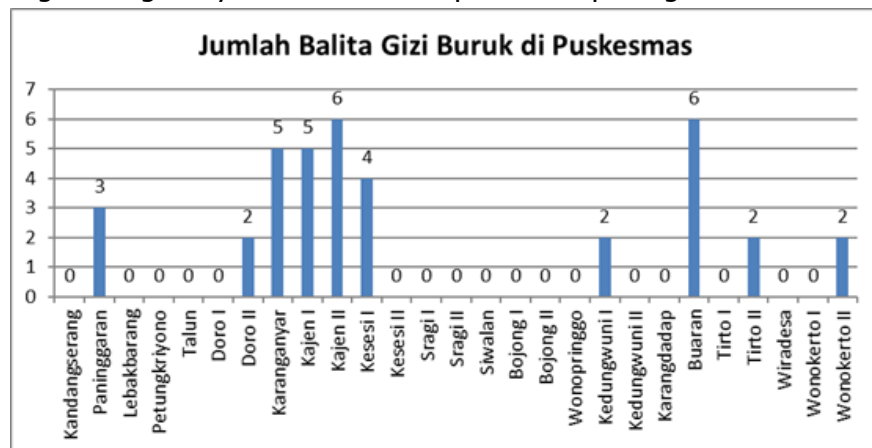


Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021

**Gambar 2.66**  
**Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020**

Dari Tabel 2.50 dan Gambar 2.66, capaian jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 sebesar **37 kasus** turun dari Tahun 2019 sebesar 45 kasus. Angka ini tergolong cukup besar (**22 besar**) dari capaian seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020. Faktor penyebab gizi buruk dikelompokkan menjadi 2 yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung gizi buruk yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai dan pendidikan yang rendah.

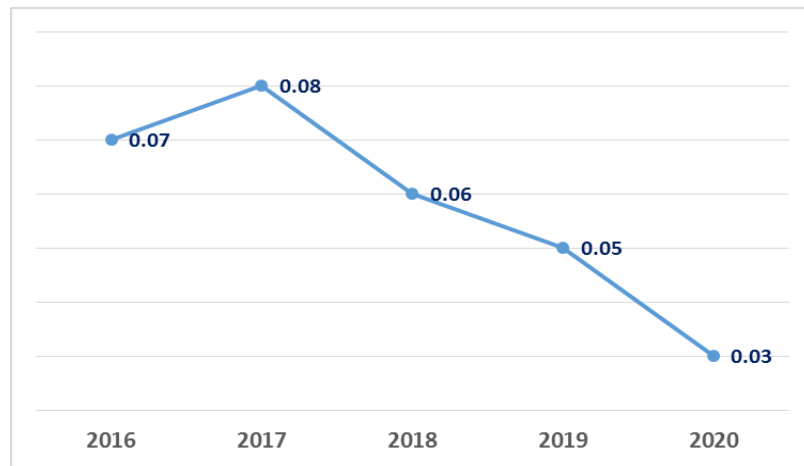
Langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan adalah dengan perawatan balita gizi buruk di rumah sakit, pemberian PMT penyuluhan, dan PMT pemulihan pada balita gizi buruk dan gizi kurang, suplementasi gizi, Pelatihan Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) bagi kader. Data gizi buruk terdapat di Puskesmas Kajen II dan Puskesmas Buaran masing-masing sejumlah 6 kasus, Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Kajen I masing-masing sejumlah 5 kasus, Puskesmas Kesesi 1 sejumlah 4 kasus, Puskesmas Panninggaran sejumlah 3 kasus, serta Puskesmas Kedungwuni I, Doro II, Tirto II dan Wonokerto II masing-masing sebanyak 2 kasus. Adapun sebaran balita gizi buruk di masing-masing wilayah Puskesmas dapat dilihat pada gambar 2.67.



**Gambar 2.67**  
**Jumlah Balita Gizi Buruk di Wilayah Puskesmas**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

#### b) Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator yang digunakan untuk menentukan gizi buruk menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Perkembangan balita gizi buruk Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 2.68.



**Gambar 2.68**  
**Persentase Balita Gizi Buruk**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

**c) Persentase Kasus *Stunting***

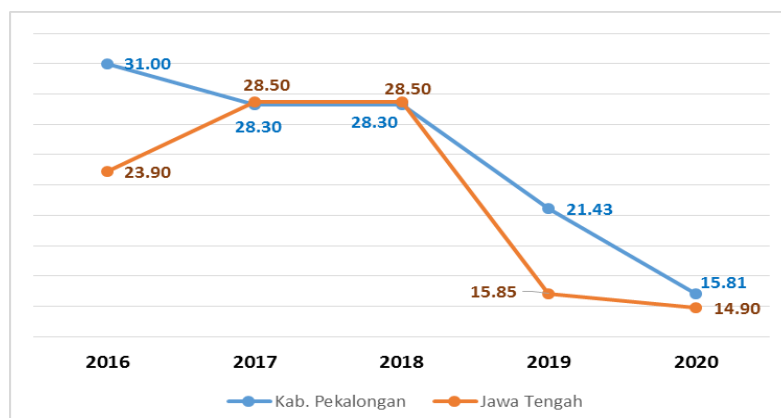
*Stunting* (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita *stunting* di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Adapun persentase kasus *stunting* Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.51 dan gambar 2.69.

**Tabel 2.51**  
**Persentase Kasus *Stunting* Kabupaten Pekalongan**  
**dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	31,00	28,30	28,30	21,43	15,81
2.	Jawa Tengah	23,90	28,50	28,50	15,85	14,90

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021



**Gambar 2.69**  
**Persentase Kasus *Stunting* Kabupaten Pekalongan**  
**dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.51 dan gambar 2.69, kondisi balita yang *stunting* di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)



Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebanyak 15,81%, turun dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 21,43%. Jumlah baduta stunting Tahun 2020 sebanyak 1.631 baduta dari jumlah total sebanyak 10.316 baduta. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.52.

**Tabel 2.52**  
**Jumlah Kasus *Stunting* Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

No	Puskesmas	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	
			2019	2020
1	Kandangserang	2	2	44
2	Paninggaran	15	54	45
3	Petungkriyono	8	25	48
4	Lebakbarang	-	-	9
5	Talun	1	1	26
6	Doro I	7	28	54
7	Doro II	2	8	
8	Karanganyar	6	18	41
9	Sragi I	7	150	65
10	Sragi II	4	16	
11	Siwalan	7	21	100
12	Wonopringgo	12	114	115
13	Karangdadap	5	21	192
14	Tirto I	12	218	220
15	Tirto II	4	83	
16	Kedungwuni I	16	251	185
17	Kedungwuni II	9	143	
18	Bojong I	12	60	16
19	Bojong II	4	12	
20	Kesesi I	9	72	192
21	Kesesi II	3	10	
22	Kajen I	7	58	105
23	Kajen II	16	119	
24	Wiradesa	11	51	19
25	Wonokerto I	2	2	49
26	Wonokerto II	1	2	
27	Buaran	-	-	106
	<b>Jumlah</b>	<b>182</b>	<b>1.540</b>	<b>1.631</b>
	<b>Jumlah Total Baduta</b>		<b>7.186</b>	<b>10.316</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pekalongan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, seimbang secara sehat dan aman. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya mengatasi masalah balita *stunting* yang terintegrasi dengan kegiatan perbaikan gizi pada masa kehamilan, penerapan ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI pada balita.

### c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan olahraga. Secara jelas digambarkan dalam uraian berikut ini.

#### 1) Urusan Kebudayaan : jumlah grup dan gedung kesenian

Kelompok kesenian pada tahun 2020 sejumlah 257 kelompok yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Seni budaya di Kabupaten Pekalongan termasuk berkembang dan beraneka ragam. Dalam rangka melestarikan seni dan budaya maka di Kabupaten Temanggung pada tiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya masyarakat. Kelompok kesenian yang ada di masyarakat sudah terorganisir dengan kesenian tradisional khas Kabupaten Pekalongan, antara lain adalah tari sintren, kuda kepang, kunthulan, terbang jawan (campuran musikrebana dan pencak silat), dan lain-lain. Kesenian yang paling

berkembang dan penggemarnya juga paling banyak adalah tari sintren. Gedung kesenian ada satu buah di Kecamatan Kajen. Gambaran jumlah grup dan gedung kesenian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.53.

**Tabel 2.53**  
**Jumlah Grup dan Gedung Kesenian**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	221	235	257	257	257
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah penduduk	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
4	Rasio grup kesenian (per 10.000 penduduk)	3	3	3	3	3

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan 2021

2) Urusan Pemuda dan Olahraga : jumlah klub dan gedung olahraga

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah klub olahraga karena adanya pendataan klub olahraga di semua kecamatan. Gedung yang disediakan pemerintah secara fisik sudah cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan olahraga tingkat kabupaten, selain itu juga didukung dengan tempat-tempat pertemuan di tingkat desa/kelurahan yang sebagian besar juga digunakan untuk kegiatan olahraga tingkat desa/kelurahan. Gambaran jumlah klub olahraga dan gedung olahraga dapat dilihat pada tabel 2.54

**Tabel 2.54**  
**Jumlah Klub dan Gedung Olahraga**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga	18	19	20	20	23
2	Jumlah gedung olahraga	210	210	213	214	214
3	Jumlah penduduk	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
4	Jumlah klub olahraga per 10.000 pddk	1	1	1	1	1

Sumber : Dinporapar Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.54 jumlah klub olahraga tahun 2020 sebanyak 23 klub yang aktif dari jumlah seluruh organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pekalongan yang terdaftar secara resmi sebanyak 36 klub.

### 3. Aspek Pelayanan Umum

#### a. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1) Pendidikan

Adapun capaian layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

##### a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Secara Rinci APS Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.55.

**Tabel 2.55**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
APS Kab. Pekalongan						
1	SD/MI (7-12 tahun)	100,00	99,73	99,70	99,70	99,99
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	87,90	90,29	90,53	90,38	91,45
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	55,41	60,76	66,65	66,34	66,69
APS Provinsi Jawa Tengah						
1	SD/MI (7-12 tahun)	99,58	99,62	99,76	99,77	99,73
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	95,41	95,48	95,79	96,11	96,37
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	67,95	68,48	69,02	69,65	70,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari tabel 2.55, selama kurun waktu 2016-2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pekalongan secara umum mengalami peningkatan. Pada kelompok usia 7-12 tahun terdapat 99,99% penduduk telah bersekolah pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 99,70%. Ini berarti masih ada 0,01% anak berumur 7-12 tahun yang sedang tidak sekolah di SD/MI. Dua kemungkinan yang terjadi, yaitu sedang bersekolah di jenjang yang lebih tinggi atau sudah tidak bersekolah lagi. Sedangkan penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SLTP/MTs meningkat dari 90,38% di tahun 2019 menjadi 91,45% di tahun 2020. Penduduk umur 16-18 tahun yang masih sekolah di tingkat SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan yaitu dari 66,34% di Tahun 2019 menjadi 66,69% di Tahun 2020.

#### b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.56.

**Tabel 2.56**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

NO.	TAHUN	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.
1.	2016	108,90	109,46	91,78	89,96	72,26	86,27
2.	2017	110,47	108,44	93,14	91,09	55,13	84,35
3.	2018	105,22	108,18	105,89	91,96	60,36	84,15
4.	2019	110,26	107,74	97,02	91,70	61,24	86,76
5.	2020	108,47	106,32	95,57	93,21	64,22	86,83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Dari tabel 2.56, dalam kurun waktu Tahun 2016-2020, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung fluktuatif. Untuk jenjang SD/MI Tahun 2020 sebesar 108,47% turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 110,26%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2020 sebesar 95,57% turun

dibandingkan tahun 2019 sebesar 97,02%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 64,22% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 61,24%.

**c) Angka Partisipasi Murni (APM)**

APM adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.57.

**Tabel 2.57**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

NO.	TAHUN	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
1.	2016	97,21	96,64	78,47	78,89	44,73	58,49
2.	2017	96,25	97,13	76,38	79,13	48,14	59,20
3.	2018	96,44	97,75	78,20	79,31	46,62	59,31
4.	2019	96,34	97,77	77,44	79,84	45,74	59,35
5.	2020	96,57	97,70	77,93	80,53	45,91	59,74

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Dari tabel 2.57, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk jenjang SD/MI Tahun 2020 sebesar 96,57% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 96,34%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2020 sebesar 77,93% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 77,44%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 45,91% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 45,74%.

**d) Persentase Penduduk berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

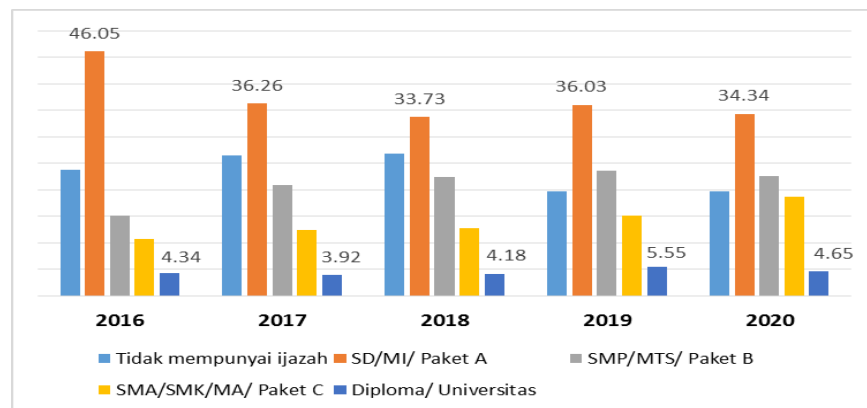
Persentase penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Adapun persentase penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.58 dan gambar 2.70.

**Tabel 2.58**  
**Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)			
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTS / Paket B	SMA/SMK/MA / Paket C	Diploma/ Universitas
2016	23,80	46,05	15,10	10,71	4,34
2017	26,51	36,26	20,88	12,43	3,92

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)			
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTS / Paket B	SMA/SMK/MA / Paket C	Diploma/ Universitas
2018	26,84	33,73	22,50	12,75	4,18
2019	19,71	36,03	23,59	15,12	5,55
2020	19,68	34,34	22,63	18,70	4,65

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



**Gambar 2.70**

### Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Dari tabel 2.58 dan gambar 2.70, dari capaian persentase penduduk umur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020 sebagian besar penduduk Kabupaten Pekalongan yang tidak mempunyai ijazah sebesar 19,36%, tamat SD/MI/Paket A sebesar 34,13%, tamat SMP/MTS/Paket B sebesar 26,56%, tamat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 19,96% dan tamat diploma/universitas sebesar 3,99%.

#### e) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.59.

**Tabel 2.59**

#### Angka Putus Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	0,30	0,29	0,22	0,14	0,12
2.	SMP/MTs	0,18	0,17	0,16	0,12	0,11
3.	SMA/SMK/MA	0,36	0,34	0,30	0,28	0,27

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Pada kurun waktu 2016-2020, Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan menengah (SMA/SMK/MA) terus mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama dalam mencari penyebab dan solusi agar capaian Angka Putus Sekolah dapat mendekati 0 (nol) persen.

Verifikasi dan validasi (verval) data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 mengungkap jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang cukup tinggi di Kab. Pekalongan, yaitu sebesar 4.346. Dari hasil verval juga ditemukan beberapa penyebab ATS, diantaranya adalah kemiskinan atau kemampuan ekonomi keluarga yang rendah, pernikahan dini, kondisi anak yang

berkebutuhan khusus, serta kurangnya pemahaman di masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Permasalahan ATS menjadi semakin penting untuk diatasi mengingat jumlah tersebut kemungkinan besar akan bertambah sebagai dampak dari pandemic COVID-19. Sebagaimana diketahui, pandemi telah memberikan dampak hilangnya mata pencarian orang tua, hilangnya akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga tidak mampu akibat pembelajaran jarak jauh, terbatasnya dukungan bagi anak dengan disabilitas, yang semuanya ini kemudian secara langsung berpotensi pada kondisi anak tidak sekolah.

Menyikapi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemkab Pekalongan telah meluncurkan inovasi **Gerakan KUDU Sekolah** (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah) yang merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam memperluas keterjangkauan pelayanan dasar, salah satunya akses terhadap pendidikan. Gerakan ini juga dibangun untuk membantu pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran atau outputnya adalah data ATS di Tahun 2019 yang dikembalikan melalui Gerakan Kudu Sekolah sebanyak 389 anak atau 100 % dari target. Sedangkan di tahun 2020, data ATS yang dikembalikan melalui Gerakan Kudu Sekolah sebanyak 540 anak dari target 680 anak, namun terkendala adanya Pandemi COVID-19 dan *refocusing* anggaran kegiatan. Kemudian untuk tahun 2021 direncanakan sebanyak 1.055 anak



**Gambar 2.71**  
**Target Gerakan KUDU SEKOLAH**

#### f) Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan pada tahun 2015-2019 mencapai 100,00% selama 5 (lima) tahun terakhir untuk setiap jenjang. Capaian angka kelulusan sekolah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.60.

**Tabel 2.60**  
**Angka Kelulusan Sekolah**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Angka kelulusan di semua jenjang pendidikan telah mencapai 100%, oleh karena itu perlu upaya yang sinergi mempertahankan capaian tersebut.

#### g) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase dari jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah dapat dilihat pada tabel 2.61.

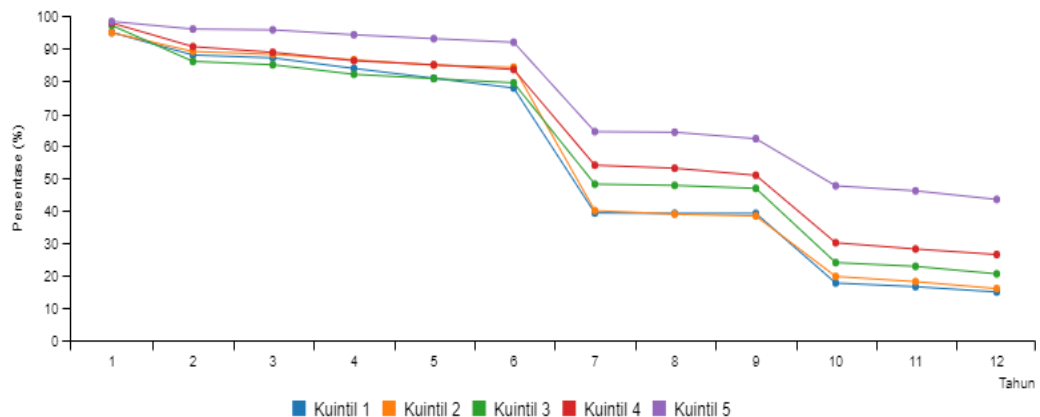
**Tabel 2.61**  
**Angka Melanjutkan Sekolah**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI ke SLTP/MTs	91,80	92,00	93,00	94,00	94,17
2	SLTP/MTs ke SMA/SMK/MA	76,90	78,50	78,50	79,00	80,03

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.61, persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Data tahun 2020 menunjukkan masih ada 5,83% lulusan SD/MI yang belum melanjutkan ke tingkat SMP/MTs dan 19,97% yang belum melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Dengan demikian masih perlu upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs agar menjadi 100% guna mendukung program wajib belajar 9 tahun.

Keberlanjutan sekolah masih sangat rendah dan terjadi ketimpangan antar kuintil, terutama kuintil 1 dan 2. Ketimpangan dalam Pelayanan Dasar Pendidikan Keberlanjutan Sekolah dapat dilihat dibawah ini.



**Gambar 2.72**  
**Ketimpangan Keberlanjutan Sekolah tahun 2020**

#### h) Fasilitas pendidikan

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indikator kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik. Capaian fasilitas pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020, sebagaimana tabel 2.62.

**Tabel 2.62**  
**Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Kondisi Baik**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	83,00	83,00	84,00	85,00	87,11
2.	SMP/MTs	88,00	90,00	91,00	94,00	95,04
3.	SMA/SMK/MA	90,00	92,00	93,00	94,00	94,50

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.62, kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terus mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD/MI dari 83,00% di Tahun 2016 menjadi 87,11% di Tahun 2020 dengan jumlah bangunan ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 2.655 bangunan dari total sebanyak 3.048 bangunan. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs meningkat dari 87,50% di Tahun 2015 menjadi 94,00% di Tahun 2020 dengan bangunan ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 939 bangunan dari total sebanyak 988 bangunan. Kemudian untuk jenjang SMA/ SMK/MA meningkat dari 90,00% di Tahun 2016 menjadi 94,50% di Tahun 2020.

**i) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar**

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Data selengkapnya terkait rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.63.

**Tabel 2.63**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**  
**Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SD/MI (unit)	637	637	634	633	631
2	Jumlah penduduk 7-12 th (jiwa)	92.491	93.189	94.611	96.032	96.570
1	Jumlah SMP/MTs (unit)	116	116	116	118	121
2	Jumlah penduduk 13-15 th (jiwa)	42.454	42.497	42.294	42.490	42.620
1.	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs (unit)	753	753	750	751	752
2.	Jumlah Total Penduduk	134.945	135.686	136.905	138.522	139.190
	<b>Rasio</b>	<b>55,80</b>	<b>55,50</b>	<b>54,78</b>	<b>54,22</b>	<b>54,03</b>

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Berdasarkan tabel 2.63, data rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami penurunan dari 55,80 di Tahun 2016 menjadi 54,03 per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar di Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadi *regrouping* (penggabungan sekolah). Rasio ini menunjukkan bahwa di Tahun 2020 terdapat 55 sekolah Pendidikan dasar dalam setiap 10.000 penduduk atau dengan kata lain dalam 1 sekolah rata-rata menampung 185 siswa sehingga masih tergolong ideal.

**j) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru dan murid di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.64.



**Tabel 2.64**  
**Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
a	Jumlah Guru (orang)	6.013	5.377	5.219	5.650	5.868
b	Jumlah Murid (anak)	95.429	94.540	93.856	95.441	95.949
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
a	Jumlah Guru (orang)	2.215	2.214	2.158	2.304	2.363
b	Jumlah Murid (anak)	41.800	41.323	39.847	40.622	42.183
a	Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs	8,228	7,591	7,377	7.954	8.231
b	Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs	137,229	135,863	133,703	136.063	138.132
	<b>Rasio per 10.000 murid</b>	<b>600</b>	<b>559</b>	<b>552</b>	<b>585</b>	<b>596</b>
	<b>Rata-rata 1 guru/murid</b>	<b>16,68</b>	<b>17,90</b>	<b>18,12</b>	<b>17,11</b>	<b>16,78</b>

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.64 rasio guru dan murid untuk sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa ketersediaan guru tidak menjadi permasalahan. Selama 5 (tahun) terakhir **rata-rata** terdapat 578 guru per 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Atau dengan kata lain terdapat 1 guru yang mengajar sebanyak 17 murid. Hal ini mendekati angka ideal yang ditetapkan yaitu 15-20 murid per guru. Permasalahan yang ada adalah belum terwujudnya pemerataan distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu adanya peningkatan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan dasar, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah siswa tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah guru. Dikhawatirkan jika jumlah rasio murid-guru meningkat, menyebabkan beban guru menjadi lebih berat dan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif.

**k) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Perkembangan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.65.

**Tabel 2.65**  
**Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
a	Jumlah Guru (orang)	6.013	5.377	5.219	5.650	5.868
b	Jumlah Kelas	3.413	4.349	4.251	4.480	4.691
c	Jumlah Murid (anak)	95.429	94.540	93.856	95.441	95.949
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
a	Jumlah Guru (orang)	2.215	2.214	2.158	2.304	2.363
b	Jumlah Kelas	981	981	1.001	1.058	1.400
c	Jumlah Murid (anak)	41.800	41.323	39.847	40.622	42.183
a	Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs	8.228	7.591	7.377	7.954	8.231
b	Jumlah Kelas D/MI dan SMP/MTs	4.394	5.330	5.252	5.538	6.091
c	Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs	137.229	135,863	133,703	136.063	138.132
	<b>Rasio</b>	<b>0.14</b>	<b>0.10</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.10</b>

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Tahun 2016-2020 capaiannya cenderung fluktuatif setiap tahun, dari tahun 2016 sebesar 0,14 guru/murid per kelas rata-rata menjadi 0,10 /murid per kelas rata-rata di tahun 2020.

#### **I) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Data selengkapnya terkait jumlah sekolah, penduduk usia sekolah dan rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.66.

**Tabel 2.66**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SMA/SMK/MA</b>					
a	Jumlah gedung sekolah (unit)	63	63	66	66	66
b	jml penduduk kelompok usia 16-18th (jiwa)	42.912	42.668	42.625	43.177	43.572
	<b>Rasio</b>	<b>14,68</b>	<b>14,77</b>	<b>15,48</b>	<b>15,29</b>	<b>15,15</b>

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020

Berdasarkan tabel 2.66, data rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah cenderung mengalami kenaikan dari 14,68 di Tahun 2016 menjadi 15,15 per 10.000 penduduk usia pendidikan menengah di Tahun 2020. Rasio ini menunjukkan bahwa di Tahun 2019 terdapat 16 sekolah Pendidikan dasar dalam setiap 10.000 penduduk atau dengan kata lain dalam 1 sekolah rata-rata menampung 625 siswa sehingga masih tergolong ideal.

#### **m) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru jenjang pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan rasio guru terhadap murid Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.67.

**Tabel 2.67**  
**Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SMA/SMK/MA</b>					
a	Jumlah Guru (orang)	1.785	1.673	1.722	1.829	1.965
b	Jumlah Murid (anak)	28.332	29.389	29.722	30.292	31.454
	<b>Rasio per 10.000 murid</b>	<b>630</b>	<b>569</b>	<b>579</b>	<b>604</b>	<b>625</b>
	<b>Rata-rata 1 guru/murid</b>	<b>15,87</b>	<b>17,57</b>	<b>17,26</b>	<b>16,56</b>	<b>16,01</b>

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020

Dari tabel 2.67, rasio guru dan murid untuk sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa ketersediaan guru

tidak menjadi permasalahan. Selama 5 (tahun) terakhir terdapat **rata-rata** 601 guru per 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Atau dengan kata lain terdapat 1 guru yang mengajar sebanyak 17 murid.

**n) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Menengah**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru jenjang pendidikan menengah per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Sekolah Pendidikan Menengah di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.68.

**Tabel 2.68**  
**Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>SMA/SMK/MA</b>					
a	Jumlah Guru (orang)	1.785	1.673	1.722	1.829	1.965
b	Jumlah kelas	920	931	949	988	991
c	Jumlah Murid (anak)	28.332	29.389	29.722	30.292	31.454
	<b>Rasio</b>	<b>0,68</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,63</b>

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SMA/SMK/MA relative turun dari Tahun 2016 sebesar 0,68 guru/murid per kelas rata-rata menjadi 0,63 guru/murid per kelas rata-rata di Tahun 2020. Rasio ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru per kelas jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) cukup memadai yang dapat mendukung mutu pengajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin baik.

**o) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV**

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada semua jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.69.

**Tabel 2.69**  
**Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

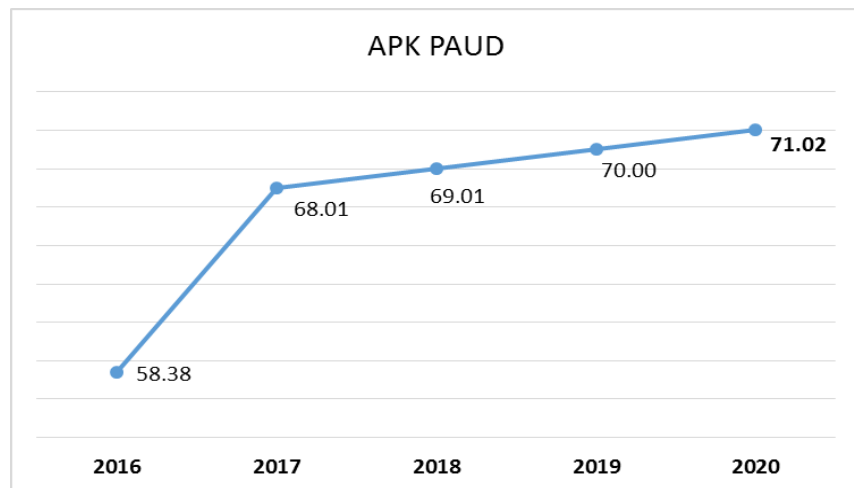
No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru SD/MI	85,00	95,00	96,00	97,00	97,06
2	Guru SLTP/MTs	93,50	95,00	95,50	97,59	97,59
3	Guru SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Pada tahun 2016-2020 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2020, untuk jenjang SD/MI jumlah guru lulusan S1/D4 sebanyak 4.221 orang dari 4.349 orang. Untuk jenjang SLTP/MTs jumlah guru lulusan S1/D4 sebanyak 1.538 orang dari 1.576 orang. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA seluruh guru seluruhnya sudah lulusan S1/D4.

**p) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, perkembangan Angka Partisipasi Kasar pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 sebagaimana gambar 2.73.



**Gambar 2.73**

**APK PAUD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari 58,38 di Tahun 2016 menjadi 71,02 di Tahun 2020. Sedangkan jumlah siswa PAUD sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 41.631 anak. Meski capaian APK PAUD dari tahun ke tahun terus meningkat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam upaya peningkatan APK PAUD, terutama masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD. Hal ini paling dirasakan di desa-desa yang sebagian besar masih menganggap bahwa PAUD kurang begitu penting dibanding masuk sekolah dasar. Hal ini tentunya menjadi tugas bersama bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan tahun.

**2) Kesehatan**

Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Pandemi COVID-19 diawal tahun 2020, telah merubah berbagai tatanan kebijakan yang berdampak ke semua sektor pembangunan, terutama pada bidang Kesehatan. Berbagai langkah strategis diambil dalam rangka mencegah penyebaran/penularan COVID-19. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, kiranya perlu meningkatkan kewaspadaan dan dapat memelopori kehidupan *new normal*. Kebijakan tahun 2020 di bidang kesehatan dapat diketahui dari berbagai indikator sebagaimana berikut :

**a) Angka Kematian Ibu (AKI)**

Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu sasaran pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disamping kematian Bayi dan prevalensi gizi kurang pada balita. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya penggunaan fasilitas

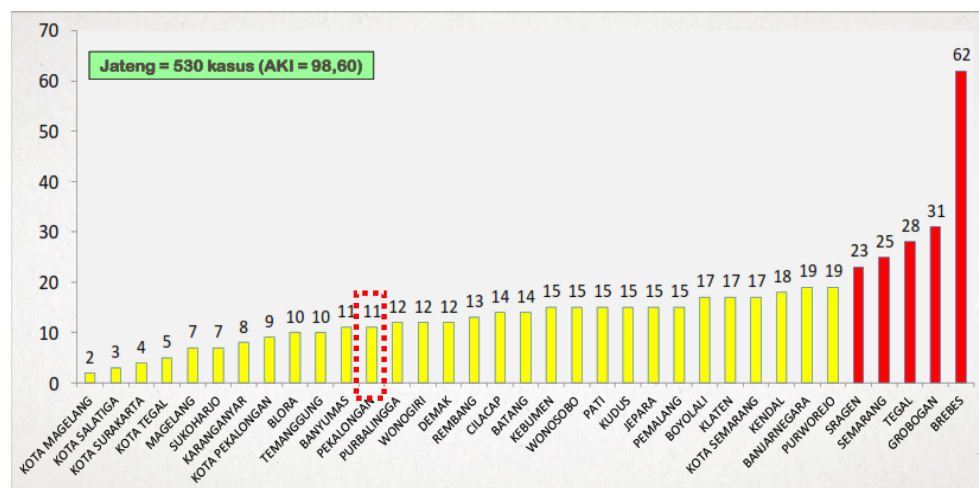
elayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.70 dan gambar 2.74.

**Tabel 2.70**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	<b>115,02</b> (18 kasus)	<b>102,01</b> (16 kasus)	<b>68,51</b> (11 kasus)	<b>60,45</b> (10 kasus)	<b>66,43</b> (11 kasus)
2.	Jawa Tengah	<b>109,65</b> (602 kasus)	<b>88,58</b> (475 kasus)	<b>78,60</b> (421 kasus)	<b>76,93</b> (416 kasus)	<b>98,60</b> (530 kasus)

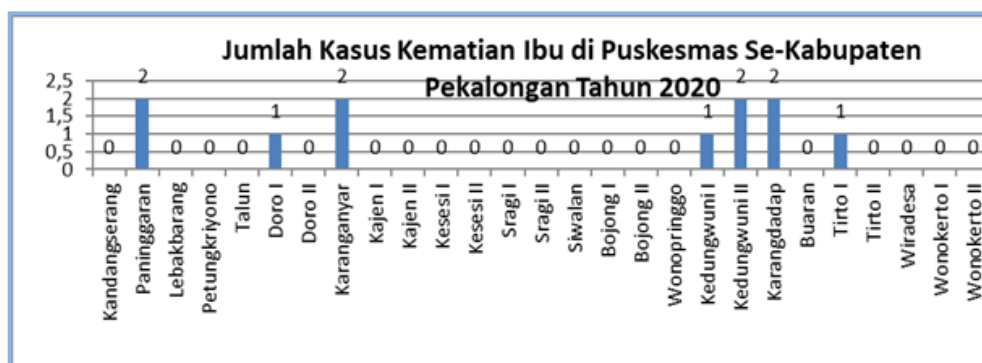
Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021



**Gambar 2.74**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2020**

Dari Tabel 2.70 dan Gambar 2.74, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan mengalami **kenaikan** dari 60,45 per 100.000 kelahiran hidup (10 kasus) pada tahun 2019 menjadi 66,43 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus) pada tahun 2020. Capaian ini lebih baik dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun terakhir sebesar 98,60 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 dengan jumlah total sebanyak 530 kasus.

Kasus kematian ibu sejumlah 11 tersebar di 7 Puskesmas yaitu: Puskesmas Paninggaran terdapat 2 kasus, Puskesmas Doro I terdapat 1 kasus, Puskesmas Karanganyar terdapat 2 kasus, Puskesmas Kedungwuni I terdapat 1 kasus, Puskesmas Kedungwuni II terdapat 2 kasus, Puskesmas Karangdadap terdapat 2 kasus serta Puskesmas Tirta I terdapat 1 kasus.



**Gambar 2.75**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Wilayah Puskesmas Di Kabupaten Pekalongan tahun 2020**

Upaya penurunan AKI di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, adanya Program Puskesmas Mampu Persalinan di setiap Puskesmas dan peran lintas sektoral dan **Gerakan Masyarakat Selamatkan Ibu dan Anak (GEMASSETIA)** di seluruh kecamatan. Adanya dukungan oleh semua sektor ini dapat diperoleh informasi dengan baik dan cepat sehingga dapat membantu dalam menentukan langkah atau kebijakan yang sesuai dengan masalah yang ada. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di setiap puskesmas.

Status kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pekalongan menjadi perhatian karena penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan tujuan pembangunan kesehatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan kunjungan ibu hamil (K4) yang dapat dilihat pada tabel 2.71.

**Tabel 2.71**  
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	90,94	91,57	94,68	100,00	100,00
2.	Provinsi Jawa Tengah	93,27	92,53	93,07	93,25	94,15

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021

Dari tabel 2.71, cakupan kunjungan ibu hamil (K4) dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), pola cakupan kunjungan ibu hamil (K4) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami kenaikan yang mencapai 100% di Tahun 2019 dan 2020. Diharapkan dengan meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil K4 akan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

#### b) Angka Kematian Bayi (AKB)

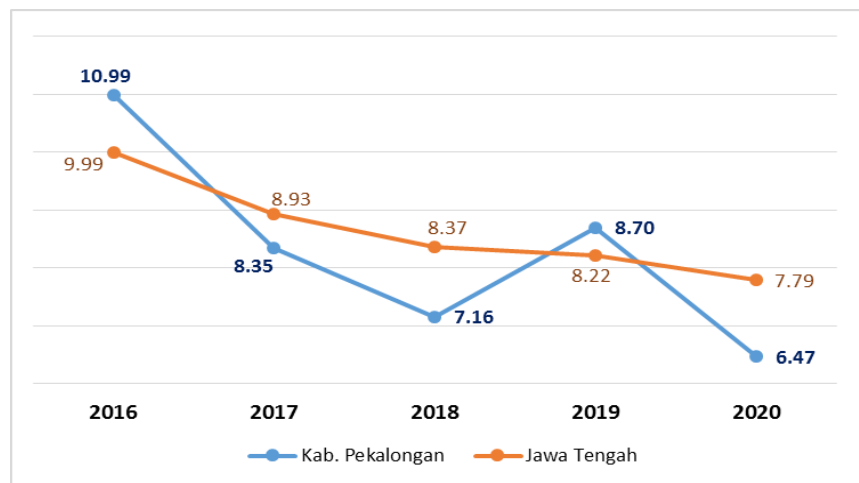
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan

antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan dalam tabel 2.72 dan gambar 2.76.

**Tabel 2.72**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	<b>10,99</b> (172 kasus)	<b>8,35</b> (131 kasus)	<b>7,16</b> (115 kasus)	<b>8,70</b> (144 kasus)	<b>6,47</b> (107 kasus)
2.	Jawa Tengah	<b>9,99</b> (5.485 kss)	<b>8,93</b> (4.791 kss)	<b>8,37</b> (4.481 kss)	<b>8,22</b> (4.450 kss)	<b>7,79</b> (4.189 kss)

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021



**Gambar 2.76**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.73 dan gambar 2.76, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019 sebesar 8,70 per 1000 KH (144 kasus) turun menjadi 7,44 per 1000 KH di Tahun 2020 (**107 kasus**) dari **16.532 kelahiran hidup**. Capaian ini lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,79 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi terbanyak ada pada Puskesmas Wonopringgo dengan jumlah kematian sebanyak 12 kasus, dan Puskesmas dengan 0 kematian ada di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Petungkriyono dan Puskesmas Doro I. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar 2.77.



**Gambar 2.77**  
**Angka Kematian Bayi menurut Puskesmas**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

Penyebab kematian bayi di Kabupaten Pekalongan antara lain Asfeksia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan kelainan congenital. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai target yaitu dengan carapembinaan puskesmas mampu bersalin oleh dokter spesialis anak, peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanganan Berat badan lahir rendah (BBLR), pemeriksaan ibu hamil resti di tiap kecamatan, pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah.

**c) Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Kesehatan Desa**

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.73.

**Tabel 2.73**  
**Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas Induk (unit)	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Puskemas Pembantu (unit)	49	49	49	49	49
3.	Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa	181	181	159	159	159
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
5.	<b>Rasio</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,24</b>
	Rasio 1 Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa /1.000 pddk	<b>3.424</b>	<b>3.448</b>	<b>3.795</b>	<b>3.820</b>	<b>4.123</b>
	Rasio 1 puskesmas/1.000 pddk	<b>32.596</b>	<b>32.822</b>	<b>33.033</b>	<b>33.249</b>	<b>35.882</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Data pada tabel 2.73, rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,24 artinya satu puskesmas melayani 35.882 jiwa. Rasio ini masih dibawah standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun demikian dengan adanya puskesmas pembantu dan poliklinik kesehatan desa dapat membantu melayani kesehatan masyarakat. Dari 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan, terdapat 26 Puskesmas terakreditasi dan **1 (satu) puskesmas belum terakreditasi** yaitu Puskesmas Wonokerto dikarenakan baru teregister tahun 2019.



**d) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita**

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Sedang Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (melakukan penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita). Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas. Rasio Posyandu dan Balita di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.74.

**Tabel 2.74**  
**Rasio Posyandu dan Balita**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah posyandu (unit)	1.389	1.393	1.400	1.385	1.398
2.	Jumlah balita (anak)	71.260	69.775	71.336	68.350	71.112
	<b>Rasio</b>	<b>19,49</b>	<b>19,96</b>	<b>19,63</b>	<b>20,26</b>	<b>19,66</b>
	Rasio 1 Posyandu/1.000 pddk	<b>51,30</b>	<b>50,09</b>	<b>50,95</b>	<b>49,35</b>	<b>50,87</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Data pada tabel 2.74, rasio posyandu dan balita per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 19,66 artinya 1 posyandu melayani 51 balita. Rasio ini di atas standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 (satu) unit Posyandu, idealnya melayani sekitar 100 balita (120 kepala keluarga) atau sesuai dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat sehingga dapat diartikan tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan melalui posyandu sudah tinggi.

**e) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio rumah sakit per jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.75.

**Tabel 2.75**  
**Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah RSUD (unit)	2	2	2	2	2
2.	Jumlah RS Swasta (unit)	1	1	1	1	1
	<b>Total RS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	<b>Rasio</b>	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>	<b>0.003</b>
	<b>Rasio 1 Rumah sakit/1.000 pddk</b>	<b>293.364</b>	<b>295.399</b>	<b>297.297</b>	<b>299.237</b>	<b>322.940</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,003 artinya satu rumah sakit melayani 322.940 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Pekalongan dengan penduduk sebesar 968.821 jiwa membutuhkan 9 rumah sakit atau membutuhkan 6 rumah sakit baru.

**f) Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk

yang ada. Rasio Jumlah Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.76.

**Tabel 2.76**  
**Rasio Dokter per satuan penduduk**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter (orang)	55	55	63	91	135
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	<b>Rasio</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,071</b>	<b>0,101</b>	<b>0,139</b>
	Rasio 1 dokter/1.000 pddk	<b>16.002</b>	<b>16.113</b>	<b>14.157</b>	<b>9.865</b>	<b>7.176</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data tabel 2.98, dimana pada Tahun 2020 satu orang dokter melayani 7.176 penduduk, maka belum memenuhi kebutuhan yang ideal.

#### g) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio Jumlah Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.77.

**Tabel 2.77**  
**Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis (orang)	1.875	1.875	1.925	2.095	1.836
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	<b>Rasio</b>	<b>2,13</b>	<b>2,12</b>	<b>2,16</b>	<b>2,33</b>	<b>1,90</b>
	Rasio 1 tng medis/1.000 pddk	<b>469</b>	<b>473</b>	<b>463</b>	<b>429</b>	<b>528</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Secara ideal angka rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk untuk Indonesia adalah 141 per 100.000 penduduk atau terdapat 1 orang tenaga medis dalam 790 jiwa penduduk. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data tabel 2.99 dimana untuk tahun 2020 terdapat 1 tenaga medis di setiap 528 jiwa penduduk, maka dapat dikatakan sudah memenuhi kondisi ideal.

#### h) Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas di Kabupaten Pekalongan adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS. Angka Kesakitan/*Incidence Rate* (IR) penyakit DBD di Kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kejadian luar biasa. Pada tahun 2018, Angka kesakitan penyakit DBD sebesar 19,17 per 10.000 penduduk (77 kasus). Pada tahun 2019, angka Kesakitan DBD menjadi 24,70 per 10.000 penduduk (222 kasus). Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 26,00 per 10.000 penduduk (246 kasus).

Sedangkan Angka Kematian/*Case Fatality Rate* (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, namun sudah mengalami penurunan kasus kematian akibat DBD selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017

sebesar 0,99% menurun menjadi 0.85% di tahun 2018 dan menurun lagi dengan tidak ada kasus (0,00%) di tahun 2019 dan 2020.

Angka Penemuan Pasien baru *Case Detection Rate/CDR*) Tuberculosis (TB) BTA positif didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang lalu. CDR TB di Tahun 2020 sebesar 9,00% naik dari tahun 2019 sebesar 8,50%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) TB turun di Tahun 2020 sebesar 96,00% dari 96,60% di Tahun 2019. Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.78.

**Tabel 2.78**  
**Kondisi Penyakit Menular**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	IR DBD/100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	SR TB (%)	Cakupan HIV/AIDS tertangani (%)
2016	36,00	2,00	8,75	93,56	100,00
2017	22,12	0,99	8,80	95,40	100,00
2018	19,17	0,85	9,21	89,45	100,00
2019	24,70	0,00	8,50	96,60	100,00
2020	26,00	0,00	9,00	96,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a) Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum yang harus ditangani sesuai kewenangan Kabupaten Pekalongan meliputi prasarana jalan dan jembatan; prasarana sumber daya air/jaringan irigasi/air limbah dan drainase; dan persampahan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### (1) Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2020, panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pekalongan sepanjang 669,895 km. Berdasarkan jenis permukaannya, di Kabupaten Pekalongan terdapat 5 (lima) jenis jalan, yaitu jalan aspal, jalan batu/kerikil, jalan beton, jalan tanah dan jalan paving.

Panjang jalan berdasarkan jenis permukaannya dari tahun ke tahun terjadi penambahan dan pengurangan, hal ini dikarenakan adanya perubahan jenis permukaannya, dari jalan aspal menjadi jalan beton/paving, dari jalan batu/kerikil menjadi jalan aspal/beton/paving, dari jalan tanah menjadi jalan batu/kerikil/paving/aspal/beton. Sebagaimana pada tabel 2.79.

**Tabel 2.79**  
**Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenis Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan Aspal (km)	542,54	604,185	595,42	593,624	595,37
2.	Jalan Batu/kerikil (km)	12,88	26,12	23,65	26,23	24,47
3.	Jalan Beton (km)	27,96	34,81	46,85	47,80	50,06
4.	Jalan Tanah (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jalan Paving (km)	5,22	4,78	3,975	2,64	0,00
	<b>Total (km)</b>	<b>588,60</b>	<b>669,895</b>	<b>669,895</b>	<b>669,895</b>	<b>669,895</b>

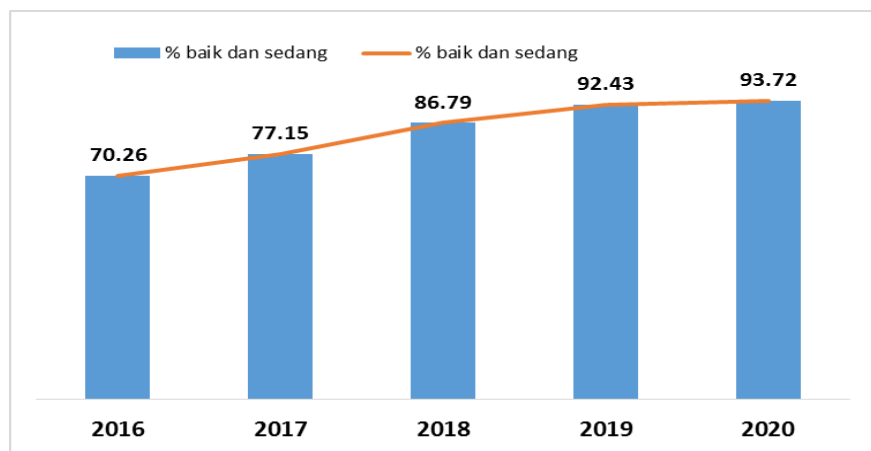
Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Berdasarkan kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yaitu 514,548 km dalam kondisi baik, sepanjang 113,288 km kondisi sedang atau sebesar 93,72% naik di bandingkan tahun 2019 dengan panjang jalan yang baik sebesar 493,376 km dan jalan sedang sebesar 125,781 km atau sebesar 92,43% dari jumlah total seluruh 669,895 km, sebagaimana pada tabel 2.80 dan gambar 2.78.

**Tabel 2.80**  
**Kondisi Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Baik (km)	321,250	422,929	480,729	493,376	514,548
2.	Sedang (km)	92,316	93,881	100,681	125,781	113,288
3.	Rusak (km)	62,915	32,506	18,006	20,247	13,132
4.	Rusak Berat (km)	112,114	120,579	70,479	30,491	28,927
	<b>Total (km)</b>	<b>588,595</b>	<b>669,895</b>	<b>669,895</b>	<b>669,895</b>	<b>669,895</b>
	<b>% baik dan sedang</b>	<b>70,26</b>	<b>77,15</b>	<b>86,79</b>	<b>92,43</b>	<b>93,72</b>

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021



**Gambar 2.78**  
**Persentase Jalan Baik dan Sedang**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Sedangkan prasarana jembatan tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan sejumlah 368 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 42 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 294 buah jembatan beton, 23 buah jembatan plat dan 6 buah jembatan rangka baja, serta 0 buah jembatan gantung, sebagaimana tabel 2.81.

**Tabel 2.81**  
**Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Jenis Jembatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Komposit (unit)	44	44	43	42	42
2.	Busur (unit)	3	3	3	3	3
3.	Beton (unit)	288	289	294	294	294
4.	Plat (unit)	23	23	23	23	23
5.	Rangka Baja (unit)	5	5	5	6	6
6.	Gantung (unit)	1	0	0	0	0
	<b>Total (unit)</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>

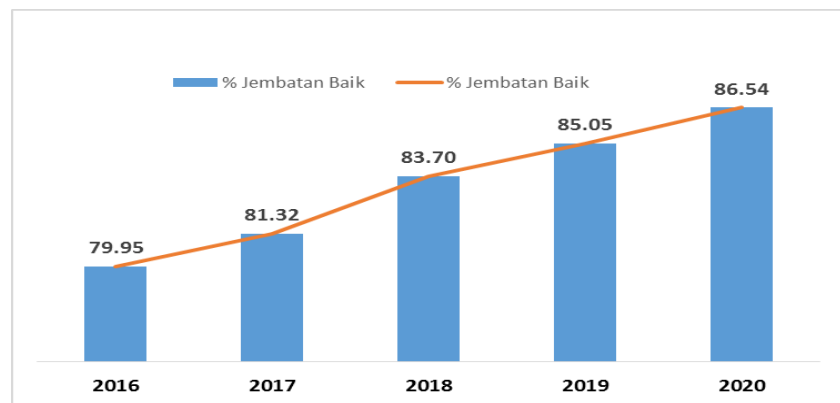
Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Pada tahun 2020, dari 368 buah jembatan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan kondisi fisiknya, di Kabupaten Pekalongan terdapat 319 buah dengan baik, 17 buah dengan kondisi sedang, dan 32 buah dengan kondisi rusak, serta 0 buah dengan kondisi rusak berat, sebagaimana pada tabel 2.82 dan gambar 2.79.

**Tabel 2.82**  
**Jembatan Berdasarkan Kondisi Fisiknya**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Kondisi Jembatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Baik (unit)	291	296	308	313	319
2.	Sedang (unit)	19	14	17	17	17
3.	Rusak (unit)	54	51	41	38	32
4.	Rusak Berat (unit)	0	3	2	0	0
	<b>Total (unit)</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
	<b>% Jembatan Baik</b>	<b>79,95</b>	<b>81,32</b>	<b>83,70</b>	<b>85,05</b>	<b>86,54</b>

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021



**Gambar 2.79**  
**Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

## (2) Prasarana Sumber Daya Air/Jaringan irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Jenis dan Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan dalam tabel 2.83.

**Tabel 2.83**  
**Jenis dan Panjang Jaringan Irigasi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Jaringan Irigasi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Non Teknis (km)	228,26	228,26	228,66	228,66	228,66
2.	Teknis					
a.	Jaringan primer (km)	20,26	20,26	20,62	20,62	20,62
b.	Jaringan Sekunder (km)	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66
c.	Jaringan Tersier (km)	430,66	430,66	430,88	430,88	430,88

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Sedangkan perkembangan prasarana sumber daya air/jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.84.

**Tabel 2.84**  
**Capaian Layanan Bidang Irigasi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jaringan Irigasi Baik (km)	341,990	347,811	360,390	372,636	382,085
2.	Luas Irigasi Kondisi Baik (ha)	11.093,29	11.129,99	10.204,51	10.680,34	10.840,30
3.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	3,08	3,10	3,14	3,40	3,525
4.	Persentase tersedianya air irigasi utk pertanian rakyat pada sistem irigasi yg sudah ada sesuai dng kewenangannya (%)	58,00	60,00	65,00	77,00	78,45

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Secara umum kondisi jaringan irigasi yang di tangani pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk pertanaian masyarakat dalam kondisi baik dengan tujuan peningkatan hasil pertanian rakyat dan perekonomian rakyat menjadi bertambah lebih baik.

### (3) Drainase

Drainase di Kabupaten Pekalongan secara umum sudah terbangun dengan baik dimana persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) mencapai 71,79% di tahun 2020.

Namun demikian guna mengantisipasi terjadinya banjir, perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan sistem jaringan drainase skala kota terus dilaksanakan karena drainase berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan. Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan serta bangunan yang ada. Pentingnya peningkatan kualitas saluran drainase salah satunya untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Adapun persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.85.

**Tabel 2.85**  
**Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase**  
**skala kota Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	40,00	45,00	100,00	86,51	71,79

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

### b) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2040 bertujuan untuk mewujudkan daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Rencana tata ruang Kabupaten Pekalongan disusun dengan memperhatikan

kecenderungan dan arahan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Capaian pelayanan urusan penataan ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator yang dijelaskan dalam tabel 2.86.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Pelayanan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%)	-	40,50	47,80	50,00	65,00
2.	Persentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital (%)	75,00	80,00	83,00	84,00	84,00
3.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	34,00	35,00	37,00	38,00	38,00

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Pada tahun 2020, persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan mencapai 65,00% naik dari tahun 2019 sebesar 50,00%, sedangkan persentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital tahun 2020 sebesar 84,00% naik dari Tahun 2016 sebesar 75,00%. Kemudian persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan tahun 2020 mencapai 38,00% naik dari Tahun 2016 sebesar 34,00%.

#### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

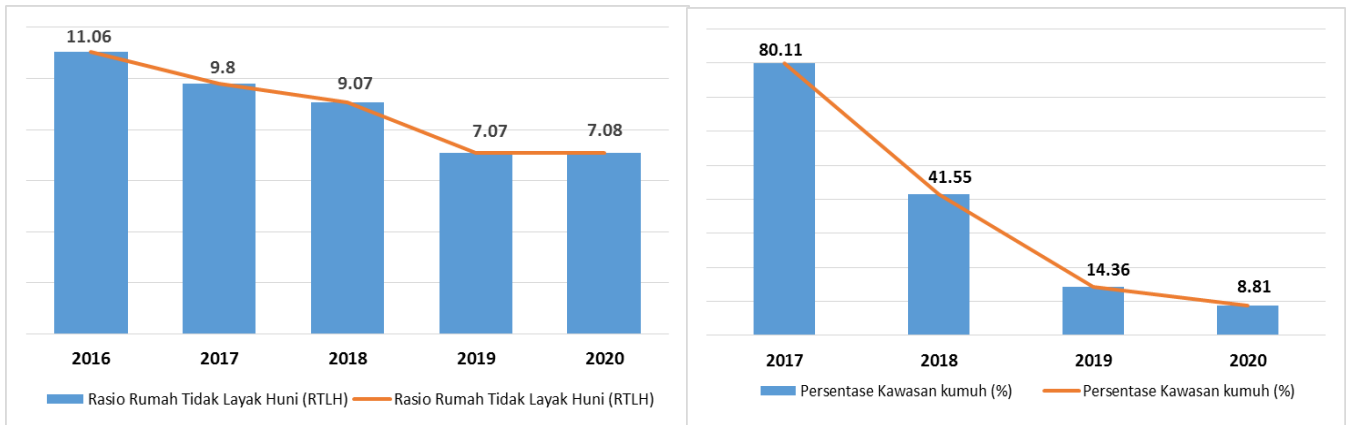
##### a) Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun capaian pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.87 dan gambar 2.80.

**Tabel 2.87**  
**Capaian Layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Backlog Kepemilikan Rumah (unit)	20.518	32.780	45.042	57.304	57.693
2.	Backlog Penghunian Rumah (unit)	18.788	29.183	39.578	49.973	50.113
3.	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	11,06	9,80	9,07	7,07	7,08
4.	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	671,84	671,84	<b>538,21</b>	279,12	96,46
5.	Kawasan yang ditangani (ha)	-	133,63	259,09	182,66	37,21
6.	Sisa Luas Kawasan Kumuh	-	<b>538,21</b>	279,12	96,46	59,25
7.	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani (%)		19,89	58,45	85,64	91,18
8.	Persentase Kawasan kumuh (%)	-	<b>80,11</b>	<b>41,55</b>	<b>14,36</b>	<b>8,81</b>

Sumber : Dinas Perkim Prov. Jateng, Dinas PERKIM dan LH Kab. Pekalongan, 2021



**Gambar 2.80**  
**Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase Kawasan Kumuh**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.87 dan gambar 2.80, fokus penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Permukiman Kumuh. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam program 100-0-100. Dengan asumsi 1 KK mempunyai 1 rumah, kekurangan pasokan (backlog) rumah Kabupaten Pekalongan masih cukup tinggi. Dari sisi kepemilikan setidaknya backlog Tahun 2020 mencapai 57.693 unit rumah, sedangkan dari sisi kependudukan sebanyak 50.113 unit rumah. Hal ini mengalami kenaikan dari Tahun 2016 yaitu dari sisi kepemilikan setidaknya backlog mencapai 20.518 unit rumah, sedangkan dari sisi kependudukan sebanyak 18.788 unit rumah atau meningkat 3 x lipat selama 5 (tahun) terakhir.

Kemudian untuk Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2020 sebesar 7,08 mengalami penurunan atau lebih baik dari Tahun 2016 sebesar 11,06. Penanganan Rehabilitasi RTLH Tahun 2020 melalui Rehab RTLH melalui BANKEU Pemerintah Desa, APBD Kabupaten, DAK Perumahan, serta Dana Desa. Program bedah rumah yang dikerjakan saat ini dilaksanakan dengan sasaran membangun rumah yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu yang salah satunya melalui program bersama antara Kodim 0710/Pekalongan dengan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Terkait dengan penanganan kawasan kumuh, dengan ditetapkannya SK Bupati Pekalongan No. 667/220 Tahun 2018 yang menetapkan luas kawasan kumuh sebesar **538,21 ha**. Tahun 2018 ada penambahan luas kawasan kumuh yang tertangani sebesar **259,09 ha** sehingga total luas yang tertangani sebesar **392,71 ha (58,45%)** dari **671,84 Ha** sehingga persentase kawasan kumuh yang belum ditangani masih ada sebesar **279,12 ha (41,55%)**.

Sedangkan pada tahun 2019 ada tambahan penanganan sebesar **182,66 ha** sehingga luas keseluruhan yang tertangani ada **575,38 ha (85,64%)**. Total luasan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar **96,46 ha (14,36%)** di Tahun 2019. Selanjutnya di Tahun 2020 ada tambahan penanganan sebesar 37,21 ha sehingga luas keseluruhan yang tertangani ada **575,38 ha (85,64%)**. Total luasan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani sampai dengan tahun 2020 sebesar **59,25 ha (8,81%)**

Terdapat beberapa kegiatan ataupun inisiasi masyarakat yang punya andil besar untuk penurunan kawasan kumuh, seperti **GENTONG HEBAT** (Gerakan Gotong Royong Hidup Bersih dan Sehat ), **BERJUMPA** (Bersih



Jum'at Pagi), **GEMA SAHE** (Gerakan Masyarakat Sapu Bersih Sampah dan Bongkar Helikopter/ jamban liar) serta **ABANG RUDI** (Ayo Bangun Rumah Sendiri). Selain itu adanya mendapatkan bantuan yang signifikan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), sangat mendukung dengan capaian pengurangan kawasan kumuh.



**Gambar 2.81**  
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

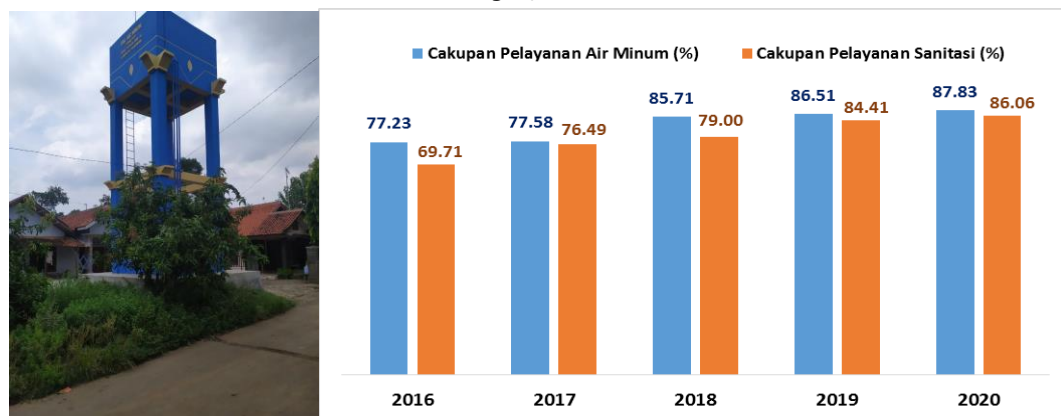
**b) Akses Air Minum dan Sanitasi**

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Kemudahan akses layanan air bersih dan sanitasi layak bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.88 dan gambar 2.82.

**Tabel 2.88**  
**Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

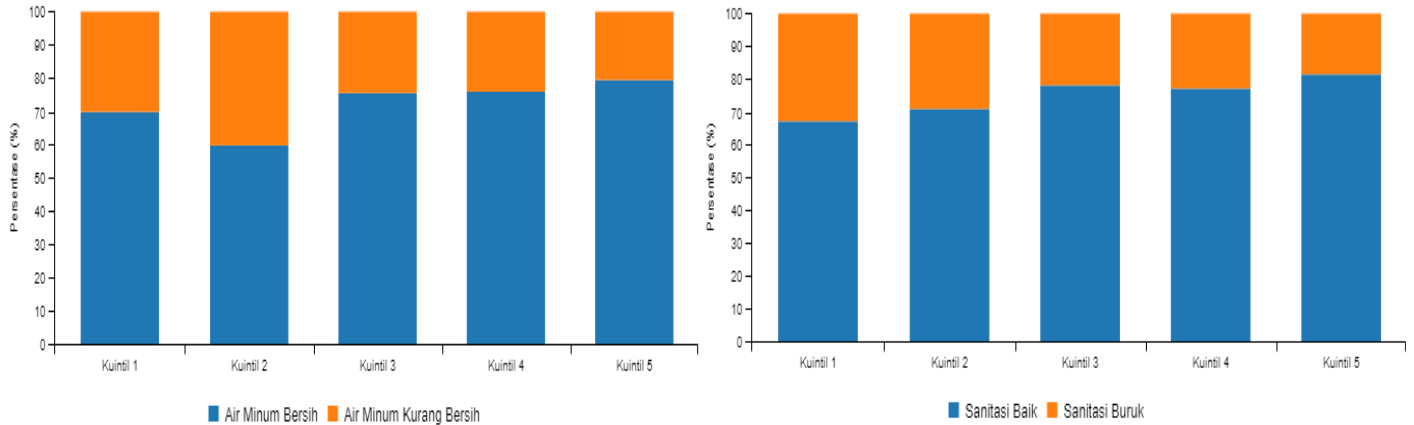
No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	77,23	77,58	85,71	86,51	87,83
2.	Cakupan Pelayanan Sanitasi (%)	69,71	76,49	79,00	84,41	86,06

Sumber : Dinas PERKIM dan LH Kab. Pekalongan, 2021



**Gambar 2.82**  
**Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.88 dan gambar 2.82, capaian pelayanan air minum ini meningkat dari tahun 2016 yaitu dari 77,23% menjadi 87,83% atau sejumlah 782.605 RT di Tahun 2020. Sedangkan sisanya sejumlah 12,17% atau 109.287 RT yang masih menggunakan sumber seadanya/belum terlayani. Sedangkan cakupan layanan sanitasi sampai tahun 2020 telah mencapai 86,06% meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,71%.



**Gambar 2.83**  
**Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Per Kuintil Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

Capaian Air Minum Layak cukup baik namun masih ada ketimpangan. Sekitar 35% RT di kuintil 1 dan 2 belum memiliki akses air minum layak. Capaian Sanitasi layak masih ada ketimpangan. Sekitar 30% RT di kuintil 1 dan 2 belum mendapatkan akses sanitasi yang layak.

**5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Tujuan Pelayanan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat, serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik Daerah guna mendukung terselenggaranya optimalisasi pembangunan Daerah secara dinamis.

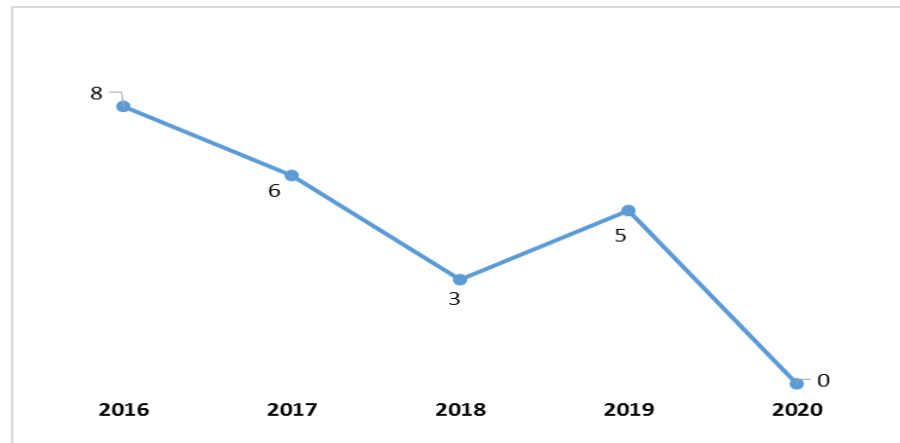
**a) Kondusivitas Wilayah**

Kondusivitas daerah Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, dengan tidak ada unjuk rasa selama tahun 2020.

**Tabel 2.89**  
**Jumlah Unjuk Rasa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Unjuk Rasa	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Politik	0	1	0	0	0
2.	Ekonomi	1	0	0	0	0
3.	Lainnya	6	5	3	5	0
	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2021



**Gambar 2.84**  
**Jumlah Unjuk Rasa**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

**b) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kamtramtibum) dan Penegakan Perda**

Selama kurun waktu 2016-2020 Rasio Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pekalongan naik dari 0,99 di Tahun 2016 menjadi 1,32 di Tahun 2020. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah juga diimbangi dengan penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 128 orang di Tahun 2019/2020 yang terdiri dari 87 orang ASN, 8 orang PTT dan 33 orang *outsourcing*. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 115 pegawai yang terdiri dari 77 orang ASN, 8 orang PTT dan 30 orang Banpol PP. Adapun rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.90.

**Tabel 2.90**  
**Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah Satpol PP	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2016	87	880.092	0,99
2.	2017	86	886.197	0,97
3.	2018	115	891.892	1,29
4.	2019	128	897.711	1,43
5.	2020	128	968.821	1,32

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Sedangkan persentase penyelesaian pelanggaran Perda turun dari 87,66% di Tahun 2019 menjadi 87,14% di tahun 2020 dengan jumlah pelanggaran perda jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 sebanyak 70 kasus yang dilaporkan dan terselesaikan sebesar 61 kasus. Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 sebanyak 38 kali kegiatan meliputi operasi penegakan perda dan peraturan perundangan lainnya, penertiban periklanan, pemberantasan miras, operasi penertiban pelajar serta pengawasan penegakan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.91.

**Tabel 2.91**  
**Penyelesaian Pelanggaran Perda**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Jml Pelanggar Perda	Jml Penyelesaian	Persentase (%)
1.	2016	150	130	86,67

No.	Tahun	Jml Pelanggar Perda	Jml Penyelesaian	Persentase (%)
2.	2017	240	203	84,50
3.	2018	269	230	85,50
4.	2019	300	263	87,66
5.	2020	70	61	87,14

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

### c) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling.

Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio jumlah Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan pada tabel 2.92 dan 2.93.

**Tabel 2.92**  
**Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2016	4.160	880.092	47,27
2.	2017	4.160	886.197	46,94
3.	2018	4.160	891.892	46,64
4.	2019	5.758	897.711	64,14
5.	2020	6.469	968.821	66,77

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

**Tabel 2.93**  
**Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah Poskamling	Jml Desa/Kelurahan	Rasio
1.	2016	1.664	285	5,84
2.	2017	1.664	285	5,84
3.	2018	1.675	285	5,88
4.	2019	1.675	285	5,88
5.	2020	1.685	285	5,91

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.92 dan 2.93, rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk mengalami kenaikan dari 47,27 di Tahun 2016 menjadi 66,77 di Tahun 2020. Sedangkan rasio poskamling per jumlah desa/kelurahan juga mengalami kenaikan dari 5,84 di Tahun 2016 menjadi 5,91 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah ikut menjaga keamanan dari segala macam tindak kriminal di lingkungannya masing-masing sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat dan musibah ataupun bencana alam.

### 6) Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 meliputi pelaksanaan program rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan dan

perlindungan sosial, juga alinea keempat UUD 1945 yang menyuratkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan umum.

Permasalahan utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial antara lain : (1)masih ada PMKS yang belum mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, (2)tingginya jumlah fakir miskin, (3)minimnya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka pemberdayaan PMKS, (4)masih tingginya jumlah RTLH (rumah tak layak huni) dan (5)belum optimalnya peran masyarakat. Adapun perkembangan pelayanan urusan sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.94.

**Tabel 2.94**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	11	11	23	23	23
2.	Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan sosial (%)	0,47	0,90	1,94	3,10	4,96
3.	Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi (%)	0,03	0,10	0,24	0,37	0,45
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial dan BPBD Kab. Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.94 dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan Sosial, ditunjukkan melalui persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari 0,47% di Tahun 2016 menjadi 4,96% atau sebanyak 4.273 jiwa di tahun 2020; dan persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi dari 0,03% di tahun 2016 menjadi 0,45% atau sebanyak 1.618 jiwa di tahun 2020.

## **b. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1) Tenaga Kerja**

Pelayanan urusan tenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja siap pakai, melalui pendidikan pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun perkembangan pelayanan urusan tenaga kerja dapat dilihat tabel 2.95.

**Tabel 2.95**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

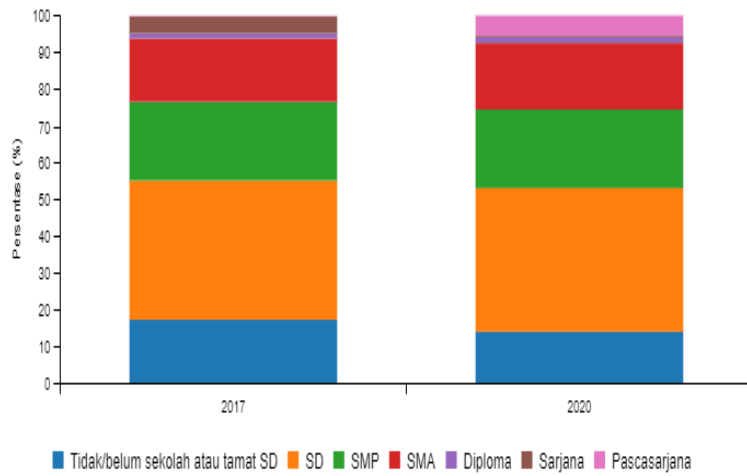
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bursa tenaga kerja (unit)	32	32	32	32	34
2.	Jumlah pencari kerja (orang)	6.236	6.514	7.657	7.580	4.811
3.	Persentase Pencari Kerja yang	2,81	22,87	50,54	58,66	30,95

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	ditempatkan (%)					
4.	Persentase tenaga kerja yang memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (%)	33,58	60,01	55,11	55,12	46,09
5.	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	9,97	22,55	54,40	54,69	68,07
6.	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33
7.	UMK (Rp)	1.463.000	1.583.698	1.721.637	1.859.885	2.018.161

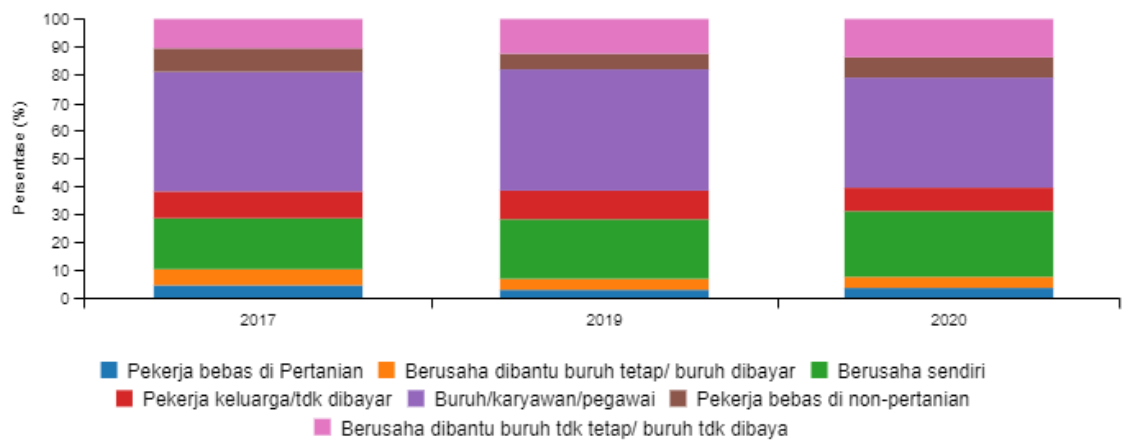
Sumber : DPMPTSP DAN NAKER Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.95 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jumlah bursa tenaga kerja tahun 2020 sebanyak 34 unit, sedikit lebih banyak dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) lebih didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tujuan membantu/memfasilitasi/menjembatani lulusan/alumni SMK untuk memperoleh informasi dan lowongan kerja dengan perusahaan yang telah ditunjuk sebagai penyedia kerja/lowongan kerja;
- b) Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar berdasarkan data dari jumlah Pencari Kerja (AK-1) tahun 2020 sebanyak 4.811 orang lebih sedikit dari tahun 2019 sebesar 7.580 orang;
- c) Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2020 sebanyak 1.489 orang (30,95%) dari 4.811 orang pencari kerja turun dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 4.447 orang (58,66%) dari 7.580 orang pencari kerja;
- d) Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan (%) Tahun 2020 menurun sebesar 46,09% dari 55,12% di tahun 2019. Hal ini disebabkan terjadinya adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun memasuki masa pension. Jumlah tenaga kerja yang mengikut sertakan program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 13.224 prang dari jumlah total sebanyak 28.692 orang;
- e) Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja naik dari tahun 2019 sebesar 54,69% menjadi 68,07% di tahun 2020. Jumlah pelatihan yang ditempatkan tahun 2020 sejumlah 452 orang dari jumlah total 664 orang lebih sedikit dari Tahun 2019 sebesar 676 orang dari jumlah total 1.236 orang. Pelatihan yang ddilaksanakan terdiri dari pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Usia Produktif, (BLK) baik APBD dan APBN;
- f) Jumlah perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan Tahun 2020 sebanyak 14 kasus dibagi Jumlah perselisihan tenaga kerja yang melapor sebanyak 15 kasus.
- g) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp 2.018.161,27 lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.859.885,05.



**Gambar 2.85**  
**Penduduk Bekerja Berdasar Pendidikan**  
**(2017 – 2020)**



**Gambar 2.86**  
**Penduduk Bekerja Status Pekerjaan**  
**(2017-2020)**

Dari data diatas Mayoritas penduduk bekerja Tahun 2020 berpendidikan SMP ke bawah sebesar 60.4%, dengan status buruh/karyawan 39%, turun dari 43,44% (2019). Bekeja sendiri naik dari 21,32% (2019) menjadi 23,54% (2020)

**2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak.

Perkembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.96.

**Tabel 2.96**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di	4,45	2,93	4,20	13,11	13,31

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	lembaga pemerintah (%)					
2.	Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga swasta (%)	6,23	6,95	6,83	9,11	9,11
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	24,44	24,44	26,66	26,66	26,66
4.	Rasio KDRT dalam setiap rumah tangga	0,0008	0,00091	0,00091	0,000012	0,000018
5.	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (%)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kab dan kec. (unit)	20	20	29	175	179

Sumber : DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.96 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Capaian persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan Tahun 2020 sebesar 13,31% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,11%. Data jumlah ASN perempuan tahun 2020 sebesar 15.001 orang lebih besar dari Tahun 2019 sebanyak 14.776 orang dari jumlah total pekerja perempuan sebanyak 112.668 orang;
- b) Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga swasta tahun 2020 sebesar 9,11% sama dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,11%. Data jumlah pekerja swasta perempuan Tahun 2020 sebesar 10.275 orang dari jumlah total perempuan yang bekerja sebesar 112.668 orang;
- c) Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif relatif sama sebesar 26,66% di tahun 2018-2020. Data jumlah anggota DPRD perempuan tahun 2020 sebanyak 12 orang dari total jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang;
- d) Rasio KDRT dari tahun 2019-2020 menunjukkan sedikit kenaikan dari 0,000012 (12 kasus) di Tahun 2019 menjadi 0,000018 (16 kasus) di Tahun 2020. Semua kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum dengan difasilitasi oleh P2TP2A. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya untuk terus melakukan fasilitasi pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan
- e) Jumlah pengaduan yg diselesaikan tahun 2020 sebanyak 52 sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2019 sebesar 51 kasus;
- f) Untuk memperkuat upaya tersebut sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 179 unit P2TP2A baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

### 3) Pangan

Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan ketahanan pangan, melalui program yang diarahkan pada fasilitasi ketersediaan dan cadangan pangan, pengendalian dan pengawasan fluktuasi harga pangan, pengembangan panganekaragaman serta pola konsumsi pangan masyarakat, peningkatan mutu dan keamanan pangan sehingga dapat membantu masyarakat di wilayah rawan pangan.

Penanganan daerah rawan pangan dilaksanakan dengan pembinaan pada Desa Mandiri Pangan melalui kelompok-kelompok afinitas yang ada di 6 (enam) Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Pekalongan yaitu masing-masing 1 (satu) desa di Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan



Lebakbarang, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Wonopringgo. Disamping itu, penanganan daerah rawan pangan juga dilaksanakan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan sasaran Kelompok Wanita Tani, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan capaian yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan urusan pangan Kabupaten Pekalongan selama tahun 2016-2020 adalah sebagaimana tabel 2.97.

**Tabel 2.97**  
**Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Ketersediaan Pangan</b>					
	▪ Produksi Gabah Kering Giling (GKG) (ton)	233.753	223.647	229.536	205.772	193.724
	▪ Beras (ton)	233.755	134.660	143.498	117.721	127.157
	▪ Jagung (ton)	10.152	6.074	8.281	11.315	14.287
	▪ Kedelai (ton)	26,4	32	248	293	337
<b>2.</b>	<b>Kebutuhan Pangan</b>					
	▪ Beras (ton)	73.353	84.401	82.594	80.000	69.720
	▪ Jagung (ton)	2.883	2.907	3.125	3.241	3.673
	▪ Kedelai (ton)	17.366	9.039	9.334	9.537	9.821
<b>3.</b>	<b>Surplus/Defisit</b>					
	▪ Beras (ton)	160.402	50.259	60.904	37.721	57.437
	▪ Jagung (ton)	7.268	3.166	5.156	8.074	10.614
	▪ Kedelai (ton)	-17.340	-9.007	-9.086	-9.244	-9.484

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.97, capaian Produksi Gabah Kering Giling (GKG) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2019 sebesar 205.772 ton mengalami penurunan sebesar 193.724 di Tahun 2020. Sedangkan ketersediaan beras jagung dan kedelai tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Produksi beras naik dari 117.721 ton di tahun 2019 menjadi 127.157 ton pada tahun 2020 dan mengalami surplus beras sebesar 57.437 ton.

Produksi jagung di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 14.287 ton sedangkan untuk kebutuhan jagung pada tahun 2020 adalah 3.673 ton sehingga adanya surplus jagung sebesar 10.614 ton. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 11.315.

Produksi kedelai di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 mencapai 337 ton meningkat dibandingkan dengan produksi tahun 2019 sebesar 293 ton. Produksi kedelai sebanyak 337 ton masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan yang mencapai 9.821 ton sehingga terjadi kekurangan atau defisit sebesar 9.484 ton sehingga mendatangkan kedelai dari luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Kemudian berkaitan dengan capaian pelayanan urusan pangan di Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan dalam tabel 2.98.

**Tabel 2.98**  
**Capaian Pelayanan Urusan Pangan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi & protein per Kapita					
	a. ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari)	2.425,57	2.343,30	2.343,30	2.440,00	2.600,00

	a. ketersediaan protein per kapita (gr/kapita/hari)	69,04	67,09	70,51	72,91	73,20
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,00	82,20	85,80	84,10	88,60

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.98 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a) Ketersediaan energi dan protein per kapita;

Berdasarkan perhitungan neraca bahan makanan tahun 2020 diperoleh bahwa angka ketersediaan energi per kapita sebesar 2.600 kkal/kapita/hari. Capaian tersebut sudah memenuhi angka Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang menyatakan bahwa angka ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan protein tahun 2020 sebesar 73,20 gr/kapita/hari naik dari Tahun 2019 sebesar 72,91 gr/kapita/hari dan telah memenuhi rekomendasi ketersediaan protein sebesar 63,00 gr/kapita/hari.

b) Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pekalongan naik dari 84,10 di tahun 2019 menjadi 88,60 di tahun 2020. Penghitungan skor PPH didapat dari data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan yang meliputi : (1) Padi-padian 25%, (2) Umbi-umbian 2,5%, (3) Pangan hewani 24%, (4) Minyak dan lemak 5%, (5) Buah dan biji berminyak 1%, (6) Kacang-kacangan 10%, (7) Gula 2,5% dan (8) Sayur dan buah 30%.

Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan produksi Daerah, melakukan pengelolaan cadangan pangan dan melakukan perdagangan bahan pangan. Pengelolaan cadangan pangan salah satunya dengan fokus pembinaan kelompok lumbung di wilayah Kabupaten Pekalongan lebih diarahkan pada upaya mempertahankan kelompok lumbung yang ada. Langkah tersebut diambil karena adanya kecenderungan menurunnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengelola lumbung pangan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengaktifkan kembali kelompok lumbung yang sudah tidak aktif juga telah dan akan terus dilaksanakan melalui pembinaan-pembinaan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Adapun data jumlah gudang/lumbung pangan di Kabupaten Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.99.

**Tabel 2.99**  
**Jumlah Lumbung Pangan Kabupaten Pekalongan**

No	Lokasi	Tahun	Nama kelompok
1	Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	2010	Tani Jaya
2	Desa Werdi Kec. Wonokerto	2010	Sido Makmur
3	Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan	2011	Sidodadi
4	Desa Sidosari Kec. Kesesi	2011	Karya Makmur
5	Desa Sumub Lor kec. Sragi	2011	Sumber Rejeki
6	Desa Pantirejo Kec. Kesesi	2013	Makmur Sejahtera
7	Desa Blimbing Wuluh Kec. Siwalan	2013	Srikandi
8	Desa Krandon Kec. Kesesi	2014	Sri Rejeki
9	Desa Getas Kec. Wonopringgo	2016	Randu Jaya
10	Desa Kedungjaran Kec. Sragi	2016	Kedungrejo
11	Desa Ketanonageng, Kecamatan Sragi	2019	Gemah Ripah

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2021

Pada Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan telah diselesaikan pembangunan Lumbung Pangan kepada kelompok tani di Desa Ketanonageng, Kecamatan Sragi dan telah diresmikan di bulan Januari 2020 oleh Bupati

Pekalongan. Bantuan Lumbung pangan masyarakat berkapasitas 40 ton, rice mill kapasitas 1,2 ton perjam dan lantai jemur sendiri berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan jumlah total Rp 500 juta. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga membantu dengan memberikan alat mesin pertanian yaitu 7 unit traktor dan 36 pompa air. Dengan adanya pembangunan lumbung pangan ini diharapkan Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu wilayah yang mempunyai tugas untuk menyangga ketahanan pangan di tingkat regional ini mampu menjaga swasembada beras.

#### 4) Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian ditujukan untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Pekalongan, baik menyangkut fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah, penanganan permohonan alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah dan penyelesaian permasalahan tanah lainnya.

Perkembangan pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel 2.100.

**Tabel 2.100**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	100,00	70,00	0,00	100,00	100,00

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan tahun 2020 sebesar 100% dengan perincian 3 (tiga) yang dilaporkan dan dapat diselesaikan semua. Sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 100,00% dengan perincian permasalahan pertanahan yang dilaporkan/dimohonkan untuk fasilitasi penyelesaiannya ada 3 (tiga) dan sudah diselesaikan semua yaitu (1)Fasilitasi permohonan pemanfaatan tanah sempadan sungai di Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi, (2)Fasilitasi pengadaan tanah untuk perluasan TPA Bojonglarang di Desa Linggo Asri Kecamatan Kajen dan (3) Fasilitasi tanah sisa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan tahun 2018 sebesar 0,00% dikarenakan selama tahun 2018 tidak ada permasalahan pertanahan yang menonjol. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 70,00%. Hal ini disebabkan penetapan lokasi belum keluar, sementara tahap pelaksanaan pengadaan lahan baru bisa dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi. Pada tahun 2017 permasalahan pertanahan yang mendapatkan penyelesaian ada 7 dari 10 permasalahan.

#### 5) Lingkungan Hidup

Kabupaten Pekalongan merupakan daerah sentra industri terutama industri batik dan tekstil. Jumlah kegiatan industri tekstil di Kabupaten Pekalongan yang potensial menghasilkan air limbah sekitar  $\pm 30$  unit untuk industri menengah dan  $\pm 12.400$  unit industri kecil yang meliputi industri pembatikan, *Printing/sablon*, *jeans wash*, pertenunan dan pewarnaan benang. Selain itu sebagian industri juga mulai beralih menggunakan bahan bakar batubara sekitar  $\pm 25$  unit industri.

Terdapat 6 (enam) sungai di Kabupaten Pekalongan yang berpotensi tercemar oleh limbah industri, yaitu : Sungai Sragi Lama (Rembun), Sungai Kapidodo (Kangkung), Sungai Slempong, Sungai Mrican, Sungai Meduri, dan

Sungai Sengkarang (Pencongan) dengan kondisi kualitas air di atas rata-rata baku mutu yang ditentukan.

Berbagai pihak terutama pelaku ekonomi berusaha menciptakan kondisi memaksimalkan untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Meskipun demikian semua pihak tetap berharap pengelolaan lingkungan harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan yang ada pada pemerintah daerah, maka partisipasi dan peran serta semua pihak sangat diperlukan. Perkembangan Pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.101.

**Tabel 2.101**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,42	53,56	48,26	48,26	62,52
2.	Persentase Pelayanan Pencegahan pencemaran air (%)	70,00	75,00	80,00	80,00	90,00
3.	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak(%)	40,00	48,00	52,00	52,00	60,00
4.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,01	0,11	0,11	0,02	0,02

Sumber : Dinas PERKIM dan LH Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.101 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari tahun 2019 sebesar 48,26 menjadi 62,52 di tahun 2020. IKLH 2018 belum memenuhi target sesuai yg direncanakan karena hasil pengujian kualitas air sungai dan udara di 4 lokasi belum dapat mempresentasikan nilai IKLH secara baik.
- Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air naik dari sebesar 80,00% (16 Perusahaan) di tahun 2018 dan 2019 menjadi sebesar 90,00% (18 Perusahaan) di tahun 2020.
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak naik dari sebesar 48,00% (12 Perusahaan) yang mentaati di tahun 2017 menjadi 52% (13 perusahaan) di tahun 2018 dan 2019 dan 60,00% (15 perusahaan) di tahun 2020.
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk relatif tetap pada tahun 2019-2020 sebesar 0,02. Kebutuhan kontainer sampah sebesar 514 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 120 unit kontainer sampah di Kabupaten Pekalongan.

Penanganan sampah di Kabupaten Pekalongan belum optimal. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah, membuat sampah belum terkelola dengan baik. Hal ini ditunjukkan Persentase pengurangan sampah diperkotaan tahun 2020 sebesar 26,34% naik dari tahun 2016 sebesar 18,00%. Persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 52,67% naik dari tahun 2019 sebesar 44,98%. Permasalahan utama pengangkutan sampah di Kabupaten Pekalongan adalah wilayah yang terkena rob, sehingga pelayanan pengangkutan sulit dijangkau. Sedangkan persentase pengoperasian TPA Tahun 2020 sebesar 97,19% naik dari tahun 2019 sebesar 73,00%. Namun demikian pengoperasian TPA ini belum maksimal disebabkan karena kendala pemilahan sampah yang ke TPA. Data penanganan sampah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

**Tabel 2.102**  
**Penanganan Sampah**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengurangan sampah diperkotaan (%)	33,30	33,50	34,50	18,00	26,34
2.	Persentase pengangkutan sampah (%)	33,45	33,50	34,00	44,98	52,67
3.	Persentase pengoperasian TPA (%)	58,00	59,20	60,35	73,00	97,19
4.	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (unit)	95	105	108	120	120

Sumber : Dinas PERKIM dan LH Kab. Pekalongan, 2021

### 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus ditangani sesuai kewenangan Daerah meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta profil kependudukan.

Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pelayanan bidang kependudukan berupa penerbitan dokumen kependudukan. Perkembangan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.103.

**Tabel 2.103**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (%)	63,83	69,85	76,18	85,89	86,78
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	87,93	90,99	91,53	95,57	95,26
3	Persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Bagi Wajib KTP EL-Pemula (%)	99,54	91,29	98,12	97,17	98,66
4	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (%)	70,40	81,79	86,71	91,94	100,00
5	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	24,77	71,59	75,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.103 beberapa data menunjukkan bahwa secara umum perkembangan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 63,83% menjadi 86,78% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam memiliki dokumen kependudukan.
- b) Rasio Bayi berakte Kelahiran mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 87,93 menjadi 95,26 di tahun 2020. Jumlah bayi ber akta kelahiran pada tahun 2020 adalah 28.578 jiwa, sedangkan Jumlah bayi pada tahun 2020

adalah 30.000 jiwa, sehingga angka realisasi sebesar 95,26%. Sedangkan Jumlah bayi ber akta kelahiran pada tahun 2019 adalah 87.753 jiwa, sedangkan Jumlah bayi pada tahun 2019 adalah 91.824 jiwa, sehingga angka realisasi sebesar 95,57%.

- c) Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik pemula bagi Wajib KTP–Elektronik pemula mengalami sedikit penurunan dari tahun 2016 sebesar 99,54% menjadi 98,66% tahun 2020. Jumlah kepemilikan KTP El pemula pada tahun 2020 adalah 693.224 jiwa, sedangkan Jumlah penduduk wajib KTP-El pemula sebesar 702.617 jiwa, sehingga realiasi 98,66%. Sedangkan jumlah kepemilikan KTP El pemula pada tahun 2019 adalah 677.316 jiwa, sedangkan Jumlah penduduk wajib KTP-El pemula sebesar 697.044 jiwa, sehingga realiasi 97,17%.
- d) Persentase penduduk usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 70,40% menjadi 100,00% di tahun 2020. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun ber-akta kelahiran pada tahun 2020 adalah 259.128 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2020 sebesar 259.128 jiwa, sehingga realiasi 100,00%. Sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun ber-akta kelahiran pada tahun 2019 adalah 257.338 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun pada tahun 2019 sebesar 279.894 jiwa, sehingga realiasi 91,94%.
- e) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) telah mencapai 100,00% dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Seluruh penduduk di Kabupaten Pekalongan seluruhnya telah memiliki KK, walaupun ada yang mengajukan sifatnya hanya perubahan atau penambahan anggota keluarga.
- f) Jumlah penerbitan Akta Kematian pada tahun 2020 adalah 27.526 dokumen, sedangkan jumlah pemohon Akta Kematian sebanyak 27.526 jiwa, sehingga angka realisasi 100,00%. Sedangkan jumlah penerbitan akta kematian pada tahun 2019 adalah 4.770 dokumen, sedangkan Jumlah Pemohon akte Kematian sebanyak pada tahun 2019 sebesar 4.770 jiwa, sehingga angka realisasi 100%
- g) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) baru efektif dilaksanakan di tahun 2018 bekerja sama dengan Mitra sekolah dikarenakan dan diolah oleh Pemerintah Pusat. Jumlah kepemilikan KIA pada tahun 2020 adalah 193.395 jiwa, sedangkan jumlah penduduk wajib KIA sebesar 257.233 jiwa, sehingga realisasi 75,18%. Sedangkan jumlah kepemilikan KIA pada tahun 2019 adalah 206.121 jiwa dan jumlah penduduk wajib KIA sebesar 287.917 jiwa, sehingga realisasi 71,59%. Tidak semua penduduk wajib KIA memanfaatkan layanan KIA terutama yang berusia 15-16 tahun. Karena usia tersebut sudah bisa direkam namun pencetakan KTP nya setelah berusia 17 tahun.

## 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pembangunan kemandirian masyarakat, Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan terhadap pentingnya partisipasi masyarakat karena masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga harus mampu berperan sebagai subyek yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini dititik beratkan pada upaya – upaya konkrit dan pendekatan yang tepat, sehingga mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin.

Adapun capaian pelayanan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.104.

**Tabel 2.104**  
**Capaian Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,47	0,49	0,48	1,00	1,00
2.	Persentase swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	18,00	6,60	21,47	18,88	23,15
3.	Cakupan sarana prasarana desa (%)	55,00	80,32	88,95	89,37	92,54

Sumber : DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.104 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Capaian rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) naik dari tahun 2016 sebesar 0,46 menjadi sebesar 1,00 di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 jumlah kelompok binaan LPM aktif sebanyak 272 unit dari total 272 unit LPM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya LPM dapat melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok binaan yang ada di desanya. Peningkatan sumber daya LPM menjadi tantangan penting untuk terus dilakukan pembenahan. Penataan kelembagaan LPM akan segera dilakukan seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b) Sedangkan capaian persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat cenderung naik selama kurun waktu 2016-2020. Capaian kinerja swadaya masyarakat tahun 2020 sebesar 23,15% lebih tinggi dari capaian tahun 2016 sebesar 18,00%. Jumlah swadaya masyarakat tahun 2020 sebesar 3,45 milyar dari total dana program pemberdayaan masyarakat sebesar 14.91 milyar. Sedangkan jumlah swadaya masyarakat tahun 2019 sebesar 4,49 milyar dari total dana program pemberdayaan masyarakat sebesar 23.85 milyar.
- c) Sampai akhir tahun 2020 cakupan sarana prasarana desa mencapai 92,54% meningkat dari tahun 2016 sebesar 55,00%. Jumlah sarana prasarana desa yang dibangun tahun 2020 sebesar 2.951 unit dari jumlah sarana prasarana desa total sebesar 3.189 unit. Capaian ini lebih besar dari tahun 2019 dengan jumlah kelompok pengelola sarana prasarana desa sebanyak 1.505 dari jumlah total sarana prasarana desa sebanyak 1.684 unit. Peningkatan cakupan sarana prasarana desa ini sejalan dengan meningkatnya kuantitas pembiayaan pembangunan sarana perdesaan baik melalui dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun swasta melalui CSR. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat menstimulasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga lain.

## 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB, yang ditandai dengan makin tingginya persentase peserta KB aktif. Upaya mendongkrak keaktifan peserta KB dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Pelayanan KB dilakukan di semua lini masyarakat dan

diperuntukkan bagi semua kalangan. Sasaran wilayahnya pun menjangkau hingga pelosok pedesaan dan kawasan yang terisolir.

Adapun Perkembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.105.

**Tabel 2.105**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,22	82,64	81,86	80,86	80,42
2.	<i>Unmet Need</i>	10,10	8,40	8,99	8,89	8,68
3.	Rata-rata jml anak per keluarga (anak)	2,40	2,19	2,06	2,09	2,11
4.	Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	81,13	83,93	83,94	85,62	84,68
5.	Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun (%)	1,20	1,30	1,09	1,64	1,71
6.	Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	82,88	81,28	81,42	79,70	78,37

Sumber : DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.105 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Cakupan peserta KB aktif tahun 2020 sebesar 80,42% lebih tinggi dari capaian tahun 2016 sebesar 80,22% namun lebih rendah dari capaian tahun 2019 sebesar 80,86%. Capaian ini dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah penyuluh KB, tingginya angka *drop out*, masih tingginya angka *unmetneed* serta rendahnya capaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Sampai dengan tahun 2020, jumlah peserta KB aktif sebanyak 141.985 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 176.559 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah peserta KB aktif sebanyak 149.498 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 184.879 orang;
- b) Capaian *Unmet Need* tahun 2020 sebesar 8,68% lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 10,10%. Sampai dengan tahun 2020 Jumlah PUS tidak ingin punya anak tetapi tidak ber-KB dan jumlah PUS ingin anak ditunda tetapi tidak ber-KB sebanyak 15.332 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 176.559 orang. Sedangkan di tahun 2019 jumlah PUS yang tidak menginginkan punya anak tetapi tidak ber-KB dan jumlah PUS ingin anak ditunda tetapi tidak ber-KB sebanyak 16.442 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 184.879 orang;
- c) Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2020 tercapai sebesar 2,11 lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 2,40. Penurunan rata-rata jumlah anak sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan program KKBPK dan kesadaran masyarakat untuk tidak memiliki anak dalam jumlah besar;
- d) Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tahun 2020 tercapai sebesar 84,68% lebih lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 81,13%. Sampai dengan tahun 2020, Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB sebanyak 7.629 orang dari jumlah total anggota UPPKS PUS sebanyak 9.009 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah anggota UPPKS yang ber-KB sebanyak 7.776 orang dari jumlah total anggota UPPKS PUS sebanyak 9.082 orang;
- e) Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun tahun 2020 sebesar 1,71% lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 1,20%. Sampai dengan



tahun 2020, jumlah PUS kelompok umur istri kurang dari 20 tahun sebanyak 3.074 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 176.559 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun sebanyak 3.028 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 184.879 orang;

- f) Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber KB tahun 2020 tercapai sebesar 78,37% lebih rendah dari capaian tahun 2016 sebesar 82,88%. Sampai dengan tahun 2020, Jumlah anggota BKB, BKR dan BKL yang ber-KB sebanyak 16.863 orang dari jumlah total anggota BKB, BKR dan BKL PUS sebanyak 21.517 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah anggota BKB, BKR dan BKL yang sudah ber KB sebanyak 17.196 orang dari total jumlah anggota BKB, BKR dan BKL PUS sebanyak 21.577 orang.

## 9) Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di Kabupaten Pekalongan adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat yang erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Pekalongan meliputi perhubungan darat yang dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan darat yang ada di Kabupaten Pekalongan. Perkembangan pelayanan angkutan darat di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.106.

**Tabel 2.106**  
**Perkembangan Pelayanan Perhubungan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat pelayanan transportasi daerah (%)	52,50	58,30	62,50	70,00	70,40
2.	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
3.	Rasio ijin trayek (%)	60,00	66,00	70,00	80,00	75,80
4.	Jumlah kendaraan wajib uji kir	4.688	4.792	4.491	4.538	4.259
5.	Jumlah uji kir angkutan umum	6.251	6.484	7.764	7.767	6.106
6.	Jumlah Terminal Tipe C	6	5	5	5	5
7.	Jumlah Perusahaan Angkutan Penumpang	120	121	17	25	25
8.	Jumlah Armada Angkutan Penumpang (unit)	380	387	387	566	571

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Jumlah Perusahaan Angkutan Barang	567	448	293	71	76
10.	Jumlah Armada Angkutan Barang (unit)	3.554	3.724	3.526	3.781	3.531

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.106 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Fasilitas keselamatan jalan

Tingkat pelayanan transportasi daerah diperoleh dari nilai rata-rata persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rasio izin trayek di Kabupaten Pekalongan. Tingkat pelayanan transportasi daerah naik dari tahun 2016 sebesar 52,50% menjadi 70,40% di tahun 2020. Pemasangan APILL dilaksanakan secara bertahap dan rasio izin trayek akan terus diupayakan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi;

Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) naik dari tahun 2016 sebesar 45,00% menjadi sebesar 65,00% di tahun 2020;

b) Angkutan Umum

Rasio izin trayek naik dari tahun 2016 sebesar 60,00% menjadi sebesar 75,80% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 belum ada penambahan trayek baru namun sudah dilakukan tahapan penetapan jalur trayek baru yang meliputi pelaksanaan survey, pembuatan kajian teknis trayek Doro - Petungkriyono dan sudah dibahas serta disepakati di Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan guna mendukung Petungkriyono sebagai destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada tambahan pengadaan bus antar jemput anak sekolah pada ruas jalan Talun – Doro – Karangdadap bantuan Kementerian Perhubungan;

c) Uji laik kendaraan

Jumlah capaian uji kir kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 7.767 unit menjadi 6.106 unit di tahun 2020 seiring mewabahnya pandemi COVID-19;

d) Terminal

Jumlah terminal tipe C di tahun 2016 sebanyak 6 unit dan tahun 2017-2020 berkurang 1 unit yaitu menjadi 5 (lima) unit karena pengalihan pengelolaan Terminal Kajeun dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar 2.87**  
**Terminal Bus Kajeun Kab. Pekalongan**

## e) Tingkat kecelakaan

Tingkat kecelakaan di Kabupaten Pekalongan seperti terlihat pada Tabel 2.107

**Tabel 2.107**  
**Tingkat Kecelakaan dan Jumlah Korban Kecelakaan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020**

	Jumlah Kecelakaan			Meninggal			Luka Berat			Luka Ringan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
PROVINSI JAWA TENGAH	19.016	25.962	21.396	4.115	4.141	3.508	97	96	48	21.967	30.555	24.495
Kabupaten Pekalongan	249	256	237	64	64	53	8	7	1	257	276	254

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.07 dapat dilihat bahwa tingkat kecelakaan di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 256 kasus menjadi 237 kasus di tahun 2020.

## f) Perkeretaapian

Di wilayah Kabupaten Pekalongan terdapat 1 stasiun yang masuk ke dalam Daerah Operasi IV Semarang yaitu Stasiun Sragi. Stasiun tersebut termasuk stasiun kereta api kelas 2 dan tidak ada kereta api yang berhenti distasiun ini kecuali jika terjadi persusulan antar kereta api.

## 10) Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ditandai dengan kecepatan arus informasi, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan e-government. Kemampuan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel dan transparan. *Good governance* di lingkungan pemerintah kabupaten harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pemerintah kabupaten urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya menyelenggarakan layanan informasi publik dan pemanfaatan IT dalam layanan pemerintahan kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam bentuk layanan informasi dapat berupa layanan informasi yang menggunakan berbagai macam produk teknologi informasi, baik media tercetak, audio, audio visual, internet dan sebagainya.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun 2020 telah diresmikan kantor baru Dinkominfo yang mulai dibangun pada tahun 2019. Pembangunan kantor Dinkominfo menggunakan dana APBD Kabupaten Pekalongan. Kantor baru Dinkominfo ini memiliki fasilitas data center yang memadai dan berfungsi untuk menyimpan data seluruh OPD di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, halaman Dinas Kominfo akan dijadikan ruang publik dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik.



**Gambar 2.88**  
**Gedung Baru Dinkominfo Kab. Pekalongan**

Peningkatan kualitas layanan publik salah satunya ditempuh melalui pemanfaatan *e-government*. Optimalisasi pemanfaatan *e-government* dilaksanakan dalam bentuk pembangunan Jaringan LAN (*Local Area Network*), penyediaan material jaringan komputer dan internet, pemasangan jaringan intranet di semua Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, pembuatan software aplikasi data terintegrasi berbasis desa dan peningkatan SDM pengelola jaringan TIK di semua Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Disamping itu sebagai upaya untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi, pemerintah daerah telah membangun fasilitas *hotspot* di 65 titik dalam area publik dan untuk menunjang telekomunikasi terdapat 146 menara/tower seluler tersebar di 19 kecamatan.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.108.

**Tabel 2.108**  
**Capaian Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase OPD yg memiliki <i>website</i> (%)	27,27	29,55	34,09	100,00	100,00
2.	Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis IT (buah)	12	14	14	10	70
3.	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (%)	50,00	60,00	75,00	80,00	80,00
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	5	5	5	5
5.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.108 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang memiliki *website* tahun naik dari 27,27% di tahun 2016 menjadi 100,00% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 semua Perangkat Daerah (45 perangkat daerah) telah mempunyai *website*. Setiap perangkat daerah telah dilengkapi infrastruktur pendukung web berupa *software*, *hardware*, tenaga pemeliharaan serta operator;

- b) Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah turun naik dari 12 buah sistem di tahun 2016 menjadi 70 buah sistem di tahun 2020. Sebagai upaya untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi yaitu dengan memberikan fasilitas hotspot di 45 titik dan 20 titik, jaringan antar OPD yaitu 25 OPD dengan kapasitas 110 mbps pada tahun 2018 dan terjadi peningkatan kapasitas pada tahun 2019 yaitu 210 mbps, ketersediaan *Broadband Acces* 19 Kecamatan, ketersediaan jaringan 4G/3G pada 19 Kecamatan dalam area publik Kabupaten Pekalongan. Demikian pula dengan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah juga telah memanfaatkan teknologi Informasi yaitu dengan menggunakan Aplikasi, yaitu : Monev LPSE, SAKIP, SIMONEV, SIMPEG, SIMPEL, SIPEDU, e-Planning, E-TAX MONITORING, SIMKEUDA dan KAJEN RODO;
- c) Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (%) naik dari tahun 2016 sebesar 50,00% menjadi 80,00% di tahun 2020. Pada Tahun 2020 telah selesai dibangun jaringan *Fiber Optic (FO)* intranet di kompleks kantor Pemerintah Daerah serta di 25 Perangkat Daerah); dan
- d) Jumlah *website* milik Pemerintah Daerah relatif sama selama 5 tahun terakhir yaitu [www.pekalongankab.go.id](http://www.pekalongankab.go.id).

### 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil.

Perkembangan pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.109.

**Tabel 2.109**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Koperasi dan**  
**Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kinerja koperasi dan UMKM aktif (%)	48,12	48,30	49,50	46,58	37,18
2.	Jumlah Koperasi/KUD (unit)	571	579	586	586	623
3.	Persentase Koperasi Aktif (%)	60,30	61,50	65,70	66,55	37,56
4.	Persentase Koperasi Sehat (%)	30,00	30,40	30,20	30,20	35,04
5.	Jumlah UKM Binaan (unit)	537	535	546	775	825
6.	Persentase Jumlah Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UKM (%)	87,75	70,00	83,00	83,79	84,65

Sumber : Dinperindagkop UKM Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.109 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Persentase kinerja koperasi dan UMKM aktif fluktuatif namun mengalami penurunan dari 48,12% di tahun 2016 menjadi 37,18% di tahun 2020. Sampai dengan Tahun 2019, jumlah koperasi aktif menurun dengan tahun sebelumnya, sehingga ada penurunan capaian. Kemudian jumlah UMKM yang mendapatkan binaan meningkat, namun jumlah ini tidak terlalu memberikan peningkatan capaian yang tinggi;

- b) Jumlah koperasi dalam kurun 5 tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 berjumlah 571 unit dan meningkat menjadi 623 unit di tahun 2020.
- c) Persentase koperasi yang aktif, mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 60,30% menjadi 37,56% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 234 unit dari jumlah total koperasi 623 unit, menurun dari Tahun 2019 sebanyak 390 unit dari jumlah total koperasi 586 unit;
- d) Persentase koperasi sehat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 30,00% menjadi 35,04% pada tahun 2020. Hal ini dapat menunjukkan bahwa koperasi semakin bagus dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan usahanya, sehingga mendapatkan penilaian sebagai koperasi sehat. Sampai dengan tahun 2020, jumlah koperasi sehat sebanyak 82 koperasi dari jumlah total 234 koperasi, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 177 koperasi dari jumlah total 586 koperasi;
- e) Jumlah Usaha Kecil Mikro (UKM) binaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 sebanyak 537 unit menjadi 825 unit di tahun 2020; dan
- f) Sedangkan Persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UKM juga mengalami kenaikan dari 87,75% di tahun 2016 menjadi 84,65% di tahun 2020.

## 12) Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. PMA sebagai salah satu komponen aliran modal dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini.

Kebijakan pembangunan dalam bidang Penanaman Modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi Daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset Daerah. Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi maupun nilai tukar rupiah sehingga berpengaruh pada iklim usaha yang kondusif.

Berbagai upaya diperlukan dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan usaha penanaman modal, agar mencapai tujuan yang diharapkan dan sekaligus juga mencegah akibat negatif yang mungkin timbul. Di antaranya melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang

penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dan keamanan berusaha.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Daerah dalam menggali potensi dan menciptakan peluang penanaman modal. Adapun perkembangan pelayanan urusan penanaman modal Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.110.

**Tabel 2.110**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	1,766	2,315	1,266	1,297	1,193
2.	Lama proses perijinan (hari)	7	7	5	5	5
3.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	16	8	52	111	210

Sumber : DPMPTSP NAKER Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.110 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Realisasi jumlah nilai investasi berskala nasional untuk PMDN turun dari tahun 2019 sebesar 1,297 trilyun menjadi 1,193 trilyun di tahun 2020. Hal ini merupakan realisasi investasi penanaman modal sektor PMDN berdasarkan data dari *OSS (online single submission)* yang telah memiliki hak akses, secara otomatis dimulai dari 1 milyar dari rata-rata non perseorangan;
- b) Lama proses pelayanan perizinan pada DPMPTSP NAKER Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 7 hari di tahun 2016 menjadi 5 hari di tahun 2018-2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi secara Elektronik dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah, pasal 28;
- c) Jumlah investor mengalami peningkatan dari 16 investor di tahun 2016 menjadi 210 investor di tahun 2020. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah investor dihitung berdasarkan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Modal, jumlah investor dihitung berdasarkan nilai investasi sebesar 1 milyar ke atas. Jumlah investor tahun 2016 sebesar 16 investor dan Tahun 2017 sebesar 8 investor. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlah investor sebesar 55 investor, tahun 2019 sebesar 111 investor dan tahun 2020 sebesar 210 investor yang merupakan data realisasi investasi penanaman modal Sektor PMDN berdasar perizinan diterbitkan melalui *Online Single Submission (OSS)* dan realisasi investasi berdasarkan LKPM online minimal 1 M.

### 13) Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran

tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain (1)masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2)masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat (3)masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan; (4)belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sementara itu permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1)masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2)masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3)terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4)belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Adapun perkembangan pelayanan urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.111.

**Tabel 2.111**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat kualitas pemuda, olahraga dan teknologi (%)	35,21	41,67	59,72	60,83	33,33
2.	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional (%)	20,00	25,00	87,50	62,50	0,00
3.	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional (%)	25,64	33,34	25,00	53,33	0,00
4.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	40	40	44	44	47
5.	Jumlah organisasi olahraga (klub)	24	24	20	20	23
7.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : *Dinporapar Kab. Pekalongan, 2021*

Dari tabel 2.111 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Tingkat kualitas pemuda, olah raga dan teknologi merupakan capaian dari prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional, persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional dan persentase jumlah hasil riset dan krenova yang bisa direkomendasikan untuk dimanfaatkan dengan capaian di tahun 2020 sebesar 33,33% menurun dari capaian tahun 2019 sebesar 60,83% karena adanya pandemi COVID-19 sehingga ada kegiatan kepemudaan dan olahraga yang tidak dapat dilaksanakan;
- b) Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional tahun 2019 sebesar 62,50% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 20,00%. Realisasi tahun 2019 diperoleh dari target 8 prestasi dan tercapai 5 prestasi (3 prestasi tingkat provinsi dan 2 prestasi tingkat nasional). Jika dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar sebesar 7 prestasi (87,50%). Sedangkan untuk tahun 2020 capaian 0,00% karena kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19;
- c) Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional tahun 2019 sebesar 53,33% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 25,64%. Pada tahun 2019 realisasi persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional dari 15 cabang yang dikirimkan, sebanyak 8 cabang olahraga mendapatkan medali/ juara. Dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan capaian prestasi yaitu sebesar 6 cabang olahraga. Sedangkan



untuk tahun 2020 capaian 0,00% karena kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19.

#### 14) Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Ketersediaan data statistik daerah dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan data statistik daerah penyelenggaraannya dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama antara BPS dengan instansi pemerintah.

Adapun capaian pelayanan urusan statistik di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel 2.112.

**Tabel 2.112**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Statistik**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase data/informasi/statistik daerah yang digunakan dalam perencanaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Buku Kabupaten Dalam Angka (dok)	1	1	1	1	1
3.	Buku PDRB Kabupaten (dokumen)	1	1	1	1	1

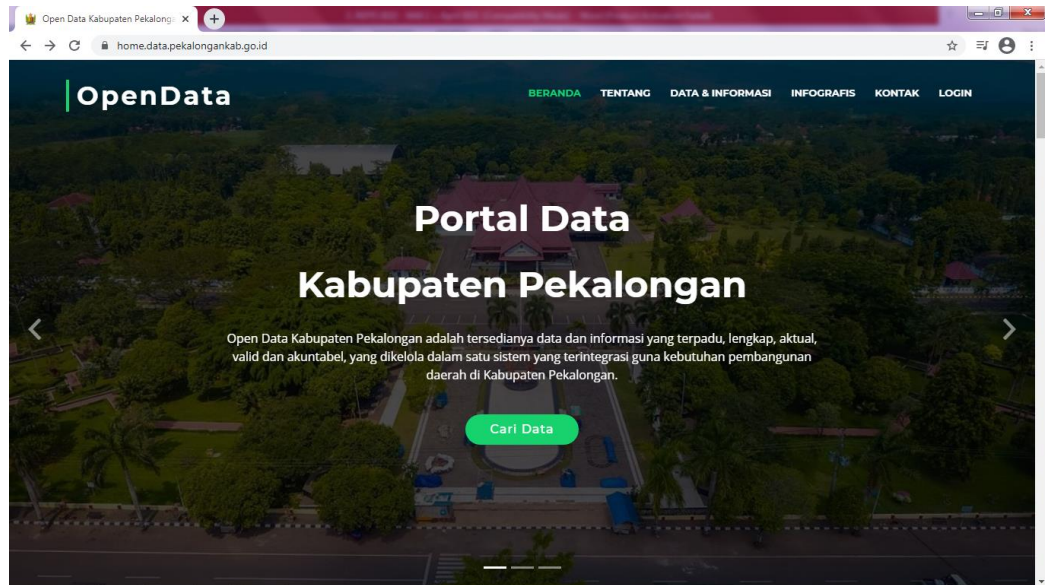
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 1.112, kemudahan untuk mengakses data statistik melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pemerintah daerah telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Pekalongan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas. Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait di tingkat Pusat dan Daerah.

Capaian kinerja sejak tahun 2016-2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala daerah antara lain :

- a) Buku Kabupaten Pekalongan Dalam Angka (DDA);

- b) Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), untuk memberi gambaran mengenai aktivitas perekonomian daerah per sektor pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- c) Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020;
- d) E-data Sektoral di portal data *www.data.pekalongankab.go.id*;
- e) Kabupaten Pekalongan dalam Infografis.



**Gambar 2.89**  
**E-data Sektoral Kab. Pekalongan**  
*(www.data.pekalongankab.go.id)*

### 15) Persandian

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas negara.

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebelumnya kedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan persandian di lingkungan pemerintah daerah diwadahi dalam lingkup sekretariat daerah. Sekarang sesuai ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf e peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan bidang persandian tergabung

bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta perumpunan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Adapun capaian pelayanan urusan persandian di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel 2.113.

**Tabel 2.113**  
**Perkembangan Pelayanan Urusan Persandian**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, 2021

Pada tabel 2.113. Persentase pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah telah tercapai 100% dalam kurun waktu 2015-2019. Urusan persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Namun demikian peran dan fungsi persandian belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kualitas sumber daya manusia persandian, yang belum memahami apa yang menjadi pekerjaannya seutuhnya. Sehingga organisasi perangkat daerah belum bisa memanfaatkan persandian secara utuh. Walaupun demikian pada hakekatnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan akan terus meningkatkan pelayanan sehingga dapat membantu organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

## 16) Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Pekalongan di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalan nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tradisi baru yang muncul dan berkembang di masyarakat pada era globalisasi teknologi ini sangat dimungkinkan, karena adanya arus informasi yang tanpa batas (*word without boundaries*). Oleh sebab itu pengembangan nilai-nilai baru yang positif amat penting untuk membentuk sikap mental masyarakat madani.

Kabupaten Pekalongan kaya akan budaya tradisional. Berbagai macam kesenian tradisional banyak dimiliki beberapa desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan yang tentu saja dengan ciri khas masing-masing. Keanekaragaman itu tidak memecah belah masyarakat tapi justru semakin memperkaya khasanah budaya di daerah Kabupaten Pekalongan. Beberapa ragam budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan antara lain:

### a) Agenda Syawalan

Upacara Tradisi Syawalan adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Rangkaian acara dalam kegiatan ini terdiri dari Ngarak Tumpeng Nasi Megono (Megono Gunung)

- setinggi 2 meter, pemotongan tumpeng oleh Bupati Pekalongan dan diakhiri dengan makan nasi megono gratis bagi para pengunjung.
- b) Kesenian Kuntulan/Sirkus "Gralis Budaya", Desa Sabarwangi Kec. Kajen  
Penampilan yang memukau dan terkesan mengerikan menjadikan identitas kesenian ini. Tetapi justru disitulah daya tarik yang dimiliki Gralis Budaya untuk merebut perhatian penonton.
  - c) Kesenian Kuda Kepang  
Kesenian Kuda Kepang dari Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Kesenian yang menggunakan Kuda Kepang sebagai sarana utama ini menyuguhkan berbagai atraksi yang menarik. Tarian - tarian dan alunan musik yang begitu harmonis menjadi perpaduan yang indah di setiap penampilan. Biasa dipentaskan pada acara - acara sedekah bumi, hajatan penyambutan tamu, HUT Kemerdekaan, Hari Jadi Kabupaten Pekalongan dan lain-lainl.
  - d) Kesenian Jaran Ilir Kecamatan Sragi  
Sekelompok pemuda - pemudi yang terpanggil untuk ikut meramaikan dunia seni dan budaya di Kabupaten Pekalongan. Mereka membangun kreatifitas dan berhasil menciptakan seni yang berbeda dari biasanya.
  - e) Kesenian Tari Sintren  
Sintren adalah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa Kesenian ini terkenal di pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kesenian Sintren Pekalongan dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis/magis yang bersumber dari cerita cinta kasih. Sintren Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia untuk kategori atau domain seni pertunjukan. Penetapan Karya Budaya Sintren sebagai salah satu WBTb itu disampaikan pada acara Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Indonesia Tahun 2019.



**Gambar 2.90**  
**Kesenian Tari Sintren Kabupaten Pekalongan**

Selain hal tersebut di atas, beberapa kegiatan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan acara keagamaan, festival budaya, pameran hasil pembangunan dan pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.



**Gambar 2.91**  
**Pagelaran Wayang Kulit di**  
**Kabupaten Pekalongan**

Adapun perkembangan pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.114.

**Tabel 2.114**  
**Capaian Perkembangan Pelayanan Urusan Kebudayaan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penyelenggaraan fasilitasi seni dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Organisasi Seni dan Budaya yang dibina (%)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	3	3	3	3	3
4.	Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%)	56,00	61,00	63,20	63,49	66,00
5.	Jumlah grup kesenian (unit)	221	235	257	257	257
6.	Jumlah Misi Kesenian (kali)	12	15	12	13	2
7.	Jumlah gedung kesenian (unit)	1	1	1	1	1
8.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	37	40	82	101	2
9.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.114 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Persentase penyelenggaraan fasilitasi seni dan budaya dari tahun 2016-2020 selalu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan capaian 100%. Tahun 2019 sebanyak 82 penyelenggaraan seni dan budaya yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk tahun 2020 hanya ada 2 penyelenggaraan seni dan budaya yang telah difasilitasi karena adanya pandemi COVID-19;
- b) Persentase organisasi seni dan budaya yang dibina meningkat dari tahun 2016 sebesar 99,00% menjadi 100,00% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 jumlah organisasi seni dan budaya yang dibina sebanyak 104 unit;
- c) Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk relatif sama dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 3 per 10.000 penduduk;

- d) Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya juga meningkat dari tahun 2016 sebesar 56,00% menjadi 66,00% di tahun 2020. Jumlah keikutsertaan festival seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebanyak 4 kali dari jumlah total 6 kali. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 karena adanya pandemi COVID-19 dengan jumlah keikutsertaan festival seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional sebanyak 40 kali dari jumlah total 63 kali.

**17) Perpustakaan**

Sebagai pelaksana salah satu urusan wajib dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus menggiatkan kegiatan perpustakaan sampai dengan revitalisasi perpustakaan desa. Perpustakaan didorong untuk terus berinovasi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul mulai dari desa. Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan adalah kunci dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Perpustakaan bukan lagi tempat belajar kontekstual akan tetapi sebagai tempat transfer ilmu dan aktivitas masyarakat. Diharapkan program kegiatan yang sudah dijalankan, setiap lurah ataupun kepala desa yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat semakin terbuka wawasannya bahwa merevitalisasi perpustakaan desa sebagai sarana berkegiatan masyarakat dapat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.



**Gambar 2.92**  
**Perpustakaan Desa Ketitang Kidul,**  
**Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 merata di 19 kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat budaya baca masyarakat Kabupaten Pekalongan terus membaik. Adapun indikator capaian pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat tabel 2.115.

**Tabel 2.115**  
**Capaian Pelayanan Urusan Perpustakaan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (unit)	175	177	178	186	187
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	53.819	53.151	55.936	71.699	14.469
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	39.863	41.743	46.780	50.414	52.778

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.115 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) meningkat dari tahun 2016 sebanyak 175 unit menjadi 187 unit di Tahun 2020. Sedangkan jumlah perpustakaan desa yang sudah memenuhi standart pada tahun 2019 sebanyak 82 perpustakaan dan ada penambahan sebanyak 2 unit di tahun 2020 sehingga total menjadi 84 unit;
- b) Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 53.819 orang menjadi 71.699 orang di tahun 2019. Namun demikian jumlah pengunjung mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 14.469 orang karena pandemi COVID -19 sehingga perpustakaan tutup sepanjang Bulan Maret-Juni 2020 tutup, armada perpustakaan dan pameran juga tidak dilaksanakan;
- c) Jumlah koleksi buku bacaan yang tersedia di perpustakaan semakin bertambah dari tahun 2016 sebanyak 39.863 eksemplar menjadi 52.778 eksemplar di tahun 2020. Ada tambahan sekitar 2.364 eksemplar di tahun 2020 dari tahun 2019.

### 18) Kearsipan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan melakukan pengelolaan arsip secara baku. Dari waktu ke waktu volume arsip dari berbagai Perangkat Daerah akan terus mengalami pertambahan. Dengan pertambahan volume arsip ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola, secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berpijak dari kenyataan itu, maka pengelolaan arsip tidak dapat dilepaskan dari setiap komponen yang ada di dalam organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Adapun komponen yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan arsip ada beberapa faktor antara lain : (1) Sumber daya manusia, (2) sarana dan prasarana yang memadai dan (3) tempat penyimpanan yang nyaman atau representatif. Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan pada kurun waktu tahun 2015-2019 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada. Hal ini dapat dilihat tabel 2.116.

**Tabel 2.116**  
**Capaian Pengelolaan Pelayanan Kearsipan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengelolaan arsip secara baku (%)	26,67	37,78	48,89	60,00	60,00
2.	Jumlah arsip tekstual permanen (berkas)	769	1.191	1.687	2.207	2.527
3.	Jumlah penyelamatan arsip tekstual (dokumen)	103.233	140.733	143.216	224.591	224.591

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.116 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) Persentase pengelolaan arsip secara baku meningkat dari tahun 2016 sebesar 26,67% menjadi 40,00% di tahun 2020. Namun capaian ini menurun dari Tahun 2019 sebesar 60,00%. Tahun 2017 jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan pengelolaan arsip secara baik sebanyak 17

Perangkat Daerah, tahun 2018 ada 22 Perangkat Daerah dan Tahun 2019-2020 ada sebanyak 27 Perangkat Daerah;

- (b) Untuk menjaga dan mengamankan arsip-arsip permanen dari kerusakan fisik arsip, maka perlu dilakukan alih media arsip dari arsip tekstual ke media elektronik. Hal ini dilakukan karena sifat dari arsip permanen sangat penting dan berlaku dalam kurun waktu yang lama. Jumlah alih media arsip ke media elektronik tahun 2017 sebanyak 1.191 berkas arsip, tahun 2018 sebanyak 1.687 berkas arsip, tahun 2019 sebanyak 2.207 berkas arsip dan tahun 2020 sebanyak 2.527 berkas arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- (c) Arsip tekstual merupakan arsip yang masih dalam bentuk fisik arsip (kertas) baik arsip dinamis maupun arsip statis, yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca sehingga mudah rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dengan melakukan penataan arsip yang masih kacau dan disimpan dalam tempat penyimpanan arsip sesuai standar penyimpanan arsip seperti *rool opack*. Pada tahun 2017 jumlah arsip yang sudah tertata sebanyak 140.733 dokumen, tahun 2018 sebanyak 143.216 dokumen, tahun 2019-2020 sebanyak 224.591 dokumen.

### c. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1) Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Selain hal tersebut, fokus utama pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah pembangunan pangan masyarakat berbasis perikanan, dengan semakin mendekatkan produk perikanan pada masyarakat baik melalui pengelan teknologi olahan, diversifikasi olahan dan pemasaran produk olahan perikanan. Para pelaku pengolahan perikanan perlu mendapat pembinaan, peningkatan pengetahuan dan dukungan bantuan sarana produksi.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.117.

**Tabel 2.117**  
**Capaian Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	ton	9.739,63	11.162,22	12.805,51	13.705,00	13.898,00
2.	Perikanan Tangkap	ton	3.270,29	4.036,18	5.178,13	5.305,58	5.381,26
3.	Perikanan Budidaya						
	a. Tambak	ton	5.465,26	6.384,62	6.662,77	7.129,89	7.135,43
	b. Kolam	ton	1.004,08	1.052,24	1.178,48	1.269,53	1.381,31
4.	Rata-rata Pendapatan Nelayan	Rp/bulan	961.623	1.020.900	1.179.787	1.291.621	1.403.178
5.	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/bulan	1.614.506	1.803.051	1.961.685	2.026.438	2.156.844

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

Sesuai dengan tabel 2.117 di atas, capaian indikator kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut :



**a) Pengembangan Budidaya Perikanan**

Pada Perikanan budidaya, luas lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2020 seluas 567,50 Ha menurun dari tahun 2016 sebesar 791,35 Ha. Sedangkan jumlah pembudidaya tambak tahun 2020 sebesar 983 orang, menurun dari tahun 2016 sebesar 1.508 orang. Namun demikian produksi tambak pada tahun 2020 mencapai 7.135,43 ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5.465,26 ton.

Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2020 seluas 73,20 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.381,31 ton, lebih banyak dari tahun 2016 yang mencapai 50,90 ha dengan produksi sebanyak 1.004,26 ton. Jumlah pembudidaya kolam menurun dari tahun 2016 sebesar 2.203 orang menjadi 1.647 orang di tahun 2020. Sementara itu Produksi Benih BBI meningkat dari tahun 2016 sebesar 986.000 ekor menjadi 1.286.633 ekor di tahun 2020. Perkembangan dari budidaya perikanan di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.118.

**Tabel 2.118**  
**Perkembangan Perikanan Budidaya**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Tambak	Ha	791,35	791,35	791,35	789,65	567,50
2.	Jumlah Pembudidaya Tambak	Orang	1.474	1.508	902	808	983
3.	Produksi Tambak	Ton	5.465,26	6.384,62	6.662,77	7.129,89	7.135,43
4.	Luas Lahan Kolam	Ha	50,90	50,90	50,90	68,40	73,20
5.	Produksi Kolam	Ton	1.004,26	1.052,24	1.178,48	1.269,53	1.381,31
6.	Jumlah Pembudidaya Kolam	Orang	2.203	2.203	1.648	1.674	1.674
7.	Produksi Benih BBI	Ekor	986.000	1.081.000	1.140.000	1.230.460	1.286.633

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

**b) Pengembangan Perikanan Tangkap**

Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, penyediaan sarana penangkapan ikan dan peningkatan fasilitas TPI baik TPI Wonokerto maupun TPI Jambean.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 5.305,58 ton meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 3.172,25 ton. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan untuk penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan juga karena faktor cuaca yang cukup mendukung untuk operasi penangkapan ikan sepanjang tahun 2015-2019.

Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan TPI Jambean pada tahun 2020 sebesar 4.039,86 ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebanyak 3.000,26 ton. Nilai raman TPI Wonokerto dan TPI Jambean tahun 2020 mencapai Rp. 16.134.790,00 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 9.000.135,00. Perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.119.

**Tabel 2.119**  
**Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.270,29	4.036,18	5.178,13	5.305,58	5.381,26

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Alat Tangkap	Unit	377	340	445	405	336
3.	Jumlah Perahu Motor Tempel	Unit	341	341	425	387	305
4.	Jumlah Kapal Motor	Unit	36	38	20	18	31
5.	Jumlah Nelayan	Ha	10.197	11.157	11.318	12.999	10.226
6.	Produksi TPI Wonokerto	Ton	1.321,50	1.815,81	2.687,59	1.694,50	2.042,73
7.	Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto	Ribu (Rp)	4.500.086	5.001.322,	7.442.459	5.698.829	8.789.488
8.	Produksi TPI Jambean	Ton	1.678,76	1.700,50	2.066,42	1.267,81	1.997,13
9.	Nilai Raman Lelang TPI Jambean	Ribu (Rp)	4.500.049	5.000.540	6.140.456	5.707.100	7.345.302

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

### c) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan diutamakan untuk mendukung peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran ikan dengan kegiatan-kegiatan seperti penyediaan sarana pengolahan ikan dan promosi produk perikanan melalui program memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) yang diharapkan meningkatnya animo masyarakat terhadap berbagai olahan ikan serta semakin disadari bahwa nilai gizi yang terkandung dalam ikan /olahan ikan cukup tinggi.

Perkembangan Pengolahan Ikan di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.120.

**Tabel 2.120**  
**Perkembangan Produksi Pengolahan Ikan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Capaian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Unit Pengolah Ikan	Unit	421	421	430	430	430
2.	Jumlah Pengolah/ Pemasar Ikan	Orang	732	732	732	732	732

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.120, perkembangan jumlah unit pengolah ikan tahun 2019 sebanyak 430 unit tidak ada penambahan pada tahun 2020, jumlah pengolah/ pemasar ikan tahun 2019 sebanyak 732 orang dan tidak ada penambahan di tahun 2020.

### d) Pengembangan Sistem Penyuluhan

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan program penyuluhan serta mendukung peningkatan data statistik perikanan.

### e) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar dilaksanakan untuk mendukung penataan dan perbaikan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kegiatan penebaran ikan di perairan umum dan Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan.

## 2) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap

perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata.

Salah satu objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Pekalongan sekarang ini adalah kawasan Kecamatan Petungkriyono sebagai *National Natural Heritage* dengan alamnya indah serta udara yang sejuk, memikat wisatawan untuk datang ke sana. Baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan pariwisata di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel 2.121.

**Tabel 2.121**  
**Capaian Pelayanan Urusan Pariwisata**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Indikator (Ha)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	115.307	129.542	140.430	236.244	115.756
2.	Nilai pendapatan sektor pariwisata (Rp.ribu/tahun)	600.358,5	611.293	667.865,5	1.697.036,5	802.135,5

Sumber : *Dinporapar Kab.Pekalongan, 2021*

Dari Tabel 2.121 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 sejumlah 115.756 orang menurun dari tahun 2019 sebesar 236.244 orang sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19. Jumlah tersebut diperoleh dari kunjungan objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah yaitu Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri.

Disamping objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, juga dikembangkan beberapa objek wisata yang dikelola masyarakat antara lain Curug Muncar, Curug Bajing, Curug Bidadari, Watuireng, Arung Jeram Sungai Lolong, Wana Wisata Kali Pahingan, *Welo River Adventure* (River Tubing), Wana Wisata Curug Lawe, Wisata Air *Black Canyon-Tinalum Adventure*;

(b) Nilai pendapatan sektor pariwisata turun dari tahun 2019 sebesar Rp 1,697 milyar menjadi sebesar Rp 802,136 juta sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19 sepanjang Tahun 2020.

Tercapainya target kinerja kunjungan wisatawan dan pendapatan ditunjang oleh pengembangan objek wisata baik dari segi manajemen pemasaran, penataan, peningkatan dan pengelolaan. Adanya penataan dan perbaikan fasilitas maupun sarana prasarana di objek wisata yang dilakukan diantaranya penataan dan pengembangan Daya Tarik Wisata Linggoasri dan peningkatan dan penataan Bumi Perkemahan Linggoasri. Selain itu peningkatan kunjungan wisata juga didukung adanya penambahan beberapa objek wisata baru di Daerah, yaitu wisata alam diantaranya Curug Jlarang, Curug Madu Resmi, Objek Wisata Watubahan, Curug Siwatang, Wana Wisata Sikujang,

Wana Wisata Curug Lawe, Watu Bangkong Adventure, OW Karang Srity dan dan Telaga Sigebyar Mangunan di Petungkriyono.



**Gambar 2.93**  
**Telaga Sigebyar Mangunan**  
**Kec. Petungkriyono Kabupaten Pekalongan**

### 3) Pertanian

Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian daerah, sumbangannya terhadap pendapatan daerah di luar minyak dan gas bumi serta dalam perekonomian rakyat tidak bisa diabaikan. Sejalan dengan hal ini, kondisi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki pasar yang luas akan mendapat prioritas utama dalam pengembangannya. Dengan demikian kebutuhan pangan, bahan baku industri, peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan peningkatan ekspor komoditi pertanian diharapkan dapat terjamin dan berkesinambungan.

Pertanian akan menjadi kekuatan besar jika dikelola dapat secara terpadu dalam satu kesatuan sistem agribisnis. Membangun sistem dan usaha agribisnis yang kokoh berarti pula membangun pertumbuhan sekaligus pemerataan sehingga terjadi keseimbangan antar sektor. Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian berkelanjutan yang menempatkan pembangunan berorientasi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tani sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat perlu terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang makin maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan pertanian di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.122.

**Tabel 2.122**  
**Indikator Capaian Pelayanan Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>PERTANIAN</b>						
1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK 2010	Persen	16,58	15,73	15,12	14,62	15,05
2.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB 2010	Persen	18,86	17,70	17,07	16,48	17,01
3.	Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	531,44	534,71	533,10	536,59	535,79
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	a. Padi	kuintal/ha	52,68	52,42	52,46	52,86	53,02
	b. Jagung	kuintal/ha	46,63	49,75	50,39	53,32	52,15
	c. Kedelai	kuintal/ha	10,15	14,00	14,56	14,64	14,04

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Produktivitas komoditas hortikultura						
	a. Durian	Kuintal	15.311	115.888	131.047	102.961	105.581
	b. Mangga	Kuintal	71.085	80.786	112.808	125.824	125.874
	c. Rambutan	Kuintal	186.939	275.557	81.539	55.654	56.214
	d. Pisang	Kuintal	45.545	30.942	32.182	218.647	219.965
	e. Kentang	Kuintal	12.024	3.630	13.442	14.994	15.411
	f. Bawang Daun	Kuintal	3.871	3.644	11.341	4.877	4.912
	g. Alpukat	Kuintal	-	1.141	13.368	5.719	5.841
	h. Manggis	Kuintal	-	793	9.828	7.710	8.714
	i. Cabe	Kuintal	-	7.536	9.342	11.670	11.741
	j. Jambu Air	Kuintal	-	3.399	2.844	12.219	12.541
<b>B.</b>	<b>PERKEBUNAN</b>						
	a. Kelapa	Butir	17.579.360	16.162.297	15.942.345	20.972.836,05	24.301.110
	b. Tebu	Kuintal	532.204	545.920	567.410	401.315,93	713.415
	c. Cengkeh	Ton	228	227,93	227,93	550,47	488,13
	d. Kopi	Ton	435	434,46	433,64	497,57	658
<b>C.</b>	<b>PETERNAKAN</b>						
1.	Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama						
	a. Sapi potong	Ekor	22.375	22.489	22.511	22.619	22.650
	b. Kerbau	Ekor	2.883	2.885	2.925	2.899	2.904
	c. Kambing	Ekor	50.499	50.788	50.873	51.073	51.112
	d. Domba	Ekor	31.171	31.236	31.465	31.425	31.445
	e. Ayam broiler	Ekor	5.528.418	5.557.500	5.756.833	5.698.750	5.822.750
	f. Ayam Buras	Ekor	984.750	990.623	991.110	1.287.000	1.287.030
	g. Ayam Petelur	Ekor	195.875	140.844	141.100	142.210	143.170
2.	Produksi Peternakan						
	a. Daging	Kg	8.218.292	8.610.563	8.776.349	8.892.964,05	9.073.782
	b. Telur	Kg	5.530.612	5.500.662	5.585.647	5.622.421,49	5.648.954
	c. Susu	Liter	357.779	364.959	364.967	364.982	365.094

Sumber : DKPP Kabupaten Pekalongan, 2020

Dari tabel 2.122 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 merupakan penyumbang kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan dengan capaian cenderung menurun setiap tahun dari tahun 2016 sebesar 16,58% menjadi 15,05% di tahun 2020;
- (b) Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar pada tahun 2020 sebesar 535,79% lebih besar dari tahun 2016 sebesar 531,44%. Beberapa faktor yang mendukung antara gangguan organisme pengganggu tanaman masih ada namun sudah dapat di tanggulangi dan kemampuan dan ketrampilan petani dalam penanggulangan OPT sudah meningkat. Sistem jaringan irigasi yang baik cukup membantu dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
- (c) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal Lainnya per hektar;
 

Produktivitas padi mengalami kenaikan dari 52,68 kuintal/ha pada tahun 2016 menjadi 53,02 kuintal/ha pada tahun 2020. Capaian ini relatif tidak mengalami banyak perubahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Produktivitas padi yang terus terjaga kestabilannya disebabkan karena adanya peningkatan petani yang membudidayakan padi dengan benih unggul bersertifikat, mengaplikasikan teknologi dan penggunaan alsintan pada pasca panen sehingga dapat mengurangi jumlah kehilangan hasil pada waktu panen.

Produktivitas jagung mengalami peningkatan yaitu dari 46,63 kuintal/ha pada tahun 2016 menjadi 52,15 kuintal/ha pada tahun 2020. Hal ini didukung lokasi areal yang biasa ditanami jagung terutama di dataran tinggi selalu tercukupi kebutuhan airnya.

Produktivitas kedele mengalami peningkatan yaitu dari 10,15 kuintal/ha di tahun 2016 menjadi 14,04 kuintal/ha pada tahun 2020.

- (d) Produksi Komoditas Hortikultura;  
 Pada tahun 2020 produktivitas komoditas hortikultura rata-rata mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019.
- (e) Produksi Komoditas Perkebunan  
 Pada tahun 2020 produktivitas komoditas perkebunan rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 kecuali komoditas cengkeh.
- (f) Produksi Komoditas Peternakan  
 Pada tahun 2020 hampir semua populasi ternak menunjukkan peningkatan dengan tahun 2019. Disisi lain konsumsi daging, telur, susu dan protein hewani menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 produksi daging tercapai 9.073.782 kg meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 8.218.292 kg. Demikian juga mengenai produksi telur, susu dan kulit juga meningkat dari tahun 2016-2020.

#### 4) Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor penyumbang terbesar ke-3 PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020. Sektor perdagangan di Kabupaten Pekalongan lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestic.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan perdagangan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.123.

**Tabel 2.123**  
**Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	13,38	13,38	13,40	13,50	13,42
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	14,87	14,84	14,88	14,93	14,90
3.	Nilai Ekspor Perdagangan (ribu US\$)	16.659	19.913	33.773	32.910	14.289

Sumber : Dinperidagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.122, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 merupakan penyumbang terbesar ketiga untuk PDRB setelah sektor industri pengolahan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan capaian cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2020. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Berlaku meningkat dari tahun 2016 sebesar 13,38% menjadi 13,42% di tahun 2020. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan relatif naik dari tahun 2016 sebesar 14,87% menjadi 14,90% di tahun 2020.

Sedangkan nilai ekspor perdagangan dari tahun 2019 sebesar 32.910 ribu US\$ menurun menjadi 14.289 ribu US\$ di tahun 2020. Karena adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020.

## 5) Perindustrian

Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi terutama dalam pembentukan PRDB sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 30,75 persen (angka ini menurun dari 31,25 persen di tahun 2016).

Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional. Penurunan daya saing ini terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri di Kabupaten Pekalongan.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan perindustrian Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel 2.124.

**Tabel 2.124**  
**Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	31,25	31,05	31.16	31,07	30,75
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHK	31,95	31,69	31.66	31,49	30,84
3.	Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	0.08	0,10	0,14	0,58	0,60
4.	Bidang Industri					
a.	Jumlah Usaha Industri (unit)	32.276	6.133	13.259	13.336	13.416

b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	184.586	308.871	61.754	62.449	62.681
c. Jumlah Investasi (Rp 000)	1.081.934.043	162.175.238	993.174.275	1.006.736.775	1.008.043.725
d. Nilai Produksi (Rp 000)	4.621.117.190	22.147.200.162	2.755.965.360	2.761.885.610	2.763.948.810

Sumber : Dinperidagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.124 dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB merupakan penyumbang nilai terbesar di Kabupaten Pekalongan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB di tahun 2016 sebesar 31,25% mengalami penurunan sebesar 30,75% di tahun 2020. Sedangkan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari 31,95% di tahun 2016 sebesar 30,84% di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan industri mengalami kenaikan dari 0,08% di tahun 2016 menjadi 0,60% di Tahun 2020 yang didominasi industri mikro kecil..

Jumlah usaha industri tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, semula 32.276 unit usaha menjadi 13.416 unit usaha. Sementara itu tenaga kerja juga mengalami penurunan, semula menyerap tenaga kerja sebanyak 184.586 orang di tahun 2016 menjadi 62.681 orang di tahun 2020. Jumlah investasi juga mengalami penurunan dari 1,08 trilyun di tahun 2016 menjadi 1 trilyun di tahun 2020. Sedangkan nilai produksi di tahun 2015 mengalami penurunan dari 4,62 trilyun menjadi 2,76 trilyun di tahun 2020.

Adapun perincian masing-masing jumlah usaha industri, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### (a) Jumlah Usaha Industri Menurut Kelompok Industri

Jumlah usaha industri menurut kelompok industri mengalami penurunan periode tahun 2016-2020. Hanya saja dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, maka ada perubahan klasifikasi usaha industri sehingga untuk skala besar dan rumah tangga sudah tidak ada/dihitung lagi.

Jumlah usaha industri menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.125.

**Tabel 2.125**  
**Jumlah Usaha Industri Menurut Kelompok Industri**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	9	-	10	10	10
	b. Skala Menengah	4.803	-	237	242	242
	c. Skala Kecil	7.507	5.069	6.278	6.302	6.337
	d. Skala Rmh Tangga	7.983	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	109	8	3	5	5
	c. Skala Kecil	1.409	1.056	6.731	6.777	6.882
	d. Skala Rmh Tangga	10.456	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (unit)	9	-	10	10	10
	b. Skala Menengah	4.912	8	240	247	247
	c. Skala Kecil	8.916	6.125	13.009	13.079	13.159
	d. Skala Rmh Tangga	18.439	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>32.276</b>	<b>6.133</b>	<b>13.259</b>	<b>13.336</b>	<b>13.416</b>

Sumber : Dinperidagkop UKM Kabupaten Pekalongan, 2021



**(b) Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri**

Jumlah tenaga kerja menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.126.

**Tabel 2.126**  
**Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	12.075	-	14.075	14.075	14.075
	b. Skala Menengah	93.286	2.247	7.536	7.903	7.903
	c. Skala Kecil	42.431	304.436	26.484	26.662	26.784
	d. Skala Rmh Tangga	9.898	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	1.012	-	98	144	144
	c. Skala Kecil	6.022	2.188	13.561	13.665	13.775
	d. Skala Rmh Tangga	19.862	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (orang)	12.075	-	14.075	14.075	14.075
	b. Skala Menengah (orang)	94.298	2.247	7.634	8.047	8.047
	c. Skala Kecil (orang)	48.453	306.624	40.045	40.327	40.559
	d. Skala Rmh Tangga(orang)	29.760	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total (orang)</b>	<b>184.586</b>	<b>308.871</b>	<b>61.754</b>	<b>62.449</b>	<b>62.681</b>

Sumber : Dinperidagkop UKM Kabupaten Pekalongan, 2020

**(c) Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri**

Jumlah investasi menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.127.

**Tabel 2.127**  
**Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	348.544.360	-	348.544.360	348.544.360	348.544.360
	b. Skala Menengah	572.288.567	6.321.000	41.723.895	44.403.895	44.403.895
	c. Skala Kecil	97.740.768	147.310.028	525.667.183	536.096.183	536.096.183
	d. Skala Rmh Tangga	4.850.450	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	21.238.615	-	495.000	695.000	695.000
	c. Skala Kecil	19.730.912	14.865.210	76.743.837	76.997.337	77.531.787
	d. Skala Rmh Tangga	16.540.371	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (Rp)	348.544.360	-	348.544.360	348.544.360	348.544.360
	b. Skala Menengah (Rp)	593.527.182	6.321.000	42.218.895	45.098.895	45.098.895
	c. Skala Kecil (Rp)	118.471.680	155.854.238	602.411.020	613.093.520	614.400.470
	d. Skala rmh (Rp)	21.390.821	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total (Rp 000)</b>	<b>1.081.934.043</b>	<b>162.175.238</b>	<b>993.174.275</b>	<b>1.006.736.775</b>	<b>1.008.043.725</b>

Sumber : Dinperidagkop UKM Kabupaten Pekalongan, 2021

**(d) Jumlah Nilai Produksi Menurut Kelompok Industri**

Jumlah nilai produksi menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.128.

**Tabel 2.128**  
**Jumlah Nilai Produksi Menurut Kelompok Industri**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka</b>					
	a. Skala Besar	1.303.538.100	-	1.303.538.100	1.303.538.100	1.303.538.100
	b. Skala Menengah	2.323.952.992	26.914.000	79.145.939	80.929.939	80.929.939
	c. Skala Kecil	697.840.201	20.371.678.856	1.077.761.066	1.079.749.616	1.080.932.716
	d. Skala Rmh Tangga	43.053.380	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan</b>					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	35.006.621	-	2.224.000	2.784.000	2.784.000
	c. Skala Kecil	168.630.949	1.748.607.307	293.296.255	294.883.955	295.764.055
	d. Skala Rmh Tangga	49.094.947	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (Rp)	1.303.538.100	-	1.303.538.100	1.303.538.100	1.303.538.100
	b. Skala Menengah (Rp)	2.358.959.613	26.914.000	81.369.939	83.713.939	83.713.939
	c. Skala Kecil (Rp)	866.471.150	22.120.286.162	1.371.057.321	1.374.633.571	1.376.696.771
	d. Skala rmh (Rp)	92.148.327	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total (Rp 000)</b>	<b>4.621.117.190</b>	<b>22.147.200.162</b>	<b>2.755.965.360</b>	<b>2.761.885.610</b>	<b>2.763.948.810</b>

Sumber : Dinperidagkop UKM Kabupaten Pekalongan, 2021

## 6) Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (*trend*) perubahan yang terjadi era globalisasi sekarang ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan.

Penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Pekalongan diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah

Capaian pelayanan urusan ketransmigrasian di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.129.

**Tabel 2.129**  
**Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi (%)	40,00	50,00	40,00	100,00	0,00
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	2	2	2	2	0
3	Jumlah calon transmigran (KK)	2	4	5	12	12

Sumber : DPMPSTP dan NAKER Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.129 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi tahun 2020 sebesar 0,00%, tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena adanya pandemi COVID-19. ;
- (b) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) tidak ada di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah transmigran tahun 2019 yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi UPT Tanjung Buka SP-6 B Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebanyak 2 KK berjumlah 6 Jiwa. Namun demikian untuk penempatan transmigrasi berdasarkan alokasi target dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebanyak 2 KK;
- (c) Jumlah calon transmigran/animo ke lokasi transmigrasi tahun 2019-2020 sebanyak 12 Kepala Keluarga. Faktor penghambatnya adalah disebabkan masih banyak pilihan lain dalam meningkatkan taraf hidupnya selain transmigrasi, misal berdagang atau buruh serabutan serta adanya persepsi dan informasi yang salah tentang warga transmigrasi yang ditempatkan banyak yang mengalami kesulitan hidup baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemasaran hasil pertanian/bercocok tanam di lokasi transmigrasi, dan adanya ketakutan timbulnya konflik antara warga lokal dengan para transmigran.

#### **d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan.

##### **1) Perencanaan**

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Pekalongan meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya perencanaan tata ruang, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya.

Dokumen perencanaan yang telah disusun dari tahun 2016-2020 antara lain :

- (a) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025;
- (b) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2016 – 2021;
- (c) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (d) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021;
- (e) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan;
- (f) Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD;
- (g) Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- (h) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- (i) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kecamatan (RDTRK).

Capaian pelayanan bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.129.

**Tabel 2.130**  
**Capaian Pelayanan Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Dokumen Perencanaan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	1	1	1
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	2	2	2	2	2
4.	Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD (%)	85,00	90,29	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase kesesuaian Program dalam RKPD ke dalam APBD (%)	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase pencapaian indikator pembangunan daerah (%)	50,00	68,00	75,23	80,30	86,27

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.130 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) Persentase penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD tercapai sebesar 100,00% di tahun 2020 lebih besar dari tahun 2016 sebesar 85,00% sebagai awal proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021. Semua program dalam RPJMD yaitu sebanyak 154 program urusan dan 4 program rutin telah digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020;
- (b) Persentase penjabaran program yang ada dalam RKPD ke dalam APBD tercapai sebesar 100,00% di tahun 2020 lebih besar dari tahun 2016 sebesar 60,00%. Nomenklatur program dalam RKPD sama dengan nomenklatur yang digunakan pada APBD, yaitu 154 program urusan dan 4 program rutin., hal ini karena telah dilaksanakannya pengintegrasian *e-Planning* dan *e-Budgeting*;
- (c) Persentase pencapaian indikator pembangunan daerah tercapai sebesar 86,27% di tahun 2020 lebih tinggi dari Tahun 2019 sebesar 80,30%. Indikator kinerja tujuan yang tercapai 89,53%. Indikator sasaran yang tercapai 78,76%, indikator program 90,52%. Sedangkan untuk tahun 2019 indikator kinerja tujuan yang tercapai sebesar 22 indikator (91,67%) dari 24 indikator. Indikator sasaran yang tercapai sebesar 84 indikator (77,78%) dari 108 indikator. Sehingga total indikator pembangunan yang tercapai sebesar 106 indikator (80,30%) dari 132 indikator.

## 2) Keuangan

### a) Administrasi Keuangan Daerah

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMPAKDIN).

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian pelayanan Keuangan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.131.

**Tabel 2.131**  
**Capaian Pelayanan Bidang Keuangan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	14,79	15,30	15,30	15,85	16,24

Sumber : : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.131, rasio PAD terhadap total penerimaan daerah tahun 2020 sebesar 16,24% lebih besar dari tahun 2019 sebesar 15,85%. Realisasi PAD tahun 2020 sebesar 341 milyar sedangkan penerimaan APBD sebesar 2,061 trilyun. Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar 341,34 milyar sedangkan penerimaan APBD sebesar 2,175 trilyun lebih besar dari tahun 2018 untuk PAD tercapai 311,29 milyar dan realisasi total penerimaan APBD sebesar 2,1 trilyun.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam kurun lima tahun, yakni sejak tahun 2016-2020 ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pemerintah daerah terus berusaha untuk bisa mewujudkan WTP yang berkualitas yaitu program-program pembangunan didedikasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan aset tercatat dan dimanfaatkan dengan baik.

Adapun Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.132.

**Tabel 2.132**  
**Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Obyek Tahun Pemeriksaan	Jumlah Pengecualian	Hal yang Dikecualikan dalam opini BPK
1.	<b>2016</b>	0	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2.	<b>2017</b>	0	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	<b>2018</b>	0	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4.	<b>2019</b>	0	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5.	<b>2020</b>	0	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : : BPKD Kab. Pekalongan, 2021



**Gambar 2.94**  
**Penyerahan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan**  
**atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD)**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020**

**b) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga optimalisasi pengelolaan aset Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset Daerah untuk mendukung peningkatan PAD. pengelolaan aset daerah berupa koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan.

Pengelolaan aset Daerah pada umumnya sudah dapat memenuhi standar penatausahaan pengelolaan barang milik Daerah dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada meliputi ketersediaan sistem pengelolaan barang milik Daerah dan pendampingan pelaksanaan sistem barang milik daerah bagi penyimpan dan pengurus barang di seluruh Perangkat Daerah. Adapun perkembangan jumlah dan nilai aset daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.133.

**Tabel 2.133**  
**Perkembangan Jumlah dan Nilai Aset Daerah**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah barang (unit)	3.063.289	3.807.028	4.479.648	4.181.508	4.371.887
2.	Jumlah Harga (Rp. juta)	2.747.401	3.123.972	3.578.285	3.856.412	4.114.828

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.132, jumlah barang aset Daerah dari 3.063.289 unit di tahun 2016 menjadi 4.371.887 unit di tahun 2020. Hal ini diikuti dengan nilai aset daerah yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp. 2,74 triliun naik menjadi Rp 4,11 triliun di tahun 2020.

**3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 cenderung turun dari 9.197 pegawai di tahun 2016 menjadi 8.113 pegawai di tahun 2020. Berdasarkan Golongan PNS tahun 2020 sebagian besar terdapat pada golongan III (4.409 orang atau 54,34%), golongan IV (2.023 orang atau 24,94%), golongan II (1.601 orang atau 19,73%) dan Golongan I (80 orang atau 0,99%). Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak dengan urutan pendidikan S1/DIV (4.951 orang atau 61,03%), SMA/SMK (1.372 orang atau 16,91%), D1/D2/D3 (1.213 orang atau 14,95%), S2 (373 orang atau 4,60%), SMP (154 orang atau 1,90%) dan SD (50 orang atau 0,62%).

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, diadakan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, pengiriman diklatpim, pengiriman peserta diklat prajabatan dari formasi K-2, formasi khusus dan formasi umum serta pengiriman diklat fungsional, bintek peningkatan kompetensi sekdes, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Adapun capaian pelayanan dan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.134 dan 2.135.

**Tabel 2.134**  
**Nominatif Pegawai Negeri Sipil**  
**Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Golongan**  
**Tahun 2016-2020**

No	Golongan Ruang	CPNS		PNS		Total
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	I/a	0	0	0	0	0
2	I/b	0	0	2	0	2
3	I/c	0	0	19	4	23
4	I/d	0	0	49	6	55
5	II/a	0	0	99	6	105
6	II/b	0	0	194	22	216
7	II/c	0	0	495	145	640
8	II/d	0	0	347	293	640
9	III/a	0	0	369	490	859
10	III/b	0	0	590	991	1581
11	III/c	0	0	341	656	997
12	III/d	0	0	433	539	972
13	IV/a	0	0	924	853	1777
14	IV/b	0	0	119	83	202
15	IV/c	0	0	18	13	31
16	IV/d	0	0	4	3	7
17	IV/e	0	0	1	5	6
<b>Jumlah Total 2020</b>						<b>8.113</b>
<b>2019</b>						<b>8.567</b>
<b>2018</b>						<b>8.607</b>
<b>2017</b>						<b>8.864</b>
<b>2016</b>						<b>9.197</b>

Sumber : BKD Kabupaten Pekalongan; 2021

**Tabel 2.135**  
**Nominatif Pegawai Negeri Sipil**  
**Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan**  
**Per 31 Desember 2020**

No	Pendidikan	CPNS		PNS		2020	2019
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	0	0	44	6	50	59
2	SMP	0	0	145	9	154	187
3	SMA/SMK	0	0	1069	303	1372	1.500
4	D1/D2/D3	0	0	331	882	1213	1.361
5	D4/S1	0	0	2159	2792	4951	5.111
6	S2	0	0	256	117	373	349
<b>Jumlah Total</b>						<b>8.113</b>	<b>8.567</b>

Sumber : BKD Kabupaten Pekalongan; 2021

#### 4) Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan Urusan Penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan. Bidang ini dibentuk dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga kedepan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan menerapkan pola pikir strategis yaitu merumuskan kebijakan publik yang didasarkan pada hasil kajian, penelitian dan evaluasi yang cermat dan dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai.

Guna menunjang hal tersebut di atas, Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan melaksanakan 2 kegiatan yaitu Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) dan Riset Daerah. Seleksi

KRENOVA bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi. Hasil temuan KRENOVA diharapkan dapat diterima industri dan sekaligus dapat mengatasi permasalahan teknologi yang ada di masyarakat. Adapun capaian pelayanan urusan penelitian dan pengembangan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.136.

**Tabel 2.136**  
**Capaian Pelayanan Urusan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemenang Krenova (orang)	3	3	3	6	6
2.	Jumlah Pemenang Riset Daerah (orang)	3	3	3	6	5

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel 2.136, sampai dengan tahun 2020 jumlah hasil kreatifitas dan inovasi teknologi masyarakat dari 53 proposal yang diajukan dan melalui proses penilaian maka terpilih 6 inovasi terbaik. Sedangkan dari total jumlah hasil riset sebanyak 40 proposal riset telah ditetapkan pemenang sebanyak 5 riset terbaik.

## 5) Pengawasan

Target kinerja yang harus dicapai dalam bidang Pengawasan Daerah adalah untuk mendorong dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai Norma dan Standar Audit Pemerintah.

Pemerintah daerah telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh aplikasi berbasis informasi teknologi. Akuntabilitas diterapkan dalam pemantauan, pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (*self assessment*) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern ini dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam Tabel 2.137.

**Tabel 2.137**  
**Tingkat Maturitas SPIP**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber : Inspektorat Kab. Pekalongan, 2021

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang



Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan persentase jumlah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah yang telah ditindaklanjuti dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif yang dapat dilihat pada tabel 2.138.

**Tabel 2.138**  
**Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang Telah Ditindaklanjuti di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Hasil Temuan yang ditindaklanjuti	2016	2017	2018	2019	2020
1.	BPK	91,84	88,19	89,17	93,00	94,22
2.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	95,38	94,50	100,00	96,00	100,00
3.	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	86,34	96,00	96,57	91,01	98,63

Sumber : Inspektorat Kab. Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.138 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK naik dari sebesar 91,84% di Tahun 2016 menjadi 94,22% di Tahun 2020. Hal ini karena adanya semangat dari perangkat daerah terkait yang menindaklanjuti hasil temuan dari BPK, dan juga pemeriksaan kinerja pada Tahun 2020 masuk dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Jumlah Rekomendasi yang sudah di tindaklanjuti untuk Tahun 2020 sebesar 595 rekomendasi dari jumlah total sebesar 631 rekomendasi;
- b) Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah naik dari sebesar 95,38% di Tahun 2016 menjadi 100,00% di Tahun 2020. Untuk tahun 2020 terdapat 50 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi atau 100,00%;
- c) Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan naik dari sebesar 86,34% di Tahun 2016 menjadi 98,63% di Tahun 2020. Untuk tahun 2020 terdapat 2342 rekomendasi selanjutnya 2.310 rekomendasi telah ditindaklanjuti (98,63%)

## 6) Pemerintahan Umum

### a) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan hasilnya telah diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran

dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 memperoleh nilai **64,02** atau predikat "**B**" lebih baik dibanding tahun 2019 yang mendapat predikat "**B**" dengan nilai **63,51**. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menunjukkan hasil baik, namun masih memerlukan perbaikan. Adapun capaian hasil penilaian SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel 2.139.

**Tabel 2.139**  
**Capaian Hasil Penilaian SAKIP**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Predikat SAKIP	CC	CC	B	B	B
2.	Capaian Nilai SAKIP	55,70	58,72	60,52	63,51	64,02

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2021



**Gambar 2.95**  
**Penyerahan SAKIP AWARD 2020**

#### b) Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah menghasilkan berokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel dan selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat dipengaruhi oleh factor-faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi kegiatan birokrasi faktor endogen yang paling menentukan adalah Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara dan sistem yg memproses tatalaksana operasional birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan ke depan ditujukan pada tiga dimensi utama, yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi

publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menangani aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, membutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANPB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta pelayanan public yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel 2.140.

**Tabel 2.140**  
**Capaian Indeks Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	53,75	60,53	64,24	64,60
2.	Kategori	-	CC	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2020

Dari tabel 2.140, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten pekalongan tahun 2020 adalah **64,60** dengan kategori "**B**" lebih baik dari tahun 2019 dengan nilai **64,24** dengan kategori "**B**".



**Gambar 2.96**  
**Penyerahan RB AWARD 2020**

### c) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dalam menjawab tantangan zaman, di tengah era globalisasi dan digital saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin inovatif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendirikan **Mall Pelayanan Publik (MPP)** yang juga merupakan bukti semangat ASN untuk menciptakan birokrasi yang benar-benar melayani masyarakat, berintegritas, transparan dan akuntabel. Terlebih, menghadapi era revolusi Industri 4.0, di mana ASN juga dituntut agar semakin cerdas, kreatif, responsif dan inovatif.

Pembentukan pelayanan terintegrasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct service*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open governance*), dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pembentukan pelayanan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan antara Pemerintah Pusat (instansi vertikal), Provinsi dan Kota dalam satu unit pelayanan. Untuk mengintegrasikan pelayanan, baik pada tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilakukan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan**, dengan didukung sarana prasarana teknologi informasi yang memadai, yang disupport oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan**.

## 4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kemampuan ekonomi Daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek daya saing daerah terdiri kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

**a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah****1) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan menurut Pengeluaran**

Tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan juga mengalami kontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2020 berada di zona merah. Kondisi ini tentu membawa kebijakan daerah untuk melakukan PSBB pada bulan Maret – Mei 2020. Kebijakan PSBB dari dalam maupun pengaruh PSBB dari luar, sangat berdampak pada ekonomi Kabupaten Pekalongan. Secara global kontraksi ekonomi Kabupaten Pekalongan lebih baik. Dengan posisi masih di bawah Jawa Tengah.

Perekonomian Kabupaten Pekalongan mengalami kontraksi dampak dari pandemi covid-19 pada tahun 2020, dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi negative yaitu sebesar -1,89 persen. Kondisi yang sama dengan Jawa Tengah secara umum juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yaitu sebesar -2,65 persen di tahun 2020. Kontraksi ekonomi yang terjadi secara umum merupakan dampak massif dari pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Sebagian besar komponen dari PDRB Pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Selengkapannya gambaran perekonomian melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran sebagaimana tabel 2.141.

**Tabel 2.141****Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**

No.	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>1.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>14.447.972,52</b>	<b>15.432.326,22</b>	<b>16.323.146,45</b>	<b>17.322.221,08</b>	<b>17.294.590</b>
a.	Makanan, Minuman selain Restoran	6.038.795,59	6.358.542,83	6.698.135,27	7.041.405,74	-
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	765.789,17	806.412,62	845.607,25	883.808,42	-
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.633.713,44	1.736.386,16	1.825.178,97	1.906.071,64	-
d.	Kesehatan dan Pendidikan	979.085,26	1.049.563,24	1.130.847,98	1.210.664,52	-
e.	Transportasi dan Komunikasi	3.223.007,27	3.523.560,55	3.689.707,28	3.946.062,29	-
f.	Restoran dan Hotel	1.538.693,28	1.670.839,23	1.825.017,15	2.011.139,50	-
g.	Lainnya	268.888,51	287.021,59	308.652,55	323.068,97	-
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>290.563,83</b>	<b>311.659,78</b>	<b>346.570,53</b>	<b>393.333,58</b>	<b>390.400</b>
<b>3.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1.659.470,8</b>	<b>1.715.309,04</b>	<b>1.797.038,66</b>	<b>1.877.491,34</b>	<b>1.791.440</b>
<b>4.</b>	<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>3.912.453,79</b>	<b>4.466.792,57</b>	<b>5.174.333,00</b>	<b>5.621.641,33</b>	<b>5.237.970</b>
a.	Bangunan	3.020.144,05	3.470.127,93	3.935.114,62	4.268.243,57	-
b.	Non Bangunan	892.309,74	996.664,64	1.239.218,38	1.353.397,76	-
<b>5.</b>	<b>Perubahan Inventori</b>	<b>251.124,51</b>	<b>276.081,00</b>	<b>374.411,37</b>	<b>391.106,00</b>	<b>406,180</b>
<b>6.</b>	<b>Net Ekspor</b>	<b>-2.305.289,81</b>	<b>-2.492.942,91</b>	<b>-2.701.188,10</b>	<b>-2.748.729,73</b>	<b>-2.317.380</b>
	<b>PDRB</b>	<b>18.256.295,67</b>	<b>19.709.225,70</b>	<b>21.314.311,91</b>	<b>22.857.063,60</b>	<b>22.803.190</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021 \*Angka Sementara \*\*)Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2.141, Nilai PDRB Kabupaten Pekalongan adh Berlaku selama periode tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan nilai tersebut sebagian besar adalah dampak langsung dari pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Di sisi lain pengaruh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume mengalami kesulitan produksi hingga pemasaran. Nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai yang paling besar tersebut menggambarkan bahwa struktur perekonomian ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Dari struktur ekonomi di Kabupaten Pekalongan, investasi sebuah barang modal memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut tercermin dalam nilai PMTB yang merupakan nilai terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Sama halnya dengan konsumsi rumah tangga, dampak dari kesulitan bahan baku dan kurangnya permintaan juga merupakan salah satu penyebab turunnya nilai PMTB dari tahun sebelumnya. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Pemerintah pun tidak luput dari pandemi global COVID-19, dengan turunnya nilai PDRB menurut Pengeluaran tahun 2020.

Kemudian gambaran perekonomian PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) menurut pengeluaran Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.142

**Tabel 2.142**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**

No.	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>1.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>10.891.643,30</b>	<b>11.323.082,70</b>	<b>11.719.193,61</b>	<b>12.188.235,41</b>	<b>12.011.210</b>
a.	Makanan, Minuman selain Restoran	4.218.171,08	4.340.700,66	4.455.341,38	4.606.187,98	-
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	699.215,23	731.524,03	758.089,64	782.131,35	-
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.232.663,0	1.266.616,18	1.311.800,48	1.340.191,29	-
d.	Kesehatan dan Pendidikan	772.754,69	802.048,78	834.104,43	868.312,60	-
e.	Transportasi dan Komunikasi	2.641.919,35	2.773.703,01	2.865.784,37	2.992.421,60	-
f.	Restoran dan Hotel	1.109.953,41	1.181.454,24	1.258.042,22	1.355.532,09	-
g.	Lainnya	216.966,46	227.035,80	236.031,09	243.458,50	-
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>206.616,71</b>	<b>217.154,16</b>	<b>235.003,69</b>	<b>257.119,98</b>	<b>250.770</b>
<b>3.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1.154.193,0</b>	<b>1.155.229,79</b>	<b>1.188.753,47</b>	<b>1.231.375,06</b>	<b>1.181.180</b>
<b>4.</b>	<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>2.946.502,32</b>	<b>3.292.108,83</b>	<b>3.665.358,45</b>	<b>3.838.479,61</b>	<b>3.566.120</b>
a.	Bangunan	2.270.817,12	2.558.450,78	2.804.250,15	2.943.616,26	-
b.	Non Bangunan	675.685,20	733.658,05	861.108,30	894.863,35	-
<b>5.</b>	<b>Perubahan Inventori</b>	<b>240.184,14</b>	<b>233.860,85</b>	<b>217.139,06</b>	<b>235.358,13</b>	<b>373.210</b>
<b>6.</b>	<b>Net Ekspor</b>	<b>-1.517.487,73</b>	<b>-1.542.307,61</b>	<b>-1.500.397,34</b>	<b>-1.394.217,20</b>	<b>-1.334.970</b>
	<b>PDRB</b>	<b>13.921.651,83</b>	<b>14.679.128,72</b>	<b>15.525.050,94</b>	<b>16.356.350,99</b>	<b>16.047.510</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021 \*)Angka Sementara \*\*)Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 2.142, ama halnya dengan nilai PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK 2010 Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2019, sedangkan yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

Selanjutnya Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Pekalongan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel 2.143.

**Tabel 2.143**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Persen)**

No.	Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
<b>1.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>79,14</b>	<b>78,24</b>	<b>78,30</b>	<b>77,14</b>	<b>76,58</b>	<b>75,49</b>	<b>75,78</b>	<b>74,52</b>	<b>75,84</b>	<b>74,85</b>
a.	Makanan, Minuman selain Restoran	33,08	30,30	32,26	29,57	31,43	28,70	30,81	28,16	-	-
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	4,19	5,02	4,09	4,98	3,97	4,88	3,87	4,78	-	-
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8,95	8,85	8,81	8,63	8,56	8,45	8,34	8,19	-	-
d.	Kesehatan dan Pendidikan	5,36	5,55	5,33	5,46	5,31	5,37	5,30	5,31	-	-
e.	Transportasi dan	17,65	18,98	17,88	18,90	17,31	18,46	17,26	18,30	-	-

No.	Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	Komunikasi										
f.	Restoran dan Hotel	8,43	7,97	8,48	8,05	8,56	8,10	8,80	8,29	-	-
g.	Lainnya	1,47	1,56	1,46	1,55	1,45	1,52	1,41	1,49	-	-
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>1,59</b>	<b>1,48</b>	<b>1,58</b>	<b>1,48</b>	<b>1,63</b>	<b>1,51</b>	<b>1,72</b>	<b>1,57</b>	<b>1,71</b>	<b>1,56</b>
<b>3.</b>	<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>9,09</b>	<b>8,29</b>	<b>8,70</b>	<b>7,87</b>	<b>8,43</b>	<b>7,66</b>	<b>8,21</b>	<b>7,53</b>	<b>7,86</b>	<b>7,36</b>
<b>4.</b>	<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>21,43</b>	<b>21,16</b>	<b>22,66</b>	<b>22,43</b>	<b>24,28</b>	<b>23,61</b>	<b>24,59</b>	<b>23,47</b>	<b>22,97</b>	<b>22,22</b>
a.	Bangunan	16,54	16,31	17,61	17,43	18,46	18,06	18,67	18,00	-	-
b.	Non Bangunan	4,89	4,85	5,06	5,00	5,81	5,55	5,92	5,47	-	-
<b>5.</b>	<b>Perubahan Inventori</b>	<b>1,38</b>	<b>1,73</b>	<b>1,40</b>	<b>1,59</b>	<b>1,76</b>	<b>1,40</b>	<b>1,71</b>	<b>1,44</b>	<b>1,78</b>	<b>2,33</b>
<b>6.</b>	<b>Net Ekspor</b>	<b>-12,63</b>	<b>-10,90</b>	<b>-12,65</b>	<b>-10,51</b>	<b>-12,67</b>	<b>-9,66</b>	<b>-12,03</b>	<b>-8,52</b>	<b>-10,16</b>	<b>-8,32</b>
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021 \*)Angka Sementara \*\*)Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 2.143, distribusi produk yang dikonsumsi di Kabupaten Pekalongan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 75 persen), walaupun proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut terhadap PDRB cenderung menurun. Tahun 2016 proporsinya merupakan yang paling tinggi yaitu 79,14 persen, kemudian berangsur berkurang hingga tahun 2019 dengan proporsi 75,78 persen dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 sebesar 75,84 persen. Penurunan proporsi ini dikarenakan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak secepat pertumbuhan komponen lainnya.

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sebagian produk Kabupaten Pekalongan diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar negeri maupun ke Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi ataupun ke provinsi lain di Indonesia. Namun, impor yang terjadi lebih besar dari ekspor, sehingga sebagian besar permintaan produk untuk kebutuhan Kabupaten Pekalongan masih harus dipenuhi dari impor. Pada tahun 2016-2020 perdagangan Kabupaten Pekalongan yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa arus barang yang dijual keluar wilayah selalu lebih rendah dari arus barang yang dibeli, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Pekalongan selalu menunjukkan posisi "defisit". Hal ini dapat dilihat dari nilai net ekspor yang bernilai negatif. Persentase distribusi selanjutnya adalah pengeluaran untuk modal (PMTB), yaitu mencapai sekitar 21-24 persen, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari seperlima perekonomian ditunjang untuk barang modal. Untuk distribusi pada konsumsi akhir pemerintah pada PDRB, ada pada rentang 7-9 persen, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam struktur perekonomian masih tidak terlalu besar.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 secara rata-rata mencapai 3,97 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,19 persen (2016); 5,44 persen (2017); 5,76 persen (2018) dan 5,35 persen (2019) dan kontraksi sebesar -1,89 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 5,76 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (kontraksi -1,89 persen) sebagai dampak pandemi COVID-19.

## 2) Konsumsi dan Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk

### a) Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan

Pada tahun 2020, Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai Rp. 523.869,00 lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp. 469.830,00. Dari total pengeluaran makanan, sebesar 40,65% digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Pengeluaran konsumsi makanan yang relatif besar lainnya adalah konsumsi rokok dan padi-padian masing-masing sebesar 11,62% dan 10,31% dari total pengeluaran konsumsi makanan. Sedangkan pengeluaran konsumsi makanan yang paling sedikit adalah konsumsi umbi-umbian yaitu 0,55%. Secara rinci persentase rata-rata pengeluaran per kapita kelompok makanan penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.144.

**Tabel 2.144**  
**Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan**  
**Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Kelompok Barang	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah)</b>	<b>349.696</b>	<b>420.338</b>	<b>478.113</b>	<b>469.830</b>	<b>523.869</b>
<b>B</b>	<b>Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita (%)</b>					
1	Padi-padian	14,30	11,47	10,11	9,83	10,31
2	Umbi-umbian	0,55	0,52	0,59	0,48	0,55
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,20	3,49	3,33	4,40	4,76
4	Daging	2,95	3,61	4,03	3,61	3,41
5	Telur dan Susu	5,41	4,56	4,45	5,56	5,38
6	Sayur-sayuran	6,75	7,03	7,53	5,51	6,50
7	Kacang-kacangan	3,27	2,44	2,19	2,34	2,37
8	Buah-buahan	4,06	3,67	3,48	4,70	4,28
9	Minyak dan lemak	2,45	2,47	2,46	2,07	2,08
10	Bahan minuman	3,98	3,90	4,04	3,61	3,63
11	Bumbu-bumbuan	2,33	2,15	2,15	2,04	2,20
12	Konsumsi lainnya	1,90	2,08	2,27	1,90	2,25
13	Makanan dan minuman jadi	36,20	40,56	41,28	43,52	40,65
14	Rokok dan tembakau	12,65	12,05	12,10	10,43	11,62
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

### b) Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan

Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 menunjukkan angka yang relatif besar dimana rata-rata pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 452.112,00 lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp. 407.691,00. Secara



rinci persentase rata-rata pengeluaran per kapita kelompok bukan makanan penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.145.

**Tabel 2.145**  
**Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Kelompok Barang	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)</b>	<b>301.655</b>	<b>335.680</b>	<b>456.696</b>	<b>407.691</b>	<b>452.112</b>
<b>B.</b>	<b>Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita (%)</b>					
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	47,83	44,44	47,22	42,26	45,32
2.	Aneka barang dan jasa	26,40	23,24	18,17	24,16	24,21
3.	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	7,31	7,93	7,51	6,74	6,68
4.	Barang tahan lama	10,21	12,02	12,94	16,77	8,84
5.	Pajak, pungutan dan asuransi	3,51	5,79	6,69	5,58	6,13
6.	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	4,74	6,59	7,49	4,50	8,82
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

### 3) Nilai Tukar Petani (NTP)

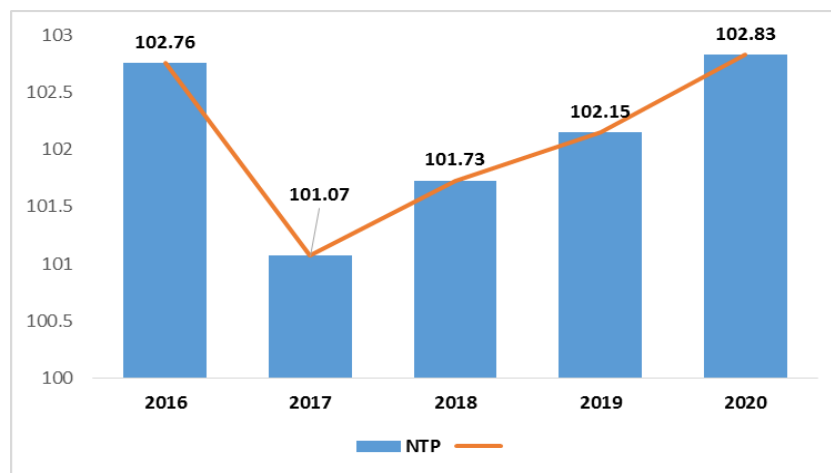
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Adapun angka perkembangan nilai tukar petani di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.146 dan gambar 2.97.

**Tabel 2.146**  
**Nilai Tukar Petani**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang diterima petani (It)	122,43	117,74	123,35	122,54	120,16
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	119,14	116,49	121,25	119,96	119,35
3.	<b>NTP</b>	<b>102,76</b>	<b>101,07</b>	<b>101,73</b>	<b>102,15</b>	<b>102,83</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021



**Gambar 2.97**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Pekalongan 2016-2020**

Dari tabel 2.145 dan Gambar 2.97 Nilai Tukar petani NTP Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 cenderung naik. Capaian lebih besar dari 100 yang berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya yang berarti pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

#### **b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Salah satu aspek yang mendukung daya saing Daerah adalah keberadaan infrastruktur perhubungan, yang akan memudahkan akses distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Aksesibilitas Wilayah**, Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga di barat. Kabupaten Pekalongan berada di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.
- 2) **Perhubungan Darat** di Kabupaten Pekalongan, sampai dengan tahun 2020 didukung dengan 5 buah Terminal Tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan 1 buah terminal yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 25 perusahaan angkutan penumpang beserta 571 armadanya dan 76 perusahaan angkutan barang beserta 3.531 armadanya sangat mendukung perekonomian daerah;
- 3) **Prasarana jalan**, berdasarkan status jalan Kabupaten Pekalongan di tahun 2020 mempunyai 9,20 km Jalan Nasional, 86,39 km jalan provinsi dan 669,90 km jalan kabupaten. Jumlah jalan yang kondisi baik di tahun 2020 sebesar 514,548 km dan jalan kondisi sedang sebesar 113,288 km (93,72%) naik di bandingkan kondisi jalan baik di tahun 2019 sebesar 493,376 km dan jalan kondisi sedang sebesar 125,781 km (92,43%) dari jumlah seluruh panjang jalan Kabupaten Pekalongan sebesar 669,895 km. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan mendapat perhatian yang lebih baik dari tahun sebelumnya;

**Tabel 2.147**  
**Panjang Jalan Kabupaten Pekalongan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2018-2020**

Tahun	Kewenangan (Km)			
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Total
<b>2018</b>	9,20	86,37	669,90	765,47
<b>2019</b>	9,20	86,39	669,90	765,49
<b>2020</b>	9,20	86,39	669,90	765,49

Sumber : DPU Taru Kab. Pekalongan, 2021

- 4) Adanya pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan difokuskan untuk mendukung program nasional pembangunan jalan tol trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol antar kota-kota di pulau Jawa dengan tujuan utama menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Semua jalan tol di pulau Jawa merupakan bagian dari Trans- Jawa, namun pemerintah memprioritaskan 9 (sembilan) ruas jalan tol Cikampek – Surabaya sepanjang 617 KM. Kesembilan ruas jalan tol tersebut disebut Ruas Prioritas Jalan Tol Trans Jawa (RPUT) yang terdiri atas:

- (1) Ruas Tol Cikampek – Palimanan sepanjang 117 Km
- (2) Ruas Tol Pejagan – Pemalang sepanjang 58 Km
- (3) Ruas Tol Pemalang – Batang sepanjang 29 Km
- (4) Ruas Tol Batang – Semarang sepanjang 75 Km
- (5) Ruas Tol Semarang – Solo sepanjang 72 Km
- (6) Ruas Tol Solo – Ngawi sepanjang 90 Km
- (7) Ruas Tol Ngawi – Kertosono sepanjang 87 Km
- (8) Ruas Tol Mojokerto – Kertosono sepanjang 41 Km
- (9) Ruas Tol Surabaya – Mojokerto sepanjang 36 Km

Hal ini didukung pula adanya exit toll di Kecamatan Bojong sehingga mempermudah aksesibilitas menuju ibukota Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Kajen maupun wilayah lainnya



**Gambar 2.98**

**Jaringan Jalan Tol Trans Jawa Yang Melewati Kabupaten Pekalongan**



**Gambar 2.99**

**Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan**

### c. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban Daerah serta kemudahan proses perizinan.

#### 1) Keamanan dan Ketertiban

Untuk membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) atau dulu dikenal Pertahanan Sipil (Hansip) disamping peran dari aparat TNI dan POLRI.

#### 2) Kemudahan Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu, melalui **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan**. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan public Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendirikan **Mall Pelayanan Publik (MPP)**

Melalui kebijakan Daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

#### 3) Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan dan jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah ada sebelas jenis, yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2); serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sesuai dengan Perda tersebut maka mulai tanggal 1 Januari 2011 pemungutan BPHTB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan PBB-P2 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Merujuk pada aturan tersebut bagi investor yang akan menanamkan modal di Daerah, hal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan selain faktor-faktor kemudahan lain seperti keamanan ketertiban, kemudahan perizinan dan pengenaan pajak.

### d. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan Daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga

mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing Daerah dan perkembangan investasi di Daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing Daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

### 1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.148.

**Tabel 2. 148**  
**Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)				Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTS/ Paket B	SMA/SMK/MA /Paket C	Diploma/ Universitas	
2016	23,80	46,05	15,10	10,71	4,34	100,00
2017	26,51	36,26	20,88	12,43	3,92	100,00
2018	26,84	33,73	22,50	12,75	4,18	100,00
2019	19,71	36,03	23,59	15,12	5,55	100,00
2020	19,68	34,34	22,63	18,70	4,65	100,00
Rata-Rata	<b>23,31</b>	<b>37,28</b>	<b>20,94</b>	<b>13,94</b>	<b>4,53</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari tabel 2.148, persentase penduduk umur 15 Tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 rata-rata didominasi lulusan SD/MI sebanyak 37,28%, Tidak mempunyai ijazah sebesar 23,31%, SMP/MTS/Paket B sebesar 20,94%, SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 13,94% dan lulusan diploma/universitas sebesar 4,53%.

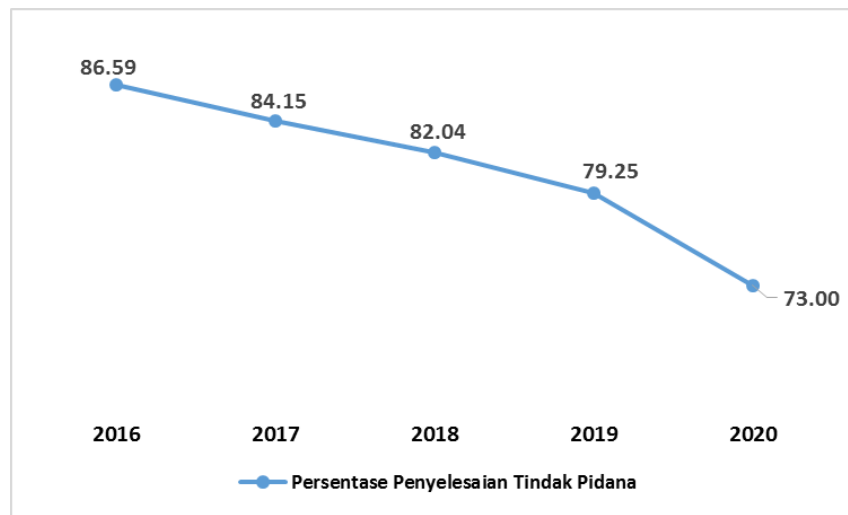
### 2) Angka Kriminalitas

Jumlah Tindak Pidana (*crime total*) di Tahun 2020 sebanyak 222 kasus dengan tingkat penyelesaian 73,00%, sedikit menurun dari Tahun 2019 sebesar 188 kasus dengan tingkat penyelesaian 79,25%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.149 dan gambar 2.100.

**Tabel 2.149**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		
		Lapor	Selesai	% Selesai
1.	2016	179	155	86.59
2.	2017	246	207	84.15
3.	2018	206	169	82,04
4.	2019	188	149	79,25
5.	2020	222	162	73,00

Sumber : Polres Pekalongan, 2021



**Gambar 2.100**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Pidana**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

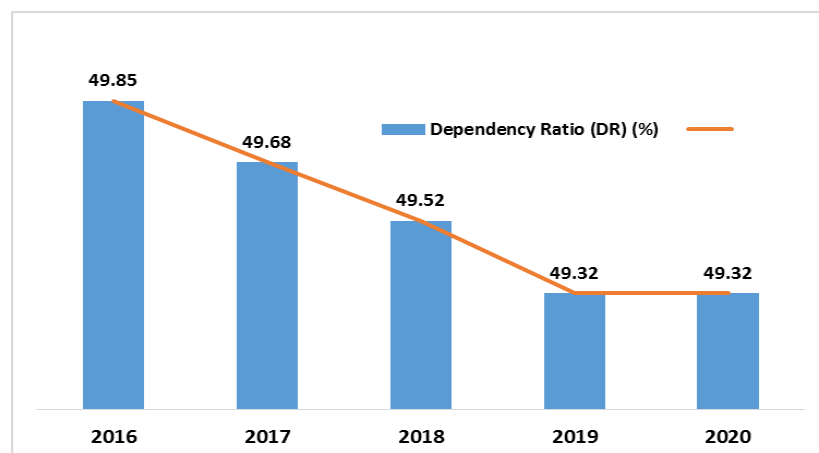
### 3) Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Hal ini diakibatkan hambatan atas upaya perkembangan daerah akan semakin besar pula. Rasio ketergantungan Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.150 dan gambar 2.101.

**Tabel 2.150**  
**Rasio Ketergantungan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

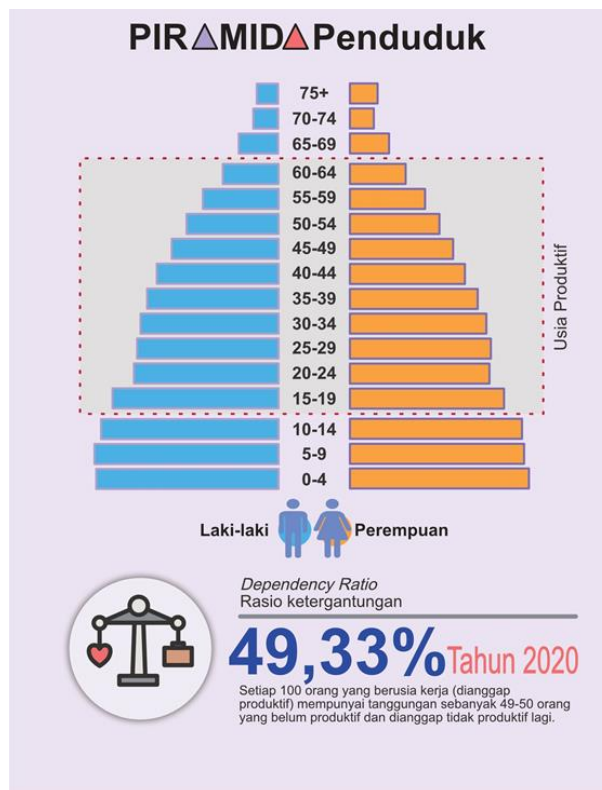
No	Tahun	Usia Bukan Produktif		Usia Produktif	Dependency Ratio (DR) (%)
		0-14 th	>65 th	15-64 th	
1.	2016	237.893	54.897	587.302	49,85
2.	2017	236.880	56.974	592.343	49,68
3.	2018	235.920	59.247	596.725	49,52
4.	2019	235.470	61.044	601.197	49,32
5.	2020	251.797	68.205	648.819	49,33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2021



**Gambar 2.101**  
**Rasio Ketergantungan**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

Dari tabel 2.150 dan gambar 2.101, dapat dijelaskan bahwa, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat. Proporsi penduduk usia produktif sebesar 69,82 persen dari total populasi di tahun 2020. Peningkatan



tersebut menjadikan rasio ketergantungan menjadi semakin rendah. Pada tahun 2020, tercatat bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) hanya menanggung sekitar **49-50** penduduk usia belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Kabupaten Pekalongan tengah menghadapi periode bonus demografi karena **66,97 persen penduduknya berada pada usia produktif**. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 (BPS,Bappenas,UNFPA,2013), Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai waktu/peleluang bonus demografi yang relatif lebih pendek. Rasio ketergantungan mencapai dibawah 50,00; pada tahun 2015 sebesar 46,50%, menurun Tahun 2020 sebesar 45,40%, titik terendah Tahun 2025 sebesar 45,30%, tetapi tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 48,30%, bahkan pada tahun 2035 dapat meningkat menjadi 51,70%. Artinya peluang bonus demografi hanya terjadi pada tahun 2015-2030. Peluang singkat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui kerja keras semua pihak.

**Generasi Z bersama milenial akan menjadi aktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam bonus demografi.** Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kabupaten Pekalongan didominasi oleh *Generasi Z (5-25 tahun)*, *Generasi Y/Milenial (26-40 tahun)*, dan *Generasi X (41-55 tahun)*. Generasi ini sebagian besar termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan sebagian dari Generasi Z masih berada di kelompok penduduk usia belum produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Kabupaten Pekalongan, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.151 dan gambar 2.102.

**Tabel 2.151**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Generasi dan**  
**Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

Kelompok Umur Generasi	Laki - Laki	Perempuan	Total
Post Generasi Z	64.884	61.767	126.651
Generasi Z	130.016	122.579	252.595
Milenial	135.187	125.532	260.719
Generasi X	97.963	98.039	196.002
Boomer	57.621	60.457	118.078
Pre Boomer	5.936	8.840	14.776
<b>Total</b>	<b>491.607</b>	<b>477.214</b>	<b>968.821</b>

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020 -BPS Kabupaten Pekalongan



**Gambar 2.102**  
**Generasi Penduduk berdasarkan kelompok umur**

#### B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2020

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2020 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2020 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu: < 50% Sangat Rendah; 51% < 65% Rendah; 66 % < 75% Sedang; 76 % < 90% Tinggi dan 91% < 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2020 mendasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi dengan rincian sebagaimana tabel 2.152.

**Tabel 2.152**  
**Rekapitulasi Rata-rata Realisasi Ketercapaian Kinerja RKPD Tahun 2020**  
**Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan**

No.	Urusan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Predikat	OPD Penanggungjawab
<b>A.</b>	<b>IKU</b>	77,72	Tinggi	
<b>B.</b>	<b>IKD</b>	89,37	Tinggi	
<b>C.</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>			
1.	Pendidikan	93,22	Sangat tinggi	Dindikbud
2.	Kesehatan	86,66	Tinggi	Dinkes, RSUD Kajen, RSUD Kraton
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,69	Tinggi	DPU Taru
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	97,23	Sangat tinggi	Dinas Perkim dan LH
5.	Ketertiban Umum dan	75,42	Sedang	Satpol PP dan Damkar,



No.	Urusan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Predikat	OPD Penanggungjawab
	Perlindungan Masyarakat			Kesbangpol
6.	Sosial	86,06	Tinggi	Dinsos, BPBD
<b>D.</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>			
1.	Tenaga Kerja	92,22	Sangat tinggi	DPMPTSP dan Naker
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,41	Tinggi	DPMDP3AP2KB
3.	Pangan	96,96	Sangat tinggi	DKPP
4.	Pertanahan	100,00	Sangat tinggi	DPU Taru
5.	Lingkungan Hidup	99,05	Sangat tinggi	Dinas Perkim dan LH
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,17	Sangat tinggi	Dindikcapil
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96,89	Sangat tinggi	DPMDP3AP2KB
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90,49	Tinggi	DPMDP3AP2KB
9.	Perhubungan	96,80	Sangat tinggi	Dinhub
10.	Komunikasi dan Informatika	84,63	Tinggi	Dinkominfo
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89,54	Tinggi	DinperindagkopUKM
12.	Penanaman Modal	100,00	Sangat tinggi	DPMPTSP dan Naker
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	64,77	Rendah	Dinporapar
14.	Statistik	100,00	Sangat tinggi	Dinkominfo
15.	Persandian	100,00	Sangat tinggi	Dinkominfo
16.	Kebudayaan	50,01	Sangat rendah	Dindikbud
17.	Perpustakaan	75,00	Sedang	Dinarpus
18.	Kearsipan	99,01	Sangat tinggi	Dinarpus
<b>E.</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
1.	Kelautan dan Perikanan	99,08	Sangat tinggi	Dinlutkan
2.	Pariwisata	97,92	Sangat tinggi	Dinporapar
3.	Pertanian	94,73	Sangat tinggi	DKPP
4.	Perdagangan	86,25	Tinggi	DinperindagkopUKM
5.	Perindustrian	100,00	Sangat tinggi	DinperindagkopUKM
6.	Transmigrasi	50,00	Sangat rendah	DPMPTSP dan Naker
<b>F.</b>	<b>Urusan Penunjang Pemerintahan</b>			
1.	Perencanaan	100,00	Sangat tinggi	Bappeda Litbang
2.	Keuangan	91,49	Sangat tinggi	BPKD
3.	Kepegawaian dan Diklat	97,54	Sangat tinggi	BKD Diklat
4.	Penelitian dan Pengembangan	100,00	Sangat tinggi	Bappeda Litbang
5.	Pengawasan	100,00	Sangat tinggi	Inspektorat
6.	Pemerintahan Umum	83,77	Tinggi	Setda, Setwan dan Kecamatan

Sumber : Hasil Analisis Tim 2021

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD).

**Rincian Lebih Lanjut sebagaimana tercantum dalam Buku II** Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2020.

Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mengalami sedikit perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perubahan dan perbedaan itu terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD untuk Pencegahan, penanganan, dan Pemulihan disegala sektor akibat adanya pandemi COVID-19. Kebijakan Refocusing anggaran ini menyebabkan target pendapatan maupun alokasi belanja daerah secara umum mengalami penurunan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya

penyesuaian kembali target tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020. Penyesuaian kembali rencana target 2021 yang kemudian akan menjadi baseline perhitungan kembali rencana target tahun 2021 disamping tetap memperhatikan capaian tahun 2020 dan target RPJMD Tahun 2016-2021 serta target dalam RKPD Tahun 2022.

### **C. Permasalahan Pembangunan Daerah**

#### **1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran serta Isue Strategis Pembangunan Daerah**

##### **a. Kemiskinan**

Masih tingginya penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 9,71% naik menjadi 10,19% di tahun 2020, dengan rata-rata capaian di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas nasional. Adanya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 10,19 persen hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang sebesar 16,02 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 9,13 persen, Kabupaten Tegal sebesar 8,14 persen dan Kota Pekalongan sebesar 7,17 persen. Namun demikian Kabupaten Pekalongan berhasil menurunkan angka kemiskinan rata-rata sebesar 0,53 persen, paling besar di bandingkan dengan kabupaten/kota sekitar selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih perlu percepatan dan inovasi kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan seiring dengan masih adanya pandemi COVID-19.

##### **b. Pengangguran dan Lapangan Kerja**

Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan. TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 71,23 persen naik dibandingkan dengan TPAK 2019 sebesar 70,90 persen. TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 71,23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 69,78 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 65,57 persen, Kabupaten Tegal sebesar 66,52 persen dan Kota Pekalongan sebesar 66,45 persen.

Sedangkan perkembangan TPT di Kabupaten Pekalongan selama periode 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2017 sebesar 4,39 persen naik tajam menjadi 6,97 persen di Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 6,97 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 6,92 persen dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang sebesar 7,64 persen, Kabupaten Tegal sebesar 9,82 persen dan Kota Pekalongan sebesar 7,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu utama dalam pembangunan.

##### **c. Pelayanan Pendidikan**

Capaian pembangunan pelayanan pendidikan terlihat dari Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pekalongan meningkat sebesar 12,40 tahun di tahun 2019 menjadi 12,41 tahun di tahun 2020 namun masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,70 tahun. Sedangkan dari Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pekalongan meningkat dari 6,88 tahun di tahun 2019 menjadi 6,91 tahun di tahun 2020 namun dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,69 tahun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI Tahun 2020 sebesar 108,47% turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 110,26%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2020 sebesar 95,57% turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 97,02%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 64,22% naik dibandingkan

tahun 2019 sebesar 61,24%. Secara umum masih perlu upaya peningkatan APK khususnya untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah terus mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk jenjang SD/MI Tahun 2020 sebesar 96,57% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 96,34%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2020 sebesar 77,93% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 77,44%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 45,91% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 45,74%. Capaian ini masih menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan APM untuk menuntaskan program pendidikan dasar.

Kemudian dari Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) selama tahun 2016-2020 relatif mengalami penurunan untuk semua jenjang pendidikan kecuali SMA/SMK/MA/Paket C. Dari capaian persentase penduduk umur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020 sebagian besar penduduk Kabupaten Pekalongan yang tidak mempunyai ijazah sebesar 19,68%, tamat SD/MI/Paket A sebesar 34,34%, tamat SMP/MTS/Paket B sebesar 22,63%, tamat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 18,70% dan tamat diploma/universitas sebesar 4,65%.

#### **d. Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

Capaian pembangunan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan terlihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,57 tahun di tahun 2019 menjadi sebesar 73,69 tahun di tahun 2020. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,37 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Terkait dengan pencapaian AKI Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan dari 60,45 per 100.000 kelahiran hidup (10 kasus) di tahun 2019 menjadi 66,43 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus) di tahun 2020. Capaian ini lebih baik dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,60 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020 dengan jumlah total sebanyak 530 kasus.

Sedangkan berkaitan dengan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pekalongan turun dari tahun 2019 sebesar 8,70 per 1000 KH (144 kasus) menjadi 6,47 per 1000 KH di Tahun 2020 (107 kasus), di bawah rata-rata capaian dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,79 per 1000 KH dengan total sebanyak 4.189 kasus.

Kemudian masih tingginya jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan walaupun sudah menurun dari pada tahun 2019 sebesar 45 kasus menjadi 37 kasus di tahun 2020. Angka ini tergolong cukup besar (22 besar) dari capaian seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020.

Kondisi balita yang *stunting* di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Pekalongan tahun 2020 masih ada sebanyak 15,81%, turun dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 21,43%. Masih tingginya angka *stunting* di Kabupaten Pekalongan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, seimbang secara sehat dan aman.

#### **e. Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian IPM. Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat walaupun mengalami penurunan di tahun 2020. IPM menurun dari 69,71 pada tahun 2019 menjadi 69,63 pada tahun 2020.

Meskipun selama periode 2016-2020 IPM Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih

stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih berstatus "sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )", dan masih sama sejak tahun 2016. Secara umum capaian IPM Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Jumlah ASN di Kabupaten Pekalongan sampai dengan Desember tahun 2020 berjumlah 8.113 pegawai di tahun 2020 atau berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 8.567. Sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Kabupaten pekalongan untuk :

- 1) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien.
- 2) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih.
- 3) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Hasil implementasi SAKIP Tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperoleh nilai 64,02 atau predikat "B" lebih baik dibanding tahun 2019 yang mendapat nilai 63,51. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menunjukkan hasil baik, namun masih memerlukan perbaikan.

#### **f. Peningkatan Infrastruktur**

Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus transportasi dan meningkatkan perekonomian daerah. Sampai dengan Tahun 2019, belum semua jalan kondisinya baik, dimana panjang jalan di Kabupaten Pekalongan kondisi baik dan sedang pada tahun 2020 sebesar 93,72% naik di bandingkan tahun 2019 sebesar 92,43% dari jumlah total seluruh 669,895 km. Sedangkan persentase kondisi jembatan dalam kondisi baik kondisi tahun 2020 sebesar 86,54% naik di bandingkan tahun 2019 sebesar 85,05% dari jumlah total jumlah jembatan sebanyak 368 unit.

#### **g. Banjir dan Rob.**

Penanganan permasalahan banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan masih menjadi isu utama permasalahan kondisi infratraktur yang memerlukan penanganan secara serius dan komprehensif dengan kerjasama antar pemerintah daerah, dibantu provinsi dan pusat. Selain itu area letak lokasi yang terendam rob menyambung dengan Kota Pekalongan, sehingga penyelesaiannya harus koordinasi, ada sinergitas antardaerah.

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berada di wilayah pesisir dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai. Karena kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang terkena bencana banjir rob.

Terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terkena dampak dari banjir dan rob ini yaitu : Kecamatan Tirto, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto dengan wilayah yang terkena dampak sebagai berikut :

### 1) Kecamatan Tirto

Wilayah Kecamatan Tirto merupakan area dengan probabilitas tinggi terhadap genangan. Wilayah pesisir di kecamatan ini berbatasan dengan Laut Jawa dan dengan sungai sehingga memiliki ancaman banjir dari dua sisi. Sampai saat ini banyak titik genangan permanen di kecamatan ini karena tidak berjalannya lagi sistem drainase. Air genangan selama ini dikeluarkan dengan sistem pompa.

Banjir juga menyebabkan perubahan lahan secara signifikan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2010 masih terdapat sekitar 218 hektar tanah sawah di kecamatan ini namun pada tahun 2020 semua sawah hilang sementara luasan lahan kering juga berkurang drastis. Wilayah yang terdampak meliputi : Desa Jeruksari, Desa Mulyorejo, Desa Tegaldowo dan Desa Karangjampo.



**Gambar 2.103**  
**Genangan permanen di Desa Jeruksari**



**Gambar 2.104**  
**Rumah yang tergenang permanen dan ditinggalkan di Desa Karangjampo**

### 2) Kecamatan Wonokerto

Secara umum, dalam satu dekade seluruh sawah di desa-desa terdampak rob di Kecamatan Wonokerto sudah hilang atau tidak beroperasi secara penuh, banyak terdapat genangan permanen akibat tidak berjalannya saluran drainase. Peninggian tanah sekitar rumah banyak ditemui di kecamatan ini, berimplikasi pada banyak titik-titik genangan ketika hujan dan surutnya relatif lama. Tak ditemui ada embung atau kolam banjir (*retention pond*) di kecamatan ini. Dalam setahun terakhir, intensitas banjir rob menurun. Hal ini dipersepsikan karena adanya tanggul penahan banjir di sisi utara permukiman. Wilayah yang terdampak meliputi :Desa Semut, Desa Tratebang, Desa Wonokerto Kulon, Desa Wonokerto Wetan, Desa Api-Api, Desa Sijambe, dan Desa Pecakaran.



**Gambar 2.105**  
**Kondisi permukiman Desa Tratebang**  
**yang berdampingan dengan genangan air**

3) Kecamatan Siwalan meliputi : Desa Depok dan Desa Blacanan.

Berdasarkan hasil dan analisis kerentanan banjir rob terdapat 3 desa berada di tingkat kerentanan rendah yaitu Desa Depok, Desa Blacanan, dan Desa Semut; dan 10 desa berada di tingkat kerentanan tinggi yaitu Desa Jeruksari, Desa Mulyorejo, Desa Tratebang, Desa Wonokerto Kulon, Desa Wonokerto Wetan, Desa Api-api, Desa Sijambe, Desa Pecakaran, Desa Tegaldowo dan Desa Karangjampo.

Untuk penanganan banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan, pemerintah pusat membangun tanggul pengendalian banjir dan rob yang telah selesai di bulan Desember 2019. Tanggul sepanjang 8.020 meter itu, membentang dari Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan hingga Kabupaten Pekalongan. Pengendalian Banjir dan Rob di Kota dan Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem polder. Karena pembangunannya berada di wilayah permukiman akan dibuat *long storage* dimana pada bagian ujungnya ditaruh pompa.



**Gambar 2.106**  
**Pembangunan Tanggul**  
**Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan**

## **2. Rangkuman Identifikasi Permasalahan hasil Evaluasi RKPD 2020 dan Data Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2020. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

## a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

### 1) Pendidikan

- a) Belum optimalnya capaian APK PAUD tahun 2020 sebesar 71,02%;
- b) Belum optimalnya angka capaian APM jenjang pendidikan dasar baik SD/MI dan SMP/MTs, data tahun 2020, APM SD/MI sebesar 96,57% sedangkan APM SMP/MTs sebesar 77,93%. Angka tersebut masih dibawah target *SDGs* dan juga PUS/*EFA* (Pendidikan Untuk Semua/*Education for All*) sebesar 100%;
- c) Masih adanya angka putus sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,12% pada tahun 2020 dan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,11% pada tahun 2020;
- d) Angka melanjutkan sekolah belum optimal. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SLTP/MTs pada tahun 2020 sebesar 94,17% dan dari SLTP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 80,03% di tahun 2020;
- e) Kurang optimalnya kualitas pendidik/guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pendidik/guru dengan kualifikasi S1/D4 tahun 2020 untuk pendidik/guru SD/MI sebesar 97,06% dan capaian SMP/MTs sebesar 97,59%; dan
- f) Belum meratanya fasilitas pendidikan dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat pada Kondisi ruang kelas dalam kondisi baik tahun 2020 untuk jenjang SD/MI sebesar 87,11% dan jenjang SMP/MTs sebesar 94,50%.

### 2) Kesehatan

- a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu tahun 2020 sebesar 66,43 sebesar per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah sebanyak 11 kasus. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 60,45 dengan jumlah sebanyak 10 kasus;
- b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) relatif masih tinggi dan mengalami penurunan dari 8,70 per 100.000 kelahiran hidup (144 kasus) pada tahun 2019 menjadi 6,47 per 100.000 kelahiran hidup (107 kasus) pada tahun 2020;
- c) Masih tingginya kasus balita gizi buruk. Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 sebesar 37 kasus turun dari Tahun 2019 sebesar 45 kasus. Angka ini tergolong cukup besar **(22 besar)** dari capaian seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020;
- d) Masih tingginya persentase kasus *stunting*. Kondisi balita yang *stunting* di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebanyak 15,81%, turun dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 21,43%;
- e) Masih tingginya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV AIDS. Sedangkan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyebabkan masih tingginya kasus DBD.

Angka Kesakitan/*Incidence Rate* (IR) penyakit DBD di Kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2018, Angka kesakitan penyakit DBD sebesar 19,17 per 10.000 penduduk (77 kasus). Pada tahun 2019, angka Kesakitan DBD menjadi 24,70 per 10.000 penduduk (222 kasus). Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 26,00 per 10.000 penduduk (246 kasus).

Sedangkan Angka Kematian/*Case Fatality Rate* (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, namun sudah mengalami penurunan kasus kematian akibat DBD selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sebesar

0,99% menurun menjadi 0.85% di tahun 2018 dan menurun lagi dengan tidak ada kasus (0,00%) di tahun 2019 dan 2020.

Angka Penemuan Pasien baru *Case Detection Rate/CDR*) Tuberculosis (TB) BTA positif didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang lalu. CDR TB di Tahun 2020 sebesar 9,00% naik dari tahun 2019 sebesar 8,50%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) TB turun di Tahun 2020 sebesar 96,00% dari 96,60% di Tahun 2019.

- f) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter di Kabupaten Pekalongan di Tahun 2020 satu orang dokter melayani 7.176 penduduk, maka dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Adapun target indikator Indonesia sehat, adalah 40 dokter per 100.000 penduduk.

### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum semua jalan kondisinya baik. Panjang jalan di Kabupaten Pekalongan kondisi baik dan sedang pada tahun 2020 sebesar 93,72% naik di bandingkan tahun 2019 sebesar 92,43% dari jumlah total seluruh 669,895 km;
- b) Belum semua jembatan kondisinya baik. Kondisi jembatan di Kabupaten Pekalongan kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 86,54% naik di bandingkan tahun 2019 sebesar 85,05% dari jumlah total seluruh 268 unit jembatan; dan
- c) Belum terpenuhinya target RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dimana capaiannya baru mencapai 38,00% di tahun 2020.

### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan. Sampai dengan Tahun 2020, terdapat luasan kumuh sebesar 8,81% atau sekitar 59,25 Ha;
- b) Masih adanya rumah tidak layak huni. Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2020 sebesar 7,08;
- c) Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu mengakses air minum sampai dengan tahun 2020 sebesar 87,83%. Hal ini belum memenuhi target 100% akses pelayanan air minum atau akses universal di akhir tahun 2020;
- d) Belum semua rumah tangga terlayani sanitasi dengan baik, total rumah tangga yang mampu mengakses sanitasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 86,06%.

### 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Belum optimalnya upaya penjangaan ketertiban dan ketenteraman. Persentase penyelesaian pelanggaran Perda sebesar 87,14% di tahun 2020 dengan jumlah pelanggar perda sebanyak 70 kasus dan terselesaikan sebesar 61 kasus; dan
- b) Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan terbatasnya jumlah anggota Satpol PP. Jumlah Petugas Satpol PP sampai dengan tahun 2020 sebesar 128 orang yang melayani 968.821 penduduk.

### 6) Sosial

- a) Masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani, PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baru mencapai 4,96% pada tahun 2020; dan



- b) Masih adanya fakir miskin yang belum terdata dan belum tertangani, Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi baru mencapai 0,45% pada tahun 2020.

## **b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1) Tenaga Kerja**

- a) Masih relatif tingginya angka TPT. Capaian TPT tahun 2020 sebesar 6,97% mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar 4,43% akibat pandemi COVID-19.; dan
- b) Masih tingginya pencari kerja yang belum mampu ditempatkan, TPAK pada 2020 sebesar 70,90% naik dibandingkan dengan TPAK 2019 sebesar 70,32%.

### **2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020 yaitu sebesar 92,48 dari kondisi ideal 100, sementara itu apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah angka tersebut lebih tinggi. Angka IPG provinsi Jawa Tengah sebesar 91,89;
- b) Masih rendahnya keberdayaan perempuan ditunjukkan dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 sebesar 72,82 dengan rata-rata masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Apabila dianalisis lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pekalongan ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki;
- c) Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan daerah, hal ini didindikasikan dengan rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD sebesar 26,66% di tahun 2020;
- d) Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, pada tahun 2020 hanya mencapai 13,31%, mengalami kenaikan dari sebesar 13,11%; dan
- e) Rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di lembaga swasta. Tahun 2020 persentase perempuan sebagai tenaga profesional di lembaga swasta sebesar 9,11%, sama dengan dari tahun 2019.

### **3) Pangan**

- a) Produksi kedelai tahun 2020 sebanyak 337 ton masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan yang mencapai 9.821 ton sehingga terjadi kekurangan atau defisit sebesar 9.484 ton sehingga mendatangkan kedelai dari luar wilayah Kabupaten Pekalongan;
- b) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Hal ini ditandai dengan dengan skor PPH walaupun naik sebesar 88,60 di tahun 2020 dari 84,10 di tahun 2019. angka ini belum ideal karena terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu.

### **4) Pertanian**

- a) Belum optimalnya data base tentang pemanfaatan lahan/tanah. Ketidakakuratan data pertanian dalam hal substansi/kelas/status, maupun koordinat menyebabkan benturan antar sektor/kepentingan dan di kawasan budidaya menyebabkan benturan antar pemangku kepentingan atas tanah.
- b) Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan (proses penerbitan sertifikat) tanah warga.

Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pensertifikatan tanah warga masih belum optimal. Selama ini berbagai program sertifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BPN (program Prona).

#### **5) Lingkungan Hidup**

- a) Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari tahun 2019 sebesar 48,26 menjadi 62,52 di tahun 2020. IKLH 2020 belum memenuhi target sesuai yg direncanakan karena hasil penguji kualitas air sungai dan udara di 4 lokasi belum dapat mempresentasikan nilai IKLH secara baik;
- b) Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan kondisi Persentase pengurangan sampah diperkotaan tahun 2020 sebesar 26,34%;
- c) Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan, ditunjukkan dengan persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 52,67% artinya 47,33% sampah masih belum terangkut;
- d) Permasalahan utama pengangkutan sampah di Kabupaten Pekalongan adalah wilayah yang terkena rob, sehingga pelayanan pengangkutan sulit dijangkau; dan
- e) Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah, Kebutuhan kontainer sampah sebesar 514 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 120 unit kontainer sampah di Kabupaten Pekalongan.

#### **6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a) Belum optimalnya capaian kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Wajib KTP EL-Pemula tahun 2020 sebesar 98,66%, rasio bayi ber-akte kelahiran sebesar 95,26, persentase penduduk usia 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran sebesar 100,00% dan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 75,18%; dan
- b) Belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2020 hanya mampu tercapai 86,78% meskipun trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

#### **7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tahun 2020 masih cukup rendah berkisar 1,00; dan
- b) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 23,15% pada tahun 2020.

#### **8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- a) Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana, dilihat dari cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 80,42%;
- b) Masih tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 8,68%; dan
- c) Tingginya cakupan PUS dengan usia di bawah 20 tahun. Hal ini ditunjukkan bahwa cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 1,71% pada tahun 2020.

#### **9) Perhubungan**

- a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas jalan pada jalan. Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) baru mencapai 65,00% di tahun 2020; dan

- b) Belum optimalnya pemanfaatan terminal tipe C yang ada di Kabupaten Pekalongan.

#### **10) Komunikasi dan Informatika**

- a) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat luas. Pada tahun 2019 perangkat daerah yang memiliki *website* sudah mencapai 100,00%, namun demikian informasi yang disajikan belum *up to date*.
- b) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government dan penerapan blueprint *e-Government* belum optimal. Jumlah aplikasi *e-goverment* di lingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah 70 aplikasi pada tahun 2020;
- c) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi; dan
- d) Belum adanya unit pengaduan *online* terpadu.

#### **11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a) Belum optimalnya kinerja koperasi dan UMKM yang aktif. Persentase kinerja koperasi dan UMKM yang aktif di Tahun 2020 baru mencapai 37,18%;
- b) Masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2020 sebesar 37,56% koperasi yang tidak aktif dari total 623 koperasi; dan
- c) Masih tingginya persentase koperasi yang tidak sehat. Pada Tahun 2020 terdapat 35,04% koperasi yang tidak sehat.

#### **12) Penanaman Modal**

- a) Belum optimalnya pelayanan perijinan. Lama rata-rata pelayanan perijinan di tahun 2020 sebesar 5 hari;
- b) Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Walaupun mengalami peningkatan jumlah investor di tahun 2020 sebanyak 210 namun nilai investasi turun dari tahun 2019 sebesar 1,297 trilyun menjadi 1,193 trilyun di tahun 2020.

#### **13) Kepemudaan Dan Olah Raga**

- a) Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan yang ada. Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebesar 33,33% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar mencapai 62,50% karena pandemi COVID-19; dan
- b) Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi. Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional baru mencapai 0,00% di tahun 2020 karena pandemi COVID-19.

#### **14) Statistik**

- a) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;
- b) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah; dan
- c) Belum tersedianya database yang berisi data dan informasi yang valid dan *up to date*.
- d) Belum optimalnya peran dan fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data.

#### **15) Persandian**

Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

**16) Kebudayaan**

- a) Belum tersedianya gedung kesenian/sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni. Sampai dengan tahun 2020 baru terdapat 1 gedung kesenian yang belum optimal pengelolaannya;
- b) Belum optimalnya keikutsertaan festival seni dan budaya. Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya Tahun 2020 baru mencapai 66,00%; dan

**17) Perpustakaan**

- a) Jumlah perpustakaan desa yang sudah memenuhi standart pada tahun 2020 baru mencapai 84 unit dari jumlah total sebanyak 187 unit;
- b) Masih sedikitnya jumlah jumlah mobil perpustakaan keliling hanya 3 unit di tahun 2020 yang melayani seluruh wilayah kabupaten; dan
- c) Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 14.469 orang karena pandemi COVID -19 sehingga perpustakaan tutup sepanjang Bulan Maret-Juni 2020 tutup, armada perpustakaan dan pameran juga tidak dilaksanakan

**18) Kearsipan**

- a) Masih rendahnya pengelolaan arsip secara baku. Capaian 2020 sebesar 60,00%;
- b) Masih belum optimalnya duplikasi arsip ke dalam bentuk digital, tahun 2020 baru mencapai 2.527 dokumen; dan
- c) Belum optimalnya jumlah penyelamatan arsip tekstual. Tahun 2020 sebesar 224.591 dokumen.

**c. Urusan Pemerintahan Pilihan****1. Kelautan dan Perikanan**

- a) Masih rendahnya rata-rata pendapatan nelayan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp. 1.403.178,- masih di bawah UMK 2020 sebesar Rp. 2.018.161,27;
- b) Masih belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya mencapai 8.516,74 ton sedangkan untuk perikanan tangkap mencapai 5.381,26 ton yang disebabkan lemahnya permodalan, manajemen dan ketampilan.

**2. Pariwisata**

- a) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Baru 3 (tiga) obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah yaitu : Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri;
- b) Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 sejumlah 115.756 orang menurun dari tahun 2019 sebesar 236.244 orang sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19;
- c) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Nilai pendapatan sektor pariwisata turun dari tahun 2019 sebesar Rp 1,697 milyar menjadi sebesar Rp 802,136 juta sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19 sepanjang Tahun 2020;
- d) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.

**3. Pertanian**

- a) Belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, yaitu 53,02 kuintal/ha di tahun 2020;
- b) Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan;

- c) Belum terbangunnya kawasan agropolitan.

#### **4. Perdagangan**

- a) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar;
- b) Belum tersedianya pusat perdagangan dan agrobisnis.
- c) Belum optimalnya ekspor komoditas. Nilai ekspor perdagangan dari tahun 2019 sebesar 32.910 ribu US\$ menurun menjadi 14.289 ribu US\$ di tahun 2020. Karena adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020.

#### **5. Perindustrian**

- a) Belum optimalnya pertumbuhan industri kecil dan menengah sehingga memperlambat dalam penyerapan tenaga kerja; Pada tahun 2020 pertumbuhan industri 0,60% sehingga hanya mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 62.681 orang;
- b) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk industri yang ditandai kurang berkembangnya inovasi sistem produksi;
- c) Masih terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi industri mikro kecil.

#### **6. Transmigrasi**

- a) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) tidak ada di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah transmigran tahun 2019 yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi UPT Tanjung Buka SP-6 B Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebanyak 2 KK berjumlah 6 Jiwa;
- b) Masih kurangnya kesesuaian ketrampilan dan minat dari calon transmigran dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan transmigrasi.

### **d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan**

- a) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan penganggarannya.

#### **2. Keuangan**

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu;
- b) Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah; dan
- c) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah.

#### **3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

- a) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b) Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).

#### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

#### **5. Pengawasan**

- a) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD);

- b) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah); dan
- c) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing Perangkat Daerah.

#### 6. Pemerintahan Umum

- a) Belum optimalnya evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah (Perda dan Perkada);
- b) Belum optimalnya pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah;
- d) Belum semua unit aktifitas perangkat daerah telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (*standar operasional prosedur*);
- e) Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui peningkatan hasil penilaian SAKIP dengan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja;
- f) Belum semua unit-unit pelayanan Perangkat Daerah memiliki pedoman Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik (pengukuran IKM) secara berkala; dan
- g) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan dan PATEN di masing masing kecamatan.

### 3. Rumusan Permasalahan hasil Evaluasi RKPD 2020 dan Data Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.



**Gambar 2.107**  
**Rumusan Masalah**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

### BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

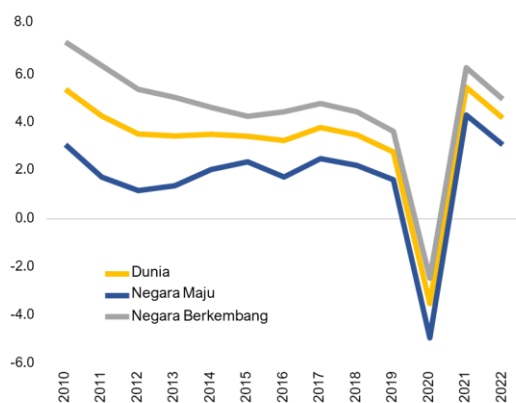
Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memberikan penjelasan mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 dan tahun 2022 yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

##### 1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global saat ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebagai akibat dari adanya pembatasan aktivitas fisik dan sosial secara global. Perkiraan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 yang mengalami *rebound* namun dengan ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun masih sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi COVID-19.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen)



Sumber: WEO IMF Januari 2021

Perkiraan Ekonomi Global

	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Resiko Ke Bawah
IMF	-3,5%	5,5%	Deviasi: -0,75%
World Bank	-4,3%	4,0%	1,6%

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Dunia**

Berbagai resiko ke bawah ekonomi dunia tahun 2021 antara lain : pengendalian virus yang belum optimal dan kemungkinan varian virus baru, proses vaksinasi yang lebih lambat dari perkiraan, efektivitas vaksin yang lebih rendah dari perkiraan dan *lock-down* yang semakin banyak. Selain itu volume perdagangan akan meningkat pada tahun 2021, walaupun masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Perdagangan global akan didorong oleh pemulihan ekonomi dan ekspor China yang terlihat di awal tahun 2021. Ekspor Korea meningkat sebesar 11% di bulan Januari 2021 Permintaan China meningkat di awal tahun seiring dengan persiapan tahun baru China. Peningkatan ekspor China didorong oleh tingginya permintaan pasar global terhadap : *Medical equipment and supplies* (masker, obat-obatan, alat Kesehatan, dll) serta peralatan elektronik untuk bekerja dan belajar jarak jauh.

Sementara itu, arus investasi global akan meningkat di Tahun 2021 tetapi dalam nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata dekade sebelum pandemi. Trend investasi ke depan akan lebih pada: sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur yang *high-return*, proyek investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon. Sementara itu, berbagai negara akan mendorong **riset dan adopsi teknologi** sebagai *engine* peningkatan produktivitas jangka panjang.

Sektor pariwisata akan pulih paling lambat, diperkirakan baru akan mencapai tingkat pra krisis pada 2023. Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya travel restrictions, masih lambatnya penanganan virus di beberapa Negara, kekhawatiran konsumen atas keamanan kesehatan, masih lemahnya daya beli masyarakat global dan pergeseran *consumer preference*.

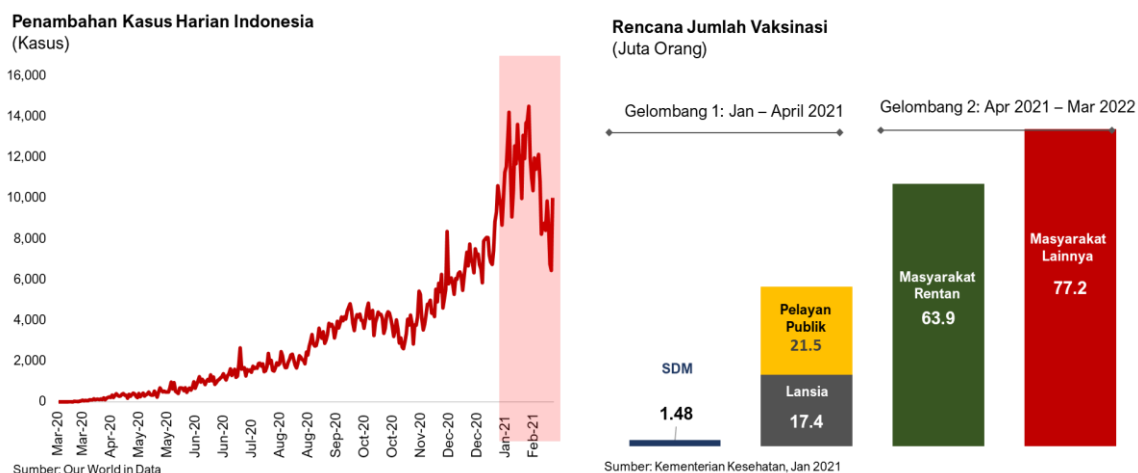
**Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.**

Dengan semangat baru, paradigma baru, cara baru, pemerintah bersama-sama *stakeholder* terkait berupaya memulihkan sosial-ekonomi, dan bangkit untuk melangkah dan berlari. Semua pihak harus bekerja *extra-ordinary*, tidak konvensional dan tidak birokratis. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Diharapkan Indonesia dapat belajar dari tahun 2020 dan bangkit di tahun 2021. Beberapa pelajaran di Tahun 2020 yang dapat di petik antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menurun, bahkan ke arah negatif. Kegiatan ekonomi dan penjualan barang dan jasa mengalami penurunan dengan laju yang berbeda-beda. Angka kemiskinan dan pengangguran mengalami kenaikan. Ekonomi yang melambat ini berpengaruh pada investasi dan kesempatan kerja yang melemah;
- b. Indonesia untuk melakukan adaptasi dan perubahan yang cepat dalam mengelola kebijakan pembangunan, pelayanan dasar, maupun pola dan gaya hidup masyarakat;
- c. Respon Indonesia atas dampak COVID-19 bervariasi sesuai konteks lingkungan strategis;
- d. Indonesia melakukan penyesuaian struktural yang cepat, tepat, dan terpadu, baik di level pusat dan di level daerah;
- e. Dari sisi keuangan negara dan daerah, Presiden terbitkan Inpres No. 4/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
- f. **Pemerintah terbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020**, tentang: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian, diikuti dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- g. Pandemi Covid-19 juga merupakan **momentum untuk koreksi atas kebijakan pemerintah di berbagai aspek**, dan perlunya arah baru sebagai fondasi ke depan; dan
- h. Pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya **"evolusi yang dipercepat"** pada pilar **transformasi digital**

*Outlook 2021* memperkirakan Pandemi COVID-19 masih akan terjadi pada tahun 2021. Pengendalian penyebaran COVID-19 perlu dilakukan melalui upaya perilaku 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun), vaksinasi COVID-19 dan komunikasi perubahan perilaku. Selain itu dilakukan upaya penguatan sistem kesehatan tes, lacak, dan isolasi (TLI). Adapun situasi perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat disampaikan bahwa terdapat penambahan jumlah kasus harian domestik yang sempat meningkat signifikan pada awal tahun 2021. Oleh karena itu, program vaksinasi yang sudah bergulir harus diimbangi dengan tetap menegakkan 5M di masyarakat serta meningkatkan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*).





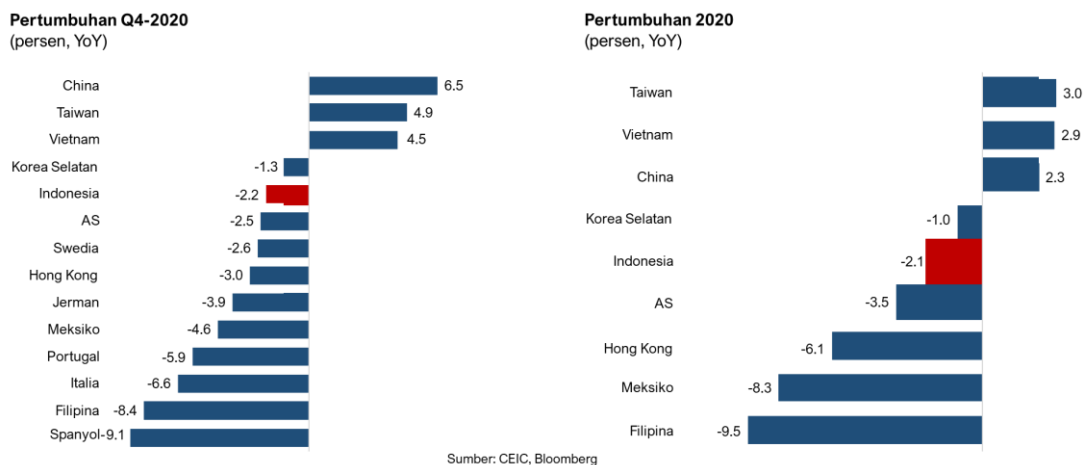
**Gambar 3.2**  
**Rencana Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia**

Sebagai langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, ada enam fokus pembangunan yang akan dilakukan pemerintah di 2021 yaitu :

- (1) Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi,
- (2) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan,
- (3) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
- (4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
- (5) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dan
- (6) Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Selanjutnya dalam menyusun kerangka ekonomi makro 2022 diperlukan sinkronisasi kerangka kebijakan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Peran swasta dan non pemerintah perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan seiring dengan tantangan pembangunan yang besar dan terbatasnya ruang fiskal.

Dibandingkan dengan negara lain, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih kecil. Ekonomi China, Taiwan dan Vietnam mampu tumbuh positif. Namun, pertumbuhan ekonomi negara lain terkoreksi cukup dalam.



**Gambar 3.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sebagian Negara di Dunia**

Peran Pemerintah masih dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan tahun 2022 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing. Strategi kebijakan diarahkan untuk tidak hanya kembali ke tingkat sebelum krisis, tetapi tumbuh lebih baik.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi dan Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2018-2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	Target 2021	Proyeksi 2022
1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	5,17	5,02	-2,07	4,50-5,50	<b>5,40-6,00</b>
	Investasi			-4,90	4,30	6,50-7,20
	Ekspor			-7,70	7,30	6,50-7,10
	Industri Pengolahan			-2,90	5,20	5,60-6,30
	Jasa-Jasa			-1,40	6,00	6,20-6,90
2.	<b>Inflasi (%)</b>	3,13	2,72	1,68	2,50	<b>2,00-4,00</b>
3.	<b>Kemiskinan (%)</b>	9,82	9,41	9,78	9,20-9,70	<b>8,50-9,00</b>
4.	<b>Pengangguran (%)</b>	5,30	5,23	7,07	5,90-6,50	<b>5,50-6,20</b>

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2021;

Dari tabel 3.1, dapat dijelaskan bahwa COVID-19 telah merubah arah perekonomian global dan nasional secara drastis. Optimisme pemulihan global seketika berubah menjadi ancaman resesi pasca pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar **5,40-6,00 %**, didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksinasi telah meluas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari: **investasi, ekspor, dan industri pengolahan**. Investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan. Investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi pengangguran pasca pandemi. Ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang sempat turun karena dampak krisis COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif terjadi melalui peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi. Stabilitas makro ekonomi terjaga, tercemrin dari tingkat inflasi yang rendah sebesar 2,00-4,00 % di tahun 2022, nilai tukar rupiah yang terjaga, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilakukan, dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran masih sebesar 4,8-5,5 persen PDB.

Meskipun kasus pertama Pandemi COVID-19 baru mulai Maret, tingkat konsumsi masyarakat terutama di perkotaan sudah mengalami penurunan yang signifikan pada awal 2020. Kelompok miskin dan rentan di pedesaan relatif belum terdampak. Salah satu penyebabnya yaitu penyempurnaan penggunaan Dana Desa meningkatkan resiliensi mereka. Pandemi COVID-19 meningkatkan kerentanan masyarakat, kerentanan akibat sakit dan juga penurunan pendapatan akibat pengurangan jam kerja dan PHK. Lapangan kerja menyusut, penganggur meningkat. Pemerintah di Tahun 2022 berupaya mendorong pengurangan pengangguran sebesar **8,50-9,00 %** melalui pemulihan ekonomi untuk penciptaan kesempatan kerja (*demand*) dan peningkatan kualitas angkatan kerja agar produktif dan berdaya saing (*supply*). Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan di Tahun 2022 dengan target **8,50-9,00 %** dilaksanakan melalui menata program-program penanggulangan kemiskinan antara lain :

- a. Transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi  
Perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100% penduduk.
- b. Integrasi program dan peningkatan SDM pendamping  
Integrasi dan koordinasi bantuan sosial dan jaminan sosial. Layanan rujukan terpadu dan sertifikasi SDM.

- c. Pengembangan mekanisme distribusi  
Pengembangan distribusi secara digital (untuk transfer tunai), dan platform PT. POS maupun Ojek *Online* untuk perkotaan (sembako dan bantuan lainnya)
- d. Pengembangan skema perlindungan sosial adaptif  
Adaptasi skema perlindungan sosial karena adanya goncangan alam, sosial ekonomi, dan kesehatan.
- e. Digitalisasi penyaluran  
Menggunakan : platform digital (integrasi data); NIK; e-KYC dan pembukaan satu rekening bansos; dan platform pembayaran perbankan dan fintech.
- f. Reformasi skema pembiayaan  
Pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan.

## 2. Tantangan Pembangunan 2021 dan 2022

Tantangan dalam menangani COVID-19 secara tepat, cepat, terukur, dan holistik. Vaksin akan menjadi "*game changer*" dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Masih adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat, walaupun lebih moderat dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk itu, pentingnya, kita memetakan sektor mana yang paling parah, moderat dan ringan akibat pandemi COVID-19. Ada sektor ekonomi yang bertahan, bahkan justru meningkat di tengah pandemi. Peluang untuk memanfaatkan sektor yang meningkat seperti *e-commerce*, logistik, *food delivery*, teknologi, obat-obatan, *streaming service*, ekonomi kreatif, dan bahkan tanaman hias dan anggrek yang menjadi trend baru di era *Work from Home, Stay at Home*.

### **Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.**

Dengan semangat baru, paradigma baru, cara baru, kita pulihkan sosial-ekonomi, dan bangkit untuk melangkah dan berlari. Kita harus bekerja *extra-ordinary*, tidak konvensional dan tidak birokratis. Menata kembali dan memperkuat **industri, pariwisata dan investasi**. Industri manufaktur yang mempertimbangkan keunggulan wilayah-wilayah. Mendorong **sentra-sentra ekonomi baru skala kecil dan menengah** yang tersambung dengan konektivitas antar wilayah. Menata **sistem kesehatan nasional, sistem ketahanan bencana, sistem ketahanan pangan, maupun sistem perlindungan sosial**.

Revitalisasi UMKM merupakan arah baru di tahun 2021. Ekonomi perdesaan sebagai penyangga ekonomi nasional. Merubah orientasi urbanisasi, menjadi "*ruralisasi*" sebagai akibat banyaknya penduduk perkotaan yang kembali ke kampung halaman di era pandemi COVID-19 ini. Karena itu, desain besar transformasi ekonomi perdesaan menjadi agenda penting di tahun 2021. *Digital platform* hadir untuk memperkuat rantai ekonomi UMKM dan ekonomi desa ke global dan nasional *marketplace*. Infrastruktur juga diarahkan ke sentra-sentra ekonomi rakyat di pelosok Republik ini.

Tahun 2021 adalah momentum yang tepat untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup, energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan rendah karbon, mitigasi perubahan iklim sebagai cerminan "*green economy*" dan bahkan, "*blue economy*". Walaupun pandemi COVID-19 memberikan pukulan yang kuat terhadap ekonomi, namun berbagai riset menyimpulkan pandemi COVID-19 memberikan dampak positif bagi lingkungan. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri menurun di berbagai negara. Karena itu, "*new reality*" saat ini mendorong pentingnya industri yang berbasis energi baru dan terbarukan.

Selanjutnya **Tahun 2022** merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Gambaran risiko dan tantangan kerangka ekonomi makro 2022 antara lain :

**a. Pengendalian Pandemi COVID-19**

Jumlah kasus masih terus meningkat, sementara vaksinasi diperkirakan baru selesai awal tahun 2022;

**b. Pemulihan Aktivitas Ekonomi Global**

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun, masih sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi COVID-19;

**c. Perubahan Harga Komoditas Global**

Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (batu bara dan CPO) akan relatif terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat *Green Recovery* paska COVID-19;

**d. Pemulihan Dunia Usaha**

Sebagian dunia usaha tutup permanen atau bangkrut, menyebabkan luka permanen bagi perekonomian. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan;

**e. Pemulihan Konsumsi Domestik**

Sebagian masyarakat masih menganggur dan mengalami penurunan pendapatan. Tingkat keyakinan konsumen, terutama kelas menengah masih pada tingkat pesimis.

**f. Ruang Terbatas Stimulus Fiskal dan Moneter**

Dari sisi kebijakan fiskal, lebarnya defisit akan berdampak pada keberlanjutan utang, sementara pada tahun 2023 defisit dituntut untuk kembali pada 3 persen PDB. Dari sisi kebijakan moneter, melimpahnya likuiditas dan permintaan agregat yang meningkat akan membatasi ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif.

**3. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2022**

COVID-19 berimbas besar bagi ekonomi nasional, banyak masyarakat berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dukungan pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menghindari lonjakan pengangguran dan angka kemiskinan. tahun 2022 merupakan tahun kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat dari tahun sebelumnya serta menyiapkan landasan penting untuk ekonomi Indonesia bangkit dari COVID-19.

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen. Sebelas kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya enam kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara

lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2020 yang mencapai **-1,89%**, mengalami perlambatan akibat pandemic COVID-19 dibandingkan tahun 2019 sebesar **5,35%**. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2021 diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar **3,00-4,00%** serta **4,00-5,00%** di tahun 2022. Adapun Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 dapat dijelaskan dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2021**

No	Wilayah	2018	2019	2020	Proyeksi	
					2021	2022
1	Nasional (%)	5,17	5,02	-2,07	4,50-5,50	5,40-6,00
2	Provinsi Jawa Tengah (%)	5,30	5,40	-2,65	4,10	3,93-5,20
3	Kab. Pekalongan (%)	<b>5,76</b>	<b>5,35</b>	<b>-1,89</b>	3,00-4,00	4,00-5,00

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2021 (Data diolah)

#### b. Kemiskinan dan Pengangguran

Sejalan dengan melemahkan pertumbuhan ekonomi global, nasional dan daerah, pandemi COVID-19 juga berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat jumlah penduduk di sekitar garis kemiskinan yang masih sangat tinggi, meskipun persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan tren penurunan yang baik, namun **berpotensi meningkat akibat dampak ekonomi COVID-19**.

Berikut disampaikan angka capaian dan proyeksi jumlah dan persentase penduduk miskin nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Wilayah	2018	2019	2020	Proyeksi	
					2021	2022
1.	Nasional (%)	9,82	9,41	9,78	9,20 - 9,70	8,50 - 9,00
2.	Prov. Jawa Tengah (%)	11,32	10,80	11,41	11,94 - 11,02	11,42 - 10,27
3.	Kab. Pekalongan (%)	10,06	9,71	10,19	9,50 - 10,00	9,50 - 10,00

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Bappeda Litbang Kab. Pekalongan; data diolah, Data Maret 2016-2020

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter-PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 6,97 persen lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas

pertumbuhan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 4,00-5,00 persen di tahun 2022 dari 6,97 persen di Tahun 2019.

Selengkapnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 dapat dijelaskan dalam tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

No	Wilayah	2018	2019	2020	Proyeksi	
					2021	2022
1.	Nasional (%)	5,30	5,23	7,07	7,70 - 9,10	5,50 - 6,20
2.	Prov. Jawa Tengah (%)	4,51	4,49	6,48	4,94 - 5,67	5,96 - 5,88
3.	Kab. Pekalongan (%)	4,41	4,43	6,97	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Bappeda Litbang Kab. Pekalongan; data diolah, Data Maret 2016-2020

### c. Inflasi

Sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi sebesar 2,36 persen menurun dari sebesar 2,80 persen di tahun 2019. Menurunnya inflasi di daerah antara lain disebabkan terjaganya pemenuhan ketersediaan pasokan, pemenuhan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dengan mempertahankan kearifan lokal di masyarakat. Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran  $3,0 \pm 1$  persen.

Perbandingan inflasi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2019 dan proyeksi 2020-2021 pasca pandemi COVID-19 dapat dilihat dalam tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022**

No	Wilayah	2018	2019	2020	Proyeksi	
					2021	2022
1	Nasional (%)	3,13	2,72	1,68	$3,0 \pm 1$	$3,0 \pm 1$
2	Provinsi Jawa Tengah (%)	2,82	2,81	1,56	$3,0 \pm 1$	$3,0 \pm 1$
3	Kab. Pekalongan (%)	2,83	2,80	2,36	$3,0 \pm 1$	$3,0 \pm 1$

Sumber: BPS Provinsi Jateng; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2021 (Data diolah)

### d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja pembangunan pemerintah daerah di berbagai sektor pembangunan masih mempertimbangkan kemandirian dan kekuatan fiskal yang dimiliki serta dampak dengan adanya pandemi COVID-19, sementara konsumsi rumah tangga akan meningkat jika pemerintah daerah mampu untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar relatif stabil, dan mendukung peningkatan upah.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong melalui peningkatan pertumbuhan 3 (tiga) sektor unggulan daerah yaitu (1) industri pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; serta (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha lain yang juga diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah (1) jasa pendidikan; (2) konstruksi; dan (3) penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan distribusi PDRB harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Perkembangan Kontribusi

Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pekalongan untuk capaian tahun 2018-2020 dan proyeksi tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.6 dan 3.7.

**Tabel 3.6**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2018		2019*		2020**		2021**		2022**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.638.653,84	17,07	3.767.422,28	16,48	3.878.724,67	17,01	4.019.963,02	17,07	4.166.344,36	16,95
B	Pertambangan & Penggalian	903.875,42	4,24	997.946,51	4,37	990.308,79	4,34	1.052.158,91	4,47	1.124.117,45	4,57
C	Industri pengolahan	6.641.106,17	31,16	7.102.497,93	31,07	7.010.931,99	30,75	7.182.451,14	30,50	7.367.952,23	29,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31.067,82	0,15	32.819,31	0,14	33.647,77	0,15	36.442,68	0,15	39.552,81	0,16
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	7.719,01	0,04	8.185,04	0,04	8.522,81	0,04	9.105,28	0,04	9.420,73	0,04
F	Konstruksi	1.488.508,36	6,98	1.589.755,34	6,96	1.546.617,98	6,78	1.647.128,73	7,00	1.760.670,15	7,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.856.931,40	13,40	3.086.285,19	13,50	3.059.501,22	13,42	3.123.591,14	13,27	3.293.213,16	13,40
H	Transportasi dan Pergudangan	506.830,37	2,38	556.439,53	2,43	450.822,99	1,98	472.317,24	2,01	502.313,06	2,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.111.495,08	5,21	1.212.678,69	5,31	1.197.711,76	5,25	1.210.782,18	5,14	1.325.086,53	5,39
J	Informasi dan Komunikasi	449.099,23	2,11	506.397,62	2,22	588.205,40	2,58	612.840,37	2,60	650.601,17	2,65
K	Jasa keuangan dan Asuransi	539.748,73	2,53	565.543,16	2,47	568.637,08	2,49	575.966,85	2,45	587.971,15	2,39
L	Real Estat	286.386,08	1,34	303.510,41	1,33	307.621,10	1,35	322.811,58	1,37	339.245,97	1,38
M,N	Jasa Perusahaan	67.212,43	0,32	76.016,78	0,33	76.339,30	0,33	81.930,78	0,35	85.224,78	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	681.073,38	3,20	717.233,71	3,14	722.214,45	3,17	739.785,72	3,14	768.514,39	3,13
P	Jasa Pendidikan	1.361.804,90	6,39	1.520.663,23	6,65	1.509.296,68	6,62	.552.442,49	6,59	1.603.680,37	6,52
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	295.719,26	1,39	320.311,14	1,40	363.879,98	1,60	395.608,02	1,68	415.538,52	1,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	447.080,43	2,10	493.357,73	2,16	490.208,96	2,15	511.798,46	2,17	545.660,03	2,22
<b>(PDRB)</b>		<b>21.314.311,91</b>	<b>100</b>	<b>22.857.063,60</b>	<b>100</b>	<b>22.803.192,93</b>	<b>100</b>	<b>23.547.124,57</b>	<b>100</b>	<b>24.585.106,85</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

**Tabel 3.7**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2018		2019*		2020**		2021**		2022**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.347.930,82	15,12	2.390.852,86	14,62	2.415.676,92	15,05	2.420.193,12	14,55	2.492.465,94	14,36
B	Pertambangan & Penggalian	572.036,43	3,68	623.600,70	3,81	607.289,51	3,78	610.059,27	3,67	678.330,71	3,91
C	Industri pengolahan	4.915.972,98	31,66	5.150.118,50	31,49	4.948.693,19	30,84	4.950.858,91	29,76	5.138.454,50	29,61
D	Penga. Listrik & Gas	27.160,19	0,17	28.580,06	0,17	29.770,85	0,19	31.953,17	0,19	32.717,06	0,19
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	7.105,57	0,05	7.406,29	0,05	7.610,70	0,05	8.318,04	0,05	7.826,93	0,05

No	Sektor	2018		2019*		2020**		2021**		2022**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Limbah dan Daur ulang										
F	Konstruksi	1.059.213,80	6,82	1.107.473,11	6,77	1.072.809,20	6,69	1.198.672,29	7,20	1.344.474,05	7,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.309.667,37	14,88	2.441.492,14	14,93	2.391.408,72	14,90	2.441.840,17	14,68	2.569.752,60	14,81
H	Transportasi dan Pergudangan	430.582,50	2,77	464.279,40	2,84	365.315,70	2,28	370.769,62	2,23	383.676,60	2,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	846.571,56	5,45	910.006,35	5,56	889.405,96	5,54	901.945,31	5,42	907.662,34	5,23
J	Informasi dan Komunikasi	470.251,82	3,03	524.677,12	3,21	608.707,47	3,79	617.874,37	3,71	631.148,22	3,64
K	Jasa keuangan dan Asuransi	371.949,67	2,40	384.021,32	2,35	389.211,30	2,43	435.988,41	2,62	463.830,43	2,67
L	Real Estat	240.734,60	1,55	250.930,66	1,53	252.244,64	1,57	292.594,23	1,76	305.564,36	1,76
M,N	Jasa Perusahaan	47.738,38	0,31	52.669,75	0,32	51.598,10	0,32	67.422,80	0,41	69.142,45	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	480.746,87	3,10	499.436,96	3,05	493.818,97	3,08	553.297,36	3,33	565.130,40	3,26
P	Jasa Pendidikan	830.022,50	5,35	904.962,74	5,53	885.186,15	5,52	989.641,56	5,95	995.732,82	5,74
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	216.294,70	1,39	231.709,69	1,42	260.337,18	1,62	293.457,26	1,76	304.461,91	1,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	351.071,18	2,6	384.133,34	2,35	378.427,21	2,36	451.903,31	2,72	463.763,12	2,67
	<b>(PDRB)</b>	<b>15.525.050,94</b>	<b>100</b>	<b>16.356.350,99</b>	<b>100</b>	<b>16.047.511,77</b>	<b>100</b>	<b>16.636.789,21</b>	<b>100</b>	<b>17.354.134,44</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Struktur lapangan usaha bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 dan tahun 2022 diproyeksikan tidak banyak bergeser bila dibandingkan dengan tahun 2020. Sumbangan terbesar dihasilkan dari dari lapangan usaha (1) industri pengolahan, kemudian (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (3) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (4) jasa pendidikan; (5) konstruksi; dan (6) penyediaan akomodasi dan makan minum.

#### e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten pekalongan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018-2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,90 juta rupiah naik menjadi 25,46 juta rupiah di tahun 2019.. Namun demikian PDRB perkapita menurun dari tahun 2019-2020 karena adanya pandemi COVID-19 sebesar 25,25 juta rupiah. Sedangkan untuk tahun 2021 diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 25,36 juta rupiah dan di tahun 2022 sebesar Rp. 25,45 juta rupiah.

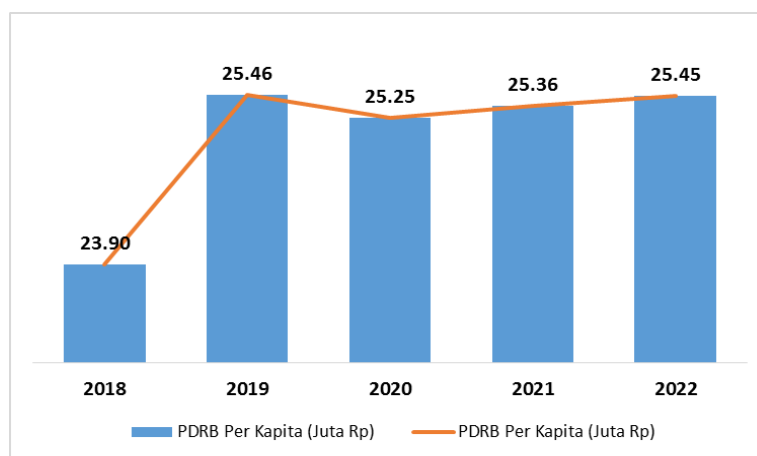
Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.8 dan gambar 3.4.

**Tabel 3.8**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2021**

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rp)
2018	23,90
2019	25,46
2020	25,25
2021	25,36*
2022	25,45*

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2021 \*) Angka Proyeksi



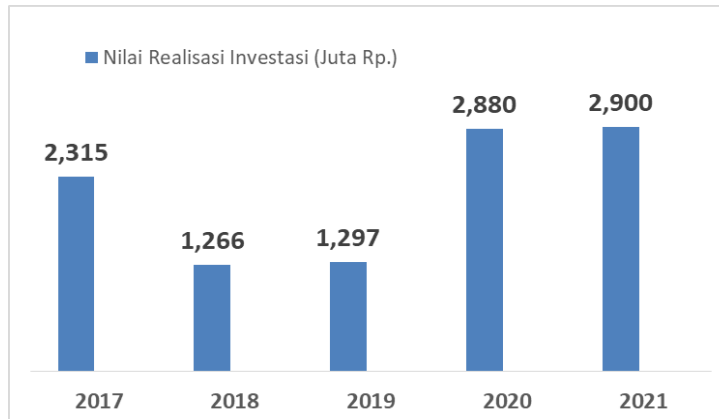


**Gambar 3.4**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022**

#### f. Nilai Investasi

Investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga setiap daerah atau wilayah berusaha menciptakan iklim yang sehat guna menggairahkan investasi.

Realisasi jumlah nilai investasi berskala nasional untuk PMDN/PMA relatif turun dari tahun 2017 sebesar Rp 2,31 trilyun menjadi Rp 1,297 trilyun di tahun 2019. Adapun realisasi dan proyeksi jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pekalongan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 3.5.



**Gambar 3.5**  
**Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Kabupaten Pekalongan tahun 2017-2021**

Guna mendukung sasaran pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka perekonomian di Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2022 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Data Indikator Makro Ekonomi**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022*
1.	PDRB (juta Rp.)					
	Harga Berlaku	21.314.311,91	22.857.063,60	22.803.192,93	23,547,124,57	24,585,106,85
	Harga Konstan	15.525.050,94	16.356.350,99	16.047.511,77	16.636.789,21	17.354.134,44
2.	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	23,90	25,46	25,25	25,36	25,45
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	5,35	-1,89	3,00-4,00	4,00-5,00
4.	Inflasi (%)	2,83	2,80	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1
5.	TPT (%)	4,41	4,43	6,97	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00
6.	Kemiskinan (%)	10,06	9,71	10,19	9,50 - 10,00	9,50 - 10,00
7.	<b>IPM</b>	<b>68,97</b>	<b>69,71</b>	<b>69,63</b>	<b>69,70</b>	<b>69,75</b>
	▪ Angka Harapan Hidup (th)	73,53	73,57	73,69	73,71	73,74
	▪ Harapan Lama Sekolah (th)	12,17	12,40	12,41	12,42	12,44
	▪ Rata-Rata Lama Sekolah (th)	6,74	6,88	6,91	6,92	6,94
	▪ Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	10.221	10.508	10.312	10.420	10.520
8.	Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp.)	1,266 T	1,297 T	2,880 T	2,900 T	

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2021

\*) Angka Proyeksi

## B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri

dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2022 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada :

1. Prioritas Kesatu, pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua, pada pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan.

Tahun 2022 tantangan pandemi dan ekonomi masih tinggi. Laju penyebaran pandemi COVID-19 harus terus ditekan dan pelaksanaan vaksin harus terus ditingkatkan. Kebijakan fiskal harus disusun secara berimbang, terukur dan terarah dengan mengedepankan azas kehati-hatian dan keberlanjutan kesehatan fiskal jangka panjang. Pengelolaan APBD dan keuangan daerah yang baik sangat krusial untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan merata. Koordinasi dan sinergi kelembagaan harus terus diperkuat untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan.

Arah kebijakan fiskal tahun 2022 fokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan reformasi struktural yang diarahkan pada :

#### 1. *Human Capital*

- a. Pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing melalui peningkatan sinergi pusat-daerah, penguatan PAUD, kompetensi guru, sarpras dan *link and match*;
- b. Sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal melalui penguatan kualitas kesehatan dan reformasi sistem kesehatan.
- c. Perlindungan Sosial sepanjang hayat dan adaptif yang tepat sasaran kepada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.

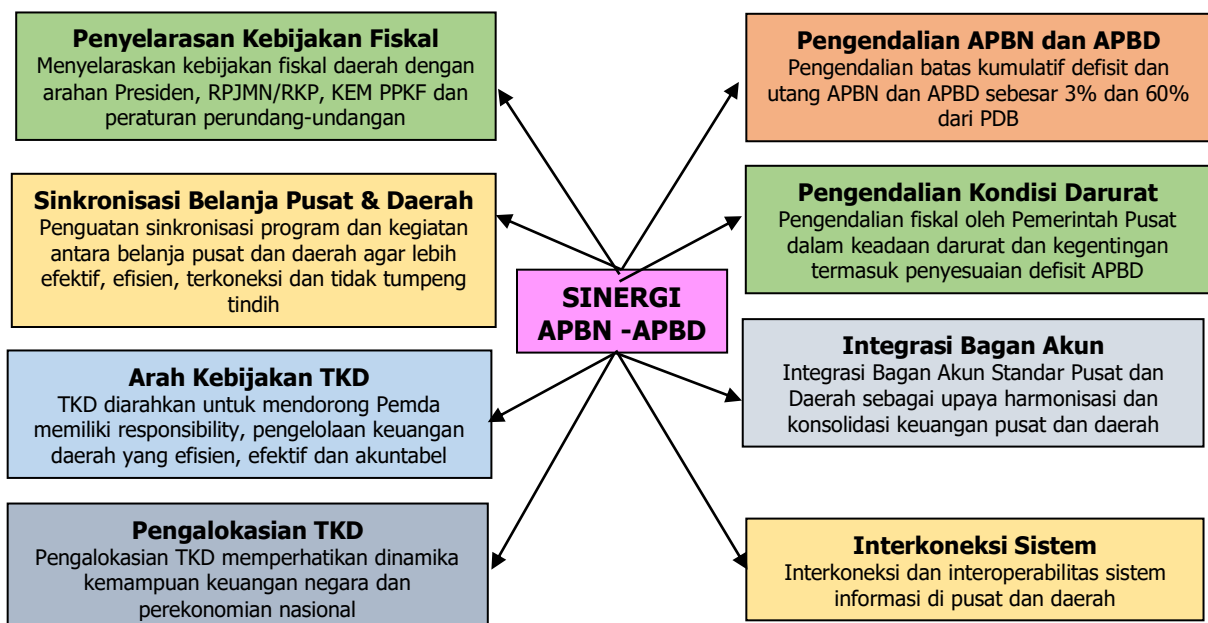
## 2. *Physical Capital*

Infrastruktur guna mendukung transformasi ekonomi melalui mobilitas, konektivitas, TIK dan produktivitas (PSN) dengan peningkatan harmonisasi antara K/L dan pemerintah daerah dengan BUMDPenugasan/BLU/BLUD.

## 3. *Institusional*

Mendorong Reformasi Birokrasi yang profesional, efektif dan berintegritas untuk penguatan Daya Saing.

Reformasi fiskal diarahkan pada Reformasi Perpajakan, Reformasi Penganggaran (*zero based budgeting*) berupa penguatan *redesign* sistem perencanaan dan penganggaran, penganggaran yang fokus pada program prioritas, efisien, sinergis dan berbasis hasil, serta subsidi yang tepat sasaran (*targeted*) serta pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*. Efektivitas *recovery* dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di Tahun 2022 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan. Reformasi harus bermutu tinggi dan tidak boleh gagal, untuk itu seluruh *stakeholder* termasuk K/L dan pemerintah daerah harus menjaga komitmen dan sinergi dalam pelaksanaannya.



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2021

**Gambar 3.6**  
**Sinergi Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021- 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Secara umum kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada :

1. Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha;
2. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat, dan prioritas;

3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien dan akuntabel;
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut :

### **1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah pada kurun waktu tahun 2016-2020 serta proyeksi tahun 2021 yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, mengalami fluktuasi yang memiliki kencerungan mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Pekalongan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah. Pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun-tahun sebelumnya (2016-2019). Hal ini disebabkan karena dampak global Pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Namun pada APBD Tahun Anggaran 2021, diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 berdasarkan pada optimisme Pemerintah Daerah dalam menghadapi pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi sejalan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah yang mengacu pada :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antara perangkat daerah terkait;
3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran Daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan; dan
4. Anggaran daerah yang bertumpu pada kepentingan publik dan tepat sasaran.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mulai tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi dan proporsi pembentuk pendapatan daerah tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>310.572.582</b>	<b>305.394.299</b>	<b>311.288.144</b>	<b>341.344.416</b>	<b>341.901.470</b>
1. 1	Hasil Pajak Daerah	40.771.237	47.296.813	65.416.345	78.217.365	74.247.140
1. 2	Hasil Retribusi Daerah	7.397.615	8.583.645	10.166.247	12.809.087	12.726.930
1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.809.131	7.506.942	7.354.576	17.331.867	10.124.616
1. 4	Lain-lain PAD yang Sah	256.594.599	242.006.900	228.350.975	232.986.096	244.802.784
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.182.370.555</b>	<b>1.282.878.564</b>	<b>1.288.217.218</b>	<b>1.321.954.447</b>	<b>1.206.915.408</b>
2. 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.291.841	29.653.264	26.222.396	21.533.683	30.732.286
2. 2	Dana Alokasi Umum	926.571.243	910.294.366	915.154.037	974.248.885	885.145.414
2. 3	Dana Alokasi Khusus	222.507.471	342.930.934	346.840.786	326.171.879	291.037.708
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yg Sah</b>	<b>294.408.538</b>	<b>479.634.989</b>	<b>501.943.940</b>	<b>519.472.090</b>	<b>512.981.597</b>
3. 1	Pendapatan Hibah	2.550.859	22.400.806	80.711.266	91.613.302	97.954.838
3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	84.684.003	98.757.216	110.590.263	110.523.017	100.595.200
3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.527.576	310.399.175	235.517.071	294.328.778	304.324.192
3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	32.646.100	48.077.793	75.125.339	23.006.993	10.107.367
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.787.351.675</b>	<b>2.067.907.852</b>	<b>2.101.449.302</b>	<b>2.182.770.952</b>	<b>2.061.798.474</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

**Tabel 3.11**  
**Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

NO.	URAIAN	PROPORSI (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Pendapatan Asli Daerah	17,38	14,77	14,81	15,64	16,58
2	Dana Perimbangan	66,15	62,04	61,30	60,56	58,54
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	16,47	23,19	23,89	23,80	24,88
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan dalam APBD tahun 2021 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan harapan pada tahun 2021 perekonomian bisa kembali membaik meskipun masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19.

**Tabel 3.12**  
**Target Tahun 2021, Proyeksi Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan**

KODE	URAIAN	TARGET 2021 (Rp.000)	PROYEKSI 2022 (Rp.000)	PRAKIRAAN MAJU 2023 (Rp.000)
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>479.807.094</b>	<b>412.104.633</b>	<b>455.173.983</b>
4 1 1	Pajak Daerah	99.085.157	78.443.692	101.271.800
4 1 2	Retribusi Daerah	23.617.263	18.076.263	22.572.076
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.233.176	13.233.176	15.869.732
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	343.871.498	302.351.502	315.460.376
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.672.454.743</b>	<b>1.636.901.192</b>	<b>1.673.699.269</b>
<b>4 2 1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.542.635.474</b>	<b>1.513.814.429</b>	<b>1.538.761.390</b>
<b>4 2 1 1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.245.949.183</b>	<b>1.217.128.138</b>	<b>1.242.075.099</b>
<b>4 2 1 1 1</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>924.949.456</b>	<b>896.128.411</b>	<b>903.889.455</b>
4 2 1 1 1 1	Bagi Hasil Pajak	23.443.884	23.443.884	21.674.680
4 2 1 1 1 2	Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam	1.617.126	1.617.126	1.495.089
4 2 1 1 1 3	Dana Alokasi Umum (DAU)	899.888.446	871.067.401	880.719.686
<b>4 2 1 1 2</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>320.999.727</b>	<b>320.999.727</b>	<b>338.185.644</b>
4 2 1 1 1 1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.165.850	95.165.850	100.260.909
4 2 1 1 1 2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	225.833.877	225.833.877	237.924.735
<b>4 2 1 2</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>33.289.185</b>	<b>33.289.185</b>	<b>33.289.185</b>
4 2 1 2 1	Dana Insentif Daerah	33.289.185	33.289.185	33.289.185
<b>4 2 1 5</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>263.397.106</b>	<b>263.397.106</b>	<b>263.397.106</b>
4 2 1 5 1	Dana Desa	263.397.106	263.397.106	263.397.106
<b>4 2 2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>129.819.269</b>	<b>123.086.763</b>	<b>134.937.880</b>
<b>4 2 2 1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>112.301.269</b>	<b>123.086.763</b>	<b>124.691.293</b>
4 2 2 1 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112.301.269	123.086.763	124.691.293
<b>4 2 2 2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>17.518.000</b>	<b>0</b>	<b>10.246.586</b>
4 2 2 2 1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	17.518.000	0	10.246.586
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>88.063.040</b>	<b>82.563.040</b>	<b>156.854.938</b>
4 3 1	Hibah	9.500.000	4.000.000	43.502.922
4 3 3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	78.563.040	78.563.040	113.352.016
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.240.324.877</b>	<b>2.131.568.865</b>	<b>2.285.728.19</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

**Tabel 3.13**  
**Proporsi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021**

KODE	URAIAN	PROPORSI (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21,42
4.2	Pendapatan Transfer	74,65
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,93
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>100,00</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Mempertimbangkan realisasi pendapatan Tahun 2016-2020 dan kondisi APBD Tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2,131 Trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp412,104 Milyar, Dana Transfer sebesar Rp1,636 Trilyun dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp82,563 Milyar. Target PAD Tahun 2022 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp67,702 Milyar atau 14,11% dibandingkan proyeksi pada APBD Induk Tahun 2021. Sumber PAD tersebut diproyeksikan mengalami penurunan dari APBD Induk Tahun 2021 yang terdiri dari pajak daerah turun Rp20,641 Milyar atau 20,83%; retribusi daerah turun Rp5,541 Milyar atau 23,46%; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp41,519 Milyar atau 12,07%. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sama dengan APBD Induk Tahun 2021.

Pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan pendapatan transfer pusat tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya yaitu sebesar Rp871,067 Milyar. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

KODE		URAIAN	PROPORSI (%)
4	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,33
4	2	Pendapatan Transfer	76,79
4	3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,87
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>100,00</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2022 kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2020 serta asumsi tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah yang tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait. Untuk itu, guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2022 tercapai, perlu ditempuh melalui upaya :

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui :

- *Intensifikasi* melalui penerapan online *system* dalam penerimaan daerah; memutakhirkan data objek pajak; melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan dukungan sumber daya yang tercukupi.
- *Ekstensifikasi* melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan.



- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/*stakeholder* terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- c. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
- e. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

## 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah mulai tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
  - 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan *New Normal*.
  - 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
  - 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
  - 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
  - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa). Belanja transfer ini dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Bagi Hasil ini merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
  - 2) Belanja Bantuan Keuangan ini merupakan dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dalam bentuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sebagai gambaran, realisasi belanja daerah tahun 2016-2020 dan pagu anggaran belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.204.072.465</b>	<b>1.199.543.624</b>	<b>1.168.840.041</b>	<b>1.261.667.000</b>	<b>1.238.610.345</b>
1. 1	Belanja Pegawai	838.942.374	781.574.332	778.188.653	816.520.406	748.962.202
1. 2	Belanja Bunga	5.213	-	-	-	-
1. 4	Belanja Hibah	42.345.305	22.733.814	27.168.517	31.513.710	82.571.723
1. 5	Belanja Bantuan Sosial	2.257.200	13.112.675	19.700.050	17.162.650	15.775.150
1. 6	Belanja Bagi Hasil Pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.401.648	5.673.142	6.605.825	7.465.203	5.536.295
1. 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	314.523.996	368.089.711	335.099.133	384.469.389	381.872.929
1. 8	Belanja Tidak Terduga	596.728	8.359.950	2.077.863	4.535.641	3.892.046
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>600.895.132</b>	<b>838.057.345</b>	<b>991.904.389</b>	<b>921.867.790</b>	<b>814.407.366</b>
2. 1	Belanja Pegawai	107.176.474	134.608.136	160.110.163	169.718.520	185.781.476
2. 2	Belanja Barang Dan Jasa	255.779.849	366.633.216	400.381.256	406.983.972	389.154.355
2. 3	Belanja Modal	237.938.809	336.815.994	431.412.971	345.165.298	239.471.535
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>1.804.967.597</b>	<b>2.037.600.969</b>	<b>2.160.744.430</b>	<b>2.183.534.790</b>	<b>2.053.017.712</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

**Tabel 3.16**  
**Pagu Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, Proyeksi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021	PROYEKSI ANGGARAN TAHUN 2022	PRAKIRAAN MAJU ANGGARAN TAHUN 2023
		(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.570.597.934</b>	<b>1.573.994.674</b>	<b>1.105.905.570</b>
1	Belanja Pegawai	972.078.413	1.104.570.413	1.054.546.144
2	Belanja Barang Dan Jasa	493.160.774	401.168.774	487.469.017
3	Belanja Bunga	0	0	0
4	Belanja Subsidi	0	0	0
5	Belanja Hibah	76.748.798	49.645.538	71.015.874
6	Belanja Bantuan Sosial	28.609.949	18.609.949	27.336.503
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>297.110.644</b>	<b>349.482.000</b>	<b>328.667.813</b>
<b>C</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>D</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>383.523.485</b>	<b>9.651.995</b>	<b>403.154.017</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.256.232.062</b>	<b>2.308.068.865</b>	<b>1.842.727.400</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah agar bisa pulih sebagai dampak wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, maka belanja daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 diarahkan pada :

- Pemulihan dan perkuatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak (Industri, Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM) serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
- Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemik Covid-19 termasuk pada kelompok miskin baru;
- Peningkatan kualitas SDM pada aspek pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja;
- Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
- Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.
- Kesiapsiagaan terhadap bencana, baik alam maupun non alam;
- Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
- Memperhatikan visi dan misi Bupati Pekalongan terpilih tahun 2021-2024, dengan prioritas utama pada Urusan Kesehatan, Pendidikan dan Inftarstruktur.

Khusus Belanja Pegawai pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena mulai diberlakukan pemberian tambahan penghasilan berbasis tunjangan kinerja serta adanya penambahan ASN.

Belanja daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1,928 Trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,573 Trilyun, belanja modal sebesar Rp349,482 Milyar, belanja tidak terduga sebesar Rp5 Milyar. Sementara untuk belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp379,592 Milyar.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

### 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan daerah juga diarahkan pada penguatan kondisi fiskal melalui optimalisasi peran BUMD dengan memberikan penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara ringkas gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>228.623.900</b>	<b>204.206.856</b>	<b>229.856.829</b>	<b>170.620.432</b>	<b>159.978.997</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	228.606.971	203.986.175	229.787.303	170.564.364	159.978.997
2	Penerimaan Piutang Daerah	-	1.258	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	16.929	219.423	69.526	56.068	0
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>7.021.802</b>	<b>4.431.161</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.935.000	4.431.161	-	10.000.000	5.000.000
2	Pembayaran Pokok Hutang	86.802	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>221.602.097</b>	<b>199.775.695</b>	<b>229.856.829</b>	<b>160.620.432</b>	<b>154.978.997</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang ada, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022 direncanakan adanya pembiayaan berupa pinjaman daerah yang akan digunakan untuk membiayai pekerjaan infrastruktur terutama jalan. Pinjaman daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sesuai peraturan pemerintah tersebut, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Di masa pandemi COVID-19 ini, pinjaman daerah yang ber sumber dari Pemerintah Pusat dilakukan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Sementara untuk pembiayaan pinjaman daerah melalui Lembaga Keuangan Bank dilakukan dengan Bank Jateng.

#### **a. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Mekanisme Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) (Persero);
- 2) Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
- 3) Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit :

- 1) Merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 2) Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- 3) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- 4) Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagai dukungan Program PEN dimaksud, PT. SMI juga memberikan dukungan dengan memberikan pinjaman daerah sebesar Rp5 Triliun. Adapun fitur utama dari Pinjaman PEN ini adalah jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun, dengan grace period maksimal 2 tahun (disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek). Untuk pembayaran kewajiban diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DAU/DBH) oleh DJPK berdasarkan permintaan PT. SMI. Adapun untuk suku bunga, Pinjaman PEN yang sumber dananya berasal dari Pemerintah dikenai bunga 0% sedangkan Pinjaman PEN yang bersumber dana

dari PT. SMI dikenai bunga 5,4% (sudah termasuk subsidi bunga dari Pemerintah sebesar 3,05%). Untuk biaya pengelolaan dikenai 0,185% yang dibayar tahunan dan biaya provisi 1% yang dibayar satu kali.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diajukannya permohonan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Pinjaman PEN dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT. SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

Permohonan Pinjaman PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. SMI, diwajibkan melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- 1) Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- 2) Surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
- 3) Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/atau;
- 4) Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan; dan
- 5) Surat Permohonan Izin Pelampauan Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal program/kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan.

#### **b. Pinjaman Daerah melalui Lembaga Keuangan Bank**

Dalam melakukan pinjaman daerah melalui Lembaga Keuangan Bank direncanakan jangka waktunya tidak melebihi masa jabatan kepala daerah, dengan kegiatan yang dibiayai sesuai dengan dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dengan suku bunga diatur sesuai dengan penawaran untuk pinjaman yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank.

Sebelum melakukan pinjaman daerah, dibahas bersama DPRD guna mendapatkan persetujuan yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA-PPAS. Persetujuan DPRD dalam bentuk keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil sidang paripurna, yang memuat antara lain penggunaan Pinjaman Daerah, jumlah Pinjaman Daerah, jangka waktu Pinjaman Daerah, dan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya.

Pinjaman daerah melalui Lembaga Keuangan Bank harus mendapatkan ijin dari Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan dokumen :

- persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- kerangka acuan kegiatan;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan;
- rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan
- rencana keuangan Pinjaman Daerah.

Berdasarkan pertimbangan Mendagri, maka disampaikan ke Kementerian Keuangan guna mendapatkan persetujuan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah dengan melampirkan :

- persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- kerangka acuan kegiatan;
- laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
- rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan
- surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

### c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan

lainnya. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang – undangan dimaksud di atas, antara lain :

- 1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- 2) Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang – undangan turunannya; dan
- 3) Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*Value for Money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Sementara untuk pembiayaan berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada tahun 2022 merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah.

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2023**

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.000)		
		2021	2022	2023



<b>7 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>22.907.185</b>	<b>200.000.000</b>	<b>177.092.815</b>
7 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	22.907.185	0	22.907.185
7 1 9	Penerimaan Piutang Daerah	0	200.000.000	200.000.000
<b>7 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>15.250.000</b>
7 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
7 2 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.000.000	23.500.000	15.250.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>15.907.185</b>	<b>176.500.000</b>	<b>192.342.815</b>

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Guna penyelesaian permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendorong pendanaan alternatif Non APBD. Pendanaan alternatif Non APBD ditempuh diantaranya dengan mendorong pengembangan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, peningkatan peran swasta dan BUMN – BUMD melalui Tanggung Jawa Sosial Lingkungan Perusahaan serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya. Peningkatan peran swasta dan BUMN-BUMD melalui Tanggung Jawa Sosial Lingkungan Perusahaan atau Program *Corporate Social Resbosibility* (CSR) merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk berperan serta dalam mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan COVID-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 merupakan Tahun ke-1 (satu) pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Namun demikian proses penyusunan RPJMD 2021-2026 masih sampai tahap Rancangan Teknokratik RPJMD. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten 2022 karena RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 belum ditetapkan, maka penyusunan rencana pembangunan tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58 Tahun 2017), memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, serta menjaga kesinambungan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

#### **1. RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2025**

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, namun hingga tersusunnya dokumen RKPD ini, RPJMD 2021-2026 belum ditetapkan, sehingga penyusunan dokumen RKPD 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan kesinambungan

dengan dokumen RPJMD 2016-2021, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 merupakan **tahap Lima Tahun Keempat (2020-2025)**. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 yaitu **"KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"** yang bermakna sebagai berikut :

- (1) *Maju*, Masyarakat yang maju merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan. Masyarakat maju bisa diukur dari berbagai indikator seperti tingkat kemampuan sumberdaya manusia yang tinggi, tingkat kemampuan ekonomi yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, tingkat partisipasi publik serta tingkat kemandirian daerah.
- (2) *Adil*, Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ingin dibangun bukan hanya sebagai masyarakat yang maju saja, tetapi juga adanya keadilan yang diterima oleh masyarakat. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang adil ditandai oleh berbagai aspek kehidupan seperti misalnya kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan taraf hidup, mendapatkan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang adil juga ditandai dengan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya serta perlindungan dan kesamaan di dalam hukum. Masyarakat yang adil berarti pula tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah.
- (3) *Sejahtera*, Masyarakat yang sejahtera juga merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pekalongan. Masyarakat sejahtera dapat diukur oleh berbagai indikator. Beberapa indikator pokok yang seringkali digunakan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan daya beli, serta tingkat kemiskinan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 tersebut, ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- (1) **Mewujudkan daya saing daerah**, adalah upaya untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan daya saing yang tinggi sehingga siap menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing pembangunan daerah diarahkan dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat basis ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi pada kemampuan daya saing yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadai, dan mempersiapkan berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah secara optimal.
- (2) **Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas**, adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa elemen antara lain tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, tingkat kemampuan daya beli masyarakat dan sebagainya.

- (3) **Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis**, adalah upaya untuk membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik juga penting agar memungkinkan diimplementasikannya prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, komunikasi, serta pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (4) **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, adalah mendistribusikan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan secara merata sehingga kesenjangan antar wilayah dalam kabupaten dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Pembangunan yang merata dengan demikian juga mesti mempertimbangkan untuk meniadakan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih mungkin terjadi di kalangan masyarakat.
- (5) **Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial**, adalah suatu upaya memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (6) **Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas**, adalah mewujudkan ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya yang memadai yang ditujukan untuk memperkuat tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Ketersediaan peralatan medis dan penunjang medis yang dibutuhkan, ketersediaan sumber daya kesehatan yang profesional serta sarana prasarana penunjang lainnya merupakan tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Ketersediaan alat-alat pembelajaran, ketersediaan tenaga pengajar yang handal serta sarana prasarana penunjang lainnya merupakan tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
- (7) **Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat**, adalah memanfaatkan segala potensi sumber daya alam pada tiap wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keharmonisan ekosistem.
- (8) **Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, adalah makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan kepada Pancasila yang dicirikan dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dan dinamis.

Pencapaian perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pokok, serta arah pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap IV**  
**RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025**

**Visi : KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA**

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
1.	Mewujudkan daya saing daerah	<p>1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk seluruh sektor di atas 5 persen per tahun, laju inflasi dapat dipertahankan pada kisaran di bawah 10 persen per tahun untuk seluruh kelompok barang, dengan tingkat pengangguran terbuka di bawah 2,5 persen serta jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen sehingga tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 dapat mencapai target yang ditentukan secara nasional.</p> <p>2. Tersusunnya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan bersaing Kabupaten Pekalongan. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (padat karya) seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Seluruh sektor/lapangan usaha memberikan sumbangan yang relatif seimbang terhadap PDRB, sehingga perekonomian tidak hanya mengandalkan beberapa sektor/ lapangan usaha saja.</p> <p>3. Semakin meningkatnya kemandirian daerah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun finansial. Ketergantungan ekonomi baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun daerah lain dapat semakin dikurangi.</p> <p>4. Kualitas SDM yang semakin meningkat, baik dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, keahlian, kultur dan perilaku, maupun pengetahuan. Hal ini karena SDM (tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi lebih penting adalah dalam hal kualitas) merupakan salah satu faktor</p>	<p>1. Perekonomian daerah dikembangkan dengan orientasi utama untuk memperkuat ekonomi daerah dengan tetap bertumpu pada penguatan daya saing ekonomi. Pembangunan diarahkan pada upaya-upaya pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara profesional dan berkelanjutan dengan dibarengi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.</p> <p>2. Struktur ekonomi diperkokoh dengan menempatkan sektor industri sebagai sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang dengan sektor pertanian dalam arti luas dan perdagangan. Sumber-sumber ekonomi yang selama ini belum dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal perlu dikelola secara lebih profesional dan optimal. Industri kecil menengah dan koperasi diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang memainkan peran yang signifikan dalam pencatatan ekonomi daerah baik dalam hal kontribusinya terhadap PDRB maupun penyerapan tenaga kerja, serta menghasilkan produk yang mampu bersaing. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kewirausahaan UKM dan koperasi sehingga UKM dan koperasi betul-betul dapat</p>	Meningkatkan kemandirian daerah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun finansial. Ketergantungan ekonomi baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun daerah lain dapat semakin dikurangi. Upaya ini perlu didukung oleh kualitas SDM yang semakin meningkat, baik dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, keahlian, kultur dan perilaku, maupun pengetahuan. Hal ini karena SDM (tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi lebih penting adalah dalam hal kualitas) merupakan salah satu faktor keunggulan bersaing daerah

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
		keunggulan bersaing daerah	<p>memperkuat struktur ekonomi daerah dan memiliki daya saing.</p> <p>3. Peningkatan investasi daerah secara signifikan sehingga dapat memicu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menarik investor dengan cara menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif, promosi yang lebih agresif, penyediaan dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur fisik pendukung investasi daerah, regulasi dan perijinan yang efisien, serta menjaga dan mengembangkan iklim persaingan usaha secara sehat</p>	
2.	Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan perumahan/permukiman yang sehat dan murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harapan seluruh rumah tangga dapat memiliki rumah tinggal sendiri.</li> <li>2. Tersedianya jaringan infrastruktur dan suprastruktur pendukung perumahan/permukiman yang memadai, handal, murah, aman, nyaman dan terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana dan prasarana perhubungan (jalan, jembatan dan moda transportasi), energi/listrik, air bersih/air minum, telekomunikasi serta persampahan dan drainase secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.</li> <li>3. Tersedianya kesempatan kerja bagi setiap elemen masyarakat dengan kompensasi yang layak, memberikan nilai tambah yang tinggi serta penghargaan terhadap hak-hak pekerja secara adil. Hal tersebut karena kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pekerjaan yang layak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonominya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektor ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor informal. Pengembangan perekonomian daerah diarahkan pada sektor yang padat tenaga kerja dalam upaya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.</li> <li>2. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya untuk peningkatan tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan. Upaya itu perlu didukung dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan IPTEK serta dengan pengembangan industri hilir sektor pertanian (industri pengolahan hasil pertanian).</li> <li>3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, perumahan/permukiman, persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat</li> </ol>	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan tetap relevan untuk dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan berkelanjutan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			<p>penunjang kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.</p> <p>4. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari daerah secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.</p> <p>5. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi masyarakat</p>	
3.	Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis	<p>1. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Profesionalisme aparatur ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur baik dalam aspek tingkat pendidikan formal maupun informal, ketrampilan teknis yang memadai serta mempunyai tanggungjawab dan motivasi yang kuat terhadap tugasnya. Dengan adanya profesionalisme aparatur maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.</p> <p>2. Terwujudnya suatu sistem tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha. Adanya sistem tata pemerintahan yang terintegrasi dan sinergis antara berbagai elemen pemerintahan daerah akan berdampak positif terhadap penegakan dan implementasi tata pemerintahan yang baik secara optimal.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik dalam aspek pendidikan formal, pendidikan informal maupun Diklat Teknis dan Non Teknis. Dengan peningkatan tingkat pendidikan ini diharapkan 20 tahun ke depan akan tersedia aparatur yang benar-benar profesional dan berkualitas.</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur serta meningkatkan pelayanan kepada publik melalui program e-government. Diharapkan dalam 20 tahun ke depan pelayanan publik melalui program e-government sudah berjalan lancar, termasuk peningkatan tertib administrasi kependudukan.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan</p>	Dalam rangka untuk memantapkan penerapan e-government dengan tujuan akhir untuk memberikan pelayanan publik yang prima, maka perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk ikut mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Segenap komponen masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bersih, tertib, teratur serta berdaya saing

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			<p>daerah. Dengan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan ini maka diharapkan 20 tahun kedepan akan tercipta aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang berkualitas.</p> <p>4. Peningkatan kinerja aparatur berdasarkan pada prinsip disiplin, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan kinerja aparatur yang demikian maka dalam 20 tahun ke depan pelayanan prima diharapkan sudah dapat berjalan secara optimal.</p> <p>5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam ikut mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dunia usaha secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka untuk ikut mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, tertib, teratur, serta berdaya saing</p>	
4.	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan kabupaten yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.</li> <li>2. Tercapainya pengendalian dan perencanaan sistem prasarana dan sarana wilayah yang kompak, terpadu dan berkesinambungan dengan melakukan kajian berbasis aspirasi kebutuhan masyarakat dengan basis otonomi yang akomodatif.</li> <li>3. Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayahnya sebagai wujud kepedulian untuk memajukan secara utuh wilayahnya terutama pada daerah-daerah tertinggal.</li> <li>4. Tercapainya program Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah merupakan acuan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pembangunan yang merata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan yang mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah serta mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial.</li> <li>2. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agrobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.</li> <li>3. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dengan penekanan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan</li> </ol>	Pengembangan ekonomi diarahkan kepada peningkatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial



No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
		dan berkeadilan	<p>distribusi.</p> <p>4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga</p>	
5.	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.</li> <li>2. Tercapainya penerapan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</li> <li>3. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan daerah yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.</li> <li>2. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat</li> <li>4. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminatif</li> </ol>	Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional
6.	Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya tingkat derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, menurunnya angka variabel pembentuk Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), dan meningkatnya nilai variabel kesehatan pembentuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan menjadi kegiatan prioritas agar layanan yang diberikan dapat terjangkau oleh masyarakat dan tidak diskriminatif kepada seluruh</li> </ol>	Meningkatkan kemandirian daerah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun finansial. Ketergantungan ekonomi baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun daerah lain dapat semakin

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
		<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya profesionalisme tenaga pelayanan kesehatan yang meliputi tenaga medis, paramedis, penunjang medis dan non medis serta sarana dan prasarana bidang kesehatan.</li> <li>3. Tersedianya obat pada pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan ragam dan jumlah cukup serta harganya terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin.</li> <li>4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ditandai dengan tingkat pendidikan terendah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah tamat SLTP (wajib belajar 9 tahun). Menurunnya nilai variabel pendidikan pembentuk</li> <li>5. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), dan meningkatnya nilai variabel pendidikan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</li> <li>6. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan kualitas baik. Sarana pendidikan yang utama adalah gedung belajar, ruangan guru, dan fasilitas laboratorium. Juga kondisi prasarana jalan menuju tempat penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi baik, sehingga memudahkan anak didik dan tenaga kependidikan untuk menuju ke sekolah.</li> <li>7. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, baik tenaga kependidikan negeri, swasta, maupun madrasah. Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga pengajar pada tingkat Sekolah Dasar serendah-rendahnya adalah Akademi atau Diploma III. Sedangkan tenaga pengajar untuk tingkat SLTP dan SLTA adalah sarjana/ strata satu.</li> <li>8. Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal. Pada setiap periode tertentu diadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agar kualitas bahan ajar, kurikulum, dan sarana penunjang pembelajaran lain</li> </ol>	<p>lapisan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan pelayanan konseling kepada masyarakat untuk membudidayakan pola hidup bersih dan sehat.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Bangunan tempat layanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah kondisinya baik, dan juga jalan menuju ke tempat layanan kesehatan harus mudah dilalui dan aman.</li> <li>4. Tersedianya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan dimanfaatkan secara rasional.</li> <li>5. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, terutama penduduk usia muda. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat diupayakan serendah-rendahnya tamat SLTA.</li> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan kualitas baik. Sarana pendidikan yang utama adalah gedung belajar, ruangan guru, dan fasilitas laboratorium. Juga kondisi prasarana jalan menuju tempat penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi baik, sehingga memudahkan anak didik dan tenaga kependidikan untuk menuju ke sekolah.</li> <li>7. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, baik tenaga kependidikan negeri, swasta, maupun madrasah. Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga pengajar pada tingkat Sekolah Dasar serendah-rendahnya adalah Akademi atau Diploma III, sedangkan tenaga pengajar untuk tingkat SLTP dan SLTA adalah sarjana/strata satu.</li> <li>8. Meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal. Pada</li> </ol>	<p>dikurangi. Upaya ini perlu didukung oleh kualitas SDM yang semakin meningkat, baik dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, keahlian, kultur dan perilaku, maupun pengetahuan. Hal ini karena SDM (tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi lebih penting adalah dalam hal kualitas) merupakan salah satu faktor keunggulan bersaing daerah</p>

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
7.	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.</li> <li>2. Terwujudnya tata lingkungan wilayah perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.</li> <li>3. Terpeliharanya kekayaan keanekaragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan.</li> <li>4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	<p>setiap periode tertentu diadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agar kualitas bahan ajar, kurikulum, dan sarana penunjang pembelajaran lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya alam merupakan anugerah yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam sesuai fungsi lingkungan sangat dibutuhkan agar tidak sampai merusak ekosistem dan tata ruang. Dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak akan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi prasyarat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan mempertahankan lahan pertanian sebagai sawah lestari diupayakan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.</li> <li>2. Mendayagunakan sumber daya alam. Sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, efisien dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.</li> <li>3. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam. Keanekaragaman produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar</li> </ol>	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan tetap relevan untuk dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan berkelanjutan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
			<p>regional, nasional, bahkan internasional.</p> <p>4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik diperlukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, serta tetap menjaga keserasian luas kawasan lindung minimal 30 persen.</p> <p>5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup sangat diperlukan agar perilaku dan peran serta masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan tercipta masyarakat berkualitas yang peduli pada lingkungan hidup. Kebijakan meminimalisasi terjadinya korban akibat bencana alam akan terus ditingkatkan agar bisa masyarakat bisa terhindar dari korban bencana alam.</p> <p>6. Mengembangkan kawasan prioritas. Sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi tiga kawasan strategis, yaitu: kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, kawasan kurang berkembang, dan kawasan konservasi. Kebijakan yang menyangkut tata ruang akan tetap diprioritaskan dengan memberi perhatian yang lebih khusus pada wilayah kurang berkembang, dan kawasan konservasi. Sedang untuk wilayah pusat pertumbuhan akan tetap dipacu agar memberi efek pada wilayah yang berdekatan</p>	

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Arah Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahap IV RPJPD
8.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.</li> <li>2. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban harkat dan martabat manusia serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleran dan tenggang rasa.</li> <li>2. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Pembangunan jati diri masyarakat dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya masyarakat yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.</li> <li>3. Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan agar masyarakat menguasai IPTEK serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya IPTEK tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka mengembangkan tradisi IPTEK dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif</li> </ol>	Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional

Sumber : RPJPD Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025

## 2. Visi Misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026

FADIA ARAFIQ, SE, MM dan H. RISWADI, SH terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2021-2026 hasil Pilkada serentak Tahun 2020. Adapun visi-misi sebagai berikut :

### a. Visi

#### **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, ADIL, MERATA (SETARA) DAN BERBUDAYA GOTONG ROYONG"**

Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Rumusan visi tersebut terdiri dari 5 unsur frasa kalimat yang dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Kabupaten Pekalongan :

- a) Meliputi wilayah dan seluruh isinya;
- b) Kabupaten Pekalongan dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2020 tentang Tata Ruang Kabupaten Pekalongan 2020 - 2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya.

#### 2) Sejahtera :

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- b) Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai;
- c) Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya;
- d) Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai;
- e) Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.

#### 3) Adil :

- a) Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan
- b) Menghilangkan ego struktural;
- c) Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- d) Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang – undangan yang berkeadilan.

#### 4) Merata :

- a) Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian;
- b) Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai;
- c) Terbukanya konektivitas antar wilayah.

#### 5) Bergotong Royong :

- a) Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan;
- b) Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas;
- c) Menumbuhkan sikap tolong menolong;
- d) Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan;
- e) Meningkatkan rasa solidaritas;
- f) Memperkokoh Persatuan.

### b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 11 (sebelas) misi pembangunan daerah, yaitu :

- 1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius;

- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif;
- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata;
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
- 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
- 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran;
- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas;
- 10) Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti;
- 11) Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

### c. Program Unggulan

- 1) Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius
  - a) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;
  - b) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan;
  - c) Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
  - a) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;
  - b) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;
  - c) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;
  - d) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;
  - e) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur;
  - f) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan *e-governance*.
- 3) Menyediakan infrastruktur publik yang merata
  - a) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;
  - b) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
  - c) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
  - d) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/ baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
  - e) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;
  - f) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;

- g) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau
  - a) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
  - b) Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi warga miskin (berpenghasilan rendah);
  - c) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
  - d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 5) Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing
  - a) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
  - b) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;
  - c) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;
  - d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);
  - e) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi;
  - f) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.
- 6) Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat
  - a) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;
  - b) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;
  - c) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;
  - d) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;
  - e) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
  - g) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;
  - h) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;
  - i) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;
  - j) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;
  - k) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;
  - l) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;
  - m) Mengembangkan festival desa.
- 7) Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran
  - a) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;
  - b) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;
  - c) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;



- d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;
- e) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
- 8) Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat
  - a) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;
  - b) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;
  - c) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
  - d) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.
- 9) Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta membuka akses pasar yang luas
  - a) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
  - b) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
  - c) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;
  - d) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;
  - e) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;
  - f) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan;
  - g) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;
  - h) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

### 3. Isu Strategis Dokumen Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026

Isu strategis merupakan pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan/dikedepankan dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Kriteria isu strategis sebagai berikut :

- a. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan menjadi satu kesatuan, jika ditangani/dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai dasar perumusan pernyataan isu strategis;
  - b. Pernyataan isu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
  - c. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah(kewenangan);
  - d. Luasnya dampak yang ditimbulkannya untuk memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan pembangunan daerah;
  - e. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
  - f. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
  - g. Prioritas untuk memenuhi janji politik Kepala Daerah yang perlu diwujudkan.
- Perumusan isu strategis juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini :



**Gambar 4.1**  
**Perumusan Isu Strategis Teknokratik RPJMD 2021-2026**

Dari beberapa hasil telaah terhadap isu-isu strategis pembangunan di atas, maka dapat diidentifikasi 4 isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

#### **a. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya**

Belum optimalnya kualitas dan daya saing penduduk dan sumberdaya manusia serta upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

- 1) Pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih dibawah rata rata Jawa Tengah. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 69,63 dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 71,92. Hal ini mengandung pengertian bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan pembangunan kesehatan, pendidikan serta pengeluaran perkapita belum optimal;
- 2) Angka kemiskinan masih relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar 9,71% naik menjadi 10,19% di tahun 2020, dengan rata-rata capaian di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas nasional. Adanya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh pandemi COVID-19;
- 3) Penduduk miskin yang mendapat jaminan perlindungan sosial belum optimal; dan
- 4) Tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi, naik tajam menjadi 6,97 persen di Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

#### **b. Isu Strategis Bidang Ekonomi**

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat yang terhambat sebagai dampak Pandemi COVID-19 struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan didominasi oleh sektor: (1) industri pengolahan, (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (4) konstruksi dan (5) penyediaan akomodasi dan makan minum. Dari kelima sektor tersebut, sebanyak tiga sektor yang terkena dampak Pandemi COVID-19 cukup besar yaitu sektor: (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan makan minum; dan (3) industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan yang pada tahun 2015-2019 selalu berada diatas 5%, mengalami perlambatan menjadi -1,89 % di tahun 2020. Tahun 2021-2022 dan seterusnya belum dapat dipastikan apakah kinerja perekonomian akan betul-betul pulih pasca Pandemi COVID-19;

- 2) Disisi yang lain, pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan sebagai akibat pembatasan aktivitas masyarakat (*social distancing*) sebagai antisipasi pencegahan penularan COVID-19. Tentunya diperlukan upaya pemulihan ekonomi agar pelaku usaha disektor-sektor ekonomi utama Kabupaten Pekalongan dapat kembali tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- 3) Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi wilayah menjadi kebutuhan yang perlu diwujudkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, sehingga mampu mengurangi pengangguran. Salah satu potensi yang perlu terus dikembangkan adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan sektor ini mampu memberikan *multiplier effect* bagi tumbuhnya industri pariwisata di Kabupaten Pekalongan;
- 4) Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan. Pada daya dukung pangan terdapat ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat dari meningkatnya akan kebutuhan untuk lahan terbangun (dalam kondisi bersyarat).

### c. Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi masyarakat.

- 1) Pengembangan infrastruktur masyarakat yang nyaman aman dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi saat ini minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun. Peningkatan kendaraan pribadi dan angkutan online berdampak pada penurunan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Pekalongan sampai tahun 2020 sebesar 0,53%, kondisi tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu fasilitas keselamatan lalu lintas perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dalam mendukung keselamatan masyarakat menggunakan moda transportasi;
- 2) Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan penataan kawasan kumuh serta pengurangan rumah tidak layak huni( termasuk di dalamnya penataan tanah). Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100% akses air minum aman dan sanitasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2020 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100% pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Daya dukung air di Kabupaten Pekalongan termasuk dalam daya air terlampaui atau buruk. Penurunan kualitas sumberdaya air yang dibuktikan dengan IKA pada kategori kurang, selain itu masih adanya kawasan dengan penyedia jasa ekosistem penyedia air yang rendah;
- 3) Penanganan permukiman kumuh juga belum optimal tahun 2020 terdapat 8,81% kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani. Berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh masih ada permasalahan yang harus harus diantisipasi yaitu kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan;
- 4) Pengurangan pencemaran lingkungan perlu dilakukan antisipasi, dan penanganan yang baik. Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan tahun 2019 menunjukkan kondisi baik dengan nilai IKLH sebesar 83,8%, meskipun demikian IKLH pernah turun drastis di tahun 2018. Meskipun IKLH dalam kondisi cukup baik namun dengan kondisi Indeks Kualitas Air (IKA)

menurun setiap tahunnya. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan baik pencemaran udara maupun penurunan kualitas sumberdaya air yang dibuktikan dengan IKA pada kategori kurang. Selain itu emisi Gerakan Rumah Kaca (GRK) juga perlu diwaspadai. Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Metana merupakan salah satu jenis GRK penyebab pemanasan global. Gas ini lebih dianggap sebagai polutan daripada sumber energi yang berguna. Gas metana pada kadar tinggi dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Gas metana dapat menyebabkan penurunan oksigen sampai sekitar 19,5%. Pada kadar yang lebih tinggi, gas metana dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan apabila bercampur dengan udara. Emisi GRK dari sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk tahun 2018 mencapai 9,30 Gg CO<sub>2</sub>e. Emisi GRK dari sektor Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga pada tahun 2018 mencapai angka 88,12 Gg CO<sub>2</sub>e dan meningkat setiap tahun. Emisi GRK dari sektor pengadaan dan penggunaan energy pada tahun 2018 mencapai 250,18 Gg CO<sub>2</sub>e dengan sub sektor transportasi mencapai 156,5 Gg CO<sub>2</sub>e. Emisi GRK dari sektor Pengolahan Limbah Padat secara Biologi pada tahun 2018 mencapai angka 1.312 Gg CO<sub>2</sub>e. Emisi GRK dari sektor Pembakaran Sampah melalui incinerator & Pembakaran sampah secara terbuka pada tahun 2018 mencapai angka 5,77 Gg CO<sub>2</sub>e dan meningkat setiap tahun. Perubahan iklim memicu dampak baik di hulu maupun di hilir;

- 5) Permasalahan persampahan juga harus menjadi perhatian, belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Persentase pengurangan sampah di perkotaan setiap tahun juga mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, tahun 2016 sebesar 33,30% menjadi 26,34% di tahun 2020. Masyarakat belum mengimplementasikan konsep pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu untuk Daya Tampung sampah di TPA terbatas.
- 6) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim perlu dilakukan mengingat Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana. BPBD mendata sebanyak tujuh kecamatan di daerah selatan atau pegunungan Kabupaten Pekalongan dinilai rawan longsor, masing-masing di Kecamatan Kesesi (2 desa), Kajen (3 desa), Lebakbarang (11 desa), Paninggaran (6 desa), Kandangserang (7 desa), Petungkriyono (4 desa), dan Doro (2 desa). Sementara, potensi ancaman serangan angin kencang merata di 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Potensi bencana banjir dan angin kencang pada 19 kecamatan. Berdasarkan Indek Rawan Bencana Indonesia, Kabupaten Pekalongan termasuk pada kategori kelas rawan tinggi dengan skor 76. IRBI Kabupaten termasuk rangking 116 di Indonesia. Berdasarkan KLHS Kabupaten Pekalongan akan mengalami peningkatan resiko bencana alam banjir, longsor, abrasi dan kekeringan. Perlu diwaspadai juga dampak Kenaikan Muka Air Laut seperti semakin meluasnya daerah genangan rob di wilayah utara; dan
- 7) Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*). Jasa ekosistem Kabupaten Pekalongan menunjukkan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER 2) sebagian berada pada kelas rendah 12,39%. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (JER 1) sebagian berada pada kelas rendah 12,39%. Jasa Ekosistem Pendukung

Biodeversitas (JED 4) di Kabupaten Pekalongan sebagian besar berada di kelas tinggi 57,97%. Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik (JEP 5) di Kabupaten Pekalongan sebagian besar berada di kelas tinggi yaitu 68,34%.

#### **d. Isu Strategis Bidang Pemerintahan**

Pemanfaatan teknologi informasi yang smart untuk penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan prima.

- 1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Konsep *good governance* dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor-sektor publik yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Masyarakat sebagai penerima layanan ataupun pengguna layanan diberikan keterbukaan untuk memberikan pemikiran kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya.
- 2) Untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, unsur paling menonjol adalah ketersediaan SDM aparatur yang berkualitas dan dukungan sarana dan prasarana. Kondisi ini tidak terlepas dari pelayanan birokrasi pemerintahan yang memerlukan kecepatan, ketepatan dan keterpaduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang perlu dikedepankan adalah melakukan pembaharuan terhadap sistem birokrasi melalui reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur;
- 3) Kondisi teknologi informasi yang berkembang begitu cepat dari waktu ke waktu, maka pemerintah harus terbuka terhadap perkembangan tersebut. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi SDM, asas kemanfaatan atau dayaguna, asas keamanan dan kehandalan, asas legalitas, asas kesetaraan hak akses, asas fleksibilitas, dan *open system*; dan
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi secara SMART diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan. Adanya dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat umum, dunia usaha ataupun pelayanan antar perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga ke depan kondisi ideal tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.



**Gambar 4.2**  
**Rumusan Isu Strategis Teknokratik RPJMD 2021-2026**

## B. Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2022 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah.

Selanjutnya untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Pekalongan disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

### 1. Sasaran dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.



#### RKP TAHUN 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

#### a. Isue Strategis Pembangunan Nasional tahun 2022

Isu strategis pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Lapangan Kerja;
- 3) UMKM;
- 4) Industri;

Untuk Mndukung Isu Strategi teresbut diatas Rencana kerja pemerintah (RKP) di tahun 2022 masih mengusung tema "**pemulihan ekonomi dan reformasi struktural**" sesuai dengan tema tersebut diatas dapat dilihat dalam gambar 4.3.



**Gambar 4.3**  
**Tema Pembangunan dalam RKP 2022**

Sedangkan untuk mendukung Tema Tersebut diatas pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) strategi dan fokus pembangunan yang meliputi :

- 1) Industri;
- 2) Pariwisata;
- 3) Ketahanan Pangan;
- 4) UMKM;
- 5) Infrastruktur;
- 6) Transformasi Digital;
- 7) Pembangunan Rendah Karbon;
- 8) Reformasi Perlindungan Sosial
- 9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan; dan
- 10) Reformasi Kesehatan.

Secara rinci 10 strategi dan fokus pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%;
  - b) Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%;
  - c) Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T.
- 2) Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan;
  - b) Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39;
- 3) Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Skor Pola Pangan Harapan 92,8;
  - b) Nilai Tukar Petani 102-104;
  - c) Nilai Tukar Nelayan 102-105;
  - d) Ketersediaan Beras 44 juta ton;
  - e) Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton;
  - f) Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn.

- 4) Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Pertumbuhan Wirausaha 3%;
  - b) Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%;
  - c) UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%.
- 5) Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit;
  - b) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi;
  - c) Panjang jalan tol baru: 400 km;
  - d) Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s;
  - e) Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR;
  - f) Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR;
  - g) Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha;
  - h) Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.
- 6) Fokus transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Masyarakat pengguna internet 79,20%;
  - b) Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%;
  - c) 72.500 SDM talenta digital;
  - d) 12,4 juta *local champion* literasi digital;
  - e) 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang diregistrasi;
  - f) 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.
- 7) Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%;
  - b) Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%;
  - c) Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%;
  - d) Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
- 8) Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Tingkat kemiskinan 8,5-9%;
  - b) Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%;
  - c) Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%;
  - d) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk.
- 9) Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a) Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%;
  - b) Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%;
  - c) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%;
  - d) 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
  - e) 900 Paten Domestik.
- 10) Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%;



- b) Insidensi TB 231/100.000 penduduk;
- c) Persalinan di fasilitas kesehatan 91%;
- d) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%;
- e) Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%;
- f) RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%;
- g) Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%;
- h) Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022 :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %;
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48;
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %;
- 6) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104;
- 7) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %.

#### **b. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

#### **1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - (2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - (3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - (4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - (5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - (2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - (3) Penyediaan air untuk pertanian;
  - (4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - (5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - (6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - (2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - (3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - (4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - (5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - (2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - (3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - (4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - (5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - (2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - (3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - (4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- (1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - (2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - (3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - (4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - (5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - (6) Pengembangan industri halal
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- (1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
  - (2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - (3) Pengelolaan Impor;
  - (4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
  - (5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
  - (6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
  - (7) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- (1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
  - (2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
  - (3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
  - (4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
  - (5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

## 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- b) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- c) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- d) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
  - (1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
  - (2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
  - (3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
  - (4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Sistem jaminan sosial nasional;
  - (2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
  - (3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu
  - (1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
  - (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
  - (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
  - (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
  - (2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
  - (3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - (4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
  - (5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
  - (2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - (3) Kualitas Pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;

- (2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
  - (3) Reforma Agraria; dan
  - (4) Perhutanan Sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- (1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
  - (2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
  - (3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
  - (4) Prestasi Olahraga.

#### **4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - (2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
  - (3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - (4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - (5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
  - (6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - (2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - (3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - (4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - (5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - (2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
  - (3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
  - (4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
  - (5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Peningkatan Budaya Literasi;
  - (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - (3) Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
  - (4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

#### **5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
  - (2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
  - (3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
  - (4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
  - (5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
  - (6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Konektivitas Jalan;
  - (2) Konektivitas Kereta Api;
  - (3) Konektivitas Laut;
  - (4) Konektivitas Udara; dan
  - (5) Konektivitas Darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Transportasi Perkotaan; dan
  - (2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;

- (2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
- (3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
  - (2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
  - (3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

## **6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - (2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - (3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - (4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Penanggulangan Bencana; dan
  - (2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
  - (2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
  - (3) Pengembangan Industri Hijau.

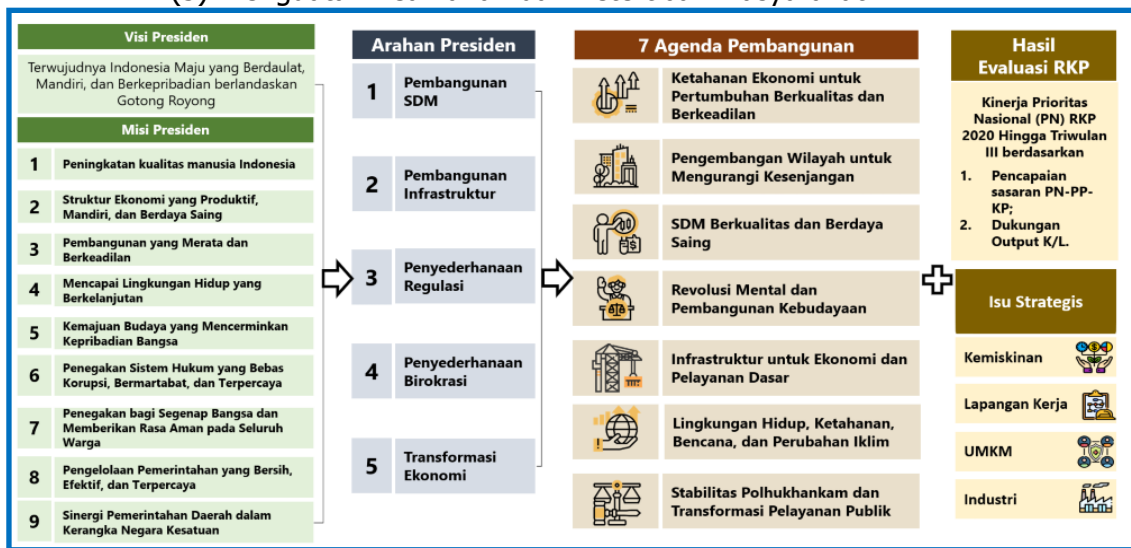
## **7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
  - (2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
  - (3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
  - (2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
  - (1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
  - (2) Transformasi pelayanan publik;
  - (3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
  - (4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - (1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
  - (2) Penguatan Keamanan Laut; dan
  - (3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.



**Gambar 4.4**  
**Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RKP 2022**



**Gambar 4.5**  
**Prioritas Nasional RKP 2022**

**2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**



RKPD provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang saat ini dalam proses dilakukan perubahan. Implementasi dari kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan sasaran pembangunan tahun 2022 dibutuhkan sinergitas dan dukungan utamanya dari



pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, berikut disampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2022, sebagai berikut :

#### **a. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2022**

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional termasuk dampak dari pandemi Covid-19, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **1) Penanggulangan kemiskinan**

Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 3,98 juta orang (11,41%), bertambah sebanyak 301,5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58%).

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut akses kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi, dan pengelolaan data kemiskinan.

##### **2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia**

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,14 poin, dari 71,73 poin pada 2019 menjadi 71,87 poin pada 2020. Namun demikian terjadi penurunan pertumbuhan secara signifikan dari 0,86% menjadi 0,20% pada 2020.

Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah diantaranya adalah akses layanan pendidikan bagi semua anak usia sekolah, penguatan sistem kesehatan daerah, tantangan bonus demografi dan pembangunan manusia paripurna berdasarkan siklus hidup, internalisasi nilai dan budaya sebagai perwujudan karakter bangsa dan ke Bhineka Tunggal Ika-an.

##### **3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha**

Terjadinya pandemi COVID-19 perekonomian Jawa Tengah di tahun 2020 terjadi kontraksi, termasuk pada sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, perdagangan dan jasa), kecuali sektor pertanian yang masih tumbuh positif di tahun 2020 sampai triwulan 3. Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,93% (y-on-y), akan tetapi lebih baik dari kondisi pada Triwulan II-2020 yang berkontraksi sebesar -5,92%.

Terjadinya pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor tenaga kerja. Jumlah pengangguran di Jawa Tengah pada periode Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48%) mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding periode Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44%).

Isu penting dalam peningkatan daya saing dan kesempatan berusaha diantaranya adalah dampak tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada sektor-sektor perekonomian antara lain sektor koperasi, UMKM, dan IKM yang ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, dan tenaga kerja; penurunan pendapatan para pelaku sektor pertanian akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan

pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanian dan produksi hasil pertanian; sektor pariwisata, transportasi dan tertundanya pembangunan infrastruktur.

#### **4) Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam**

Permasalahan utama daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam di Jawa Tengah antara lain dampak perubahan iklim yang menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih; kerusakan DAS; tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan; peningkatan jumlah timbulan sampah; kegiatan pertambangan yang belum menerapkan *Good Mining Practice*; kerusakan sumber daya pesisir; pencemaran air di sebagian wilayah sungai Jawa Tengah masih tinggi; tingginya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan tingginya risiko bencana yang disebabkan ancaman bencana alam dan non alam, keterpaparan penduduk dan kerentanan Infrastruktur serta tata kelola penanggulangan bencana.

#### **5) Kedaulatan Pangan dan energi**

Permasalahan yang masih perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan diantaranya adalah masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; belum berkembangnya kelembagaan petani berorientasi pada usaha ekonomis; belum stabilnya harga dan stok pangan strategis; konsumsi yang belum seimbang antar kelompok pangan; mutu dan keamanan pangan; serta daya saing Produk Pangan.

Terkait kedaulatan energi, permasalahan yang masih terjadi antara lain akses jaringan listrik rumah tangga miskin, budaya hemat energi masih perlu ditingkatkan, perlunya penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan energi bagi industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perlunya ditingkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

#### **6) Kesenjangan wilayah**

Meningkatkan aksesibilitas wilayah menjadi isu penting utamanya pada daerah-daerah tertinggal. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, penguatan sistem perkotaan dan perdesaan, membangun hubungan kota-desa, pengembangan kawasan agropolitan, peningkatan akses ketrampilan, permodalan dan pemasaran, peningkatan transportasi, pergantian antar moda serta sistem logistik.

#### **7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah**

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas wilayah antara lain keterbukaan dan transparansi informasi - komunikasi, akuntabilitas kinerja, kemandirian fiskal, profesionalisme dan kualitas Aparatur sipil Negara, penguatan kelembagaan, digitalisasi tata kelola, pelayanan publik yang belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan, antisipasi tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme serta penciptaan kondusivitas wilayah.

### **b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021 masih mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing

sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada **"Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM"**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

**a) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana, yang difokuskan pada :**

- (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- (2) Perwujudan korporasi Petani;
- (3) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- (4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- (5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- (6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
- (7) Pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi;
- (8) Perbaikan iklim dan kepastian Investasi yang semakin kondusif;
- (9) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
- (10) Rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- (11) Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;
- (12) Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung dan longstorage yang didukung perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
- (13) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob dan tanah longsor;
- (14) Integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan;
- (15) Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan;
- (16) Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan;
- (17) Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber dari non Pemerintah.

**b) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran/**yang difokuskan pada :

- (1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya;
- (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat);
- (3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan BAZNAS;
- (4) Pengurangan pengangguran melalui startup wirausaha, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja.

**c) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing,** yang difokuskan pada :

- (1) Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- (2) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah, meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak

**d) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah** yang difokuskan pada :

- (1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct seruices*), dan membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*);
- (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- (3) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- (4) Mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik;
- (5) Meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat;
- (6) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;
- (7) Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
- (8) Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**c. Target Sasaran Pembangunan Tahun 2022**

Target sasaran makro pembangunan tahun 2022 yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain meliputi :

- 1) Angka Kemiskinan turun menjadi **11,42-10,27%**;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar **5,96-5,88%**;

- 3) Pertumbuhan Ekonomi antara **3,93-5,20%**;
- 4) Inflasi pada angka **3,0±1**;
- 5) Nilai Tukar Petani **103,56**;
- 6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar **72,43**.

#### d. Pembangunan Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah serta sebagai upaya pemerataan pembangunan/maka OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan program pembangunan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengembangan wilayah Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata melalui keterpaduan, integrasi dan sinergi lokasi rencana program/kegiatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Arah kebijakan pembangunan wilayah
  - a) Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong Kedungsepur Wanarakuti – Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah;
  - b) Poros pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb Purwomanggung-Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
  - c) Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
  - d) Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet - Sindoro - Sumbing - Merbabu-Merapi –Lawu;
  - e) Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- 3) Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pengurangan kemiskinan
- 4) Mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

### 3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022



**RKPd KAB PEKALONGAN  
TAHUN 2022**

RKPd Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan **tahap Lima Tahun Keempat (2020-2025)** pada RPJPD 2005-2025 dengan arah pemantapan pembangunan

secara menyeluruh di berbagai bidang yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah berlandaskan keunggulan SDM, pelayanan dasar semakin luas, infrastruktur wilayah berkualitas, kondusivitas wilayah yang mantap serta kemampuan Iptek yang meningkat.

Selanjutnya untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Pekalongan disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

### a. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Daya saing ekonomi;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Pendidikan dan kesehatan;
- 4) Infrastruktur, Penanggulangan bencana banjir dan rob; dan
- 5) Tata Kelola Pemerintahan.

### b. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 mendasarkan pada kebijakan pembangunan tahap Lima Tahun Keempat (2020-2025) **RPJPD Tahun 2005-2025**, mempertimbangkan **visi, misi dan program kepala daerah terpilih** hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dan memperhatikan **RKP 2022**.

Arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemandirian daerah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun finansial. Ketergantungan ekonomi baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun daerah lain dapat semakin dikurangi. Upaya ini perlu didukung oleh kualitas SDM yang semakin meningkat, baik dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, keahlian, kultur dan perilaku, maupun pengetahuan. Hal ini karena SDM (tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi lebih penting adalah dalam hal kualitas) merupakan salah satu faktor keunggulan bersaing daerah;
- 2) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan tetap relevan untuk dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.
- 3) Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
- 4) Dalam rangka untuk memantapkan penerapan *e-government* dengan tujuan akhir untuk memberikan pelayanan publik yang prima, maka perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk ikut mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Segenap komponen masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bersih, tertib, teratur serta berdaya saing.
- 5) Pengembangan ekonomi diarahkan kepada peningkatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19 di Kabupaten Pekalongan dan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJPD Tahun 2005-2025, maka tema pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 adalah **"Pemantapan Pemulihan, Kemandirian Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung Penguatan Daya Saing"**, dengan prioritas :

- 1) **Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah**, melalui upaya :
  - a) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri mikro dan kecil, perdagangan dan jasa pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri mikro dan kecil (fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan standarisasi produk, fasilitasi penyediaan bahan baku industri unggulan), peningkatan promosi pariwisata, perbaikan iklim dan kepastian investasi yang kondusif, serta peningkatan ekspor produk unggulan.
  - b) Penguatan kemampuan teknologi informasi terutama bagi masyarakat dan usaha mikro kecil terdampak COVID-19 melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana teknologi informasi, serta pengembangan *e-commerce* produk-produk industri kreatif di Kabupaten Pekalongan.
- 2) **Peningkatan dan Kemudahan Investasi**, dilakukan melalui upaya : Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui peningkatan pelayanan kemudahan berusaha (*doing bussiness*), mendorong realisasi investasi, optimalisasi promosi investasi, penyebaran investasi berkualitas, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan industri mikro kecil, mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya industri mikro kecil.
- 3) **Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**, dilakukan melalui upaya:
  - a) Mengurangi beban pengeluaran (jaring pengaman sosial) yang berupa:
    - (1) Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan air bersih;
    - (2) Berupa bantuan langsung;
    - (3) Bersifat hibah/bansos;
  - b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui:
    - (1) Pelatihan/ketrampilan kewirausahaan pemula (*Start up*);
    - (2) Bantuan modal awal;
    - (3) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melalui pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah;
  - c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui:
    - (1) Pendampingan ekonomi pada kelompok rentan lainnya seperti kelompok perempuan kepala rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya yang terdampak pandemi COVID-19;
    - (2) Fasilitasi usaha mikro/kecil serta usaha rintisan yang bersinergi dengan BUMDesa dan/atau BUMDesa;
    - (3) Penciptaan lapangan kerja dengan padat karya;
    - (4) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.
  - d) Optimalisasi pelaksanaan sinergitas penanggulangan kemiskinan melalui:
    - (1) Peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya melalui Baznas dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* PKBL meliputi : pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial;
    - (2) Partisipasi masyarakat yang meliputi : pendaftaran perubahan kondisi rumah tangga, peduli lingkungan dan swadaya/gotong royong;
    - (3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan yang meliputi : pemutakhiran data, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat,

- padat karya tunai, pengendalian inflasi daerah, pembangunan inklusif dan antisipasi kejadian bencana.
- e) Peningkatan penanganan PMKS di luar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, dan peningkatan akurasi data kemiskinan melalui optimalisasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu);
  - f) Peningkatan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi dengan sasaran pada :
    - (1) Pelaksanaan pelatihan vokasi berdasarkan kompetensi dan kerjasama dengan industri melalui :
      - (a) Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan di daerah;
      - (b) Perizinan dan akreditasi lembaga pendidikan keterampilan di daerah;
      - (c) Sertifikasi kompetensi;
      - (d) Penyediaan Instruktur Aparatur Sipil Negara di daerah;
      - (e) Penguatan fungsi konsultasi dan pengukuran produktivitas.
    - (2) Penguatan pengelolaan informasi pasar kerja daerah yang terintegrasi berupa data pencari kerja dan lowongan pekerjaan pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER);
    - (3) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha terutama bagi warga terdampak COVID-19 melalui peningkatan ketrampilan, pendidikan dan pelatihan berbasis *softskill*, penguatan program *link and match* antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), peningkatan jejaring pemagangan dalam dunia industri;
    - (4) Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas melalui penyediaan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Fungsi layanan disabilitas dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,** dilakukan melalui upaya:
- a) Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan,** meliputi:
- (1) Peningkatan pelayanan pendidikan terutama adaptasi terhadap perubahan akibat pandemi COVID-19 dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, dengan tetap melakukan pemerataan layanan pendidikan yang baik;
  - (2) Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Pendidikan.
  - (3) Peningkatan dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau *stunting* melalui :
    - (a) penyelenggaraan PAUD;
    - (b) penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
    - (c) bantuan sanitasi sekolah;
    - (d) kelas *parenting*.
  - (4) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
  - (5) Peningkatan dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya (antara lain: penanganan anak tidak sekolah, IPM, IPG, IDG dan lain-lain)



- (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya "*kembali ke sekolah*" (*back to school*) bagi anak usia sekolah;
- (7) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;
- (8) Peningkatan pemenuhan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- (9) Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (10) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku;
- (11) Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
- (12) Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;
- (13) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan
- (14) Peningkatan pengembangan pendidikan *inklusi* yang memberikan kesempatan belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata sehari-hari;
- (15) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf.

**b) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan**, meliputi :

- (1) Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain:
  - (a) Adapun Rencana Peningkatan dan Perluasan serta Penambahan Fasilitas Kesehatan Berupa Rumah Sakit baru di wilayah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan.
  - (b) Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi.
  - (c) Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor.
  - (d) Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia.
  - (e) Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data
- (3) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pasca pandemi COVID-19 melalui upaya *Promotif* dan *Prenventif* Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diantaranya :
  - (a) Peningkatan kualitas lingkungan;
  - (b) Peningkatan perilaku hidup sehat;

- (c) Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi;
  - (d) Peningkatan aktivitas fisik masyarakat; dan
  - (e) Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi :
- (a) Peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
  - (b) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan
  - (c) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas.
- (5) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- (6) Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
- (7) Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi dengan meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- 5) Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas**, dilakukan melalui upaya :
- a) Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Pekalongan serta wilayah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas wilayah dan regional serta perkotaan-perdesaan, peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal dan stasiun);
  - b) Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pembangunan bangunan penampungan air (embung) pada daerah pertanian produktivitas tinggi/lambung pangan dan daerah rawan kekeringan;
  - c) Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi, dan drainase di wilayah kumuh perkotaan dan miskin perdesaan, pengelolaan sampah serta pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
  - d) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan utara, yang diwujudkan dengan pembangunan kawasan industri, pembangunan flyover perlintasan sebidang rel kereta Api di Wiradesa serta pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - e) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim melalui penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir-rob, tanah longsor dan lain sebagainya;
- 6) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan**, dilakukan melalui upaya :
- a) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk guna peningkatan nilai tambah, pemberian bibit, benih dan pupuk, peningkatan sarana dan prasarana irigasi, pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perkebunan dan peternakan serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok; dan
  - b) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan, pengembangan cakupan dan layanan asuransi nelayan,

penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; pemberian benih dan pakan ikan serta penyediaan lahan perikanan budidaya;

**7) Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga,** dilakukan melalui upaya :

- a) Peningkatan promosi dan penyelenggaraan event melalui peningkatan peran komunitas, swasta dan dunia pendidikan;
- b) Peningkatan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan; peningkatan prasarana dan sarana destinasi pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**8) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani,** dilakukan melalui upaya :

- a) Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampak pasca pandemi COVID-19 melalui :
  - (1) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah diakses masyarakat dengan penerapan pelayanan *daring/online* dan atau pelayanan keliling kepada masyarakat;
  - (2) Mengoptimalkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
  - (3) Terus mendorong pemerintah desa/kelurahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan membangun gerakan solidaritas untuk saling membantu, berbagi satu sama lain untuk membangun jejaring sosial komunitas sebagai gerakan perjuangan bersama;
  - (4) Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.
  - (5) Penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); perkuatan kapabilitas APIP, pembangunan zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, optimalisasi SIMWAS-Online guna percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan;
  - (6) Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka untuk mewujudkan aparatur yang semakin lincah dan adaptif terhadap perubahan.
  - (7) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah dengan mendorong kesiapan dunia usaha, dengan penerapan protokol baru dalam

menjalankan usaha serta diperlukan program sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi yang diterima masyarakat seragam dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain yang dikeluarkan setiap perangkat daerah.

- b) Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah pasca pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama seperti pajak dan retribusi, serta mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non pemerintah untuk investasi pembangunan (KPBU, CSR dan Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP));

### c. Sasaran Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Skenario sasaran makro pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2022 antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai angka **4,50 persen** dengan rentang nilai antara **4,0-5,0 persen**. Kebijakan ekonomi Kabupaten Pekalongan difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil pasca pandemi COVID-19 dan dapat memberikan pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal melalui peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan dan revitalisasi pasar daerah dan desa, pembangunan kawasan industri yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja, pengembangan destinasi pariwisata potensial. Hal tersebut juga perlu didukung dengan fasilitasi jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui kerjasama antar daerah di tingkat regional, provinsi maupun nasional.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai status tinggi dengan capaian sekitar **70,00 ± 1** dengan terus fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pembangunan infrastruktur fisik di daerah;
- 3) Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka **9,50 persen** yang akan diupayakan melalui sinergitas program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dengan prioritas dan fokus penanganan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar **4,00 persen**, dengan tantangan yang perlu diperhatikan adalah **bonus demografi** yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja.

Rencana pembangunan daerah tahun 2022 juga untuk mewujudkan implementasi Program – program Unggulan Kabupaten Pekalongan diantaranya yaitu:

#### 1) Sekolah Gratis Untuk Masyarakat Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa dan siswi dikabupaten pekalongan dari mulai uang spp, uang gedung dan seragam bagi siswa dan siswi warga kabupaten pekalongan, program ini merupakan program prioritas dibidang pendidikan tujuan dari program ini untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi droop out serta mengurangi angka kemiskinan. Sekolah gratis ini ditujukan bagi siswa baru tahun ajaran 2022/2023 di Seklah Negeri.

## 2) Jaminan Kesehatan Untuk Semua Masyarakat Kabupaten Pekalongan (UHC >95%).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan menjamin biaya layanan kesehatan bagi warganya dengan hanya menunjukkan KTP warga pekalongan hal ini dikarenakan biaya layanan kesehatan tersebut diatas sudah dicover oleh pemerintah kabupaten pekalongan melalui dana APBD, program ini merupakan salah satu program prioritas bidang kesehatan.

## 3) Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu.

Pemberian bantuan bagi penunggu pasien yang menjalani rawat inap kelas III di rumah sakit ini bisa menjadi salah satu sistem proteksi yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya resiko-resiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam keberlangsungan hidup khususnya bagi warga tidak mampu agar kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi.

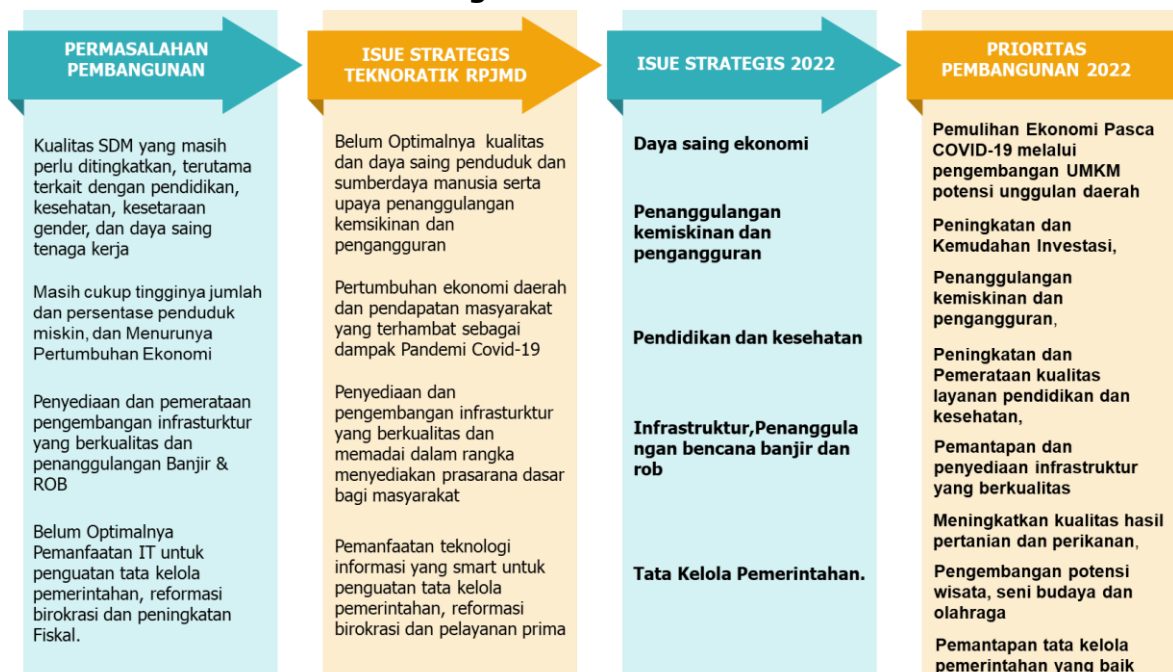
## 4) Ruas Tuntas Jalan Kabupaten.

Ruas Tuntas merupakan Peningkatan dan perbaikan jalan di seluruh Kabupaten Pekalongan yang mana akan diselesaikan bertahap program ini merupakan program pengentasan jalan rusak di semua wilayah dikabupaten pekalongan yang jalanya merupakan kewenangan Kabupaten "Jalanne Alus Rezekine Mulus & Jalan Mulus Ekonomi Lancar"



Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 telah selaras dengan RPJPD 2005-2025 serta Teknokratik RPJMD 2021-2026, diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Masalah Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas**  
**Pembangunan Tahun 2022**



Sumber: Hasil Analisa Tim 2021

## 4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pekalongan

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Daerah. Pokok-

Pokok Pikiran DPRD untuk rancangan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 mengusulkan sebanyak **1.493** usulan. Dalam mengusulkan pokok, dasar hukum yang diambil DPRD adalah Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178 yang menyatakan bahwa pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prinsip pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Penyampaian pokok-pokok pikiran tersebut menjadi tanggungjawab DPRD dan diharapkan menjadi skala prioritas dan dimasukkan kedalam rencana kerja daerah tahun 2022. Dalam memberikan usulan pokok, anggota dewan menjangking aspirasi dari masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti pada saat reses, hearing, audensi, dan rapat kerja. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 secara garis besar menyoroti bidang sebagai berikut :

**a. Bidang Pemerintahan**

- 1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur, serta efisiensi birokrasi termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan melaksanakan standarisasi rotasi, mutasi dan promosi berdasarkan Undang-undang ASN;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah; dan
- 3) Peningkatan sosialisasi peraturan-peraturan daerah termasuk terkait desa, sehingga dapat menciptakan suasana kondusif serta tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Bidang Perekonomian dan Keuangan**

- 1) Membuka mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas, karena UMKM sebagai basis perekonomian rakyat;
- 2) Menarik investor dengan mempermudah perijinan;
- 3) Mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat; dan
- 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

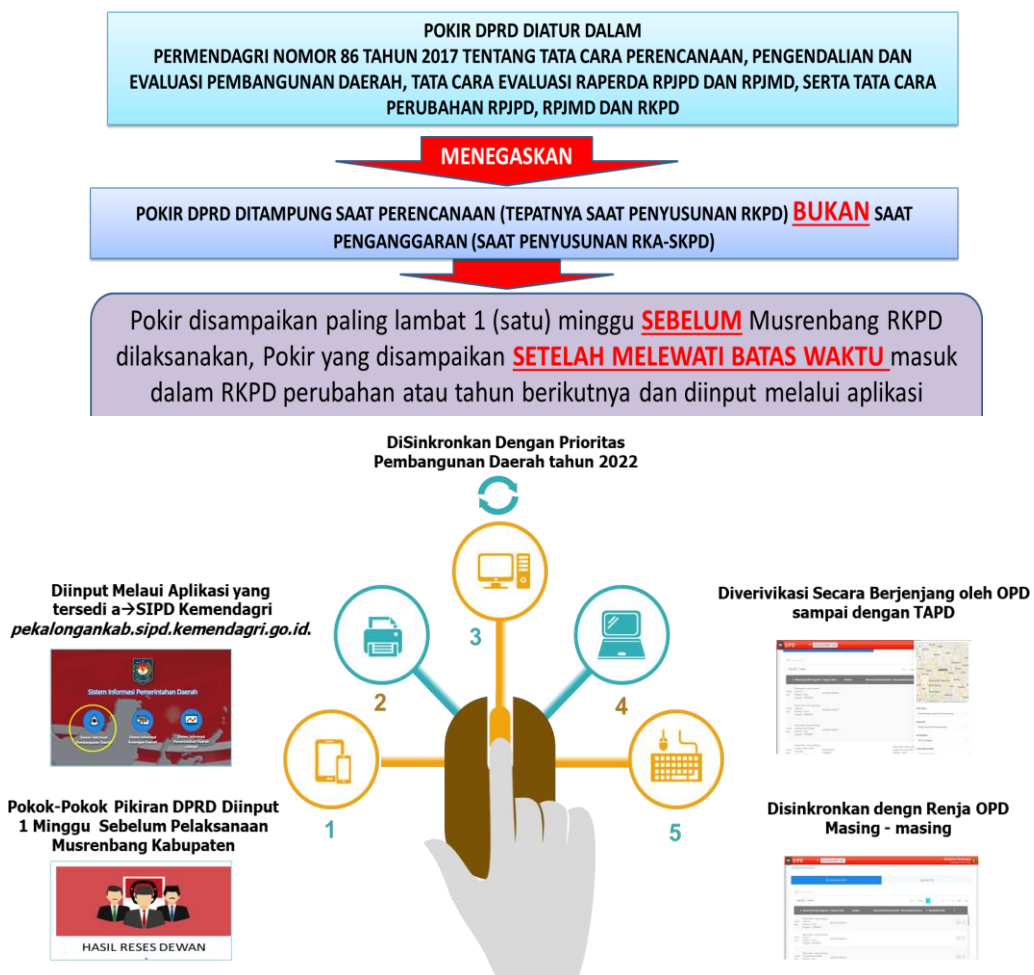
**c. Bidang Pembangunan**

- 1) Peningkatan perhatian pemerintah terhadap kualitas jalan;
- 2) Mendorong pemerintah daerah agar bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait rob dan dampaknya;
- 3) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan terutama di daerah Pantura;
- 4) Pembangunan pasar harus ada grand desain yang jelas agar terintegrasi;
- 5) Penataan tempat wisata lokal dan masalah taman;
- 6) Menyusun RTRWK dan RDTR lebih detail. Termasuk menata kawasan industri Kabupaten Pekalongan;
- 7) Pembangunan infrastruktur jalan, listrik, saluran air di daerah atas agar menjadi perhatian sehingga mobilitas dan akses perekonomian menjadi lebih lancar;
- 8) Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan persampahan;
- 9) Optimalisasi sarana transportasi antar desa yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- 10) Penataan dan pemerataan Penerangan Jalan umum (PJU) di wilayah Kabupaten Pekalongan terutama di daerah rawan kejahatan/ jauh dari pemukiman, lingkungan kantor pemerintah daerah, lingkungan taman dan tempat hiburan sehingga tidak digunakan sebagai tempat negatif; dan
- 11) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan bersinambungan lingkungan hidup

#### d. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Peningkatan mutu pendidikan dan mutu layanan yang berdaya saing;
- 2) Menjamin pemenuhan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Akurasi data mengenai penduduk miskin sehingga perlu data yang jelas dan terintegrasi di semua OPD;
- 4) Sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlu disusun program dan kegiatan prioritas yang mampu mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan, peningkatan kompetensi tenaga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, optimalisasi peran BLK, perluasan kewirausahaan sertapeningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah;
- 5) Perlunya konsultasi yang lebih intensif ke pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi penerapan program-program nasional terkait pengentasan kemiskinan di daerah;
- 6) Peningkatan pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah; dan
- 7) Mendorong petani dan nelayan agar lebih maju.

DPRD juga mendorong eksekutif guna optimalisasi kegiatan pasca pandemi COVID-19 melalui kegiatan dalam APBD, adapun Proses Input Pokir ke aplikasi SIPD dikarenakan seluruh rangkaian pengusula kegiatan pada RKPD terintegrasi dengan SIPD Kementrian dalam negeri.



**Gambar 4.6**  
**Mekanisme Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

#### 5. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2022

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 telah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

dan Prioritas Nasional Tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Adapun keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2022**

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional
<b>TEMA</b>			
	Pemantapan Pemulihan, Kemandirian Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung Penguatan Daya Saing	Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
<b>PRIORITAS</b>			
1.	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	<b>Prioritas 1:</b> Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	<b>Prioritas 1:</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2.	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	<b>Prioritas 1:</b> Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	<b>Prioritas 1:</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
3.	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	<b>Prioritas 2:</b> Penguatan percepatan Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<b>Prioritas 2 :</b> Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan <b>Prioritas 3 :</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	<b>Prioritas 3:</b> Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;	<b>Prioritas 3 :</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing <b>Prioritas 4 :</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	<b>Prioritas 1</b> Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	<b>Prioritas 2 :</b> Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan <b>Prioritas 5 :</b> Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar <b>Prioritas 6 :</b> Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6.	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	<b>Prioritas 1:</b> Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	<b>Prioritas 1:</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
7.	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	<b>Prioritas 3:</b> Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;	<b>Prioritas 3 :</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing <b>Prioritas 4 :</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional
8.	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	<b>Prioritas 4 :</b> Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan fiscal daerah	<b>Prioritas 7 :</b> Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Analisa Tim 2021

Sedangkan untuk lebih jelasnya keterkaitan Prioritas pembangunan antara nasional, Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pekalongan beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan**  
**Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten Pekalongan beserta Pagu Tahun 2022**

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Petumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana	1. Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	155,000,000
			2. Peningkatan dan Kemudahan Investasi			Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	180,000,000
						Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	800,000,000
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	975,000,000
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2,330,800,000
				KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	515,000,000
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	590,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
				PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	300,000,000
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500,000,000
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	200,000,000
				PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,000,000,000
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	960,000,000
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1,200,000,000
				TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan RTK	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	250,000,000
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2,429,384,100
							Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1,100,000,000
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	350,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
							Job Fair/Bursa Kerja	300,000,000
				PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75,000,000
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	450,000,000
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	330,000,000
				PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	870,000,000
				PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40,000,000
							Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25,000,000
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	175,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
							Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20,000,000
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan percepatan Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	300,000,000
			2. Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500,000,000
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	200,000,000
				PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100,000,000
				PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	3,074,036,000
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,074,036,000
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	9,849,812,000
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,197,000,000
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2,500,000,000
							Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,100,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1,000,000,000
				KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	7,500,000,000
							Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,200,000,000
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,000,000,000
							Pengadaan Obat, Vaksin	3,000,000,000
							Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,726,926,000
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	4,700,000,000
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4,500,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	500,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	75,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	90,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	980,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	800,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3,500,000,000
							Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	375,000,000
							Pengelolaan Kesehatan Khusus	390,000,000
				PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	86,419,344,000
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1,485,450,000
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,285,400,000
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1,731,000,000
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	55,000,000
							Pengelolaan Dana BOP PAUD	330,000,000
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	110,000,000
							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100,000,000
				KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	75,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	980,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					PAGU SUBKEGIATAN
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	111,700,000,000
				SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	37,246,200
							Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	435,000,000
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	829,400,000
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200,000,000
						Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	750,000,000
							Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1,210,000,000
				TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	250,000,000
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2,429,384,100
							Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1,100,000,000



No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN						
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Penguatan percepatan Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4,500,000,000	
		2. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;	2. Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	500,000,000	
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	75,000,000
							Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	57,500,000
					SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	250,000,000
								Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	250,000,000
								Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	750,000,000
								Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1,210,000,000
						KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	500,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70,000,000
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75,000,000
				PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	3,074,036,000
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,074,036,000
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	9,849,812,000
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,197,000,000
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2,500,000,000
							Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,100,000,000
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1,000,000,000
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	350,565,500

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200,000,000
4	<b>Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan</b>	<b>Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;</b>	<b>Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga</b>	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	1,050,000,000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1,200,000,000
				KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80,000,000
							Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	285,000,000
							Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	460,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	642,000,000
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	30,000,000
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000
				KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80,000,000
							Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	285,000,000
							Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	460,000,000
5	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana</b>	<b>Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas</b>	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan kumuh	800,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaiki RTLH	2,975,000,000
							Perbaiki RTLH bersama PSU	2,500,000,000
					PROGRAM PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan kawasan pada daerah kab/Kota	Perbaiki RTLH untuk pencegahan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	11,250,000,000
							Kerjasama perbaikan RTLH bersama PSU dibawah 10 Ha	2,500,000,000
				PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6,571,000,000
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,341,250,000
				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3,000,000,000
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,500,000,000
							Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9,745,000,000
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5,343,000,000
							Rehabilitasi Bendung Irigasi	2,025,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	150,000,000
				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	170,000,000
6	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	<b>Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan Keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana</b>	<b>Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas</b>	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	520,000,000
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	170,000,000
7	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	<b>Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan fiscal daerah</b>	<b>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani</b>	PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	250,000,000
				DINKOMINFO	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	160,000,000
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	450,000,000

No.	RKP	RKPD PROVISI JATENG	RKPD KAB PEKALONGAN					
	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN
				KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang sing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan wilayah Perbatasan, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	2,072,554,400
				PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	200,000,000
							Fasilitasi Bantuan Hukum	332,000,000
								<b>308,113,972,300</b>

Sumber: Hasil Analisa Tim 2021

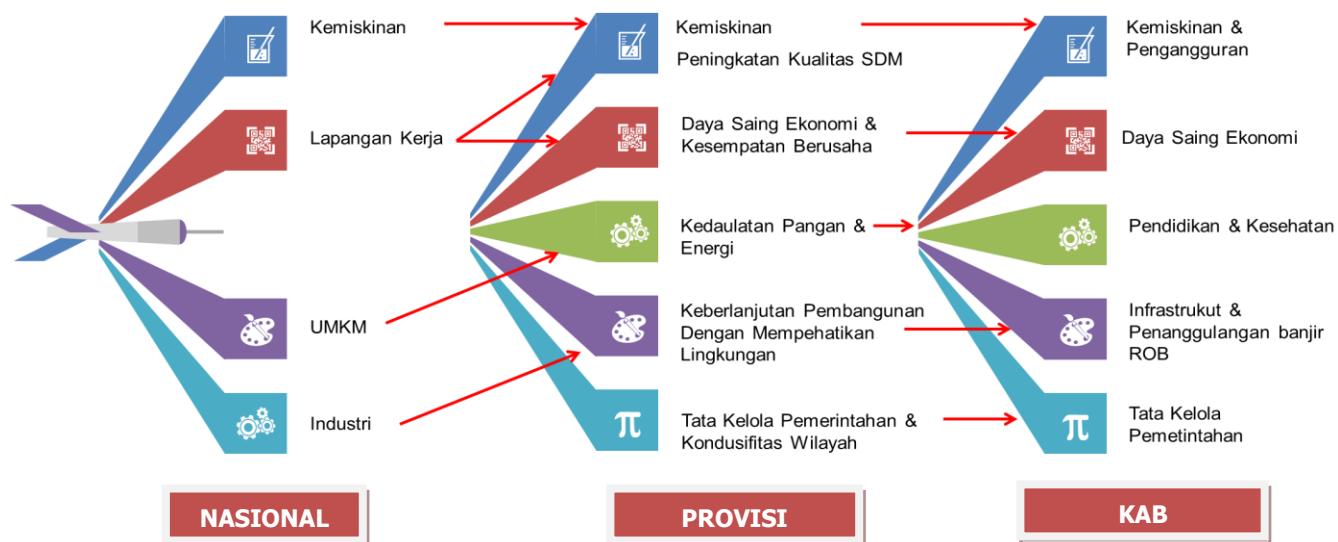
Sedangkan untuk keterkaitan sasaran pembangunan antara nasional, Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Keterkaitan Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan Target Sasaran Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran	RKP 2022	RKPD Provinsi Jawa Tengah 2022	RKPD Kabupaten Pekalongan 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40 - 6,00	3,93 - 5,20	4,00 - 5,00
2	Inflasi (%)	3,0±1	3,0±1	3,0±1
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,50 - 9,00	11,42 - 10,27	9,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,50 - 6,20	5,96 - 5,88	4,00
5	Rasio Gini	0,376 - 0,378	-	-
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 - 73,48	72,43	70,00 ± 1
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,80 - 27,10	-	-
8	Nilai Tukar Petani/NTP	102-104	103,56	-
9	Nilai Tukar Nelayan/NTN	102-105	-	-

Sumber: Hasil Analisa Tim 2021

Sedangkan untuk keterkaitan Isu Strategis antara nasional, Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 4.7.



**Gambar 4.7**  
**Keterkaitan Target Isu Strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**



## 6. Inovasi Daerah dalam Pencapaian Target dan Sasaran Tahun 2022

Inovasi Daerah dalam pencapaian target dan sasaran dengan melihat prioritas Pembangunan tahun 2022 juga mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022.

### a. Gerakan "KUDU" Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah)



Gerakan KUDU Sekolah (Kembali Upayakan DUKungan untuk Sekolah) adalah gerakan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang saling bersinergi untuk menurunkan **Anak Tidak Sekolah (ATS)** secara efektif dengan cara mengupayakan dan mendukung pengembalian anak usia sekolah yang tidak bersekolah, melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.



**Gambar 4.8**  
**Kunjungan Ke Rumah ATS sebagai upaya Pendampingan**  
**ATS yang akan Dikembalikan ke Sekolah**

Tujuan dari gerakan KUDU Sekolah antara lain :

- 1) Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas;
- 2) Menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS);
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan peluang bekerja bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah tamat; dan
- 4) Menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Sasaran gerakan KUDU Sekolah adalah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak sekolah dengan kategori anak yang belum atau tidak pernah sekolah, anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah. Adapun rekapitulasi jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dalam tabel 4.4.

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Kategori			Jumlah
		Drop Out (DO)	Tidak Melanjutkan	Belum / Tidak Pernah Sekolah	
1.	Kandangserang	87	465	5	557
2.	Paninggaran	63	193	13	269
3.	Lebakbarang	43	95	8	146
4.	Petungkriono	15	101	2	118
5.	Talun	67	130	24	221
6.	Doro	88	102	10	200
7.	Karanganyar	114	86	8	208
8.	Kajen	154	185	29	368
9.	Kesesi	141	136	15	292
10.	Sragi	78	149	18	245
11.	Siwalan	96	144	9	249
12.	Bojong	169	221	14	404
13.	Wonopringgo	86	95	4	185

No.	Kecamatan	Kategori			Jumlah
		Drop Out (DO)	Tidak Melanjutkan	Belum / Tidak Pernah Sekolah	
14.	Kedungwuni	114	50	13	177
15.	Karangdadap	40	81	3	124
16.	Buaran	41	44	7	92
17.	Tirto	113	100	7	220
18.	Wiradesa	55	62	8	125
19.	Wonokerto	70	70	6	146
<b>Jumlah</b>		<b>1634</b>	<b>2509</b>	<b>203</b>	<b>4346</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>4346</b>			

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan 2021

Dari tabel 4.5, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kab. Pekalongan sebanyak 4.346 anak. Terdapat empat alasan mendasar yang menyebabkan anak tidak sekolah, yaitu : (i) Tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah sebesar 33,02%; (ii) Psikologis karena sudah lama berhenti sekolah sebesar 27,96%; (iii) Ekonomi sebesar 20,41%; dan (iv) Berkebutuhan khusus, ABK dan Anak Penyandang Disabilitas (APD) sebesar 7,43%.

Permasalahan ATS ini menjadi perhatian serius mengingat hal tersebut sangat memengaruhi capaian IPM di Kabupaten Pekalongan karena terkait dengan indikator-indikator pendukungnya. Selain itu jumlah ATS kemungkinan besar akan bertambah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak hilangnya mata pencarian orang tua, hilangnya akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga tidak mampu akibat pembelajaran jarak jauh, terbatasnya dukungan bagi anak dengan disabilitas, yang semuanya ini kemudian secara langsung berpotensi pada kondisi anak tidak sekolah.

Target gerakan KUDU Sekolah di Daerah, pada tahun 2019 akan mengembalikan Angka Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 389 anak, tahun 2020 ditargetkan 680 anak, dan pada tahun 2021 ditargetkan 1.025 anak dan pada tahun 2022 ditargetkan 2.225 anak. Sehingga dari **4.346** Angka Tidak Sekolah (ATS) dapat dituntaskan dalam kurun waktu 4 tahun. Target tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Data dan Target pengurangan anak tidak sekolah dapat dilihat pada gambar 4.9.



**Gambar 4.9**  
**Data dan Target Jumlah Anak yang Harus Sekolah**  
**dalam Gerakan "Kudu Sekolah"**

Mekanisme Gerakan KUDU Sekolah diinisiasi dan digerakkan oleh elemen masyarakat peduli pendidikan dan Pemkab Pekalongan. Diawali dengan pendataan melalui BDT Tahun 2018, data dari DAPODIK Dikdas, dan data EMIS tahun 2018 serta pendataan ATS tahun 2016 melalui kegiatan Pendidikan untuk Semua (PUS) yang telah dilakukan verval faktual oleh Tim Pendamping PKH Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019. Sedangkan sumber dana untuk membiayai pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah, dana dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, Forum CSR, BAZNAS, swadaya masyarakat dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### b. Laboratorium Kemiskinan, Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal

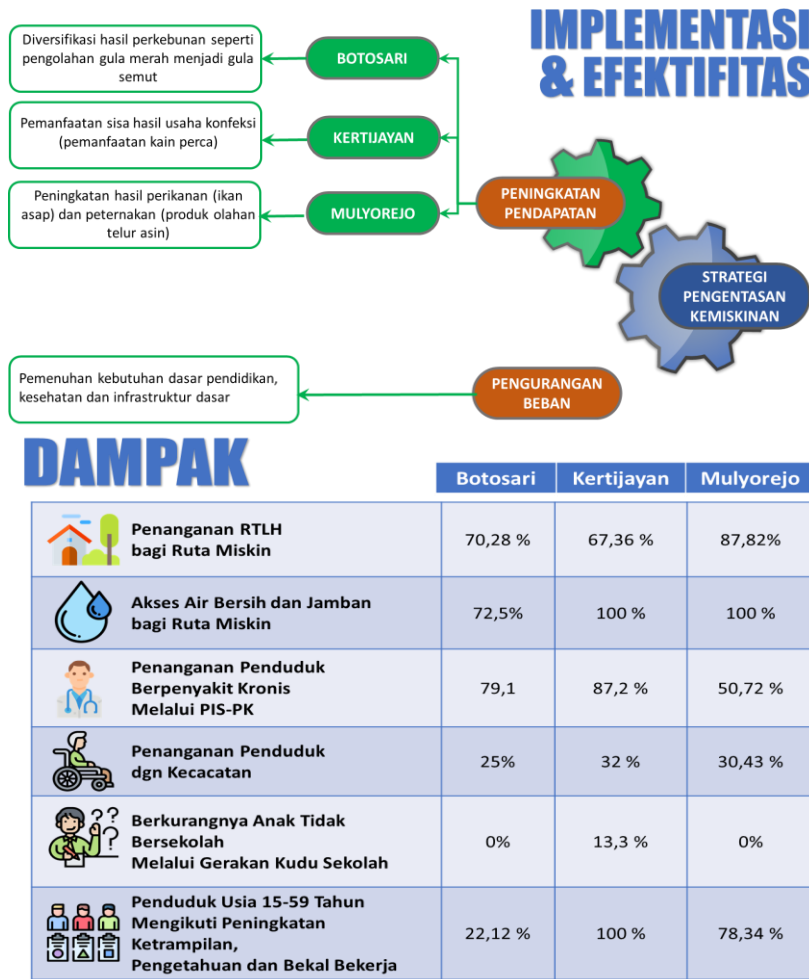


##### LABORATORIUM KEMISKINAN KABUPATEN PEKALONGAN

Strategi penanggulangan kemiskinan daerah telah diatur dalam **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan**. Sedangkan laboratorium penanganan kemiskinan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan utamanya permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin, prasarana dasar pemukiman, dan mendorong ekonomi lokal dengan menggali potensi-potensi ekonomi kemasyarakatan sebagai daya ungkit pembangunan wilayah. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada desa/kelurahan prioritas, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi obyek (sasaran) program-program penanggulangan kemiskinan saja, tetapi juga akan menjadi subyek (pelaku aktif) dari program-program penanggulangan kemiskinan.

Melalui laboratorium penanganan kemiskinan masyarakat dapat mengoptimalkan seluruh potensi lingkungan setempat dengan memberdayakan warga setempat. Masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan warga miskin serta merumuskan penanganan permasalahan dengan mengangkat potensi lingkungan yang ada sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat secara bertahap melalui perbaikan program perlindungan sosial, perbaikan akses pelayanan dasar dan memperluas pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan yang ditempuh adalah Penetapan program dan kegiatan terpadu antar perangkat daerah yang difokuskan pada desa terpilih secara bertahap pada desa-desa miskin di Daerah.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015 pada tahap awal dipilih 3 desa merah sesuai karakteristik wilayah miskin perdesaan, miskin perkotaan dan miskin pesisir, yaitu : **Desa Botosari (Kec. Paninggaran), Desa Kertijayan (Kec. Buaran, Desa Mulyorejo (Kec. Tirto)**. Desa-desa yang telah ditentukan tersebut kemudian dipetakan kondisi permasalahan rumah tangga dan individunya berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) 2015, yang selanjutnya diintervensi melalui program/kegiatan reguler atau program/kegiatan afirmatif Perangkat Daerah, program/kegiatan dunia usaha, perguruan tinggi dan komponen masyarakat lainnya.



**Gambar 4.10**  
Implementasi Pelaksanaan Laboratorium Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Pada tahun 2019 dari 3 desa tersebut telah berhasil keluar dari desa merah sehingga pada tahun 2020 di replikasi menjadi atau bertambah menjadi 6 desa yaitu Desa Bebel (Kec Wiradesa), Kelurahan Kedungwuni Timur (Kec Kedungwuni), Desa Jrebengkembang (Kec Karangdadap), Desa Pedawang (Kec Karanganyar), Desa Windurojo (Kec Kesesi) dan Desa Kayupuring (Kec Petungkriyono) dan pada tahun 2021 akan ada tambahan replikasi sebanyak 6 desa. Verifikasi data tahun 2020 menggunakan Aplikasi SAKTI (Satu Aplikasi Kemiskinan Terintegrasi).

**Tabel 4.7**  
Lokasi Desa Laboratorium Kemiskinan Di Kabupaten Pekalongan

3 desa awal sasaran Laboratorium Kemiskinan	6 desa Replikasi Laboratorium Kemiskinan	Tipologi Desa
1. Desa Botosari (Kec. Paninggaran)	1. Desa Bebel (Kec Wiradesa)	Pesisir
2. Desa Kertijayan (Kec. Buaran)	2. Kelurahan Kedungwuni Timur (Kec. Kedungwuni)	Kota
3. Desa Mulyorejo (Kec. Tirto)	3. Desa Jrebengkembang (Kec. Karangdadap)	Kota
	4. Desa Pedawang (Kec. Karanganyar)	pegunungan
	5. Desa Windurojo (Kec. Kesesi)	Pegunungan
	6. Desa Kayupuring (Kec. Petungkriyono)	Pegunungan

c. **"SAPU JAGAD" pelayanan Kependudukan bagi Semua Terutama bagi penyandang Disabilitas dimasa Pandemi COVID-19.**



**SAPU JAGAD** akronim dari (**SemuA PendUduk TerJAMin** dalam PenGurusan **Administrasi Kependudukan**) merupakan inovasi pelayanan publik Kabupaten Pekalongan mengarang inovasi ini khusus bagi penyandang disabilitas dalam upaya untuk memberikan akses layanan administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu layanan yang mudah diakses, cepat dan **berkeadilan**. Pelayanan yang adil dalam arti tidak diskriminatif sehingga semua penduduk terlayani dengan baik.

Inovasi Sapu jagad juga dilaksanakan selaras dengan 3 (tiga) Program Strategi Nasional yaitu tertib database, tertib NIK dan tertib dokumen kependudukan serta sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan 2021-2026 yang ke satu yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik".

Permasalahan Munculnya Inovasi Sapu Jagad antara lain :

- 1) Inovasi 4 Sekawan (layanan berdasarkan kelompok sasaran) belum mengcover kelompok sasaran penyandang disabilitas sehingga perlu penyempurnaan;
- 2) Terbatasnya akses layanan adminduk bagi penyandang disabilitas;
- 3) Ketidakmampuan hadir di tempat pelayanan menyebabkan mereka belum memiliki dokumen adminduk sehingga perlu penanganan khusus.

Inovasi Layanan **Sapu Jagad** mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu **tujuan ke-16 SDGs, 'mewujudkan masyarakat inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level'** serta target ke-16 c. yaitu "memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial". Dengan salah satu indikatornya adalah *Persentase balita yang memiliki akta kelahiran*. Indikator dapat diperluas dengan persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki akta kelahiran.



**Gambar 4.11**  
**Inovasi Sapu Jagad dalam mendukung SDGs**

Dalam layanan terhadap para penyandang disabilitas, dokumen yang diterbitkan antara lain KTP elektronik, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. dengan upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sesuai dengan tujuan SDG's.

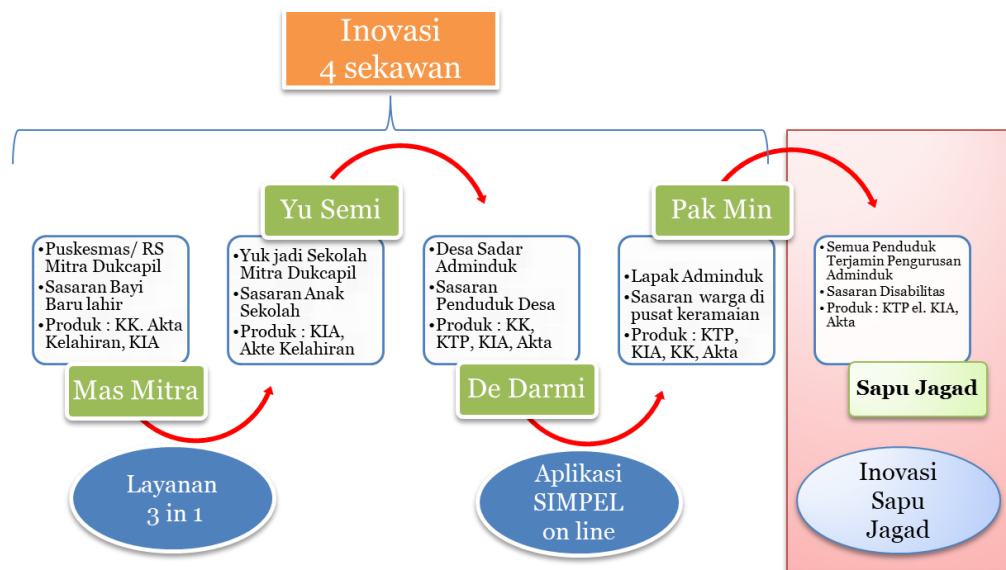
- 1) Semua Penduduk adalah semua penduduk Kabupaten Pekalongan termasuk penduduk penyandang disabilitas.

- 2) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 3) Terjamin adalah menanggung terhadap akses pelayanan adminduk
- 4) Dokumen adminduk meliputi Akta Kelahiran, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak

Tujuan dari inovasi ini adalah:

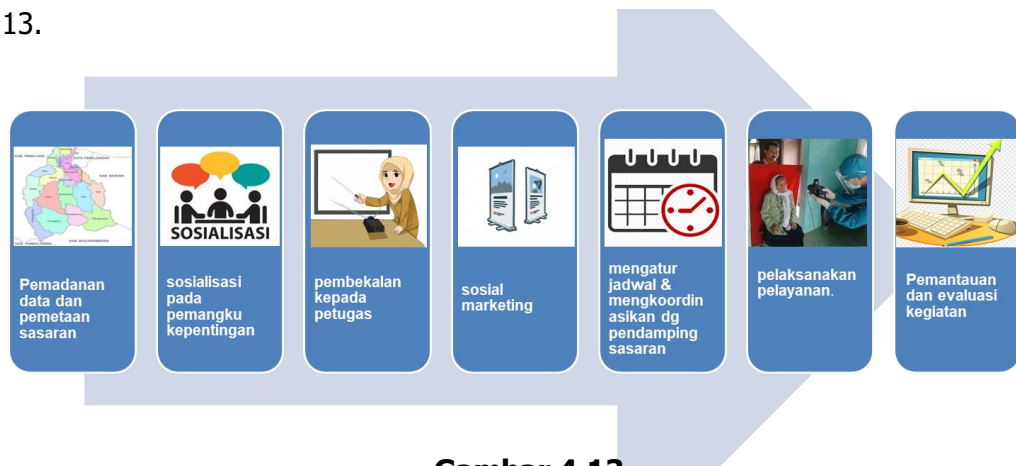
- 1) Memberikan akses layanan administrasi kependudukan bagi semua penduduk tanpa kecuali termasuk para penyandang disabilitas.
- 2) Para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman dan adil;
- 3) Memperoleh data penyandang disabilitas yang akurat.

Tahapan Munculnya Inovasi Sapu Jagad di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 4.12.



**Gambar 4.12**  
**Tahapan Munculnya Inovasi Sapu Jagad**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021**

Adapun Tahapan Pelaksanaan Inovasi Sapu jagad dapat dilihat pada gambar 4.13.



**Gambar 4.13**  
**Tahapan Pelaksanaan Inovasi Sapu Jagad**  
**di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021**

Adapun Dampak yang dihasilkan dari inovasi ini Menunjukkan percepatan cakupan kepemilikan dokumen adminduk dan keberpihakan pemerintah daerah untuk memberikan hak warga negara kepada warganya tanpa kecuali.

Bagi penduduk penyandang disabilitas Mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan penerbitan dokumen kependudukan Bagi Institusi yang menangani disabilitas Sekolah juga membutuhkan dokumen kependudukan siswanya yaitu akta kelahiran sebagai syarat untuk diinput dalam data pokok kependidikan (dapodik). Yang pada setiap jenjangnya akan dilakukan penulisan ijazah dengan penulisan identitasnya berdasarkan akta kelahiran. Sehingga kerjasama ini juga meminimalisir kesalahan dalam penulisan ijasah. Akta kelahiran dan Ijazah, dokumen tersebut akan dipakai terus oleh peserta didik ketika akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel 4.8**  
**Dampak Inovasi Jagad**  
**Di Kabupaten Pekalongan**

Sebelum ada Inovasi Sapu jagad	Sesudah ada Inovasi Sapu Jagad
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilakukan Identifikasi institusi / kelompok yang bertanggungjawab / peduli pada disabilitas.</li> <li>• Belum ada Pembentukan Tim Pempcepatan Penyelesaian Target Nasional dengan Keputusan Bupati Pekalongan</li> <li>• Belum dilakukan Pemaparan data dan Pemetaan sasaran dengan melibatkan institusi yang bertanggungjawab atau peduli dengan para disabilitas.</li> <li>• Belum ada Sosialisasi pada pemangku kepentingan tentang layanan sapu jagad.</li> <li>• Belum dilaksanakan Pembekalan kepada petugas untuk layanan Sapu Jagad</li> <li>• Belum ada Sosial marketing dengan menyediakan poster/stand banner</li> <li>• Tidak dilakukan Penyusunan jadwal school/home visit.</li> <li>• Belum dilaksanakan layanan sapu jagad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan Identifikasi institusi / kelompok yang bertanggungjawab / peduli pada disabilitas.</li> <li>• Pembentukan Tim Pempcepatan Penyelesaian Target Nasional dengan Keputusan Bupati Pekalongan</li> <li>• Pemaparan data dan Pemetaan sasaran dengan melibatkan institusi yang bertanggungjawab atau peduli dengan para disabilitas.</li> <li>• Sosialisasi pada pemangku kepentingan tentang layanan sapu jagad.</li> <li>• Pembekalan kepada petugas untuk layanan Sapu Jagad</li> <li>• Sosial marketing dengan menyediakan poster/stand banner</li> <li>• Penyusunan jadwal school/home visit.</li> <li>• Pelaksanaan layanan sapu jagad</li> </ul>

**d. "SINTA SAH BU" : Solusi Mantap Pengusaha Sibuk Jurus jitu dalam percepatan pelayanan perijinan dimasa Pandemi COVID-19**



Kabupaten Pekalongan memiliki daerah yang dipersiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Kawasan ini merupakan zona pertumbuhan industri baru di provinsi Jawa Tengah wilayah pantura. Kondisi saat ini di daerah perlu adanya peningkatan iklim investasi guna meningkatkan daya saing.

Pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya telah disebut dalam Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, akan tetapi kondisi saat ini respon masyarakat untuk mengurus perizinan usaha belum maksimal. Hal ini disebabkan belum berfungsinya PTSP di daerah secara utuh, sehingga masyarakat masih harus meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk mengurus syarat perizinan ke OPD teknis. Merespon kesibukan

masyarakat tersebut, Kabupaten Pekalongan Melalui Dinas yang menangani perizinan meluncurkan pelayanan perizinan secara online.



Namun pada kenyataannya masyarakat masih kurang responsive untuk mengurus perizinan dengan alasan tidak semua masyarakat dunia usaha bisa menggunakan aplikasi perizinan usaha yang disediakan, sehingga banyak yang menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengurusan perizinan. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses perizinan dikarenakan para pengusaha yang sibuk membuat rawan adanya pungli dan salah faham proses pengurusan perizinan.

Solusi Mantap Pengusaha Sibuk (SINTA SAH BU) adalah sebuah layanan perizinan yang merupakan terobosan untuk menjawab kurang responsifnya masyarakat terhadap pentingnya perizinan dengan alasan tidak ada waktu atau sibuk. Adapun layanan yang kami sajikan adalah :

### 1) Pelayanan perizinan malam hari (*Weekend Night Service*)

Layanan perizinan ini dilakukan setiap jum'at malam dari jam 19.00 – 22.00 wib, Layanan merespon bagi pelaku usaha / pemohon yang tidak ada waktu mengurus perizinan di siang hari.

### 2) Pelayanan perizinan lewat fasilitas android (WA) dan video Call

Layanan ini disediakan bagi pelaku usaha atau pemohon yang kurang familiar dengan aplikasi online. Dengan layanan ini pelaku usaha/pemohon bisa mengajukan perizinan hanya dengan menfoto dokumen lewat aplikasi WA dan bahkan bagi yang punya waktu luang di rumah bisa langsung menggunakan WA Video Call untuk pendampingan pengurusan izin lewat Online Single Submission (OSS).

### 3) Pelayanan perizinan lewat on call

Layanan ini disediakan khusus untuk pelaku usaha atau pemohon terutama kaum perempuan (ibu-ibu, lansia, berkebutuhan khusus) yang benar-benar karena kesibukannya tidak bisa meninggalkan tempat usahanya, petugas akan mendatangi tempat domisili usaha dan membantu pemrosesan sampai selesai.

Adapun Dampak Pelayanan "SINTA SAH BU" dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terutama bagi para pelaku usaha atau pemohon khususnya bagi kaum perempuan (*ibu-ibu, lansia, berkebutuhan khusus*) yang tidak ada waktu serta lokasinya jauh dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya pelayanan ini pelaku usaha atau pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus perizinan, tetapi cukup memanfaatkan layanan yang sudah disediakan.

Sebelum pelayanan "SINTA SAH BU" diluncurkan, pelaku usaha atau pemohon masih dilayani dengan pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja setiap hari kerja dari hari Senin sampai Jum'at dan harus datang sendiri untuk memasukkan berkas ataupun mengakses perizinan online yang disediakan.

Dengan adanya pelayanan "SINTA SAH BU" pelaku usaha atau pemohon bisa mengurus perizinan baru atau perpanjangan perizinan cukup dari rumah hanya dengan memanfaatkan layanan lewat Whatsapp (WA) dengan nomor layanan yang sudah disediakan, bahkan bagi pelaku usaha atau pemohon yang benar-benar tidak ada waktu di siang hari, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyediakan waktu ekstra setiap jum'at malam.



"SINTA SAH BU " juga terdapat layanan *on call*, dimana pelaku usaha atau pemohon bias konsultasi terkait perizinan dan pelayanan perizinan dengan mendatangi domisili pelaku usaha tersebut.



**Gambar 4.14**  
**Pelayanan Unggulan "Sinta Sah Bu"**

#### **e. Inisiatif Inovasi Membangun Kabupaten Pekalongan dalam Penanggulangan Banjir dan Rob serta Pengembangan Aset Daerah melalui Kerja Sama dengan Badan Usaha**

Inisiatif inovasi dalam membangun Kabupaten Pekalongan merupakan gagasan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang ada, Banjir dan Rob adalah 2 (dua) kejadian yang akrab dengan penduduk di sekitar pesisir Pulau Jawa khususnya di Daerah Pekalongan. Banjir yang terjadi di musim penghujan, disebabkan karena limpasan air tidak dapat tertampung dengan cukup pada badan air seperti sungai, saluran drainase maupun prasarana sumber daya air lainnya, dimana laju airnya berasal dari hulu ke hilir.

Sedangkan rob jamak terjadi di musim kemarau karena limpasan air laut yang masuk ke daratan, dimana laju airnya dari hilir ke hulusalah satu diantaranya adalah Rencana Tindak lanjut pembangunan tanggul rob yang mana terdapat beberapa permasalahan pada saat musim hujan air tidak dapat mengalir ke hilir dikarenakan adanya tanggul rob sehingga kedepan diperlukan solusi dan gagasan untuk mengintegrasikan hasil pembangunan tersebut.

Adapun salah satu inovasi dalam pengintegrasian tersebut untuk mengurangi banjir yang ada di pesisir Kabupaten Pekalongan adalah dengan pengintegrasian saluran drainase sekunder dan pembangunan rumah pompa, pintu air serta direncanakan akan dibangun kolam retensi.

Inisiatif inovasi dalam membangun Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini :

##### 1) Rencana Pembangunan Kolam Retensi

Pada tahun depan diawali dengan pembebasan lahan di daerah kecamatan wonokerto dan penyusunan DED, sedangkan konsep dasar dari kolam retensi adalah menampung volume air ketika debit maksimum di sungai datang, kemudian secara perlahan-lahan mengalirkannya ketika debit di sungai sudah kembali normal. Secara spesifik kolam retensi akan memangkas besarnya puncak banjir yang ada di sungai, sehingga potensi *over topping* yang mengakibatkan kegagalan tanggul dan luapan sungai tereduksi.

Selain fungsi utamanya sebagai pengendali banjir, manfaat lain yang bisa diperoleh dari Kolam Retensi adalah :

- a) Sebagai sarana pariwisata air;
- b) Sebagai konservasi air, karena mampu meningkatkan cadangan air tanah setempat;

Terdapat 2 (dua) jenis kolam retensi yang dapat diterapkan, yaitu:

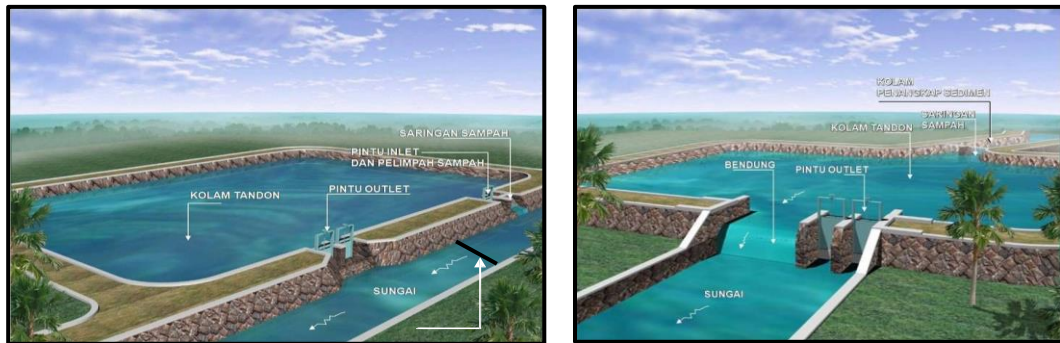
- a) Kolam Retensi yang berada di samping badan sungai.

Prinsip yang dipakai dalam pembangunannya harus tersedia lahan yang cukup karena secara parsial berada di luar alur sungai dan tidak mengganggu sistem aliran sungai yang ada.

b) Kolam Retensi yang berada di dalam badan sungai.

Karena berada didalam badan sungai sehingga mirip dengan waduk Prinsip yang dipakai dalam pembangunannya harus tersedia lahan yang cukup karena secara parsial berada dalam sungai

Untuk lebih jelas ilustrasi gambar rencana pembangunan kolam retensi untuk mengurangi banjir dan rob dikabupaten pekalongan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 4.15**  
**Ilustrasi Rencana Pembangunan Kolam Retensi**

2) Pemanfaatan dan pengembangan asset daerah melalui kerja sama dengan investor dan badan usaha.

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya daerah untuk berinovasi dalam penyediaan dana selain dari DAU Untuk mengatasi itu, Pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP)*. Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya adapun Asset daerah yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan diantaranya adalah :

a. Gedung Eks Pendopo Nusantara (Kota Pekalongan)

Lokasi yang akan dikembangkan sebagai hotel adalah Eks Pendopo Kab. Pekalongan yang berada di Jl. Nusantara No. 1 Kota Pekalongan dengan luas lahan 26.630 m<sup>2</sup>.

Lokasi tersebut berdekatan dengan Alun-Alun Kota Pekalongan, Masjid Agung Kauman, Plaza Pekalongan, ± 2 Km dari Pasar Grosir Batik Setono, ± 2 Km dari Stasiun Kereta Api Kota Pekalongan, ± 4 Km dari Terminal Bis Kota Pekalongan. Berada di jantung Kota Pekalongan Kawasan Alun-Alun saat ini masih menjadi central point pergerakan ekonomi masyarakat Area Alun-Alun berubah wajah ketika malam hari menjadi sentra kuliner masyarakat (wisata Kuliner).



**Gambar 4.16**  
**Asset Gedung Eks Pendopo Nusantara**

b. Gedung Eks DPU (Sibedug)

Lokasi yang akan dikembangkan adalah Eks DPU Kab. Pekalongan yang berada di Jl. Bahurekso No. 1 Kajen (Perempatan Sibedug) dengan luas 6.790 m<sup>2</sup>.

Lokasi tersebut berdekatan dengan Kompleks Perkantoran Kab. Pekalongan, ± 1 Km dari Alun-Alun Kajen dan Masjid Al Muhtarom, ± 1,5 Km dari Terminal Bis Kajen, ± 10,6 Km dari Exit Tol Bojong dan ± 16,9 Km dari jalur Pantura

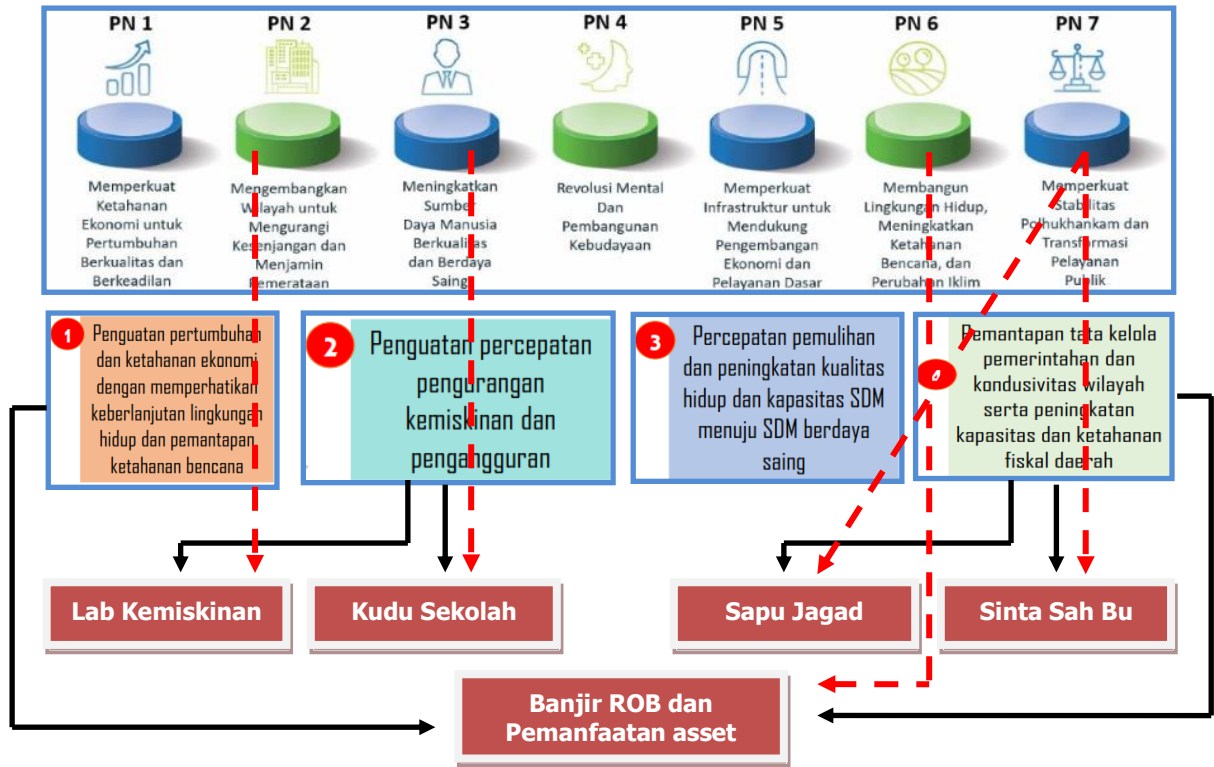
Rencana Pengembangan pada lokasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari 3 blok yaitu Hotel; Balai Budaya, *Exhibition & Convention Center*, dan *Office & Shopping Arcade*;
- 2) Hotel bintang 3 dengan 50 kamar (10 suite room luas kamar 48 m<sup>2</sup> dan 40 kamar deluxe luas kamar 24 m<sup>2</sup>) dilengkapi meeting room, *function room*, *board room*, *lounge lobby*, dan *restaurant*;
- 3) Balai Budaya, *Exhibition & Convention Center* terdiri dari *Function Hall*; *Office & Shopping Arcade* terdiri dari Office 10 unit, Restoran kapasitas



**Gambar 4.17**  
**Rencana Pengembangan Gedung Eks DPU**

Inovasi Daerah dalam pencapaian target dan sasaran dengan melihat prioritas Pembangunan tahun 2022 juga mendukung prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan 2022 untuk lebih jelas keterkaitan Prioritas dengan Inovasi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 2.18.



**Gambar 4.18**  
Keterkaitan Prioritas dengan Inovasi

**C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan**

**1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019**

Dasar Pelaksanaan Perpres No 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, Perpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan;

Untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan 3 Quick Wins pada kawasan tersebut (KI Brebes, KI Kendal, Kawasan Borobudur) perlu dikembangkan kawasan pendukungnya termasuk kawasan Pekalongan - Batang (Petanglong)

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp6.430 M. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.100 M; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp630 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp200 M; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.500 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong berasal dari sektor sumber daya air dan jalan/jembatan. Rincian 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dapat dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4.9**  
**Program dan Kegiatan Rencana Induk Pembangunan**  
**Kawasan Petanglong sesuai Perpres 79 Tahun 2019**

No.	Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
1.	Kab. Pekalongan	Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan	1.500	APBN
2.	Kab. Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru, Kab. Pekalongan	200	APBN
3.	Kab. Pekalongan	Pelebaran dan peningkatan Jalan Doropetungkriyono, Kab. Pekalongan	50	APBN
4.	Kab. Pekalongan	Pembangunan perlintasan tak sebidang kereta api Waru Ruas Wiradesa-Kalibening, Kab. Pekalongan	100	APBN
5.	Kab. Pekalongan	Pelebaran jalan provinsi ruas Wiradesa-Kalibening, Kab. Pekalongan	100	APBN
6.	Kab. Pekalongan	Pengembangan SPAM Regional Petanglong	200	KPBU
7.	Kab. Pekalongan	Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan	200	APBN
8.	Kab. Pekalongan	Revitalisasi Pasar Wiradesa, Kab. Pekalongan	120	APBN
9.	Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	300	APBN
10.	Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	250	APBN
11.	Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan	Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	500	APBN
12.	Kota Pekalongan	Pengembangan TOD (Transit Oriented Development) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan	200	BUMN
13.	Kota Pekalongan	Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan	430	KPBU
14.	Kota Pekalongan & Kab. Batang	Pengendalian banjir dan rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang	500	APBN
15.	Kab. Batang	Pengendalian banjir dan perbaikan muara Sungai Sambong (Sungai Lojahan), Kab. Batang	500	APBN
16.	Kab. Batang	Akses menuju Pelabuhan Gas, Kab. Batang	100	APBN
17.	Kab. Batang	Pengembangan infrastruktur penyediaan LNG/ Gas berkelanjutan Jawa Tengah, Kab. Batang	1.500	SWASTA
18.	Kab. Batang	Revitalisasi dan/atau reorientasi BLK, Kab. Batang	30	APBN
19.	Kab. Batang	Pengembangan Pelabuhan Pantai Klidanglor, Kab. Batang	50	APBN
	<b>LINTAS KAWASAN</b>			
20.	Seluruh Kabupaten/Kota	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah	2.187,5	APBN
21.	Kab. Pekalongan	Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata, Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Blora, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, <b>Kab. Pekalongan</b> , Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Pekalongan dan Kab. Semarang	100	APBN
22.	Kab. Pekalongan	Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, Kab. Blora, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Purbalingga, Kab. Sragen, Kab. Pekalongan, Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Wonosobo, Kab. Pemalang, <b>Kab. Pekalongan</b> , Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal dan Kab. Magelang	100	APBN
23.	Seluruh Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM bidang IPTEK di Jawa Tengah	125	APBN
24.	Kab. Pekalongan	Pembangunan dan Pengembangan prasarana	229	APBN

No.	Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
		SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman) Kab. Purworejo, Kab. Cilacap, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab.. Wonogiri, Kab. . Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Demak, <b>Kab. Pekalongan</b> , Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Batang, dan Kab. Semarang		

Sumber : Lampiran Perpres 79/2019

Dalam pencapaian target dan sasaran dengan melihat prioritas Pembangunan tahun 2022 juga mendukung prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan 2022 untuk lebih jelas dukungan daerah terhadap program Nasional dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 4.10**  
**Dukungan Daerah terhadap Rencana Induk Pembangunan**  
**Kabupaten Pekalongan sesuai Perpres 79 Tahun 2019**

No.	Kabupaten	Program/Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana	Progres dan Dukungan Daerah
1.	Kab. Pekalongan	Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan	1.500	APBN	Penyusunan DED tahun ini dilaksanakan 2021
2.	Kab. Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru, Kab. Pekalongan	200	APBN	Penyusunan DED tahun ini dilaksanakan 2021
3.	Kab. Pekalongan	Pelebaran dan peningkatan Jalan Doro-Petungkriyono, Kab. Pekalongan	50	APBN	Penyediaan RAB usulan kegiatan/dan pengeprasan bukit
4.	Kab. Pekalongan	Pembangunan perlintasan tak sebidang kereta api Waru Ruas Wiradesa-Kalibening, Kab. Pekalongan	100	APBN	DED Sudah Ada Dan Provinsi Yang Melaksanakan pembangunannya
5.	Kab. Pekalongan	Pelebaran jalan provinsi ruas Wiradesa-Kalibening, Kab. Pekalongan	100	APBN	RAB dan dilaksanakan pembangunan oleh Provinsi
6.	Kab. Pekalongan	Pengembangan SPAM Regional Petanglong	200	KPBU	RAB dan dilaksanakan pembangunan oleh Provinsi atau KPBU
7.	Kab. Pekalongan	Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan	200	APBN	Rencanan Penyediaan Lahan 2022/2023
8.	Kab. Pekalongan	Revitalisasi Pasar Wiradesa, Kab. Pekalongan	120	APBN	Penyediaan Pasar Darurat 2020 pembangunan sedang dilaksanakan pada tahun 2021
9.	Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	300	APBN	Penyusunan DED dan Penyediaan Rumah Pompa dan rencana Pembebasan lahan untuk kolam penampungan

No.	Kabupaten	Program/Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana	Progres dan Dukungan Daerah
10.	Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	250	APBN	Penyusunan DED dan Penyediaan Rumah Pompa dan rencana Pembebasan lahan untuk kolam penampungan
11.	Kab. Pekalongan & Kota Pekalongan	Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	500	APBN	Pembanguna rencana Sitem drainase ikutan dianggarkan 2022

Sumber : Lampiran Perpres 79/2019 dianalisis tim 2021

## 2. Arah kebijakan Pengembangan Wilayah Provisni Jawa Tengah di Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan (Petanglong)

Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokkan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun pengembangan kewilayahan meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsapur, Petanglong dan Bregasmalang sebagaimana pada gambar 4.19.



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2009-2029

**Gambar 4.19**  
**Pembagian Pengembangan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah**

Kebijakan pembangunan pada 8 wilayah pembangunan dilakukan selaras terpadu dan terintegrasi dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan pembangunan wilayah yang berdaya saing dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan

pembangunan. Kebijakan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dan menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur eksisting ditambah dengan infrastruktur tambahan guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan pusat ekonomi dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya masih belum optimal dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan serta memajukan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta kawasan industri pada 3 (tiga) *quick wins* di wilayah pengembangan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang yang didukung dengan pembangunan di wilayah sekitarnya agar pembangunan menjadi semakin merata di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan 3 (tiga) *quick wins* tersebut yaitu :

- a. Kawasan Kedungsapur (Kendal – Kota Semarang – Semarang - Kota Salatiga - Demak – Grobogan), dengan *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal, dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029, dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kendal sendiri telah ditentukan sebesar 4.500 Ha. Kawasan pendukung Kedungsapur (KI Kendal), meliputi :
  - 1) Wilayah Pengembangan Banglor yang meliputi Kabupaten Rembang dan Blora; dan
  - 2) Wilayah Pengembang Wanarakuti meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.
- b. Kawasan Purwomanggung (Purworejo - Wonosobo - Magelang – Kota Magelang - Temanggung), dengan *quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece*, Mahakarya Budaya Dunia, yang diharapkan menjadi magnet dan daya Tarik wisatawan mancanegara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung. Kawasan pendukung Purwomanggung (Kawasan Pariwisata Borobudur), meliputi Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten yang meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten;
- c. Kawasan Bregasmalang (Brebes – Kota Tegal - Tegal - Pemalang) dengan *quickwin* Kawasan Industri Brebes. Kawasan Industri (KI) Brebes ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sisi ekonomi, diarahkan sebagai pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan di Bregasmalang. Kawasan pendukung Bregasmalang (KI Brebes), yang meliputi:
  - 1) Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb yang meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen;
  - 2) Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan.

Gambaran keterkaitan 3 *quick wins* dengan wilayah pengembangan sebagaimana dalam gambar 4.20.

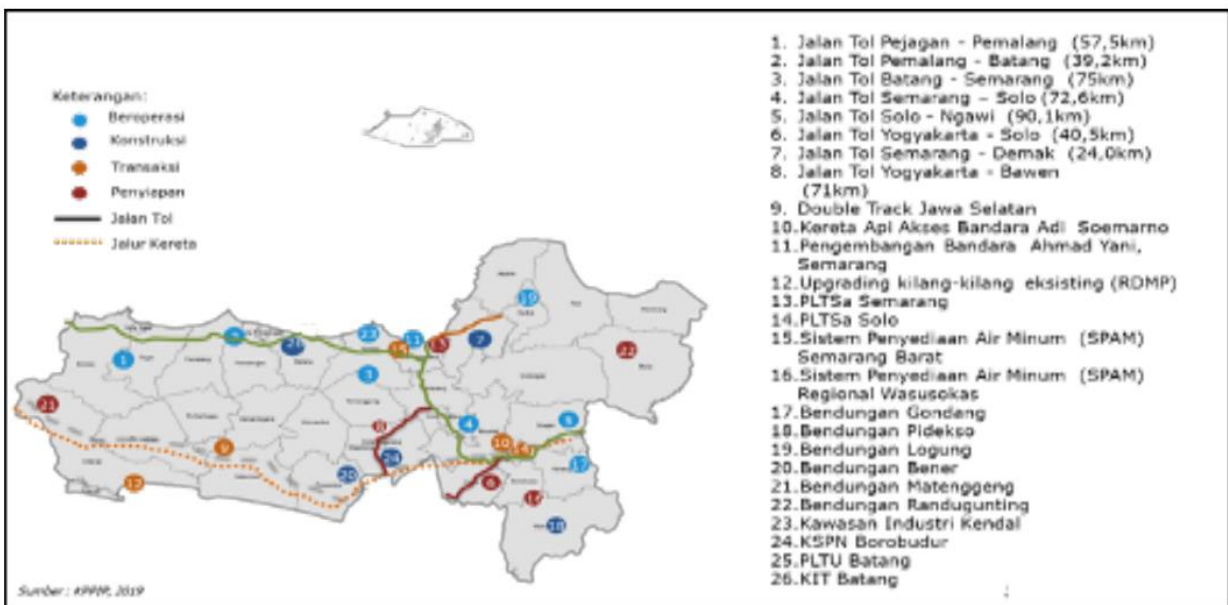




Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

**Gambar 4.20**  
**Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah**

Selain Perpres Nomor 79 Tahun 2019, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan pemerataan wilayah di Jawa Tengah dipercepat pula dengan pembangunan infrastruktur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020, dengan sebaran dan kegiatan sebagaimana gambar 4.21.



Sumber: Perpres No. 109 Tahun 2020

**Gambar 4.21**  
**Sebaran Proyek Strategis Nasional dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 di Jawa Tengah**

Kolaborasi ini mengagabarkan konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian antara wilayah pengembangan prioritas dan pendukung yang diamanatkan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dengan memperhatikan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Batang sebagai Proyek Strategis Nasional.

### 3. Integrasi WP dalam *Quickwin* Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri (KI) Batang

WP Petanglong WP pendukung *quickwin* Kawasan Industri (KI) Brebes meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.11**  
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT dan IPM WP Petanglong Tahun 2020**

No.	Kabupaten/Kota	PE (%)	Kemiskinan (%)*	TPT (%)**	IPM
1.	Kab. Pekalongan	-1,89	10,19	6,97	69,63
2.	Kab. Batang	-1,29	9,13	6,92	68,65
3.	Kota Pekalongan	-1,87	7,17	7,02	74,98
	<b>Rata-Rata WP</b>	<b>-1,68</b>	<b>8,83</b>	<b>6,97</b>	<b>71,09</b>

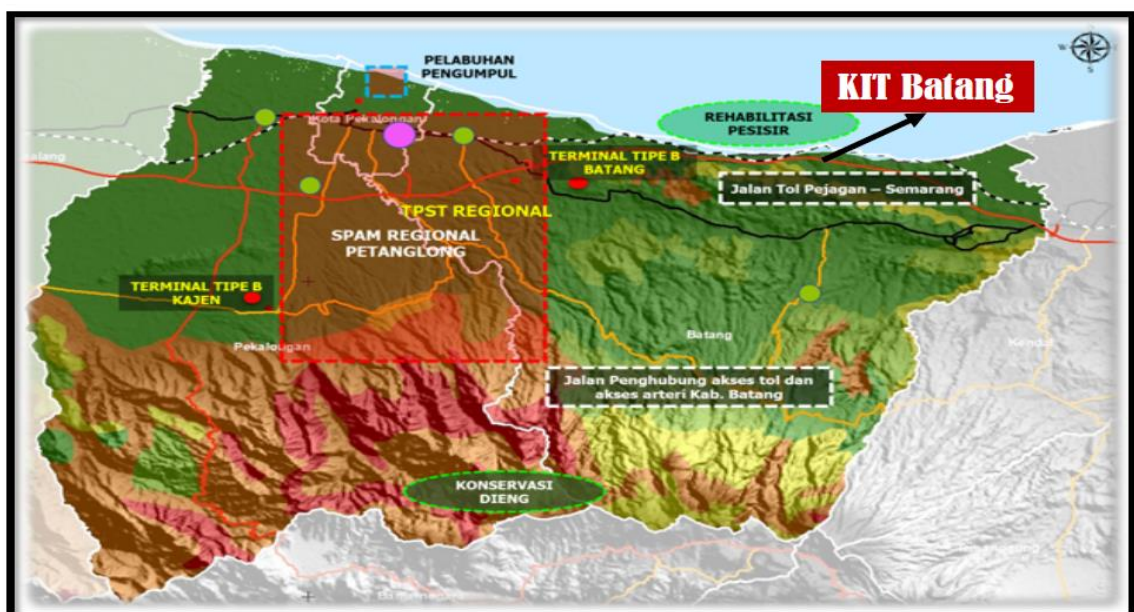
Keterangan:

\*) Angka kemiskinan per Maret 2020

\*\*) TPT per Agustus 2020

Wilayah Petanglong diarahkan sebagai PKW meliputi Kota Pekalongan, dan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Limpung, Batang, Kajen, Kedungwuni, dan Wiradesa. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan PKL.

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah **"Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"**. Arah kebijakan pengembangan WP Petanglong dapat digambarkan dalam gambar 4.22.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

**Gambar 4.22**  
**Arah Pengembangan Wilayah Petanglong**

Pengembangan wilayah Petanglong untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama dalam tabel 4.11.

**Tabel 4.12**  
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT**  
**dan IPM WP Petanglong Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	PE (%)	Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1.	Kab. Pekalongan	3,89-5,15	11,13-9,71	6,41-6,32	70,26
2.	Kab. Batang	3,91-5,18	9,84-8,35	6,36-5,28	69,66
3.	Kota Pekalongan	3,99-5,28	7,58-6,56	6,46-6,37	75,57
	<b>Rata-Rata WP</b>	<b>3,93-5,21</b>	<b>9,52-8,21</b>	<b>6,41-6,32</b>	<b>71,83</b>

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain pemantapan konektivitas dan aksesibilitas akan dilakukan pengembangan infrastruktur meliputi revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih, Kabupaten Batang dan Kajen, Kabupaten Pekalongan; peningkatan jalan provinsi akses menuju jalan tol di Kabupaten Pekalongan, dan peningkatan jalan provinsi akses menuju jalan arteri pantura di Kabupaten Batang.

Guna pemenuhan kebutuhan air baku maka akan dilakukan pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan). Selain itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan diantaranya utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang), serta konservasi CAT Pekalongan – Pemalang; penanganan kerusakan pesisir; serta penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di WP Petanglong. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya : (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Petanglong adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Di wilayah Petanglong sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dibangun Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi di wilayah Batang dan sekitarnya. Kawasan Industri Terpadu Batang (*the smart and sustainable Industrial Estate*) terletak di Koridor Industri Utara Jawa Tengah seluas 4.300 ha. KIT Batang terbagi dalam 3 klaster kawasan dengan rincian klaster 1 (3.100 ha), klaster 2 (800 ha), dan klaster 3 (400 ha). Peruntukkan pengembangan di klaster 1 adalah untuk pengembangan *industrial estate* dan *industrial township*, klaster 2 adalah untuk pengembangan pusat inovasi dan *township*, dan klaster 3 adalah untuk pengembangan pusat rekreasi dan *township*.

Untuk mendukung pengembangan WP Petanglong program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi :

- a. Peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Pekalongan-Batang;
- b. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui peningkatan terminal tipe B Banyuputih di Batang (Tahap I);
- c. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU Ruas Jalan Kebonagung - Bts. Batang, Wonotunggal - Bts. Kabupaten Pekalongan; Batang - Wonotunggal - Surjo; Banyuputih - Plantungan (Bts. Kabupaten Kendal);
- d. Studi Alokasi Air WS Pemali Comal dan WS Bodri Kuto; Kajian dan DED Waduk Muara Kaliboyo; FS dan DED Waduk DAS Urang, Kabupaten Batang untuk mendukung pengembangan KIT Batang;

- e. Fasilitasi pengendalian banjir pada sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan, sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, pengendalian banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan;
- f. Persiapan pembangunan TPST Regional Kabupaten Pekalongan;
- g. Fasilitasi pengembangan infrastruktur penyediaan LNG/gas berkelanjutan Jawa Tengah, Kabupaten Batang untuk mendukung pengembangan KIT Batang

#### **4. Kebijakan Penataan Ruang untuk Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan**

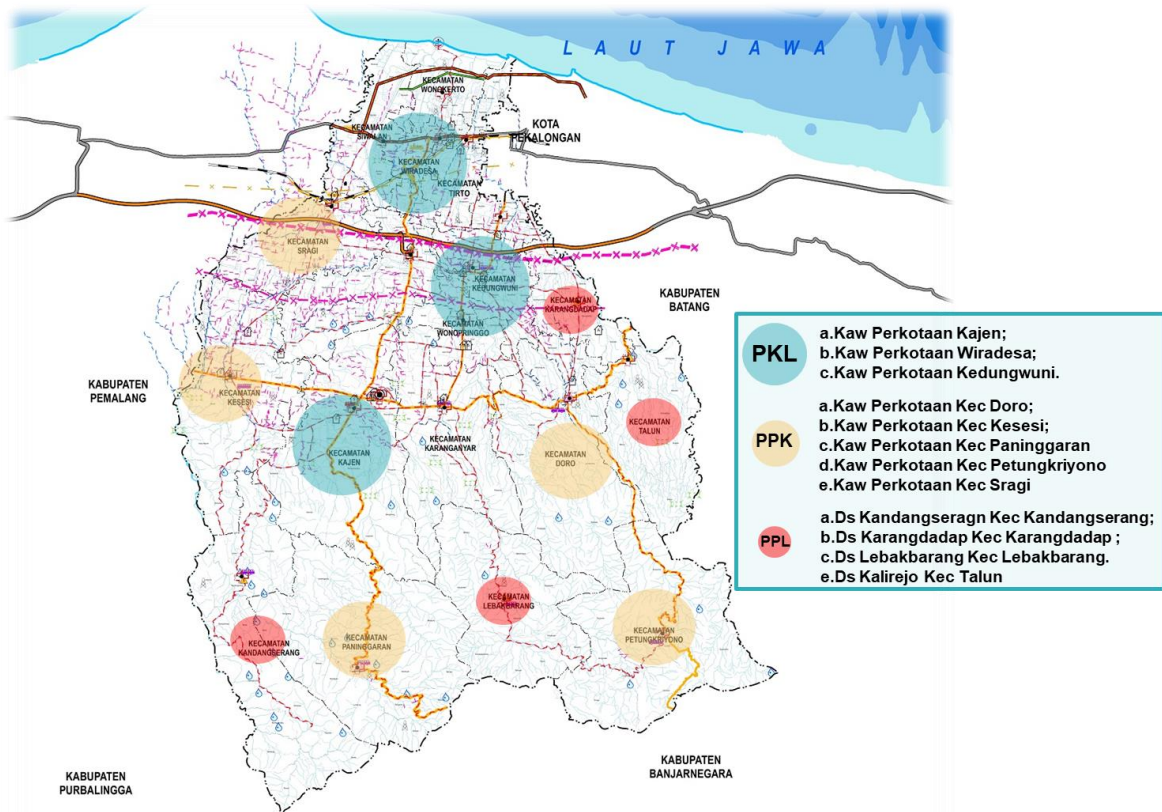
Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, maka seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sinergi program/kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pengurangan kemiskinan mendasarkan basis data terpadu serta lokus dan fokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi;
- b. Sesuai dengan **Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040**

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Pekalongan disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Pekalongan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pekalongan meliputi :

- a. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
- b. Pengembangan prasarana Daerah;
- c. pengembangan industri;
- d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- e. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
- f. pengembangan dan pengendalian kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- i. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Untuk lebih jelas terkait kebijakan penataan ruang untuk pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW kabupaten pekalongan dapat dilihat pada peta arah pengembangan dalam gambar 4.23.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040 (dianalisis dan diolah)

**Gambar 4.23**  
**Peta Rencana Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan**

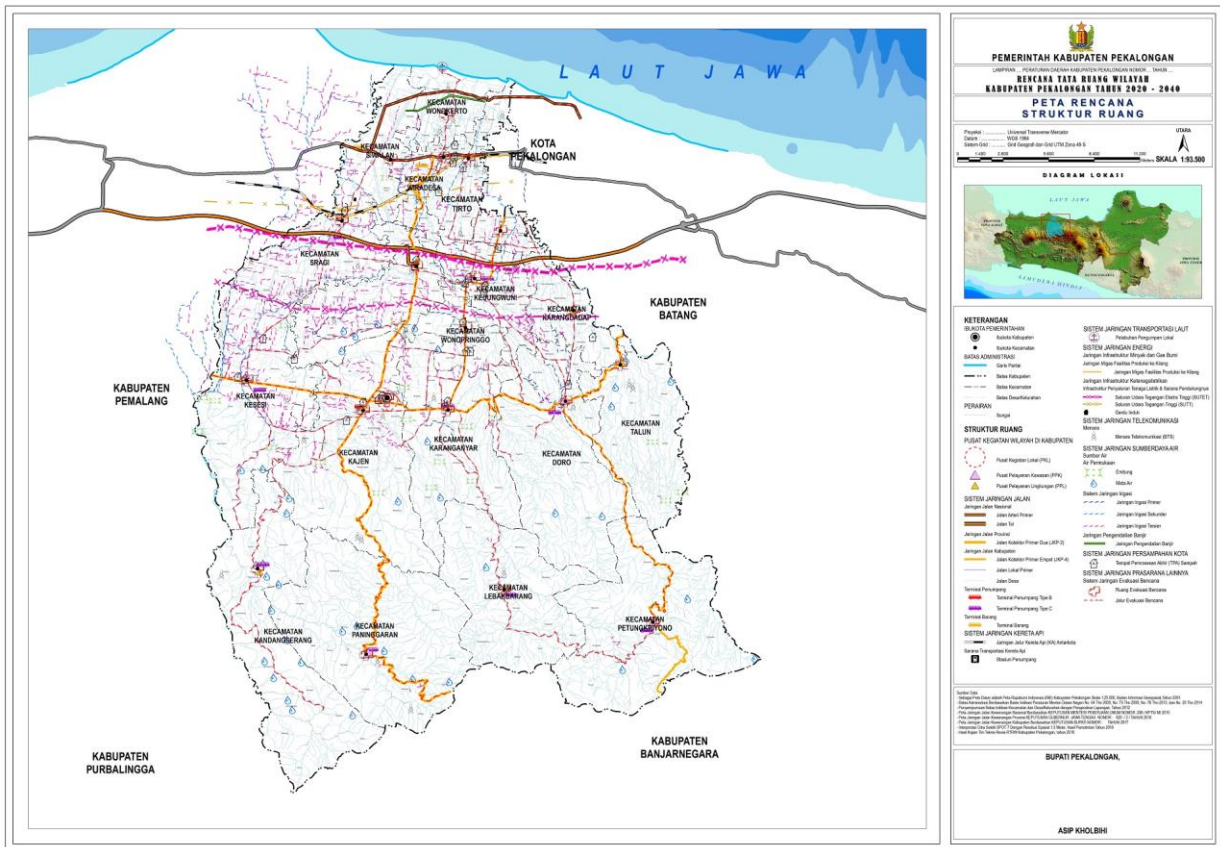
## 5. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan Pengembangan struktur ruang ini guna mendukung arah pengembangan wilayah yang mana jaringan prasarana wilayah di fokuskan guna terintegrasinya percepatan pembangunan dan pemerataan wilayah yang mana akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri atas rencana sistem perkotaan; rencana sistem jaringan prasarana; rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pengembangan jaringan dimaksud meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energy; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Perda RTRW Kabupaten Pekalongan, meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan dan rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Untuk lebih jelas terkait kebijakan pengembangan struktur ruang untuk pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW kabupaten pekalongan dapat dilihat pada peta struktur ruang dalam gambar 4.24.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 4.24**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pekalongan**

## 6. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan Pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri atas :

### a. Kawasan lindung

Kawasan peruntukkan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang akan dimantapkan di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dinyatakan sebagai kawasan non-budi daya adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung geologi, kawasan ekosistem mangrove dan kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana kawasan peruntukkan lindung Kabupaten Pekalongan terdiri atas:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- 2) Kawasan perlindungan setempat;
- 3) Kawasan lindung geologi;
- 4) Kawasan rawan bencana alam;
- 5) Kawasan cagar budaya; dan
- 6) Kawasan ekosistem mangrove.

### b. Kawasan budidaya

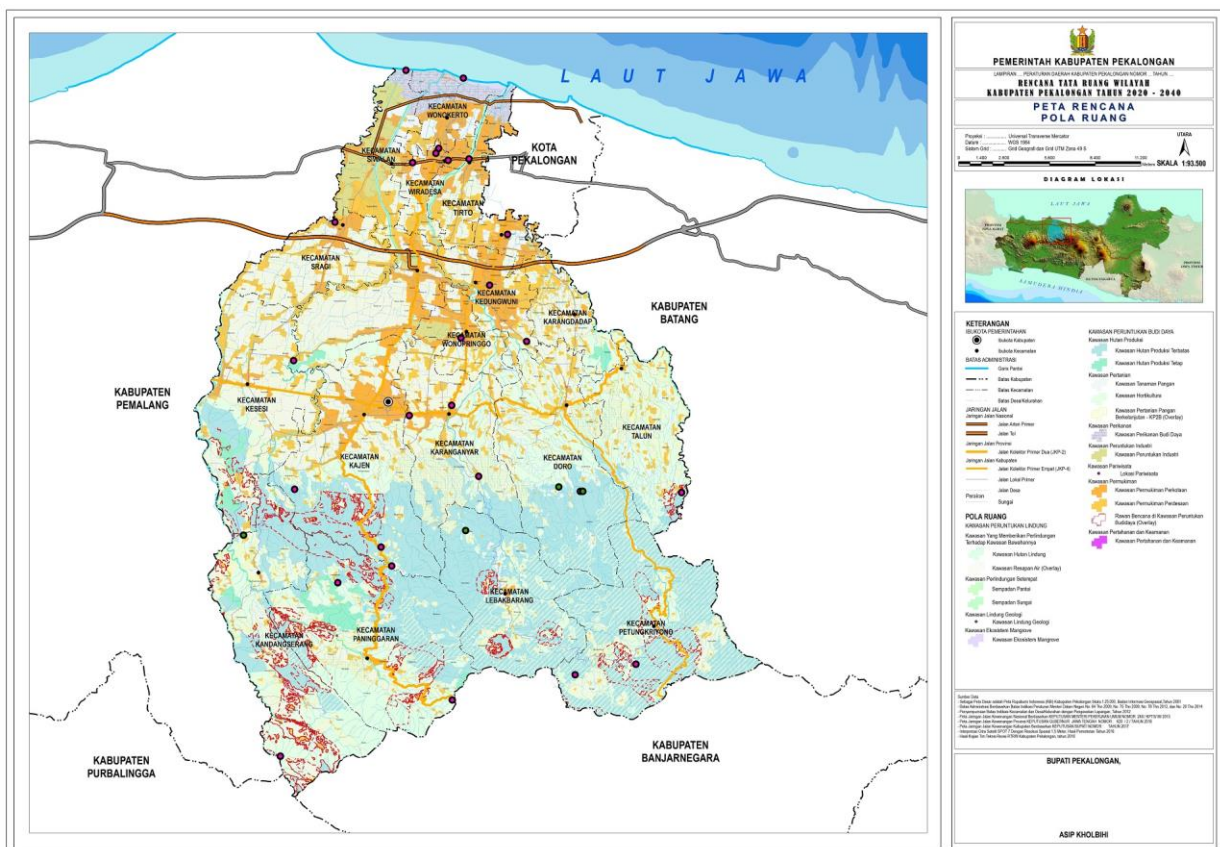
Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan sasaran yang diinginkan dari pengelolaan kawasan budidaya adalah :

- 1) Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 2) Terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada prioritas pemanfaatan bagi kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan secara seksama dan berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek teknis serta aspek-aspek keruangan. Untuk itu, dalam penetapan kegiatan-kegiatan budidaya dibutuhkan pertimbangan teknis sektoral dan keruangan dengan menggunakan kriteria teknis sektoral dan kriteria keruangan, yaitu ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya.

Kawasan budidaya di Kabupaten Pekalongan terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan hutan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan pertahanan dan keamanan.

Untuk lebih jelas terkait kebijakan pengembangan pola ruang untuk pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 4.25.

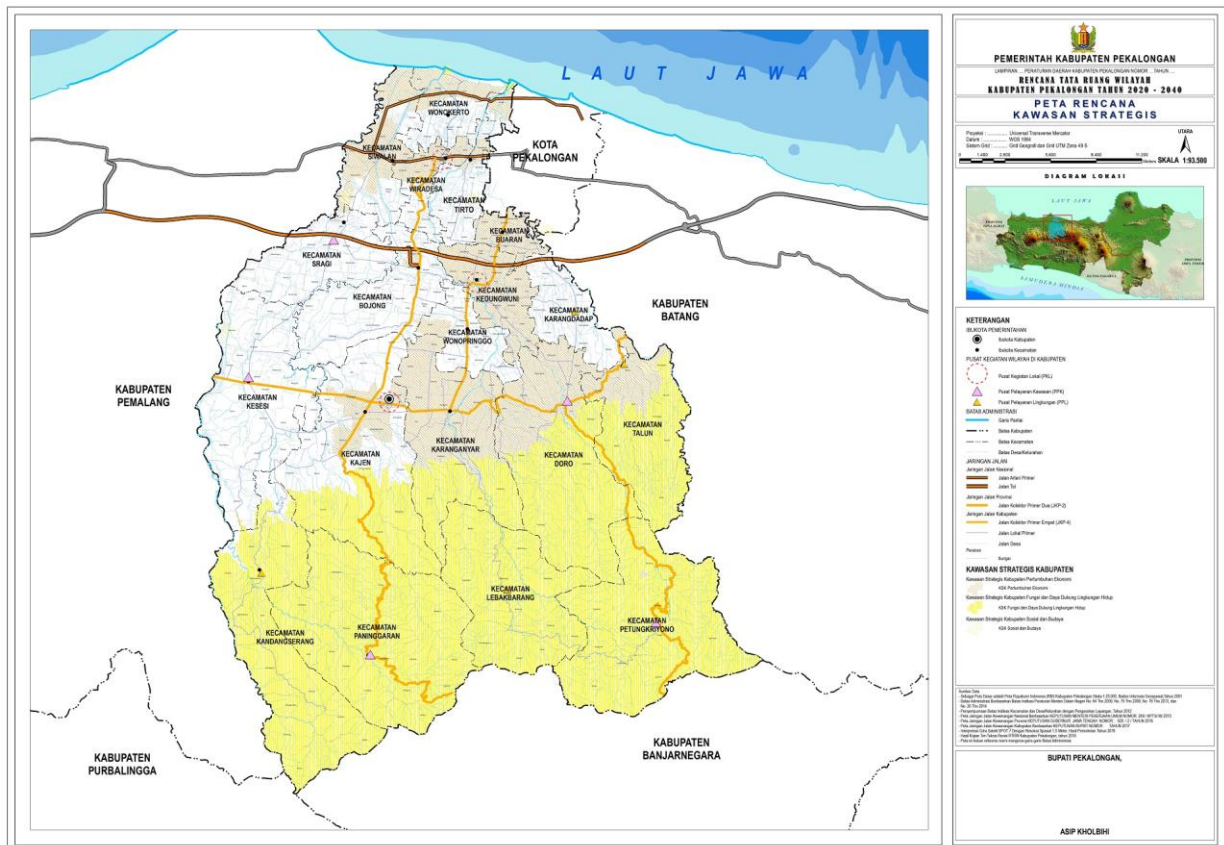


Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 4.25**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan**

## 7. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pekalongan

Rencana kawasan strategis Kabupaten Pekalongan baik dari segi pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA/teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan dapat dijelaskan melalui gambar 4.26.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

**Gambar 4.26**  
**Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pekalongan**

Dari gambar 4.25 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi;**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- 1) kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Tirto - Wiradesa - Siwalan.

Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) berperan mengotimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi.

- 2) Kawasan agropolitaan KRIDO TALUN ANYAR dengan komoditas unggulan tanaman hortikultura :

- a) Kecamatan Doro;
- b) Kecamatan Karangayar;
- c) Kecamatan Petungkriyono
- d) Kecamatan Talun;

Kawasan strategis agropolitan KRIDO TALUN ANYAR berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas hortikultura.

- 3) Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO meliputi:

- a) Kecamatan Siwalan;
- b) Kecamatan Wonokerto;
- c) Kecamatan Tirto;

Kawasan strategis minapolitan SIWONO TIRTO berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.

- 4) Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan-Sragi dan Bojong-Wonopringgo.

Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan-Wonokerto dan Bojong berperan mendorong perkembangan investasi industri di Daerah.



**b. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya;**

Kawasan strategis bidang sosial budaya meliputi :

## 1) Kawasan Pariwisata

- a) Kawasan pariwisata berupa kawasan wisata Linggoasri di Kecamatan Kajen dan Kawasan wisata di Kecamatan Petungkriyono.
- b) Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan destinasi wisata Daerah dan perlindungan alam.

## 2) Kawasan Perbatasan;

Kawasan perbatasan meliputi :

- a) Kawasan perbatasan Tirto - Kota Pekalongan;
- b) Kawasan perbatasan Buaran – Kota Pekalongan;
- c) Kawasan perbatasan Siwalan - Ulujami (Kabupaten Pemalang);
- d) Kawasan perbatasan Kesesi - Bodeh (Kabupaten Pemalang);
- e) Kawasan Perbatasan Talun-Wonotunggal (Kabupaten Batang);
- f) Kawasan Perbatasan Panninggaran-Kalibening (Kabupaten Banjarnegara)

Pengembangan kawasan perbatasan ditujukan untuk meningkatkan prasarana kawasan dalam rangka mengurangi dampak sosial ekonomi.

**c. Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :

## 1) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;

Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air kawasan imbuhan air tanah meliputi :

- a) Kecamatan Doro;
- b) Kecamatan Kajen;
- c) Kecamatan Kandangserang;
- d) Kecamatan Karanganyar;
- e) Kecamatan Kesesi;
- f) Kecamatan Lebakbarang;
- g) Kecamatan Panninggaran;
- h) Kecamatan Petungkriyono;
- i) Kecamatan Talun.

Pengembangan kawasan imbuhan air tanah ditujukan untuk meningkatkan resapan air melalui :

- a) peningkatan perlindungan kawasan hutan lindung;
- b) pengaturan pemanenan kawasan hutan produksi dan produksi terbatas;
- c) mendorong budidaya tanaman hutan di lahan yang dikuasai masyarakat;
- d) penghijauan kawasan kritis.

## 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro berupa kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai, (zona transisi) antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut meliputi :

- a) Kecamatan Siwalan;
- b) Kecamatan Wonokerto;
- c) Kecamatan Tirto.

Pengembangan kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari sungai ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pantai.

## **8. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dengan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, mengamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah (tahapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan factor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud diatas berprinsip aman,nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan cepatnya perubahan dinamika pembangunan akibat perubahan kebijakan ditingkat global, nasional, provinsi dan di lingkungan Kabupaten Pekalongan sendiri maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.

Dengan jalan panjang setelah melalui pembahasan dan kajian teknis, administrasi dan yang tidak lepas juga melibatkan naskah akademisi (NA), akhirnya DPRD Kabupaten Pekalongan bersama dengan pemerintah daerah mengesahkan **Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040** pada Bulan Agustus 2020. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pekalongan adalah rencana penataan ruang yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengaturan serta pengendalian matra keruangan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun.

RTRW Kabupaten Pekalongan disusun untuk menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Di samping itu untuk menjaga keterpaduan pembangunan daerah, maka RTRW Kabupaten Pekalongan saling mengacu dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan wilayah, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana pengendalian tata ruang daerah guna pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar dalam perijinan lokasi pembangunan dan/atau rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, swasta/pengusaha dan masyarakat di daerah.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah

Kabupaten Pekalongan. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang wilayah;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **A. Kerangka Pendanaan Tahun 2022**

Pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2.131.568.864.934,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp412.104.632.579,00, Pendapatan transfer sebesar Rp1.636.901.192.355,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp82.563.040.000,00.

Pendapatan Daerah tersebut akan dioptimalkan dalam membiayai program/kegiatan pembangunan tahun 2022 yang diformulasikan ke dalam Belanja Daerah. Belanja Daerah tahun 2022 diarahkan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah tahun 2021 terdiri dari :

##### **1. Belanja Operasi**

- a. **Belanja Pegawai** merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. **Belanja Barang dan Jasa** digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja tersebut dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. **Belanja Bunga** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. **Belanja Subsidi** digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. **Belanja Hibah** diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- f. **Belanja Bantuan Sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. **Belanja Modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Diantaranya pengeluaran pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, bangunan aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa

Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

KODE	U R A I A N	PAGU ANGGARAN (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.131.568.864.934</b>
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>412.104.632.579</b>
4 1 1	Pajak Daerah	78.443.692.200
4 1 2	Retribusi Daerah	18.076.262.570
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.233.176.091
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	302.351.501.718
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.636.901.192.355</b>
<b>4 2 1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.513.814.429.000</b>
<b>4 2 1 1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.217.128.138.000</b>
<b>4 2 1 1 01</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>896.128.411.000</b>
4 2 1 1 01 01	Bagi Hasil Pajak	23.443.884.000
4 2 1 1 01 02	Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam	1.617.126.000
4 2 1 1 01 03	Dana Alokasi Umum (DAU)	871.067.401.000
<b>4 2 1 1 02</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>320.999.727.000</b>
4 2 1 1 01 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.165.850.000
4 2 1 1 01 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	225.833.877.000
<b>4 2 1 2</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>33.289.185.000</b>
4 2 1 2 01	Dana Insentif Daerah	33.289.185.000
<b>4 2 1 5</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>263.397.106.000</b>
4 2 1 5 01	Dana Desa	263.397.106.000
<b>4 2 2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>123.086.763.355</b>
<b>4 2 2 1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>123.086.763.355</b>
4 2 2 1 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.086.763.355
<b>4 2 2 2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0</b>
4 2 2 2 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>82.563.040.000</b>
4 3 1	Hibah	4.000.000.000
4 3 3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	78.563.040.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.131.568.864.934</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.928.476.673.483</b>
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.573.994.673.483</b>
5 1 1	Belanja Pegawai	1.104.570.412.917

KODE	U R A I A N	PAGU ANGGARAN (Rp)
5 1 2	Belanja Barang Dan Jasa	401.168.773.628
5 1 5	Belanja Hibah	49.645.537.539
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	18.609.949.399
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>349.482.000.000</b>
5 2 1	Belanja Modal Tanah	15.000.000.000
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000.000
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.500.000.000
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	238.482.000.000
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.500.000.000
<b>5 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>379.592.191.451</b>
<b>6 1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>9.651.995.477</b>
6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.844.369.220
6 1 2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.807.626.257
<b>6 2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>369.940.195.974</b>
6 2 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	369.940.195.974
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>2.308.068.864.934</b>
<b>SURPLUS / (DESFIIST)</b>		<b>(176.500.000.000)</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>176.500.000.000</b>
<b>7 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>200.000.000.000</b>
7 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0
7 1 9	Penerimaan Piutang Daerah	200.000.000.000
<b>7 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.500.000.000</b>
7 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0
7 2 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	23.500.000.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>176.500.000.000</b>
<b>SILPA</b>		<b>0</b>

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kab. Pekalongan, 2021

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas di seluruh Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2022. Adapun pendanaan masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Per Perangkat Daerah Tahun 2022**

PERANGKAT DAERAH	TOTAL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	TOTAL
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70	621.657.180.484	287.734.087.616	909.391.268.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	121	228.071.278.154	105.610.182.203	333.681.460.357
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	3	95.501.783.238	44.222.844.762	139.724.628.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	2	100.474.500.000	46.525.500.000	147.000.000.000

PERANGKAT DAERAH	TOTAL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	TOTAL
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74	327.423.020.536	176.514.098.030	503.937.118.566
1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	84	95.048.227.538	44.012.822.262	139.061.049.800
1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	32	8.424.697.218	3.901.121.682	12.325.818.900
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34	6.566.248.086	3.040.552.332	9.606.800.418
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	53	20.930.145.373	9.691.866.877	30.622.012.250
2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63	16.486.878.511	7.634.377.540	24.121.256.051
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49	36.173.808.946	16.750.564.055	52.924.373.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43	5.005.847.854	2.317.996.848	7.323.844.702
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44	10.594.625.925	4.905.924.075	15.500.550.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	37	97.745.897.135	45.261.999.185	143.007.896.320
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	42	15.309.006.644	7.088.954.796	22.397.961.440
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	47	18.312.948.175	8.479.953.325	26.792.901.500
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37	10.236.574.450	4.740.125.550	14.976.700.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	37	26.018.994.272	12.048.298.006	38.067.292.278
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27	4.381.915.083	2.029.079.918	6.410.995.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan	35	25.322.985.063	11.726.005.520	37.048.990.583
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37	16.304.284.390	7.549.825.910	23.854.110.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	63	51.214.015.312	23.715.048.788	74.929.064.100
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	41	49.714.745.889	23.020.800.401	72.735.546.290
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan	37	7.320.217.334	3.389.683.667	10.709.901.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	60	312.804.448.660	144.846.536.943	457.650.985.603
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	39	12.504.632.500	5.790.367.500	18.295.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	39	6.442.732.740	2.983.357.589	9.426.090.329
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen	42	10.014.014.342	4.637.067.358	14.651.081.700
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi	37	4.895.498.090	2.266.898.530	7.162.396.620
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa	50	9.268.601.750	4.291.898.250	13.560.500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni	39	7.592.354.465	3.515.698.885	11.108.053.350
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran	45	7.819.839.908	3.621.037.792	11.440.877.700
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto	30	2.505.863.348	1.160.359.546	3.666.222.894
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong	37	3.113.684.250	1.441.815.750	4.555.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo	38	2.388.071.976	1.105.815.334	3.493.887.310
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar	37	2.747.520.661	1.272.260.848	4.019.781.509
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro	33	2.355.665.663	1.090.809.338	3.446.475.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun	35	1.893.491.848	876.796.152	2.770.288.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang	30	1.999.613.425	925.936.575	2.925.550.000

PERANGKAT DAERAH	TOTAL SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	TOTAL
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang	36	1.879.955.814	870.528.186	2.750.484.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran	35	2.412.752.129	1.117.243.671	3.529.995.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi	40	3.232.182.167	1.496.687.133	4.728.869.300
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono	35	2.751.121.723	1.273.928.347	4.025.050.070
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto	32	2.756.044.003	1.276.207.647	4.032.251.650
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan	36	2.848.349.550	1.318.950.450	4.167.300.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap	35	2.260.270.798	1.046.636.002	3.306.906.800
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	7.342.329.515	3.399.922.885	10.742.252.400
<b>TOTAL</b>	<b>1.980</b>	<b>2.308.068.864.934</b>	<b>1.093.538.474.056</b>	<b>3.401.607.338.990</b>

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kab. Pekalongan, 2021

## B. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 dijabarkan kedalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan yang terdiri dari 19 kecamatan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

Beberapa program dan kegiatan yang langsung memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 6 (enam) isu strategis dan permasalahan pembangunan mendapatkan perhatian khusus terhadap pendanaannya karena sesuai prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel V.1.

**Tabel 5.3**  
**Program dan Kegiatan Prioritas**  
**RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Perangkat Daerah
<b>1.</b>	<b>Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBL	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2.</b>	<b>Peningkatan dan Kemudahan Investasi</b>		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Perangkat Daerah
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>3.</b>	<b>Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Ko	Dinas Sosial
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>4.</b>	<b>Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Perangkat Daerah
		Terintegrasi	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
<b>5.</b>	<b>Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Perangkat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
<b>6.</b>	<b>Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan</b>		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Perangkat Daerah
		Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>7.</b>	<b>Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>8.</b>	<b>Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani</b>		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Mutasi dan Promosi ASN	
		Pengembangan Kompetensi ASN	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

8 (delapan) prioritas dengan program sebagaimana tabel V.1 diatas dijabarkan dalam kegiatan-sub kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan sebagaimana uraian dibawah ini :

## 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Program Pengelolaan Pendidikan

Target capaian indikator persentase adalah ruang belajar dalam kondisi baik untuk SD dengan target 70% dan SMP dengan target 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.

#### 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Target indikator kinerja yang dicapai adalah persentase tenaga pendidik S1/D4 sebanyak 92,30%, dilakukan melalui kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/kesetaraan.

#### 3) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Dilakukan melalui kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

### b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Target capaian indikator kinerja persentase FKTP terakreditasi sebesar 50%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; dan
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Target capaian indikator kinerja berupa tercukupinya pembinaan pengawasan perijinan dan pembinaan mutu kompetensi SDM Kesehatan sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Target capaian indikator kinerja berupa persentase pengawasan sarana distribusi makanan sehat di swalayan/toko makanan dan sekolah sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- b) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
- c) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
- d) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); dan
- e) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

**4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Target capaian indikator kinerja berupa peningkatan strata posyandu mandiri sebesar 23,7% dan persentase PHBS RT sehat paripurna sebesar 80%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

Target capaian indikator kinerja persentase terpeliharanya talud, bronjong sebesar 0,162%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

**2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Target capaian indikator kinerja Persentase kinerja sistem penyediaan air minum sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Target capaian indikator kinerja Persentase kinerja pengolahan air limbah sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Target capaian indikator kinerja persentase drainase/gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 80%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**5) Program Penataan Bangunan Gedung**

Target capaian indikator kinerja Persentase Pembangunan Gedung Pemerintah sebesar 6%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

**6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota..

**7) Program Penyelenggaraan Jalan**

Target capaian indikator kinerja Persentase terpeliharanya rutin jalan dan jembatan sebesar 4,09%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

**8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Target capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Baru sebesar 27% Program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil); dan
- c) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

**9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Target capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kabupaten Pekalongan sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; dan
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengembangan Perumahan**

Target capaian indikator kinerja Persentase Rumah layak huni yang dibangun sebesar 13,755% , program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- b) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- c) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; dan
- d) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

**2) Program Kawasan Perumahan**

Target capaian indikator kinerja Persentase permukiman yang ditata sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; dan
- c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

**3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Target capaian indikator kinerja Persentase peningkatan lingkungan kumuh yang ditangani sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

**4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Target capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan pembangunan dan peningkatan PSU sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

**5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

target capaian indikator kinerja Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan (K3) di Kabupaten Pekalongan sebesar 0,96%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

**2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Penanggulangan Bencana**

Program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;



- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

#### **f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **1) Program Pemberdayaan Sosial**

Target capaian indikator kinerja Persentase PMKS yang ditangani sebesar 1,70% , program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

##### **2) Program Rehabilitasi Sosial**

Target capaian indikator kinerja Persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani sebesar 0,45% , program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

##### **3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Target capaian indikator kinerja Persentase PMKS yang ditangani sebesar 1,70% , program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; dan
- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

##### **4) Program Penanganan Bencana**

Target capaian indikator kinerja Persentase PMKS yang direhabilitasi sebesar 0,45% , program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan cara melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

##### **5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

## **2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **1) Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

#### **2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Target capaian indikator kinerja prosentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dengan target 7%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; dan
- b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

#### **3) Program Penempatan Tenaga Kerja**

Target capaian indikator kinerja prosentase penempatan tenaga kerja dengan target 82,8%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan

- b) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

**4) Program Hubungan Industrial**

Target capaian indikator kinerja prosentase perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan sarana hubungan industrial dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Target capaian indikator kinerja Persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak yang tertangani sebesar 92%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

**2) Program Perlindungan Perempuan**

Target capaian indikator kinerja Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani sebesar 100% , program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

**3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

**5) Program Perlindungan Khusus Anak**

Target capaian indikator kinerja Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan responsif gender anak sebesar 61%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Target capaian indikator kinerja presentase cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan target NA %, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Target capaian indicator kinerja jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan target 180 + 70 ton program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; dan
- c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

**3) Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Target capaian indicator kinerja presentase penanganan rawan pangan dengan target 80%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- c) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Target capaian indikator kinerja persentase konflik pertanian yang terselesaikan sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**2) Program Penatagunaan Tanah**

Target capaian indikator kinerja Persentase Informasi Pertanian yang baik sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Target capaian indicator kinerja persentase tersedianya data lingkungan yang aktual dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; dan
- b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

**2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Target capaian indicator kinerja persentase sungai yang menjadi titik pantau analisis kualitas air dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
- c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

**3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Target capaian indikator kinerja persentase RTH dengan target 45%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

**4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Target capaian indikator kinerja persentase pengawasan kegiatan penghasil limbah B3 dengan target 45%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan
- b) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Target capaian indikator kinerja persentase perusahaan yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Target capaian indikator kinerja persentase terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Target capaian indikator kinerja persentase terselenggaranya penghargaan bidang lingkungan hidup dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Target capaian indikator kinerja persentase kasus lingkungan terselesaikan dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

**9) Program Pengelolaan Persampahan**

Target capaian indikator kinerja persentase kelompok pengelola sampah aktif dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Sampah.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pendaftaran Penduduk**

Target capaian indikator kinerja persentase permohonan layanan adminduk yang terlayani sesuai SOP dengan target 0,85%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; dan
- c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

**2) Program Pencatatan Sipil**

Target capaian indikator kinerja persentase permohonan layanan capil yang terlayani sesuai SOP dengan target 85%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan
- c) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

**3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Target capaian indikator kinerja persentase data kependudukan yang terupdate dengan target 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
- b) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- c) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan

**g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penataan Desa**

Target capaian indikator kinerja persentase swadaya masyarakat dalam membangun desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa dengan target 10,50%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa.

**2) Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Target capaian indikator kinerja persentase BUMDes bersama yang mampu meningkatkan omzet dengan target 21,31%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa.

**3) Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Target capaian indikator kinerja persentase kesesuaian APBDes dengan RKPDes dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

**4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Target capaian indikator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target 99%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **1) Program Pengendalian Penduduk**

Target capaian indikator kinerja persentase PIK remaja yang aktif sebesar 40%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

##### **2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Target capaian indikator kinerja persentase UPPKS yang aktif sebesar 97%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

##### **3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Target capaian indikator kinerja Cakupan anggota bina keluarga balita yang ber KB sebesar 86%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### **i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Target capaian indikator kinerja persentase layanan LLAJ yang tertangani dengan target 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- c) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- d) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- e) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- g) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- h) Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- i) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Target capaian indikator kinerja Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui media komunikasi publik sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**2) Program Aplikasi Informatika**

Target capaian indikator kinerja Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan dan aplikasi terintegrasi sebesar 75,85%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Target capaian indikator kinerja Persentase peningkatan manajemen koperasi sebesar 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Target capaian indikator kinerja Persentase peningkatan manajemen koperasi sebesar 75% , program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

**3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Target capaian indikator kinerja Persentase koperasi yang berkinerja baik sebesar 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Target capaian indikator kinerja Persentase peningkatan manajemen koperasi sebesar 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Target capaian indikator kinerja Persentase koperasi yang berkinerja baik sebesar 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Target capaian indikator kinerja persentase KUB/Klaster usaha mikro sebesar 14%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

**7) Program Pengembangan UMKM**

Target capaian indikator kinerja Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil sebesar 85%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

**I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Target capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investor sebesar 20%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

**2) Program Promosi Penanaman Modal**

Target capaian indikator kinerja peningkatan promosi investasi sebesar 4 kali per tahun, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Pelayanan Penanaman Modal**

Target capaian indikator kinerja peningkatan pengawasan investasi sebesar 20%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

**4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Target capaian indikator kinerja persentase kesesuaian perijinan sebesar 97%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Target capaian indikator kinerja peningkatan efektifitas perencanaan penanaman modal sebesar 17%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;

**2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Target capaian indikator kinerja persentase fasilitasi pembinaan cabang olahraga sebesar 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
- d) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi



**n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Target capaian indikator kinerja Persentase data sektoral yang digunakan dalam perencanaan pembangunan sebesar 13,755%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

**o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Target capaian indikator kinerja Persentasi OPD yang menerapkan standar keamanan informasi level aman sebesar 70,57%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

**p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Kebudayaan**

Target capaian indikator persentase sekolah dan instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan budaya local sebesar 75%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

**2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Pembinaan Sejarah**

Target capaian indikator kinerja pertumbuhan pelaku seni budaya sebesar 22%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Target capaian indikator kinerja persentase cagar budaya yang dilestarikan sebesar 20%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

**5) Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

**q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pembinaan Perpustakaan**

Target capaian indikator kinerja rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan sebesar 3.917,00 orang/bulan, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan

b) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengelolaan Arsip**

Target capaian indikator kinerja persentase pengelolaan jaringan informasi dokumen/arsip daerah sebesar 70%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

**2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Target capaian indikator kinerja persentase dokumen/arsip daerah yang dipelihara sebesar 60%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun;
- b) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota; dan
- c) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

**3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Target capaian indikator kinerja volume ikan yang dilelang di TPI sebesar 29.228,00 ton, pertumbuhan KUB nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham sebesar 28,13%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
- b) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

**2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Target capaian indikator kinerja persentase kelompok pelaku utama perikanan budidaya sebesar 7,18%, produksi perikanan budidaya sebesar 42.775 ton, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
- b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

**3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

Target capaian indikator kinerja peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sebesar 0,26%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

**4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Target capaian indikator kinerja produksi olahan ikan sebesar 42.725,17 ton, pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan sebesar 8,70%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; dan
- b) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Target capaian indikator kinerja Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan sebesar 34%, program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

**2) Program Pemasaran Pariwisata**

target capaian indikator kinerja persentase kualitas pengembangan pemasaran pariwisata sebesar 1,39%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Target capaian indikator kinerja peningkatan produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura sebesar 1.646.513,8 ton, persentase jumlah kelompok pengguna terapan teknologi pertanian/perkebunan sebesar 0,51 %, pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi perkebunan sebesar 3,96%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
- b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Target capaian indikator kinerja Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi hortikultura sebesar 3,14%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
- b) Pembangunan Prasarana Pertanian

**3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Target capaian indikator kinerja Rasio tenaga paramedis/medis terhadap populasi ternak sebesar 0,08%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Target capaian indikator kinerja Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi perkebunan sebesar 8,51%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

**5) Program Penyuluhan Pertanian**

Target capaian indikator kinerja Pertumbuhan nilai prestasi kerja penyuluh pertanian sebesar 2,6%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Target capaian indikator kinerja Presentase peningkatan manajemen pasar daerah sebesar 14%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.

**2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

target capaian indikator kinerja persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan sebesar 14%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
- b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

**3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Target capaian indikator kinerja persentase pengaduan konsumen yang tertangani sebesar 12%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

**4) Program Pengembangan Ekspor**

Target capaian indikator kinerja persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil sebesar 8%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Target capaian indikator kinerja Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala) sebesar 12%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

**6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Target capaian indikator kinerja Proporsi perdagangan berbasis e-commerce sebesar 13%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Target capaian indikator kinerja Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil sebesar 6%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

**2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Target capaian indikator kinerja persentase produksi industri kreatif sebesar 6%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri

(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

**3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.**

Target capaian indikator kinerja persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce sebesar 8%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Target capaian indikator kinerja jumlah transmigran yang ditempatkan dengan target 5 KK program ini dilakukan melalui kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**a. Sekretariat Daerah**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan target capaian indikator kinerja Nilai Kinerja PD dan terselesainya Laporan Keuangan sebesar 100%, Laporan Kinerja keuangan yang disajikan sebesar 100%, Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur sebesar 25%, Persentase layanan administrasi yang tertangani sebesar 100%, Prosentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik sebesar 100%, Persentase layanan administrasi yang tertangani sebesar 100%, Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, Indek kepuasan layanan kepada pimpinan sebesar 3,55%, Persentase agenda kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana sebesar 100%, Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM sebesar 83%, Persentase saluran informasi publik yang aktif sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum);
- i) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian Umum);
- j) Penataan Organisasi (Bagian Organisasi); dan
- k) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Protokol)

**2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Target capaian indikator kinerja Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang tata pemerintahan sebesar 95%, program ini dilakukan melalui kegiatan:

- a) Administrasi Tata Pemerintahan;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;

- c) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; dan
- d) Fasilitasi Kerjasama Daerah

### **3) Program Perekonomian dan Pembangunan**

Target capaian indikator kinerja Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi sebesar 83%, Persentase Realisasi Pembangunan Infrastruktur Daerah > 90% sebesar 99%, Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP sebesar 99%, Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi sebesar 83%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
- b) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
- c) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

#### **b. Sekretariat DPRD**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; dan
- i) Layanan Administrasi DPRD.

##### **2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- b) Peningkatan Kapasitas DPRD;
- c) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- d) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; dan
- e) Fasilitasi Tugas DPRD.

## **5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **a. Perencanaan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Target capaian indikator kinerja persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

**2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Target capaian indikator kinerja persentase program dalam Restra OPD yang mencapai target RPJMD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

**b. Keuangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Target capaian indikator kinerja ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

**2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Target capaian indikator kinerja integrasi laporan barang milik daerah dengan SIMDA keuangan sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

**3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Target capaian indikator kinerja persentase target pendapatan sebesar 15%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

**c. Kepegawaian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Kepegawaian Daerah**

Target capaian indikator kinerja Persentase pelayanan kepegawaian yang menggunakan data SIMPEG sebesar 100 %, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- b) Mutasi dan Promosi ASN;
- c) Pengembangan Kompetensi ASN;
- d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

**d. Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Target capaian indikator kinerja persentase ASN yang mengikuti diklat penunjang jabatan sebesar 90 %, program ini dilakukan melalui kegiatan :

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

**e. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Target capaian indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah sebesar 50%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

**6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

**a. Inspektorat Daerah**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Target capaian indikator kinerja temuan hasil pengawasan sebesar 0%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

**2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Target capaian indikator kinerja persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian internal sebesar 5%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
- b) Pendampingan dan Asistensi.

**7. Unsur Kewilayahan**

**a. Kecamatan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Target capaian indikator kinerja persentase permohonan perijinan yang terlayani, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

**2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Target capaian indikator kinerja persentase RT/RW aktif sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; dan
- c) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

**3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



**4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

**5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Target capaian indikator kinerja persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**8. Unsur Pemerintahan Umum****a. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini dilakukan melalui kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

**2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

program ini dilakukan melalui kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

**3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

program ini dilakukan melalui kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan).

**4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

program ini dilakukan melalui kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

program ini dilakukan melalui kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

**9. Non Urusan (Program Setiap Perangkat Daerah)**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah);
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah);
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah);
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah);
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Semua Perangkat Daerah);
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Semua Perangkat Daerah);

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Semua Perangkat Daerah); dan
- 8) Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD Kraton; dan RSUD Kajen).

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021, dan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 belum ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58 Tahun 2017), memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, serta menjaga kesinambungan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 dibawah.

**Tabel 6.1**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

No	Tujuan Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian	OPD
		2022	
<b>1.</b>	<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara adil dan setara agar berdaya saing dan memiliki kearifan lokal</b>		
a.	Indeks Pembangunan Manusia	70,00 ± 1%	Seluruh OPD
b.	Indeks Pembangunan Gender	93 – 95%	
c.	Indeks Pemberdayaan Gender	72 – 75%	
d.	Persentase kemiskinan	9,50 - 10%	
e.	Indeks Gini	0,266 – 0,268	
<b>2.</b>	<b>Memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan pendapatan masyarakat</b>		
a.	Pertumbuhan Ekonomi	4 - 5%	Seluruh OPD
b.	Laju inflasi	3,0±1	
c.	Indeks Williamson	0,5 – 0,6	
d.	PDRB per Kapita	25,549.60 – 25,849,60	
<b>3.</b>	<b>Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur didukung dengan pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan</b>		
a.	Persentase Infrastruktur kondisi baik	80 - 90%	DPU, DINHUB dan DINPERKIM
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,52 – 65,00	
<b>C.</b>	<b>meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan</b>		
a.	Indeks Reformasi Birokrasi	70 – 75%	SETDA, PERENCANAN, PENGAWASAN & KEUANGAN
b.	Nilai Sakip	BB+	

*Keterangan: \*Indikator dan Target Masih Sementara dan masih Bisa berubah dikarenakan masih proses Desk FGD.*

Penetapan indikator kinerja Daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.2 sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian	OPD
		2022	
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASY.</b>		
<b>1.</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>		
a.	Pertumbuhan ekonomi	4 - 5%	Seluruh OPD
b.	PDRB ADH Berlaku th 2010 (Juta Rp)	22.8 – 22.9	
c.	PDRB ADH Konstan Tahun 2010 (juta Rp)	16.0 – 16.5	
d.	PDRB Per Kapita	25,549.60 – 25,849,60	
e.	Laju Inflasi	3,0±1	
f.	Indeks Gini	0,266 – 0,268	
g.	Indeks Wiliamson	0,5 – 0,6	
h.	Presentase Kemiskinan	9,50 - 10%	
i.	TPAK	71 – 75%	
j.	TPT	4,00 - 5,00	
<b>2.</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,00 ± 1%	Seluruh OPD
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93 – 95%	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72 – 75%	
	Persentase Balita Gizi Buruk	0.03 – 0.02	
<b>3.</b>	<b>FOKUS SENI BUDAYA &amp; OLAHRAGA</b>		
a.	Persentase penyelenggaraan seni dan budaya yang difasilitasi (%)	80 - 90	DINDIKBUD/ DINPORAPAR
b.	Tingkat kualitas pemuda, olahraga dan teknologi (%)	60 - 75	
c.	Persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan (%)	90 - 95	
d.	Persentase penyelenggaraan wisata religi dan heritage (%)	90 - 95	
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>1.</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
<b>a.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
1)	APK SD/MI/Paket A	103.85	DINDIKBUD
2)	APK SMP/MTs/Paket B	100	
3)	APM SD/MI/Paket A	93.80	
4)	APM SMP/MTs/Paket B	84.50	
5)	AL SD/MI	100	
6)	AL SMP/MTs	100	
7)	Jumlah Prestasi Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP, MTS, Dikmas	5 - 15	
8)	APK PAUD 3-6 tahun	71.04	
9)	Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal	80 - 85	
<b>b.</b>	<b>KESEHATAN</b>		
1)	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	993,60 – 995,00	DINKES
2)	Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH)	65,25 – 60,00	
3)	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	6,50 – 5,00	
4)	Persentase Balita Gizi Buruk (%);	0,03 – 0,02	
5)	Prevalensi anemia pada Ibu Hamil (%)	10,60 – 90,00	
6)	Bayi dengan berat badan lahir rendah (%)	4,00 - 300	
7)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bln yang mendapat ASI eksklusif (%)	52,00 – 60,00	
8)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%)	15,00 – 10,00	
9)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah 2 tahun (%)	26,00 – 24,00	
10)	CNR Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk	121 - 125	
11)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	0,34	
12)	Jumlah kecamatan mencapai eliminasi malaria ( kec)	19	
13)	Persentase Desa yang memenuhi sarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	85,00 -90,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian	OPD
		2022	
14)	Cakupan Pelayanan Dasar dan Rujukan Masyarakat Miskin (%)	100,00	
<b>c.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1)	Prosentase Tingkat kemantapan jalan (%)	75,65 – 80,00%	DPU TARU
2)	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	37.32%	
3)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	82,72%	
4)	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	100,00	
5)	Rasio Jaringan Irigasi (%)	3.575	
6)	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi yang tersedia dan terupdate per tahun	100,00	
	Persentase rekomendasi teknis IUJK Nasional yang diterbitkan	100,00	
7)	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	21,00 – 50,00%	
8)	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	13,78 – 20%	
9)	Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	28 -35%	
10)	Rasio Kepatuhan IMB	16 – 40%	
11)	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	12 – 30%	
13)	Persentase Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	75,00%	
14)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaran dan bukan perpipaaran terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	87 – 90%	
15)	persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik (%)	67-70%	
<b>d.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
1)	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100,00	DINAS PERKIM DAN LH
2)	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0.209	
3)	Persentase kawasan permukiman kumuh (%)	0.027	
4)	Persentase penerbitan izin pengembangan dan pembangunan perumahan	100,00	
5)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	4,298	
6)	Presentase RTH dalam kondisi baik	100,00	
7)	Persentase timbulan sampah yang ditangani	100,00	
<b>e.</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
1)	prosentase gangguan Ketrentaman dan Ketertiban umum yang tertangani (%)	100,00	SATPOL PP, BaDAN BANGPOL DAN DAMKAR
2)	Prosentase Peristiwa kebakaran yang tertangani	100,00	
3)	Persentase Penegakan PERDA (%)	100,00	
4)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 – 30%	
5)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg diberdayakan dan mendapatkan pengawasan	30 – 50%	
6)	Prosentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa	40 – 60%	
7)	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupten Pekalongan	100	
<b>f.</b>	<b>SOSIAL</b>		
1)	Cakupan Penanganan PMKS (%)	2,84 – 5,00	DINAS SOSIAL
2)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	5,24 – 10,00	
3)	Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi (%)	0,43 – 0.50	
4)	Persentase desa tangguh bencana (%)	100,00	BPBD
5)	Persentase Relawan bencana yang aktif	100,00	
6)	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian	OPD
		2022	
<b>2.</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>		
<b>a.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>		
1)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	71 – 75%	DINKOP UMKM&NAKER
2)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	45 – 50%	
3)	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30 – 40%	
4)	Presentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) BPJS Ketenagakerjaan (%)	40 – 45%	
5)	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	66%	
<b>b.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
1)	Prosentase perempuan yang aktif di Bidang Pembangunan (%)	15 – 30%	DPPKB
2)	Rasio KDRT (%)	0,00064	
3)	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	30,00	
4)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	70 – 90%	
5)	Prosentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	60 – 70%	
<b>c.</b>	<b>PANGAN</b>		
1)	Persentase ketercapaian kemandirian pangan (%)	70 – 90%	DKPP
2)	Persentase ketersediaan dan konsumsi energi dan protein (%)	2.600	
3)	Persentase ketercapaian desa bebas rawan pangan (%)	100%	
4)	Persentase ketercapaian keamanan pangan (%)	100%	
<b>d.</b>	<b>PERTANAHAN</b>		
1)	Persentase penurunan sengketa tanah masyarakat	50%	DPU TARU
2)	Persentase sengketa tanah masyarakat yang diselesaikan	50%	
<b>e.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1)	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	62,52 – 65,00	DINAS PERKIM DAN LH
2)	Indeks kualitas air (%)	35 – 50%	
3)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	59,31	
4)	Persentase timbulan sampah yang ditangani	70 - 805	
5)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	100,00	
<b>f.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN &amp; PENCATATAN SIPIL</b>		
1)	Persentase Kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan (%)	95 – 100%	DINDUKCAPIL
<b>g.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
1)	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	0,56	DPMD
2)	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dibagi jumlah total lembaga kemasyarakatan yang ada (%)	4.16	
3)	Cakupan sarana prasarana desa (%)	95,00	
<b>h.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
1)	IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) (%)	50 – 60%	DPPKB
2)	Prosentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK	55%	
3)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Setiap Kecamatan	35 – 45%	
<b>i.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>		
1)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Marka Jalan	60 – 70%	DINHUB
2)	Persentase APILL Terintegrasi (%)	70,00 – 80,00	
3)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rambu Jalan	70 – 80%	
4)	Persentase PJU yang termeterisasi (%)	30 – 50%	
<b>j.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
1)	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan dinas Kominfo	71%	DINKOMINFO

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian	OPD
		2022	
2)	Persentase keluhan/ aduan masyarakat yang tertangani	70%	
<b>k.</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
1)	Persentase koperasi/unit simpan pinjam yang mendapatkan pelayanan rekomendasi izin usaha simpan pinjam	7,69%	DINKOP UMKM&NAKER
2)	Persentase pertumbuhan koperasi sehat	4,20%	
3)	Persentase KSP/USP Koperasi yg sehat	57,69%	
<b>l.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>		
1)	presentase realisasi investasi	1.85	DINAS PM
2)	Nilai investasi (PMDN/PMA)	464 milyar	
3)	Persentase pelayanan perijinan yang dilayani	100	
4)	Kepeminatan Investasi	2	
5)	SKM Layanan	90	
<b>m.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
1)	Persentase prestasi pemuda yang diperoleh di tingkat kota, regional, provinsi, nasional dan internasional (%)	22%	DINPORAPAR
2)	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor (pilih 1: wirausaha muda pemula)	67,50%	
3)	Persentase organisasi pemuda yang aktif	77,14%	
4)	Persentase medali yang diperoleh di tingkat kota, regional, provinsi, nasional dan internasional (%)	10 – 30%	
<b>n.</b>	<b>STATISTIK</b>		
1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (%)	80%	DINKOMINFO
<b>o.</b>	<b>PERSANDIAN</b>		
1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	I	DINKOMINFO
<b>p.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>		
1)	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	100,00	DINDIKBUD
2)	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (%)	100,00	
3)	Cakupan gelar seni budaya	86%	
4)	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	100,00	
<b>q.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>		
1)	Prosentase ketersediaan bahan pustaka	26,76%	DINARPUS
2)	Jumlah pengunjung perpustakaan	86646	
<b>r.</b>	<b>KEARSIPAN</b>		
1)	Prosentase arsip dinamis daerah kabupaten yang dikelola	100,00	DINARPUS
2)	Prosentase arsip statis daerah kabupaten yang dikelola	35%	
3)	Prosentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (PMDN 18/2020)	30%	
4)	Prosentase arsip yang diselamatkan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	50%	
<b>3.</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>a.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
1)	Produksi perikanan tangkap laut (ton)	5623.9	DINLUTKAN
2)	produksi perikanan tangkap Perairan umum (ton)	308.23	
3)	Produksi perikanan budidaya	8593.65	
4)	Persentase permohonan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diberikan rekomendasi	70%	
5)	Jumlah produksi olahan ikan	3326.21	
<b>b.</b>	<b>PARIWISATA</b>		
1)	Persentase penambahan destinasi wisata	0,03%	DINPORAPAR
2)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	0,10%	
<b>c.</b>	<b>PERTANIAN</b>		
1)	Persentase ketercapaian pengembangan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan (%)	30 – 50%	DKPP
2)	Persentase ketercapaian peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian (%)	30 – 50%	
3)	Persentase ketercapaian peningkatan produksi dan	30 – 50%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian	OPD
		2022	
	produktivitas komoditas Perkebunan (%)		
4)	Persentase kelompok tani terbina (%)	50 – 75%	
<b>d.</b>	<b>KEHUTANAN</b>		
	Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi		
<b>e.</b>	<b>ENERGI &amp; SUMBER DAYA MINERAL</b>		
	Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi		
<b>f.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		
1)	Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak)	83,3%	DINPERINDAG
2)	Persentase Agen dan Pasar Rakyat yang dipantau ketersediaan Bapokting	60%	
	Pertumbuhan nilai Ekspor	20%	
<b>g.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>		
1)	Prosentase Peningkatan nilai produksi IKM	0,4%	DINPERINDAG
2)	Persentase IKM yang dibina	0,6%	
3)	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50%	
<b>h.</b>	<b>KETRANSMIGRASIAN</b>		
1)	Presentase calon transmigran yang diberangkatkan (%)	50,00	DINKOP UMKM&NAKER
<b>4.</b>	<b>FOKUS LAYANAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>a.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
1)	Persentase penjabaran konsistensi program perencanaan pembangunan daerah (%)	75,00	BAPPEDA LITBANG
2)	Persentase pencapaian indikator pembangunan daerah (%)	75,00	
<b>b.</b>	<b>KEUANGAN</b>		
1)	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	15,62	BPKD
<b>c.</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
1)	Persentase ASN yang memperoleh Layanan Kepegawaian dengan Baik (%)	100,00	BKD DIKLAT
2)	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	75-90%	
<b>d.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
1)	Persentase jumlah hasil riset yang bisa direkomendasikan untuk dimanfaatkan (%)	66,67	BAPPEDA LITBANG
<b>e.</b>	<b>PENGAWASAN</b>		
1)	Prosentase Rekomendasi yang sesuai ditindak lanjuti	90%	INSPEKTORAT
2)	Tercapainya Level SPIP	Level 3+	
<b>f.</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>		
1)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	SETDA / KECAMATAN
2)	Hasil implementasi SAKIP	BB+	
3)	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah (%)	100,00	
4)	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi (%)	100,00	
5)	Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi (%)	100,00	
<b>D.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>		
<b>1.</b>	<b>FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR</b>		
a.	Tingkat kualitas infratraktur wilayah (%)	80 - 90%	DPU TARU
<b>2.</b>	<b>FOKUS IKLIM BERINVESTASI</b>		
a.	jumlah kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati	66	SATPOL PP DAN DAMKAR
b.	Persentase pelayanan perijinan yang dilayani	100%	DINPM
<b>3.</b>	<b>Pertanian</b>		
a.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,71	DKPP

Keterangan: \*Indikator dan Target Masih Sementara dan masih Bisa berubah dikarenakan masih proses Desk FGD.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah



dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

**Tabel 6.3**  
**Indikator dan Target Yang Mendukung Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Tahun 2022**

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
<b>A.</b>	<b>Pendidikan</b>			
1.	Tercapainya penerapan Kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,05%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	35,05%	
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%	
<b>B.</b>	<b>Kesehatan</b>			
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000 Ratio Penduduk	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	
2.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.</li> <li>2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.</li> <li>3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia</li> <li>8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</li> <li>9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</li> <li>11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</li> </ol>	100%	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	150/100.000	Dinas Kesehatan
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	2%	
		Persentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan	100%	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	17,0%	

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
		Balita		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) padabalita (persen)	7,5	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	150/100.000	
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19	
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90%	
		Treatment coverage padapasien TB	100%	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	95%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	70%	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,90%	
		Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok(UBM)	100%	
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	10%	
4.	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49%	Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Produksi UMOT	60%	
<b>C.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1.	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah Beririgasi	82,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	3,5 km	
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	7 km	
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	5 Km	
2.	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tanggayang menempati hunian dengan akses air minum layak	9,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tanggadengan akses air minum jaringan perpipaan	3,16%	
		Persentase rumah tanggayang menempati hunian dengan akses air minum aman	100%	
		Persentase PDAM dengankinerja	73,68%	

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
		sehat	penanganan; 11,18% pengurangan	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	30%	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	100%	
		Persentase rumah tanggayang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	9,47%	
3.	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantapjalan kabupaten/kota	75,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Terpenuhinyapenyelesaian rencana tata ruang dan rencana detailtata ruang	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	1 Persetujuan Substansi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Terciptanya kepatuhan PemanfaatanRuang pada Sawah yang terlindungi	Pelaksanaan pengendalianalih fungsi lahan sawah	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahansawah	100%	
<b>D.</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
1.	Terpenuhinya pelayanan dasarbidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layakhuni	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibatprogram Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	
2.	Meningkatnya luasan kawasankumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	7 Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya jumlah rumahlayak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layakhuni)	750 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.	Meningkatnya penyediaan FSUPERumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>E.</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>			
1.	Meningkatnya pelayanan Trantibum yangsesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	90%	
2.	Meningkatnya manajemen	Persentase penanganan pra	100 %	Badan

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
	bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	bencana		Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	
		Persentase penanganan pasca bencana	100 %	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	
3.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	18%	
<b>F.</b>	<b>Sosial</b>			
1.	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	85 %	Dinas Sosial
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	38 orang	
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	19 orang	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100 %	
2.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	15 Badan Usaha	Dinas Sosial
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	400 KPM	
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	5.263 KPM	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	120 orang	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	120 orang	
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	22 lembaga	
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	200 orang	
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	5,000 jiwa	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	200 jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	2 kelompok masyarakat	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	2 kelompok masyarakat	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan	0 orang	

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
		Bantuan Perlindungan Sosial		
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	0 orang	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4,93 %	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	43 %	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luarpanti	0,52 %	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	20 %	
<b>G.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
1.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial TenagaKerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar pesertaBPJS Ketenagakerjaan)	7,5%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	1.200 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenagakerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	208 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	208 Orang	
<b>H.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan PerlindunganPerempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Meningkat minimal 5% dari kondisi 2020	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPOyang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi2020	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan PerlindunganAnak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkat minimal 2% dari kondisi 2020	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
<b>I.</b>	<b>Pangan</b>			
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase daerah rentan rawan pangan	14%	
		Skor Pola Pangan Harapan	92,8%	
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>J.</b>	<b>Pertanahan</b>			
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	3 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>K.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58.57 Poin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	72 Lembaga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbunan sampah b. Jumlah penanganan timbunan sampah	11,18 73,68	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>L.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admuduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	94 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	100 %	
		Pemanfaatan data kependudukan	3 instansi	
<b>M.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	992 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah kelembagaan desa yang	136	

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
		ditata sesuai standar	lembaga	
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	55 Sistem pelayanan	
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	36 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa Berkembang	236 Desa	
		Jumlah Desa Tertinggal	0 Desa	
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	18 Bumdes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>N.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00 Index	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	74.42%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	74.42%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	12.20%	
<b>O.</b>	<b>Perhubungan</b>			
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	83.00 (Nilai)	Dinas Perhubungan
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	0 %	
2.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	100%	Dinas Perhubungan
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	28.85 Rasio	Dinas Perhubungan
<b>P.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
1.	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	51.11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMK yang difasilitasi untuk implementasi	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
		adopsi teknologi digital		
		Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	0%	
4.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	66 orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	30 orang	
5.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasidan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	75%	
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	75%	
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	6,67%	
<b>Q.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>			
1.	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	10%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0,25%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>R.</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
1.	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rp. 464.000.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>S.</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
1.	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	1.85% (Persen)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan



No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
	organisasi sosial	dan organisasi sosial kemasyarakatan		Pariwisata
2.	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.40% (Persen)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3.	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	2 (Medali emas)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
<b>T.</b>	<b>Statistik</b>			
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	
<b>U.</b>	<b>Persandian</b>			
1.	Menguatnya kemandirian lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	1 Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	7 instansi	
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) )	1 Orang	
<b>V.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
1.	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	93 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	1 Unit	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1 Unit	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	15 Orang	
<b>W.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
1.	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 (Index)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,3 (Nilai)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>X.</b>	<b>Kearsipan</b>			
1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	2.000 Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	50 Orang	
<b>Y.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
1.	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	5.623,90 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya	8.598,65 ton	
<b>Z.</b>	<b>Pariwisata</b>			

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif		Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	100.000-150.000	
		Kontribusi PAD Pariwisata	4.3%	
<b>AA.</b>	<b>Pertanian</b>			
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	2,00%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,20%	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,28%	
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,20%	
2.	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5%	
<b>AB.</b>	<b>Perdagangan</b>			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	55% – 75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	90%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	91%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	50-75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	3+1%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>AC.</b>	<b>Perindustrian</b>			
1.	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0.1%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2022	OPD Penanggungjawab
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	31.0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	0.014 (Nilai)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	63.145 orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	1.01 Triliun	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>AD.</b>	<b>Transmigrasi</b>			
1.	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	(Index)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	(Index)	

## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 merupakan Tahun ke-1 (satu) pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Namun demikian proses penyusunan RPJMD 2021-2026 masih sampai tahap Rancangan Teknokratik RPJMD, sehingga Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58 Tahun 2017), memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, serta menjaga kesinambungan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 ini, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah.

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 ini, diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, yakni: **"KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"** dan mendukung visi-misi Bupati-Wakil Bupati Pekalongan terpilih pada pilkada serentak 2020 dengan visi : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, ADIL, MERATA (SETARA) DAN BERBUDAYA GOTONG ROYONG"**

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 7 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19631005 199208 2 001

Usulan Pokir DPRD Kab. Pekalongan  
 Tahun 2022

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan Pisma Kec. Kedungwuni	Jl. Pisma Kelurahan Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di dukuh karangmoncol	Dukuh Karang Moncol, Kab. Pekalongan, Kesesi, Windurojo	1 paket	Dinas Perhubungan
3	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Tidak adanya drainase jadinya merusak	Desa Brondong, Kab. Pekalongan, Kesesi, Brondong	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa podosari	Desa Kauman, Kab. Pekalongan, Kesesi, Podosari	1 Paket	Dinas Perhubungan
5	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pada saat hujan air merusak jalan	Desa Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan yang rusak mempersulit transportasi hasil pertanian	Desa Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Pantirejo	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	RUsaknya Tersier sawah blok 4 RW 03 RT 02 Desa Kalimadea	Desa Kalimadea, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimadea	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	tidak adanya drainase merusak jalan dan lingkungan	Dukuh Sigerung Desa Sijeruk, Kab. Pekalongan, Sragi, Sijeruk	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Tebing gugur membahayakan pemakai jalan di sekitar Makam Umum di Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Mulyorejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Rusaknya tersier sawah di Desa Ketanon ageng	Desa Ketanon Ageng, Kab. Pekalongan, Sragi, Ketanonageng	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Desa Krandon	Desa Krandon, Kab. Pekalongan, Kesesi, Krandon	1 Paket	Dinas Perhubungan
12	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	KEbutuhan pagar keliling dan gudang kecil untuk kenyamanan proses belajar	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulaksari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Rowokembu RT 07 s/d RT 09/04 guna mempermudah aktifitas warga	Desa Rowokembu RT 07 s/d RT 09/04, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Perhubungan
14	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Jetakkidul diharapkan dengan adanya PJU mempermudah aktifitas warga	Desa Jetakkidul, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetakkidul	1 paket	Dinas Perhubungan
15	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Getas Dukuh Kedungrandu Lor RT 04 s/d RT 09/02 diharapkan dengan adanya PJU mempermudah aktifitas warga	Desa Getas Dukuh Kedungrandu Lor RT 04 s/d RT 09/02, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Perhubungan
16	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Legokgunung dengan harapan dapat mempermudah aktifitas warga	Desa Legokgunung, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Legokgunung	1 paket	Dinas Perhubungan
17	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Kebon Tengah - Kwagean - Galang Galang Pengampon	Desa Kebon Tengah - Kwagean - Galang Galang Pengampon, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Galangpengampon	1 paket	Dinas Perhubungan
18	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan senderan sungai Desa Rowokembu Kaum	Desa Rowokembu Kaum, Kab. Pekalongan, Rowokembu	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bantuan bibit kentang kelompok Tani "MULYA SEJAHTERA" Desa Gumelem	Desa Gumelem, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Gumelem	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
20	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bantuan bibit cabe dan tomat kelompok tani DUKUH DRANAN Desa Yosorejo	Desa Yosorejo, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Yosorejo	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan kabupaten lokasi desa Kutosari	Desa Kutosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Kutosari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Jatirejo – Pawitro Desa Pododadi	Dukuh Jatirejo – Pawitro Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 paket	Dinas Perhubungan
23	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Jalan Desa Wonosari	Desa Wonosari, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
24	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan Desa Sokosari	Desa Sokosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Sokosari	1 paket	Dinas Perhubungan
25	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan drainase jalan Kabupaten Lokasi Desa Rogoselo	jalan Kabupaten Lokasi Desa Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Jalan kabupaten (lokasi desa Rogoselo)	Jalan kabupaten (lokasi desa Rogoselo), Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perhubungan
27	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan desa Legokkalong (lokasi jalan Dukuh Pandurekso)	jalan desa Legokkalong (lokasi jalan Dukuh Pandurekso), Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokkalong	1 paket	Dinas Perhubungan
28	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan bronjong tebing dukuh wonosirno Kutosari	dukuh wonosirno Kutosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Kutosari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Pembangunan tempat parkir SMPN 1 Karanganyar	Jl. Kebunsari, Karangsari, Kec. Karanganyar,, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TPQ TARBIYATUL QUR'ANIYAH Dukuh Wonorejo Desa Pododadi	Pembanguann RKB TPQ TARBIYATUL QUR'ANIYAH Dukuh Wonorejo Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan poros Desa Dukuh SicoweT Pododadi – Desa Pedawang	Dukuh SicoweT Pododadi – Desa Pedawang, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pedawang	1 paket	Dinas Perhubungan
32	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan Kabupaten, Desa Kutosari-Desa Legokgunung	Desa Kutosari-Desa Legokgunung, Kab. Pekalongan, Kutosari	1 paket	Dinas Perhubungan
33	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan Propinsi, Desa Pododadi-Desa Larikan	Desa Pododadi-Desa Larikan, Kab. Pekalongan, Pododadi	1 paket	Dinas Perhubungan
34	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan umum (PJU) Desa Tosaran Kedungwuni	RT.01 dan RT 03 RW I Dukuh Pejaten, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tosaran	1 paket	Dinas Perhubungan
35	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Tangkil Tengah	RT.06 dan RT.07 dan Dukuh Karanglo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkiltengah	1 paket	Dinas Perhubungan
36	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Rehabilitasi saluran buangan bawah Paving Kelurahan Pekajangan	Pekajangan Gang 8, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan Kelurahan Pekajangan	Pekajangan gang 15 RT. 10-12 RW XIII, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan Kabupaten, Desa Gutomo-Desa Sokoyoso Kajen	LPJU jalan Kabupaten, Desa Gutomo-Desa Sokoyoso Kajen, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 paket	Dinas Perhubungan
39	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Rehabilitasi Toilet Siswa dan Guru SD Muhammadiyah 1 Pekajangan	SD Muhammadiyah 1 Pekajangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Rehabilitasi toilet siswa dan guru SD Muhammadiyah 3 Pekajangan	SD Muhammadiyah Pekajangan 3, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
41	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan bronjong penahan sungai	Desa Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Buaran, Pakumbulan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum (JPU) Desa Watusalam	Desa Watusalam - Buaran, Kab. Pekalongan, Buaran, Watusalam	1 paket	Dinas Perhubungan
43	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum (JPU) Desa Legokgunung	Desa Legokgunung, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Legokgunung	1 paket	Dinas Perhubungan
44	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Ruang Kelas Baru (RKB) MTs. Muhammadiyah Kajen	Jalan Diponegoro-Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum (JPU) Desa Ambokembang	Desa Ambokembang Gang 12 RT. 30, 31,24, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 paket	Dinas Perhubungan
46	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kdungwuni sejumlah 4 Paket	Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	4 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
47	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Bukhori RT 005/002 Desa Sastridirjan	RT 005/002 Desa Sastridirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastridirjan	1 paket	Dinas Sosial
48	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Maskur RT 006/002 Desa Sastridirjan	RT 006/002 Desa Sastridirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastridirjan	1 paket	Dinas Sosial
49	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Kaswandi RT 004/002 Desa Sastridirjan	RT 004/002 Desa Sastridirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastridirjan	1 paket	Dinas Sosial
50	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Muhammad Fahmi Saifurohman RT 004/002 Desa Sastridirjan	RT 004/002 Desa Sastridirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
51	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Nur Salim RT 005/002 Desa Sastridirjan	RT 005/002 Desa Sastridirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastridirjan	1 paket	Dinas Sosial
52	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	bantuan hibah utk pc muslimat nu kab pekalongan	Desa Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Karangdowo	1 paket	Sekretariat Daerah
53	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah utk pc ansor kab pekalongan	Desa Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
54	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD)	Peningkatan mutu tenaga kependidikan TK dan KB/ SPS/ TPA	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD)	Pembimbingan karier Pendidik PAUD, Pengawas, Penilik Paud	Kab Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD)	Penguatan Kelembagaan PAUD	Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Zaenal Ghofirin RT 005/002 Desa Sastridirjan	RT 005/002 Desa Sastridirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastridirjan	1 Paket	Dinas Sosial
58	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Nuruth Tholibin (Yayasan ANNUR) Ketitang Kidul	Ketitang Kidul, Kab. Pekalongan, Bojong, Ketitangkidul	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan motor roda 3 (TOSSA) Desa Ketitanglor	Desa Ketitanglor, Kab. Pekalongan, Bojong, Ketitanglor	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
60	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Normalisasi saluran irigasi Desa Wiroditan Bojong Minggir	Desa Wiroditan Bojong Minggir, Kab. Pekalongan, Bojong, Wiroditan	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
61	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong Sungai Jajarwayang	Desa Jajarwayang, Kab. Pekalongan, Bojong, Jajarwayang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Ketitanglor	Desa Ketitanglor, Kab. Pekalongan, Bojong, Ketitanglor	1 Paket	Dinas Perhubungan
63	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong Kaliboro Bojongwetang	Desa Bojongwetang, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojongwetang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Jajarwayang	Desa Jajarwayang, Kab. Pekalongan, Bojong, Jajarwayang	1 Paket	Dinas Perhubungan
65	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB MDA Al-Ikhlas Babalanlor Bojong	Desa Babalanlor Bojong, Kab. Pekalongan, Bojong, Babalanlor	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE Desa Karangsari 10 orang	Desa Karangsari, Kab. Pekalongan, Bojong, Karangsari	1 Paket	Dinas Sosial
67	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjongisasi Desa Porworejo RT 03	Desa Porworejo RT 03, Kab. Pekalongan, Sragi, Porworejo	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE Desa Babalanlor 10 orang	Desa Babalanlor, Kab. Pekalongan, Bojong, Babalanlor	1 Paket	Dinas Sosial
69	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Babalanlor	Desa Babalanlor, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojonglor	1 Paket	Dinas Perhubungan
70	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Bukur	Desa Bukur, Kab. Pekalongan, Bojong, Bukur	1 Paket	Dinas Perhubungan
71	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan motor roda 3 Desa Menjangan	Desa Menjangan, Kab. Pekalongan, Bojong, Menjangan	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
72	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Elnazam Desa Tegal Suruh Sragi	Desa Tegalsuruh Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalsuruh	1 Paket	Dinas Sosial
73	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Sejahtera Desa Bojongminggir	Desa Bojongminggir, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojongminggir	1 Paket	Dinas Sosial
74	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Maju Bersama Desa BabalanLor	Desa BabalanLor, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojonglor	1 Paket	Dinas Sosial
75	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Bantuan WRSE Ibu Umala RT 001/008 Desa Kalijambe Sragi	RT 001/008 Desa Kalijambe Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Kalijambe	1 Paket	Dinas Sosial
76	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Bantuan WRSE Ibu Kustini RT 002/ 002 Desa Sijeruk Sragi	RT 002/ 002 Desa Sijeruk Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sijeruk	1 Paket	Dinas Sosial
77	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Bantuan WRSE Ibu Taripah RT 001/003 Desa Sijeruk Sragi	RT 001/003 Desa Sijeruk Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sijeruk	1 Paket	Dinas Sosial



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
78	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Bantuan WRSE Ibu Sumiati RT 003/001 Desa Klunjukan Sragi	RT 003/001 Desa Klunjukan Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Klunjukan	1 Paket	Dinas Sosial
79	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Bantuan WRSE Ibu Sukhemi RT 001/003 Desa Gebangkerep Sragi	RT 001/003 Desa Gebangkerep Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Gebangkerep	1 Paket	Dinas Sosial
80	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Sembungjambu	LPJU Desa Sembungjambu, Kab. Pekalongan, Bojong, Sembungjambu	1 Paket	Dinas Perhubungan
81	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Raudlatuttolibin Porworejo sragi	Desa Porworejo, Kab. Pekalongan, Sragi, Porworejo	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
82	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan kendaraan roda 3 Desa Bukur	3 Desa Bukur, Kab. Pekalongan, Bojong, Bukur	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
83	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Sunaryo RT 004/002 Desa Sastrodirjan	Desa Sastrodirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 Paket	Dinas Sosial
84	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Muhammad Alfaqih RT 005/001 Desa Sastrodirjan	RT 005/001 Desa Sastrodirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 Paket	Dinas Sosial
85	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Riyadi RT 004/002 Desa Getas	RT 004/002 Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 Paket	Dinas Sosial
86	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak M. Tibrizin Gebruk RT 003/001 Desa Getas	RT 003/001 Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 Paket	Dinas Sosial
87	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Siti Imronah Dukuh Randu RT 004/002 Desa Getas	Dukuh Randu RT 004/002 Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 Paket	Dinas Sosial
88	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TK Nusa Indah Desa Pedawang	Desa Pedawang, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pedawang	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
89	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Bantuan rehab masjid Al-Hikmah Desa Yosorejo	Desa Yosorejo, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Yosorejo	1 Paket	Sekretariat Daerah
90	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Bantuan rehab masjid Al-Ikhlas Desa Kasimpar	Desa Kasimpar, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Kasimpar	1 Paket	Sekretariat Daerah
91	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu Desa Simego Pengaspalan jalan poros desa Semego-Songgodadi	Desa Simego, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Simego	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
92	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu Desa Rogoselo - Pungangan Pengaspalan jalan poros desa	Desa Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
93	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu Desa Pododadi Pengaspalan Pododadi – Tengger Legokkalong	Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
94	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB RA Muslimat NU Lolong	Desa Lolong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Lolong	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan rehab aula TK Pembina Negeri Pododadi Karanganyar	Desa Pododadi Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Bantuan sarana air bersih (pembangunan sumur dalam) Dukuh Jatirejo Desa Pododadi	Dukuh Jatirejo Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
97	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah rehab Masjid Baiturrohman Cokrah Pododadi	Dukuh Cokrah Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Sekretariat Daerah
98	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah pembangunan Masjid Miftakhul Huda Pododadi	Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Sekretariat Daerah
99	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah pembangun Masjid Baitul Huda Desa Kayugeritan	Desa Kayugeritan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Kayugeritan	1 Paket	Sekretariat Daerah
100	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah rehab masjid Att-Taqwa Desa Gutomo	Desa Gutomo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 Paket	Sekretariat Daerah
101	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehab gedung MDT-Ar-Rohman Desa Pododadi	Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
102	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan pintu gerbang pagar bumi TK Pembina Negeri Karanganyar	Desa Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bantuan hibah rehab gedung PONPES Hassbullah Pododadi.	Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
104	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Banque desa Rogoselo Pengaspalan jalan Simangu Rogoselo	Simangu Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
105	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan keuangan untuk pengaspalan jalan Dukuh Cokrah Desa Rembun	Bantuan keuangan untuk pengaspalan jalan Dukuh Cokrah Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
106	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros yang menghubungkan Desa Rembun dengan Desa Tengeng Kulon	Desa Rembun dengan Desa Tengeng Kulon, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros yang menghubungkan Desa Yosorejo dengan Desa Blacanan	Desa Yosorejo dengan Desa Blacanan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Blacanan	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Yosorejo dengan Desa Depok	Desa Yosorejo dengan Desa Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Depok	1 Paket	Dinas Perhubungan
109	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan di Kelurahan Gumawang	Kelurahan Gumawang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan rehab TK Muslimat Istiqomah Desa Pait	Bantuan rehab TK Muslimat Istiqomah Desa Pait, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
111	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan rehab TK Roudhotul Athfal Desa Rembun	Bantuan rehab TK Roudhotul Athfal Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
112	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan rehab TK Roudhotul Athfal Desa Tengeng Kulon	Desa Tengeng Kulon, Kab. Pekalongan, Siwalan, Tengengkulon	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
113	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan rehab TK Roudhotul Athfal Desa Waru Kidul	Desa Waru Kidul, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Warukidul	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan Desa Pucung	Desa Pucung, Kab. Pekalongan, Tirta, Pucung	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan Drainase Desa Karang Jompo	Desa Karang Jompo, Kab. Pekalongan, Tirta, Karangjompo	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
116	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros desa yang menghubungkan Desa Blimbing Wuluh dengan Desa Pait	Desa Blimbing Wuluh dengan Desa Pait, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
117	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan rehab TK Muslimat NU Dukuh Babadan Desa Pait	Dukuh Babadan Desa Pait, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
118	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Depok dengan Pantai Depok	Desa Depok dengan Pantai Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Depok	1 Paket	Dinas Perhubungan
119	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan Dukuh Boyomati Desa Boyoteluk	Dukuh Boyomati Desa Boyoteluk, Kab. Pekalongan, Siwalan, Boyoteluk	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan drainase Dukuh Wiyanggong Kelurahan Pekuncen	Dukuh Wiyanggong Kelurahan Pekuncen, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
121	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pavingisasi RT 003/010 Gg. Beringin I dan RT 003/011 Beringin III, Gembong Kedungwuni Barat	RT 003/010 Gg. Beringin I dan RT 003/011 Beringin III, Gembong Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
122	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pavingisasi RT 002/001 Gg. Mawar V dan RT 003/001 Gg. Mawar IV Gembong Timur, Kedungwuni Timur	RT 002/001 Gg. Mawar V dan RT 003/001 Gg. Mawar IV Gembong Timur, Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
123	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pavingisasi Capgawen Utara RT 003/003 dan RT 001/004 Kedungwuni Timur	Capgawen Utara RT 003/003 Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
124	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Paesan Utara Karang Lengis, Kedungwuni Barat	Paesan Utara Karang Lengis, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Perhubungan
125	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Gembong Beringin I Kedungwuni Barat	Gembong Beringin I Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungpatangewu	1 Paket	Dinas Perhubungan
126	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Gembong Beringin 4 dan 5 Kedungwuni Barat	Gembong Beringin 4 dan 5 Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Perhubungan
127	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembuatan senderan sungai Paesan Selatan, Kedungwuni Barat (Belakang SDN Kedungwuni 02)	Paesan Selatan, Kedungwuni Barat (Belakang SDN Kedungwuni 02), Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
128	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembuatan saluran air Paesan Selatan (Lebak) Kedungwuni Barat	Paesan Selatan (Lebak) Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
129	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembuatan talud sungai Karanganyar Lor / samping makam RT 003/001 Desa Karangdadap	Karanganyar Lor / samping makam RT 003/001 Desa Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
130	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembuatan drainase saluran air RT 001/001 Desa Rengas	RT 001/001 Desa Rengas, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Rengas	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
131	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Nurul Gholam Kertijayan Gg. 2 RT 008/003	Kertijayan Gg. 2 RT 008/003, Kab. Pekalongan, Buaran, Kertijayan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
132	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE "Gembong Ceria" Kedungwuni Barat	Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Sosial
133	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE "Wopi Ceria" Desa Jetak kidul	Desa Jetak kidul, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetakkidul	1 Paket	Dinas Sosial
134	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Dukuh Jambangan, Kab. Pekalongan, Kajen, Pringsurat	1 paket	Dinas Perhubungan
135	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan Jalan	Dukuh Gerdu, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Perhubungan
136	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Tebing rowo Ninis sering gugur membahayakan warga sekitar	Dukuh Sibedug, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
137	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Saluran mengakibatkan sumber penyakit	Dukuh Gutoko, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
138	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Rusaknya akses jalan poros desa sangkanjoyo ke Desa Kebon agung	Desa Kebonagung, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
139	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tidak tersedianya air bersih	Desa Botosari, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
140	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Tebing sering gugur	Desa bubak, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Bubak	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
141	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Sokoyoso, Kab. Pekalongan, Kajen, Sukoyoso	1 paket	Dinas Perhubungan
142	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Dukuh Purwodadi, Kab. Pekalongan, Kajen, Sukoyoso	1 paket	Dinas Perhubungan
143	Rossi Ardiyanti	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Jalan Purwodadi desa kutorojo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kutorojo	1 paket	Dinas Perhubungan
144	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Masjid Al Mukaromah Dk Kephirutan	Desa Ujungnegoro, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ujungnegoro	1 paket	Sekretariat Daerah
145	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Jalan Di Desa Ujungnegoro	Desa ujungnegoro, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ujungnegoro	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
146	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla Baitul Ma'ruf Dukuh Buangan	Dukuh BUangan Wetan, Kab. Pekalongan, Sragi, Purwodadi	1 paket	Sekretariat Daerah
147	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah ke Padepokan Setia Hati Terate Sragi	Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Sekretariat Daerah
148	Sarjono	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan keuangan untuk pembangunan jalan tembus Desa Windurojo ke Desa Ujungnegoro	Desa Ujungnegoro, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ujungnegoro	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
149	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Dukuh Krandan, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
150	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Tebing Sungai Sering longsor	Desa Wonorejo, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
151	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Rusaknya drainase jalan	Dukuh Rejosari, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
152	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Pekiringanalit, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Dinas Perhubungan
153	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	aspal jalan rusak	Desa Sukoyoso, Kab. Pekalongan, Kajen, Sukoyoso	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
154	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di malam hari	Desa Sukoyoso, Kab. Pekalongan, Kajen, Sukoyoso	1 paket	Dinas Perhubungan
155	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan di malam hari	Desa Pringsurat, Kab. Pekalongan, Kajen, Pringsurat	1 paket	Dinas Perhubungan
156	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan umum di malam hari	Desa Kalijoyo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kalijoyo	1 paket	Dinas Perhubungan
157	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Aspal jalan rusak mempersulit transportasi warga	Desa Rowolaku, Kab. Pekalongan, Kajen, Rowolaku	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
158	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan desa	Desa gejlak, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Perhubungan
159	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan umum	Desa Kutorejo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kutorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
160	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Mnimnya penerangan jalan umum	Desa Kutorojo-Kutorejo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kutorojo	1 paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
161	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan umum	Desa Rowolaku, Kab. Pekalongan, Kajen, Rowolaku	1 paket	Dinas Perhubungan
162	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Sambiroto, Kab. Pekalongan, Kajen, Sambiroto	1 paket	Dinas Perhubungan
163	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Salit, Kab. Pekalongan, Kajen, Salit	1 paket	Dinas Perhubungan
164	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan umum desa	Desa Nyamok, Kab. Pekalongan, Nyamok	1 paket	Dinas Perhubungan
165	Riyadi	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan desa	Desa Tanjungsari, Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	1 paket	Dinas Perhubungan
166	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Masjid Nurul Huda Dukuh Traji	Desa Bantar Kulon, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Bantarkulon	1 paket	Sekretariat Daerah
167	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan TPQ Al Hidayah Dukuh Traji	Desa Bantar Kulon, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Bantarkulon	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
168	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Tani Podosari, berupa 1000 Bibit Duren dan Alpokat	Desa Mendolo, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Mendolo	1 paket	Sekretariat Daerah
169	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Tani Sidomakmur, berupa 1.300 Bibit Alpokat dan Duren	Desa Sidomulyo, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Sidomulyo	1 paket	Sekretariat Daerah
170	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Pembangunan Rumah Dinas Koramil Lebakbarang	Desa Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Lebakbarang	1 paket	Sekretariat Daerah
171	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan pembangunan RUMAH Dinas Koramil Petungkriyono	Desa Kauman, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Yosorejo	1 paket	Sekretariat Daerah
172	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	SD Tembelangnungung kurang ruang kelas	Desa Tembelangnungung, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Tembelangnungung	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
173	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase karanganyar - lolong rusak	Desa Lolong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Lolong	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
174	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Rusaknya Drainase Lebakbarang-Timbangarsari	Desa Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Lebakbarang	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
175	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Senderan kali menyep sering longsor	Desa Depok, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Depok	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
176	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan pembangunan masjid Al AMANah Desa Depok	Desa Depok, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Depok	1 paket	Sekretariat Daerah
177	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Pembangunan Masjid Baiturohman Dukuh Sengkarang	Desa Karanggondang, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
178	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan TPQ Baitusalam	Desa Karanggondang, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karanggondang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
179	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Bantuan Alat Kelompok Tani Jamur	Desa Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Lebakbarang	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
180	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Ternak Karya Tani	Desa Timbangsari, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Timbangsari	1 paket	Sekretariat Daerah
181	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rusaknya jalan pertanian	Desa Wonosido, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Wonosido	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
182	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Pembangunan Masjid Al Mutaqin Desa Kutorembet	Desa Kutorembet, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Kutorembet	1 paket	Sekretariat Daerah
183	Endang Suwarningsih	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Lapangan Sepakbola AKA KAUMAN di Desa Kauman Wiradesa	Desa Kauman, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kauman	1 paket	Sekretariat Daerah
184	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Karyomukti	Desa Karyomukti, Kab. Pekalongan, Kesesi, Karyomukti	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
185	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Kendaraan roda 3 (Nozomi) TK Muslimat NU Paesan Utara, Kedungwuni Barat	Paesan Utara, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
186	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Kendaraan roda 3 (Nozomi) RA Muslimat NU Paesan Selatan, Kedungwuni Barat	Paesan Selatan, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
187	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Gembong Beringin I RT 001/001, Kedungwuni Barat	Gembong Beringin I RT 001/001, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
188	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Mushola Baitul Muttaqien Dukuh Penthol	Dukuh Penthol RT. 08 RW. 04, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pangkah	1 unit	Sekretariat Daerah
189	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum Desa Jagung	Desa Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 Paket	Dinas Perhubungan
190	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Prawasan Barat Kelurahan Kedungwuni Timur	Prawasan Barat Kelurahan Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
191	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pecentongan Kwayangan	Pecentongan Kwayangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kwayangan	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
192	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Kendaraan roda 3 (Nozomi) TPQ Birul Walidain Dukuh Kebaran Desa Tosaran Kedungwuni	Dukuh Kebaran Desa Tosaran Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tosaran	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
193	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Kendaraan roda 3 (Nozomi) TPQ Raudlotul Falah Capgawen Utara Kedungwuni Timur	Capgawen Utara Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
194	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum Desa Sukorejo	Desa Sukorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sukorejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
195	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Pembangunan Gedung Panti Asuhan Yatim Ahmad Dahlan, Muhammadiyah Wuled	Desa Wuled, Kab. Pekalongan, Tirto, Wuled	1 paket	Sekretariat Daerah
196	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP "Gembong Ceria" Kedungwuni Barat	Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
197	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Pantirejo sampai Desa Bulaksari	Desa Pantirejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Pantirejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
198	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pemeliharaan JUT dengan pembangunan talud	Desa Ponorawen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponorawen	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
199	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Zumaroh RT 003/011 Gg. Beringin 3 Gembong Selatan , Kedungwuni Barat	RT 003/011 Gg. Beringin 3 Gembong Selatan , Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
200	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Ilmiyah RT 001/012 Gg. Beringin 4 Gembong Barat, Kedungwuni Barat	RT 001/012 Gg. Beringin 4 Gembong Barat, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
201	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Bapak Teguh Sanjaya RT 001/012 Gg. Beringin4 Gembong Barat, Kedungwuni Barat	RT 001/012 Gg. Beringin4 Gembong Barat, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
202	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Istikomah RT 001/002 Gg. Beringin 4 Gembong, Kedungwuni Barat	RT 001/002 Gg. Beringin 4 Gembong, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
203	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum Desa Pantianom sampai Desa Bukur	Desa Pantianom sampai Desa Bukur, Kab. Pekalongan, Bojong, Pantianom	1 Paket	Dinas Perhubungan
204	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Nahdhiyatin RT 005/006 Kedungwuni Timur (Belakang kantor Kelurahan Kedungwuni Timur)	RT 005/006 Kedungwuni Timur (Belakang kantor Kelurahan Kedungwuni Timur), Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Sosial
205	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Bapak Fatchul Mu'is RT 002/001 No. 35 Desa Kedungpatangewu	RT 002/001 No. 35 Desa Kedungpatangewu, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungpatangewu	1 paket	Dinas Sosial
206	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Bapak Misbach Ghulam RT 001/008 Paesan Selatan, Kedungwuni Barat	RT 001/008 Paesan Selatan, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
207	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase Jalan Kabupaten di Desa Pantianom	Desa Pantianom, Kab. Pekalongan, Bojong, Pantianom	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
208	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH Desa Pantianom	Desa Pantianom, Kab. Pekalongan, Bojong, Pantianom	3 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
209	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah rumah Tidak Layak Huni Kec. Tirto	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	17 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
210	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum di Desa Randumuktiwaren	Desa Randumuktiwaren, Kab. Pekalongan, Bojong, Randumuktiwaren	1 Paket	Dinas Perhubungan
211	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Wiradesa	Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	10 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
212	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kec. siwalan	Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	3 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
213	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong bantaran sungai Desa Pantianom	Desa Pantianom, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
214	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Untuk Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Muhammadiyah Cabang Wiradesa	Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
215	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Aisyiyah Desa Werdi	Desa Werdi, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Werdi	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
216	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Kelas Baru TPQ Taaruf Petukangan	Petukangan, Kab. Pekalongan, Petukangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
217	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) TKIT "Mutiarra Umat"	Desa Wangandowo RT 02 / RW 01, Kab. Pekalongan, Wangandowo	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
218	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kec. tirto	Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	10 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
219	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Bulaksari	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulaksari	3 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
220	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Desa Wuled, Kab. Pekalongan, Tirto, Wuled	1 paket	Dinas Perhubungan
221	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Desa Dadirejo	Desa Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Perhubungan
222	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pesangan LPJU Desa Pandanarum	Desa Pandanarum, Kab. Pekalongan, Tirto, Pandanarum	1 paket	Dinas Perhubungan
223	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Desa Curug	Desa Curug, Kab. Pekalongan, Tirto, Curug	1 paket	Dinas Perhubungan
224	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB Madin Miftakhul Huda Desa Bulaksari	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Sragi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
225	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembuatan Saluran air Drainase Desa Dadirejo	Desa Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
226	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembuatan saluran air Drainase Desa Karangjampo	Desa Karangjampo, Kab. Pekalongan, Tirto, Karangjampo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
227	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rahabilitasi Ad Dahlan Muhammadiyah Kelurahan Mayangan	Kelurahan Mayangan, Kab. Pekalongan, Mayangan	1 unit	Sekretariat Daerah
228	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Rehabilitasi Mushola Miftahul Soleh Desa karanganyar RT.05 RW.02	RT. 05 RW. 02 Desa Karanganyar, Kab. Pekalongan, Tirto, Karanganyar	1 unit	Sekretariat Daerah
229	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum Desa Bulaksari	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulaksari	1 Paket	Dinas Perhubungan
230	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembuatan saluran limbah rumah tangga	RT. 02, 03 RW. 02 Desa Wuled, Kab. Pekalongan, Tirto, Wuled	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
231	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehab PONPES Mambaul Huda Pajomblangan	Pajomblangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pajomblangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
232	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan WC /sanitasi SDN Kalilembu	Kalilembu, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kalilembu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
233	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan Umum Desa Bulakpelem	Desa Bulakpelem, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 Paket	Dinas Perhubungan
234	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Hibah Pengadaan Motor Pengangkut Sampah Komunitas di Desa Wuled Kec. Tirto	Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
235	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tegalsuruh	Desa Tegalsuruh, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalsuruh	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
236	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehab ruang kelas 3 lokal SDN Kalilembu	Kalilembu, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kalilembu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
237	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Hibah Bantuan Modal Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	10 paket	Dinas Sosial
238	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Hibah Bantuan Modal Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kec Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	7 paket	Dinas Sosial
239	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Perbaikan / pembangunan sanitasi SDN Pagumenganmas	Pagumenganmas, Kab. Pekalongan, Pagumenganmas	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
240	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan tembok keamanan/ batas sungai SDN Pagumenganmas	Pagumenganmas, Kab. Pekalongan, Pagumenganmas	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
241	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi TPQ Aisyiyah Baiturrahman	Desa Kedungpatangewu, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungpatangewu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
242	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Rabat beton jalan Desa Bulaksari sampai Desa Sidosari	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulaksari	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rahabilitasi Gedung dan Halaman TPQ Siti Aisyah Cabang Bligo	Kelurahan Bligo, Kab. Pekalongan, Buaran, Bligo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
244	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid At Taqwa Dk. Sumurwatu Timur RT 15 RW 05 Ds. Sumurjomblangbogo	Dk. Sumurwatu Timur RT 15 RW 05 Ds. Sumurjomblangbogo, Kab. Pekalongan, Bojong, Sumurjomblangbogo	1 Paket	Sekretariat Daerah
245	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TPQ Aisyiyah Perum Puri Kedungwuni	Perum Puri Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
246	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan WC/sanitasi SDN Jrebengkembang	Jrebengkembang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Jrebengkembang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
247	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan Rambu-Rambu Jalan ( Trafik light ) di Jalan Raya	Jalan Raya Pekajangan Depan Masjid At-Taqwa Pekajangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Perhubungan
248	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan Rambu_Rambu Jalan raya ( Trafik Light ) di Jalan raya	Jalan raya Ambokembang Deapan Masjid Baitul Makmur Ambokembang, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 paket	Dinas Perhubungan
249	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	PJU Desa Mrican Kecamatan Sragi	Desa Mrican, Kab. Pekalongan, Mrican	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
250	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SMP/MTs)	RKB SMP N 3 Sragi	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Bulaksari	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
251	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Kauman Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 paket	Dinas Perhubungan
252	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Tegalpacing Desa Bulak Pelem	Dukuh Tegalpacing Desa Bulak Pelem, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
253	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Pengangkut sampah	Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	5 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
254	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Brondong	Desa Brondong, Kab. Pekalongan, Kesesi, Brondong	1 Paket	Dinas Perhubungan
255	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Kalimade RT 02 / RW 03	Desa Kalimade RT 02 / RW 03, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
256	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Ruang Kelas TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Sragi	Kelurahan sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
257	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Musholla Sumub Kidul	desa Sumubkidul, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumubkidul	1 paket	Sekretariat Daerah
258	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Bubak RW 04 Desa Karyomukti	Dukuh Bubak RW 04 Desa Karyomukti, Kab. Pekalongan, Kesesi, Karyomukti	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
259	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Semangu Desa Sidomulyo	Dukuh Semangu Desa Sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
260	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Kwigaran Desa Kwigaran	Dukuh Kwigaran Desa Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
261	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Linggoloyo Desa Podosari	Dukuh Linggoloyo Desa Podosari, Kab. Pekalongan, Kesesi, Podosari	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
262	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penyuluhan Kesehatan remaja Desa Rejosari	Desa Rejosari, Kab. Pekalongan, Bojong, Rejosari	1 paket	Dinas Sosial
263	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Jagung Desa Jagung	Dukuh Jagung Desa Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
264	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dukuh Bantul Desa Kesesi	Dukuh Bantul Desa Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
265	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Masjid Baiturrohim Desa Sijeruk	Desa Sijeruk, Kab. Pekalongan, Sragi, Sijeruk	1 paket	Sekretariat Daerah
266	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rahibilitasi Ruang Kelas TK PGRI Desa Kaibahan	Desa Kaibahan, Kab. Pekalongan, Kaibahan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
267	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD)	Operasional Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah Legokclile	Desa Legokclile, Kab. Pekalongan, Bojong, Legokclile	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
268	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan TPQ Desa Kaibahan	Desa Kaibahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kaibahan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
269	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju persawahan	Desa Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
270	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Menuju persawahan	Desa Kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
271	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Menuju Persawahan	Desa Sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
272	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju persawahan	Desa Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
273	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju persawahan	Desa Podosari, Kab. Pekalongan, Kesesi, Podosari	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
274	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pengadaan Mesin Penyedot Air	Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojong, Seluruh Kelurahan/Desa	4 unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
275	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pavingisasi TPQ Salmurtaufik Dukuh Kaligawe Desa Pakumbulan	Dukuh Kaligawe Desa Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Buaran, Pakumbulan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
276	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Mushola Nurul Anwar Desa Tangkil Kulon	Desa Tangkil Kulon, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Paket	Sekretariat Daerah
277	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Mushola RT.001/RW001 Desa Tangkil Kulon	RT.001/RW001 Desa Tangkil Kulon, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Paket	Sekretariat Daerah
278	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Mushola Al-Falah Desa Rengas	Desa Rengas, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Rengas	1 Paket	Sekretariat Daerah
279	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Masjid Darul Masykur Desa Tangkil Kulon	Desa Tangkilkulon, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Paket	Sekretariat Daerah
280	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Mushola As Shodiq Desa Karangdowo	Karangdowo Dukuh, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Karangdowo	1 Paket	Sekretariat Daerah
281	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah	Desa Karangdowo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Karangdowo	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
282	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase di Desa Simbangkulon Gang 2	Desa Simbangkulon Gang 2, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
283	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase di Desa Simbangkulon Gang 3	Desa Simbangkulon Gang 3, Kab. Pekalongan, Simbangkulon	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
284	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase di Desa Pakumbulan	Desa Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Buaran, Pakumbulan	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
285	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pelebaran aspal Desa Bligo	Desa Bligo, Kab. Pekalongan, Buaran, Bligo	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
286	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong Desa Wonorejo sampai Jetaklengkong	Desa Wonorejo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonorejo	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
287	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Pertigaan Jalan Simbangwetan Tanjung	Desa Simbangwetan, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangwetan	1 Paket	Dinas Perhubungan
288	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Rengas (sepanjang arah Balaidesa, TPQ dan Madrasah)	Desa Rengas, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Rengas	1 Paket	Dinas Perhubungan
289	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani Desa Pakumbulan arah ke Desa Watusalam	Desa Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Buaran, Pakumbulan	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
290	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Al Falah Desa Karangjampo	Desa Karangjampo, Kab. Pekalongan, Tirta, Karangjampo	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
291	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehab ruangan perpustakaan SDN 02 Menjangan	Desa Menjangan, Kab. Pekalongan, Bojong, Menjangan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
292	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TK Muslimat Desa Lebakbarang	Desa Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Lebakbarang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
293	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Bapak Abdi Priwiro Dukuh Sontel Desa Legokkalong Karanganyar	Dukuh Sontel Desa Legokkalong Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokkalong	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
294	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Ib Kartini Dukuh Sontel Desa Legokkalong	Dukuh Sontel Desa Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokkalong	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
295	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Bapak Dedeng Faud Hilmi Dukuh Sari RT 03/04 Rogoselo	RT 03/04 Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
296	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Bapak Cami Dukuh Plumutan RT 02/02 Rogoselo	RT 02/02 Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
297	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Bapak Samsi Dukuh Bangunrejo RT 03/02 Rogoselo	RT 03/02 Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
298	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Ibu No'umi Dukuh Sawahan Rogoselo	Dukuh Sawahan Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
299	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Ibu Ipi Supianah Dukuh Sorosido Desa Rogoselo	Dukuh Sorosido Desa Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
300	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Bapak Martono Dukuh Sicowet RT 02/06 Desa Pododadi	Dukuh Sicowet RT 02/06 Desa Pododadi, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Pododadi	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
301	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Bapak Rudini Dukuh Sari RT 03/04 Rogoselo	Dukuh Sari RT 03/04 Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
302	Sabdo. SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH Ibu Suparti Dukuh Bangunrejo RT 03/02 Rogoselo	Dukuh Bangunrejo RT 03/02 Rogoselo, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
303	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Rehab Masjid Baitul Muqorrobin Karangasem	Karangasem, Kab. Pekalongan, Talun, Karangasem	1 paket	Sekretariat Daerah
304	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah rehab Musholah Baitul Muttaqin Dukuh Kedempel Desa Harjosari	Dukuh Kedempel Desa Harjosari, Kab. Pekalongan, Doro, Harjosari	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
305	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab gedung RA Muslimat Talun	Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Talun	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
306	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Rehab Musholah Al-Ikhsan Donowangun	Donowangun, Kab. Pekalongan, Talun, Donowangun	1 paket	Sekretariat Daerah
307	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah rehab Musholah NURUL HIKMAH RT 13 RW 06 Dukuh Doro Kulon, Desa Dororejo	RT 13 RW 06 Dukuh Doro Kulon, Desa Dororejo, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 paket	Sekretariat Daerah
308	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Bantuan meeting ampli 4 unit Musholah Al-Barokah Dukuh Jambangan Pucung Batusari	Dukuh Jambangan Pucung Batusari, Kab. Pekalongan, Talun, Batusari	1 paket	Sekretariat Daerah
309	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Rehab Musholah Al-Mu"minin Dukuh Gunung Cilik Desa Songgodadi Petungkriyono	Dukuh Gunung Cilik Desa Songgodadi Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Songgodadi	1 paket	Sekretariat Daerah
310	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong Kali Gandu Desa Talun (belakang gedung NU Talun)	Kali Gandu Desa Talun (belakang gedung NU Talun), Kab. Pekalongan, Talun, Talun	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
311	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pagar TK Muslimat Krompeng	Krompeng, Kab. Pekalongan, Talun, Krompeng	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
312	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bantuan lingkungan PAUD Hidayatusibyan Karangasem (Paving, Knopi, APE)	Karangasem, Kab. Pekalongan, Talun, Karangasem	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
313	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Kalirejo-Krompeng	Kalirejo-Krompeng, Kab. Pekalongan, Talun, Krompeng	1 paket	Dinas Perhubungan
314	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Ds. Batusari-Sengare	Ds. Batusari-Sengare, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 paket	Dinas Perhubungan
315	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Ds. Sengare-Ds. Jolotigo	Ds. Sengare-Ds. Jolotigo, Kab. Pekalongan, Talun, Jolotigo	1 paket	Dinas Perhubungan
316	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Mesoyi- Desa Talun	Desa Mesoyi- Desa Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Talun	1 paket	Dinas Perhubungan
317	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Batusari – Desa Sengare	Desa Batusari – Desa Sengare, Kab. Pekalongan, Talun, Batusari	1 paket	Dinas Perhubungan
318	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Donowangun – Talun	Donowangun – Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Donowangun	1 paket	Dinas Perhubungan
319	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Air bersih Dk. Nolo Kalirejo	Dk. Nolo Kalirejo, Kab. Pekalongan, Talun, Kalirejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
320	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani Donowangun	Donowangun, Kab. Pekalongan, Talun, Donowangun	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
321	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan mesin jahit/ Obras Banjarsari	Desa Banjarsari, Kab. Pekalongan, Talun, Banjarsari	1 paket	Dinas Sosial
322	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong Dukuh Blumbang Ds. Kalirejo	Dukuh Blumbang Ds. Kalirejo, Kab. Pekalongan, Talun, Kalirejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
323	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab gedung madrasah Darussalam Dukuh Kalibakung Desa Kalirejo	Dukuh Kalibakung Desa Kalirejo, Kab. Pekalongan, Talun, Kalirejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
324	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Kantor TPQ Miftakhul Huda Batusari	TPQ Miftakhul Huda Batusari, Kab. Pekalongan, Talun, Batusari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
325	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab Gedung TPQ Dk. Nolo Kalirejo	TPQ Dk. Nolo Kalirejo, Kab. Pekalongan, Talun, Kalirejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
326	Yahya	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab	Rehab Masjid Ar Rohman Dk Krompeng Rt 03 Rw 01 Desa Krompeng, Kab. Pekalongan, Talun, Krompeng	1 Paket	Sekretariat Daerah
327	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dk Sijengkol Desa Krompeng - Desa Kaligawe Karangdadap, Kab. Pekalongan, Talun, Krompeng	1 Paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
328	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dk Doro Kulon Rt 16 Rw 14 Desa Dororejo, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
329	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Sengare - Desa Jolotigo, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 Paket	Dinas Perhubungan
330	Yahya	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab	Rehab Masjid Dk Purbo Desa Jolotigo, Kab. Pekalongan, Talun, Jolotigo	1 Paket	Sekretariat Daerah
331	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dk Sindong Rt 04 Rw 01 Desa Banjarsari, Kab. Pekalongan, Talun, Banjarsari	1 Paket	Dinas Perhubungan
332	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dk Bangun Lor RT 01 Rw 01 Desa Donowangun, Kab. Pekalongan, Talun, Donowangun	1 Paket	Dinas Perhubungan
333	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dk Mbeder Desa Batusari, Kab. Pekalongan, Talun, Batusari	1 Paket	Dinas Perhubungan
334	Yahya	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dk Nolo - Dk Blumbang Desa Kalirejo, Kab. Pekalongan, Talun, Kalirejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
335	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Penambahan Ruang Kelas PAUD/TK/RA/TPQ/KB/TPA	Penambahan ruangan PAUD KB Ulul Izmi Desa Bodas, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Bodas	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
336	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan Rehab gedung TPQ	Rehab TPQ Madin IKHYA Ulumudin Desa Lambur, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Lambur	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
337	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Talud Irigasi	Talud dijalan Kemploko Legi Dukuh Krajan Desa Wangkelan, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Wangkelang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
338	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Tangerang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Tangerang	1 Paket	Dinas Perhubungan
339	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Perhubungan
340	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Botosari, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Perhubungan
341	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Kendaraan Roda 3	Bantuan Motor Sampah Kelompok Tani Subur Makmur Desa Sambiroto, Kab. Pekalongan, Kajen, Sambiroto	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
342	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SMP/MTs)	SMP NU Kajen	Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
343	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah PONPES ASSIYFA	Nyamok Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
344	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH	Bantuan RLTH : 1. Suhrim (Dk. Sitahta RT 2 Rw 3 Desa Tenogo), 2. Wartono (Dk. Sitahta RT 1 Rw 2 Desa Tenogo), 3. Buang Raharjo (Dk. Sitahta RT 2 Rw 2 Desa Tenogo), 4. Casmidi (Dk. Sitahta RT 1 Rw 2 Desa Tenogo), Kab. Pekalongan, Paninggaran, Tenogo	4 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
345	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Al-Hidayah Desa Pekiringan Alit	Desa Pekiringan Alit, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Sekretariat Daerah
346	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PAUD QURROTA A"YUN Dukuh Kembon Pekiringan Alit	Pekiringan Alit, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
347	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	TK Muslimat Gandarum Kajen	TK Muslimat Gandarum Kajen, Kab. Pekalongan, Gandarum	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
348	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Wangkelang	Desa Wangkelang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Wangkelang	1 paket	Dinas Perhubungan
349	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Nurul Huda Desa Notogiwang	Hibah Masjid Nurul Huda Desa Notogiwang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 paket	Sekretariat Daerah
350	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani Dukuh Kembon Desa Pekiringan Alit	Dukuh Kembon Desa Pekiringan Alit, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
351	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah PONPES BUSTHANUL MANSURIA Desa Rowolaku Kajen	Desa Rowolaku Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Rowolaku	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
352	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Genset	Bantuan Genset untuk Mushola 1. Desa Kaliombo, 2. Desa Lumeneng, 3. Desa Krandegan, 4. Desa Domiyang, 5. Desa Kaliboja, 6. Desa Tenogo, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran, Seluruh Kelurahan/Desa	6 Paket	Sekretariat Daerah
353	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	MI Salafiyah Pejarakan Desa Domiyang Paninggaran	Pejarakan Desa Domiyang Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Domiyang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
354	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Kayu Bapak Turah Desa Pekiringan Alit	Desa Pekiringan Alit, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Dinas Sosial
355	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang keliling Bapak Rakhul Munib Desa Kebonagung	Desa Kebonagung, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Sosial
356	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang keliling Bapak Sepul Huda Desa Pekiringan Alit	Desa Pekiringanalit, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Dinas Sosial
357	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang keliling Bapak Bejo Desa Wonorejo	Desa Wonorejo, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 paket	Dinas Sosial
358	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang keliling Bapak Suparto Desa Tanjung kulon	Desa Tanjung kulon, Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungkulon	1 paket	Dinas Sosial
359	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang keliling Bapak Marori Desa Kebon Agung	Desa Kebon Agung, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Sosial
360	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang ayam Bapak Zakaria Desa Kutorejo	Desa Kutorejo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kutorejo	1 paket	Dinas Sosial
361	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha BANSAW (mesin gergaji) Bapak Sunoto Desa Notogiwang	Desa Notogiwang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 paket	Dinas Sosial
362	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase Jalan	Drainase Dukuh Mekar Agung Desa Kebon Agung, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
363	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan Desa Sambiroto, Kab. Pekalongan, Kajen, Sambiroto	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
364	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Kajongan, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajongan	1 Paket	Dinas Perhubungan
365	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Wonorejo, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
366	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Saka Mandiri Desa Bojongwetan	Desa Bojongwetan, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojongwetan	1 paket	Dinas Sosial
367	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan keuangan untuk pengaspalan jalan Desa Wangandowo	Desa Wangandowo, Kab. Pekalongan, Bojong, Wangandowo	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
368	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Dihan jaya sound Desa Bukur	Desa Bukur, Kab. Pekalongan, Bojong, Bukur	1 paket	Dinas Sosial
369	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Hibah Ternak	Bantuan Peternakan Sapi Desa Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
370	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan roda 3 desa babalanlor bojong	Desa Babalanlor, Kab. Pekalongan, Bojong, Babalanlor	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
371	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP : 1. Darjo (Dk. Mekar Agung Rt 1 Rw 8 Desa Kebon Agung), 2. Isro (Dk. Mekar Agung Rt 1 Rw 8 Desa Kebon Agung), 3. Rasuto (Rt 1 Rw 1 Desa Pekiringan Alit),, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 Paket	Dinas Sosial
372	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP : 1. Ayi (Banyumatis Rt 10 Rw 6 Desa Sambiroto), 2. Khotijah (Pole Panjang Rt 8 Rw 4 Desa Sambiroto), 3. Suherti (Banyumatis Rt 9 Rw 4 Desa Sambiroto), 4. Sutego (Pole Panjang Rt 8 Rw 4 Desa Sambiroto), Kab. Pekalongan, Kajen, Sambiroto	1 Paket	Dinas Sosial
373	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP : 1. Kamil (Pole Panjang Rt 8 Rw 4 Desa Sambiroto), 2. Tuti (Sambiroto Rt 1 Rw 1 Desa Sambiroto), 3. Casyati (Desa Sambiroto), 5. Erpayah (Sambiroto Rt 1 Rw 1 Desa Sambiroto),, Kab. Pekalongan, Kajen, Sambiroto	1 Paket	Dinas Sosial
374	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan gor bulutangkis di desa kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
375	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Olahraga	Penataan lapangan sepak bola di kelurahan sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
376	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Saluran Irigasi	Pembangunan irigasi pertanian di desa sumub kidul, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumubkidul	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
377	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan Drainase Jalan	Drainase ruas jalan kesesi kaliwadas, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
378	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan/ penataan tebing sekolah SDN Kalilembu	Desa Kalilembu, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kalilembu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
379	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pavingisasi SDN Jrebengkembang	Desa Jrebengkembang, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
380	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan WC/sanitasi SDN Karangdadap	Desa Karangdadap, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
381	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan pagar belakang sekolah SDN Karangdadap	Desa Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
382	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan pagar sekolah SDN Jrebengkembang	Desa Jrebengkembang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Jrebengkembang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
383	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pavingisasi halaman sekolah SDN Karangdadap	Pavingisasi halaman sekolah SDN Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
384	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TK Muslimat NU Paesen Utara	Paesen Utara, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
385	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TK Muslimat NU Kedungwuni Kelurahan Kedungwuni Timur (Belakang brimob)	Kelurahan Kedungwuni Timur (Belakang brimob), Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
386	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TK Darma Wanita Kedungkebo	Kedungkebo, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kedungkebo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
387	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TK Darma Wanita Pekajangan	Pekajangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
388	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Kendaraan Roda 3	Pengadaan motor sampah untuk desa di kec Kesesi dan desa di kec Sragi, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
389	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	Lampu Penerangan jalan di dukuh grejo desa krandon, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Perhubungan
390	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pemeliharaan Saluran Irigasi	Perbaikan saluran irigasi di desa kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
391	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	Lampu penerangan jalan ruas jagung karangrejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 Paket	Dinas Perhubungan
392	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Hibah Ternak	Bantuan ternak untuk kelompok di desa kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
393	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	Penerangan jalan umum desa kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Perhubungan
394	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dukuh Pedhek Rt 07 Rw 02 Desa Jajarwayang, Kab. Pekalongan, Bojong, Jajarwayang	1 Paket	Dinas Perhubungan
395	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Rehabilitasi Irigasi Pertanian	Perbaikan irigasi pertanian di desa podosari, Kab. Pekalongan, Kesesi, Podosari	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
396	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan Keuangan Khusus Desa	Bantuan keuangan untuk peningkatan jalan desa ujungnegoro, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
397	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU PERUM GSM Kebon Agung Kajen	PERUM GSM Kebon Agung Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Perhubungan
398	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	Penerangan lampu jalan desa bondansari, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Bondansari	1 Paket	Dinas Perhubungan
399	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Senderan sawah Desa Pandanarum	Desa Pandanarum, Kab. Pekalongan, Tirto, Pandanarum	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
400	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	Penerangan jalan umum dukuh simbang desa srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Dinas Perhubungan
401	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan tosa pengangkut sampah Desa Kampil	Desa Kampil, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kampil	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
402	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani Desa Ponolawen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponolawen	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
403	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan tosa pengangkut sampah Desa Waru Kidul	Desa Waru Kidul, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Warukidul	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
404	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan tosa pengangkut sampah Desa Simbangkulon	Desa Simbangkulon, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
405	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Al-Barokah Karangjati	Karangjati, Kab. Pekalongan, Karangjati	1 paket	Sekretariat Daerah
406	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jambanisasi	Jambanisasi untuk warga dukuh bantu desa kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Kesehatan
407	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Jalan ruas Desa Jagung Menuju Desa Karangrejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 Paket	Dinas Perhubungan
408	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Bantuan Modal Usaha kepada Masyarakat, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
409	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Hibah Tani	Bantuan ternak kambing untuk kelompok di wilayah kecamatan kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
410	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan Keuangan	Bantuan keuangan untuk peningkatan jalan desa windurojo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Windurojo	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
411	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	RKB SD Al-Burhan SimbangKulon	SimbangKulon, Kab. Pekalongan, Simbangkulon	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
412	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Bantuan modal usaha untuk masyarakat diwilayah kecamatan srage, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
413	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Bantuan modal usaha untuk masyarakat diwilayah kecamatan bojong, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojong, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
414	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU diwilayah kecamatan kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Perhubungan
415	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Ruang	Pemeliharaan Saluran Irigasi	Perbaikan derah irigasi di Desa Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
416	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Desa Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Perhubungan
417	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan	Bantuan sarana dan prasarana untuk obyek wisata Umbul sigesing desa Watugajah, Kab. Pekalongan, Kesesi, Watugajah	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
418	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Pengelolaan Pariwisata Kecamatan Doro	Seluruh Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
419	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan Keuangan	Bantuan keuangan untuk peningkatan jalan desa sukorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sukorejo	1 Paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
420	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelatihan pengelolaan Pariwisata Kecamatan Petungkriyono	Kecamatan Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Petungkriyono, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
421	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Senderan Sungai	Senderan saluran air tengah desa dari kadus 2 - kadus 3 Desa Sumub Kidul, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumubkidul	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
422	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pengadaan tenda UMKM Kecamatan Bojong	Pengadaan tenda UMKM Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojong, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
423	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pengadaan tenda UMKM Kecamatan Wiradesa	Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
424	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pengadaan tenda UMKM Kecamatan Siwalan	Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
425	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pengadaan tenda UMKM Kecamatan Wonokerto	Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
426	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pengadaan tenda UMKM Kecamatan Tirto	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
427	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan yang menghubungkan Desa Karangjati - Babalanlor	LPJU jalan yang menghubungkan Desa Karangjati - Babalanlor, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 paket	Dinas Perhubungan
428	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Ngalian	Desa Ngalian, Kab. Pekalongan, Tirto, Ngalian	1 paket	Dinas Perhubungan
429	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Pembangunan kamar mandi Masjid Karangjati	Hibah Pembangunan kamar mandi Masjid Karangjati, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 paket	Sekretariat Daerah
430	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembuatan selokan jalan utama Karangjati sampai Delektukang	Karangjati sampai Delektukang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
431	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Senderan	Senderan air dusun kliyudan desa Ketanonageng, Kab. Pekalongan, Sragi, Ketanonageng	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
432	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	OPD	Kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi opd Dindik, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
433	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjong sungai Karangjati ke sungai Ngrengas	Desa Karangjati, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
434	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (SMP/MTs)	Bantuan ruang lab IPA MTs Al-Utsmani Gejlig Kajen	Gejlig Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
435	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan non formal program pengelolaan pendidikan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
436	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab Madrasah Diniyah Awaliyah Karangjati	Karangjati, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
437	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Pembinaan	Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
438	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Pembinaan	Kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
439	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Baitul Amin di Dukuh Sandong Desa Rogoselo Kec. Doro	Dukuh Sandong, Desa Rogoselo, Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Sekretariat Daerah
440	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah pembangunan kantor Ansoruna Kabupaten Pekalongan	kantor Ansoruna Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Karangdowo	1 paket	Sekretariat Daerah
441	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan	Bantuan traktor Desa Kaliombo, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliombo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
442	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Al-Ma"ruf di Dukuh Kaso Tengah, Desa Doro, Kec. Doro	Dukuh Kaso Tengah Desa Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro	1 paket	Sekretariat Daerah
443	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid An Nur Dukuh Bligorejo, Desa Bligorejo, Kec. Doro	Dukuh Bligorejo, Desa Bligorejo, Kab. Pekalongan, Doro, Bligorejo	1 paket	Sekretariat Daerah
444	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (SMP/MTs)	Pembangunan ruang kantor guru SMP FQ Api-Api Wonokerto	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Api-Api	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
445	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	Pembangunan RKB MI Pandanarum	Desa Pandanarum, Kab. Pekalongan, Pandanarum	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
446	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD)	Bantuan Operasional TPQ Pecakaran	Desa Pecakaran, Kab. Pekalongan, Pecakaran	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
447	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TPQ An-Nur PISMA Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
448	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB RA Silirejo	Desa Silirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Silirejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
449	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Api-Api	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Api-Api	1 paket	Dinas Perhubungan
450	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Pecakaran	Desa Pecakaran, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
451	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 paket	Dinas Perhubungan
452	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembelian tossa untuk Desa Api-Api	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Api-Api	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
453	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembelian tossa untuk Desa Pecakaran	Desa Pecakaran, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pecakaran	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
454	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembelian tossa untuk Desa Wonokerto Wetan	Desa Wonokerto Wetan, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertowetan	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
455	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembelian tossa untuk Desa Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
456	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Pesanggrahan	Desa Pesanggrahan, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pesanggrahan	1 paket	Dinas Perhubungan
457	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan pagar PONPES Syarif Hidayatullah Jetak Kidul Wonopringgo	Jetak Kidul, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetakkidul	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
458	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bantuan operasional PONPES Desa Semut	Desa Semut, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Semut	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
459	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH untuk warga kurang mampu di Desa Api-Api	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Api-Api	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
460	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH untuk warga kurang mampu di Desa Pecakaran	Desa Pecakaran, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pecakaran	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
461	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH untuk warga kurang mampu di Desa Wonokerto Kulon	Desa Wonokerto Kulon, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertokulon	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
462	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha untuk warga Desa Api-Api	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Api-Api	1 paket	Dinas Sosial
463	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha untuk Desa Pecakaran	Desa Pecakaran, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pecakaran	1 paket	Dinas Sosial
464	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Desa Wonokerto Kulon	Desa Wonokerto Kulon, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertokulon	1 paket	Dinas Sosial
465	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Desa Pandanarum di Kecamatan Tirto	Desa Pandanarum di Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Pandanarum	1 paket	Dinas Sosial
466	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan untuk KUBE SORBAN MAJU SEJAHTERA Desa Pacar Tirto	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirto, Pacar	1 paket	Dinas Sosial
467	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan untuk KUBE Busur Berkah Tilompo Desa Sidorejo Tirto	Tilompo Desa Sidorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Sidorejo	1 paket	Dinas Sosial
468	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	RKB MI Salafiyah Dadirejo	Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
469	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	RKB MI An-Nur Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
470	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan rehab musholah Dukuh Kedungkebo Pecakaran	Dukuh Kedungkebo Pecakaran, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pecakaran	1 paket	Sekretariat Daerah
471	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pavingisasi halaman SD Rowoyoso 3	Desa Rowoyoso, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Rowoyoso	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
472	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan untuk KUBE TERNAK BERKAH Desa pesanggrahan	Desa pesanggrahan, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pesanggrahan	1 paket	Dinas Sosial
473	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Bantuan operasional Karang Taruna Api-Api	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Api-Api	1 paket	Sekretariat Daerah
474	Samsul Bakhri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Bantuan operasional Karang Taruna Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 paket	Sekretariat Daerah
475	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Karangdadap - Pagumenganmas	Karangdadap - Pagumenganmas, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pagumenganmas	1 paket	Dinas Perhubungan
476	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan raya Kedungwuni - Karangdadap	Kedungwuni - Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonsari	1 paket	Dinas Perhubungan
477	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan / Pembuatan Senderan kali Putih Sidodadi Kedungwuni Timur	Sidodadi Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
478	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan / Pembuatan Senderan kali Putih Pakisputih	Pakisputih, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pakisputih	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
479	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan / Pembuatan Senderan Cagawen Podo	Cagawen Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
480	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Normalisasi saluran / senderan di Kwayangan	Kwayangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kwayangan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
481	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan Saluran Cagawen s/d Kwayangan	Pembangunan Saluran Cagawen s/d Kwayangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kwayangan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
482	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan saluran Kedungwuni pasar s/d Kranji (Belakang X Brimob)	Kedungwuni pasar s/d Kranji (Belakang X Brimob), Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
483	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan saluran air Gembong Gg. Beringin Kedungwuni Barat	Gembong Gg Beringin Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
484	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Sidodadi Kedungwuni Timur	Sidodadi Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Perhubungan
485	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan saluran Kedungwuni Gembong Gg. Mawar	Gembong Gg. Mawar, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
486	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ An-Nur Jrebengkulon Desa Jrebengkembang	Jrebengkulon Desa Jrebengkembang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Jrebengkembang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
487	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehab ruang kelas berat MIs Proto I	Proto, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Proto	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
488	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehab PONPES Mamba"ul Huda Pajomblangan	Pajomblangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pajomblangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
489	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Jami" Al-Ihsan Desa Sawangan	Desa Sawangan, Kab. Pekalongan, Doro, Sawangan	1 paket	Sekretariat Daerah
490	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehab berat MI Walisongo Kwayangan Kedungwuni	Kwayangan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kwayangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
491	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD/ MI)	Rehab perpustakaan SDN Pagumenganmas	Desa Pagumenganmas, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
492	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU dari Dk. Ploso Desa Bligorejo ke Dk. Condongmlati	Dukuh Ploso Desa Bligorejo, Kab. Pekalongan, Doro, Bligorejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
493	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Saluran irigasi Persawahan Desa Bligorejo	Desa Bligorejo, Kab. Pekalongan, Doro, Bligorejo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
494	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Jaya Makmur Desa Bojongwetan	Desa Bojong wetan, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojongwetan	1 paket	Dinas Sosial
495	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan gedung TPQ di Dukuh Mojokarang Desa Kalimojosari	Dukuh Mojokarang Desa Kalimojosari, Kab. Pekalongan, Doro, Kalimojosari	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
496	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Fatayat sejahtera Sumurjomblangbogo Bojong	Sumurjomblangbogo, Kab. Pekalongan, Bojong, Sumurjomblangbogo	1 paket	Dinas Sosial
497	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Silemud Desa Kaliboja	Dukuh Silemud Desa Kaliboja, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliboja	1 Paket	Dinas Perhubungan
498	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha dagang keliling Bapak Daur Iskai Desa Kebonagung	Desa Kebon agung, Kab. Pekalongan, Kajen, Kebonagung	1 paket	Dinas Sosial
499	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Tengah Desa Botosari	Dukuh Tengah Desa Botosari, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Perhubungan
500	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Sikele Desa Sawangan	Dukuh Sikele Desa Sawangan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Perhubungan
501	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perbaikan RTLH 20 unit di Desa Winduaji	Desa Winduaji, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	20 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
502	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid At Taqwa Dukuh Binangun Desa Werdi	Dukuh Binangun Desa Werdi, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Werdi	1 Paket	Sekretariat Daerah
503	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pelatihan Kepemudaan Keterampilan Desain Grafis Di Kecamatan Wiradesa	Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
504	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengadaan bibit cabe,sayur,dan buah untuk rumah tangga di Kecamatan Sragi	Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
505	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Al Amin Desa Notogiwang	Desa Notogiwang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
506	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan tossa pengangkut sampah RW 06 Jeruksari	RW 06 Jeruksari, Kab. Pekalongan, Tirta, Jeruksari	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
507	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Sabillul Muhtadin Desa Lambanggalun	Desa Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
508	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Birrul Walidain Desa Lambanggalun	Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
509	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Bahrul Ulum Desa Bojongkoneng	Desa Bojongkoneng, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Bojongkoneng	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
510	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Roudotussalaf Desa Luragung	Desa Luragung, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Luragung	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
511	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan sarana prasarana wisata "TRIANGGULASI" Desa Sawangan	Desa Sawangan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
512	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bansos Masjid Al-Hidayah Desa Klasem	Desa Klasem, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Klesem	1 paket	Sekretariat Daerah
513	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bansos Masjid An-Nur Desa Lambanggalun	Desa Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 paket	Sekretariat Daerah
514	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid Darusalam Desa Lambanggalun	Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 paket	Sekretariat Daerah
515	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH 5 unit di Dukuh Pejarakan Desa Domiyang	Dukuh Pejarakan Desa Domiyang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Domiyang	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
516	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid Desa Lumeneng	Desa Lumeneng, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 paket	Sekretariat Daerah
517	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengadaan bibit pisang Kapendis Desa Paninggaran	Desa Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
518	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengadaan bibit pisang Desa Pakiringanageng	Desa Pakiringanageng, Kab. Pekalongan, Kajen, Pakiringanageng	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
519	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani Desa Trajumas	Desa Trajumas, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Trajumas	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
520	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan bibit Kambing untuk Kelompok Tani "TUNAS MUDA" Dukuh Kaliwisnu Desa Lumeneng	Dukuh Kaliwisnu Desa Lumeneng, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
521	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan tossa pengangkut sampah Desa Lambanggalun	Desa Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
522	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU di Dukuh Brunyah Desa Tanggeran	Dk. Brunyah Desa Tanggeran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Tangerang	1 Paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
523	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan Desa Lambur	Desa Lambur, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Lambur	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
524	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU di Dukuh Koyasa Desa Gembong	Desa Gembong, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Gembong	1 Paket	Dinas Perhubungan
525	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	RKB SD Islam Kajen	Desa Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
526	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase jalan kabupaten Desa Tenogo - Wangkelang	Desa Tenogo - Wangkelang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Tenogo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
527	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan kabupaten Desa Tenogo - Wangkelang	Desa Tenogo - Wangkelang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Tenogo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
528	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan permodalan untuk pengrajin sapu glagah di Desa Botosari	Desa Botosari, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Sosial
529	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan kabupaten Bumiroso-Lambanggelun	Bumiroso-Lambanggelun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggelun	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
530	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani Desa Karanggondang	Desa Karanggondang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Karanggondang	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
531	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Tenogo- Wangkelang	Desa Tenogo- Wangkelang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Tenogo	1 paket	Dinas Perhubungan
532	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH 15 unit di Desa Sawangan	Desa Sawangan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	15 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
533	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Bumiroso Lambanggelun	Bumiroso Lambanggelun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggelun	1 paket	Dinas Perhubungan
534	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Lumeneng	Desa Lumeneng, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 paket	Dinas Perhubungan
535	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Garungwiyoro	Desa Garungwiyoro, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Garungwiyoro	1 paket	Dinas Perhubungan
536	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Domiyang	Desa Domiyang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Domiyang	1 paket	Dinas Perhubungan
537	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Klasem	Desa Klasem, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Klesem	1 paket	Dinas Perhubungan
538	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan drainase Kecamatan Kandangserang	Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Kandangserang, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
539	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan talud Desa Garungwiyoro	Desa Garungwiyoro, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Garungwiyoro	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
540	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Gejlig	Desa Gejlig, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Perhubungan
541	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros Desa Gejlig	Desa Gejlig, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
542	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Bedagung	Desa Bedagung, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Bedagung	1 paket	Dinas Perhubungan
543	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid An-Nur Desa Bojongkoneng	Desa Bojongkoneng, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Bojongkoneng	1 paket	Sekretariat Daerah
544	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bansos Masjid Al-Hidayah Desa Garung Wiyoro	Desa Garung Wiyoro, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Garungwiyoro	1 paket	Sekretariat Daerah
545	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Nahjul Hidayah Desa Garung Wiyoro	Desa Garung Wiyoro, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Garungwiyoro	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
546	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankek pengaspalan jalan Desa Garung Wiyoro	Desa Garung Wiyoro, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Garungwiyoro	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
547	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Sukoharjo	Desa Sukoharjo, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Sukoharjo	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
548	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu Desa Karanggondang	Desa Karanggondang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Karanggondang	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
549	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Trajumas	Desa Trajumas, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Trajumas	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
550	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Bubak	Desa Bubak, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Bubak	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
551	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Wangkelang	Desa Wangkelang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Wangkelang	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
552	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Luragung	Desa Luragung, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Luragung	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
553	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan Domoyang-Notogiwang	Domoyang Notogiwang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
554	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Talud Jalan kabupaten ruas Desa Krandegan	Desa Krandegan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
555	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Lambanggalun	Desa Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
556	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Notogiwang	Desa Notogiwang, Kab. Pekalongan, Notogiwang	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
557	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Lumeneng	Desa Lumeneng, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
558	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Winduaji	Desa Winduaji, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
559	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Kaliombo	Desa Kaliombo, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliombo	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
560	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu pengaspalan jalan Desa Domiyang	Desa Domiyang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Domiyang	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
561	Suparno	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pembangunan Rumah Sakit Type D Kecamatan Talun	Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Talun, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kesehatan
562	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Musholla Baiturrohman Desa Tengengwetan	Dukuh Cangkring Kulon RT 01 / RW 08 Desa Tengengwetan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Tengengwetan	1 Paket	Sekretariat Daerah
563	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Al Ikhlas Desa Depok	Desa Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Depok	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
564	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	REhab Musholla Al Muhlisin Desa Tengengkulon	Dukuh Rembun RT 01 / RW 06 Desa Tengengkulon, Kab. Pekalongan, Siwalan, Tengengkulon	1 Paket	Sekretariat Daerah



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
565	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TK Muslimat NU Desa Siwalan	Dukuh Krengseng Desa Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
566	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Musholla Nurul Huda Desa Siwalan	Desa Siwalan RT 01 / RW 03, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan	1 Paket	Sekretariat Daerah
567	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehab Musholla Baiturrohman Desa Pait	Dk. Babadan Tugurejo RT 02 RW 05, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 Paket	Sekretariat Daerah
568	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH atas nama Bilal Desa Rembun	Dukuh Cokrah RT 01 / RW 03 Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
569	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU di sekitar Ponpes Walindo Desa Boyoteluk	Desa Boyoteluk, Kab. Pekalongan, Siwalan, Boyoteluk	1 Paket	Dinas Perhubungan
570	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan sarpras tempat wudlu dan MCK Musholla Tambihun Desa Kampil RT 10	Desa Kampil RT 10, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kampil	1 Paket	Sekretariat Daerah
571	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	TPQ Al Istiqomah Desa Jrebeng Kembang	Desa Jrebeng Kembang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Jrebengkembang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
572	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Sarana dan Prasarana Sekolah kurang nyaman untuk belajar dan mengajar	SDN 02 Desa Jetak Lengkong, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetaklengkong	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
573	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	MI.Podo	Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
574	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	MI. 1 Ambokembang	Desa Ambokembang, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
575	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya Penerangan di Malam hari	GG. 3 Dukuh Cangkring, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Perhubungan
576	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Masih banyaknya rumah warga di Kecamatan Kedungwuni yang tidak layak huni	Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
577	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Sering longsor tebing saluran	RT 18 Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
578	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan di Sekitar Masjid Al Karomah	Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Perhubungan
579	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Sering lonsornya senderan Kaligawe Penciran	Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
580	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah sarana dan Prasarana Bantuan Olahraga kepada Pemuda Desa Podo	Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Sekretariat Daerah
581	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peninggian dan rehab TK Muslimat Samborejo	Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Samborejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
582	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH (akibat bencana ROB/Banjir) Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Mulyorejo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
583	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH (akibat bencana ROB/Banjir) Desa Jeruksari	Desa Jeruksari, Kab. Pekalongan, Tirto, Jeruksari	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
584	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tegaldowo	Desa Tegaldowo, Kab. Pekalongan, Tirto, Tegaldowo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
585	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Karang Jompo	Desa Karang Jompo, Kab. Pekalongan, Tirto, Karangjompo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
586	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan senderan/Bronjong Desa Tanjung	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirto, Tanjung	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
587	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan senderan/Bronjong Desa Ngalian	Desa Ngalian, Kab. Pekalongan, Tirto, Ngalian	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
588	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Desa Ngalian	Desa Ngalian, Kab. Pekalongan, Tirto, Ngalian	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
589	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Desa Tanjung	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirto, Tanjung	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
590	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Desa Dadirejo	Desa Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
591	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Samborejo	Desa Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Samborejo	1 paket	Dinas Perhubungan
592	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Pucung	Desa Pucung, Kab. Pekalongan, Tirto, Pucung	1 paket	Dinas Perhubungan
593	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Ngalian	Desa Ngalian, Kab. Pekalongan, Tirto, Ngalian	1 paket	Dinas Perhubungan
594	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Dadirejo	Desa Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Perhubungan
595	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Sidorejo	Sidorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Sidorejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
596	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TK/PAUD Karanganyar	Desa Karanganyar, Kab. Pekalongan, Tirto, Karanganyar	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
597	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Mulyorejo	1 paket	Dinas Sosial
598	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP Desa Samborejo	Desa Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Samborejo	1 paket	Dinas Sosial
599	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP Desa Jeruksari	Desa Jeruksari, Kab. Pekalongan, Tirto, Jeruksari	1 paket	Dinas Sosial
600	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP Desa Karangjompo	Desa Karangjompo, Kab. Pekalongan, Tirto, Karangjompo	1 paket	Dinas Sosial
601	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP Desa Tegaldowo	Desa Tegaldowo, Kab. Pekalongan, Tirto, Tegaldowo	1 paket	Dinas Sosial
602	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirto, Pacar	1 paket	Dinas Sosial
603	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Mulyorejo	1 paket	Dinas Sosial
604	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Samborejo	Desa Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Samborejo	1 paket	Dinas Sosial
605	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Jeruksari	Desa Jeruksari, Kab. Pekalongan, Tirto, Jeruksari	1 paket	Dinas Sosial
606	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Tegaldowo	Desa Tegaldowo, Kab. Pekalongan, Tirto, Tegaldowo	1 paket	Dinas Sosial
607	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Karangjompo	Desa Karangjompo, Kab. Pekalongan, Tirto, Karangjompo	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
608	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirta, Pacar	1 paket	Dinas Sosial
609	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirta	Peningkatan mutu SDM/Workshop Perangkat Desa Sekecamatan Tirta	Desa Sekecamatan Tirta, Kab. Pekalongan, Tirta, Tirta, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Tirta
610	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirta	Pelatihan outbond Kepala Desa Sekecamatan Tirta	Desa Se-kecamatan Tirta, Kab. Pekalongan, Tirta, Tirta, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Tirta
611	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana prasarana Olahraga Desa Samborejo	Desa Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirta, Samborejo	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
612	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana prasarana olah raga Desa Tanjung	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirta, Tanjung	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
613	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana prasarana olah raga Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Tirta, Mulyorejo	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
614	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana prasarana olah raga Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirta, Pacar	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
615	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana prasarana olah raga Desa Pucung	Desa Pucung, Kab. Pekalongan, Tirta, Pucung	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
616	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan motor tosa sampah 2 unit Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Tirta, Mulyorejo	2 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
617	Romadhon	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaian di Kawasan Perdesaan	Pengadaan Alqon/mesin sedot air kecil Desa Mulyorejo	Desa Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Tirta, Mulyorejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
618	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Perbaikan Jalan Prawasan Barat Kedungwuni Timur	Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
619	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Perbaikan Gorong-Gorong Kranji Kedungwuni Timur	Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
620	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB Ponpes Asma"ul Chusna Kranji Kedungwuni Timur	Kranji Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
621	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Perbaikan Jalan Sidodadi Rogobayan Kedungwuni Timur	Sidodadi Rogobayan Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
622	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Jalan Kebaran Rt 01/04 Desa Tosaran	Kebaran Rt 01/04 Desa Tosaran, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tosaran	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
623	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ An-Nur Pagodean Wonopringgo	Pagodean Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
624	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Ponpes Mambaul Huda 06 Pajomblangan	Pajomblangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pajomblangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
625	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Pajomblangan	Pajomblangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pajomblangan	1 paket	Dinas Perhubungan
626	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Miftakhul Ulum Rowocacing	Rowocacing, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Rowocacing	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
627	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Kranji Kedungwuni	Kranji Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
628	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB MI 02 Kranji Kedungwuni	Dukuh Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
629	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Tangkil Tengah	Desa Tangkil Tengah, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkiltengah	1 paket	Dinas Perhubungan
630	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Kwayangan	Kwayangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kwayangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
631	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Senderan Sungai Kebonrowopucang	Kebonrowopucang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
632	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Kebonrowopucang	Kebonrowopucang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
633	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Perbaikan Gorong-Gorong Gembong Kedungwuni	Gembong Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
634	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Perbaikan Jalan Belakang Kawedanan	Jl. Raya Kedungwuni Paesan Kebumen, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
635	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB Paud Al-Wafak Gumingsir Langkap	Gumingsir Langkap, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Langkap	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
636	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan Tosa Desa Pajomblangan	esa Pajomblangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pajomblangan	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
637	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan Tosa Kelurahan Kedungwuni Barat	Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
638	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan Tosa Kelurahan Kedungwuni Timur	Kelurahan Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
639	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan Tosa Desa Pekajangan	Desa Pekajangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
640	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan Tosa Desa Pakisputih Kedungwuni	Pakisputih Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pakisputih	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
641	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SD/ MI)	Bantuan Komputer MDA Paesan	Paesan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
642	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojong	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dan Peningkatan Kapasitas Pengurusan BUMDES Kecamatan Bojong	Kecamatan Bojong, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojonglor	1 paket	Kecamatan Bojong
643	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Pelatihan untuk Petani Durian, Rambutan, dll.	Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
644	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Pelatihan untuk Pengelola Pariwisata Lokal	Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
645	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB/ Pavingisasi PAUD Anjani Desa Kertijayan	Desa Kertijayan, Kab. Pekalongan, Buaran, Kertijayan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
646	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE desa Wonoyoso	Desa Wonoyoso, Kab. Pekalongan, Buaran, Wonoyoso	1 paket	Dinas Sosial
647	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Kertijayan	Desa Kertijayan, Kab. Pekalongan, Buaran, Kertijayan	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
648	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Coprayan	Desa Coprayan, Kab. Pekalongan, Buaran, Coprayan	1 paket	Dinas Sosial
649	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Bligo	Desa Bligo, Kab. Pekalongan, Buaran, Bligo	1 paket	Dinas Sosial
650	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE Desa Watusalam	Desa Watusalam, Kab. Pekalongan, Buaran, Watusalam	1 paket	Dinas Sosial
651	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan perumahan Kedungwuni Barat	Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
652	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjongisasi Desa Kalilembu	Desa Kalilembu, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kalilembu	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
653	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Lomba Kontes Durian Unggul Lokal	Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
654	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Festival Durian Lolong	Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
655	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Jembatan dan Jalan banyak yang rusak mengganggu transportasi masyarakat	Desa Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
656	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Musholla Al Furqon	Desa Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Sekretariat Daerah
657	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Karanganyar	Pelatihan Ketrampilan remaja Putri	Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
658	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Pelatihan Ketrampilan untuk Pemuda	Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
659	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Pelatihan ketrampilan untuk remaja putri	Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karanganyar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Karanganyar
660	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Hibah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kecamatan Tirto	Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
661	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Hibah Sarana Olah raga Kecamatan wiradesa	Kec. wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
662	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Karanganyar	Pelatihan tertib administrasi PKK tingkat Desa	Kec Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
663	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Karanganyar	Pelatihan Keterampilan untuk pengurus PKK	Kec Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
664	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Karanganyar	Pembinaan dan pelatihan organisasi keagamaan	Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
665	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Karanganyar	Pencarian bakat dan minat bagi calon peserta lomba MTQ di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
666	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Karanganyar	Penjaringan, Pembinaan, dan Pelatihan bagi anak putus sekolah	Kecamatan karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
667	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Pembekalan keterampilan linmas desa di Tingkat Kecamatan	Kec Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
668	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petungkriyono	PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA	Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Kayupuring	1 paket	Kecamatan Petungkriyono
669	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petungkriyono	PELATIHAN DASAR SDM KEPARIWISATAAN PELAKU USAHA KULINER	Kec Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Kayupuring	1 paket	Kecamatan Petungkriyono
670	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petungkriyono	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KELOMPOK TANI DAN TERNAK	Kec Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Kayupuring	1 paket	Kecamatan Petungkriyono
671	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu penerangan jalan umum dukuh Yosorejo-Sibodak Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan	Dukuh Yosorejo-Sibodak Desa Yosorejo, Kab. Pekalongan, Siwalan, Yosorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
672	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Talun	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	Kec Talun, Kab. Pekalongan, Talun	1 paket	Kecamatan Talun
673	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Bogor Desa Sepok Kec.Siwalayan	Dukuh Bogor Desa Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Depok	1 paket	Dinas Perhubungan
674	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Rehab berat IPAL Komunal Perpipaan Desa Kalijambe	Desa Kalijambe, Kab. Pekalongan, Sragi, Kalijambe	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
675	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Depan Masjid Miftahul Rohman ke Timur Desa Dadirejo	Depan Masjid Miftahul Rohman ke Timur Desa Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Perhubungan
676	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan KUBE Sedep Roso Desa Kalijambe	Desa Kalijambe, Kab. Pekalongan, Sragi, Kalijambe	1 paket	Dinas Sosial
677	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan KUBE " Barokah" Desa Kalijambe	Desa Kalijambe, Kab. Pekalongan, Kalijambe	1 paket	Dinas Sosial
678	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan talud Desa Jajarwayang	Desa Jajarwayang, Kab. Pekalongan, Jajarwayang	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
679	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Pembangunan Masjid Al-Ikhsan Kel Kepatihan, Wiradesa	Masjid Al-Ikhsan Kel.Kepatihan, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kepatihan	1 paket	Sekretariat Daerah
680	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholah "Jamiatul Khoir 2 " Desa Jajarwayang	Desa Jajarwayang, Kab. Pekalongan, Jajarwayang	1 paket	Sekretariat Daerah
681	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholah "Nurus Sa"adah" Desa Babalan Kidul	Desa Babalan Kidul, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
682	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholah "Baitu Atiq Desa Bojong Minggir	Desa Bojong Minggir, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
683	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	sampah menjadi sumber penyakit, dibutuhkan Bak sampah yang terpilah sebanyak 300 Buah	Se Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
684	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Tidak adanya talud mengakibatkan longsor	Kali Pekuncen - Api-api, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
685	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah PONPES "Darrusalam" Kedungwuni	Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
686	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB PAUD Ijtihad Desa Sembung Jambu	Desa Sembung Jambu, Kab. Pekalongan, Sembungjambu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
687	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehab MIS Sembung Jambu	Sembung Jambu, Kab. Pekalongan, Sembungjambu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
688	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bantuan bibit Mangrove untuk Wisata	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Api-Api	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
689	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB MADIN Takmiliah MHS Babalan Lor	Babalan Lor, Kab. Pekalongan, Babalanlor	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
690	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah untuk Rumah Cendekia Pesanggrahan	Desa Api-Api, Kab. Pekalongan, Api-Api	1 paket	Sekretariat Daerah
691	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pavingisasi MIS Desa Ketitang Kidul	Desa Ketitang Kidul, Kab. Pekalongan, Ketitangkidul	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
692	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TPQ "Bustamul Arifin" Ketitang Kidul	Ketitang Kidul, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
693	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Penyediaan Permakanan	Lokasi Makam terkena banjir maka dibutuhkan Pengurangan	Desa Sijambe, Kab. Pekalongan, Sijambe	1 paket	Dinas Sosial
694	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Bantuan WRSE Desa Karangsari	Desa Karangsari, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
695	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan KUBE " Maju Jaya" Babalan Kidul	Babalan Kidul, Kab. Pekalongan, Babalankidul	1 paket	Dinas Sosial
696	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjongisasi tepi sungai Desa Babalan Kidul	Desa Babalan Kidul, Kab. Pekalongan, Bojong, Babalankidul	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
697	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pendangkalan Saluran di Pekuncen-Bener	Kelurahan Pekuncen, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
698	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH 8 warga Desa Menjangan	Desa Menjangan, Kab. Pekalongan, Menjangan	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
699	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU DukuhNtak-Ntak Rt09/RW.03 Desa Curug Kec.Tirto	Dukuh Ntak-Ntak Rt.09/Rw.03 Desa Curug, Kab. Pekalongan, Tirto, Curug	1 paket	Dinas Perhubungan
700	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi pengaspalan jalan Masjid Baiturokhim Wuled ke Barat Desa Wuled	Desa wuled, Kab. Pekalongan, Wuled	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
701	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Penyuluhan Kebersihan dalam pengelolaan sampah	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
702	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pengaspalan JUT (Jalan Usaha Tani) Desa Legokclile	Desa Legokclile, Kab. Pekalongan, Bojong, Legokclile	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
703	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan LPJU Desa Babalan Kidul	Desa Babalan Kidul, Kab. Pekalongan, Babalankidul	1 paket	Dinas Perhubungan
704	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Depan masjid AlHuda Desa Blimbing Wuluh Kec.Siwalayan	Depan Masjid AlHuda Desa Blimbing Wuluh, Kab. Pekalongan, Siwalan, Blimbingwuluh	1 paket	Dinas Perhubungan
705	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonopringgo	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	wonokerto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Wonopringgo
706	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab PAUD Cahaya Suci Bukur	Bukur, Kab. Pekalongan, Bojong, Bukur	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
707	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Jami"ul Huda Dukuh Sumurwatu Barat RT 02 RW 07 Sumurjomblangbogo Bojong	Dukuh Sumurwatu Barat RT 02 RW 07 Sumurjomblangbogo Bojong, Kab. Pekalongan, Sumurjomblangbogo	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
708	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Banyak rumah yang belum layak huni	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
709	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan LPJU Desa Randumuktiwaren	Desa Randumuktiwaren, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
710	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Gapuro-Balai Desa Blacanan ke selatan Desa Blacanan, Kec.Siwalayan	Gapuro-Balai Desa Blacanan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Blacanan	1 paket	Dinas Perhubungan
711	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan di malam hari	Desa Kauman, Kab. Pekalongan, Kauman	1 paket	Dinas Perhubungan
712	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan gedung Perpustakaan MIS Menjangan	Menjangan, Kab. Pekalongan, Menjangan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
713	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TK Az-Zahra Bojongminggir	Bojongminggir, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
714	Drs.H. Mochtar,MM	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Gapuro-Balai Desa Blacanan ke selatan Desa Blacanan	LPJU Gapuro-Balai Desa Blacanan ke selatan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Blacanan	1 paket	Dinas Perhubungan
715	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	Pembangunan RKB MI Al-Huda Babalan Kidul	Babalan Kidul, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
716	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan LPJU Desa Babalan Lor	Desa Babalan Lor, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
717	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB MADIN ASWAJA Bojonglor	Bojonglor, Kab. Pekalongan, Bojonglor	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
718	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Rehab Musholah Al-Karomah Bojonglor	Bojonglor, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
719	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB MADIN Hidayatul Muta"allim Jajarwayang	Jajarwayang, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
720	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TPQ A-I-Hidayah Sembungjambu	Sembungjambu, Kab. Pekalongan, Sembungjambu	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
721	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pengadaan menara air /Toren Dukuh Sijambu Desa Sembungjambu	Dukuh Sijambu Desa Sembungjambu, Kab. Pekalongan, Bojong, Sembungjambu	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
722	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TK Wahid Hasyim Wiroditan	Wiroditan, Kab. Pekalongan, Wiroditan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
723	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TPQ Al-Muttakin Dukuh Waren Randumuktiwaren	Dukuh Waren Randumuktiwaren, Kab. Pekalongan, Randumuktiwaren	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
724	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan drainase Dukuh Muten Desa Randumuktiwaren	Dukuh Muten Desa Randumuktiwaren, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
725	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pengadaan/Pembangunan bronjong tepi sungai Desa Randumuktiwaren	Desa Randumuktiwaren, Kab. Pekalongan, Randumuktiwaren	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
726	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Meubeler RAM Sembungjambu	Sembungjambu, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
727	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Irigasi pertanian rusak	Desa Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
728	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	longsornya tebing saluran	Kalimade - Ponolawen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
729	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Perhubungan



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
730	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Jalan dan jembatan di desa kaibahan rusak	Kaibahan, Kab. Pekalongan, Kaibahan	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
731	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Musholla Aljihad	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
732	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Musholla Al Mujahidin	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Sekretariat Daerah
733	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rusaknya jalan dan jembatan di desa krandon	Krandon, Kab. Pekalongan, Krandon	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
734	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rusaknya jalan dan jembatan di desa jagung	Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
735	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rusaknya jalan dan jembatan di Desa Karyomukti	Karyomukti, Kab. Pekalongan, Karyomukti	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
736	Catur Andriansah, S.Pd	FRAKSI GERINDA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesesi	Rehab Aula Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Kecamatan Kesesi
737	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	rusaknya jalan dan jembatan	podosari, Kab. Pekalongan, Podosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
738	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rusaknya jalan dan jembatan	Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
739	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rusaknya jalan dan jembatan	kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
740	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	RUsaknya jalan dan jembatan	Kesesi, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
741	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan musholla desa kwigaran	Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Sekretariat Daerah
742	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Musholla Desa Sukorejo	Sukorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sukorejo	1 paket	Sekretariat Daerah
743	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Musholla Desa Bulakpelem	Bulakpelem, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 paket	Sekretariat Daerah
744	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 paket	Dinas Perhubungan
745	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	sukorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sukorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
746	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Dinas Perhubungan
747	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bantuan Karang Taruna Desa Bulakpelem	Bulakpelem, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
748	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase Jalan	Saluran drainase gg beringin rt 03 rw 11 kedungwuni barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
749	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bantuan Karang Taruna Desa Srinahan	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
750	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase Jalan	Saluran drainase gg beringin rt 03 rw 13 kedungwuni barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
751	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Tambakroto Kec.Kajen	Desa Tambakroto, Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Tambakroto	1 paket	Dinas Perhubungan
752	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rusaknya jalan pertanian	Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
753	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rusaknya jalan pertanian	Pantirejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
754	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	rusaknya jalan pertanian	Pantirejo, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
755	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan poros desa Sabarwangi sampai Desa Kalijoyo, Kec.Kajen	Desa Sabarwangi-Desa Kalijoyo, Kab. Pekalongan, Kajen, Sabarwangi	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
756	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Rt 04 Rw 06 Desa Kedungkebo, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kedungkebo	1 Paket	Dinas Perhubungan
757	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kumuhnya permukiman	Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
758	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dusun Keberkahan Desa Kedongkebo, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kedungkebo	1 Paket	Dinas Perhubungan
759	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU gg 4 Desa Simbang Kulon, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 Paket	Dinas Perhubungan
760	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Rt 01 Rw 01 Desa Paweden, Kab. Pekalongan, Buaran, Paweden	1 Paket	Dinas Perhubungan
761	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB PAUD dan TK di Kecamatan Kesesi	Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
762	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan PJU Desa Bojong minggir	Desa Bojong minggir, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojongminggir	1 paket	Dinas Perhubungan
763	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI (SD/MI/SMP/MADIN/MTS)	Rehab Aula SDN Paweden, Kab. Pekalongan, Buaran, Paweden	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
764	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Kalijoyo Kajen	Desa Kalijoyo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kalijoyo	1 paket	Dinas Perhubungan
765	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan KUBE "Muda Bangkit" Desa Babalanlor (usaha perkebunan pisang)	Desa Babalanlor, Kab. Pekalongan, Bojong, Babalanlor	1 paket	Dinas Sosial
766	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Ikan Cupang Desa Babalankidul	Desa Babalankidul, Kab. Pekalongan, Bojong, Babalankidul	1 paket	Dinas Sosial
767	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Talud Jalan	Senderan/Talud dk Karang Sari Rt 07 Rw 03 Desa Jrebeng Kembang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Jrebengkembang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
768	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU lanjutan Dukuh Bnadungan Kulon Kelurahan Kajen	Dukuh Bandungan Kulon Kel. Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
769	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan KUBE "Kelompok Tani Tanaman Hias Manise" Desa Kalijambe	Kalijambe, Kab. Pekalongan, Sragi, Kalijambe	1 paket	Dinas Sosial
770	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan Poros Dk Pajomblangan selatan Rt 01 Rw 03 - Tosaran Dk Selatan Rt 03 Rw 03, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tosaran	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
771	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha kepada Bapak M. Baha"uddin Desa Wiroditan	Desa Wiroditan, Kab. Pekalongan, Bojong, Wiroditan	1 paket	Dinas Sosial
772	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan Poros Pegaden Tengah Rt 02 Rw 01 Dk Blumbung - Wonorejo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Pengadentengah	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
773	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha kepada Bapak M. Rofi Desa Bojongminggir	Desa Bojongminggir, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojongminggir	1 paket	Dinas Sosial
774	Masbukhin, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan RTLH atas nama Bapak Rahmat Desa Wiroditan	Desa Wiroditan, Kab. Pekalongan, Bojong, Wiroditan	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
775	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU dk Kedolan Rt 06 Rw 03 Desa Jrebengkembang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Jrebengkembang	1 Paket	Dinas Perhubungan
776	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Coprayan Rt 04 Rw 05 Gang 1, Kab. Pekalongan, Buaran, Coprayan	1 Paket	Dinas Perhubungan
777	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD/MI/MIM	Penambahan Ruang Kelas Baru MDA Al Hidayah Gembong selatan GG Beringin 3 Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
778	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Lumeneng Kec. Paninggaran	Desa Lumeneng, Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 paket	Dinas Perhubungan
779	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU gg beringin rt 02 rw 12 gembong Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Perhubungan
780	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	tebing sering longsorkaligosek	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
781	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Si Gejrot Desa Wangkelang Kec. Kandangserang	Dukuh SiGejrot Desa Wangkelanf, Kab. Pekalongan, Wangkelang	1 paket	Dinas Perhubungan
782	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid Jami" Dukuh Kebontengah Kedungpatangewu	Dukuh Kebontengah Kedungpatangewu, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungpatangewu	1 paket	Sekretariat Daerah
783	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rusaknya irigasi	Kalijambe, Kab. Pekalongan, Sragi, Kalijambe	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
784	H. Edy Haryanto, SE	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan keuangan untuk pengaspalan jalan Desa, Desa Kutorojo	Desa Kutorojo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kutorojo	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
785	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan tossa pengangkut sampah Desa Winduaji	Desa Winduaji, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
786	Mohamad Nasron	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rehab rumah dinas POLSEK Kandangserang	Kandangserang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Kandangserang	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
787	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PAUD Dian Sukma Desa Srinahan	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
788	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab PAUD Kenangga 2	Desa Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
789	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	REhab PAUD Melati Desa Kalimade	Kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
790	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab PAUD Fatimah Azzahra	Karangrejo, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
791	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab PAUD Baitul Makmur	Krandon, Kab. Pekalongan, Kesesi, Krandon	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
792	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD/ MI)	Rehab SD/MI Maarif NU	Sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
793	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Permukiman Kumuh	Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
794	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
795	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Ponolawem, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponolawen	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
796	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
797	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Sukorejo, Kab. Pekalongan, Sukorejo	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
798	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Kwigaran, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwigaran	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
799	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Paninggaran	Pelatihan Sekretari Desa Tingkat Kecamatan Paninggaran	Kec Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 paket	Kecamatan Paninggaran
800	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Paninggaran	Festival Manggis Tingkat Kecamatan Paninggaran	Kecamatan Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 paket	Kecamatan Paninggaran
801	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Hibah Pembangunan saluran sanitasi PONPES Syarif Hidayatullah Jetak Kidul	Hibah Pembangunan saluran sanitasi PONPES Syarif Hidayatullah Jetak Kidul, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetakkidul	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
802	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Saefudin Slamet RT 005/002 Desa Sastrodirjan	Desa Sastrodirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
803	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Moch. Djaeri RT 005/002 Desa Sastrodirjan	Sastrodirjan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
804	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Arifin RT 004/002 Desa Getas	Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
805	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Casmini RT 004/002 Desa Getas	Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
806	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Alfi Ilmiatun Nafi"ah Dukuh Randu RT 004/002 Desa Getas	Dukuh Randu Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
807	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Siskan Mafiroh RT 004/002 Desa Getas	RT 004/002 Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
808	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Barkah RT 004/002 Desa Getas	Desa Getas RT 004/002, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
809	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Riadlotul Mufailah Dukuh Randu RT 004/002 Desa Getas	Dukuh Randu RT 004/002 Desa Getas, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
810	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Dewi Anisa RT 004/002 Desa Getas	Desa Getas RT 04/02, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
811	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Sahadi RT 003/001 Desa Wonopringgo	RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
812	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Caswono RT 003/001 Desa Wonopringgo	Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
813	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Subandi RT 003/001 Desa Wonopringgo	Desa Wonopringgo RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
814	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Alip RT 003/001 Desa Wonopringgo	RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
815	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Budiarto RT 001/001 Desa Wonopringgo	RT 001/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
816	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Mugiri RT 003/001 Desa Wonopringgo	Desa Wonopringgo RT 03/01, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
817	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Dasi'un RT 003/001 Desa Wonopringgo	Desa Wonopringgo Rt 03/01, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
818	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Sukhayat RT 010/004 Desa Wonopringgo	RT 010/004 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
819	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Subandi RT 010/004 Desa Wonopringgo	RT 10/04 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
820	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha ternak kambing Bapak Rismanto RT 003/001 Desa Wonopringgo	RT 3/1 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
821	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Siswanto RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Siswanto RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
822	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Musafir Taufik RT 002/001 Desa Wonopringgo	Bapak Musafir Taufik RT 002/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
823	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Ibu Dimyati RT 003/001 Desa Wonopringgo	Ibu Dimyati RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
824	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Nasrullah RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Nasrullah RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
825	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Firzan Afandi RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Firzan Afandi RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
826	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Nurkholid RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Nurkholid RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
827	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Amat Rokib RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Amat Rokib RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
828	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Sidik Raharjo RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Sidik Raharjo RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
829	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Heri Setiawan RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Heri Setiawan RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
830	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha budidaya ikan air tawar Bapak Nirwan RT 003/001 Desa Wonopringgo	Bapak Nirwan RT 003/001 Desa Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Sosial
831	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Ali Imron RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Ali Imron RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
832	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Rochlani RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Rochlani RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
833	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Saekhu RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Saekhu RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
834	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Eko Supriyadi RT 011/005 Desa Rowokembu	Bapak Eko Supriyadi RT 011/005 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
835	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Agus Riyanto RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Agus Riyanto RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
836	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Mas Baekhaki RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Mas Baekhaki RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
837	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Agus Mugiono RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Agus Mugiono RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
838	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Achmad Riskon RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Achmad Riskon RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
839	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Nur Fatmawati RT 009/004 Desa Rowokembu	Ibu Nur Fatmawati RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
840	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Agus Salim RT 009/004 Desa Rowokembu	Agus Salim RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
841	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Teguh Basuki RT 007/004 Logaten Utara Desa Rowokembu	Bapak Teguh Basuki RT 007/004 Logaten Utara Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
842	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Sugeng Priyanto RT 001/001 Kwagean Cokrah	Bapak Sugeng Priyanto RT 001/001 Kwagean Cokrah, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Kwagean	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
843	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Sofyan Dukuh Kedungrejo RT 009/004 Desa Rowokembu	Bapak Sofyan Dukuh Kedungrejo RT 009/004 Desa Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
844	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Muhammad Nasir Gebruk Getas RT 008/001	Muhammad Nasir Gebruk Getas RT 008/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
845	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Zakaria Gebruk Getas RT 003/001	Bapak Zakaria Gebruk Getas RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
846	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Zamroni Gebruk Getas RT 003/001	Bapak Zamroni Gebruk Getas RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
847	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Nasrullah Gebruk Getas RT 003/001	Bapak Nasrullah Gebruk Getas RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Getas	1 paket	Dinas Sosial
848	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Mizaroh Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 001/001	Ibu Mizaroh Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 001/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
849	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Edy Syam Desa Sastrodirjan RT 003/001	Bapak Edy Syam Desa Sastrodirjan RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
850	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Sri Umi Desa Sastrodirjan RT 002/001	Desa Sastrodirjan RT 002/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
851	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Abdul Ghofrun Desa Sastrodirjan RT 003/001	Bapak Abdul Ghofrun Desa Sastrodirjan RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
852	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Achmad Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 003/001	Bapak Achmad Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
853	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Lukman Khakim Desa Sastrodirjan RT 001/001	Bapak Lukman Khakim Desa Sastrodirjan RT 001/001, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
854	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Jamalah Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 002/001	Bapak Jamalah Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 002/001, Kab. Pekalongan, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
855	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Sumiati Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 001/001	Sumiati Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 001/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
856	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Ahmad Fadloli Desa Sastrodirjan RT 002/001	Bapak Ahmad Fadloli Desa Sastrodirjan RT 002/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
857	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak adanya irigasi di Dk. Dopleng	Desa Wonosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Wonosari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
858	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Nadliroh Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 002/001	Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 002/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
859	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Ibu Imtikhanah Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 003/001	Ibu Imtikhanah Dukuh Wonolobo Desa Sastrodirjan RT 003/001, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Sosial
860	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
861	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Zaenal Abidin Kwagean Kaum RT 004/003	Kwagean Kaum RT 004/003, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Kwagean	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
862	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Ach. Yasir Kwagean RT 005/002	Bapak Ach. Yasir Kwagean RT 005/002, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Kwagean	1 paket	Dinas Sosial
863	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Pembangunan Masjid Baiturohman	Karanggondang, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karanggondang	1 paket	Sekretariat Daerah
864	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Zaenudin Mudinan Rowokembu RT 006/003	Bapak Zaenudin Mudinan Rowokembu RT 006/003, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Sosial
865	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Aminudin Dukuh Sebetek RT 010/004 Galang Pengampon	Bapak Aminudin Dukuh Sebetek RT 010/004 Galang Pengampon, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Galangpengampon	1 paket	Dinas Sosial
866	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	sarana prasarana pertanian rusak	Desa Kulu, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Kulu	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
867	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Penjual Mie Bapak Musakhirin Pekajangan Gg. 5 Nomor 26 RT 004/002	Bapak Musakhirin Pekajangan Gg. 5 Nomor 26 RT 004/002, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pekajangan	1 paket	Dinas Sosial
868	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kesenian Kuda Lumping	Desa Limbangan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Limbangan	1 paket	Sekretariat Daerah
869	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Penjual Mie Bapak Khamim Jalan Raya Nomor 7 Ambokembang RT 019/009	Bapak Khamim Jalan Raya Nomor 7 Ambokembang RT 019/009, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 paket	Dinas Sosial
870	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Limbangan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Limbangan	1 paket	Dinas Perhubungan
871	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan umum	karangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Dinas Perhubungan
872	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	Banjarejo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Banjarejo	1 paket	Dinas Perhubungan
873	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan umum	Wonosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Wonosari	1 paket	Dinas Perhubungan
874	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	Desa Sokosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Sokosari	1 paket	Dinas Perhubungan
875	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah kepada Masjid An Noor	Desa Karangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Sekretariat Daerah
876	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah tidak sehat	Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karanganyar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
877	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi TPQ At Taqwa 01 Dk Gumingsir	Desa Gutomo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
878	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	tidak adanya senderan tebing di NII Sampel Desa Lolong	Desa Lolong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Lolong	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
879	Budi Santosa	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Yoga Dwi Jayanto RT 001/001 Kwagean Cokrah	Bantuan modal usaha konveksi Bapak Yoga Dwi Jayanto RT 001/001 Kwagean Cokrah, Kab. Pekalongan, Kwayangan	1 paket	Dinas Sosial
880	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RKB TPQ Muslimat NU Lolong	Desa Lolong, Kab. Pekalongan, Lolong	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
881	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Talud Jalan kabupaten di Desa Sidomukti	Desa Sidomukti, Kab. Pekalongan, Sidomukti	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
882	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Gutomo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 paket	Dinas Perhubungan
883	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	kayugeritan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
884	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan umum	lolong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Lolong	1 paket	Dinas Perhubungan
885	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	menimnya penerangan jalan	Desa Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokalong	1 paket	Dinas Perhubungan
886	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tidak adanya irigasi pertanian	Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokalong	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
887	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Tidak adanya modal kerja warga	Karanganyar, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
888	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Ndarini Richana Gg. Beringin 1 RT 003/001 Gembong Utara, Kedungwuni Barat	Gg. Beringin 1 RT 003/001 Gembong Utara, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
889	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Bapak Abdul Ghofar RT 01/010Gg Beringin 2 Gembong Utara, Kedungwuni Barat	RT 01/010 Gg Beringin 2 Gembong Utara, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
890	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Kerja Warga	Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
891	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Muslimah RT 01/13 Gembong Beringin 3, Kedungwuni Barat	RT 01/13 Gembong Beringin 3, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
892	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Tidak adanya modal kerja warga	Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Talun, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
893	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Retnowati RT 001/012 Gg. Beringin 4 Gembong Barat, Kedungwuni Barat	RT 001/012 Gg. Beringin 4 Gembong Barat, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
894	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Tidak adanya modal kerja	Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Petungkriyono, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
895	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Bapak Sabikhis Gg. Beringin 3 RT 001/001 Gembong Barat, Kedungwuni Barat	Gg. Beringin 3 RT 001/001 Gembong Barat, Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
896	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Tidak adanya modal kerja	Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
897	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Pembangunan Masjid Ar Rahman Desa Songgodadi	Desa Songgodadi, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Songgodadi	1 paket	Sekretariat Daerah
898	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Roikhatul Jannah RT 001/008 Prawasan Timur	RT 001/008 Prawasan Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni Timur	1 paket	Dinas Sosial
899	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha Tani Tosaran	Tosaran, Kab. Pekalongan, Tosaran	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
900	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Ternak Harapan Mulia Desa Tlogopakis	Tlogopakis, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Tlogopakis	1 paket	Sekretariat Daerah
901	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan saluran irigasi di Desa Bubak	Desa Bubak RT 02 RW 01, Kab. Pekalongan, Bubak	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
902	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Sender kali sebelah selatan Maqbaroh Pajomblangan	Pajomblangan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
903	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan talud pengaman tebing Desa Kayupuring	KAYupuring, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Kayupuring	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
904	Fatkiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Maryam Gembong Beringin 2 Kedungwuni Barat	Gembong Beringin 2 Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
905	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Ternak Desa Mesoyi	Desa Mesoyi, Kab. Pekalongan, Talun, Mesoyi	1 paket	Sekretariat Daerah
906	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan saluran irigasi di Desa Trajumas	Dukuh Purwodadi Desa Trajumas, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Trajumas	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
907	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Ternak Desa Lemah abang	Desa Lemahabang, Kab. Pekalongan, Doro, Lemahabang	1 paket	Sekretariat Daerah
908	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanganyar	Pembangunan Polsek Karanganyar	Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Kecamatan Karanganyar
909	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Songgodadi, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Songgodadi	1 paket	Dinas Perhubungan
910	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Sengare, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 paket	Dinas Perhubungan
911	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Desa Batusari, Kab. Pekalongan, Talun, Batusari	1 paket	Dinas Perhubungan
912	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Mesoyi, Kab. Pekalongan, Talun, Mesoyi	1 paket	Dinas Perhubungan
913	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Kelompok Tani Desa Dororejo	Dororejo, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 paket	Sekretariat Daerah
914	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Untuk Kelompok Tani Rejo Sukses	Dororejo, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
915	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan untuk Kelompok Tani Berkah Utomo	Desa Gutomo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 paket	Sekretariat Daerah
916	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RKB TPQ Al - MUTTAQIN di Desa Kebonrowopucang RT. 02 / RW. 01, Kec. Karangdadap	Desa Kebonrowopucang RT. 02 / RW. 01, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
917	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	bantuan kelompokk tani Siwi Makmur	Mesoyi, Kab. Pekalongan, Talun, Mesoyi	1 paket	Sekretariat Daerah
918	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Dukuh Bontotan Kidul RT.01/ RW.06, Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	Dukuh Bontotan Kidul RT.01/ RW.06, Desa Kebonrowopucang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	1 paket	Dinas Perhubungan
919	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Ruang	Rehabilitasi Saluran Irigasi di Desa Pegandon (Belakang SDN Pegandon), Kec. Karangdadap	Desa Pegandon (Belakang SDN Pegandon), Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pegandon	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
920	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Perkuatan Tebing Sungai Selokan di Desa Pegandon RT.05/RW.03, Kec. Karangdadap	Desa Pegandon RT.05/RW.03, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
921	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan gedung Majelis An-Nidhomiyah Desa Sidorejo Kecamatan Tirto	Desa Sidorejo Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Sidorejo	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
922	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan Rehab TK Pertiwi Dukuh Babadan Desa Pait	Dukuh Babadan Desa Pait, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
923	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Yosorejo dengan Desa Blacanan	Desa Yosorejo dengan Desa Blacanan, Kab. Pekalongan, Yosorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
924	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Tengeng Kulon dengan Desa Rembun	Desa TengengKulon dengan Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
925	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Tengeng Wetan dengan Desa Tengeng Kulon	Desa Tengeng Wetan dengan Desa Tengeng Kulon, Kab. Pekalongan, Tengengkulon	1 paket	Dinas Perhubungan
926	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Pintu Air di Dukuh Rowoputih, Desa Pagumengan Mas, Kec. Karangdadap, Pagumenganmas	Dukuh Rowoputih, Desa Pagumengan Mas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pagumenganmas	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
927	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Modal Usaha	Desa Srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 paket	Dinas Sosial
928	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Blacanan dengan Desa Depok	Desa Blacanan dengan Desa Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Depok	1 paket	Dinas Perhubungan
929	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Boyoteluk Dengan Desa Depok	Desa Boyoteluk Dengan Desa Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Boyoteluk	1 paket	Dinas Perhubungan
930	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal usaha	Kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 paket	Dinas Sosial
931	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Krandon, Kab. Pekalongan, Kesesi, Krandon	1 paket	Dinas Sosial
932	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Tunjungsari Siwalan dengan Desa Wiradesa, Wiradesa	LPJU yang menghubungkan Desa Tunjungsari Siwalan dengan Desa Wiradesa, Wiradesa, Kab. Pekalongan, Siwalan, Tunjungsari	1 paket	Dinas Perhubungan
933	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Kaibahan, Kab. Pekalongan, Kaibahan	1 paket	Dinas Sosial
934	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha	karangrejo, Kab. Pekalongan, Karangrejo	1 paket	Dinas Sosial
935	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha	watugajah, Kab. Pekalongan, Kesesi, Watugajah	1 paket	Dinas Sosial
936	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	bantuan modal usaha	Jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 paket	Dinas Sosial
937	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Bantuan rehab TK Muslimat NU Dukuh Tausit Desa Pait	Dukuh Tausit Desa Pait, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
938	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan MODal Usaha	Langensari, Kab. Pekalongan, Kesesi, Langensari	1 paket	Dinas Sosial
939	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Dukuh Rembun Suci Desa Rembun	Dukuh Rembun Suci Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 paket	Dinas Perhubungan
940	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Karyomukti, Kab. Pekalongan, Kesesi, Karyomukti	1 paket	Dinas Sosial
941	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Mushola AL - KHAIR di Desa Pegandon RT.01/RW.01 Kec. Karangdadap	Mushola AL - KHAIR di Desa Pegandon RT.01/RW.01 Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pegandon	1 paket	Sekretariat Daerah
942	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Dukuh Babadan Desa Pait dengan Desa Blimbingwuluh	Dukuh Babadan Desa Pait dengan Desa Blimbingwuluh, Kab. Pekalongan, Siwalan, Pait	1 paket	Dinas Perhubungan
943	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 paket	Dinas Sosial
944	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Pucung dengan Desa Sidorejo	Desa Pucung dengan Desa Sidorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Pucung	1 paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
945	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah rehab Musholah Al-Mahbub Dukuh Pencilotan Desa Rembun	Dukuh Pencilotan Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 paket	Sekretariat Daerah
946	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Sukorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sukorejo	1 paket	Dinas Sosial
947	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah rehab musholah At-Taufiq Dukuh Rembun Suci Desa Rembun	Dukuh Rembun Suci Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 paket	Sekretariat Daerah
948	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal usaha	Sidosari, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidosari	1 paket	Dinas Sosial
949	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan hibah rehab musholah Nurul Ulum Dukuh Rembun Lor Desa Rembun	Dukuh Rembun Lor Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 paket	Sekretariat Daerah
950	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha	Mulyorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Mulyorejo	1 paket	Dinas Sosial
951	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Siwalan dengan Desa Boyoteluk	Desa Siwalan dengan Desa Boyoteluk, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan	1 paket	Dinas Perhubungan
952	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Pantirejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Pantirejo	1 paket	Dinas Sosial
953	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Senderan / Talud di Dukuh Kebondalem RT.09/RW.04, Desa Pangkah, Kec. Karangdadap	Dukuh Kebondalem RT.09/RW.04, Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pangkah	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
954	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Bondansari dengan Dukuh Babadan Desa Pait	Desa Bondansari dengan Dukuh Babadan Desa Pait, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
955	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Modal Usaha	Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 paket	Dinas Sosial
956	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Tunjungsari dengan Desa Blimbing Wuluh	Desa Tunjungsari s/d Desa Blimbing Wuluh, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
957	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Boyoteluk Desa Werdi	Desa Boyoteluk Desa Werdi, Kab. Pekalongan, Siwalan, Boyoteluk	1 paket	Dinas Perhubungan
958	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Karanganyar dengan Desa Wuled Kecamatan Tirta	Desa Karanganyar dengan Desa Wuled Kecamatan Tirta, Kab. Pekalongan, Tirta, Karanganyar	1 paket	Dinas Perhubungan
959	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU yang menghubungkan Desa Pait dengan Desa Yosorejo	Desa Pait dengan Desa Yosorejo, Kab. Pekalongan, Siwalan, Yosorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
960	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Desa Wonokeri, Kec. Wonopringgo	Desa Wonokeri, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
961	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU jalan Walisongo Desa Rembun	jalan Walisongo Desa Rembun, Kab. Pekalongan, Siwalan, Rembun	1 paket	Dinas Perhubungan
962	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Jetak Lengkong Kec. Wonopringgo	Desa Jetak Lengkong Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
963	Dodiek Prasetyo	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan modal usaha	Kauman, Kab. Pekalongan, Kauman	1 paket	Dinas Sosial
964	H. Saeful Bahri, S.Ag	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Kelurahan Gumawang	Kelurahan Gumawang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 paket	Dinas Perhubungan
965	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha	Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
966	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan kesehatan	Kauman, Kab. Pekalongan, Kauman	1 paket	Dinas Sosial
967	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	pemukiman kumuh	Kauman, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kauman	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
968	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Pemasaran hasil kerajinan	Karangjati, Kab. Pekalongan, Karangjati	1 paket	Dinas Sosial
969	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pelatihan ketrampilan	Karangjati, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
970	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Peralatan Mesin Jahit di Desa Pegandon Kec. Karangdadap	Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pegandon	1 paket	Dinas Sosial
971	Abdul Adhim, S.Pd.I	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholah Baitullah Desa Bojonglor	Desa Bojonglor, Kab. Pekalongan, Bojong, Bojonglor	1 paket	Sekretariat Daerah
972	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) Ruas Jalan Pegandon Menuju Kebonsari, Kec. Karangdadap	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) Ruas Jalan Pegandon Menuju Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pegandon	1 paket	Dinas Perhubungan
973	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Duku Gendogo, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Bondansari	1 paket	Dinas Perhubungan
974	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman kumuh	Tirto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
975	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
976	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Wonokeri Kec. Wonopringgo	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Wonokeri Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Perhubungan
977	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman kumuh	Siwalan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
978	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman Kumuh	Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
979	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid	Wiradesa, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
980	Drs.H. Abdul Munir	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid Jami" Kyai Mojo Kebontengah	Masjid Jami" Kyai Mojo Kebontengah, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungpatangewu	1 paket	Sekretariat Daerah
981	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
982	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
983	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
984	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid	Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
985	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla	Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
986	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla	wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
987	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla	Siwalan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
988	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Bantuan Traktor Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo	Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetaklengkong	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
989	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla	Tirto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
990	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Senderan / Talud Jalan Poros Desa Pangkah - Desa Pagumengan Mas, Kec. Karangdadap	Desa Pagumengan Mas, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Pagumenganmas	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
991	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Senderan / Talud Jalan Poros Desa Kebonrowopucang - Desa Jrebengkembang, Kec. Karangdadap	Desa Jrebengkembang, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
992	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Peralatan Mesin Jahit di Desa Kebonsari Kec. Karangdadap	di Desa Kebonsari Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonsari	1 paket	Dinas Sosial
993	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Jaringan irigasi di Desa Pantianom	Desa Pantianom, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
994	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Jaringan irigasi di Desa Bulaksari sampai Desa Pantirejo	Desa Bulaksari, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulaksari	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
995	Nailul Hidayah, SH	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan Desa di Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap	Pengaspalan Jalan Desa di Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Kebonsari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
996	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Jaringan irigasi di Desa Bulakpelem	Dukuh Gombong, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
997	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan MUSHolla Hidayatul Muttaqien	Dukuh Wonolobo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sastrodirjan	1 paket	Sekretariat Daerah
998	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla Al Ikhlas dk Karangrejo	Wonorejo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonorejo	1 paket	Sekretariat Daerah
999	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan TPQ Ichya Ulumudin	Surobayan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Surobayan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1000	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan MI Ichya Ulumuddin	Surobayan, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Surobayan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1001	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Musholla Al Mubajhidin	wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1002	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	MInimnya penerangan jalan	Kwagean, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Kwagean	1 paket	Dinas Perhubungan
1003	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Galangpengampon, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Galangpengampon	1 paket	Dinas Perhubungan
1004	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Fasilitas sarana pertanian	sastrodirjan, Kab. Pekalongan, Sastrodirjan	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1005	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Perawatan jalan	Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1006	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	perawatan jalan	Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1007	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemukiman kumuh	Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1008	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan saluran drainase (talud) Dukuh Beji Desa Sengare	Dukuh Beji, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1009	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan untuk Kelompok ternak Desa Sengare	Desa Sengare, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1010	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Penambahan ruang kelas baru (RKB) Madin "Minhajul Abidin" Desa Banjarsari	Desa Banjarsari, Kab. Pekalongan, Talun, Banjarsari	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1011	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	RT 003 Rw 02 Mrican, Kab. Pekalongan, Sragi, Mrican	1 paket	Dinas Perhubungan
1012	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Masjid di Desa Sumub kidul	Sumub kidul, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumubkidul	1 paket	Sekretariat Daerah
1013	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Tebing dibelakang bali desa sumub kidul longsor	Sumubkidul, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1014	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	Rt 02/04 Sumub kidul, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumubkidul	1 paket	Dinas Perhubungan
1015	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan tempuran-krasak	Krasak, Kab. Pekalongan, Sragi, Krsakageng	1 paket	Dinas Perhubungan
1016	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	Bulakpelem, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 paket	Dinas Perhubungan
1017	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pengecoran jalan Rt 02/3	Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1018	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan winong rt 02/06 sumub lor	sumub lor, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumublor	1 paket	Dinas Perhubungan
1019	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan bak sampah	Kedung jaran, Kab. Pekalongan, Sragi, Kedungjaran	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1020	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bak sampah	Tegal Iontar, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalontar	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1021	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	tegalontar, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalontar	1 paket	Dinas Perhubungan
1022	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan musholla/penataan lingkungan untuk kawasan wisata "Karangsriti" Petungkriyono	Desa Tlogopakis, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Tlogopakis	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1023	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	fasiltas sarana pertanian	Tegalontar, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalontar	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1024	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan untuk perkumpulan Kelompok ternak Indrokilo Desa Talun	Desa Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Talun	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1025	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	Tegalsuruh rt 03/08 s/d rt 02/07, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalsuruh	1 paket	Dinas Perhubungan
1026	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan talud dari Desa Talun sampai Dk. Nolo Desa Kalirejo	Desa Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Talun	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1027	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	fasilatas sarana pertanian	Tegalsuruh, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalsuruh	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1028	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	fasilatas sarana pertanian	Banjardowo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwasen	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1029	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TPQ Al Mutaqien	Binangun Kwasen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwasen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1030	Haryanto	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tidak ada sumber air bersih	Kwasen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kwasen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1031	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan talud Desa Tlogopakis	Desa Tlogopakis, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Tlogopakis	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1032	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonokerto	Fokus pada penanganan banjir	wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Wonokerto
1033	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha	wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
1034	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Minimnya penerangan jalan	wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
1035	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengelolaan sampah dengan container, bak atau tonmg sampah	wonokerto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1036	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	DED penanganan banjir	wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1037	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	fokus pada penanganan banjir	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Tirto
1038	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Bulakpelem	Desa Bulakpelem, Kab. Pekalongan, Sragi, Bulakpelem	1 Paket	Dinas Perhubungan
1039	SUPRIYATI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan sanderan/talud Dk. Dranan Desa Yosorejo	Dukuh Dranan, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Yosorejo	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1040	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penataan lingkungan kumuh	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1041	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Penggadaan ambulan atau mobil kesehatan	Tirto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kesehatan
1042	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Penggadaan ambulan atau mobil kesehatan	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kesehatan



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1043	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Khitanan massal bagi anak tidak mampu	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kesehatan
1044	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Khitanan massal	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kesehatan
1045	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
1046	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	minimnya penerangan jalan	tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
1047	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Penggadaan kontainer, gerobak dan tong sampah	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1048	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	Penggadaan pompa air untuk mengatasi banjir	tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Tirto
1049	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan umum	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
1050	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Penggadaan kontainer, gerobak dan tong sampah	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1051	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Sunatan massal	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kesehatan
1052	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
1053	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan RKB TPQ Miftahul Ulum	Dukuh Kebonagung, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1054	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penataan lingkungan kumuh	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1055	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pengadaan Genset untuk Masjid Desa Rengas	Desa Rengas, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Rengas	1 Unit	Sekretariat Daerah
1056	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pengadaan genset untuk Masjid Desa Tangkilkulon	Desa Tangkilkulon, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Unit	Sekretariat Daerah
1057	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pengadaan Genset untuk Masjid Desa Tangkiltengah	Desa Tangkiltengah, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkiltengah	1 Unit	Sekretariat Daerah
1058	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pengadaan Genset untuk Masjid Desa Coprayan	Desa Coprayan, Kab. Pekalongan, Buaran, Coprayan	1 Unit	Sekretariat Daerah
1059	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pengadaan Genset untuk Masjid Desa Bodas	Desa Bodas, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Bodas	1 Unit	Sekretariat Daerah
1060	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pengadaan Genset untuk Musholla An Nawawi Desa Karangdowo	Dukuh Gentongan Desa Karangdowo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Karangdowo	1 Unit	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1061	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Kwayangan	Desa Kwayangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kwayangan	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1062	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan gerobak dagang	Karangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Dinas Sosial
1063	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan Gerobak Dagang	Banjarejo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Banjarejo	1 paket	Dinas Sosial
1064	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	sarana pertanian	Banjarejo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Banjarejo	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1065	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Tangkilkulon	Desa Tangkilkulon, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1066	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan keuangan desa wonosari untuk pengaspalan jalan lingkungan	Wonosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Wonosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1067	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Tangkiltengah	Desa Tangkiltengah, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkiltengah	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1068	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan keuangan desa telogohendro untuk pengaspalan jalan lingkungan	Telogohendro, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Tlogohendro	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1069	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Simbangkulon	Desa Simbangkulon, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1070	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan	Wonosari, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
1071	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Simbangwetan	Desa Simbangwetan, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangwetan	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1072	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bankeu desa kayupuring untuk pengaspalan jalan	Kayupuring, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Kayupuring	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1073	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Pakumbulan	Desa Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Buaran, Pakumbulan	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1074	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Karangdadap	Desa Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1075	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan kepada SSB Bina Muda Karangsari	Karangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 Paket	Sekretariat Daerah
1076	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan poros jalan karangsari-sokosari	Karangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1077	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Kelurahan Kedungwuni Timur	Kelurahan Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1078	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	penerangan jalan umum	Sokosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Sokosari	1 paket	Dinas Perhubungan
1079	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Kedungwuni Barat	Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1080	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	penerangan jalan	Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokalong	1 paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1081	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Karangdadap	Desa Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1082	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kebonrowopucang	Desa Kebonrowopucang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonrowopucang	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1083	AHMAD MUZAKI	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pekerjaan Drainase/saluran pembuangan di Desa Sampih	Desa sampih, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sampih	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1084	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitas Usaha Mikro Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan UMKM/Menjahit Ibu-ibu Aisyiyah Kec. Wiradesa	Kec. wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1085	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan	sidomukti, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Sidomukti	1 paket	Dinas Perhubungan
1086	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan	Gutomo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 paket	Dinas Perhubungan
1087	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Kebonsari	Desa Kebonsari, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kebonsari	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1088	HERU GUNAWAN	FRAKSI PAN	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitas Usaha Mikro Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan UMKM/Menjahit Ibu-ibu di Kecamatan Tirto	Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1089	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	saluran irigasi pedesaan	Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokalong	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1090	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pakumbulan	Desa Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Buaran, Pakumbulan	1 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1091	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Coprayan	Desa Coprayan, Kab. Pekalongan, Buaran, Coprayan	3 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1092	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Simbangkulon	Desa Simbangkulon, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1093	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP/MTs)	RKB MTs Maarif Karanganyar	Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karanganyar	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1094	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tangkiltengah	Desa Tangkiltengah, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkiltengah	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1095	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan	Batursari, Kab. Pekalongan, Talun, Batursari	1 paket	Dinas Perhubungan
1096	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan	Kayupuring, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Kayupuring	1 paket	Dinas Perhubungan
1097	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tangkilkulon	Desa Tangkilkulon, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	3 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1098	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Masjid Baiturrohim Desa Kutorojo	RT. 02 RW.01 Jalan Desa Kutorojo, Kab. Pekalongan, Kajen, Kutorojo	1 paket	Sekretariat Daerah
1099	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan	Desa Songgodadi, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Songgodadi	1 paket	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1100	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Banque Desa Karang Sari untuk Drainase Jalan lingkungan	Karang Sari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karang Sari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1101	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Rengas	Desa Rengas, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Rengas	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1102	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Banque Desa Legok kalong untuk Pengaspalan jalan lingkungan	Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokkalong	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1103	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Bantuan Motor Roda 3 untuk angkutan sampah	Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokkalong	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1104	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Air bersih	Legokkalong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Legokkalong	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1105	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungwuni Barat	Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1106	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungwuni Timur	Kelurahan Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1107	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	penerangan jalan	Kayugeritan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Kayugeritan	1 paket	Dinas Perhubungan
1108	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Banque Desa KAYu geritan untuk Pengaspalan jalan lingkungan	Kayugeritan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Kayugeritan	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1109	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Bener	Kelurahan Bener, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Bener	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1110	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengaspalan jalan lingkungan sokosari	Sokosari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Sokosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1111	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengaspalan lingkungan	karang Sari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karang Sari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1112	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengaspalan jalan lingkungan songgodadi	Songgodadi, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Songgodadi	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1113	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengaspalan jalan lingkungan	Batusari, Kab. Pekalongan, Talun, Batusari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1114	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Jalan sengare - Jolotigo	Sengare, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1115	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan	Sengare, Kab. Pekalongan, Talun, Sengare	1 paket	Dinas Perhubungan
1116	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TK Tunas Harapan Desa Sokosari	Sokosari, Kab. Pekalongan, Sokosari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1117	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Ternak untuk Kelompok Tunas Muda	Wringing Ageng, Kab. Pekalongan, Doro, Wringingagung	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1118	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan Mesin potong rumput untuk lapangan Desa Tegalsuruh	Desa Tegalsuruh, Kab. Pekalongan, Sragi, Tegalsuruh	1 Unit	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1119	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan Pagar bumi SDN Karangsari 01	SD Krangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1120	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB Ponpes Nurul Huda Simbangkulon	Desa Simbangkulon, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1121	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Talud	Limangan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Limangan	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1122	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Talud Jalan	Limangan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Limangan	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1123	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	penerangan jalan	Limangan, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Limangan	1 paket	Dinas Perhubungan
1124	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pelebaran Jalan Karangondang-Lolong	Karangondang, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangondang	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1125	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Ternak untuk kelompok Maju Jaya	Telogopakis, Kab. Pekalongan, Petungkriyono, Tlogopakis	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1126	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan ternak untuk kelompok Tirta Sari Bumi Karangsari	Karangsari, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karangsari	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1127	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan Pagar Bumi dan MCK SDN Gutomo 01	Gutomo, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Gutomo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1128	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengaspalan jalan lingkungan	Lolong, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Lolong	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1129	Taufiq Rizal	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengaspalan jalan lingkungan	Sidomukti, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Sidomukti	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1130	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pelatihan peningkatan ketrampilan untuk perempuan berbasis dapil	-, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	5 Paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1131	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Yayasan Al Usmani Gejlig Kajen	Desa Gejlig, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 Paket	Sekretariat Daerah
1132	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB MDA Takmiliah Ar Rozaqiyyah Ds Coprayan RT 017 RW 006	Desa Coprayan RT 017 RW 006, Kab. Pekalongan, Buaran, Coprayan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1133	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Hibah Ternak	Bantuan Kepada kelompok ternak bina usaha bersama desa pantirejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Pantirejo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1134	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan Hibah Ternak	Bantuan Kepada Kelompok ternak bina usaha mandiri desa pantirejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Pantirejo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1135	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hibah Benih Perkebunan)	Bantuan Bibit Perkebunan	Bantuan kepada kelompok tani makaryo desa ponolawen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponolawen	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1136	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP Desa srinahan : 50 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Dinas Sosial
1137	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP desa sidomulyo : 20 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1138	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP desa kalimade : 20 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 Paket	Dinas Sosial
1139	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP desa ponolawen : 5 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponolawen	1 Paket	Dinas Sosial
1140	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hibah Benih Perkebunan)	Bantuan Bibit Perkebunan	Bantuan kepada kelompok tani triwis maju makmur desa kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1141	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Masjid	Bantuan kepada masji Al hikmah dusun semampir, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Sekretariat Daerah
1142	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Mushola	Bantuan kepada musola Al mujahidin desa srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Sekretariat Daerah
1143	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada desa watupayung : 20 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Watupayung	1 Paket	Dinas Sosial
1144	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU desa watupayung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Watupayung	1 Paket	Dinas Perhubungan
1145	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU desa kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 Paket	Dinas Perhubungan
1146	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Mushola	Bantuan kepada Musola Al furqon dukuh serkam desa srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Sekretariat Daerah
1147	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Mushola	Bantuan kepada musola Al Anwar dukuh waringan desa sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Sekretariat Daerah
1148	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada desa sumub lor : 20 orang, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumublor	1 Paket	Dinas Sosial
1149	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Alat Kesenian	Bantuan kepada kelompok kesenian gandrungmanis ngesi tomo desa sumub lor, Kab. Pekalongan, Sragi, Sumublor	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1150	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada Desa kesesi : 20 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 Paket	Dinas Sosial
1151	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada desa karyomukti : 10 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Karyomukti	1 Paket	Dinas Sosial
1152	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Mushola	Bantuan kepada musola baitul amin dukuh brebesan desa sidosari, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidosari	1 Paket	Sekretariat Daerah
1153	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Tebing Sungai	Perkuatan tebing kali supan desa paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1154	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Bantuan kepada kelompok usaha bersama kalimade mandiri jaya Desa kalimade, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kalimade	1 Paket	Dinas Sosial
1155	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	bantuan UEP kepada desa krandon : 5 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Krandon	1 Paket	Dinas Sosial
1156	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Mushola	bantuan kepada mushola qubatul mustofa desa srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1157	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada desa sukorejo : 10 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sukorejo	1 Paket	Dinas Sosial
1158	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada desa windurojo : 10 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Windurojo	1 Paket	Dinas Sosial
1159	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan UEP kepada desa jagung : 5 orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 Paket	Dinas Sosial
1160	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Bantuan kepada kelompok usaha bersama maju sejahtera abadi desa duwet, Kab. Pekalongan, Bojong, Duwet	1 Paket	Dinas Sosial
1161	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pemeliharaan Saluran Irigasi	DED rehabilitasi jaringan irigasi desa kesesi s.d sukorejo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1162	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hibah Benih Perkebunan)	Bantuan Bibit Perkebunan	Bantuan kepada kelompok tani berkah desa sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1163	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hibah Benih Perkebunan)	Bantuan Bibit Perkebunan	Bantuan kepada kelompok tani mulya jaya bersama desa sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1164	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hibah Benih Perkebunan)	Bantuan Bibit Perkebunan	Bantuan kepada kelompok tani lestari tani makmur desa sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1165	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	KUBE	Bantuan kepada kelompok usaha bersama MANDIRI BERKAH JAYA desa sidomulyo, Kab. Pekalongan, Kesesi, Sidomulyo	1 Paket	Dinas Sosial
1166	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan Hibah Mushola	Bantuan kepada mushola baitusalam dukuh simbang desa srinahan, Kab. Pekalongan, Kesesi, Srinahan	1 Paket	Sekretariat Daerah
1167	H. SAEFUL ARIF, S.H. M.Kn.	FRAKSI GERINDA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH	RTLH Kecamatan Kesesi 10 Orang, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1168	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid BAITURROHMAN di Dukuh Bagol Desa Lemahabang, Kec. Doro	Masjid BAITURROHMAN di Dukuh Bagol Desa Lemahabang, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Lemahabang	1 paket	Sekretariat Daerah
1169	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid AL HIKMAH di Dukuh Adi Wukir Desa Randusari, Kec. Doro	Masjid AL HIKMAH di Dukuh Adi Wukir Desa Randusari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Randusari	1 paket	Sekretariat Daerah
1170	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Masjid AL HUDA di Dukuh Gumelar Desa Kutosari, Kec. Doro	Masjid AL HUDA di Dukuh Gumelar Desa Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kutosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1171	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Mushola ROIKHATUL JANNAH di Dukuh Gondorio Desa Wringinagung, Kec. Doro	Mushola ROIKHATUL JANNAH di Dukuh Gondorio Desa Wringinagung, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Wringinagung	1 paket	Sekretariat Daerah
1172	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa SawanganKec. Doro	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa SawanganKec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Sawangan	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1173	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa KalimojosariKec. Doro	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa KalimojosariKec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kalimojosari	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1174	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Mesoyi, Kec. Talun	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Mesoyi, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Mesoyi	1 paket	Sekretariat Daerah
1175	EKO PAMUJI	Fraksi Persatuan Pembangunan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan UMKM "Go online" Genpro Desa Jagung	Desa Jagung, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1176	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ BABUSSALAM di Desa Lemahabang Kec. Doro	RKB TPQ BABUSSALAM di Desa Lemahabang Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Lemahabang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1177	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Talud dan saluran air di jalan raya Lambur - Kandangserang	Jalan Raya Lambur RT 06 RW 02, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Lambur	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1178	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	Pembangunan RKB MIS Lambur	Desa Lambur, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Lambur	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1179	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	RKB MIS Donowangun di Dukuh Keprak Desa Donowangun, Kec. Talun	RKB MIS Donowangun di Dukuh Keprak Desa Donowangun, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Donowangun	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1180	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ NURUL HUDA 2 di Desa Banjarsari Kec. Talun	RKB TPQ NURUL HUDA 2 di Desa Banjarsari Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Banjarsari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1181	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan sarana wudhu, MCK, pemasangan plafond dan pengadaan air bersih untuk musholla Assalafiyah Desa Pekuncen	Dukuh Pegantungan RT.02 RW.02, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 Paket	Sekretariat Daerah
1182	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ AL AMIN di Dukuh Kasocikal Desa Doro, Kec. Doro	RKB TPQ AL AMIN di Dukuh Kasocikal Desa Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1183	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan gedung Majelis ta'lim Manbalul Anwar Kelurahan Gumawang	Gang 10 RT.09 RW.03, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 Paket	Sekretariat Daerah
1184	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	Pembangunan RKB MIS Mabta'ul Huda Kelurahan Gumawang	Kelurahan Gumawang RT.09 RW.03, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1185	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Sarana wudhu dan MCK di Mushola Al Amanah Desa Bondansari	Desa Bondansari RT 08 RW 03, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Bondansari	1 Paket	Sekretariat Daerah
1186	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Renovasi bangunan gedung RA Nahdlatul Ulama Desa Pekuncen	Desa Pekuncen RT.04 RW.03, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1187	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	RKB MI FUTUHIYAH Kecamatan Doro	RKB MI FUTUHIYAH Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1188	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pemasangan plafon masjid Baitul Muttaqin Desa Kemplong	Desa Kemplong RT.05 RW.03, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kemplong	1 Paket	Sekretariat Daerah
1189	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru (SD/ MI)	Pembangunan gedung SD NU Desa Kemplong	Desa Kemplong RT 06 RW 04, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kemplong	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1190	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Rehabilitasi Ruang Kelas MI Syafi'iyah di Dukuh Kaliketing, Desa Kalimojosari, Kec. Doro	Rehabilitasi Ruang Kelas MI Syafi'iyah di Dukuh Kaliketing, Desa Kalimojosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kalimojosari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1191	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan kewirausahaan bagi warga sekitar Kelurahan Gumawang	Kelurahan Gumawang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 Paket	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1192	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan Sarana Prasarana MIM Kutosari Desa Kutosari, Kec. Doro	Pembangunan Sarana Prasarana MIM Kutosari Desa Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Kutosari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1193	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Masjid Al Barokah Desa Karangjati	Desa Karangjati, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Karangjati	1 Paket	Sekretariat Daerah
1194	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Perbaikan sarana wudhu dan MCK untuk Masjid Nurrohman Desa Waru lor	Desa Waru lor, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Warulor	1 Paket	Sekretariat Daerah
1195	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Dk. Sembung Desa Kampil	Dukuh Sembung, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kampil	1 Paket	Dinas Perhubungan
1196	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan gedung TK Tunas Harapan Desa Pekuncen	Desa Pekuncen RT.01 RW.06, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1197	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TK RA Muslimat NU Desa Ketandan	Ketandan RT. 12 RW. 03, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1198	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan PAMSIMAS bagi warga Kelurahan Mayangan	Kelurahan Mayangan, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Mayangan	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1199	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan tong sampah bagi warga Desa Pekuncen sebanyak +-145 KK	Desa Pekuncen RT. 24,25 dan 26, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1200	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan jalan +- 300 m dan lebar 3m di Kelurahan Gumawang	Kelurahan Gumawang RT.12 RW.04, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1201	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pemasangan plafon Masjid Jami' Al Maghfiroh Desa Kampil	Desa Kampil RT 07 RW 02, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kampil	1 Paket	Sekretariat Daerah
1202	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan PAMSIMAS bagi warga desa Pekuncen RW.07	Desa Pekuncen RW.07, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1203	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	RKB MI Harjosari di Desa Harjosari Kecamatan Doro	RKB MI Harjosari di Desa Harjosari Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Harjosari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1204	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirto, Pacar	1 Paket	Dinas Perhubungan
1205	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di Kecamatan Doro	Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1206	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Karanganyar	Desa Karanganyar, Kab. Pekalongan, Tirto, Karanganyar	1 Paket	Dinas Perhubungan
1207	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Samborejo	Desa Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Samborejo	1 Paket	Dinas Perhubungan
1208	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Dororejo, Kec. Doro	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1209	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Sawangan Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Sawangan Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Sawangan	1 paket	Dinas Perhubungan
1210	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Yayasan Asy Syifa Sidorejo	Desa Sidorejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Sidorejo	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1211	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pengadaan traktor roda 2 untuk Gapoktan Tanjung I (a.n H. Mashudi)	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirto, Tanjung	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1212	Patmisari	FRAKSI GERINDA	Pertanian	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hibah Benih Perkebunan)	Bantuan Bibit Perkebunan	Bantuan Bibit Perkebunan Desa Lambanggalun, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lambanggalun	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1213	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pengadaan pompa air untuk Gapoktan Tanjung II Desa Tanjung	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirta, Tanjung	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1214	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pengadaan pompa air untuk Gapoktan Sri Subur Desa Pandanarum	Desa Pandanarum, Kab. Pekalongan, Tirta, Pandanarum	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1215	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Boyoteluk ( PP Walindo )	Desa Boyoteluk, Kab. Pekalongan, Siwalan, Boyoteluk	1 Paket	Dinas Perhubungan
1216	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Al Jihad Desa Ngaliyan	Desa Ngaliyan, Kab. Pekalongan, Tirta, Ngalian	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1217	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan motor sampah	Kecamatan Tirta, Kab. Pekalongan, Tirta, Tirta, Seluruh Kelurahan/Desa	4 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1218	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Wiradesa	Desa Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa	1 paket	Dinas Perhubungan
1219	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Bondansari	Desa Bondansari, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Bondansari	1 paket	Dinas Perhubungan
1220	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TPQ Al Falah Desa Karangjampo	Desa Karangjampo, Kab. Pekalongan, Tirta, Karangjampo	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1221	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Parapet sungai Meduri Desa Tegaldowo (500 m)	Desa Tegaldowo (500 m), Kab. Pekalongan, Tirta, Tegaldowo	1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1222	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengadaan bibit cabe,sayur,dan buah untuk rumah tangga di Kecamatan Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan, Karanganyar, Karanganyar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1223	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH Kecamatan Tirta	Kecamatan Tirta, Kab. Pekalongan, Tirta, Tirta, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1224	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH Kecamatan Wiradesa	Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1225	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH Kecamatan Siwalan	Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1226	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TK Muslimat NU Siwalan	Jl. Dwi Tunggal no 174 Desa Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1227	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan penguas suara/sound system untuk Majelis Taklim Kecamatan Wiradesa	Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1228	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan penguas suara/sound system untuk Majelis Taklim Kecamatan Tirta	Kecamatan Tirta, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1229	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Tanjung	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirta, Tanjung	1 Paket	Dinas Perhubungan
1230	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab TK Puspita Desa Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1231	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Masjid AL Mubarakah Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirta, Pacar	1 Paket	Sekretariat Daerah
1232	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Musholla Al Barokah Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirta, Tirta, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Sekretariat Daerah
1233	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan tiang listrik beton/palting (4 buah) Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirta, Pacar	4 Unit	Dinas Perhubungan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1234	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Ngaliyan - Pandanarum - Curug	Ngaliyan - Pandanarum - Curug, Kab. Pekalongan, Tirta, Ngalian	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1235	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Doro Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Doro Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro	1 paket	Dinas Perhubungan
1236	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Bligorejo Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Bligorejo Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Bligorejo	1 paket	Dinas Perhubungan
1237	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Dororejo Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Dororejo Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 paket	Dinas Perhubungan
1238	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Larikan Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Larikan Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Larikan	1 paket	Dinas Perhubungan
1239	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Randusari Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Randusari Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Randusari	1 paket	Dinas Perhubungan
1240	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Sidoharjo Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Sidoharjo Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Sidoharjo	1 paket	Dinas Perhubungan
1241	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sidorejo - Tanjung	Sidorejo - Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirta, Sidorejo	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1242	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Kalimojosari Kec. Doro	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Kalimojosari Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kalimojosari	1 paket	Dinas Perhubungan
1243	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Banjarsari Kec. Talun	Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di Desa Banjarsari Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Banjarsari	1 paket	Dinas Perhubungan
1244	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembangunan tempat pembuangan sampah Desa Silirejo	Desa Silirejo, Kab. Pekalongan, Tirta, Silirejo	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1245	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kecamatan Doro	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kecamatan Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perhubungan
1246	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Perkuatan Tebing Sungai (Bronjong) di Sungai Sorosido Desa Rogoselo, Kec. Doro	Perkuatan Tebing Sungai (Bronjong) di Sungai Sorosido Desa Rogoselo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1247	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Irigasi di Dukuh Kaliketing Desa Kalimojosari, Kec. Doro	Rehabilitasi Irigasi di Dukuh Kaliketing Desa Kalimojosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kalimojosari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1248	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan penguas suara/sound system untuk Majelis Taklim Kecamatan Kedungwuni	Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1249	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Musholla Sabilul Huda Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirta, Pacar	1 Paket	Sekretariat Daerah
1250	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan penguas suara/sound system untuk Majelis Taklim Kecamatan Buaran	Kecamatan Buaran, Kab. Pekalongan, Buaran, Buaran, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1251	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan penguas suara/sound system untuk Majelis Taklim Kecamatan Kesesi	Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1252	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Bantuan pengeras suara/sound system untuk Majelis Taklim Kecamatan Wonopringgo	Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1253	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Musholla Al Ikhsan Desa Pacar	Desa Pacar, Kab. Pekalongan, Tirto, Pacar	1 Paket	Sekretariat Daerah
1254	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah untuk Mushola Istiqomah Desa Wonokerto Wetan	Desa Wonokerto Wetan RT 02 RW 03, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertowetan	1 Paket	Sekretariat Daerah
1255	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Yayasan Faidul Qodir Desa Pesangrahan	Desa Pesangrahan, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pesangrahan	1 Paket	Sekretariat Daerah
1256	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH 5 unit Di Desa Karangjampo	Desa Karangjampo, Kab. Pekalongan, Tirto, Karangjampo	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1257	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH Di Desa Jeruksari	Desa Jeruksari, Kab. Pekalongan, Tirto, Jeruksari	2 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1258	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Kabupaten di Desa Dororejo, Kec. Doro	Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Kabupaten di Desa Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1259	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Kabupaten di Desa Kutosari, Kec. Doro	Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Kabupaten di Desa Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kutosari	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1260	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH Di Desa Pacar	Pacar, Kab. Pekalongan, Tirto, Pacar	20 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1261	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Curug	Desa Curug, Kab. Pekalongan, Tirto, Curug	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1262	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Rehabilitasi Ruas Jalan Kabupaten di Desa Jolotigo Kec. Talun	Rehabilitasi Ruas Jalan Kabupaten di Desa Jolotigo Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Jolotigo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1263	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Silirejo	Desa Silirejo, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	10 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1264	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Bronjongisasi Desa Wonorejo	Desa Wonorejo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonorejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1265	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Irigasi di Dukuh Sandong Desa Rogoselo, Kec. Doro	Rehabilitasi Irigasi di Dukuh Sandong Desa Rogoselo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Rogoselo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1266	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Ambokembang sampai Pakumbulan	Desa Ambokembang sampai Pakumbulan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambokembang	1 paket	Dinas Perhubungan
1267	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah rumah warga Desa Ambokembang	Desa Ambokembang, Kab. Pekalongan, Ambokembang	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1268	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani Desa Wonoyoso	Desa Wonoyoso, Kab. Pekalongan, Buaran, Wonoyoso	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1269	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Drainase kelurahan Simbang kulon belakang gedung NU	Kelurahan Simbang kulon belakang gedung NU, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1270	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Irigasi Tersier di Desa Doro Kec. Doro	Rehabilitasi Irigasi Tersier di Desa Doro Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1271	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RKB TK PGRI coprayan	coprayan, Kab. Pekalongan, Buaran, Coprayan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1272	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pasang knopi spilut TK RS Simbang Wetan	Simbang Wetan, Kab. Pekalongan, Simbangwetan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1273	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Simbang Wetan	Simbang Wetan, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangwetan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1274	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehab kantor TK RS Simbang Wetan	Simbang Wetan, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangwetan	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1275	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Legokgunung	Legokgunung, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Legokgunung	1 paket	Dinas Perhubungan
1276	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Pandanarum	Desa Pandanarum, Kab. Pekalongan, Tirto, Pandanarum	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1277	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum di OW Watu Bahan, Desa Lemahabang, Kec. Doro	Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum di OW Watu Bahan, Desa Lemahabang, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Lemahabang	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1278	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU Desa Legokkalong	Desa Legokkalong, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetaklengkong	1 paket	Dinas Perhubungan
1279	Dewi Aida Fitria	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pelebaran jalan Bligo Watusalam	Bligo Watusalam, Kab. Pekalongan, Buaran, Watusalam	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1280	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Dadirejo	Desa Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	10 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1281	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Tanjung	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirto, Tanjung	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1282	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Tegaldowo	Desa Tegaldowo, Kab. Pekalongan, Tirto, Tegaldowo	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1283	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Dukuh Bungkus Desa Kalimojosari menuju Kec. Karangdadap, Kec. Doro	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Dukuh Bungkus Desa Kalimojosari menuju Kec. Karangdadap, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kalimojosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1284	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1285	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Karanganyar	Desa Karanganyar, Kab. Pekalongan, Tirto, Karanganyar	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1286	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Bintek Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1287	H. M Kholis Jazuli	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Pavingisasi SMP N 2 Wonopringoo , Jl. Raya Legokgunung	Wonopringoo , Jl. Raya Legokgunung, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Legokgunung	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1288	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembangunan tempat penampungan sementara sampah di Desa Silirejo	Desa Silirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Silirejo	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1289	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Bintek Peningkatan Kapasitas Mutu Kelembagaan Desa (BMD dan LPMD)	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1290	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Kabupaten di Desa Dororejo, Kec. Doro	Pembangunan Drainase dan Talud Jalan Kabupaten di Desa Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Dororejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1291	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Mushola Al Ikhlas Desa Samborejo	Desa Samborejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Samborejo	1 Paket	Sekretariat Daerah
1292	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Tirto	Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Kecamatan Tirto
1293	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Bligorejo Menuju Desa Kutosari, Kec. Doro	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Bligorejo Menuju Desa Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Kutosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1294	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah MWCNU Kec. Tirto	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirto, Tanjung	1 Paket	Sekretariat Daerah
1295	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Bintek Peningkatan Kapasitas Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas Desa)	Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1296	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Dororejo menuju Desa Wringinagung, Kec. Doro	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Dororejo menuju Desa Wringinagung, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Wringinagung	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1297	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Dororejo menuju Desa Harjosari, Kec. Doro	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Dororejo menuju Desa Harjosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Harjosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1298	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Pelatihan Marketing Online bagi Pelaku Usaha UMKM	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1299	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jembatan Sungai Soyong Desa Pungangan, Kec. Doro	Rehabilitasi Jembatan Sungai Soyong Desa Pungangan, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Pungangan	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1300	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	Pembangunan tembok belakang Polsek Tirto	Desa Tanjung, Kab. Pekalongan, Tirto, Tanjung	1 Paket	Kecamatan Tirto
1301	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Banjarsari Kec. TalunMenuju Desa Bligorejo Kec. Doro	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Banjarsari Kec. TalunMenuju Desa Bligorejo Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Bligorejo	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1302	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Mesoyi Kec. Talun Menuju Desa Randusari Kec. Doro	Rehabilitasi Jalan Poros Desa di Desa Mesoyi Kec. Talun Menuju Desa Randusari Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Randusari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1303	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Talud / Perkuatan Tebing Jalan di Desa Harjosari, Kec. Doro	Pembangunan Talud / Perkuatan Tebing Jalan di Desa Harjosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Harjosari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1304	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Kuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Talud / Perkuatan Tebing Jalan di Desa Banjarsari, Kec. Talun	Pembangunan Talud / Perkuatan Tebing Jalan di Desa Banjarsari, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Banjarsari	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1305	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik bagi Anggota Gapoktan	Kec Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1306	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembangunan Rabat Beton Jalan di Desa Karangasem, Kec. Talun	Pembangunan Rabat Beton Jalan di Desa Karangasem, Kec. Talun, Kab. Pekalongan, Talun, Karangasem	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1307	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH masing-masing 3 unit di setiap Desa Di Kecamatan Siwalan	Kecamatan Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	39 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1308	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1309	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Wonokerto wetan	Wonokerto wetan, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertowetan	3 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1310	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Pekuncen	Desa Pekuncen, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1311	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Karangjati	Desa Karangjati, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1312	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Bener	Desa Bener, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Bener	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1313	MIRZA KHOLIK	Fraksi Persatuan Pembangunan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH di Desa Gumawang	Desa Gumawang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	5 Unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1314	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karangdadap	Pelatihan Pengelola BUM bagi Pengurus BUM Desa	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap	1 paket	Kecamatan Karangdadap
1315	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Duku Sumur Bandung Desa Gejlik ,Kec.Kajen	Pemasangan LPJU Duku Sumur Bandung Desa Gejlik ,Kec.Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Perhubungan
1316	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen	Pemasangan LPJU Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Sinangohprendeng	1 paket	Dinas Perhubungan
1317	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama Jahiri	RT 02 RW 03 Duku Rata Masjid, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Unit	Dinas Sosial
1318	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Desa Kalijoyo, Kajen	Pemasangan LPJU Desa Kalijoyo, Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kalijoyo	1 paket	Dinas Perhubungan
1319	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama Uswatun	RT 03 RW 02 Dk. Jurangkulon, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Unit	Dinas Sosial
1320	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Desa Wengkelang Kec.Kandangserang	Pemasangan LPJU Desa Wengkelang Kec.Kandangserang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Wangkelang	1 paket	Dinas Perhubungan
1321	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama Abdul Latif	RT 02 RW 01 Dk. Wetankali, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Unit	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1322	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama Duriyah	RT 04 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1323	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pemasangan LPJU Desa Kalijombo Kec. Paninggaran	Pemasangan LPJU Desa Kalijombo Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliombo	1 paket	Dinas Perhubungan
1324	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama DIMAH	RT 03 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1325	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama ROHMI	RT 02 RW 01 Dk. Kauman Selatan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1326	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembuatan MCK UmumDukuh Sumur Bandung Desa Gejlik, Kec.Kajen	Pembuatan MCK UmumDukuh Sumur Bandung Desa Gejlik, Kec.Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1327	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sragi	Peningkatan kapasitas LPMD/K tingkat kecamatan	Kec Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Kecamatan Sragi
1328	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama KUSTINI	RT 03 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1329	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama ZAHROTIN	RT 04 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1330	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pembuatan/Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Sinangohprendeng Kec.kajen	Pembuatan/Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Sinangohprendeng Kec.kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Sinangohprendeng	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1331	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan	Perbaikan Jembatan kali Wedus Desa Sinangohprendeng Kec.Kajen	Perbaikan Jembatan kali Wedus Desa Sinangohprendeng Kec.Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Sinangohprendeng	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1332	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama RA"''YAH	RT 03 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1333	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Perbaikan/pembuatan Saluran Air Pinggir Jalan Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen	Perbaikan/pembuatan Saluran Air Pinggir Jalan Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Sinangohprendeng	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1334	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama DHOMAH	RT 03 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1335	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama AFIYAH	RT 04 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1336	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama WAHRUP	RT 03 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1337	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama WITRIYAH	RT 01 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1338	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah utk menunjang kegiatan Senkom Mitra Polri Kabupaten Pekalongan, di Desa Gejlig, Kec.Kajen	Senkom Mitra Polri Kabupaten Pekalongan, di Desa Gejlig, Kec.Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Gejlig	1 paket	Sekretariat Daerah
1339	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama CASDI	RT 01 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1340	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Perbaikan senderan sungai selatan masjid Jami' Kel.Kajen menuju perbatasan Kel. Kajen dan Desa Kebonangung Kec. Kajen	Perbaikan senderan sungai selatan masjid Jami' Kel.Kajen menuju perbatasan Kel. Kajen dan Desa Kebonangung Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1341	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama SUMARNI	RT 01 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1342	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama SUPRIHATIN	RT 03 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1343	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama ZULAIHAH	RT 04 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1344	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan bagi keluarga miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa mesin jahit di Kecamatan Paninggaran atas nama MARFU"AH	RT 04 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Unit	Dinas Sosial
1345	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Perbaikan/Rehab tempat parkir kendaraan di SD Negeri 05 Kajen Kec. Kajen.	Perbaikan/Rehab tempat parkir kendaraan di SD Negeri 05 Kajen Kec. Kajen., Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1346	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sragi	Peningkatan kapasitas KPMD tingkat kecamatan	Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Kecamatan Sragi
1347	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Sragi	Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga	Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Kecamatan Sragi
1348	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sragi	Pelatihan pembuatan garnis	Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Kecamatan Sragi
1349	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sragi	Pelatihan hantaran pengantin	Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Kecamatan Sragi
1350	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sragi	Pelatihan kebun gizi skala rumah tangga	Kec Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi	1 paket	Kecamatan Sragi

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1351	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama KHOIRI	RT 02 RW 02 Dk. Sekele, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1352	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SAODAH	RT 02 RW 02 Dk. Sekele, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1353	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama FATHIIN	RT 05 RW 01 Dk. Sidomaju, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1354	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama UMI ZIDAH	RT 05 RW 01 Dk. Sidomaju, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1355	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama WAHUDI	RT 03 RW 03 Dk. Kembang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1356	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama CASIYAH	RT 03 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1357	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama PURWANTO	RT 03 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1358	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama REHATI	RT 02 RW 03 Dk. Kauman Selatan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1359	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama MUGHIROTUN	RT 04 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1360	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama NISWATIN	RT 03 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1361	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama KASMA"AN	RT 04 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1362	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama KOMARIYAH	RT 05 RW 01 Dk. Sidomaju, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1363	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama KUNAIROH	RT 04 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1364	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama WARNITI	RT 04 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1365	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama TOYIB MAULANA	RT 04 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1366	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ABDUL KHOLIK	RT 01 RW 02 Dk. Tengah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1367	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama LUKMAN HAKIM	RT 03 RW 01 Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1368	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama CAHYONO	RT 02 RW 02 Dk. Sikele, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1369	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama KHOLIFAH	RT 04 RW 03 Dk. Kembang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1370	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama MUHAMAD YAHYA	RT 02 RW 03 Dk. Kaligenteng, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliboja	1 Paket	Dinas Sosial
1371	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama NURUL AHFA	RT 02 RW 03 Dk. Kaligenteng, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliboja	1 Paket	Dinas Sosial
1372	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama CASTORI	RT 01 RW 02 Dk. Tangerang Timur, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Tangerang	1 Paket	Dinas Sosial
1373	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ROHMAN	RT 04 RW 01 Dk. Botosari, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Sosial
1374	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ASMUNI	RT 08 RW 02 Dk. Karangnangka, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Sosial
1375	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SUMAIDI	RT 01 RW 01 Dk. Karanggondang, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1376	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SUCIPTO	RT 02 RW 06 Dk. Sijambu, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Botosari	1 Paket	Dinas Sosial
1377	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama MAHSUN	RT 02 RW 07 Dk. Kauman, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Sosial
1378	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama UNTUNG	RT 01 RW 01 Dk. Kaliombo, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Kaliombo	1 Paket	Dinas Sosial
1379	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama DARN0	RT 02 RW 03 Dk. Binangun atas sidoagung, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Werdi	1 Paket	Dinas Sosial
1380	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama MUHAMAD TARYO	RT 01 RW 01 Dk. Werdi Barat, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Werdi	1 Paket	Dinas Sosial
1381	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SLAMET	RT 03 RW 01 Dk. Srijan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Paket	Dinas Sosial
1382	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama CASHARI	RT 03 RW 02 Dk. Jurang kulon, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Paket	Dinas Sosial
1383	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama MUROFIK	RT 02 RW 01 Dk. Wetan kali, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Paket	Dinas Sosial
1384	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ABDUL KHOLIK	RT 02 RW 01 Dk. Wetan kali, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Krandegan	1 Paket	Dinas Sosial
1385	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SUBKHI	RT 04 RW 01 Dk. Winduaji, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 Paket	Dinas Sosial
1386	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ABDUL MUKTI	RT 02 RW 02 Dk. Plumbon, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 Paket	Dinas Sosial
1387	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama IMRIYAH	RT 01 RW 03 Dk. Plumbon, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 Paket	Dinas Sosial
1388	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Ta"iqoh RT 003/001 Desa Karangdowo	Ibu Ta"iqoh RT 003/001 Desa Karangdowo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Karangdowo	1 paket	Dinas Sosial
1389	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Suhartatik Sidoradi Rogobayan, Kedungwuni Timur	Bantuan modal usaha Ibu Suhartatik Sidoradi Rogobayan, Kedungwuni Timur, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1390	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama KASROH	RT 02 RW 05 Dk. Sidomas, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 Paket	Dinas Sosial
1391	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Sabriyah Gembong Kelurahan Kedungwuni Barat	Ibu Sabriyah Gembong Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1392	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Samsiyah Gembong Kelurahan Kedungwuni Barat	Ibu Samsiyah Gembong Kelurahan Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1393	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Bapak Abdurrohman Gembong Kel. Kedungwuni Barat	Bapak Abdurrohman Gembong Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1394	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ISTIKOMAH	RT 04 RW 04 Dk. Simbang Wetan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Winduaji	1 Paket	Dinas Sosial
1395	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Supriyati Gembong Kel. Kedungwuni Barat	Ibu Supriyati Gembong Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1396	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Sriyati Gembong Kel. Kedungwuni Barat	Ibu Sriyati Gembong Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1397	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ROHMAT	RT 01 RW 01 Dk. Sitisuk, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 Paket	Dinas Sosial
1398	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Rahmawati Paesan Utara Kedungwuni Barat	Ibu Rahmawati Paesan Utara Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1399	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SUBUR	RT 01 RW 01 Dk. Notowarih, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 Paket	Dinas Sosial
1400	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Daroyah Gembong Ke. Kedungwuni Barat	Ibu Daroyah Gembong Ke. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1401	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Tina Gembong Kel. Kedungwuni Barat	Ibu Tina Gembong Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1402	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama ASIYAH	RT 01 RW 01 Dk. Notowarih, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Notogiwang	1 Paket	Dinas Sosial
1403	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Sukasih Gembong Kel. Kedungwuni Barat	Ibu Sukasih Gembong Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1404	Fatkhiana Dewi,SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha Ibu Rodliyah Gembong Kel. Kedungwuni Barat	Ibu Rodliyah Gembong Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Dinas Sosial
1405	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama NUR SALIM	RT 01 RW 03 Dk. Sigitung, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Sosial
1406	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama SUKRON	RT 02 RW 03 Dk. Cokrah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Sosial
1407	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama FATONI	RT 02 RW 07 Dk. Kauman bawah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Sosial
1408	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama MUKAROM	RT 02 RW 07 Dk. Kauman bawah, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran	1 Paket	Dinas Sosial
1409	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama DAHLAN	RT 01 RW 04 Dk. Semingkir, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 Paket	Dinas Sosial
1410	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama TOHIR	RT 02 RW 04 Dk. Semingkir, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 Paket	Dinas Sosial
1411	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama IBNU HAJAR	RT 01 RW 04 Dk. Semingkir, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Lumeneng	1 Paket	Dinas Sosial
1412	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Paninggaran atas nama LISNAWATI	RT 04 RW 01 Dk. Kauman Utara, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Sosial
1413	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan ke Balai Penyuluhan KB di Karangdadap	Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1414	SYIHABUDDIN NUR, S.H.I	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pertanian	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Hibah Ternak)	Bantuan pengadaan bibit kambing untuk Kelompok Tani "BUMI ASIH" Desa Sawangan	Desa Sawangan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1415	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan ke Balai Penyuluhan KB di Doro	BaKecamatan Doro, Kab. Pekalongan, Doro, Doro, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1416	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan ke Balai Penyuluhan KB Kandangserang	Kecamatan Kandangserang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Kandangserang, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1417	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan	Rowokembu, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Rowokembu	1 paket	Dinas Perhubungan
1418	Musa Adam	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan Jalan	Jetak Kidul, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Jetakkidul	1 paket	Dinas Perhubungan
1419	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama SOPIYAN	Dk. Karanglo Desa Tangkil Tengah, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkiltengah	1 Paket	Dinas Sosial
1420	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama MUTI'AH	RT 002 RW 006 Capgawen Selatan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1421	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama MUSYAMAH	RT 001 RW 006 Capgawen Selatan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1422	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama SITI MARWAH	RT 001 RW 006 Capgawen Selatan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1423	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama SOKHEMI	RT 001 RW 003 Capgawen Utara, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1424	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama MUSIRIN	RT 001 RW 003 Capgawen Utara, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1425	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama FAISAL AMIR	RT 001 RW 003 Capgawen Utara, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1426	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama BASUKI	RT 002 RW 006 Capgawen Selatan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1427	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama CHOTIMAH	RT 002 RW 006 Capgawen Selatan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 Paket	Dinas Sosial
1428	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Bantuan modal usaha di Kecamatan Kedungwuni atas nama FAIZAH	Dk. Plosoran RT 009 RW 004, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Tangkilkulon	1 Paket	Dinas Sosial
1429	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bankeu Desa Proto Hibah untuk Ponpes An Nashr	Desa Proto, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Proto	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1430	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan RT.07 Kelurahan Kajen	Pengaspalan Jalan RT.07 Kelurahan Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1431	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembuatan Jembatan RT.10 Kelurahan Kajen	Pembuatan Jembatan RT.10 Kelurahan Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1432	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pengaspalan Jalan RT.10 Kelurahan Kajen	Pengaspalan Jalan RT.10 Kelurahan Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1433	Rokhyasin, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Mushola Al Barokah RT.07 Kelurahan Kajen	Pembangunan Mushola Al Barokah RT.07 Kelurahan Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Sekretariat Daerah
1434	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Ormas	Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kauman	1 paket	Sekretariat Daerah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1435	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Pengadaan cold storage (alat pembeku ikan) untuk Koperasi "BINTANG" Desa Bebel	Desa Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 Paket	Dinas Sosial
1436	MASUDAH	Fraksi Persatuan Pembangunan	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Bantuan modal untuk koperasi "BUMI" Pekalongan	Desa Pegaden Tengah, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Pengadentengah	1 Paket	Dinas Sosial
1437	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan rumah tidak layak huni	wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1438	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan rumah tidak layak huni	Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1439	Sumar Rosul	Fraksi PDI Perjuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bantuan rumah tidak layak huni	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1440	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Pengurangan lapangan sepakbola	Kauman, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kauman	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1441	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Siwalan	Fasilitasi, Administrasi ata Pemerintahan Desa	Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan	1 paket	Kecamatan Siwalan
1442	H. Achmad Kozin,ST	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Ruang Kelas Ponpes Nurul Ummah Desa Sawangan Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	Pembangunan Ruang Kelas Ponpes Nurul Ummah Desa Sawangan Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Sawangan	1 paket	Sekretariat Daerah
1443	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wiradesa	Penyusunan Buku Babat Wiradesa	Kec. wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa	1 paket	Kecamatan Wiradesa
1444	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wiradesa	Pembentukan dan Pembekalan Tim Siaga Bencana Tingkat Kecamatan Wlradesa	Kec Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa	1 paket	Kecamatan Wiradesa
1445	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wiradesa	Pelatihan Design Grafis dan Video Grafis	Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa	1 paket	Kecamatan Wiradesa
1446	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	Bintek aparatur desa (alokasi 2 peserta/desa)	Kec Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Wuled	1 paket	Kecamatan Tirto
1447	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	Bintek BPD (alokasi 2 peserta/desa)	Kec Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Wuled	1 paket	Kecamatan Tirto
1448	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tirto	Bintek Tim Bencana Kec (alokasi 2 peserta/desa + 10 staf kec)	Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Tirto, Tirto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Tirto
1449	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kedungwuni	Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Kecamatan Kedungwuni
1450	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kedungwuni	Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Timur	1 paket	Kecamatan Kedungwuni
1451	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kedungwuni	Bintek Perencanaan Pembangunan Desa	Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 paket	Kecamatan Kedungwuni

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1452	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kedungwuni	Bintek Peningkatan Kapasitas Mutu Kelembagaan Desa (BPD dan LPMD)	Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Kedungwuni
1453	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kedungwuni	Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat	Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Kecamatan Kedungwuni
1454	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kajen	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kajen	Kec Kajen, Kab. Pekalongan, Kajen	1 paket	Kecamatan Kajen
1455	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buaran	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buaran	Kec Buaran, Kab. Pekalongan, Buaran, Bligo	1 paket	Kecamatan Buaran
1456	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonopringgo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonopringgo	Kec Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo	1 paket	Kecamatan Wonopringgo
1457	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Doro	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Doro	Kec Doro, Kab. Pekalongan, Doro	1 paket	Kecamatan Doro
1458	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lebakbarang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lebakbarang	Kec Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Lebakbarang, Lebakbarang	1 paket	Kecamatan Lebakbarang
1459	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kandangserang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lebakbarang	Kec Lebakbarang, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Kandangserang	1 paket	Kecamatan Kandangserang
1460	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesesi	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kesesi	Kec Kesesi, Kab. Pekalongan, Kesesi, Kesesi	1 paket	Kecamatan Kesesi
1461	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonokerto	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonokerto	Kec Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertokulon	1 paket	Kecamatan Wonokerto
1462	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Menyebutkan Nama Paket)	Hibah untuk operasional Persatuan renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kab. Pekalongan	Persatuan Renang Seluruh Indonesia kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1463	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan jalan di RT.11 Lingkungan bendungan wetan	Lingkungan Bendungan wetan Kelurahan kajen, Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1464	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Bronjong, Tanggul, Senderan)	Pembangunan Bronjong sungai di Dk. Kyudan Desa Wonorejo	Dk. Kyudan, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1465	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Dk. Pekiringan RT. 08, Kab. Pekalongan, Kajen, Pekiringanalit	1 paket	Dinas Perhubungan
1466	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung TPQ An-Nur Dk. Krandon RT. 03 Rw.05	Dk. Krandon, Kab. Pekalongan, Kajen, Wonorejo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1467	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonokerto	Pembentukan dan pembekalan tim siaga bencana tk. Kec Wonokerto	Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertokulon	1 paket	Kecamatan Wonokerto
1468	Dra.Hj.Hindun . MH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wonokerto	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokertokulon	1 paket	Kecamatan Wonokerto
1469	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SD/ MI)	Pengadaan Laptop untuk MI Podo	Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1470	Mohammad Kenedy	Fraksi PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan (Turab, Talud, Pengaspalan Jalan)	Pembangunan Talud Kali Pekuncen	Kelurahan Pekuncen, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Pekuncen	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1471	Warti Suci Jiun	Fraksi PDI Perjuangan	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	Penerangan jalan di lingkungan Masjid Al Karomah Rt 17	Rt 17 Desa Podo, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Podo	1 paket	Dinas Perhubungan
1472	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	TEST INPUT CEK ERROR PPP JANGAN DIPROSES	ddddddddd, Kab. Pekalongan, Kandangserang, Klesem	1 ddd	
1473	AHSIN PURWOKO	Fraksi Persatuan Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	TEST ERROR LAGI	ddddddddd, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Werdi	1 dd	
1474	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah untuk desa Jagung	Desa jagung, Kab. Pekalongan, Kesesi, Jagung	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1475	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Mobil operasional Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kesesi	Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1476	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Mobil operasional Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sragi	Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Sragi, Sragi, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1477	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan toilet SDN 01 Wonosari	Desa wonosari, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1478	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Masjid Daruttaqwa Wonosari	Desa wonosari, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1479	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Baitul Muttaqin Wonosari	Desa Wonosari, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1480	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Al-Hidayah Wonosari	Wonosari, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1481	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Bak Sampah Desa Wonosari	Wonosari, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1482	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan Motor Sampah Desa Wonosari	Wonosari, Kab. Pekalongan, Wonosari	1 paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1483	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP/MTs)	Pavingisasi halaman SMP N 01 Siwalan	Siwalan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1484	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah PKBM An-Nur Paninggaran	Paninggaran, Kab. Pekalongan, Paninggaran, Paninggaran, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1485	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Saluran Pembuangan)	Pembangunan Saluran/Drainase gang 2 Gumawang	Gumawang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1486	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Mobil Operasional Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa	Wiradesa, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Wiradesa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1487	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rahabilitasi Gedung TK ABA Gumawang Wiradesa	Gumawang, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Gumawang	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1488	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Pembangunan Gedung Tahfidzul Qur'an Wonokerto	Wonokerto, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Wonokerto, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1489	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan Poros Desa Tengeng wetan-Blimbingwuluh	Tengeng wetan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Tengengwetan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1490	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Al-Aziz Dukuh Buntu Desa Tengengwetan	Tengengwetan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Tengengwetan	1 paket	Sekretariat Daerah



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1491	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Pembangunan Irigasi Pertanian dukuh Cokrah	Blacanan, Kab. Pekalongan, Siwalan, Blacanan	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1492	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa (Menyebutkan Paket Pekerjaan)	Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Jalan RT. 10 - Rt. 11 RW. 03 Desa Waru Kidul	Waru Kidul, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Warukidul	1 paket	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1493	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung PAUD Melati Putih	Tegaldowo, Kab. Pekalongan, Tirto, Tegaldowo	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1494	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Hibah Budidaya udang Vannamie Kelompok Tani Depok Vannamie Mas	Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Depok	1 paket	Dinas Sosial
1495	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD/ MI)	Pembangunan Pagar SDN 03 Bebel	Bebel, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Bebel	1 paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1496	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Dadirejo	Dadirejo, Kab. Pekalongan, Tirto, Dadirejo	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1497	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Kadipaten	Kadipaten, Kab. Pekalongan, Wiradesa, Kadipaten	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1498	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Desa Ngalian	Ngalian, Kab. Pekalongan, Tirto, Ngalian	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1499	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Cendrawasih Pencongan ( Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto )	Pesanggrahan, Kab. Pekalongan, Wonokerto, Pesanggrahan	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1500	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Pengadaan motor Roda tiga pengangkut sampah desa Mejasem	Mejasem, Kab. Pekalongan, Siwalan, Mejasem	1 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1501	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sosial	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	Budidaya Udang Vannamie kelompok Tani Vannamie Abadi Jaya	Depok, Kab. Pekalongan, Siwalan, Siwalan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Sosial
1502	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Hibah Sarana Prasarana ASKAB PSSI Kab. pekalongan	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1503	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Hibah Sarana Prasarana pemuda Pancasila kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 paket	Sekretariat Daerah
1504	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	20 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1505	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Baiturrohman	tegalborang, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1506	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Baitul Muslimin	Dukuh Wonosari, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1507	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Mushola Baiturrohman	Dukuh Tegalborang, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1508	CANDRA SAPUTRA	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Baitus Salam tegal borang	RT. 03 RW.01, Kab. Pekalongan, Siwalan, Wonosari	1 paket	Sekretariat Daerah
1509	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Pembangunan Irigasi Pertanian Dukuh Pekijangan	Krasak Ageng, Kab. Pekalongan, Sragi, Krsakageng	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1510	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Hibah Masjid, Mushola, Lembaga)	Rehabilitasi Mushola Amaliyah	Dukuh Krandon, Kab. Pekalongan, Sragi, Sijeruk	1 paket	Sekretariat Daerah
1511	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan jalan usaha tani desa Ponolawen	Ponolawe, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponolawen	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1512	SHINANTA PREVITA ANGGREANI	FRAKSI PAN	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Irigasi Sawah)	Pembangunan saluran irigasi jalur pertanian desa Ponolawen	Ponolawen, Kab. Pekalongan, Kesesi, Ponolawen	1 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1513	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Gembong gang beringin rt 02 rw 012, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Perhubungan
1514	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (LPJU)	LPJU	LPJU Dukuh mesoyi Rt 02 Rw 01, Kab. Pekalongan, Talun, Mesoyi	1 Paket	Dinas Perhubungan
1515	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Motor Sampah	pengadaan motor sampah tiga roda Desa sampih, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Sampih	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1516	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Motor Sampah	pengadaan motor sampah tiga roda Desa wonorejo, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonorejo	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1517	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Motor Sampah	pengadaan motor sampah tiga roda Desa kwagean, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Kwagean	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1518	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Motor Sampah	pengadaan motor sampah tiga roda Ambukembang, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Ambukembang	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1519	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Motor Sampah	pengadaan motor sampah tiga roda Desa simbang kulon, Kab. Pekalongan, Buaran, Simbangkulon	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1520	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni Kecamatan Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1521	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	RTLH	RTLH Desa mesoyi, Kab. Pekalongan, Talun, Mesoyi	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1522	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan uep Kecamatan kedungwuni desa/kelurahan 20 orang, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
1523	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan uep Kecamatan wonopringgo 10 orang, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
1524	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan uep Kecamatan buaran 10, Kab. Pekalongan, Buaran, Buaran, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
1525	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Sosial	Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	Bantuan uep Kecamatan karangdadap 10 orang, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Karangdadap, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
1526	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembinaan	Pembinaan peningkatan prestasi olahraga senam Ritmic, Kab. Pekalongan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan Akhir
1527	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pembinaan dan peningkatan prestasi atlet badminton, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1528	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dana Hibah	Dana hibah karangtaruna gembong selatan beringin rt 3 rw 11 kecamatan kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni Barat	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1529	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dana Hibah	Dana hibah karang taruna desa pajomblangan, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Pajomblangan	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1530	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pelatihan	Pelatihan ketrampilan remaja putri Kec.kedungwuni, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1531	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE	Pelatihan ketrampilan masyarakat, Kab. Pekalongan, Wonopringgo, Wonopringgo, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
1532	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Sosial	Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE	Pelatihan ketrampilan masyarakat, Kab. Pekalongan, Kedungwuni, Kedungwuni, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket	Dinas Sosial
1533	Shellva Ria Paparingga S.pd.I	FRAKSI GERINDA	Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Persampahan	Motor Sampah	Pengadaan motor sampah desa kedungkebo, Kab. Pekalongan, Karangdadap, Kedungkebo	1 Paket	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
 Pada tanggal 7 Juli 2021  
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 TTD  
 BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
 ENDANG MURDININGRUM, SH  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19631005 199208 2 001

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01						905.901.268.100						930.302.875.890		
1	01	01					603.710.814.800						663.578.834.400		
1	01	01	2,01				25.000.000						2 Dokume n	25.000.000	
1	01	01	2,01	01			10.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dindikbud Kab Pekalongan	2 Dokume n	10.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2,01	07			15.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Dindikbud Kab Pekalongan	3 Dokume n	15.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2,02				600.825.595.600						12 bulan	660.693.615.200	
1	01	01	2,02	01			598.680.196.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	658.548.215.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2,02	03			1.740.600.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	1.740.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2,02	04			404.799.600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	404.799.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2,05				10.912.000						5 dokumen	10.912.000	
1	01	01	2,05	09			10.912.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Orang	10.912.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi perkantoran elama 5 tahun	bulan		bulan	12 bulan	<b>849,648,900</b>						12 bulan	<b>849,648,900</b>	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat listrik/penerangan kantor				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor				12 Bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	89,648,900	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	89,648,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu				12 Bulan	215,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	215,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	220,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan gedung kantor	paket		paket	1 paket	<b>500,000,000</b>						1 paket	<b>500,000,000</b>	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis pengadaan mebel				1 Paket	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	DIndikbud Kab Pekalongan	1 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				2 Paket	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DIndikbud Kab Pekalongan	2 Paket	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>995,358,300</b>						100 %	<b>995,358,300</b>	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya jaskom, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	778,251,300	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DIndikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	778,251,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor outsourcing				12 Bulan	217,107,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	217,107,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>504,300,000</b>						100 %	<b>504,300,000</b>	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional dan pembayaran pajak/perizinan kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	69,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	69,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor				12 Bulan	165,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	165,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan mebel				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor				12 Bulan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dindikbud Kab Pekalongan	12 Bulan	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Pkt A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Pkt B APK PAUD Cakupan layanan pendidikan non formal (%)	- - - - - - -	- - - - - - -	100 - 100 - 103,85 - 100 - 93,80 - 84,50 - 72 - 4,67 -	272,136,245,700						100 - 100 - 103,85 - 100 - 93,80 - 84,50 - 72 - 4,67 -	236,669,833,890		
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Jumlah Satuan Pendidikan (SD) yang terakreditasi Minimal B	%	%	100 %	143,837,363,500						100 %	118,232,708,200		
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun			18 Ruang	3,434,036,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kehatan	Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	18 Ruang	3,777,439,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun			1 Ruang	332,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kehatan	Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun			13 Ruang	2,032,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kehatan	Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	13 Ruang	1,769,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang terehabilitasi sedang/berat			17 Ruang	2,560,387,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kehatan	Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	17 Ruang	2,560,387,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terehabilitasi sedang/berat			4 Ruang	703,050,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	4 Ruang	523,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terehabilitasi sedang/berat			4 Ruang	470,580,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	4 Ruang	470,580,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang ter rehabilitasi sedang/berat				114 Sekolah	26,372,958,900	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	114 Sekolah	25,622,958,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubel Sekolah yang tersedia				29 Unit	25,622,958,900	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	29 Unit	1,199,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan dari Pemda (SPM)/ KKC				3301 Ssiwa	1,510,410,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	3301 Ssiwa	1,510,410,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				511 sekolah	357,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	511 sekolah	357,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah cabang lomba yang dilaksanakan, jumlah guru inklusi yang mengikuti pelatihan				3 kegiatan	323,442,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	3 kegiatan	323,442,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru/pengawas yang difasilitasi TPG/PAK, cakasek, guru seni budaya, PIGP				5 kegiatan	700,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	5 kegiatan	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD, SD SMP terakreditasi ( PAUD ) ( SPM ) - Pengelolaan Dapodik dan Mutu Pendidikan Pengelolaan Jardiknas				797 Sekolah 597 Sekolah 18 Unit	605,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	797 Sekolah 597 Sekolah 18 Unit	605,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS				597 sekolah	78,563,040,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru	597 sekolah	78,563,040,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan, rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru		250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Jumlah Satuan Pendidikan (SMP) yang terakreditasi Minimal B	%		%	100 %	<b>38,071,918,200</b>						100 %	<b>50,036,027,720</b>	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun				5 Ruang	1,762,005,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	5 Ruang	1,938,205,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terhabilitasi sedang/berat				4 Ruang	443,100,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	4 Ruang	243,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun				50 Ruang	1,742,005,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	50 Ruang	10,834,793,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang terbangun				50 Ruang	1,316,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	50 Ruang	1,316,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang terhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	703,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	5 Ruang	503,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang terbangun				4 Ruang	243,100,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	4 Ruang	243,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang terhabilitasi				6 Ruang	757,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	6 Ruang	833,250,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia				13 Unit	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	13 Unit	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ATS yang di fasilitasi untuk kembali kesekolah Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan dari Pemda (SPM)				1055 Siswa 200 Mahasiswa 2308 Siswa	30,193,708,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	1055 Siswa 200 Mahasiswa 2308 Siswa	33,213,079,020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumah Sekolah yang di fasilitasi PPDB Online Jumlah yang melaksanakan AKM jenjang SMP				78 Sekolah 86 Sekolah	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	78 Sekolah 86 Sekolah	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah materi yang disusun				12 Materi	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penambahan dan rehabilitasi ruang kelas	12 Materi	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	Jumlah Lembaga penerima operasional Jumlah penerima operasional Penyelenggaraan PAUD Jumlah siswa penerima tambahan makanan anak	Lembaga Siswa Siswa		Lembaga Siswa Siswa	108 Lembaga 32781 Siswa 5500 Siswa	<b>74,479,665,500</b>						108 Lembaga 32781 Siswa 5500 Siswa	<b>51,500,069,620</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang terbangun ( Terlaksananya pembangunan gedung sekolah PAUD				68 Ruang	33,580,444,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	68 Ruang	13,560,444,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terbangun				10 Unit	4,206,355,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Unit	1,946,355,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun				31 Ruang	11,269,040,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	0	31 Ruang	12,197,944,880	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terehabilitasi Sedang/Berat				11 Unit	2,869,099,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	11 Unit	1,309,099,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terehabilitasi				2 Set	314,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Set	264,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Meubelair yang tersedia				2 Unit	244,279,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Unit	244,279,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa penerima perlengkapan sekolah				12000 Siswa	719,646,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12000 Siswa	569,646,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD				10 Unit	154,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Unit	154,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jenis lomba Apresiasi Jmlah peserta pelatihan				12 Lomba 445 Orang	1,315,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	12 Lomba 445 Orang	1,446,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa Penerima BOP Jumlah TKN Penerima DAK Non Fisik				32871 Siswa 3 Sekolah	19,807,800,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	32871 Siswa 3 Sekolah	19,807,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>1 01 02 2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Lembaga dapat beroperasi secara optimal	Lembaga		Lembaga	1300 Lembaga	<b>15,747,298,500</b>					1300 Lembaga	<b>16,901,028,350</b>		
1 01 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima Biaya Personil Nonformal/Kesetaraan Jumlah penerima Biaya Personil Nonformal/Kesetaraan Jumlah santri penerima operasional				1300 Lembaga 4909 Orang 100 Orang	160,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1300 Lembaga 4909 Orang 100 Orang	160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta pelatihan pendidikan nonformal/ kesetaraan				335 Orang	321,677,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	335 Orang	353,845,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Operasional ( TPQ/Madin/Non Islam ) Jumlah Santri Penerima Operasional Jumlah Ustadz/Ustazah penerima Operasional				1300 Lembaga 1000 Orang 7951 Orang	11,215,621,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1300 Lembaga 1000 Orang 7951 Orang	12,337,183,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Kesetaraan Penerima BOP				2384 Siswa	4,050,000,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2384 Siswa	4,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>1 01 04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase dokumen Perhitungan, Pemetaan dan pendistribusian tendik yang tersusun	-		-	--	<b>29,494,207,600</b>					--	<b>29,494,207,600</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang menerima Operasional personalia di sekolah Negeri	Orang		Orang	1913 Orang	29,494,207,600						1913 Orang	29,494,207,600	
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang menerima Operasional personalia di sekolah Swasta		Orang		Orang	3857 Orang						3857 Orang				
Jumlah Sekolah Negeri penerima operasional non personalia		Sekolah		Sekolah	537 Sekolah					537 Sekolah					
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK Non PNS Penerima Biaya Operasional di Sekolah Swasta				3857 Orang	29,494,207,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS se Kab Pekalongan	3857 Orang	29,494,207,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Jumlah PTK Non PNS Penerima Biaya Operasional di Sekolah Negeri				1913 Orang		1913 Orang									
Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasioal				537 Sekolah		537 Sekolah									
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa jawa halus	-		-	--	560,000,000					--	560,000,000		
		Presentase lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa jawa halus	-		-	--				--					
1 01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa jawa halus	%		%	100 %	560,000,000					100 %	560,000,000		
1 01 06 2.01 06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya LombaMulok Bahasa Jawa bagi siswa SD, SMP dan SMA: Terlaksananya Kegiatan MAPSI dan FASI				3 Kegiatan	560,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Lembaga pemerintah dan Lembaga Pendidikan	3 Kegiatan	560,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3,490,000,000							3,490,000,000	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1,680,000,000							1,680,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 2.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1,620,000,000</b>							<b>1,620,000,000</b>	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya kegiatan apresiasi seni dalam rangka hari jadi kabupaten, pergantian tahun baru, pentas seni budaya daerah kabupaten pekalongan				5 Kegiatan	905,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Kegiatan	905,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (FLS2N) Festival Kesenian Rakyat dan Festival Sintren Kab. Pekalongan				4 Kegiatan	715,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Kegiatan	715,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.03	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>60,000,000</b>							<b>60,000,000</b>	
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Tercapainya pembinaan 8 organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME				8 Organisasi Penghayat	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Organisasi Penghayat	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>						<b>650,000,000</b>							<b>650,000,000</b>	
2 22 03 2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>650,000,000</b>							<b>650,000,000</b>	
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya kegiatan kemah seni budaya, operasional PEPADI dan DKDKab. Pekalongan				5 Kegiatan	650,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Kegiatan	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>						<b>345,000,000</b>							<b>345,000,000</b>	
2 22 04 2.01	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>345,000,000</b>							<b>345,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kirab budaya yang dilaksanakan Tercapainya pengiriman peserta Napak Tilas dan Lawatan Sejarah Lokal dan Regional				1 Kegiatan 2 Kegiatan	345,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan 2 Kegiatan	345,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Terlaksananya Kegiatan Cagar Budaya	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>					5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>		
2 22 05 2.02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Cagar Budaya	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>					5 Kegiatan	<b>440,000,000</b>		
2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya kegiatan pendataan cagarbudaya dan terpenuhinya jumlah juru rawat cagar budaya di Kab.Pekalongan; LKTI dan LombaCerdas CermatCagar Budaya bagi siswa SMP dan SMA				5 Kegiatan	440,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		5 Kegiatan	440,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>						<b>375,000,000</b>						<b>375,000,000</b>		
2 22 06 2.01	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>						<b>375,000,000</b>						<b>375,000,000</b>		
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tercapainya pemeliharaan bangunan museum kabupaten pekalongan				1 Bangunan	375,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Bangunan	375,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>TOTAL</b>							<b>909,391,268,100</b>						<b>933,792,875,890</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
<b>1</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>02</b>						<b>245,793,149,700</b>						<b>299,773,133,800</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>					<b>88,236,168,700</b>						<b>91,688,943,800</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.01				<b>85,000,000</b>						<b>90,500,000</b>					
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				4 dokumen	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 dokumen	57,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu				6 dokumen	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 dokumen	33,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.02				<b>86,484,444,200</b>							<b>89,890,000,000</b>				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				14 bulan	85,615,309,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 bulan	89,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 bulan	869,135,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	890,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.06				<b>280,000,000</b>							<b>303,000,000</b>				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya komponen listrik kantor				20 Unit	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Unit	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan rumah tangga				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya cetak dan penggandaan kantor				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	50,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 kali	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 kali	110,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>275,000,000</b>	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				6 unit	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 unit	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin				10 unit	100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 unit	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 kegiatan	110,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>936,300,000</b>							<b>991,000,000</b>	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 unit	464,400,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				19 orang	471,900,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19 orang	491,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>200,424,500</b>							<b>139,443,800</b>	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	32,495,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	33,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	77,871,500	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	7,880,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				12 bulan	15,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	15,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	uhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	15,058,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	16,563,800	Dinas Kesehatan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	60,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	66,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>156,361,981,000</b>							<b>206,820,690,000</b>	
1 02 02 2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>31,721,981,000</b>							<b>28,001,690,000</b>	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						200,000,000							0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan				2 Puskesmas	9,137,900,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				2 Puskesmas	10,051,690,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehabilitasi				2 Puskesmas	400,000,000	Semua Kab/Kota	DBH CHT				2 Puskesmas	440,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan				12 Puskesmas	4,157,155,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				12 Puskesmas	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan				12 Unit	4,000,000,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				12 Unit	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan distribusi obat dan e-Logistik Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan obat dan vaksin				27 Puskesmas 12 bulan	3,150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan				27 Puskesmas 12 bulan	35,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan bahan medis habis pakai				12 bulan	4,700,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan				12 bulan	4,900,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana kesehatan				2 unit	5,726,926,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan			2 unit	6,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah bulan terpeliharanya alat kesehatan				12 bulan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	275,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>124,540,000,000</b>						<b>178,709,000,000</b>		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan ibu hamil Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pertemuan Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan ibu hamil				27 Puseesmas 27 kegiatan 27 kegiatan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27 Puseesmas 27 kegiatan 27 kegiatan	77,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Persalinan yang tercover Jampersal Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan ibu bersalin Pertemuan Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan ibu bersalin				1757 orang 27 Puskesmas 27 kegiatan	4,500,000,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan			1757 orang 27 Puskesmas 27 kegiatan	47,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pendampingan bayi baru lahir Pertemuan Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan bayi baru lahir				27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 kegiatan	500,000,000	Semua Kab/Kota				27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 kegiatan	550,000,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan balita Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan balita Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita				27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas	77,500,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Skринing anak sekolah dasar				27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 sekolah	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 sekolah	99,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan pada usia produktif Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan pada usia produktif Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Skринing usia produktif				27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 kegiatan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 kegiatan	110,000,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan pada usia lanjut Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan pada usia lanjut Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut Peningkatan pengetahuan kesehatan pada usia lanjut Skrining usia lanjut				27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 orang 27 Puskesmas	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 orang 27 Puskesmas	77,500,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Koordinasi dan Advokasi lintas sektor Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas petugas Peningkatan pengetahuan hipertensi Peningkatan pengetahuan kesehatan pada usia lanjut				6 Kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 orang 27 orang	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 Kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 orang 27 orang	37,500,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Koordinasi dan Advokasi lintas sektor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan posbindu Peningkatan Kapasitas petugas Peningkatan pengetahuan DM				6 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 orang 27 orang	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 kegiatan 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 orang 27 orang	37,500,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Koordinasi dan Advokasi lintas sektor Monitoring dan Evaluasi Pendampingan ODGJ Peningkatan Kapasitas petugas Peningkatan pengetahuan				6 kegiatan 27 Puskesmas 40 orang 27 orang 27 orang	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6 kegiatan 27 Puskesmas 40 orang 27 orang 27 orang	37,500,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Peningkatan pengetahuan TB PMT TB				3 kegiatan 27 kegiatan 27 orang 27 orang 27 Puskesmas	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 27 kegiatan 27 orang 27 orang 27 Puskesmas	220,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pendampingan Orang Terinfeksi HIV Peningkatan kapasitas petugas dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Skreening Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				3 kegiatan 27 kegiatan 27 orang 27 orang 17 lokasi	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 27 kegiatan 27 orang 27 orang 17 lokasi	220,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah PE yang dilakukan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Penguatan dan koordinasi jejaring survailans Penguatan pelmbinaan kesehatan haji				204 orang 20 KALI 3 kegiatan 3 kegiatan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			204 orang 20 KALI 3 kegiatan 3 kegiatan	110,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						980,000,000						1,000,000,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	monev kesehatan kerja dan olah raga Pelaksanaan tes kebugaran ASN Peningkatan kapasitas petugas tentang kesjaor Pertemuan koordinasi program kesjaor				27 Puskesmas 1000 orang 1 kegiatan 3 kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 Puskesmas 1000 orang 1 kegiatan 3 kegiatan	33,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Monev Desa/Kelurahan STBM Monitoring dan Evaluasi kualitas lingkungan Pemeliharaan IPAL dan limbah medis Rapat Koordinasi pelayanan kesehatan lingkungan				100 lokasi 1 dokumen 12 Bulan 2 kegiatan	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100 lokasi 1 dokumen 12 Bulan 2 kegiatan	880,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cetak Brosur,Leaflet Pertemuan Lintas Sektor Radio Spot				12 kegiatan 6 Puskesmas 6 kegiatan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 kegiatan 6 Puskesmas 6 kegiatan	55,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Koordinasi Kestrad Monev Kestrad Peningkatan pengetahuan Kestrad				2 kegiatan 27 Puskesmas 27 orang	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 kegiatan 27 Puskesmas 27 orang	27,500,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Monev program imunisasi Pemantauan wilayah setempat Penguatan koordinasi teknis program imunisasi Sosialisasi imunisasi				27 Puskesmas 27 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	300,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 Puskesmas 27 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan	400,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	MonevPeningkatan Kesehatan Mata dan Telinga Kestrad Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Peningkatan Kesehatan gigi dan Mulut Kegiatan pengetahuan Kestrad				27 Puskesmas 550 kegiatan 27 Puskesmas	390,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 Puskesmas 550 kegiatan 27 Puskesmas	400,000,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Honor PSCn ASN (bulan) Operasional /logistik PSC P3K acara seremonial Pengembangan sistem PSC/SPGDT				12 bulan 12 bulan 15 kegiatan 1 kegiatan	375,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 bulan 12 bulan 15 kegiatan 1 kegiatan	377,500,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Monev Pelayanan kesehatan penyakit menular Pelaksanaan fogging Penderita Diare ditangani				27 Puskesmas 20 kali 100 kasus	3,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 Puskesmas 20 kali 100 kasus	3,750,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah premi BPJS yang dibayarkan Monev Jaminan kesehatan				490825 orang 1 dok	110,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT			490825 orang 1 dok	121,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Advokasi dan koordinasi kota sehat Monev PIS PK Pelaksanaan PIS PK/ Koordinasi PIS PK PePengembangan sistem PSC/SPGDTningPeningkatan Kesehatan gigi dan Mulutkatan pengetahuan Kestrad				1 kali 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 Puskesmas	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 kali 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 Puskesmas	55,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Advokasi dan koordinasi kota sehat Monev PIS PK Pelaksanaan PIS PK/ Koordinasi PIS PK PePengembangan sistem PSC/SPGDTningPeningkatan Kesehatan gigi dan Mulutkatan pengetahuan Kestrad				1 kali 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 Puskesmas	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 kali 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 Puskesmas	277,500,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi /standarisasi UPT Monev akreditasi Pendampingan akreditasi Rapat akreditasi Workshop akreditasi				12 Puskesmas 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan	1,775,000,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas			12 Puskesmas 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan	1,800,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>						<b>80,000,000</b>						<b>88,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes dgn sistem informasi kesehatan yg terintegrasi Penyusunan Buku Profil Kesehatan Tersedianya Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan				27 Puskesmas 1 kegiatan 1 Unit	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27 Puskesmas 1 kegiatan 1 Unit	88,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>20,000,000</b>						<b>22,000,000</b>		
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Monev Fasyankes				10 kegiatan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 kegiatan	22,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						<b>300,000,000</b>						<b>315,000,000</b>		
1 02 03 2.01	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						<b>25,000,000</b>						<b>27,500,000</b>		
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehata				4 kegiatan	25,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 kegiatan	27,500,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03 2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						<b>25,000,000</b>						<b>27,500,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kab. Pekalongan yang tersusun Jumlah Keputusan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diterbitkan Jumlah Profil Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kab. Pekalongan yang tersusun Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan dan SDM Berprestasi yang terpilih dipilih				1 dokumen 220 orang 1 dokumen 10 orang	25,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 dokumen 220 orang 1 dokumen 10 orang	27,500,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03 2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>250,000,000</b>						<b>260,000,000</b>		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan fasilitasi penelitian bidang kesehatan Jumlah SDM Kesehatan Dinas dan UPT yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan/ seminar/ workshop/ study lanjut				100 orang 120 orang	250,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100 orang 120 orang	260,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>						<b>335,000,000</b>						<b>369,500,000</b>		
1 02 04 2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>						<b>60,000,000</b>						<b>66,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek yang dimonitor terhadap kepatuhan pemenuhan sesuai syarat perizinan Jumlah ketersediaan data hasil monitoring perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) pada periode tertentu Jumlah toko alat kesehatan yang dimonitor terhadap kepatuhan pemenuhan sesuai syarat perizinan Jumlah toko obat yang dimonitor terhadap kepatuhan pemenuhan sesuai syarat perizinan				40 kegiatan 2 dokumen 10 kegiatan 20 kegiatan	60,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			40 kegiatan 2 dokumen 10 kegiatan 20 kegiatan	66,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.02	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>						10,000,000						11,000,000		
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian Sertifikat Produksi Alkes Kelas 1 dan PKRT kelas 1				11 kegiatan	10,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11 kegiatan	11,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>						200,000,000						220,000,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggarakannya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				27 kegiatan	200,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan			27 kegiatan	220,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 04 2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>						<b>15,000,000</b>						<b>17,500,000</b>		
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Bintek PWS kesling Pembinaan TPP				3 kegiatan 11 kegiatan	15,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 kegiatan 11 kegiatan	17,500,000	Dinas Kesehatan	
1 02 04 2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>						<b>50,000,000</b>						<b>55,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan sampel produk makanan minuman yang beredar umlah Data hasil Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangg				10 kegiatan 20 sampel 2 laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 kegiatan 20 sampel 2 laporan	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	0	- - -	- - -	- - -	70 - 70 - 72 -	<b>560,000,000</b>						70 - 70 - 72 -	<b>579,000,000</b>	
1 02 05 2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>50,000,000</b>							<b>55,000,000</b>	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Evaluasi kegiatan pemberdayaan Kemitraan Institusi Kesehatan Pengembangan Desa/kelurahan siaga aktif PLinsek PKP(Promosi kesehatan dan Pemberdayaan )				3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 media	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 media	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>470,000,000</b>							<b>480,000,000</b>	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Evaluasi PHBS Gerakan Sadar Hidup Sehat Kooordinasi tenaga promosi kesehatan Penyebarluasan informasi melalui berbagai media				1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 2 media	470,000,000	Semua Kab/Kota	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				1 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 2 media	480,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40,000,000							44,000,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	imbangan Teknis UKBM Pengembangan partisipasi masyarakat peduli kesehatan				1 kegiatan 3 kegiatan	40,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 kegiatan 3 kegiatan	44,000,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>3,216,604,763</b>							<b>3,377,435,000</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,567,764,763</b>							<b>2,696,153,000</b>	
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>2,567,764,763</b>							<b>2,696,153,000</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Operasional BLUD				12 bulan	2,567,764,763	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	2,696,153,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>648,840,000</b>							<b>681,282,000</b>	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>648,840,000</b>							<b>681,282,000</b>	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	648,840,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	681,282,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4,867,593,650</b>							<b>5,110,973,550</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>4,174,908,150</b>							<b>4,383,653,550</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						4,174,908,150					4,383,653,550			
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	4,174,908,150	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	4,383,653,550	Dinas Kesehatan	
1	02	02				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						692,685,500						727,320,000		
1	02	02	2.02			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						692,685,500						727,320,000		
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	692,685,500	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	727,320,000	Dinas Kesehatan	
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	02					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						1,387,611,675							1,456,992,100	
1	02	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>						754,848,675						792,591,100		
1	02	01	2.10			<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						754,848,675						792,591,100		
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	754,848,675	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	792,591,100	Dinas Kesehatan	
1	02	02				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						632,763,000						664,401,000		
1	02	02	2.02			<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						632,763,000						664,401,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	632,763,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	664,401,000	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,169,338,131</b>						<b>7,234,005,000</b>		
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>533,761,131</b>						<b>560,449,000</b>		
<b>1 02 01 2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>533,761,131</b>						<b>560,449,000</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	533,761,131	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	560,449,000	Dinas Kesehatan	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>635,577,000</b>						<b>6,673,556,000</b>		
<b>1 02 02 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>635,577,000</b>						<b>6,673,556,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	635,577,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	6,673,556,000	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,984,747,847</b>						<b>2,083,982,150</b>		
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>1,348,363,947</b>						<b>1,415,782,150</b>		
<b>1 02 01 2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>1,348,363,947</b>						<b>1,415,782,150</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	1,348,363,947	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	1,415,782,150	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						636,383,900						668,200,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						636,383,900						668,200,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	636,383,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	668,200,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>3,854,225,543</b>						<b>4,046,936,800</b>		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,173,305,643						3,331,970,900		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3,173,305,643						3,331,970,900		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,173,305,643	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	3,331,970,900	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						680,919,900						714,965,900		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						680,919,900						714,965,900		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	680,919,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	714,965,900	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>2,988,315,713</b>						<b>3,137,731,400</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,309,213,813						2,424,674,500		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD						2,309,213,813						2,424,674,500		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,309,213,813	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	2,424,674,500	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						679,101,900						713,056,900		
1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						679,101,900						713,056,900		
1 02 02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	679,101,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	713,056,900	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,594,614,747						1,674,345,400		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						888,961,847						933,409,900		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD						888,961,847						933,409,900		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	888,961,847	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	933,409,900	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						705,652,900						740,935,500		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						705,652,900						740,935,500		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhiya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	705,652,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	740,935,500	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>3,467,617,988</b>						<b>3,640,998,877</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,895,543,788</b>						<b>3,040,320,977</b>		
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>2,895,543,788</b>						<b>3,040,320,977</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhiya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,895,543,788	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	3,040,320,977	Dinas Kesehatan	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>572,074,200</b>						<b>600,677,900</b>		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						<b>572,074,200</b>						<b>600,677,900</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhiya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	572,074,200	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	600,677,900	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>2,811,109,450</b>						<b>2,951,664,860</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,092,676,250</b>						<b>2,197,310,000</b>		
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>2,092,676,250</b>						<b>2,197,310,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,092,676,250	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	2,197,310,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>718,433,200</b>							<b>754,354,860</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						718,433,200							754,354,860	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	718,433,200	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	754,354,860	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>5,733,474,800</b>						<b>6,020,148,000</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>5,041,362,900</b>							<b>5,293,431,000</b>	
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>5,041,362,900</b>							<b>5,293,431,000</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	5,041,362,900	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	5,293,431,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>692,111,900</b>							<b>726,717,000</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						692,111,900							726,717,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	692,111,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	726,717,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
											Nasional					Daerah					
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											<b>2,400,320,500</b>		<b>2,520,336,600</b>						
1	02	01														<b>1,755,442,500</b>				<b>1,843,214,600</b>	
1	02	01	2.10													<b>1,755,442,500</b>				<b>1,843,214,600</b>	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhi Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	1,755,442,500	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD					12 bulan		1,843,214,600	Dinas Kesehatan
1	02	02														<b>644,878,000</b>				<b>677,122,000</b>	
1	02	02	2.02													<b>644,878,000</b>				<b>677,122,000</b>	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhi kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	644,878,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					12 bulan		677,122,000	Dinas Kesehatan
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											<b>4,335,257,400</b>		<b>4,552,020,500</b>						
1	02	01														<b>3,562,650,000</b>				<b>3,740,782,500</b>	
1	02	01	2.10													<b>3,562,650,000</b>				<b>3,740,782,500</b>	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhi Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,562,650,000	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD					12 bulan		3,740,782,500	Dinas Kesehatan
1	02	02														<b>772,607,400</b>				<b>811,238,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						772,607,400							811,238,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						772,607,400	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					811,238,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>2,784,294,275</b>							<b>2,923,508,250</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,079,171,675</b>							<b>2,183,130,250</b>	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						<b>2,079,171,675</b>							<b>2,183,130,250</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,079,171,675	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan		2,183,130,250	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>705,122,600</b>							<b>740,378,000</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						<b>705,122,600</b>							<b>740,378,000</b>	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	705,122,600	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan		740,378,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>3,550,258,991</b>							<b>3,727,771,950</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,851,268,091</b>							<b>2,993,831,450</b>	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						<b>2,851,268,091</b>							<b>2,993,831,450</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,851,268,091	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan		2,993,831,450	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						698,990,900						733,940,500		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						698,990,900						733,940,500		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan bahan medis habis pakai				12 bulan	698,990,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	733,940,500	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>3,140,375,686</b>						<b>3,297,394,250</b>		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,550,823,086						2,678,364,250		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2,550,823,086						2,678,364,250		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,550,823,086	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	2,678,364,250	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						589,552,600						619,030,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						589,552,600						619,030,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	589,552,600	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	619,030,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4,088,808,845</b>						<b>4,293,248,900</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,373,071,345						3,541,724,900		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD						3,373,071,345						3,541,724,900		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,373,071,345	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	3,541,724,900	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						715,737,500						751,524,000		
1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						715,737,500						751,524,000		
1 02 02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	715,737,500	Semua Kab/Kota Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	751,524,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,696,181,555						4,930,986,300		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,971,225,055						4,169,786,300		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD						3,971,225,055						4,169,786,300		
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,971,225,055	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	4,169,786,300	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						724,956,500						761,200,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						724,956,500						761,200,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhiya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	724,956,500	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	761,200,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>3,359,689,370</b>						<b>3,527,673,700</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2,672,188,470</b>						<b>2,805,797,800</b>		
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>2,672,188,470</b>						<b>2,805,797,800</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhiya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	2,672,188,470	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	2,805,797,800	Dinas Kesehatan	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>687,500,900</b>						<b>721,875,900</b>		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						<b>687,500,900</b>						<b>721,875,900</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhiya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	687,500,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	721,875,900	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4,194,291,212</b>						<b>4,404,005,600</b>		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>3,536,269,212</b>						<b>3,713,082,600</b>		
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>3,536,269,212</b>						<b>3,713,082,600</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,536,269,212	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	3,713,082,600	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>658,022,000</b>							<b>690,923,000</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						658,022,000							690,923,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	658,022,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	690,923,000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>3,741,661,890</b>						<b>3,928,745,000</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>3,084,103,890</b>							<b>3,238,309,000</b>	
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>3,084,103,890</b>							<b>3,238,309,000</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,084,103,890	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	3,238,309,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>657,558,000</b>							<b>690,436,000</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						657,558,000							690,436,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	657,558,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	690,436,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												<b>4,155,893,850</b>				
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												<b>3,288,660,900</b>			<b>3,453,093,950</b>	
<b>1 02 01</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>												<b>3,288,660,900</b>			<b>3,453,093,950</b>	
1 02 01	2.10	01															
1 02 01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhi Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,288,660,900	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	3,453,093,950	Dinas Kesehatan	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												<b>669,333,300</b>			<b>702,799,900</b>	
<b>1 02 02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>669,333,300</b>			<b>702,799,900</b>	
1 02 02	2.02																
1 02 02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhi kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	669,333,300	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	702,799,900	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												<b>4,215,252,500</b>			<b>4,426,015,100</b>	
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												<b>3,502,602,600</b>			<b>3,677,732,750</b>	
<b>1 02 01</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>												<b>3,502,602,600</b>			<b>3,677,732,750</b>	
1 02 01	2.10	01															
1 02 01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhi Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	3,502,602,600	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	3,677,732,750	Dinas Kesehatan	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												<b>712,649,900</b>			<b>748,282,350</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						712,649,900						748,282,350		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhiya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	712,649,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	748,282,350	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>1,885,467,758</b>				<b>1,979,741,000</b>				
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>1,182,688,658</b>						<b>1,241,823,000</b>		
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>1,182,688,658</b>						<b>1,241,823,000</b>		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhiya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	1,182,688,658	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD			12 bulan	1,241,823,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>702,779,100</b>						<b>737,918,000</b>		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						<b>702,779,100</b>						<b>737,918,000</b>		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhiya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	702,779,100	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			12 bulan	737,918,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4,772,161,443</b>				<b>5,010,769,450</b>				
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>4,017,948,543</b>						<b>4,218,845,950</b>		
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>4,017,948,543</b>						<b>4,218,845,950</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	4,017,948,543	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	4,218,845,950	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>754,212,900</b>							<b>791,923,500</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						754,212,900							791,923,500	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	754,212,900	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	791,923,500	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>2,307,766,515</b>						<b>2,423,154,850</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>1,653,334,515</b>							<b>1,736,001,250</b>	
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						<b>1,653,334,515</b>							<b>1,736,001,250</b>	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD				12 bulan	1,653,334,515	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD				12 bulan	1,736,001,250	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>654,432,000</b>							<b>687,153,600</b>	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						654,432,000							687,153,600	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM				12 bulan	654,432,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				12 bulan	687,153,600	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
																Nasional					Daerah					
1							<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
1	02												1,383,274,210											1,452,438,750		
1	02	01					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>						1,026,151,210											1,077,458,750		
1	02	01	2.10				<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						1,026,151,210											1,077,458,750		
1	02	01	2.10	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Belanja Modal dan Belanja Operasional BLUD					12 bulan	1,026,151,210	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD							12 bulan	1,077,458,750	Dinas Kesehatan	
1	02	02					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						357,123,000											374,980,000		
1	02	02	2.02				<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						357,123,000											374,980,000		
1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional Puskesmas untuk mendukung capaian SPM					12 bulan	357,123,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							12 bulan	374,980,000	Dinas Kesehatan	
<b>TOTAL</b>													<b>333,681,460,357</b>												<b>398,062,050,987</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												<b>139,724,628,000</b>		<b>126,517,090,800</b>	
<b>1 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	<b>95,024,628,000</b>						14 Bulan	<b>98,927,090,800</b>		
<b>1 02 01</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	14 bulan	<b>19,024,628,000</b>						14 bulan	<b>20,927,090,800</b>		
1 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	19,024,628,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	20,927,090,800	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
<b>1 02 01</b>	<b>2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	terpenuhinya kebutuhan pelayanan rumah sakit		bulan	12 bulan	<b>76,000,000,000</b>						12 bulan	<b>78,000,000,000</b>		
1 02 01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan rumah sakit			12 Bulan	76,000,000,000	Kab. Pekalongan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit BLUD	12 Bulan	78,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Prosentase sarana dan prasarana RS sesuai permenkes No 3 Tahun 2020	%		%	90 %	<b>44,700,000,000</b>						90 %	<b>27,590,000,000</b>		
<b>1 02 02</b>	<b>2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki/jumlah standar yang ada dalam permenkes		%	90 %	<b>44,700,000,000</b>						90 %	<b>27,590,000,000</b>		
1 02 02	2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit			2 unit	37,800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	2 unit	20,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
1 02 02	2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan NICU, Instalasi Radiologi, Laboratorium			5 Unit	6,900,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	5 Unit	7,590,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
<b>TOTAL</b>							<b>139,724,628,000</b>							<b>126,517,090,800</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1															
1	02														
1	02	01													
1	02	01	2.10												
1	02	01	2.10	01											
1	02	02													
1	02	02	2.01												
1	02	02	2.01	14											
<b>TOTAL</b>							<b>147,000,000,000</b>							<b>152,500,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											<b>489,887,118,566</b>		<b>492,977,123,751</b>	
<b>1 03 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	--	<b>26,735,024,700</b>						--	<b>29,437,000,000</b>	
<b>1 03 01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun Tepat waktu	persen	persen	100 persen	<b>110,000,000</b>						100 persen	<b>121,000,000</b>	
1 03 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENSTRA, RENJA dan hasil Verivikasi POKIR			4 Dokumen	50,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			6 Bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Bulan	66,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>1 03 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pesentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen	<b>20,180,000,000</b>						100 persen	<b>22,298,000,000</b>	
1 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	19,800,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	14 Bulan	21,780,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terbayarnya Honorarium PA, KPA dll			12 Bulan	380,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Bulan	518,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>1 03 01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persen	persen	50 persen	<b>35,000,000</b>						50 persen	<b>38,500,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan pelatihan	12 Bulan	11,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya DIKLAT DAN BINTEK				5 orang	25,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan pelatihan	5 orang	27,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>1 03 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>470,000,000</b>						100 persen	<b>517,000,000</b>	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbelinya Lampu dan komponen jaringan listrik				12 Bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 Bulan	22,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 bulan	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 bulan	33,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	45,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 bulan	49,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu				12 bulan	68,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 bulan	74,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 bulan	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip OPD				12 Bulan	7,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Kantor, Rumah Tangga, barang cetakan. Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi SKPD, Arsp SKPD	12 Bulan	7,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik daerah	persen		persen	100 persen	<b>2,550,000,000</b>						100 persen	<b>2,768,000,000</b>	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Terbelinya Tandem Roller 4 Ton Terbelinya Truck 120 PS Terbelinya Walker 1 Ton				2 unit 1 unit 1 unit	2,150,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung kantor, Alat Besar	2 unit 1 unit 1 unit	2,328,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terbelinya Mebeler				24 unit	50,000,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung kantor, Alat Besar	24 unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Lab Gergaji mesin Terbelinya Komputer PC dan Printer Terbelinya Laptop Terbelinya Mesin Pemotong rumput				2 unit 7 unit 12 unit 2 Unit 8 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung kantor, Alat Besar	2 unit 7 unit 12 unit 2 Unit 8 Unit	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Pagar Keliling Pembangunan Pos SATPAM				1 ls 1 ls	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung kantor, Alat Besar	1 ls 1 ls	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemda	persen		persen	100 persen	<b>2,410,000,000</b>						100 persen	<b>2,651,000,000</b>	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Internet, PDAM dll				12 bulan	250,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Jasa Telekomunikasi dan PTT dan Outsourcing	12 bulan	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji PTT Tersedianya dan Terbayarnya Outsourcing				5 orang 80 orang	2,160,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Jasa Telekomunikasi dan PTT dan Outsourcing	5 orang 80 orang	2,376,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	persen		persen	100 persen	<b>980,024,700</b>						100 persen	<b>1,043,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM, Perpanjangan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala OPD				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Alat Besar	12 Bulan	38,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional OPD, Terbayarnya Pajak, KIR Kendaraan Dinas Operasional OPD				12 Bulan	310,224,700	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Alat Besar	12 Bulan	315,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat Besar				12 Bulan	300,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Alat Besar	12 Bulan	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Laptop, Komputer PC, Mesing Pemotong rumpuk, Pemeliharaan Genset, Kalibarsi Alat Lab, dan Pembelian Pisau Core				12 Bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Alat Besar	12 Bulan	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Kantor Induk DPU TARU, dan 6 Kantor UPT DPU TARU				12 Bulan	134,800,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas, Kendaraan Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan mesin Lainnya, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Alat Besar	12 Bulan	140,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Rasio Jaringan Irigasi	- -		- -	-- 3575 -	<b>167,998,854,600</b>						-- 3575 -	<b>160,096,060,560</b>	
1 03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Panjang Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob	persen persen		persen persen	60 persen 50 persen	<b>141,175,375,800</b>						60 persen 50 persen	<b>136,072,913,380</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pengendali banjir dan rob terencana				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	2 Dokumen	210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang dibangun				2 Buah	3,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	2 Buah	3,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terpenuhinya pembangunan bangunan perkuatan tebing di Kabupaten Pekalongan				100 persen	23,150,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	7,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						0						0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	Terpenuhinya pembangunan kanal banjir di Kabupaten Pekalongan				100 persen	63,400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	69,740,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terpenuhinya pembangunan stasiun pompa banjir di Kabupaten Pekalongan				100 persen	4,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	3,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terpenuhinya rehabilitasi bangunan perkuatan tebing di Kabupaten Pekalongan				100 persen	33,510,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	36,861,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpenuhinya normalisasi/restorasi sungai di Kabupaten Pekalongan				100 persen	11,700,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	12,870,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai di Kabupaten Pekalongan				100 persen	1,300,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir di Kabupaten Pekalongan				100 persen	665,375,800	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	100 persen	731,913,380	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Pekalongan				100 persen	250,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	100 persen	260,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen		persen	82.72 persen	<b>26,823,478,800</b>					82.72 persen	<b>24,023,147,180</b>		
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan irigasi terencana				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	2 Dokumen	210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya pembangunan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Pekalongan				100 persen	6,700,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 persen	3,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Pekalongan				100 persen	10,192,416,800	Kab. Pekalongan	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 persen	11,211,658,480	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Pekalongan				100 persen	6,293,345,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 persen	5,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terpenuhinya rehabilitasi bendung irigasi di Kabupaten Pekalongan				100 persen	2,637,717,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 persen	2,901,488,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Pekalongan				100 persen	800,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100 persen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	-	-	-	--	<b>15,232,861,500</b>						--	<b>11,602,647,650</b>	
1 03 03 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah SPAM yang terbangun	rumah tangga		rumah tangga	1000 rumah tangga	<b>15,232,861,500</b>						1000 rumah tangga	<b>11,602,647,650</b>	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya DED Air Minum				45 Paket	100,659,900	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan SPAM Perdesaan, Perluasan SPAM Perkotaan	45 Paket	110,725,890	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarpras air bersih kontraktual, terlaksananya pembangunan sarana prasarana air minum melalui program PAMSIMAS, terlaksananya pembangunan sarana prasarana air minum melalui program hibah air minum perdesaan				30 Desa	8,728,866,900	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan SPAM Perdesaan, Perluasan SPAM Perkotaan	30 Desa	4,888,253,590	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	terlaksananya pembangunan SPAM perdesaan				10 Desa	5,016,362,080	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan SPAM Perdesaan, Perluasan SPAM Perkotaan	10 Desa	5,077,998,288	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya perluasan SPAM Perkotaan				12 Desa	1,386,972,620	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan SPAM Perdesaan, Perluasan SPAM Perkotaan	12 Desa	1,525,669,882	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah di TPA	0 -		0 -	--	<b>660,000,000</b>						--	<b>726,000,000</b>	
1 03 04 2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya TPS di TPA	buah		buah	5 buah	<b>660,000,000</b>						5 buah	<b>726,000,000</b>	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya pembangunan TPS3R di perdesaan				2 Desa	660,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2 Desa	726,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik	-		-	--	<b>5,783,125,260</b>						--	<b>6,361,437,786</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	03	05	2.01			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	rumah		rumah	500 rumah	<b>5,783,125,260</b>					500 rumah	<b>6,361,437,786</b>		
1	03	05	2.01	02		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota						0						0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05	2.01	06		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya sistem air limbah domestik setempat di desa sasaran				20 Desa	4,710,173,160	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat, Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	20 Desa	5,181,190,476	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	2.01	12		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya sistem air limbah domestik terpusat di desa sasaran				4 Desa	1,072,952,100	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat, Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	4 Desa	1,180,247,310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase Drainase kondisi baik	-		-	37,32 -	<b>27,100,000,001</b>						37,32 -	<b>15,310,000,000</b>	
1	03	06	2.01			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Drainase kondisi baik	m		m	250 m	<b>27,100,000,001</b>						250 m	<b>15,310,000,000</b>	
1	03	06	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase terencana				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Drainase Perkotaan, Pemeliharaan Sistem Drainase	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	03	06	2.01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Drainase di Kab Pekalongan				100 %	10,500,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Drainase Perkotaan, Pemeliharaan Sistem Drainase	100 %	10,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terbangunnya dan terpeliharanya Drainase di Kab Pekalongan				100 %	16,500,000,001	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyusunan Rencana, Pembangunan Drainase Perkotaan, Pemeliharaan Sistem Drainase	100 %	5,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	bangunan gedung yang memiliki IMB	-	-	--		<b>5,999,264,510</b>						--	<b>6,379,190,961</b>	
1	03	08	2.01			<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan	buah	buah	1500 buah		<b>5,999,264,510</b>						1500 buah	<b>6,379,190,961</b>	
1	03	08	2.01	01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya pendataan bangunan gedung di kab pekalongan dan pelayanan publik dalam memberikan rekomendasi IMB dan SLF			285 Desa		610,114,010	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pendataan Bangunan Ber IMB, Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Gedung serta Bantuan Teknis Pembangunan Gedung	285 Desa	671,125,411	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya gedung rekrim, PWI, pemeliharaan rusunawa, perbaikan sarana air bersih rusunawa, dan perubahan sambungan listrik rusunawa			6 Paket		5,324,373,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pendataan Bangunan Ber IMB, Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Gedung serta Bantuan Teknis Pembangunan Gedung	6 Paket	5,636,811,070	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan dalam memberikan bantuan teknis dan penyusunan AHSP bangunan gedung di Kab Pekalongan				100 %	64,776,800	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pendataan Bangunan Ber IMB. Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Gedung serta Bantuan Teknis Pembangunan Gedung	100 %	71,254,480	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	-		-	12,20 -	<b>13,737,087,780</b>						12,20 -	<b>14,670,796,558</b>	
1.03.09.2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kawasan Yang Tertata Sesuai RTBL	kawasan		kawasan	4 kawasan	<b>13,737,087,780</b>						4 kawasan	<b>14,670,796,558</b>	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kawasan Perencanaan teknis infrastruktur				1 Dokumen 57 Paket	437,087,780	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pelaksanaan dari Penyusunan Rencana Kegiatan, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Pemeliharaannya	1 Dokumen 57 Paket	480,796,558	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Panjang Trotoar / Pedestrian yang dibangun				7207 meter	12,150,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pelaksanaan dari Penyusunan Rencana Kegiatan, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Pemeliharaannya	7207 meter	12,925,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah titik lokasi Sarana Prasarana Kota (RTH, Pedestrian, Saluran/ Drainase Kota dan Batas Wilayah) yang tertangani				7 Lokasi	1,150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pelaksanaan dari Penyusunan Rencana Kegiatan, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Pemeliharaannya	7 Lokasi	1,265,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	-		-	75,65 -	<b>225,169,427,505</b>						75,65 -	<b>246,786,370,255</b>	
1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jalan Terehabilitasi	km		km	14.8 km	<b>225,169,427,505</b>						14.8 km	<b>246,786,370,255</b>	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah jembatan atau panjang jalan terencana				10 Dokumen	1,350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	10 Dokumen	1,485,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	pembangunan jalan				1	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	1	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Terpenuhinya Rekonstruksi Jalan di Kabupaten Pekalongan				100 %	77,139,427,500	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	100 %	84,853,370,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Terpenuhinya Rehabilitasi Jalan di Kab Pekalongan				100 %	116,080,000,005	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	100 %	127,688,000,005	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Rusak ringan di Kab Pekalongan				25 KM	10,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	25 KM	10,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan di Kab Pekalongan				1 Buah	2,400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	1 Buah	2,640,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya penggantian jembatan				10 Unit	15,700,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	10 Unit	17,270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Terpeliharanya Jembatan rusak ringan di Kab Pekalongan				100 %	2,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan rutin jalan, Pembangunan Jembatan, Penggantian Jembatan dan rehabilitasi Jembatan	100 %	2,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Meningkatnya kemampuan pelaksana pekerjaan konstruksi dan K3, Rekomendasi Perijinan Jasa Konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan, Terpenuhinya informasi tentang Jasa Konstruksi	-		-	13,78 -	<b>621,472,710</b>						13,78 -	<b>672,619,981</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	persen		persen	50 persen	<b>130,000,000</b>						50 persen	<b>143,000,000</b>	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga terampil dan K3 yang memiliki sertifikat kompetensi				40 Orang	130,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	40 Orang	143,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi yang tersedia dan terupdate pertahun	persen		persen	100 persen	<b>371,472,710</b>						100 persen	<b>403,619,981</b>	
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah data dan informasi Tenaga kerja dan Badan Usaha di Kabupaten Pekalongan yang tersusun dalam 1 tahun				993 Orang	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan data Penggunaan Material dan Tenaga, Tenaga Kerja dan Badan Usaha, Kegagalan Konstruksi	993 Orang	105,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen data dan informasi ketersediaan/penggunaan material yang tersusun dalam 1 tahun dibagi 2 semester dalam 1 tahun				2 Dokumen	197,060,710	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan data Penggunaan Material dan Tenaga, Tenaga Kerja dan Badan Usaha, Kegagalan Konstruksi	2 Dokumen	216,766,781	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah informasi kegagalan bangunan/konstruksi yang rawan dibagi dengan jumlah penyelesaian/pengkajian data dari informasi yang masuk				10 Dokumen	74,412,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan data Penggunaan Material dan Tenaga, Tenaga Kerja dan Badan Usaha, Kegagalan Konstruksi	10 Dokumen	81,853,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>						<b>0</b>							<b>0</b>	
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK Nasional yang diterbitkan Jumlah Tenaga terampil dan K3 yang memiliki sertifikat kompetensi				20 Dokumen 30 Orang	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Dokumen 30 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	Jumlah proyek dalam kewenangan pengawasan yang melakukan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan konstruksi	lokasi		lokasi	75 lokasi	<b>120,000,000</b>						75 lokasi	<b>126,000,000</b>	
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Proyek dalam kewenangan pengawasan yang melakukan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi dibagi jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100				75 Lokasi	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75 Lokasi	126,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	% Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	-		-	28,571 -	<b>850,000,000</b>						28,571 -	<b>935,000,000</b>	
1 03 12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>500,000,000</b>						1 dokumen	<b>550,000,000</b>	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang memiliki Dokumen RDTR				1 Lokasi	500,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	1 Lokasi	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yang disusun  Laporan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	dokumen lokasi		dokumen lokasi	6 dokumen 300 lokasi	<b>350,000,000</b>						6 dokumen 300 lokasi	<b>385,000,000</b>	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi yang dimonitoring				300 Lokasi	350,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300 Lokasi	385,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						<b>14,050,000,000</b>						<b>15,455,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	--	50,000,000						--	55,000,000	
2 10 04 2.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan	kasus	kasus	8 kasus	8 kasus	50,000,000						8 kasus	55,000,000	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikan Masalah Pertanahan			8 Permasalahan	8 Permasalahan	50,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam daerah	8 Permasalahan	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0 -	0 -	--	--	14,000,000,000						--	15,400,000,000	
2 10 10 2.01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kasus ganti kerugian pengadaan tanah	kasus	kasus	3 kasus	3 kasus	14,000,000,000						3 kasus	15,400,000,000	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terbelinya tanah untuk kepentingan umum			2 Ha	2 Ha	14,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	2 Ha	15,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>TOTAL</b>							<b>503,937,118,566</b>							<b>508,432,123,751</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya Rehabilitasi dan pembangunan bagi rumah korban bencana atau relokasi korban pemerintah	%		%	100 %	<b>4,825,000,000</b>						100 %	<b>5,307,500,000</b>	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi				100 persen	900,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	100 persen	990,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen site plan dan atau detail engineering design (DED) yang tersusun				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	1 Dokumen	27,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani atau dibangun				100 Unit	700,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	100 Unit	770,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan korban bencana yang tertangani atau jumlah kawasan relokasi program kabupaten melalui kegiatan pembangunan rumah khusus beserta PSU nya				1 Kawasan	3,200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	1 Kawasan	3,520,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 02 2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Tercapainya pembinaan pengelolaan rusun	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>300,000,000</b>						12 Bulan	<b>330,000,000</b>	
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan rusun				1 Unit	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Pemenuhan Rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	1 Unit	330,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 02 2.06	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Persentase terlaksananya Izin yang dikeluarkan dan permohonan izin yang di ajukan	%		%	100 %	<b>50,000,000</b>						100 %	<b>55,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	12 Bulan	55,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang didukung Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan	%		%	100 %	<b>25,964,349,700</b>						100 %	<b>9,404,559,670</b>	
1.04.03.2.01	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	tercapainya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	%		%	100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>33,000,000</b>	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan	12 Bulan	33,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Tercapainya perencanaan penataan dan kualitas kawasan permukiman kumuh	%		%	100 %	<b>2,694,599,700</b>						100 %	<b>2,744,059,670</b>	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Waktu pelaksanaan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh				0 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perumahan	0 Bulan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen yang disusun				1 Dokumen	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perumahan	1 Dokumen	880,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Desa yang mendapatkan Hibah uang dan barang ,Bantuan Sosial Kepada Masyarakat				119 Desa	1,694,599,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perumahan	119 Desa	1,644,059,670	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan				12 Bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perumahan	12 Bulan	220,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen yang direview				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perumahan	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Tercapainya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	%		%	100 %	<b>23,239,750,000</b>						100 %	<b>6,627,500,000</b>	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen site plan yang tersusun				1 Dokumen	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	1 Dokumen	495,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang diperbaiki dikawasan permukiman kumuh				170 unit	3,132,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	170 unit	3,272,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terbangunnya rumah layak huni beserta PSU di kawasan permukiman kumuh				1 kawasan	19,557,250,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	1 kawasan	2,750,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh				8 bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	8 bulan	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang diberi bantuan uang untuk sewa rumah tinggal sementara dalam 1 tahun				0 jumlah Rumah Tangga	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	0 jumlah Rumah Tangga	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan				0 Kawasan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	0 Kawasan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Laporan hasil pendataan dan verifikasi				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Cakupan Ketersediaan Rumah layak huni	%		%	100 %	<b>13,750,000,000</b>						100 %	<b>15,125,000,000</b>	
1 04 04 2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perbaikan RTLH diluar kawasan permukiman kumuh	%		%	100 %	<b>13,750,000,000</b>						100 %	<b>15,125,000,000</b>	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase jumlah perbaikan rumah tidak layak huni				4298 Persen	11,250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup perumahan	4298 Persen	12,375,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terbangunya Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh				1 Kawasan	2,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup perumahan	1 Kawasan	2,750,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	-		-	100 -	<b>2,075,000,000</b>						100 -	<b>2,282,500,000</b>	
1 04 05 2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Terlaksanya Lingkungan sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana utilitas umum (PSU)	%		%	100 %	<b>2,075,000,000</b>						100 %	<b>2,282,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Penyediaan PSU di Perumahan				5 unit	2,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	5 unit	2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan				12 Bulan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas lingkungan perumahan	12 Bulan	82,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1 04 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Terlaksananya sertifikasi yang dikeluarkan	%		%	100 %	<b>50,000,000</b>						100 %	<b>55,000,000</b>		
1 04 06 2.01	<b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>	Persentase Terlaksananya sertifikasi yang dikeluarkan	%		%	100 %	<b>50,000,000</b>						100 %	<b>55,000,000</b>		
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah bulan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang yang dilaksanakan				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	12 Bulan	55,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>91,996,700,100</b>							<b>96,609,370,110</b>	
2 11 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	--	<b>27,703,357,600</b>						--	<b>30,473,693,360</b>		
2 11 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tercapainya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	<b>200,000,000</b>						10 dokumen	<b>220,000,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	3 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	<b>15,194,016,000</b>						100 %	<b>16,713,417,600</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN (Bulan)				14 Bulan	14,927,595,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	14 Bulan	16,420,355,160	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Bulan)				12 Bulan	266,420,400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	293,062,440	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	<b>125,336,800</b>						100 %	<b>137,870,480</b>	
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu (Dokumen)				5 Dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja ASN dan pendidikan pelatihan ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Pegawai)				10 Orang	25,336,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja ASN dan pendidikan pelatihan ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	27,870,480	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>513,117,200</b>						100 %	<b>564,428,920</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit terpenuhinya komponen listrik atau kantor (Buah)				15 Buah	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	15 Buah	38,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)				12 Bulan	44,272,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	48,699,420	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga (Bulan)				12 Bulan	22,189,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	24,408,120	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	41,112,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	45,223,860	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu (Bulan)				12 Bulan	85,836,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	94,419,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Kali)				110 Kali	224,707,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	110 Kali	247,177,920	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penataan arsip dinamis pada OPD (Bulan)				12 Bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	66,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian identifikasi barang milik daerah	%		%	100 %	<b>2,440,000,000</b>						100 %	<b>2,684,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)				0 unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian identifikasi barang milik daerah	0 unit	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel (unit)				5 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian identifikasi barang milik daerah	5 unit	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				16 unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian identifikasi barang milik daerah	16 unit	165,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)				1 unit	2,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian identifikasi barang milik daerah	1 unit	2,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)				5 unit	190,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian identifikasi barang milik daerah	5 unit	209,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>2 11 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>8,890,646,000</b>						12 Bulan	<b>9,779,710,600</b>	
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)				12 bulan	219,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	241,120,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pengadaan jasa pelayanan umum (orang)				298 orang	8,671,446,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 orang	9,538,590,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
<b>2 11 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian identifikasi barang milik daerah Persentase Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	% Bulan		% Bulan	100 % 12 Bulan	<b>340,241,600</b>						100 % 12 Bulan	<b>374,265,760</b>	
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan dinas jabatan ( Bulan)				12 Bulan	39,130,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	43,043,880	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Bulan)				12 Bulan	164,460,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	180,906,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebel (Bulan)				0 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	0 Bulan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (Bulan)				12 Bulan	41,650,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	45,815,880	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara atau direhabilitasi (Unit)				6 Unit	95,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	6 Unit	104,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup berkualitas	-		-	100 -	<b>250,000,000</b>						100 -	<b>275,000,000</b>	
2 11 02 2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Ketercapaian Dokumen RPPLH, DODTLH berbasis ekojasa yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	<b>250,000,000</b>						1 dokumen	<b>275,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen neraca sumber daya alam Jumlah dokumen DDDTLH berbasis jasa ekosistem yang tersusun Jumlah dokumen RPPLH yang disusun				0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	275,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan opd lain				0 Kegiatan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	0 Kegiatan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Dokumen KLHS,RPJPD, RPJMD, KHS, KRP yang tersusun	dokumen		dokumen	0 dokumen	0						0 dokumen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS RPJPD Atau RPJMD yang disusun				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP yang disusun				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	- -	- -		100 - --	<b>5,800,000,000</b>						100 - --	<b>6,380,000,000</b>	
2 11 03 2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kampung iklim yang terdaftar dalam SRN	%	%		100 %	<b>4,670,000,000</b>						100 %	<b>5,137,000,000</b>	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data Pemantauan terhadap Kualitas air permukaan udara ambien dan air laut				20 Sampel	2,220,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kampung iklim yang terdaftar dalam SRN	20 Sampel	2,442,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Yang Tersusun Kampung Iklim yang terdaftar dalam SRN				1 Dokumen 16 Desa	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kampung iklim yang terdaftar dalam SRN	1 Dokumen 16 Desa	165,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Akreditasi Laboratorium ( ISO/IEC 17025 2017) Bangunan Laboratorium Jumlah Parameter Uji Penyediaan alat Uji Laboratorium Study identifikasi peran penting laboratorium lingkungan dalam penyediaan data untuk mendukung pengambilan kebijakan				2 Dokumen 1 Bangunan 20 Parameter 1 Paket 1 Dokumen	2,300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kampung iklim yang terdaftar dalam SRN	2 Dokumen 1 Bangunan 20 Parameter 1 Paket 1 Dokumen	2,530,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase dokumen kerusakan lingkungan hidup yang tersusun Persentase kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	% %		% %	100 % 100 %	<b>510,000,000</b>						100 % 100 %	<b>561,000,000</b>	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen IKLH yang disusun tiap tahun Jumlah Dokumen IKPLHD yang disusun tiap tahun Study kerusakan lingkungan akibat Kegiatan Pengambilan ABT dan Pemetaan Pengambilan ABT Study Kerusakan lingkungan akibat Produksi Bio massa Study Potensi dan Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan pertambangan mineral batuan tanah urug Study Potensi dan Kerusakan lingkungan akibat kegiatan Sirtu pasir batu dan andesit Study Potensi dan Kerusakan Sumber Mata Air Zonasi potensi pengambilan ABT				1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	510,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya dokumen kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	561,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	11	03	2.03			<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah B3, cakupan lahan kritis terkonservasi  Pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah B3 dan cakupan lahan kritis terkonservasi	%  %		%  %	100 %  100 %	<b>620,000,000</b>					100 %  100 %	<b>682,000,000</b>		
2	11	03	2.03	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Identifikasi sumber pencemar ,Isolasi Penghentian sumber Pencemar pembersihan unsur pencemaran remediasi				20 Meter per segi	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya Sumber Pencemaran yang terisolasi, penghentian dan pembersihan sumber pencemaran remediasi dan perlindungan terhadap konservasi lahan kritis pada kawasan fungsi lindung dan DTA	20 Meter per segi	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah daerah tangkapan air dan kawasan berfungsi lindung yang dikonservasikan  jumlah persentase luas lahan akses terbuka yang dipulihkan atau luas lahan akses terbuka seluruhnya  Konservasi lahan kritis perlindungan terhadap kawasan berfungsi lindung dan DTA  Pemulihan lahan akses terbuka				20 Persen 25 persen 20 Ha 0 Dokumen	520,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terlaksananya Sumber Pencemaran yang terisolasi, penghentian dan pembersihan sumber pencemaran remediasi dan perlindungan terhadap konservasi lahan kritis pada kawasan fungsi lindung dan DTA	20 Persen 25 persen 20 Ha 0 Dokumen	572,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Presentase RTH dalam kondisi baik	-	-		100 -	<b>1,250,000,000</b>						100 -	<b>1,375,000,000</b>	
2	11	04	2.01			<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Pekalongan	%		%	100 %	<b>1,250,000,000</b>						100 %	<b>1,375,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah dokumen identifikasi Ke Anekaragaman hayati dan dokumen rencana pengelolaan Keaneekaragaman hayati kab Pekalongan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Identifikasi Keaneekaragaman hayati daerah Pembuatan dokumen site plan Pembuatan pagar keliling hutan kota Pembuatan papan nama hutan kota Pengadaan Bibit				1 Dokumen 0 Dokumen 0 Unit 0 Unit 3000 Buah	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen 0 Dokumen 0 Unit 3000 Buah	220,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dokumen atau data RTH yang disusun Jumlah pot median Pulau dan Turus jalan yang Tersedia Jumlah taman kota yang dibangun Luas taman kota terpelihara Penghijauan RTH Gemek Turus Jalan				0 Dokumen 75 Buah 0 persen 0 Ha 0 Persen	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Pekalongan	0 Dokumen 75 Buah 0 persen 0 Ha 0 Persen	440,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Arboretum yang dikelola				13 Lokasi	550,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Pekalongan	13 Lokasi	605,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	-	-	-	100 -	<b>30,000,000</b>						100 -	<b>33,000,000</b>	
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Terlaksananya ijin penyimpanan, syarat administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3 terverifikasi	dokumen		dokumen	12 dokumen	<b>15,000,000</b>						12 dokumen	<b>16,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin Penyimpanan Sementara LB3 Terfasilitasi				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah B3	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Persyaratan administrasi dan teknis ijin Penyimpanan sementara limbah B3 terverifikasi				6 Dokumen	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah B3	6 Dokumen	16,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	%		%	100 %	<b>15,000,000</b>						100 %	<b>16,500,000</b>	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Komitmen ijin pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan Pengelolaan Limbah B3	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Arahan Teknis Pengelolaan limbah B3				5 Kali	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan Pengelolaan Limbah B3	5 Kali	16,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	-		-	100 -	<b>363,000,000</b>						100 -	<b>399,300,000</b>	
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pembinaan Pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilakukan	%		%	100 %	<b>363,000,000</b>						100 %	<b>399,300,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Home industri UMKM Yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Lingkungan dan Atau Ijin PPLH Jumlah Persetujuan Lingkungan atau Rekomendasi UKL- UPL Atau Surat Keputusan Lingkungan Hidup				10 Usaha 30 Usaha	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	10 Usaha 30 Usaha	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat atau petugas pengawas lingkungan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan observasi lapangan (praktek atau Pelaksanaan tugas lapangan )				2 Orang	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	2 Orang	60,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin PPLH yang diterbitkan Jumlah usaha dan atau Kegiatan yang diawasi atau di evaluasi				3 Dokumen 50 Perusahaan	120,000,000	Semua Kab/Kota Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	3 Dokumen 50 Perusahaan	132,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha atau kegiatan yang mendapat sanksi dibagi usaha atau kegiatan yang diawasi				12 Usaha	88,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	12 Usaha	96,800,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase desa/ kelurahan yang memenuhi indikator Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Persentase sekolah adiwiyata	- -		- -	-- 100 -	<b>345,000,000</b>						-- 100 -	<b>379,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%		%	100 %	345,000,000						100 %	379,500,000	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya BinteK atau Pelatihan TOT bidang LH Pelatihan Untuk Tomas atau Toga Raker Pengelolaan sampah Pelatihan Pengelola TPS3R TPST Rumah Kompos BS dll				4 Kali	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	4 Kali	110,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Gerakan PBLHS (Peduli Berbudaya lingkungan hidup di sekolah ) Kampung Mandiri Sampah				10 Sekolah	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	10 Sekolah	82,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Edukasi komunikasi masyarakat dibidang Pengelolaan sampah Sosialisasi Bahaya Pecemaran lingkungan Sosialisasi langit Biru dan Bumi Hijau				20 Persen 2 Kali 2 Kali	170,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	20 Persen 2 Kali 2 Kali	187,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	-	-	-	7 -	<b>75,000,000</b>						7 -	<b>82,500,000</b>	
2 11 09 2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tokoh / Lembaga Masyarakat yang mendapatkan penghargaan tingkat kota provinsi dan nasional	desa		desa	7 desa	<b>75,000,000</b>						7 desa	<b>82,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah desa atau kelurahan yang memenuhi indikator lingkungan bersih sehat (LBS)				7 Desa	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	7 Desa	82,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-		-	24 -	<b>148,000,000</b>						24 -	<b>162,800,000</b>	
2 11 10 2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Aduan		Aduan	24 Aduan	<b>148,000,000</b>						24 Aduan	<b>162,800,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah aduan masyarakat yang dikelola atau ditindaklanjuti di bagi jumlah aduan				12 Laporan	88,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	12 Laporan	96,800,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kasus yang ditangani dengan sanksi administrasi penyelesaian sengketa dan atau dilakukan penyelidikan lingkungan diluar pengadilan atau melalui pengadilan dibagi jumlah kasus				12 Kasus	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Air Sungai, Udara Ambien, dan Tutupan Lahan melalui Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	12 Kasus	66,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase cakupan area pelayanan Persentase timbulan sampah yang ditangani Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	- - -	- - -	- 100 - -	56,032,342,500						- 100 - -	57,048,576,750		
2 11 11 2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan di Kab Pekalongan Terlaksananya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pekalongan	% %	% %	100 % 100 %	56,032,342,500						100 % 100 %	57,048,576,750		
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen capaian kinerja Pengelolaan sampah Kabupaten atau kota yang tersusun (Jakstrada SRT dan SSRT) Jumlah Dokumen kaji ulang rencana induk pengelolaan sampah Kab Pekalongan yang tersusun Jumlah dokumen profil pengelolaan sampah kabupaten pekalongan (Peta Sebaran TPS atau Contaner sampah Peta Area Pelayanan Peta sebaran TPS3R Bank Sampah) yang Tersusun Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Perda 4 th 2017 tentang Pengelolaan sampah dan turunannya			2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Kali	370,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Kali	407,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Gerakan sumber bersih (berjumpa, bersih sungai, resik pantai, pelaksanaan HPSN, WCD) Jumlah bank sampah yang terbangun dan tersedia sarprasnya Jumlah desa mandiri sampah yang terbentuk Jumlah desa yang menerima kegiatan edukasi dan sosialisasi mobil hijau Jumlah PDU / TPS 3R yang terbangun Jumlah pengadaaan tempat sampah Jumlah pengadaan alat angkut sampah jumlah pengadaan alat bor biopori Jumlah pengadaan komposter/keranjang takakura Jumlah rumah kompos/tempat pengelolaan sampah skala desa/biogas sampah yang terbangun				36 Kali 3 bank sampah 0 desa 20 desa 5 unit 125 unit 0 unit 375 unit 250 unit 0 unit	10,269,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pekalongan	36 Kali 3 bank sampah 0 desa 20 desa 5 unit 125 unit 0 unit 375 unit 250 unit 0 unit	11,296,560,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan Operasional sampah yang terpelihara (arm roll 14 dumptruck 12 pickup 5 Tangki taman 2 tangki tinja 3 Truck PJU 1 Katrol PJU 1 Roda 3 10 Jumlah Landasan Kontainer yang terbangun Jumlah pembelian suku cadang BBM Jumlah Pengadaan arm roll Jumlah Pengadaan Bak Container sampah Jumlah Pengadaan dump truck sampah Jumlah Pengadaan Kendaraan Pick up Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut sampah Jumlah tempat sampah terpilah untuk area publik yang tersedia Jumlah TPA Sanitari landfil terbangun Jumlah TPST yang terbangun Pengadaan Tanah Urug (4 Paket) Pengadaan Tanah Urug Sampah Revitalisasi Bak Lechet Revitalisasi Gas Metan Terlaksananya Pemeliharaan TPA Bojonglarang Terpeliharanya Drainase TPA Terpeliharanya Jembatan Timbang				49 Unit 5 Unit 12 Bulan 3 Unit 25 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Unit 625 Unit 1 Paket 2 Unit 4 Paket 8 Meter Persegi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	26,148,837,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pekalongan	49 Unit 5 Unit 12 Bulan 3 Unit 25 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Unit 625 Unit 1 Paket 2 Unit 4 Paket 8 Meter Persegi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	28,763,721,250	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan program bersih lingkungan				48 Kali	430,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pekalongan	48 Kali	363,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	05						12,325,818,900						12,940,096,490							
1	05	01					8,322,429,000						8,489,051,700							
1	05	01	2.01				50,000,000						65,000,000							
1	05	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)				12 Bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	30,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	35,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	bulan		bulan	14 bulan	7,226,602,000					14 bulan	7,276,602,000		
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				12 Bulan	6,952,602,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	semua pegawai satpolIPP dan DAMkar	12 Bulan	6,992,602,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 Bulan	274,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	semua pegawai satpolIPP dan DAMkar	12 Bulan	284,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)	%		%	50 %	140,000,000					50 %	147,000,000		
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut (Buah)				110 Setel	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Satpolpp dan DAMkar	110 Setel	95,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				12 Bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Satpolpp dan DAMkar	12 Bulan	21,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				1 orang	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Satpolpp dan DAMkar	1 orang	31,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	JumlahBulan Terpenuhiya Cetak Penggandaan kantor (Bulan) Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	bulan bulan			12 bulan 12 bulan	<b>132,500,000</b>						12 bulan 12 bulan	<b>160,000,000</b>	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhiya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)				12 Bulan	7,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SatpolPP dan Damkar	12 Bulan	8,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SatpolPP dan Damkar	12 Bulan	16,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				100 %	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SatpolPP dan Damkar	100 %	8,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhiya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SatpolPP dan Damkar	12 Bulan	11,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhiya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SatpolPP dan Damkar	12 Bulan	36,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				12 Bulan	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SatpolPP dan Damkar	12 Bulan	81,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan			12 bulan	<b>140,327,000</b>						12 bulan	<b>167,559,700</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				2 unit	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SatpolPP dan Damkar	2 unit	95,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				8 unit	12,327,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SatpolPP dan Damkar	8 unit	13,559,700	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				10 unit	58,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SatpolPP dan Damkar	10 unit	59,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>265,500,000</b>						12 bulan	<b>289,390,000</b>	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	36,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SATpolPP dan Damkar	12 Bulan	37,600,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				12 Bulan	228,900,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SATpolPP dan Damkar	12 Bulan	251,790,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	bulan		bulan	12 bulan	<b>367,500,000</b>						12 bulan	<b>383,500,000</b>	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 Bulan	32,500,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SATpolPP dan Damkar	12 Bulan	35,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 Bulan	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SATpolPP dan Damkar	12 Bulan	310,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	SATpolPP dan Damkar	12 Bulan	11,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SATpolPP dan Damkar	12 Bulan	27,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	05	02				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	prosentase gangguan Ketrentaman dan Ketertiban umum yang tertangani	-		-	100 -	<b>3,425,389,900</b>					100 -	<b>3,841,044,790</b>		
1	05	02	2.01			<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	kegiatan	kali	kali	212 kali	<b>3,195,348,900</b>						212 kali	<b>3,391,003,790</b>		
1	05	02	2.01	01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli Wilayah, Pengamanan dan pengawasan pejabat acara pemda dan acara resmi, Operasi Pemberantasan Penyakit masyarakat(PEKAT) dan pengemis gelandangan dan Orang terlantar (PGOT),Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			196 kali	1,456,548,900	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	semua masyarakat kabupaten pekalongan	196 kali	1,602,203,790	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	02	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			160 kali	127,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	semua masyarakat kabupaten pekalongan	160 kali	147,300,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	02	2.01	04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pam Natal tahun baru TNI, POLRI/ lainnya dalam mengemban tugas, jumlah pesertanya jumlah tersedianya uang saku dan honorarium kegiatan bagi 100 anggota LRC			16 kali	1,133,250,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	semua masyarakat kabupaten pekalongan	16 kali	1,143,250,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	02	2.01	08		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah sarana dan prasarana satpol pp yang sesuai standar			16 jenis	478,250,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	semua masyarakat kabupaten pekalongan	16 jenis	498,250,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran		
1	05	02	2.02			<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	kegiatan	kali	kali	162 kali	<b>230,041,000</b>						162 kali	<b>450,041,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati				66 kali	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat kabupaten pekalongan	66 kali	210,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Monitoring / Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di 284 Desa 19 Kecamatan				24 kali	55,041,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat kabupaten pekalongan	24 kali	55,041,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi penegakan perda				72 kali	175,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat kabupaten pekalongan	72 kali	185,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-		-	100 -	<b>578,000,000</b>						100 -	<b>610,000,000</b>	
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	kegiatan	kali		kali	100 kali	<b>578,000,000</b>						100 kali	<b>610,000,000</b>	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelayanan penanganan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan evakuasi korban kebakaran				50 kegiatan	238,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat kabupaten pekalongan	50 kegiatan	240,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran				250 Kegiatan	145,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat kabupaten pekalongan	250 Kegiatan	170,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri				16 unit	195,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat kabupaten pekalongan	16 unit	200,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
<b>TOTAL</b>							<b>12,325,818,900</b>							<b>12,940,096,490</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
<b>1</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>05</b>						<b>9,606,800,418</b>						<b>11,195,400,000</b>								
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>					<b>4,214,317,818</b>						<b>5,362,000,000</b>								
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.01				<b>10,000,000</b>					8 dokumen	<b>12,000,000</b>								
1	05	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu					8 dokumen	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	8 dokumen	12,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.02				<b>2,019,967,638</b>					12 bulan	<b>2,650,000,000</b>								
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN					14 bulan	1,899,967,638	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BPBD Kabupaten Pekalongan	14 bulan	2,500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD					12 bulan	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.05				<b>5,000,000</b>					4 pegawai	<b>10,000,000</b>								
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					4 pegawai	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BPBD Kabupaten Pekalongan	4 pegawai	10,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.06				<b>314,796,180</b>					12 bulan	<b>355,000,000</b>								
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah					12 bulan	314,796,180						12 bulan	355,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya komponen listrik/kantor				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor				12 bulan	44,796,180	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu				12 bulan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk rapat-rapat koordinasi keluar daerah				12 bulan	95,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,169,554,000</b>						12 bulan	<b>1,580,000,000</b>	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)				3 unit	1,100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	3 unit	1,500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				9 unit	69,554,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	9 unit	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>202,000,000</b>						12 bulan	<b>215,000,000</b>	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pengadaan jasa pelayanan umum				3 orang	132,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	3 orang	135,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	9 unit	<b>493,000,000</b>						9 unit	<b>540,000,000</b>	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas jabatan (bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (bulan)				12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	12 bulan	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	218,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BPBD Kabupaten Pekalongan	1 unit	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana	%		%	100 %	<b>5,392,482,600</b>						100 %	<b>5,833,400,000</b>	
1 05 03 2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang		orang	225 orang	<b>84,999,600</b>						225 orang	<b>90,000,000</b>	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) yang dilaksanakan				100 %	84,999,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Warga negara yang menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) yang dilaksanakan	100 %	90,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang		orang	490 orang	<b>3,601,692,850</b>						490 orang	<b>3,880,000,000</b>	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	1 dokumen	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana				490 orang	756,798,400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	490 orang	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil dalam pengendalian operasi kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Sarpras kesiapsiagaan yang dibutuhkan terhadap bencana Jumlah warga negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan Pusdalops dan Sarpras penanggulangan bencana				22 orang 3 unit 154 orang	1,075,121,300	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	22 orang 3 unit 154 orang	1,200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan penanganan bencana				5 unit	676,000,150	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	5 unit	700,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi antar stakeholder penanggulangan bencana				3 kali	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	3 kali	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa dan kelurahan yang telah memiliki sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana / desa tangguh bencana				5 desa/kelurahan	318,773,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	5 desa/kelurahan	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisa dampak bencana yang disusun				20 dokumen	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	20 dokumen	160,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan untuk TRC				1 kali	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	1 kali	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	1 dokumen	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara di daerah rawan bencana dan aparatur yang mendapatkan gladi kesiapsiagaan bencana				150 orang	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang berada di daerah rawan bencana	150 orang	260,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang		orang	34858 orang	<b>1,450,573,750</b>						34858 orang	<b>1,580,000,000</b>	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang ditangani dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana				2 kali	242,405,350	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Korban bencana yang mendapatkan logistik penyelamatan dan evakuasi	2 kali	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				34858 orang	46,178,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Korban bencana yang mendapatkan logistik penyelamatan dan evakuasi	34858 orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan logistik penyelamatan dan evakuasi				34858 orang	161,990,400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Korban bencana yang mendapatkan logistik penyelamatan dan evakuasi	34858 orang	170,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				100 orang	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Korban bencana yang mendapatkan logistik penyelamatan dan evakuasi	100 orang	1,100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 03</b>	<b>2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	%	100 %	<b>255,216,400</b>						100 %	<b>283,400,000</b>	
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal				2 dokumen	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Warga negara yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	2 dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan lembaga bencana yang dilakukan				12 kali	71,016,400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Warga negara yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	12 kali	72,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang disepakati				2 organisasi	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Warga negara yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	2 organisasi	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah petugas pengelolaan sistem informasi kebencanaan				22 orang	79,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Warga negara yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	22 orang	81,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana				4 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Warga negara yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	4 bulan	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>TOTAL</b>							<b>9,606,800,418</b>							<b>11,195,400,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1 06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											<b>30,622,012,250</b>		<b>32,277,885,290</b>	
<b>1 06 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota selama lima tahun (%)	persen		persen	100 persen	<b>12,303,451,900</b>						100 persen	<b>13,004,155,000</b>	
<b>1 06 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen yang terpenuhi dalam rangka penyediaan dokumen selama satu tahun	dok		dok	9 dok	<b>54,999,900</b>						9 dok	<b>67,400,000</b>	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu				4 Dokumen	29,999,900	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	39,900,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu				5 Dokumen	25,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	27,500,000	Dinas Sosial
<b>1 06 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	persentase		persentase	100 persentase	<b>3,313,505,000</b>						100 persentase	<b>3,328,505,000</b>	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	3,163,505,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Dinas Sosial	1 tahun	3,163,505,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Bulan)				12 bulan	150,000,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Dinas Sosial	12 bulan	165,000,000	Dinas Sosial
<b>1 06 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi administrasi kepegawaian perangkat daerah selama satu tahun	bulan		bulan	12 bulan	<b>29,000,000</b>						12 bulan	<b>31,900,000</b>	
1 06 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				12 bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Dinas Sosial Kab. Pekalongan	12 bulan	16,500,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pegawai)				12 bulan	14,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Dinas Sosial Kab. Pekalongan	12 bulan	15,400,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	% Persentase		% Persentase	100 % 100 Persentase	<b>211,000,000</b>						100 % 100 Persentase	<b>232,100,000</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik / Kantor (unit/buah)				12 bulan	15,000,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	16,500,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JumlahBulan terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	27,500,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JumlahBulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	11,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetakan Penggandaan Kantor (bulan)				12 bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	22,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	JumlahBulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (bulan)				12 bulan	21,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	23,100,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				12 bulan	110,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	121,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD (Bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	11,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>7,900,000,000</b>						100 Persentase	<b>8,690,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JumlahPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				1 paket	450,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	1 paket	495,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	JumlahPengadaanMebel				12 bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	165,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JumlahPeralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				1 paket	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	1 paket	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 paket	7,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	1 paket	7,700,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 paket	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	1 paket	220,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>420,000,000</b>						100 Persentase	<b>462,000,000</b>	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial, Rumah Singgah, Sekretariat UPPKH, TMP dan Sanggar Karang Taruna	12 bulan	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya dalam penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	320,000,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial, Rumah Singgah, Sekretariat UPPKH, TMP dan Sanggar Karang Taruna	12 bulan	352,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>374,947,000</b>						100 Persentase	<b>192,250,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	38,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan (bulan)				12 bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	66,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Mebeuler (bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Kantor (Bulan)				12 bulan	29,947,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	32,750,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)				12 bulan	240,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Sosial	12 bulan	44,000,000	Dinas Sosial
<b>1 06 02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Presentasi penguatan PSKS Kabupaten Pekalongan	bulan		bulan	12 bulan	<b>540,000,000</b>						12 bulan	<b>572,000,000</b>	
<b>1 06 02</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan Kemampuan PSKS di Kabupaten Pekalongan	bulan		bulan	12 bulan	<b>540,000,000</b>						12 bulan	<b>572,000,000</b>	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial				12 bulan	220,000,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia (PSKS) di Kabupaten Pekalongan	12 bulan	220,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial				12 BULAN	320,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia (PSKS) di Kabupaten Pekalongan	12 BULAN	352,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase		Persentase	3.050 Persentase	<b>1,503,206,700</b>						3.050 Persentase	<b>1,570,587,370</b>	
1 06 04 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase		Persentase	1.4 Persentase	<b>535,780,200</b>						1.4 Persentase	<b>589,358,220</b>	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan sosial permakanan di rumah singgah selama satu tahun				155 orang	37,246,200	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	155 orang	40,970,820	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang selama satu tahun				155 orang	12,700,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	155 orang	13,970,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat alat bantu selama satu tahun				168 Orang	435,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	168 Orang	478,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga selama satu tahun				30 orang	7,750,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	30 orang	8,525,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				100 orang	5,400,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 orang	5,940,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan selama satu tahun				100 orang	30,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 orang	33,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rujukan selama satu tahun				100 orang	7,684,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 orang	8,452,400	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase		Persentase	1.65 Persentase	<b>967,426,500</b>						1.65 Persentase	<b>981,229,150</b>	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sosial permakanan berkelanjutan selama satu tahun				258 orang	829,400,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	258 orang	829,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah kelayan anak, lansia dan keluarga yang mendapat layanan bimbingan sosial Temu Penguatan Anak & Keluarga, bimbingan sosial anak bermasalah/ berhadapan dengan hukum (ABH)				300 orang	98,026,500	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	300 orang	107,829,150	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang memperoleh pelayanan penelusuran keluarga selama satu tahun				300 orang	40,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	300 orang	44,000,000	Dinas Sosial
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>14,250,375,500</b>						100 Persentase	<b>14,794,550,000</b>	
1.06.05.2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Persentase anak terlantar diluar rumah singgah yang ditangani	Persentase		Persentase	64.94 Persentase	<b>236,375,500</b>						64.94 Persentase	<b>262,150,000</b>	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar luar panti yang terinventarisir data nya secara by name by address selama satu tahun				150 anak	45,405,500	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang masuk dalam DTKS	150 anak	52,000,000	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Rujukan reunifikasi				50 anak	60,845,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang masuk dalam DTKS	50 anak	67,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar luar panti yang mendapatkan bantuan sosial selama satu tahun				100 anak	130,125,000	Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang masuk dalam DTKS	100 anak	143,150,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Keluarga Fakir Miskin Yang Masuk DTKS yang Mendapatkan bantuan sosial KUBE,UEP dan WRSE	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>14,014,000,000</b>						100 Persentase	<b>14,532,400,000</b>	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang melakukan updating data selama satu tahun				19 kec	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Fakir Miskin yang masuk DTKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	19 kec	275,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				19 kec	2,750,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Fakir Miskin yang masuk DTKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	19 kec	3,025,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan dalam rangka memfasilitasi penyaluran program sembako, bantuan sosial penunggu pasien dan program keluarga harapan selama satu tahun				12 bulan	2,780,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Fakir Miskin yang masuk DTKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	12 bulan	3,000,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) Jumlah KUBE yang mendapat bantuan sosial Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapat bantuan sosial				800 orang 700 orang 150 orang	7,484,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Fakir Miskin yang masuk DTKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	800 orang 700 orang 150 orang	8,232,400,000	Dinas Sosial
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>1,715,978,700</b>						100 Persentase	<b>1,926,592,920</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>1,448,554,500</b>						100 Persentase	<b>1,632,426,300</b>	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan permakanan untuk menangani bencana alam dan sosial selama satu tahun				1 tahun	1,237,303,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kab.Pekalongan yang terdampak korban bencana alam dan sosial	1 tahun	1,361,033,300	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan penyediaan sandang selama satu tahun				2.753 orang	43,351,500	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kab.Pekalongan yang terdampak korban bencana alam dan sosial	2.753 orang	86,703,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial selama satu tahun				1 tahun	139,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kab.Pekalongan yang terdampak korban bencana alam dan sosial	1 tahun	152,900,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah bulan korban bencana alam dan sosial yang mendapat Penanganan Khusus bagi kelompok rentan				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kab.Pekalongan yang terdampak korban bencana alam dan sosial	12 bulan	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah bulan korban bencana alam dan sosial yang mendapat Pelayanan Dukungan Psikososial				12 bulan	18,900,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kab.Pekalongan yang terdampak korban bencana alam dan sosial	12 bulan	20,790,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase kampung siaga bencana yang dibina	Persentase		Persentase	100 Persentase	<b>267,424,200</b>						100 Persentase	<b>294,166,620</b>	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah bulan dalam rangka Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				12 bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Warga masyarakat yang terdampak bencana	12 bulan	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan dalam rangka terfasilitasinya Petugas Perlindungan Sosial Korban dan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana (Tagana)				12 bulan	167,424,200	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Warga masyarakat yang terdampak bencana	12 bulan	184,166,620	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	Persentase		Persentase	71.43 Persentase	<b>308,999,450</b>						71.43 Persentase	<b>410,000,000</b>	
1 06 07 2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan selama lima tahun	unit		unit	11 unit	<b>308,999,450</b>						11 unit	<b>410,000,000</b>	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Paket dalam rangka Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional selama satu tahun				1 paket	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama"	1 paket	220,000,000	Dinas Sosial
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan Nasional				12 bulan	108,999,450	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama"	12 bulan	190,000,000	Dinas Sosial
<b>TOTAL</b>							<b>30,622,012,250</b>							<b>32,277,885,290</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	08						<b>8,307,600,900</b>						<b>9,015,279,390</b>							
2	08	01					<b>5,826,550,000</b>						<b>6,374,785,500</b>							
2	08	01	2.01				<b>45,500,000</b>						<b>50,000,000</b>							
2	08	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu					11 Dokumen	25,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		11 Dokumen	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu					7 Dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		7 Dokumen	22,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>3,174,000,000</b>					<b>3,491,400,000</b>		
2	08	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	3,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	3,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Bulan	174,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	191,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>35,000,000</b>					<b>38,500,000</b>		
2	08	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun Tepat Waktu					50 Dokumen	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		50 Dokumen	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10 Orang	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		10 Orang	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>240,350,000</b>					<b>261,315,500</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terprnuhinya Komponen Listrik/Kantor				20 Unit	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		20 Unit	11,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	43,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhi Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	17,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	18,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhi Cetak Penggandaan Kantor				12 Bulan	19,850,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	20,815,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhi Kunjungan Tamu				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	12,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2 08 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>1,760,000,000</b>							<b>1,906,000,000</b>	
2 08 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11 Unit	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		11 Unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				24 Unit	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		24 Unit	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpenuhi				30 Unit	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		30 Unit	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	460,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		2 Unit	506,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2 08 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>146,400,000</b>							<b>158,540,000</b>	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	52,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				4 Orang	96,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		4 Orang	106,040,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2 08 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>425,300,000</b>							<b>469,030,000</b>	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	104,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	115,280,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 Bulan	15,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	16,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				3 Unit	260,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas		3 Unit	286,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>						<b>880,565,500</b>							<b>968,622,050</b>	
2 08 02 2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>650,565,500</b>							<b>715,622,050</b>	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTIPELATIHAN KAUKUS PEREMPUAN, JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PELATIHAN MEMBUAT KUE, - JUMLAH PESERTA FASILITASI APE				710 ORANG	650,565,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		710 ORANG	715,622,050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>230,000,000</b>							<b>253,000,000</b>	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-JUMLAH PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN SDM PEREMPUAN				90 ORANG	230,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		90 ORANG	253,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>						<b>460,547,800</b>							<b>484,692,980</b>	
2 08 03 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>351,967,800</b>							<b>376,112,980</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-TERBAYARNYA FULTIMER DAN PELATIHAN PELAYANAN PENDAMPINGAN KDRT				26 ORANG	141,451,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		26 ORANG	155,596,980	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	TERSOSIALISASINYA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				570 ORANG	210,516,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		570 ORANG	220,516,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>108,580,000</b>							<b>108,580,000</b>	
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN TPPO				80 ORANG	108,580,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		80 ORANG	108,580,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>						<b>30,000,000</b>							<b>30,000,000</b>	
2 08 04 2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>30,000,000</b>							<b>30,000,000</b>	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PESERTA PELATIHAN REVITALISASI GSIB				30 ORANG	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		30 ORANG	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>						<b>128,500,000</b>							<b>128,500,000</b>	
2 08 06 2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>128,500,000</b>							<b>128,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi KLA Family Gatering Forum Anak Rakor GTKLA Reorganisasi Forum Anak Kecamatan SIGA				30 orang 60 orang 30 orang 120 orang 25 orang	128,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		30 orang 60 orang 30 orang 120 orang 25 orang	128,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>						<b>981,437,600</b>							<b>1,028,678,860</b>	
2 08 07 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>267,560,000</b>							<b>267,560,000</b>	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Full timer P2TP2A KIE Pencegahan Kekerasan P2TP2A Kecamatan PATBM				12 bulan 500 lembar 120 orang 120 ORANG	267,560,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		12 bulan 500 lembar 120 orang 120 ORANG	267,560,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>241,465,000</b>							<b>241,465,000</b>	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN THD ANAK DAN TPPO				48 ORANG	241,465,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		48 ORANG	241,465,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>472,412,600</b>							<b>519,653,860</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PELAYANAN PENGADUAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SOSIALISASI DAN PENGUATAN LEMBAGA UPTD				50 orang 1 UNIT	472,412,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		50 orang 1 UNIT	519,653,860	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>15,813,655,151</b>						<b>17,518,179,551</b>		
2 14 02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>							<b>270,000,000</b>						<b>320,000,000</b>	
2 14 02 2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>							<b>100,000,000</b>						<b>120,000,000</b>	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						70,000,000	Semua Kab/Kota Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					85,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.01 04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	jumlah pendataan masyarakat tentang kependudukan				285 desa	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				285 desa	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02	<b>Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>170,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data yang terbentuk				2 kelompok	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		2 kelompok	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	terlaksananya sosialisasi sistem inforasi keluarga bagi kkbpk				19 kecamatan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		19 kecamatan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	terlaksananya pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pengendalian kbbagi kkbpk				19 kecamatan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		19 kecamatan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>						<b>12,096,962,351</b>						<b>12,907,385,271</b>		
2 14 03 2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>						<b>2,279,812,000</b>						<b>2,501,293,200</b>		
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	jumlah promosi dansosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan bagi mitra kerja				19 kecamatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	19 kecamatan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah kegiatan fasilitasi harganas tingkat nasional, provinsi dan kabupaten				3 daerah	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	3 daerah	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah paket penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor balai penyuluh kb				19 kecamatan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	19 kecamatan	260,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	pemutaran film kb melalui mobil mupen				20 kali	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	20 kali	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terpenuhinya kegiatan di Balai Penyuluh KKBPK				12 Bulan	1,864,812,000	Semua Kab/Kota	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	12 Bulan	2,051,293,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>						<b>2,510,000,000</b>						<b>2,560,000,000</b>		
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	honor ppkb atau skd se kab pekalongan sebanyak 570 orang				570 orang	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	570 orang	850,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	terpenuhinya data keluarga				285 desa	1,710,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	285 desa	1,710,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						6,016,197,151						6,466,092,071		
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusinya Alat dan Obat Kontrasepsi Terlaksananya Pembinaan Jejaring Terlaksananya Visitasi dan Registrasi Klinikn KB				102 klinik 136 Bidan 34 Klinik	68,852,500	Semua Kab/Kota	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			102 klinik 136 Bidan 34 Klinik	75,737,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KB MOP Terlaksananya Pelayanan KB MOW Terlaksananya Penggerakan dan Pelayanan KB MKJP				40 Akseptor 15 Akseptor 3659 Akseptor	1,767,646,600	Semua Kab/Kota	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			40 Akseptor 15 Akseptor 3659 Akseptor	1,787,646,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	ayoman kegagalan/Komplikasi MO pertemuan Tim Jaga Mutu Rapat Bidan KKB dan jejaring				5 kasus 20 orang 75 Orang	15,724,750	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	5 kasus 20 orang 75 Orang	19,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah paket penyedia peralatan dan perlengkapan balai penyuluh kb Tersedia IUD Kit Tersedia Obgyn Bed Tersedia Removal Implant Kit				12 paket 14 Kit 16 Unit 39 Kit	4,117,105,201	Semua Kab/Kota	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	12 paket 14 Kit 16 Unit 39 Kit	4,528,815,721	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.03 07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Sosialisasi Pasca Pelayanan KB				60 orang	11,720,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60 orang	12,892,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	terlaksananya orientasi dan sosialisasi kesehatan reproduksi				150 orang	35,148,100	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	150 orang	42,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						1,290,953,200						1,380,000,000		
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Kordinasi, Sosialisasi dan orientasi KB Modern				250 orang	50,953,200	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		250 orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah poktan, pokja dan mini lokal yang telah dibentuk				69 Kelompok	1,170,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		69 Kelompok	1,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terpenuhinya pembinaan RDIK dan terlaksana loma-lomba Kampung KB				69 Kelompok	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		69 Kelompok	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						3,446,692,800						4,290,794,280		
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						3,296,692,800						4,030,794,280		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) untuk Anggota Kelompok UPPKS yang miskin/ kurangmampu yang di adakan Jumlah Kader dan Pengelola Poktan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R ), yang diorientasi / di latih Jumlah Kartu Kembang Anak (KKA) yang diadakan Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, PPKS, UPPKS) yang terbentuk jumlah Lomba Duta GenRe dan Pameran UPPKS yang diselenggarakan, Jumlah Forum GenRe yang dikukuhkan, Jumlah Remaja dan lansia yang mendapat Sosialisasi Program Genre, dan 7 lansia tangguh				20 set 410 orang 25000 lembar 109 kelompok 3 kali 1200 orang	1,325,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		20 set 410 orang 25000 lembar 109 kelompok 3 kali 1200 orang	1,382,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan /UPPKS) yang di adakan				115 set	965,000,000	Kab. Pekalongan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		115 set	995,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapat Biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				686 kelompok	405,944,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		686 kelompok	446,539,280	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Ibu Hamil dan Ibu Baduta yang tereduksi pengasuhan 1000 HPK  Remaja / Calon Pengantin yang tereduksi tentang Kespro dalam rangka Pencegahan Stunting				1750 orang 1200 orang	600,748,000	Kab. Pekalongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			1750 orang 1200 orang	606,755,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04 2.01 09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah advokasi dan promosi dan sosialisasi IPK  Jumlah Data IPK yang tersedia  Jumlah Materi IPK yang tersedia  Jumlah Pertemuan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) yang terselenggara				21 kali 1 dokumen 1 paket 2 kali	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		21 kali 1 dokumen 1 paket 2 kali	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04 2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						<b>150,000,000</b>						<b>260,000,000</b>		
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Perbup tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibuat				1 dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		1 dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja yang dilaksanakan Jumlah organisasi/ kelompok Masyarakat yang mengikuti Pertemuan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi masyarakat dalam mendukung operasional Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 kali 25 organisasi 50 orang	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		2 kali 25 organisasi 50 orang	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>TOTAL</b>							<b>24,121,256,051</b>							<b>26,533,458,941</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	09						<b>17,808,573,000</b>							<b>18,469,590,920</b>	
2	09	01					<b>16,903,573,000</b>							<b>17,648,090,920</b>	
2	09	01	2.01				<b>50,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
2	09	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)						1 Dokumen	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)						1 Dokumen	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>15,914,090,920</b>	
2	09	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)						12 Bulan	14,941,073,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)						12 Bulan	357,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>40,000,000</b>	
2	09	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)						1 Dokumen	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)						125 Orang	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>405,000,000</b>	
														<b>445,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor (unti/buah)				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 Bulan	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				12 Bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	220,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
<b>2 09 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>320,000,000</b>						<b>355,000,000</b>		
2 09 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				4 Unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	4 Unit	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				1 Paket	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1 Paket	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				1 Paket	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1 Paket	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1 Paket	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						500,000,000						525,000,000		
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	210,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				11 Orang	300,000,000	Kab. Pekalongan			Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		11 Orang	315,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						290,000,000							312,000,000	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 Bulan	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	67,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				1 Unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		1 Unit	165,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>						300,000,000						135,000,000		
2 09 02 2.01	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						300,000,000						135,000,000		
2 09 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun (unit)				2 Unit	250,000,000	Kab. Pekalongan			Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	2 Unit	80,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah pengadaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (paket)				1 Paket	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	1 Paket	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>						460,000,000						516,500,000		
2 09 03 2.01	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>						65,000,000						71,500,000		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan				1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan data stok / ketersediaan bahan pangan pokok strategis				1 Kabupaten	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	1 Kabupaten	33,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 09 03 2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>						195,000,000						225,000,000		
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan yang tersedia (kg)				24000 Kg	175,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	24000 Kg	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pemeliharaan gudang cadangan pangan pemerintah (paket)				1 Paket	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>						<b>200,000,000</b>							<b>220,000,000</b>	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman penganekaragaman konsumsi pangan (orang) cadangan pangan yang tersedia (kg)				1 Paket	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	220,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	-		-	--	<b>100,000,000</b>						--	<b>120,000,000</b>	
2 09 04 2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>						<b>50,000,000</b>							<b>60,000,000</b>	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah desa/kelurahan yang terpetakan (desa)				1 Paket	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 04 2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>50,000,000</b>							<b>60,000,000</b>	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)				1 Paket	50,000,000	Kab. Pekalongan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	Persentase ketercapaian desa bebas rawan pangan	1 Paket	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>						<b>45,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
2 09 05 2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>45,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan bersama JKPD (kali)				1 Paket	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan produktivitas pertanian (kali)				1 Paket	650,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas		1 Paket	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>3 27 03 2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>						<b>31,270,800,000</b>							<b>6,910,000,000</b>	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi pertanian yang dibangun (lokasi)				5 Lokasi	3,100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas		5 Lokasi	3,410,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan/ pemeliharaan jalan usaha tani yang dibangun (lokasi)				20 Lokasi	27,005,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas		20 Lokasi	2,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah pembangunan/ pemeliharaandam parit yang dibangun (lokasi)				6 Lokasi	975,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas		6 Lokasi	1,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						190,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>3 27 04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>						<b>250,000,000</b>							<b>295,000,000</b>	
3 27 04 2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>100,000,000</b>							<b>120,000,000</b>	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ketersediaan obat dan ketersediaan produk asal hewan yang ASUH (unit)				1 Paket	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>3 27 04 2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>						<b>150,000,000</b>							<b>175,000,000</b>	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan serta sarana prasarana rumah potong hewan dan Puskesmas (paket)				1 Paket	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>						<b>960,000,000</b>						<b>805,000,000</b>		
3 27 05 2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>						<b>960,000,000</b>						<b>805,000,000</b>		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (kali)				1 Paket	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengadaan bibit tanaman perkebunan (batang)				1 Paket	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		1 Paket	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 05 2.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengadaan obat-obatan, pestisida dan bibit tanaman hortikultura (buah)				3 Paket	660,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		3 Paket	455,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>						<b>470,000,000</b>						<b>315,000,000</b>		
3 27 07 2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>						<b>470,000,000</b>						<b>315,000,000</b>		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok pertanian yang dilatih (poktan)				1 Paket	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (paket)				1 Paket	370,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan		1 Paket	195,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>TOTAL</b>							<b>52,924,373,000</b>						<b>27,734,590,920</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	12						<b>7,323,844,702</b>							<b>13,224,334,432</b>							
2	12	01					<b>6,262,719,402</b>							<b>11,800,876,652</b>							
2	12	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen) = 4 dokumen, Jumlah Nara sumber Pembahas DAK Non Fisik = 1 orang, Jumlah Dokumen , EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen) = 7 dokumen	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>148,600,000</b>			12 Bulan	<b>148,600,000</b>					
2	12	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)				4 Dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Nara Sumber Pembahas DAK Non Fisik				2 orang	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	2 orang	7,200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Evaluasi perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				7 Dokumen	121,400,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	7 Dokumen	121,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) = 14 bulan, Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan) = 12 bulan	Bulan		Bulan	14 Bulan	<b>0</b>							14 Bulan	<b>5,135,391,000</b>	
2	12	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				14 bulan	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	14 bulan	5,034,791,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
																							Nasional	Daerah				
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya Kooordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD						12 bulan	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	100,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2	12	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen) = 1 Dok, Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai) = 10 orang, Jumlah Jenis Media Sosialisasi = 2 jenis, Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Kooordinasi, Loka Karya serta Pengiriman Peserta Bintek Adminduk =12 bulan	Bulan		Bulan		12 Bulan	0							12 Bulan	192,048,000								
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu					1 Dokumen	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					10 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	10 orang	36,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Media Sosialisasi					2 jenis	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	2 jenis	64,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan terlaksananya Rapat Koordinasi, Lokakarya serta Pengiriman peserta Bintek Adminduk					12 bulan	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	71,448,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	12	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya bahan-bahan penunjang administrasi perkantoran	Bulan		Bulan		12 Bulan	2,617,359,400							12 Bulan	2,667,359,400								

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit terpenuhinya Komponen Listrik /kantor (unit/buah)r				10 unit	5,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	10 unit	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya Handscoen=1500 bh,masker=576 pak, kertas HVS F4=50 rim, Kertas HVS A4=762 rim, Blangko KIA=30.000 kp, Formulir Kependudukan = 1 paket, Tinta printer =676 botol, Cleaning datacard =10 bh, Cleaning fargo = 10 bh, Retransfer datacard=90 bh,				12 bulan	1,990,861,400	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	1,990,861,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya alat kebersihan, bahan pembersi, dan bahan anti kuman arsip				12 bulan	9,027,600	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	9,027,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Penunjang Pelayanan Adminduk				12 bulan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Barang cetak dan Penggandaan				12 bulan	30,148,400	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	30,148,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Makan minum Rapat dan makain minum tamu serta tersedianya Jumlah Bahan anti septik =60liter, Vitamin C= 864 pak				12 bulan	127,850,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	127,850,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan terlaksananya Koordinasi dan konsultasi serta penyelenggaraan Rakor Kerjasama Pemanfaatan Data dengan instansi terkait.				12 bulan	328,472,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	328,472,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatan Arsip dinamis				12 bulan	36,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	36,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						90,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat		90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah kendaraan operasional = 1 unit, Jumlah unit mebeleur =11, Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya = 68, Jumlah shelter parkir pemohon layanan adminduk = 1 unit	Unit		Unit	81 Unit	<b>2,030,447,490</b>						81 Unit	<b>2,150,708,439</b>	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan				1 unit	627,838,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	1 unit	627,838,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebelaer				11 unit	144,965,250	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	11 unit	159,461,775	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya				68 unit	1,057,644,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	68 unit	1,163,408,664	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Shelter parkir pemohon layanan adminduk				1 unit	200,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	1 unit	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terbayarnya bahan bacaan koran, jasa telpon, PAM, Listrik, Jasa bandwidth dan pulsa untuk aplikasi SIAK dan aplikasi adminduk online, Jumlah Bulan Tersedianya Tenaga Outsourcing= 30 Org, PTT= 3 Org, Jasa Entri KIA= 30.000 lb, Jasa digitalisasi Arsip= 100.000 set, Tenaga Fron Office = 2 Org	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,292,153,012						12 Bulan	1,332,610,313	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya bahan bacaan koran, jasa telepon, PAM, Listrik, Jasda Benwict, dan pulsa untuk aplikasi SIAK dan aplikasi Adminduk				12 bulan	404,573,012	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	445,030,313	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan tersedianya Tenaga Outsourcing=30 org, PTT=3 org, Jasa Interi KIA=30.000 lb, Jasa Digitali Arsip=100.000 set, tenaga fron Office=2 org				12 bulan	887,580,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 bulan	887,580,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang dipelihara = 7 unit, Jumlah AC Floor = 2 unit, Windows AC = 20 unit, printer inkjet = 7 unit, personal komputer = 14 unit, printer KTP-EI = 5 unit, Jumlah gedung kantor yang dipelihara = 12 unit	Unit		Unit	55 Unit	174,159,500						55 Unit	174,159,500	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				7 unit	89,588,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	7 unit	89,588,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC floor=2 unit,Windos AC=20 unit, printer injec=7 unit, personal komputer=14 unit, Printer KTP-el= 5 unit				48 unit	35,780,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	48 unit	35,780,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				12 unit	48,791,500	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sekretariat	12 unit	48,791,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Kepemilikan KTP elektronik	- - -	- - -	- - -	-- -- --	<b>294,060,000</b>						-- -- --	<b>299,970,000</b>	
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk,Jumlah PendudukNon Permanen dan Rentan Adminduk yang terdata = 1 dokumen, Jumlah KTP -el yang dicetak = 116366 orang	Orang		Orang	116366 Orang	<b>75,000,000</b>						116366 Orang	<b>75,000,000</b>	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk, Jumlah Penduduk Non Pemanen dan Rentan Adminduk yang terdata				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KTP el yang tercetak				116366 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	116366 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	jumlah lokasi Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dengan model jemput bola, Termasuk Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	lokasi		lokasi	38 lokasi	<b>159,100,000</b>						38 lokasi	<b>165,010,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah lokasi Pelaksanaan Pelayanan Kependudukan dengan model jemput bola, Termasuk Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				38 Lokasi	59,100,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	38 Lokasi	65,010,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran Penduduk				75 orang	100,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	75 orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah peserta bintek peningkatan SDM pendaftaran penduduk	Orang		Orang	75 Orang	<b>59,960,000</b>						75 Orang	<b>59,960,000</b>	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta bintek peningkatan SDM pendaftaran penduduk				75 orang	59,960,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	75 orang	59,960,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Cakupan kepemilikan akta kelahiran Cakupan penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	- -		- -	97 - --	<b>479,199,800</b>						97 - --	<b>494,619,780</b>	
2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah lokasi jemput bola pencatatan kelahiran 64 desa	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	<b>0</b>						5 Kecamatan	<b>0</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Akte Kelahiran				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	0 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah lokasi jemput bola pencatatan kelahiran 64 desa	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	<b>325,000,000</b>						5 Kecamatan	<b>325,000,000</b>	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah lokasi jemput bola pencatatan kelahiran 64 desa				5 Kecamatan	225,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	5 Kecamatan	225,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi Pencatatan sipil di 8 Kecamatan				172 orang	100,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	172 orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah lokasi jemput bola pencatatan kelahiran 64 desa Jumlah peserta bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil untuk perangkat desa / kelurahan	Kecamatan orang		Kecamatan orang	5 Kecamatan 74 orang	<b>154,199,800</b>						5 Kecamatan 74 orang	<b>169,619,780</b>	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil untuk perangkat desa / kelurahan				74 orang	154,199,800	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan	74 orang	169,619,780	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	persentase database yang valid dan update	-		-	--	<b>287,865,500</b>						--	<b>453,247,000</b>	
2.12.04.2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Jumlah data akta kelahiran yang dire- entry kedalam database kependuduka = 15.000 paket, jumlah konfigurasi SIAK = 1 paket, jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data = 7 lembaga	tahun		tahun	1 tahun	<b>127,905,500</b>						1 tahun	<b>127,905,500</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Data akte Kelahiran yang di entri kedalam database kependudukan dan Jumlah Konfigurasi SIAK				15000 Paket	74,461,500	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparat Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Stakeholder	15000 Paket	74,461,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data				7 lembaga	53,444,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparat Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Stakeholder	7 lembaga	53,444,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah media yang digunakan sebagai komunikasi informasi dan edukasi kependudukan (cetak, radio, visual) = 3 media, Jumlah inovasi = 1 dokumen	tahun		tahun	1 tahun	<b>100,000,000</b>						1 tahun	<b>265,381,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi				1 Dokumen	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan, Aparatur Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	82,623,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi terkait pengelolaan Informasi administrasi kependudukan				75 orang	100,000,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan, Aparatur Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	75 orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Media yang digunakan sebagai komunikasi informasi dan edukasi kependudukan ( Cetak, Radio, Visual )				3 media	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penduduk Kabupaten Pekalongan, Aparatur Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 media	82,758,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.04	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah Peserta Rapat Pembinaan dalam Rangka Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Orang		Orang	30 Orang	<b>59,960,000</b>						30 Orang	<b>59,960,000</b>	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta rapat pembinaan dalam rangka pengelolaan informasi administrasi kependudukan				30 orang	59,960,000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparat Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	30 orang	59,960,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	-		-	--	<b>0</b>						--	<b>175,621,000</b>	
2.12.05.2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Jumlah buku profil kependudukan	buku		buku	300 buku	<b>0</b>						300 buku	<b>175,621,000</b>	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Kependudukan				300 buku	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD, Kecamatan dan Desa	300 buku	175,621,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>TOTAL</b>							<b>7,323,844,702</b>							<b>13,224,334,432</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	13						<b>15,500,550,000</b>						<b>15,684,985,500</b>		
2	13	01					<b>5,626,550,000</b>						<b>5,853,785,500</b>		
2	13	01	2.01				<b>45,500,000</b>						<b>50,000,000</b>		
2	13	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu						11 Dokumen	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu						7 Dokumen	22,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bulan		Bulan			12 Bulan	<b>3,491,400,000</b>	
2	13	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN						12 Bulan	3,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12 Bulan	191,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>38,500,000</b>	
2	13	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun Tepat Waktu						41 Dokumen	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10 Orang	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>261,315,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	11,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	43,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	17,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	18,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor				12 Bulan	19,850,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	20,815,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	12,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<b>2 13 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>1,800,000,000</b>						<b>1,650,000,000</b>		
2 13 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				24 Unit	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	24 Unit	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpenuhi				30 Unit	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	30 Unit	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		1 Unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Tenaga Teknis/Administrasi dalam rangka Menjaga Kebersihan, Keamanan dan Kelancaran Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>146,400,000</b>						12 Bulan	<b>158,540,000</b>	
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 Bulan	52,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				4 Orang	96,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 Orang	106,040,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>185,300,000</b>							<b>204,030,000</b>	
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 bulan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	64,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	71,280,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 Bulan	15,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		12 Bulan	16,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		1 Unit	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	13	02					2,845,000,000						3,075,000,000			
2	13	02	2.01				2,845,000,000						3,075,000,000			
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Tersusunnya data desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi status desa				59 Desa	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	59 Desa	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang memiliki peta Wilayah Administrasi Desa Terfasilitasinya penyusunan pedoman penetapan batas wilayah desa				59 Desa 2 DOKUMEN	175,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	59 Desa 2 DOKUMEN	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terfasilitasi penyusunan kegiatan Desa berdasarkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal				59 Desa	60,000,000	Kab. Pekalongan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	59 Desa	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terselenggaranya fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarpras Pemerintah Desa dan keg. TMMMD				272 Desa	2,550,000,000	Kab. Pekalongan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	272 Desa	2,805,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>						450,000,000				470,000,000	
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>						450,000,000				470,000,000	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa dan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota				10 unit/kelompok	200,000,000	Kab. Pekalongan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	10 unit/kelompok	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibina				3 kawasan	250,000,000	Kab. Pekalongan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	3 kawasan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>						4,560,000,000				4,185,000,000	
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>						4,560,000,000				4,185,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemdes dan penyusunan RKPDes serta SID Terselenggaranya penyusunan RPJMDes				59 Desa 33 Desa	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		59 Desa 33 Desa	130,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya pedoman penyelenggaraan Pemdes				2 DOKUMEN	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		2 DOKUMEN	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terselenggaranya fasilitasi penyaluran Dana Desa Terselenggaranya Fasilitasi penyusunan APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa				272 Desa 272 Desa	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		272 Desa 272 Desa	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Pembekalan Kepala Desa				33 Desa	400,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		33 Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terselenggaranya fasilitasi pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai SOTK serta Tersalurnya Bantuan Alokasi Dana Desa				272 Desa	3,350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		272 Desa	3,370,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terselenggaranya Fasilitasi pengelolaan Aset Desa				59 Desa	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		59 Desa	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kapasitas BPD				59 Desa	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		59 Desa	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi penyusunan Profil Desa Terselenggaranya fasilitasi Evaluasi perkembangan Desa dan lomba desa				59 Desa 272 Desa	160,000,000				Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		59 Desa 272 Desa	170,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2,019,000,000						2,101,200,000		
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						2,019,000,000						2,101,200,000		
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang teridentifikasi dan dibina Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang dibina				139 kelompok 352 unit/lembaga 96 orang	342,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		139 kelompok 352 unit/lembaga 96 orang	376,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang dibina				52 kelompok	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		52 kelompok	260,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok pengelola sumber daya alam desa (LMDH, Desa Wisata) yang dibina Jumlah kelompok pengelola TTTG yang dibina				3 kelompok 5 kelompok	325,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		3 kelompok 5 kelompok	355,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang dilaksanakan				8 unit/desa	115,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		8 unit/desa	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader yang dilatih Jumlah kelembagaan PKK yang dibina				627 orang 285 unit	987,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		627 orang 285 unit	990,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>TOTAL</b>							<b>15,500,550,000</b>							<b>15,684,985,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	15						<b>143,007,896,320</b>						<b>146,889,170,452</b>							
2	15	01					<b>7,850,000,000</b>						<b>8,495,000,000</b>							
2	15	01	2.01				<b>30,000,000</b>					12 bulan	<b>18,000,000</b>							
2	15	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terbayarnya gaji, tunjangan, insentif pegawai dan honorarium tim pengelola kegiatan	bulan		bulan	12 bulan	<b>5,650,000,000</b>						12 bulan	<b>6,170,000,000</b>	
2	15	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				12 bulan	5,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	6,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	170,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Rompi Parkir Terselenggaranya pendidikan, pelatihan, diklat, & kursus pegawai	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	<b>190,000,000</b>						12 bulan 12 bulan	<b>225,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang Terpenuhinya Rompi Parkir dan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				250 orang	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	250 orang	85,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				6 orang	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	6 orang	140,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya komponen listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, logistik kantor, makan-minum, dan terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>375,000,000</b>						12 bulan	<b>452,000,000</b>	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)				30 unit/buah	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	30 unit/buah	35,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 bulan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	90,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya makan minum harian pegawai dan makan minum rapat				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	55,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				40 bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	40 bulan	180,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinami Pada OPD (Bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	12,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya mebel, sapras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan		bulan	12 bulan	<b>165,000,000</b>						12 bulan	<b>130,000,000</b>	
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				3 unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	3 unit	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				8 unit	85,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	8 unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	1 unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terbayarnya honor tenaga outsourcing dan PTT	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,100,000,000</b>						12 bulan	<b>1,150,000,000</b>	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bulan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	250,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				33 orang	850,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	33 orang	900,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Jabatan, Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor dan Saprass Pendukung Gedung Kantor serta Terbayarnya Pajak Kendaraan dan KIR Kendaraan	bulan		bulan	12 bulan	<b>340,000,000</b>						12 bulan	<b>350,000,000</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	40,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 bulan	170,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	175,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	12 bulan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				1 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	1 unit	100,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio) Persentase APILL Terintegrasi Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum Persentase Pemenuhan Kebutuhan Marka Jalan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rambu Jalan Persentase PJU yang termeterisasi	- - - - - -	- - - - - -	-- -- -- -- -- --		<b>135,157,896,320</b>					-- -- -- -- -- --	<b>138,394,170,452</b>		
2 15 02	<b>2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Tersusunnya dokumen LLAJ	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	<b>200,000,000</b>					1 Dokumen	<b>0</b>		
2 15 02	<b>2.01</b>	01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Review Rencana Induk LLAJ			1 dokumen	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02	<b>2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya dan terpeliharanya perlengkapan jalan	bulan	bulan	12 bulan	<b>124,116,491,320</b>					12 bulan	<b>136,911,765,452</b>		
2 15 02	<b>2.02</b>	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah paket perlengkapan jalan yang dipenuhi			2 paket	120,715,241,320	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat	2 paket	132,786,765,452	Dinas Perhubungan
2 15 02	<b>2.02</b>	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah unit prasarana jalan yang direhabilitasi			2 unit	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat	2 unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02	<b>2.02</b>	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah paket perlengkapan jalan yang direhabilitasi			2 paket	3,341,250,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat	2 paket	4,125,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	<b>2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Terbangunnya dan terlaksananya rehabilitasi gedung terminal	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	<b>9,690,000,000</b>					2 kegiatan	<b>500,000,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Tersusunnya dokumen pembangunan terminal tipe c; jumlah gedung terminal yang dibangun dan sarana dan prasarana				2 unit	9,190,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	2 unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah fasilitas utama dan pendukung terminal yang direhabilitasi				3 paket	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	3 paket	500,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Terlaksananya penertiban parkir liar	bulan		bulan	12 bulan	<b>35,000,000</b>						12 bulan	<b>35,000,000</b>	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanya penertiban parkir liar				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	12 bulan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor serta terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor	bulan		bulan	12 bulan	<b>566,405,000</b>						12 bulan	<b>391,405,000</b>	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor				1 unit	195,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	1 unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	tersediannya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor				4000 buah	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	4000 buah	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara				9 unit	271,405,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	9 unit	291,405,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Lancarnya Lalul lintas arus mudik, arus balik pada saat lebaran, haji, Natal, Tahun Baru dan Event Pemerintah	bulan		bulan	12 bulan	<b>430,000,000</b>						12 bulan	<b>430,000,000</b>	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan				5 kegiatan	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	5 kegiatan	400,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				3 kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	3 kegiatan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	Terlaksananya inspeksi uji berkala kendaraan bermotor	kali		kali	11 kali	<b>60,000,000</b>						11 kali	<b>60,000,000</b>	
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				11 kali	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	11 kali	60,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.10	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersusunya dokumen kajian penetapan kawasan perkotaan wil kab/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>20,000,000</b>						1 Dokumen	<b>22,000,000</b>	
2 15 02 2.10 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kajian penetapan kawasan perkotaan wil Kab/Kota				1 dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dishub	1 dokumen	22,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.16	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya pemantauan tarif angkutan	bulan		bulan	12 bulan	<b>40,000,000</b>						12 bulan	<b>44,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya tarif ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah kab/kotapenetapan kawasan perkotaan wil Kab/Kota				2 kegiatan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	2 kegiatan	44,000,000	Dinas Perhubungan
<b>TOTAL</b>							<b>143,007,896,320</b>						<b>146,889,170,452</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	16						21,817,961,440							14,118,207,958				
2	16	01						6,514,683,500						40 %	7,163,153,191			
2	16	01	2.01					51,000,000						40 %	56,000,000			
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)			7 dokumen	31,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	7 dokumen	34,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)			7 dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	7 dokumen	22,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)			40 %	4,004,683,500						40 %	4,399,051,850	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)			12 bulan	3,923,683,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	4,316,051,850	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)			12 bulan	81,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	83,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)			40 %	22,000,000						40 %	23,469,160	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)			6 orang	22,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	6 orang	23,469,160	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%		%	40 %	<b>335,000,000</b>						40 %	<b>305,885,525</b>	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor (unti/buah)				25 unit	6,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	25 unit	6,142,444	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	31,307,177	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	35,959,814	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 bulan	18,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	19,352,740	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	30,498,050	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				45 kali	166,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	45 kali	182,625,300	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamsi Pada OPD (Bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	40 %	<b>300,000,000</b>						40 %	<b>370,000,000</b>	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				10 unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	10 unit	170,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				10 unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	10 unit	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	40 %	<b>1,500,000,000</b>						40 %	<b>1,700,000,000</b>	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bulan	1,300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	1,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				8 orang	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	8 orang	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	40 %	<b>302,000,000</b>						40 %	<b>308,746,656</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bulan	34,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	36,615,326	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 bulan	43,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	47,399,330	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	24,732,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan	12 bulan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	0Persentase keluhan/ aduan masyarakat yang tertangani	%		%	70 %	<b>3,260,000,000</b>						70 %	<b>2,608,500,000</b>	
2 16 02	2.01 <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang terpublikasikan	informasi		informasi	1354 informasi	<b>3,260,000,000</b>						1354 informasi	<b>2,608,500,000</b>	
2 16 02	2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan Masyarakat yang tertangani oleh pemerintah daerah				270 aduan	175,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	270 aduan	95,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan kepada masyarakat				850 informasi	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	850 informasi	290,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan				140 konten	160,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	140 konten	170,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi yang dikekola Dinas Kominfo				320 informasi	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	320 informasi	380,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	2.01 06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Edisi Terbit Majalah Gema Kota Santri				6 edisi	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	6 edisi	395,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																				Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif						
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah media cetak dan elektronik yang bekerjasama dengan pemerintah daerah					38 iklan/advertorial	1,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	38 iklan/advertorial	850,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika									
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Yang Difasilitasi					19 kelompok	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	19 kelompok	65,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika									
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase ketersediaan informasi publik yang dipublikasikan					70 %	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	70 %	105,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika									
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Sanggar Media Tradisional yang dibina					19 sanggar	235,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kabupaten Pekalongan	19 sanggar	258,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika									
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		%		71 %	<b>12,043,277,940</b>						71 %	<b>4,346,554,767</b>										
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perangkat daerah yang menggunakan nama sub domain pemerintah daerah	%		%		100 %	<b>300,000,000</b>						100 %	<b>300,000,000</b>										



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sub domain pemerintah daerah, Pembinaan Teknis terhadap portal web organisasi perangkat daerah				49 buah	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan	49 buah	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dikelola Dinas Kominfo, Penyediaan Akses internet agi pemerintah daerah				71 %	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan	71 %	180,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		%	71 %	<b>11,743,277,940</b>						71 %	<b>4,046,554,767</b>	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pengelolaan e-government yang ditetapkan atau direview				1 dokumen	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	170,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Pembangunan Pusat Data, Data Recovery, dan Pengelolaan Pusat Data. Jumlah Infrastruktur Data Center ( Server, UPS, CPanel) Persentase Pembangunan Pusat Data, Data Recovery, dan Pengelolaan Pusat Data. Jumlah Infrastruktur Data Center ( Server, UPS, CPanel)				39 %	10,880,277,940	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	39 %	3,236,554,767	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Intra Pemerintah Daerah terhubung dengan seluruh perangkat daerah dan Pemanfaatan Jaringan Internet yang dikelola dinas				37 OPD	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	37 OPD	65,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang diolah oleh Dinkominfo				1 aplikasi	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah	1 aplikasi	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi				2 aplikasi	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	2 aplikasi	165,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan teknologi Informasi				13 sertifikasi	13,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	13 sertifikasi	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah, pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik, dan pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik				52 unit/PD	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	52 unit/PD	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>300,000,000</b>							<b>330,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%		%	80 %	<b>300,000,000</b>						80 %	<b>330,000,000</b>	
2 20 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase keterisian data sektoral yang termuat dalam satu data	%		%	70 %	<b>300,000,000</b>						70 %	<b>330,000,000</b>	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang tersedia di portal data				1300 dataset	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Data Statistik Sektoral	1300 dataset	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam peningkatan mutu statistik daerah				2 kegiatan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Data Statistik Sektoral	2 kegiatan	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>280,000,000</b>							<b>310,000,000</b>	
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	tingkat		tingkat	1 tingkat	<b>280,000,000</b>						1 tingkat	<b>310,000,000</b>	
2 21 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	OPD		OPD	3 OPD	<b>150,000,000</b>						3 OPD	<b>170,000,000</b>	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang telah disertifikasi BSSN				3 OPD	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Keamanan informasi pemerintah daerah	3 OPD	170,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02 2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah OPD yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh OPD pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	OPD		OPD	19 OPD	<b>130,000,000</b>						19 OPD	<b>140,000,000</b>	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik komunikasi pemerintah daerah yang diamankan				19 kecamatan	130,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Keamanan informasi pemerintah daerah	19 kecamatan	140,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>TOTAL</b>							<b>22,397,961,440</b>							<b>14,758,207,958</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2	07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>													6,340,384,100	7,179,384,000		
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		jumlah dokumen	-	-	--	250,000,000					--	0			
2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	dokumen		dokumen	1 dokumen	250,000,000				1 dokumen	0			
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen RTK Makro			1 dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	tenaga kerja	1 dokumen	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		"Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi"  "Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan"	-  -	-  -	45 -  25 -	3,744,384,100					45 -  25 -	4,554,384,000			
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang		orang	384 orang	3,679,384,100					384 orang	4,229,384,000		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan dididik tentang keterampilan kompetensi			384 orang	2,579,384,100	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari kerja	384 orang	2,729,384,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi instruktur			10 kejuruan	1,100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari kerja	10 kejuruan	1,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dibina	lembaga		lembaga	21 lembaga	65,000,000					21 lembaga	75,000,000		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina			21 lembaga	65,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	21 lembaga	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan pengukuran produktivitas	perusahaan		perusahaan	28 perusahaan	0					28 perusahaan	250,000,000		
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah perusahaan yang menerapkan produktivitas			0 perusahaan	0	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	perusahaan	0 perusahaan	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	07	04				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	-	30 -	<b>900,000,000</b>					30 -	<b>1,030,000,000</b>		
2	07	04	2.03			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam ipk online dan jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan bimbingan jabatan	orang	orang		4500 orang	<b>550,000,000</b>					4500 orang	<b>630,000,000</b>		
2	07	04	2.03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam ipk online				4600 orang	350,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari Kerja	4600 orang	380,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Memanfaatkan Pelayanan Job Fair/Bursa Kerja				2500 orang	200,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Pencari Kerja	2500 orang	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.04			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan fasilitasi dan jumlah layanan cpmi dan jumlah PMI purna yang mendapatkan pelatihan	orang	orang		30 orang	<b>350,000,000</b>						30 orang	<b>400,000,000</b>	
2	07	04	2.04	01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan fasilitasi dan Jumlah PMI purna yang mendapatkan pelatihan jumlah layanan cpmi				30 orang 1 layanan	350,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	PMI	30 orang 1 layanan	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	07	05				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	"Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)"	-	-	-	60 -	<b>1,446,000,000</b>						60 -	<b>1,595,000,000</b>	
2	07	05	2.01			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perusahaan yang mempunyai PP dibandingkan yang wajib PP jumlah perusahaan yang mendaftar PKB	perusahaan	perusahaan		165 perusahaan	<b>604,000,000</b>						165 perusahaan	<b>675,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mempunyai PP dibandingkan yang wajib PP dan Jumlah perusahaan yang mendaftar PKB				68 perusahaan	504,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	perusahaan	68 perusahaan	525,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan mendaftarkan bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan				24 perusahaan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	perusahaan	24 perusahaan	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah angka sengketa Jumlah perusahaan yang dibina dan Jumlah perselisihan yang diselesaikan	perusahaan kali		perusahaan kali	3 perusahaan 25 kali	<b>842,000,000</b>						3 perusahaan 25 kali	<b>920,000,000</b>	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan Jumlah perselisihan yang diselesaikan				25 perusahaan	408,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	perusahaan	25 perusahaan	420,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sidang yang dilaksanakan dan Jumlah fasilitas, koordinasi pelaksanaan jaminan sosial, Jumlah anggota serikat pekerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja				4 kali kegiatan	434,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	perusahaan	4 kali kegiatan	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						<b>20,121,017,400</b>						<b>22,202,919,100</b>		
2 17 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	--	<b>18,316,017,400</b>						--	<b>20,114,419,100</b>	
2 17 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	<b>59,000,000</b>						100 %	<b>79,000,000</b>	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				6 dokumen	29,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	6 dokumen	39,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				5 dokumen	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	5 dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 17 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	<b>9,297,317,400</b>						100 %	<b>10,227,049,100</b>	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				14 bulan	8,997,317,400	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Naker	14 bulan	9,897,049,100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 bulan	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Naker	12 bulan	330,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 17 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan kepegawaian	%		%	100 %	<b>75,000,000</b>						100 %	<b>90,000,000</b>	
2 17 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Naker	1 Tahun	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				30 orang	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Naker	30 orang	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 17 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>685,000,000</b>						100 %	<b>768,000,000</b>	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)				1 Tahun	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	1 Tahun	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 bulan	115,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	12 bulan	130,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	12 bulan	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				1 Tahun	120,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	1 Tahun	132,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				1 Tahun	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	1 Tahun	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				12 kali	320,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	12 kali	352,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD (Bulan)				0 bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administrasi umum	0 bulan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 17 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>6,265,000,000</b>						100 %	<b>6,891,500,000</b>	
2 17 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				11 unit	550,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	11 unit	605,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				40 unit	145,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	40 unit	159,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				42 unit	420,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	42 unit	462,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 unit	5,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	1 unit	5,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				5 unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	5 unit	165,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 17 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan	%		%	100 %	<b>1,342,200,000</b>						100 %	<b>1,407,120,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bulan	550,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Koperasi UKM dan Naker	12 bulan	605,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				12 bulan	792,200,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Koperasi UKM dan Naker	12 bulan	802,120,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>592,500,000</b>						100 %	<b>651,750,000</b>	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bulan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	77,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 bulan	117,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	129,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 bulan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	60,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	110,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				3 unit	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	3 unit	275,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase koperasi/unit simpan pinjam yang mendapatkan pelayanan rekomendasi izin usaha simpan pinjam Persentase koperasi/unit simpan pinjam yang mendapatkan pelayanan rekomendasi izin usaha simpan pinjam	Koperasi Persen		Koperasi Persen	18 Koperasi 2,89 Persen	<b>20,000,000</b>						18 Koperasi 2,89 Persen	<b>22,000,000</b>	
2 17 02 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah rekomendasi izin usaha kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP keanggotaan dalam daerah	Koperasi		Koperasi	1 Koperasi	<b>20,000,000</b>						1 Koperasi	<b>22,000,000</b>	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi izin usaha kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP keanggotaan dalam daerah jumlah usaha simpan pinjam yang mendapatkan pendampingan				1 koperasi 18 koperas	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Usaha Simpan Pinjam Koperasi	1 koperasi 18 koperasi	22,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	pertumbuhan koperasi sehat	Koperasi		Koperasi	150 Koperasi	<b>100,000,000</b>						150 Koperasi	<b>200,000,000</b>	
2 17 03 2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah koperasi, KSP/USP yang diawasi dan diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang wilayahnya dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi		Koperasi	150 Koperasi	<b>100,000,000</b>						150 Koperasi	<b>200,000,000</b>	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi, KSP/USP kewenangan dalam daerah kabupaten/kotayang diawasi kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitasnya				150 koperasi	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	150 koperasi	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	Persen		Persen	42,74 Persen	<b>100,000,000</b>						42,74 Persen	<b>105,000,000</b>	
2 17 04 2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	Koperasi		Koperasi	100 Koperasi	<b>100,000,000</b>						100 Koperasi	<b>105,000,000</b>	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan				100 koperasi	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 koperasi	105,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Jumlah SDM pengelola Koperasi dan SDM UMKM yang kompeten persentase SDM koperasi yang ditingkatkan kapasitas SDMnya	orang Persen		orang Persen	116 orang 18,62 Persen	<b>400,000,000</b>						116 orang 18,62 Persen	<b>600,000,000</b>	
2 17 05 2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah SDM koperasi yang ditingkatkan kapasitas SDMnya	orang		orang	116 orang	<b>400,000,000</b>						116 orang	<b>600,000,000</b>	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro kecil yang mengikuti pelatihan dan uji kompetensi				116 orang	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Koperasi dan UMKM	116 orang	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	persentase Koperasi aktif yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan persentase Koperasi aktif yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Koperasi Persen		Koperasi Persen	110 Koperasi 17,66 Persen	<b>100,000,000</b>						110 Koperasi 17,66 Persen	<b>180,000,000</b>	
2 17 06 2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	jumlah Koperasi aktif yang mendapatkan pelatihan fasilitasi pembiayaan	Koperasi		Koperasi	110 Koperasi	<b>100,000,000</b>						110 Koperasi	<b>180,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Koperasi aktif yang mendapatkan pelatihan fasilitasi pembiayaan				110 koperasi	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110 koperasi	180,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	-	-	-	0,49 -	<b>570,000,000</b>						0,49 -	<b>525,000,000</b>	
2 17 07 2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	UMK		UMK	19381 UMK	<b>570,000,000</b>						19381 UMK	<b>525,000,000</b>	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah data potensi usaha mikro Jumlah usaha mikro kecil yang diberikan izin				1 dokumen 1233 UMK	220,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Usaha Mikro Kecil	1 dokumen 1233 UMK	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah pertumbuhan kelembagaan usaha mikro Jumlah usaha mikro yang bermitra				7 klaster 430 umk	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Usaha Mikro Kecil	7 klaster 430 umk	110,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro				4 kali	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Usaha Mikro Kecil	4 kali	165,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2 17 08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	persentase pertumbuhan usaha mikro	-	-	-	0,0012 -	<b>515,000,000</b>						0,0012 -	<b>456,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 08 2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	Usaha Mikro yang memperoleh fasilitas pengembangan usaha	UMK		UMK	19381 UMK	<b>515,000,000</b>						19381 UMK	<b>456,500,000</b>	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	usaha mikro yang memperoleh fasilitas pengembangan usaha				19381 umk	515,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Usaha Mikro	19381 umk	456,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						<b>331,500,000</b>							<b>350,000,000</b>	
3 32 03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Presentase calon transmigran yang diberangkatkan	-		-	50 -	<b>331,500,000</b>						50 -	<b>350,000,000</b>	
3 32 03 2.01	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah transmigran yang diberangkatkan dibagi jumlah animo transmigran*100	persen		persen	50 persen	<b>331,500,000</b>						50 persen	<b>350,000,000</b>	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah animo transmigran dan Jumlah calon transmigran yang terjaring				6 KK	331,500,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	masyarakat	6 KK	350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
<b>TOTAL</b>							<b>26,792,901,500</b>							<b>29,732,303,100</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	18						<b>14,976,700,000</b>								<b>8,447,975,000</b>					
2	18	01					<b>13,565,700,000</b>							100 %	<b>6,907,675,000</b>					
2	18	01	2.01				<b>23,500,000</b>							100 %	<b>24,675,000</b>					
2	18	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)				5 dokumen	13,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 dokumen	14,175,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				5 dokumen	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 dokumen	10,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%		%	100 %	<b>4,140,000,000</b>						100 %	<b>4,347,000,000</b>	
2	18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				29 orang	4,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29 orang	4,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 bulan	140,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	147,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)	%		%	100 %	<b>110,000,000</b>						100 %	<b>115,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				5 dokumen	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 dokumen	52,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				29 orang	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29 orang	63,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%		%	100 %	<b>310,000,000</b>						100 %	<b>326,000,000</b>	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)				10 buah	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 buah	16,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	42,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	37,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	31,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	42,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				12 bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	157,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah bulan penataan arsip				0 bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0 bulan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang milik daerah penunjang pemerintah daerah (%)	%		%	100 %	<b>8,050,000,000</b>						100 %	<b>1,102,500,000</b>	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				14 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14 unit	105,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				46 unit	600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46 unit	630,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 unit	7,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				2 unit	350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 unit	367,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	100 %	<b>560,000,000</b>						100 %	<b>601,000,000</b>	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bulan	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	315,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				10 orang	260,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 orang	286,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	100 %	<b>372,200,000</b>						100 %	<b>391,000,000</b>	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	42,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 bulan	42,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	44,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	42,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 bulan	105,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				1 unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 unit	157,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan jumlah investor	%		%	50 %	<b>225,000,000</b>						50 %	<b>255,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kebijakan daerah tentang insentif dan kemudahan	perda/perbup		perda/perbup	1 perda/perbup	75,000,000						1 perda/perbup	85,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah kebijakan evaluasi Jumlah Perbup				0 dokumen 1 dokumen	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pengusaha/Investor	0 dokumen 1 dokumen	85,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen peta potensi Jumlah promosi pm	dokumen kali		dokumen kali	1 dokumen 4 kali	150,000,000						1 dokumen 4 kali	170,000,000	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Junlah Perbup/Perda RUPM				0 dokumen	0	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pengusaha/Investor	0 dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi berupa video dan dokumen				4 titik	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pengusaha/Investor	4 titik	170,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase promosi di kab pekalongan	%		%	100 %	250,000,000						100 %	260,000,000	
2 18 03 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah promosi pm	kali		kali	2 kali	250,000,000						2 kali	260,000,000	
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	jumlah strategi promosi				0 kegiatan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Investor/Pengusaha	0 kegiatan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal dan kepeminatan perusahaan Jumlah strategi promosi				4 investor 0 kegiatan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Investor/Pengusaha	4 investor 0 kegiatan	260,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	persentase ijin yang diterbitkan	%		%	100 %	453,000,000						100 %	495,300,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah pelayanan perijinan yang diterbitkan	ijin		ijin	4500 ijin	<b>453,000,000</b>						4500 ijin	<b>495,300,000</b>	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan perijinan jumlah pemenuhan komitmen perijinan				4500 ijin 0 ijin	330,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Investor/Pengusaha	4500 ijin 0 ijin	360,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah investor/perusahaan yang memenuhi komitmen perijinan berusaha dan perijinan komersial				4500 investor	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Investor/Pengusaha	4500 investor	38,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti				25 perusahaan	88,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Investor/Pengusaha	25 perusahaan	96,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perbup				0 dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Investor/Pengusaha	0 dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	perusahaan		perusahaan	43 perusahaan	<b>183,000,000</b>						43 perusahaan	<b>210,000,000</b>	
2 18 05 2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen LKPM yang dihasilkan	laporan		laporan	3 laporan	<b>183,000,000</b>						3 laporan	<b>210,000,000</b>	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM				30 Perusahaan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pengusaha/Investor	30 Perusahaan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina				150 perusahaan	98,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pengusaha/Investor	150 perusahaan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal				50 perusahaan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pengusaha/Investor	50 perusahaan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	%		%	100 %	<b>300,000,000</b>						100 %	<b>320,000,000</b>	
2 18 06 2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data yang tersedia	data		data	1 data	<b>300,000,000</b>						1 data	<b>320,000,000</b>	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan aplikasi perijinan dan update data				1 ijin	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pengusaha/Investor	1 ijin	320,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>TOTAL</b>							<b>14,976,700,000</b>							<b>8,447,975,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2	19																
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										32,663,131,050						13,337,500,000	
2	19	01															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	--		25,898,131,050						--		6,229,000,000	
2	19	01	2.01														
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	%	100 %			10,679,050						100 %		12,000,000	
2	19	01	2.01	01													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun			2 Dokumen		10,679,050		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	
2	19	01	2.01	07													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dok Monev dll			0 Dokumen		0		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	
2	19	01	2.02														
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	persen	persen	100 persen			4,356,452,000						100 persen		4,630,000,000	
2	19	01	2.02	01													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN			12 Bulan		4,246,452,000		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	4,500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	
2	19	01	2.02	04													
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)			12 Bulan		110,000,000		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	130,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	
2	19	01	2.05														
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	persen	persen	100 persen			10,000,000						100 persen		10,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				0 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	"Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi"				1 Orang	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	10,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>281,000,000</b>						100 %	<b>298,000,000</b>	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	36,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	32,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				12 Bulan	36,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	12 Bulan	39,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	55,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Kunjungan Tamu yang difasilitasi				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	31,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	105,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan Arsip Dinamis				0 kali	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 kali	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%		%	100 %	20,058,000,000						100 %	60,000,000	
2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan roda 2 dan Roda 4 Operasional				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				1 Kursi Putar	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kursi Putar	20,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				8 Unit	38,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	40,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun				1 Gedung Kesenian	20,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung Kesenian	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		%	100 %	<b>850,000,000</b>						100 %	<b>860,000,000</b>	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	140,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	710,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	710,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		%	100 %	<b>332,000,000</b>						100 %	<b>359,000,000</b>	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	37,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	43,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel						0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	27,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	29,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara				1 Unit	230,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	- -		- -	22.5 - 5.10 -	<b>1,640,000,000</b>						22.5 - 5.10 -	<b>1,540,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						1,640,000,000						1,540,000,000		
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pemuda yang menerima penghargaan Jumlah pemuda yang terpenuhi haknya melalui perlindungan pemuda, jumlah pemuda yang mendapatkan akses pengembangan diri; jumlah pemuda yang menggunakan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif; jumlah partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, jumlah pemuda yang berperanserta dalam pengambilan keputusan program strategis kepemudaan				100 Orang 4 Orang 25 Orang	550,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri x 100	100 Orang 4 Orang 25 Orang	605,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang memperoleh pelatihan pengembangan kapasitas dan kesukarelawanan Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				100 Orang 30 Orang 100 Orang	420,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri x 100	100 Orang 30 Orang 100 Orang	240,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang menerima penghargaan Jumlah pemuda yang sudah mendapat pelatihan peningkatan kompetensi diri Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kota				1 Kelompok 50 Orang 150 Orang	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri x 100	1 Kelompok 50 Orang 150 Orang	95,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka				25 Orang 410 Orang	580,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Jumlah pemuda yang berwirausaha / jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri x 100	25 Orang 410 Orang	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Perolehan Medali (Emas, Perak, perunggu) yang diperoleh dalam pekan olahraga daerah tingkat provinsi dan kejuaraan tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional	-	-	--		<b>5,125,000,000</b>						--	<b>5,568,500,000</b>	
2 19 03 2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pembinaan olahraga/ jumlah satuan pendidikan x 100%	%	%	25 %		<b>945,000,000</b>						25 %	<b>1,039,500,000</b>	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga Jumlah pusat pelatihan olahraga yang aktif beroperasi Jumlah sarana dan prasarana olahraga tersedia				3 Kegiatan 7 Unit 2 Paket	945,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3 Kegiatan 7 Unit 2 Paket	1,039,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2 19 03 2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	kelompok		kelompok	1 kelompok	<b>2,670,000,000</b>						1 kelompok	<b>2,900,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten (Kompetisi Olahraga) Jumlah penyelenggaraan event OR tingkat daerah Jumlah peserta dalam penyelenggaraan kejuaraan				10 Event 1 Event 700 Orang	2,670,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 Event 1 Event 700 Orang	2,900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.19.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah atlet yang masuk pelatda/ jumlah atlet potensial terdaftar x 100%	%		%	10 %	<b>890,000,000</b>						10 %	<b>979,000,000</b>	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten Jumlah atlet daerah yang terpilih Jumlah atlet yang dibina Jumlah Cabor yang melakukan pemusatan latihan daerah				100 Orang 120 Orang 40 Orang 10 Kelompok	890,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100 Orang 120 Orang 40 Orang 10 Kelompok	979,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina / jumlah olahraga rekreasi x 100	%		%	50 %	<b>620,000,000</b>						50 %	<b>650,000,000</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga tradisional yang dilakukan masyarakat Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina Jumlah Sapras olahraga rekreasi tersedia				3 Unit 3 Event 3 Organisasi 10 Unit	620,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Unit 3 Event 3 Organisasi 10 Unit	650,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>							<b>5,404,161,228</b>						<b>5,011,077,350</b>	
3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase penambahan destinasi wisata	-		-	0,03 -	<b>3,954,161,228</b>						0,03 -	<b>3,391,077,350</b>	
3.26.02.2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>3,954,161,228</b>							<b>3,391,077,350</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Destinasi Pariwisata yang dihasilkan Jumlah entitas pengelolaan destinasi Jumlah laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang diadakan				2 Dokumen 30 Unit 30 Dokumen 5 Paket	2,425,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a Pengadaan/Pe meliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	2 Dokumen 30 Unit 30 Dokumen 5 Paket	2,000,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang diadakan				5 Paket	219,161,228	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a Pengadaan/Pe meliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a	5 Paket	241,077,350	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah anggota masyarakat yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yang terselenggara Jumlah Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dasar kepariwisataan Jumlah POKDARWIS Jumlah SDM pariwisata (Pengelola Destinasi Wisata) dan ekraf yang telah mengikuti kompetensi tingkat dasar				30 Kelompok 2 Paket 2 Paket 100 Orang 30 Kelompok 20 Orang	1,310,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pe meliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Kelompok 2 Paket 2 Paket 100 Orang 30 Kelompok 20 Orang	1,150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3 26 03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	-		-	0,10 -	<b>1,450,000,000</b>						0,10 -	<b>1,620,000,000</b>	
3 26 03 2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>1,450,000,000</b>							<b>1,620,000,000</b>	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah media yang digunakan untuk penyediaan data dan tersebarnya informasi pariwisata				3 Kegiatan 5 Unit	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Kegiatan 5 Unit	270,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional				5 Kegiatan	1,200,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	5 Kegiatan	1,350,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	
<b>TOTAL</b>							<b>38,067,292,278</b>						<b>18,348,577,350</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	23						<b>5,985,995,000</b>						<b>6,383,344,500</b>									
2	23	01					<b>4,873,000,000</b>						100 %	<b>5,068,300,000</b>								
2	23	01	2.01				<b>8,500,000</b>						11 Jenis	<b>9,500,000</b>								
2	23	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu						11 jenis	8,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	11 jenis	9,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.02				<b>3,715,000,000</b>						12 Bulan	<b>4,071,500,000</b>								
2	23	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan gaji dan tunjangan ASN						12 bulan	3,650,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	4,000,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (bulan)						12 bulan	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	71,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.05				<b>10,000,000</b>						1 Tahun	<b>15,000,000</b>								
2	23	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (bulan)						12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 bulan	15,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	2.06				<b>179,500,000</b>						12 Bulan	<b>198,500,000</b>								
2	23	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit terpenuhinya komponen listrik/kantor (unit/buah)						5 jenis	11,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	5 jenis	12,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan alat tulis kantor				12 bulan	22,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 bulan	24,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan bahan pembersih kantor yang diadakan				18 Jenis	9,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	18 Jenis	10,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang diadakan				12 Jenis	34,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 Jenis	37,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangkapenyediaan makan dan minum				11 Bulan	11,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	11 Bulan	13,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan dalam memenuhi Rakor				12 bulan	92,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 bulan	101,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>2 23 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	Unit		Unit	48 Unit	<b>325,000,000</b>						48 Unit	<b>75,000,000</b>	
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralataan dan mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				48 unit	325,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	48 unit	75,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>2 23 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>456,000,000</b>						12 Bulan	<b>501,000,000</b>	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangkapenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	244,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 Bulan	268,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan honor bagi tenaga outsourcing				12 Bulan	212,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 Bulan	233,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>179,000,000</b>						12 Bulan	<b>197,800,000</b>	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan Jumlah dokumen/surat kelengkapan kendaraan dinas jabatan/operasional				12 bulan 9 Dokumen	73,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 bulan 9 Dokumen	80,300,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemeliharaan mobil perpustakaan keliling dan kendaraan roda dua perpustakaan keliling				12 bulan	31,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 bulan	34,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan dalam rangka penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				12 bulan	17,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	12 bulan	19,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dalam setahun				2 unit	58,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	2 unit	64,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%		%	0.488 %	<b>1,112,995,000</b>						0.488 %	<b>1,315,044,500</b>	
2 23 02 2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase ketersediaan bahan pustaka	%		%	26.75 %	<b>553,450,000</b>						26.75 %	<b>679,545,000</b>	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan perpustakaan				64 Lokasi	235,950,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	64 Lokasi	259,545,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan dan diolah				2000 Exemplar	317,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	2000 Exemplar	420,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang		Orang	86646 Orang	<b>559,545,000</b>						86646 Orang	<b>635,499,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Bintek perpustakaan desa Jumlah pelaksanaan pameran Lomba perpustakaan desa				50 orang 1 paket 3 pemenang	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	50 orang 1 paket 3 pemenang	350,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah warga yang mendapat pelatihan kewirausahaan				72 orang	259,545,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan	72 orang	285,499,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>425,000,000</b>							<b>515,000,000</b>	
2 24 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Prosentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%		%	63.64 %	<b>285,000,000</b>						63.64 %	<b>345,000,000</b>	
2 24 02 2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase arsip dinamis daerah kabupaten yang dikelola	%		%	63.64 %	<b>125,000,000</b>						63.64 %	<b>125,000,000</b>	
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pencipta arsip yang diawasi				45 pencipta arsip	125,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD	45 pencipta arsip	125,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase arsip statis daerah kabupaten yang dikelola	%		%	29.8 %	<b>60,000,000</b>						29.8 %	<b>70,000,000</b>	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi, dan diakses				2000 berkas	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD	2000 berkas	70,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 02 2.03	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan SDM Kearsipan dalam rangka mendukung Program SRIKANDI.	OPD		OPD	25 OPD	<b>100,000,000</b>						25 OPD	<b>150,000,000</b>	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bintek/Pelatihan SRIKANDI di Tahun 2022				25 OPD	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD	25 OPD	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan	%		%	30 %	<b>140,000,000</b>						30 %	<b>170,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 03 2.01	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	Prosentase arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	%	%	%	30 %	50,000,000						30 %	60,000,000	
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip beretensi di bawah 10 tahun yang dinilai dan ditetapkan menjadi arsip musnah				10000 berkas	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD	10000 berkas	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.02	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	Prosentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	%	%	%	25 %	50,000,000						25 %	60,000,000	
2 24 03 2.02 01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dievakuasi dan diidentifikasi				120 meter linear	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD	120 meter linear	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03 2.03	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	Prosentase arsip yang diselamatkan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	%	%	%	50 %	40,000,000						50 %	50,000,000	
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah arsip yang diselamatkan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung				600 Berkas	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD	600 Berkas	50,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>TOTAL</b>							<b>6,410,995,000</b>							<b>6,898,344,500</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	30,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 bulan	15,326,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	21,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor				12 bulan	85,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	96,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu				12 bulan	33,340,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	48,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				180 kali	175,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	180 kali	192,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit		unit	20 unit	<b>295,000,000</b>						20 unit	<b>225,000,000</b>	
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				8 unit	25,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	8 unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi				12 unit	170,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 unit	100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>402,000,000</b>						12 bulan	<b>425,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	102,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pengadaan jasa pelayanan umum kantor				12 orang	300,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 orang	315,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>196,900,000</b>						12 bulan	<b>233,000,000</b>	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan				12 bulan	34,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	38,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	30,400,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				35 unit	32,500,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	35 unit	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi				4 unit	100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 unit	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>						<b>29,563,833,333</b>							<b>0</b>	
<b>3 25 03 2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>3,347,500,000</b>							<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dokumen data sumber daya perikanan tangkap yang tersusun Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia Jumlah sarana perikanan tangkap ramah lingkungan yang tersedia				1 dokumen 30 unit 150 unit	1,325,000,000	Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			1 dokumen 30 unit 150 unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia Jumlah sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan Jumlah sarana perikanan tangkap lingkungan yang tersedia				15 unit 150 unit 150 unit	2,022,500,000	Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 unit 150 unit 150 unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 2.02	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Monev, Identifikasi dan verifikasi kelembagaan serta ujicoba Discaringsang Monev, Identifikasi dan verifikasi kelembagaan serta ujicoba Discaringsang	orang orang		orang orang	90 orang 180 orang	<b>230,000,000</b>					90 orang 180 orang	<b>0</b>		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terbentuk Jumlah keluarga Nelayan yang telah diberdayakan Jumlah Nelayan yang telah terfasilitasi Jumlah Nelayan yang terbina Jumlah peningkatan klasifikasi kelompok Nelayan yang terbina				15 kelompok 60 orang 4 Kelompok 120 orang 10 kelompok	230,000,000	Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	15 kelompok 60 orang 4 Kelompok 120 orang 10 kelompok	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 2.03	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	Jumlah lokasi pembangunan dermaga tambat labuh perahu ikan Jumlah lokasi penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana operasional TPI	lokasi lokasi		lokasi lokasi	2 lokasi 2 lokasi	<b>25,986,333,333</b>					2 lokasi 2 lokasi	<b>0</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen Kajian Pembangunan TPI Jumlah dokumen Prosedur Pengelolaan TPI yang tersusun Jumlah gedung di lingkungan TPI yang terbangun Jumlah Kios di lingkungan TPI yang terbangun Jumlah luas halaman lingkungan TPI yang terbangun Jumlah sarana dan prasarana operasional TPI Jambean yang tersedia Jumlah sarana prasarana TPI Wonokerto yang tersedia Panjang Dermaga Tambat Perahu Ikan yang terbangun Panjang jalan lingkungan TPI Jambean yang terbangun				1 dokumen 1 dokumen 15 unit 6 unit 863 meter2 1 paket 1 paket 267.7 meter 590 meter	25,986,333,333	Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	TPI Wonokerto, TPI Jambean, Dermaga Tratebang, Dermaga Mrican	1 dokumen 1 dokumen 15 unit 6 unit 863 meter2 1 paket 1 paket 267.7 meter 590 meter	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan	ton		ton	8593650 ton	<b>2,220,000,000</b>						8593650 ton	<b>0</b>	
3 25 04 2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Pembudidaya Air Payau dan Tawar Pembudidaya Kab Pekalongan	Paket Peket		Paket Peket	2 Paket 2 Peket	<b>200,000,000</b>						2 Paket 2 Peket	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan budidaya ikan				2 Bintek	150,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil; Pembudidaya Ikan Air Payau dan Tawar 2. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan : Pembudidaya Kab Pekalongan	2 Bintek	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan pembudidayaan ikan				80 orang	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil; Pembudidaya Ikan Air Payau dan Tawar 2. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan : Pembudidaya Kab Pekalongan	80 orang	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Pemeliharaan Gedung Posikandu Pengadaan Bibit Unggul dan Pakan, Rehab Kolam, Pengadaan Sarpras Nila, Pengadaan Sarpras Lele, Pengadaan Sarana Ikan Hias Pengadaan Waring Produksi Perikanan Budidaya RTP Pembudidaya Kab Pekalongan	Paket Paket Paket Rupiah Kecamatan		Paket Paket Paket Rupiah Kecamatan	1 Paket 5 Paket 3 Paket 8593650 Rupiah 19 Kecamatan	<b>2,020,000,000</b>						1 Paket 5 Paket 3 Paket 8593650 Rupiah 19 Kecamatan	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akuratnya data perikanan Budidaya				1 dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	0	1 dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Jalan Produksi Tambak Desa Pecakaran Jumlah Peningkatan Jalan Produksi Tambak Desa Semut Jumlah Peningkatan Jalan Produksi Tambak Desa Api - Api				1 Paket 1 Paket 1 Paket	800,000,000	Semua Kab/Kota Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	0	1 Paket 1 Paket 1 Paket	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bibit Unggul dan Pakan Pengadaan Sarpras Budidaya Ikan Nila Pengadaan Sarpras Budidaya Lele Rehabilitasi Kolam Sarana Budidaya Ikan Hias				1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	510,000,000	Semua Kab/Kota Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	0	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Posikandu				1 Paket	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	0	1 Paket	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bulan penyediaan sarana prasarana produksi/operasional BBIAT Jumlah target produksi benih BBIAT				12 bulan 1376144 ekor	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	0	12 bulan 1376144 ekor	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengadaan Waring				3 Paket	410,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	0	3 Paket	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>90,000,000</b>							<b>0</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						90,000,000						0		
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina				3 kelompok	90,000,000	Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3 kelompok	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah produksi olahan ikan Tingkat konsumsi Ikan	- -		- -	3.326,21 - 24,68 -	<b>626,777,000</b>					3.326,21 - 24,68 -	<b>564,500,000</b>		
3 25 06 2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	Jumlah kegiatan gemarikan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan promosi produk perikanan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan uji mutu produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang ditingkatkan kelas kelompoknya Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang terbentuk Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	kegiatan kegiatan kegiatan kelompok kelompok orang		kegiatan kegiatan kegiatan kelompok kelompok orang	1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 2 kelompok 2 kelompok 100 orang	<b>515,000,000</b>					1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 2 kelompok 2 kelompok 100 orang	<b>564,500,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kegiatan Gemarikan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan promosi produk perikanan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan uji mutu produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang ditingkatkan kelas kelompoknya Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang terbentuk Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina				1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 2 kelompok 2 kelompok 100 orang	515,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	1 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 2 kelompok 2 kelompok 100 orang	564,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	buah		buah	42 buah	<b>111,777,000</b>						42 buah	<b>0</b>	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia				42 unit	111,777,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan	42 unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana pengolahan ikan yang terehab				5 unit	0	Kab. Pekalongan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan	5 unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>TOTAL</b>							<b>37,048,990,583</b>							<b>5,716,215,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja penilaian pegawai yang disusun tepat waktu				5 dokumen	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	UPT Metrologi, UPT Pasar, Kantor Dinas Perindag	5 dokumen	12,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				15 pegawai	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	UPT Metrologi, UPT Pasar, Kantor Dinas Perindag	15 pegawai	27,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>3 30 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran  Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	%  %		%  %	100 %  100 %	<b>575,000,000</b>						100 %  100 %	<b>614,000,000</b>	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit terpenuhinya komponen listri kantor				143 unit	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administtasi umum	143 unit	11,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	85,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administtasi umum	12 bulan	90,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 bulan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administtasi umum	12 bulan	80,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor				12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administtasi umum	12 bulan	210,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administtasi umum	12 bulan	12,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				50 kali	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan administtasi umum	50 kali	210,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>3 30 02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-		-	50 -	<b>100,000,000</b>						50 -	<b>125,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 02 2.01	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan	tahun		tahun	1 tahun	<b>100,000,000</b>						1 tahun	<b>125,000,000</b>	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	JUmlah pelaku usaha terfasilitasi izin TDG Jumlah pelaku usaha terfasilitasi STPW secara elektronik Jumlah pelaku usaha toko/swalayan yang tefasilitasi pemenuhan komitmen perizinan				2 orang 3 toko 2 toko	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pelaku usaha di Kab.Pekalongan	2 orang 3 toko 2 toko	125,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak)	-		-	83,3 -	<b>7,965,000,000</b>						83,3 -	<b>8,080,000,000</b>	
3 30 03 2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Terlaksananya peningkatan sarana distribusi perdagangan	%		%	100 %	<b>7,900,000,000</b>						100 %	<b>8,000,000,000</b>	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi				4 pasar	7,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pasar Rakyat	4 pasar	7,500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tercapainya target pendapatan pasar				85 persen	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pasar Rakyat	85 persen	500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03 2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi	orang		orang	510 orang	<b>65,000,000</b>						510 orang	<b>80,000,000</b>	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina				700 orang	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Pengelola sarana distribusi perdagangan	700 orang	80,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase Agen dan Pasar Rkyat yang dipantau ketersediaan Bapokting	-		-	60 -	<b>200,000,000</b>						60 -	<b>220,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.01	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksananya pemantauan barang kebutuhan pokok dan bahan penting di Kabupaten Pekalongan Tersedianya data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan bahan penting di Kab.Pekalongan	tahun tahun		tahun tahun	1 tahun 1 tahun	<b>200,000,000</b>						1 tahun 1 tahun	<b>220,000,000</b>	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida Terlaksananya operasi pasar tersedianya data perkembangan harga dan stok barang kebutuhan pokok penting di pasar				6 kali 2 kali 240 hari	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Agen dan Distributor Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting di Kab.Pekalongan	6 kali 2 kali 240 hari	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Pertumbuhan eksportir	-		-	1 -	<b>870,000,000</b>						1 -	<b>695,000,000</b>	
3 30 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pelaksanaan pameran promosi produk unggulan daerah Kab. Pekalongan Tercapainya perluasan pasar produk dari Kab.Pekalongan	tahun tahun		tahun tahun	1 tahun 1 tahun	<b>870,000,000</b>						1 tahun 1 tahun	<b>695,000,000</b>	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dagang lokal yang diselenggarakan Jumlah pameran nasional yang diikuti Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina Jumlah pelaku usaha yang diikutkan misi dagang				2 even 4 even 50 orang 6 orang	870,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Pelaku usaha produk unggulan daerah yang berijin	2 even 4 even 50 orang 6 orang	695,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-		-	83,9 -	<b>169,110,300</b>						83,9 -	<b>197,798,500</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan dan penyuluhan alat UTTP Terlaksananya sidang tera / tera ulang di 12 Pasar Rakyat dan 4 Pasar Desa	orang Tahun		orang Tahun	300 orang 1 Tahun	<b>169,110,300</b>						300 orang 1 Tahun	<b>197,798,500</b>	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera				2251 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaku usaha pemilik UTTP wajib tera/ tera ulang	2251 unit	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal Porsentase penyelesaian kasus pelanggaran kemetrologian				300 orang 100 %	69,110,300	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaku usaha pemilik UTTP wajib tera/ tera ulang	300 orang 100 %	87,798,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Pertumbuhan jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	-		-	1 -	<b>75,000,000</b>						1 -	<b>80,000,000</b>	
3 30 07 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Pelaksanaan pendataan dan dokumentasi pelaku ekspor dan pelaku umkm di kab. Pekalongan Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	bulan pertemuan		bulan pertemuan	6 bulan 2 pertemuan	<b>75,000,000</b>						6 bulan 2 pertemuan	<b>80,000,000</b>	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaku usaha yang terfasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				100 pelaku usaha	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Pelaku Ekspor dan Pelaku UMKM unggulan daerah	100 pelaku usaha	80,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>6,635,000,000</b>						<b>8,292,000,000</b>		
3 31 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- -		- -	-- --	<b>5,385,000,000</b>						-- --	<b>6,742,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>755,000,000</b>						100 %	<b>1,575,000,000</b>	
3 31 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				11 unit	550,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	11 unit	575,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				20 unit	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	20 unit	30,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi				22 unit	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	22 unit	900,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				5 unit	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	5 unit	70,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	%		%	100 %	<b>4,170,000,000</b>						100 %	<b>4,642,000,000</b>	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	UPT Metrologi, UPT Pasar, Kantor Dinas Perindag	12 bulan	610,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pengadaan jasa pelayanan umum kantor				140 Orang	3,570,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	UPT Metrologi, UPT Pasar, Kantor Dinas Perindag	140 Orang	4,032,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>460,000,000</b>						100 %	<b>525,000,000</b>	
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang milik daerah	12 bulan	40,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang milik daerah	12 bulan	80,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebel				12 bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang milik daerah	12 bulan	17,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya				12 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang milik daerah	12 bulan	37,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi				11 unit	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang milik daerah	11 unit	350,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Prosentase Peningkatan nilai produksi IKM	-		-	0,4 -	<b>1,000,000,000</b>						0,4 -	<b>1,200,000,000</b>	
3 31 02 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Legalitas usaha yang terbit Persentase IKM yang dibina	IKM %		IKM %	20 IKM 0.6 %	<b>1,000,000,000</b>						20 IKM 0.6 %	<b>1,200,000,000</b>	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah sumber daya industri yang dibina				40 IKM	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	IKM	40 IKM	350,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah kelompok IKM yang mendapatkan bantuan sarana				1 sentra	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	IKM	1 sentra	600,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumah wira usaha baru yang terlatih				40 orang	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	IKM	40 orang	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pertumbuhan legalitas usaha	0%		0%	10 0%	<b>100,000,000</b>						10 0%	<b>100,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Legalitas usaha yang terbit	IKM		IKM	20 IKM	100,000,000						20 IKM	100,000,000	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang terfasilitasi legalitas				20 IKM	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	IKM	20 IKM	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Tersajinya data industri terkini	%		%	100 %	150,000,000						100 %	250,000,000	
3 31 04 2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Tersajinya data industri terkini	data		data	1 data	150,000,000						1 data	250,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri				4 komponen	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	IKM	4 komponen	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>TOTAL</b>							<b>23,854,110,300</b>							<b>26,293,298,500</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor				12 bulan	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	510,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	545,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	275,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor				12 bulan	135,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	146,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 bulan	1,070,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 kali	900,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	76 kali	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>1,740,000,000</b>						100 %	<b>3,750,000,000</b>	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7 unit	560,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	7 unit	2,700,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jumlah Pengadaan Mebel				30 unit	280,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	30 unit	300,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				59 unit	900,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	59 unit	750,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>3,743,000,000</b>						100 %	<b>4,111,300,000</b>	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	1,183,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	1,301,300,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	660,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				74 orang	1,960,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	74 orang	2,150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>3,687,386,000</b>						100 %	<b>3,855,124,600</b>	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	677,386,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	745,124,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	1,200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	1,320,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				12 bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	70,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 bulan	750,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	820,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	900,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	<b>1,050,000,000</b>						100 %	<b>1,115,000,000</b>		
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan pemenuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	1,050,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1,115,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.12	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Prosentase bulan pemenuhan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	<b>1,440,000,000</b>						100 %	<b>1,583,000,000</b>		
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Kepala Daerah				12 bulan	860,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	950,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 bulan	580,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	633,000,000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>1,310,000,000</b>							<b>1,470,000,000</b>	
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Prosentase pemenuhan fasilitas bidang tata kelola pemerintahan	-		-	100 -	<b>1,310,000,000</b>						100 -	<b>1,470,000,000</b>		
4 01 02 2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	%		%	100 %	<b>1,080,000,000</b>						100 %	<b>1,180,000,000</b>		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian di bidang pemerintahan				1 dokumen	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	1 dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen administrasi kewilayahan				2 dokumen	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	2 dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penerapan dan evaluasi SPM, dokumen LPPD, dokumen PAW, dokumen memori jabatan yang tersusun Penyusunan dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran				3 dokumen 1 Jenis	530,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	3 dokumen 1 Jenis	580,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	%		%	100 %	<b>230,000,000</b>						100 %	<b>290,000,000</b>		
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah naskah kerja sama dalam negeri yang terfasilitasi				20 naskah	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	20 naskah	250,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi kerja sama luar negeri				1 kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	1 kegiatan	40,000,000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>1,037,000,000</b>							<b>1,120,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	--	<b>210,000,000</b>						--	<b>230,000,000</b>		
4 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%		%	100 %	<b>210,000,000</b>						100 %	<b>230,000,000</b>		
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				320 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	320 Orang	110,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Orang	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	100 Orang	120,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	100 -	827,000,000						100 -	890,000,000	
4 01 02 2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	%	%	%	100 %	827,000,000						100 %	890,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian atas permasalahan Peraturan Perundang-undangan Jumlah produk hukum yang disinkronisasi dan harmonisasi tersusunnya propemperda/propemperbup				5 buah 60 Perda/Perbup 2 Dokumen	345,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	5 buah 60 Perda/Perbup 2 Dokumen	360,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi penanganan perkara litigasi dan non litigasi Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum Pemenuhan data laporan Aksi HAM dan penilaian Peduli HAM Prosentase pemberian bantuan hukum bagi warga miskin melalui LBH				4 Perkara 357 Orang 4 Dokumen 40 Perkara	332,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 Perkara 357 Orang 4 Dokumen 40 Perkara	365,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip Produk Hukum Daerah Jumlah Himpunan Produk Hukum daerah yang dibuat Jumlah Perda dan Perbup yang didistribusikan Jumlah Perda dan Perbup yang disosialisasikan				12 Bulan 340 buku 150 Perda/Perbup 3 Perda/Perbup	150,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	12 Bulan 340 buku 150 Perda/Perbup 3 Perda/Perbup	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						1,983,000,000						2,335,000,000		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	--	1,983,000,000						--	2,335,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	%		%	100 %	<b>25,000,000</b>						100 %	<b>25,000,000</b>	
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja sekretariat daerah yang tersusun				1 dokumen	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%		%	100 %	<b>274,000,000</b>						100 %	<b>450,000,000</b>	
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				12 Bulan	119,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15 Pegawai	155,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	15 Pegawai	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>50,000,000</b>						100 %	<b>100,000,000</b>	
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis dan inaktif yang dikelola dalam satu tahun				2500 Dokumen	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	2500 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>175,000,000</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	175,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	%		%	100 %	<b>1,459,000,000</b>						100 %	<b>1,560,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan, anjab dan ABK yang tersusun				3 Dokumen	350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	3 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	354,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	3 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sikip tingkat Pemkab yang tersusun				4 dokmen	305,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 dokmen	310,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>637,500,000</b>						<b>680,000,000</b>		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	<b>57,500,000</b>						-	<b>70,000,000</b>	
4 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	%		100 %	<b>57,500,000</b>						100 %	<b>70,000,000</b>	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Renstra dan Renja) Jumlah SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran				2 Dokumen 6 SK	27,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Setda Kab.Pekalongan	2 Dokumen 6 SK	35,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Setda Kab.Pekalongan	2 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	-	-	-	100 -	<b>580,000,000</b>						100 -	<b>610,000,000</b>	
4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Presentase laporan fisik seluruh opd	%	%	%	100 %	<b>580,000,000</b>						100 %	<b>610,000,000</b>	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penunjukan PA dan KPA pada Perangkat Daerah dan Surat Keputusan (SK) Sekda tentang Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah				9 SK	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	9 SK	40,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka koordinasi, pengendalian, evaluasi, percepatan dan pelaporan kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, DAK dan Tugas Pembantuan				12 Bulan	262,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	OPD se Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	270,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, DAK, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dekonsentrasi Jumlah dokumen visualisasi hasil pembangunan Kabupaten Pekalongan Update data pelaporan (SIMPEL) kegiatan APBD				4 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	283,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>33,817,178,100</b>							<b>17,684,895,910</b>	
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	-	-	-	100 -	<b>33,817,178,100</b>						100 -	<b>17,684,895,910</b>	
4 01 02 2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi	%	%	%	100 %	<b>33,817,178,100</b>						100 %	<b>17,684,895,910</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan dan koordinasi dalam fasilitasi keagamaan dan lembaga keagamaan				4 keg	3,817,217,100	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 keg	4,198,938,810	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat, individu dan keluarga penerima hibah dan bantuan sosial				4 keg	28,370,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 keg	11,693,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat				3 keg	1,629,961,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	OPD se Kabupaten Pekalongan	3 keg	1,792,957,100	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>860,000,000</b>							<b>940,000,000</b>	
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase kenaikan deviden dari BUMD	%		%	5 %	<b>860,000,000</b>						5 %	<b>940,000,000</b>	
4 01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Prosentase kebijakan Perekonomian Daerah yang dilakukan monev	%		%	100 %	<b>435,000,000</b>						100 %	<b>475,000,000</b>	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaksanakan				33 Kegiatan	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	33 Kegiatan	130,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPID yang dilaksanakan				4 Kegiatan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	275,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPAKD yang dilaksanakan				4 Kegiatan	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	70,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	%		%	100 %	<b>425,000,000</b>						100 %	<b>465,000,000</b>	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Kegiatan	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	OPD se Kabupaten Pekalongan	2 Kegiatan	330,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup				4 Kegiatan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Energi dan Air				4 Kegiatan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>2,100,000,000</b>							<b>1,926,000,000</b>	
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ yang tepat waktu	-		-	100 -	<b>2,100,000,000</b>						100 -	<b>1,926,000,000</b>	
4 01 03 2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	%		%	100 %	<b>2,100,000,000</b>						100 %	<b>1,926,000,000</b>	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. PBJ				195 Paket	1,500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	195 Paket	1,500,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan aplikasi sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)				1 Dokumen	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	276,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta pembinaan pelaku pengadaan barang/ jasa				425 Orang	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD se Kabupaten Pekalongan	425 Orang	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>550,000,000</b>						<b>605,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	--	<b>550,000,000</b>						--	<b>605,000,000</b>	
4 01 01 2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Prosentase kgiatan keprotokolan yang terfasilitasi	%		%	100 %	<b>550,000,000</b>						100 %	<b>605,000,000</b>	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Protokol pimpinan yang terfasilitasi				140 kali	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	140 kali	165,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	220,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah bulan terpenuhinya pendokumentasian kegiatan Pimpinan				12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Organisasi Perangkat Daerah	12 bulan	220,000,000	Sekretariat Daerah
<b>TOTAL</b>							<b>74,929,064,100</b>						<b>63,920,320,510</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4	02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>													72,735,546,290	79,613,182,859		
4	02	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	--	40,190,761,290						--	44,025,959,309		
4	02	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Paket Tahun	Paket Tahun	1 Paket 1 Tahun	10,000,000					1 Paket 1 Tahun	11,000,000			
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaraan ya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	5,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaraan ya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Dokumen	5,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terbayarnya Gaji ASN dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Pembantu, Pengurusan Gaji, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan	Tahun Tahun	Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	4,882,976,190						1 Tahun 1 Tahun	5,371,273,809		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD			1 Tahun	4,510,016,190	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaraan ya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	4,961,017,809	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terbayarnya Honorarium PA, Kuasa PA, PPK, Bend Pengeluaran DPRD, Bend Pengeluaran Pembantu, Pengurusan Gaji, Pengurus Barang Pengguna Inventaris, Pengurus Barang Pengguna Persediaan			1 Tahun	372,960,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaraan ya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	410,256,000	Sekretariat DPRD



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkirimnya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		orang	44 orang	350,000,000					44 orang	385,000,000		
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44 Orang	350,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	44 Orang	385,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Dewan ke Luar Daerah (Luar Provinsi 24 kali, Dalam Provinsi 30 kali, Eks-Karesidenan 20 kali) Tersedianya Alata Tulis Kantor dan Materai, Tersedianya Kebutuhan Bahan Pembersih dan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai Tersedianya Barang Cetak dan Biaya Fotocopy Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan Makan dan Minum Tamu, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan	Bulan Bulan Tahun Bulan Bulan		Bulan Bulan Tahun Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	1,489,301,100					12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	1,601,935,500		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	24,999,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	27,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai				1 Tahun	149,999,200	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	165,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Bahan Pembersih dan Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	249,999,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	275,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Biaya Fotocopy				1 Tahun	252,999,900	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	253,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Setwan, Jamuan Makan dan Minum Tamu, Makan Prasmanan Tamu DPRD dan Setwan, Belanja Bahan Makanan				1 Tahun	301,305,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	331,435,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pejabat Struktural dan Staf Dewan ke Luar Daerah (Luar Provinsi 24 kali, Dalam Provinsi 30 kali, Eks-Karesidenan 20 kali)				1 Tahun	500,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	550,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip Kantor				1 Tahun	9,999,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya 1 Paket Mixer, 1 Paket Mic Conference, 1 unit Alat Pengukur Suhu Badan, 2 unit Printer dan 1 Paket Genset, Jaringan dan Pemasangannya Tersedianya 1 Paket Mixer dan Sound System, 1 Paket Mic Conference, 1 unit Alat Pengukur Suhu Badan, 2 unit Printer Tersedianya 1 Paket Mixer dan Sound Conference, 1 unit Alat Pengukur Suhu Badan, 2 unit Printer dan 1 Paket Genset, Jaringan dan Pemasangannya	Paket Bulan Paket		Paket Bulan Paket	1 Paket 12 Bulan 1 Paket	<b>3,000,000,000</b>						1 Paket 12 Bulan 1 Paket	<b>6,860,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya 2 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan 9 unit Kendaraan Dinas Roda Dua				11 Unit	0	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	11 Unit	0	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Lemari Besi 4 unit, Meja Kursi Tamu 3 Set, Meja Kerja 8 unit, Kursi Putar 72 buah, Kursi Tunggu 10 buah				1 Paket	600,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Paket	660,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 1 Paket Mixer, 1 unit Alat Pengukur Suhu Badan, 2 unit Printer dan 1 Paket Genset, Jaringan dan Pemasangannya				1 Paket	2,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Paket	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor				1 Paket	0	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Paket	5,000,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya rumah genset, tempat parkir, pagar gedung kantor dan pavingisasi taman				1 paket	400,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 paket	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya jasa telephone, air, listrik, Surat Kabar dan internet Tersedianya tenaga outsourcing kebersihan 8 orang, sopir 8 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang	Bulan Tahun		Bulan Tahun	12 Bulan 1 Tahun	<b>1,320,000,000</b>						12 Bulan 1 Tahun	<b>1,320,000,000</b>	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa telephone, air, listrik, Surat Kabar dan internet				1 Tahun	400,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	400,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga outsourcing kebersihan 8 orang, sopir 8 orang, tenaga pramuladi 4 orang, dan tenaga IT 2 orang				1 Tahun	920,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	920,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas</p> <p>Rehabilitasi plafon gedung setwan, pemasangan teralis besi pintu ruang paripurna, pagar, renovasi kamar mandi ruang paripurna, pemeliharaan gedung, perbaikan garasi mobil, pembuatan talud, renovasi ruang kerja Sekretariat dan AKD, pembuatan instalasi lampu taman</p> <p>Terpeliharanya Tabung Pemadam Kebakaran 10 unit, Refil Toner Printer LaserJet 8 unit, Mesin Absensi 2 unit, Mesin Potong Rumput 2 unit, AC Floor 9 unit, AC Split 34 unit, Lemari Es 8 unit, Pompa Air 2 unit, Sound System 3 unit, Kamera Digital 2 unit, LCD Proyektor 4 unit, Printer InkJet 20 unit, Printer LaserJet 8 unit, Lap Top (sedang) 5 unit, Lap Top (ringan) 15 unit, PC Komputer (sedang) 5 unit, PC Komputer (ringan) 15 unit</p> <p>Tersedianya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, service, bahan bakar minyak dan gas dan pelumas, ban luar, ban dalam, Accu, perpanjangan STNK dan KIR</p>	<p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Tahun</p>		<p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Tahun</p>	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3,050,000,000</p>					<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>1 Tahun</p>	<p>1,470,000,000</p>		
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<p>Tersedianya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, service, bahan bakar minyak dan gas dan pelumas, ban luar, ban dalam, Accu, perpanjangan STNK</p>				1 Tahun	400,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	440,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, service, bahan bakar minyak dan gas dan pelumas, ban luar, ban dalam, Accu, perpanjangan STNK dan KIR				1 Tahun	300,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	330,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel				1 Tahun	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Tabung Pemadam Kebakaran 10 unit, Refil Toner Printer LaserJet 8 unit, Mesin Absensi 2 unit, Mesin Potong Rumput 2 unit, AC Floor 9 unit, AC Split 34 unit, Lemari Es 8 unit, Pompa Air 2 unit, Sound System 3 unit, Kamera Digital 2 unit, LCD Proyektor 4 unit, Printer InkJet 20 unit, Printer LaserJet 8 unit, Lap Top (sedang) 5 unit, Lap Top (ringan) 15 unit, PC Komputer (sedang) 5 unit, PC Komputer (ringan) 15 unit				1 Tahun	150,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas				1 Tahun	2,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	300,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	General Check Up Kesehatan 45 orang Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Tersedianya Pakaian Dinas PSL 45 Stel, PSR 45 Stel, PSH 45 Stel, PDH 45 Paket dan Pakaian Adat Derah 60 Stel	orang Stel		orang Stel	45 orang 240 Stel	<b>24,438,484,000</b>						45 orang 240 Stel	<b>25,281,750,000</b>	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD				1 Tahun	23,188,280,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	24,000,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas PSL 45 Stel, PSR 45 Stel, PSH 45 Stel, PDH 45 Paket dan Pakaian Adat Derah 60 Stel				1 Tahun	881,750,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	881,750,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up Kesehatan 45 orang Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan				45 Orang	368,454,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	45 Orang	400,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Tersedianya belanja rumah tangga Ketua DPRD dan Jamuan Makanan dan Minuman tamu Ketua DPRD Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Tersedianya Jamuan Prasmanan Rapat Paripurna Hari Jadi Kab. Pekalongan	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	<b>1,650,000,000</b>						12 Bulan 12 Bulan	<b>1,725,000,000</b>	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Jamuan Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Tersedianya Jamuan Prasmanan Rapat Paripurna Hari Jadi Kab. Pekalongan				1 Tahun	900,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	900,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya belanja rumah tangga Ketua DPRD dan Jamuan Makanan dan Minuman tamu Ketua DPRD				1 Tahun	750,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	825,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase ketercapaian program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-		-	100 -	<b>32,544,785,000</b>						100 -	<b>35,587,223,550</b>	
4 02 02 2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Terlaksananya bedah perda dan raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan perundang-undangan 6 (enam) paket	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	<b>1,571,844,000</b>						2 Dokumen 2 Dokumen	<b>1,600,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya bedah perda dan raperda 3 (tiga) paket, tersusunnya kajian peraturan perundang-undangan 6 (enam) paket				2 dokumen	1,371,844,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	2 dokumen	1,400,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 2 (dua) paket				2 dokumen	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	2 dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD				1 dokumen	0	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 dokumen	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Tersedianya buletin DPRD, Pengelolaan Website DPRD, Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Pembuatan Baliho DPRD, Karangan Bunga Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD 6 orang Tersedianya Tenaga Analisis LKPJ Bupati dan DPRD	Paket Paket Paket		Paket Paket Paket	1 Paket 1 Paket 2 Paket	<b>4,848,330,500</b>						1 Paket 1 Paket 2 Paket	<b>5,287,223,550</b>	
4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD				45 orang	0	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	45 orang	0	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Pengiriman Peserta BinteK DPRD 45 orang x 6 kali dan Belanja Perjalanan Dinas Pendamping BinteK				1 Tahun	3,592,930,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	3,952,223,550	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya buletin DPRD, Pengelolaan Website DPRD, Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Pembuatan Baliho DPRD, Karangan Bunga				1 Tahun	650,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	650,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tenaga analisis LKPJ Bupati dan DPRD				2 paket	376,200,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	2 paket	385,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi DPRD 6 orang				1 Tahun	229,200,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 Tahun	300,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Terlaksananya reses DPRD 3 kali x 4 pertemuan Terlaksananya reses DPRD 3 kali x 4 pertemuan	Tahun Kali		Tahun Kali	1 Tahun 3 Kali	<b>2,124,610,500</b>						1 Tahun 3 Kali	<b>2,300,000,000</b>	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses DPRD 3 kali x 4 pertemuan				3 kali	2,124,610,500	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	3 kali	2,300,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	<b>0</b>						1 Dokumen	<b>0</b>	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun				1 dokumen	<b>0</b>	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1 dokumen	<b>0</b>	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan DPRD, AKD dan Pendamping Terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan DPRD dan pendamping (luar pulau 4 kali, luar provinsi 36 kali, dalam provinsi menginap 36 kali, dalam daerah 60 kali, dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (Luar pulau 2 kali, luar provinsi 24 kali, dalam provinsi menginap 24 kali, dalam daerah 60 kali, dalam provinsi tidak menginap 8 kali)	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	<b>24,000,000,000</b>						1 Tahun 1 Tahun	<b>26,400,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya perjalanan dinas Pimpinan DPRD dan pendamping (luar pulau 4 kali, luar provinsi 36 kali, dalam provinsi menginap 36 kali, dalam daerah 60 kali, dalam provinsi tidak menginap 12 kali), AKD dan pendamping (Luar pulau 2 kali, luar provinsi 24 kali, dalam provinsi menginap 24 kali, dalam daerah 60 kali, dalam provinsi tidak menginap 8 kali)				266 kali	24,000,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terselenggara nya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	266 kali	26,400,000,000	Sekretariat DPRD
<b>TOTAL</b>							<b>72,735,546,290</b>							<b>79,613,182,859</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	01						<b>9,959,901,000</b>							<b>10,502,351,100</b>	
5	01	01					<b>6,309,901,000</b>							<b>6,662,351,100</b>	
5	01	01	2.01										4 Dokumen	<b>755,000,000</b>	
5	01	01	2.01	01									2 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.01	06									1 Dokumen	550,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.01	07									1 dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.02										12 Bulan	<b>4,687,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	4,297,400,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN, dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun	4,512,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 Bulan	175,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN, dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/diklat ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	<b>40,000,000</b>						1 Tahun	<b>50,000,000</b>	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan/ diklat ASN				1 Tahun	40,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai dan ASN Bappeda Litbang	1 Tahun	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>504,000,000</b>						12 Bulan	<b>543,000,000</b>	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan komponen instalasi listrik (bulan)				12 Bulan	9,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan administrasi umum Bappeda Litbang	12 Bulan	9,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) (bulan)				12 Bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan administrasi umum Bappeda Litbang	12 Bulan	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 Bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan administrasi umum Bappeda Litbang	12 Bulan	20,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan administrasi umum Bappeda Litbang	12 Bulan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai (rapat, minum harian) (bulan)				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan administrasi umum Bappeda Litbang	12 Bulan	43,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah bagi ASN Bappeda Litbang (bulan)				12 Bulan	325,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan administrasi umum Bappeda Litbang	12 Bulan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, SDA, listrik, dan pelayanan umum kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>400,000,000</b>						12 Bulan	<b>415,000,000</b>	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	130,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik, dan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kontrak)				11 Orang	270,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik, dan jasa pelayanan umum kantor	11 Orang	280,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, peralatan, mesin, dan gedung kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>193,501,000</b>						12 Bulan	<b>212,351,100</b>	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, peralatan, mesin, dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, peralatan, mesin, dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	38,501,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, peralatan, mesin, dan pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	42,351,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				1 Unit	55,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, peralatan, mesin, dan pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase pencapaian indikator pembangunan daerah	%		%	100 %	<b>1,875,000,000</b>						100 %	<b>1,940,000,000</b>	
5	01	02	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase tersusunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	%		%	100 %	<b>1,300,000,000</b>						100 %	<b>1,300,000,000</b>	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Dokumen	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan				2 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase sub kegiatan yang tercapai	%		%	100 %	<b>255,000,000</b>						100 %	<b>300,000,000</b>	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1 dokumen	125,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan Peta Tematik Kabupaten Pekalongan dan buku indikator makro	1 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun				2 dokumen	130,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan Peta Tematik Kabupaten Pekalongan dan buku indikator makro	2 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Indikator Kinerja Program dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%) Persentase Indikator Kinerja sasaran dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%) Persentase Indikator Kinerja tujuan dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%)	% % %		% % %	75 % 75 % 75 %	<b>320,000,000</b>						75 % 75 % 75 %	<b>340,000,000</b>	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah jenis penyusunan dokumen evaluasi capaian pembangunan daerah yang disusun secara tepat waktu Pemeliharaan dan update aplikasi Sim dalev				4 jenis 1 aplikasi	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Monev Pembangunan Daerah	4 jenis 1 aplikasi	260,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun berjalan jumlah penyusunan dokumen laporan DAK, TP, Dekon, Urusan Bersama yang disusun tepat waktu				12 bulan 2 jenis	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pelaksanaan Monev Pembangunan Daerah	12 bulan 2 jenis	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	-	85 -	<b>1,775,000,000</b>						85 -	<b>1,900,000,000</b>	
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Sesuai peraturan berlaku	%		%	6 %	<b>695,000,000</b>						6 %	<b>800,000,000</b>	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang disusun tepat waktu				3 dokumen	220,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen perencanaan bidang pemerintahan, bidang sosial, dan bidang pembangunan manusia	3 dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah jenis dokumen perencanaan bidang sosial yang disusun tepat waktu				4 dokumen	250,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen perencanaan bidang pemerintahan, bidang sosial, dan bidang pembangunan manusia	4 dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu				3 dokumen	225,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen perencanaan bidang pemerintahan, bidang sosial, dan bidang pembangunan manusia	3 dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase kegiatan bidang ekonomi dan sumberdaya alam yang tercapai	%		%	100 %	<b>180,000,000</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang disusun				8 kegiatan	80,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	8 kegiatan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) yang dilaksanakan				1 dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 03 2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai	%		%	100 %	<b>900,000,000</b>						100 %	<b>900,000,000</b>		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu				3 dokumen	500,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	3 dokumen	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) yang dilaksanakan				3 dokumen	400,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	3 dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan	
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>750,000,000</b>							<b>800,000,000</b>		
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-		-	30 -	<b>750,000,000</b>							30 -	<b>800,000,000</b>	
5 05 02 2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase implementasi rencana kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%		%	100 %	<b>150,000,000</b>							100 %	<b>150,000,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan Umum yang disusun				1 dokumen	150,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan dokumen kajian penelitian dan pengembangan sesuai perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	1 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Persentase implementasi rencana kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%		%	100 %	<b>100,000,000</b>						100 %	<b>100,000,000</b>	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Aspek-Aspek Sosial yang disusun				1 dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bidang aspek sosial	1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Persentase implementasi rencana kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		%	100 %	<b>200,000,000</b>						100 %	<b>200,000,000</b>	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun				1 dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, UMKM, dan bidang komunikasi informatika	1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika yang disusun				1 dokumen	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, UMKM, dan bidang komunikasi informatika	1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%		%	100 %	<b>300,000,000</b>						100 %	<b>350,000,000</b>	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan kelitbangan bidang teknologi dan inovasi yang difasilitasi				1 dokumen	200,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Inovasi Daerah yang dipublikasikan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan	1 dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang didiseminasikan (dipublikasikan, dilaksanakan dan dimanfaatkan)				5 inovasi	100,000,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Inovasi Daerah yang dipublikasikan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan	5 inovasi	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
<b>TOTAL</b>							<b>10,709,901,000</b>							<b>11,302,351,100</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Jasa Admistrasi Keuangan				12 bln	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12 bln	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Prosentase Dokumen perencanaan yang Tersusun	%		%	100 %	<b>95,000,000</b>						100 %	<b>105,000,000</b>	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu				1 dok	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	1 dok	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal				5 orgng	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	5 orgng	70,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase admistrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>735,000,000</b>						100 %	<b>860,000,000</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor				12 bln	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bln	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 bln	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor				12 bln	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	125,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum harian Pegawai, Peserta Rapat, dan tamu				12 bln	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi antar instansi				12 bln	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis				12 bln	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya admistrasi Umum Perangkat Daerah	12 bln	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>5 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Prosentase Barang Milik Daerah Yang tersedia	%		%	100 %	<b>610,000,000</b>						100 %	<b>620,000,000</b>	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas Operasiona				2 unit	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah Yang tersedia	2 unit	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair Kantor				3 jenis	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah Yang tersedia	3 jenis	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor				2 jenis	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah Yang tersedia	2 jenis	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 0	0	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah Yang tersedia	0 0	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 0	0	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah Yang tersedia	0 0	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>5 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tang terpenuhi	%		%	100 %	<b>24,310,000,000</b>						100 %	<b>25,310,000,000</b>	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				12 bln	24,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12 bln	25,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Admistrasi Perkantoran dan Tenaga Outsorsing				10 org	310,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	10 org	310,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>5 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Basrang Milik Daerah Yang terpelihara	%		%	100 %	<b>1,325,000,000</b>						100 %	<b>1,475,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang memadai				12 bln	275,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12 bln	305,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan				12 bln	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12 bln	320,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				5 unit	750,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Dukungan Suberdaya Manusia dan Sarana Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	5 unit	850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Rencana Anggaran yang disusun tepat waktu	%		%	100 %	<b>405,613,684,503</b>						100 %	<b>444,614,528,753</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase Rencana Anggaran yang disusun tepat waktu	%		%	100 %	<b>2,650,000,000</b>						100 %	<b>3,000,000,000</b>	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS				2 Dok	300,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2 Dok	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA-PPAS Perubahan yang disusun				2 dok	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2 dok	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Dokumen Perda dan Perbub				2 dok	825,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2 dok	900,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Perda dan Perbub Perubahan anggaran				2 dok	825,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2 dok	900,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan APBD Tahun 2022				6 dok	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	6 dok	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>5 02 02 2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	%		%	100 %	<b>970,000,000</b>						100 %	<b>1,085,000,000</b>	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan.				2 dok	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	2 dok	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					2 dok	160,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	2 dok	180,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	tersusunnya daftar gaji ASN dan terlaksananya rekonsiliasi PFK				2 dok	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	2 dok	260,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Kasus TP-TGR yang Tertangani				2 kasus	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	2 kasus	70,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	terbayarnya belanja APBD Kab Pekalongan				2000 Blongko	350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana	2000 Blongko	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Mengikatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	<b>1,915,000,000</b>						100 %	<b>2,155,000,000</b>	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban APBD dalam 1 Tahun Anggaran dan jumlah Laporan prognos enam bulan berikutnya				4 dok	270,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat waktu dan Akuntabel	4 dok	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 dok	525,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat waktu dan Akuntabel	1 dok	625,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan				1 dok	750,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat waktu dan Akuntabel	1 dok	800,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis pertanggungjawaban APBD dalam 1 tahun anggaran				4 dok	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat waktu dan Akuntabel	4 dok	130,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Keuangan OPD dan jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Daerah				45 opd	270,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat waktu dan Akuntabel	45 opd	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Prosentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	<b>399,728,684,503</b>						100 %	<b>437,974,528,753</b>	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa				272 desa	382,458,442,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	272 desa	420,704,286,750	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk keperluan mendesak dan tidak bisa di prediksi				1 Tahun	5,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	5,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terbayarkannya Badi Hasil Pajak dan Restribusi kepada Desa				272 desa	12,270,242,003	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	272 desa	12,270,242,003	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan Keuangan	%		%	100 %	350,000,000						100 %	400,000,000	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah				12 bln	350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Penetapan dan Perubahan APBD tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	12 bln	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	0 - 0 -		0 - 0 -	-- --	6,250,000,000						-- --	6,820,000,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengikatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	6,250,000,000						100 %	6,820,000,000	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab. Pekalongan				1 dok	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 dok	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 dok	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 dok	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 dok	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	2 dok	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah				2 dok	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	2 dok	270,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya laporan keberadaan barang milik daerah				5 dok	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	5 dok	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pensertifikatan tanah dan pemasangan papan nama identitas kepemilikannya, penjualan barang milik daerah dan Asuransi Barang Milik Daerah				4 paket	2,600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	4 paket	2,700,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah guna Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah				3 dok	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	3 dok	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah				1 dok	450,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 dok	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi Penggunaan, pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, penjualan, hibah, pemusnahan dan penghapusan				7 dok	750,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	7 dok	800,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kesesuaian data barang milik daerah yang dicatat OPD dan yang dicatat bidang Aset				45 opd	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	45 opd	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah Kab. Pekalongan				1 dok	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 dok	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan tentang pengelolaan barang milik daerah				47 opd	600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	47 opd	650,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Pertumbuhan PAD	0 -		0 -	--	<b>4,222,301,100</b>						--	<b>3,709,132,700</b>	
5 02 04 2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	Pertumbuhan PAD	%		%	100 %	<b>4,222,301,100</b>						100 %	<b>3,709,132,700</b>	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB dan Peningkatan Pengetahuan Petugas Pemungut				285 desa/Kel	409,990,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	285 desa/kel	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sistem aplikasi SMS Gateway dan Aplikasi Web Service yang tersedia.				12 bulan	509,132,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	12 bulan	509,132,700	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah				12 bln	890,858,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	12 bln	900,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya Basis data pajak daerah, terpeliharanya sistem aplikasi pelayanan PBB dan BPHTB online dan Pengadaan Sistem Peta PBB berbasis WEB				3 aplikasi	412,319,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	3 aplikasi	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)				12 bln	950,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	12 bln	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah				12 bln	1,050,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	12 bln	1,200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>TOTAL</b>							<b>457,650,985,603</b>							<b>499,063,661,453</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5	03	<b>KEPEGAWAIAN</b>												10,745,000,000	10,795,000,000			
5	03	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												-	5,550,000,000		
5	03	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	dokumen		dokumen	10 dokumen	20,000,000					10 dokumen	20,000,000		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			10 dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	10 dokumen	20,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			4 dokumen	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	4 dokumen	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan gaji, tambahan penghasilan serta penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan		bulan	12 bulan	4,070,000,000					12 bulan	4,070,000,000		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			12 bulan	3,870,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	3,870,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	200,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		Orang	15 Orang	75,000,000					15 Orang	75,000,000		
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu			1 dokumen	0	Kab. Pekalongan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	1 dokumen	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15 pegawai	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	15 pegawai	75,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan dalam eang tercapainya administrasi umum Perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>240,000,000</b>						12 bulan	<b>240,000,000</b>	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor				50 unit	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	50 unit	10,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	60,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	15,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	30,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu				12 bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	25,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 kali	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	50 kali	100,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinami Pada OPD				12 bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah	unit		unit	50 unit	<b>450,000,000</b>						50 unit	<b>500,000,000</b>	
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	4 unit	200,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				35 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	35 unit	100,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi				20 unit	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	20 unit	200,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	0 unit	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	0 unit	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan dalam rangka Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>240,000,000</b>						12 bulan	<b>240,000,000</b>	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	12 bulan	150,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				3 orang	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN BKPSDM	3 orang	90,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan dalam rangka Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>405,000,000</b>						12 bulan	<b>405,000,000</b>	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	12 bulan	50,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	12 bulan	55,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler				12 bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	12 bulan	20,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	12 bulan	30,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarpras pada BKPSDM	1 unit	250,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase ASN yang memperoleh Layanan Kepegawaian dengan Baik	-		-	--	<b>5,245,000,000</b>						--	<b>5,245,000,000</b>	
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Jumlah tercapainya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Orang		Orang	1850 Orang	<b>2,300,000,000</b>						1850 Orang	<b>2,300,000,000</b>	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Usulan Formasi PPPK dan CPNS 2022				2 dokumen 450 orang	2,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab Pekalongan	2 dokumen 450 orang	2,000,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah SK Pemberhentian ASN				400 SK	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab Pekalongan	400 SK	50,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah PNS yang diterbitkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, SK Penetapan Tewas serta Jumlah PNS yang difasilitasi terkait Taspen, Tapera, BPJS, Bank Jateng, Korps ASN, BKD On Mobile dan Perlindungan Bantuan Hukum bagi ASN				1100 orang	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab Pekalongan	1100 orang	50,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah updating aplikasi dalam rangka pengembangan Sistem Informasi data kepegawaian				4 aplikasi	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab Pekalongan	4 aplikasi	150,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Kepegawaian per tahun				4 laporan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab Pekalongan	4 laporan	50,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Jumlah Dokumen mutasi aparatur yang terbit	SK		SK	5326 SK	<b>610,000,000</b>						5326 SK	<b>610,000,000</b>	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi ASN Pelaksana Yang ditetapkan pada tahun tersebut Jumlah SK PPPK Guru, CPNS serta PPPK Non Guru				3000 SK 1726 SK	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kabupaten Pekalongan	3000 SK 1726 SK	250,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN Yang ditetapkan pada tahun tersebut				1600 SK	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kabupaten Pekalongan	1600 SK	80,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah SK Pengangkatan ASN JPT, Pejabat Administrasi dan Fungsional tertentu yang diterbitkan pada tahun tersebut				1000 SK	280,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kabupaten Pekalongan	1000 SK	280,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Jumlah ASN yang terpetakan profile kompetensi	orang		orang	560 orang	<b>2,060,000,000</b>						560 orang	<b>2,060,000,000</b>	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti ujian dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah				250 orang	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab.Pekalongan	250 orang	60,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang telah dinilai potensi dan kompetensinya pada tahun tersebut				310 orang	2,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab.Pekalongan	310 orang	2,000,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Jumlah ASN yang terekam dalam data base kinerja	orang		orang	8000 orang	<b>275,000,000</b>						8000 orang	<b>275,000,000</b>	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang telah ternilai, terevaluasi dan terdata dalam database kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan				8000 orang	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab.Pekalongan	8000 orang	200,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang telah mendapatkan penghargaan pada tahun tersebut				150 orang	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab.Pekalongan	150 orang	20,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus PNS yang telah ditangani pada tahun tersebut				10 kasus	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab.Pekalongan	10 kasus	55,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>7,550,000,000</b>							<b>8,000,000,000</b>	
<b>5 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	-	-	-	--	<b>7,550,000,000</b>						--	<b>8,000,000,000</b>	
5 04 02 2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Jumlah ASN yang mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional	orang		orang	451 orang	<b>7,550,000,000</b>						451 orang	<b>8,000,000,000</b>	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional				451 orang	7,550,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kab Pekalongan	451 orang	8,000,000,000	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>TOTAL</b>							<b>18,295,000,000</b>							<b>18,795,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>6 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>												<b>10,369,084,362</b>		
<b>6 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase yang terpenuhi dalam rangka perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	bulan		bulan	12 bulan	<b>7,536,871,329</b>						12 bulan	<b>8,290,943,462</b>	
<b>6 01 01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase yang terpenuhi dalam rangka perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	bulan	bulan	12 bulan	<b>24,778,071</b>						12 bulan	<b>27,255,878</b>	
6 01 01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Dok Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dok	17,400,011	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	15 Dok	19,140,012	Inspektorat
6 01 01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Dok Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev, LKjIP, LKPD, LPPD) yang disusun tepat waktu		63 Dok	7,378,060	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	63 Dok	8,115,866	Inspektorat
<b>6 01 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentasi penyediaan administrasi	%	%	100 %	<b>6,522,532,000</b>						100 %	<b>7,174,785,200</b>	
6 01 01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)		12 Bulan	6,435,554,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	7,079,109,400	Inspektorat
6 01 01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)		12 Bulan	86,978,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentase yang terpenuhi dalam rangka penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	95,675,800	Inspektorat
<b>6 01 01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	prosentase kompetensi SDM yang unggul	%	%	100 %	<b>126,224,650</b>						100 %	<b>139,232,115</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				12 dok	28,574,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentasi bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bimtek, koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja	12 dok	31,432,060	Inspektorat
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				73 Pegawai	97,650,050	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Persentasi bulan yang terpenuhi dalam rangka pengiriman ASN untuk Diklat, Bimtek, koordinasi dan konsultasi untuk mendukung capaian kinerja	73 Pegawai	107,800,055	Inspektorat
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentasi penyediaan administrasi	%		%	100 %	<b>229,122,600</b>						100 %	<b>252,034,860</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor				12 Bulan	15,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	17,050,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	18,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	19,800,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 Bulan	49,539,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	54,493,560	Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor				12 Bulan	30,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	33,220,000	Inspektorat
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu				12 Bulan	18,539,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	20,392,900	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				12 Bulan	84,664,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	93,130,400	Inspektorat
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tercapainya Penataan Arsip Dinamis Pada OPD				12 Bulan	12,680,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Prosentasi penyediaan administrasi umum	12 Bulan	13,948,000	Inspektorat
6 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarpras pendukung	%		%	100 %	<b>45,000,000</b>						100 %	<b>49,500,000</b>	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tercapainya Pengadaan Mebel (Unit)				3 Unit	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan penyediaan sarpras	3 Unit	16,500,000	Inspektorat
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				6 Unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan penyediaan sarpras	6 Unit	33,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Gedung	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan penyediaan sarpras	1 Gedung	0	Inspektorat
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan penyediaan sarpras	0 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa penunjang	%		%	100 %	<b>237,000,000</b>						100 %	<b>260,700,000</b>	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	78,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	86,460,000	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				6 Orang	158,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya pelayanan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6 Orang	174,240,000	Inspektorat
<b>6 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan terpeliharanya barang milik daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>352,214,008</b>						12 bulan	<b>387,435,409</b>	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan				12 Bulan	22,424,988	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kinerja aparatur	12 Bulan	24,667,487	Inspektorat
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 Bulan	33,889,020	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kinerja aparatur	12 Bulan	37,277,922	Inspektorat
6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler				5 Unit	18,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kinerja aparatur	5 Unit	20,350,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	77,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kinerja aparatur	12 Bulan	85,140,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatkan kinerja aparatur	1 Unit	220,000,000	Inspektorat
<b>6 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase meningkatnya kualitas manajemen pemeriksaan	%		%	100 %	<b>1,410,930,800</b>						100 %	<b>1,552,023,880</b>	
<b>6 01 02 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase meningkatnya kualitas manajemen pemeriksaan	%		%	100 %	<b>1,214,515,800</b>						100 %	<b>1,335,967,380</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Dokumen Laporan Pengawasan Kinerja Pemda				92 Dok	227,895,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	92 Dok	250,684,500	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Dokumen Laporan Pengawasan Keuangan Pemda				16 Dok	39,635,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	16 Dok	43,598,500	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Terpenuhinya Dokumen Laporan Reviu Kinerja				98 Dok	129,910,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	98 Dok	142,901,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Tercapainya Dokumen Laporan Reviu Keuangan				55 Dok	149,650,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	55 Dok	164,615,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Terpenuhinya Dokumen laporan pengawasan desa				24 Dok	128,828,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	24 Dok	141,710,800	Inspektorat
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terpenuhinya dokumen laporan kerjasama pengawasan internal				14 Dok	336,965,100	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	14 Dok	370,661,610	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terpenuhinya dokumen laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut				17 Dok	201,632,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	17 Dok	221,795,970	Inspektorat
<b>6 01 02 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase meningkatnya kualitas manajemen pemeriksaan	%		%	100 %	<b>196,415,000</b>						100 %	<b>216,056,500</b>	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terpenuhinya laporan dokumen TGR				15 Dok	15,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	15 Dok	16,830,000	Inspektorat
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terpenuhinya Dokumen laporan PDTT				37 Dok	181,115,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya fungsi manajemen pemeriksaan	37 Dok	199,226,500	Inspektorat
<b>6 01 03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase jumlah perbup di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan	%		%	100 %	<b>478,288,200</b>						100 %	<b>526,117,020</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah perbup di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan	%		%	100 %	38,795,500						100 %	42,675,050	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan pengawasan				1 Dok	16,868,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pengawasan	1 Dok	18,554,800	Inspektorat
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tercapainya perbup bidang pengawasan yang tersusun				2 Dok	21,927,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pengawasan	2 Dok	24,120,250	Inspektorat
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah laporan kegiatan	%		%	100 %	439,492,700						100 %	483,441,970	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya laporan dokumen pendampingan dan asistensi urusan pemda				3 Dok	54,827,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan APIP	3 Dok	60,310,360	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tercapainya laporan dokumen pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi				5 Dok	27,808,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan APIP	5 Dok	30,588,800	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tercapainya Prosentase Nilai MCP KPK				75 %	259,928,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan APIP	75 %	285,921,570	Inspektorat
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terpenuhinya laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas				3 Dok	96,928,400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan APIP	3 Dok	106,621,240	Inspektorat
<b>TOTAL</b>								<b>9,426,090,329</b>						<b>10,369,084,362</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01					<b>KECAMATAN</b>															
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	--	<b>11,761,681,700</b>							--	<b>4,095,349,870</b>		
7	01	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	%	%	100 %	<b>20,000,000</b>							100 %	<b>22,000,000</b>		
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			1 Dokumen	10,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen Perencanaan Kecamatan Kajen	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Kajen	
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)			1 Dokumen	10,000,000		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen Perencanaan Kecamatan Kajen	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Kajen	
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN  rsentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Bulan %	Bulan %	12 Bulan 100 %	<b>2,976,300,000</b>							12 Bulan 100 %	<b>3,273,930,000</b>		
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	2,900,000,000		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN di Kecamatan Kajen	12 Bulan	3,190,000,000	Kecamatan Kajen	
7	01	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Bulan	76,300,000		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN di Kecamatan Kajen	12 Bulan	83,930,000	Kecamatan Kajen	
7	01	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>0</b>								<b>0</b>		
7	01	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Disusun Tepat Waktu			0 Dokumen	0		Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	Kecamatan Kajen	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0 Pegawai	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Pegawai	0	Kecamatan Kajen
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	%		%	100 %	<b>128,764,200</b>						100 %	<b>141,640,620</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor				0 Unit/Buah	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	0 Unit/Buah	0	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	27,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	12 Bulan	30,250,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	11,475,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	12 Bulan	12,622,720	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor				12 Bulan	12,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	12 Bulan	14,080,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu				12 Bulan	49,489,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	12 Bulan	54,437,900	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Kali	27,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	50 Kali	30,250,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD				12 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	12 Bulan	0	Kecamatan Kajen
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>212,700,000</b>						100 %	<b>207,470,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah di Kecamatan Kajen	2 Unit	77,000,000	Kecamatan Kajen

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				30 Unit	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah di Kecamatan Kajen	30 Unit	23,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				15 Unit	97,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah di Kecamatan Kajen	15 Unit	107,470,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah di Kecamatan Kajen	0 Unit	0	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah di Kecamatan Kajen	0 Unit	0	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	100 %	<b>161,397,500</b>						100 %	<b>177,537,250</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	51,100,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	12 Bulan	56,210,550	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				4 Orang	110,297,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Kajen	4 Orang	121,326,700	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	100 %	<b>8,262,520,000</b>						100 %	<b>272,772,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	37,970,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah yang ada di Kecamatan Kajen	12 bulan	41,767,000	Kecamatan Kajen

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	1,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah yang ada di Kecamatan Kajen	12 Bulan	1,320,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah yang ada di Kecamatan Kajen	12 Bulan	15,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 Bulan	13,350,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah yang ada di Kecamatan Kajen	12 Bulan	14,685,000	Kecamatan Kajen
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				12 Bulan	8,200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah yang ada di Kecamatan Kajen	12 Bulan	200,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>577,200,000</b>							<b>414,920,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>0</b>							<b>0</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Kegiatan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Kegiatan	0	Kecamatan Kajen
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>200,000,000</b>						100 %	<b>0</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				0 Kegiatan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kajen	0 Kegiatan	0	Kecamatan Kajen

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	<b>377,200,000</b>						100 %	<b>414,920,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat				12 Bulan	17,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kajen	12 Bulan	18,920,000	Kecamatan Kajen
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba antar desa, grebek syawalan, ferial durian lolong dan kudu sekolah)				6 Kegiatan	360,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kajen	6 Kegiatan	396,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>120,500,000</b>						--	<b>64,735,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 100 %	<b>120,500,000</b>						100 100 %	<b>64,735,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan				26 Kali	45,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kajen	26 Kali	50,050,000	Kecamatan Kajen
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran Jumlah TP PKK Desa/kecamatan yang dibina				1 Kelurahan 24 Desa 26 TP PKK	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kajen	1 Kelurahan 24 Desa 26 TP PKK	14,685,000	Kecamatan Kajen
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						<b>0</b>							<b>0</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak dsb) yang dibina				0 Lembaga	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lembaga	0	Kecamatan Kajen

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-		-	--	<b>30,000,000</b>					--	<b>33,000,000</b>		
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Linmas yang dibina	%		%	100 %	<b>30,000,000</b>					100 %	<b>33,000,000</b>		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah linmas yang dibina Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				0 Orang 12 Kali	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Linmas di Wilayah Kecamatan Kajen	0 Orang 12 Kali	33,000,000	Kecamatan Kajen
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	<b>100,000,000</b>					--	<b>110,000,000</b>		
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>100,000,000</b>					100 %	<b>110,000,000</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengirimkan Ormas dan Organisasi kepemudaan dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Kelurahan 24 Desa	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kajen	1 Kelurahan 24 Desa	110,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	- -		- -	-- --	<b>211,700,000</b>						-- --	<b>224,670,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang tertib administrasi Persentase desa yang tertib administrasi	Desa %		Desa %	24 Desa 100 %	<b>211,700,000</b>						24 Desa 100 %	<b>224,670,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				1 Desa	11,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kajen	1 Desa	11,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				24 Desa	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kajen	24 Desa	40,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				1 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kajen	1 Desa	15,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				80 Orang	8,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kajen	80 Orang	8,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan				1 Rekomendasi	8,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kajen	1 Rekomendasi	8,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan pendampingan Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan pendampingan				1 Kelurahan 24 Desa	129,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kajen	1 Kelurahan 24 Desa	142,670,000	Kecamatan Kajen
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,850,000,000</b>							<b>2,035,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>1,850,000,000</b>						--	<b>2,035,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase bulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	<b>1,850,000,000</b>						100 %	<b>2,035,000,000</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan (belanja rutin dan modal kelurahan)				12 bulan	1,250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Kajen	12 bulan	1,375,000,000	Kecamatan Kajen
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Ketua RT/ RW, LPMK, PMK, dll yang memperoleh insentif				12 bulan	600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Kajen	12 bulan	660,000,000	Kecamatan Kajen

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
<b>TOTAL</b>							<b>14,651,081,700</b>						<b>6,977,674,870</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 orang	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	2 orang	7,000,000	Kecamatan Sragi
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	bulan		bulan	12 bulan	<b>137,000,000</b>						12 bulan	<b>152,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhiya Komponen Listerik/Kantor				3 unit	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	3 unit	8,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	22,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	24,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	22,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	24,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhiya Cetak Penggandaan kantor				12 bulan	4,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	5,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhiya Kunjungan Tamu				11 bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	11 bulan	38,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	45,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinami Pada OPD				1 bulan	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	1 bulan	8,000,000	Kecamatan Sragi
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	18 unit	<b>1,391,000,000</b>						18 unit	<b>1,520,000,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	1 unit	40,000,000	Kecamatan Sragi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				4 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	4 unit	120,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi				10 unit	56,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	10 unit	60,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 paket	1,200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	0	3 paket	1,300,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	bulan		bulan	12 bulan	<b>174,000,000</b>						12 bulan	<b>220,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	24,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	30,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	190,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	unit bulan		unit bulan	18 unit 12 bulan	<b>57,000,000</b>						18 unit 12 bulan	<b>68,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	45,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler				12 bulan	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	7,000,000	Kecamatan Sragi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor				12 bulan	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	7,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	0	1 unit	9,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-		-	--	<b>171,510,000</b>						--	<b>135,000,000</b>	
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	<b>171,510,000</b>						12 bulan	<b>135,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah bulan Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan PATEN				12 bulan	41,510,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	12 bulan	45,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan				6 kegiatan	130,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	6 kegiatan	90,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>1,892,030,000</b>						--	<b>2,168,343,280</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>112,584,800</b>						12 bulan	<b>123,343,280</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan				3 kegiatan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Sragi	3 kegiatan	27,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran, TP PKK Desa/ Kelurahan/ kecamatan yang dibina, kelompok bank sampah yang dibina, UMKM yang dibina				4 kegiatan	87,584,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Kecamatan Sragi	4 kegiatan	96,343,280	Kecamatan Sragi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
7	01	03	2.02			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Presentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,710,000,000</b>					12 bulan	<b>2,000,000,000</b>		
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan, belanja rutin dan modal kelurahan				12 bulan	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan Sragi	12 bulan	1,200,000,000	Kecamatan Sragi
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan Ketua RT/ RW, LPMK, PMK, dll yang memperoleh insentif dan KK yang menerima bansos				12 bulan	710,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Masyarakat Kelurahan Sragi	12 bulan	800,000,000	Kecamatan Sragi
7	01	03	2.03			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	bulan bulan	bulan bulan	12 bulan 12 bulan	<b>69,445,200</b>						12 bulan 12 bulan	<b>45,000,000</b>		
7	01	03	2.03	02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak, KUDU sekolah dsb) yang dibina				4 kegiatan	69,445,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	0	4 kegiatan	45,000,000	Kecamatan Sragi
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-	-	--		<b>68,500,000</b>						--	<b>71,000,000</b>	
7	01	04	2.01			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tahun		tahun	1 tahun	<b>68,500,000</b>						1 tahun	<b>71,000,000</b>	
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, aduan masyarakat, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan dan pembinaan linmas				5 kegiatan	68,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Sragi	5 kegiatan	71,000,000	Kecamatan Sragi



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-	-	-	--	62,000,000					--	68,000,000		
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan		bulan	12 bulan	62,000,000					12 bulan	68,000,000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Lahir Pancasila)				4 kegiatan	62,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	4 kegiatan	68,000,000	Kecamatan Sragi	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	- -	- -	- -	-- --	74,114,000					-- --	83,000,000		
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	bulan		bulan	12 bulan	74,114,000					12 bulan	83,000,000		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				16 desa	19,357,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	16 desa	22,000,000	Kecamatan Sragi	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				16 desa	19,357,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	16 desa	22,000,000	Kecamatan Sragi	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				3 desa	13,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	3 desa	15,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa anggota BPD yang terbina				16 desa	10,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	16 desa	12,000,000	Kecamatan Sragi
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa lainnya				7 desa	10,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	0	7 desa	12,000,000	Kecamatan Sragi
<b>TOTAL</b>							<b>7,162,396,620</b>							<b>7,951,710,162</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
7	01						<b>7,560,500,000</b>						<b>8,366,050,000</b>		
7	01	01					<b>6,753,000,000</b>						100 %	<b>7,648,300,000</b>	
7	01	01	2.01										8 dokumen	<b>38,500,000</b>	
7	01	01	2.01	01									7 Dokumen	27,500,000	Kecamatan Wiradesa
7	01	01	2.01	07									4 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Wiradesa
7	01	01	2.02										12 bulan	<b>6,666,000,000</b>	
7	01	01	2.02	01									12 bulan	6,600,000,000	Kecamatan Wiradesa
7	01	01	2.02	04									12 bulan	66,000,000	Kecamatan Wiradesa
7	01	01	2.05										8 ASN	<b>26,500,000</b>	
7	01	01	2.05	05									4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Wiradesa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				6 Orang	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan Wiradesa	6 Orang	16,500,000	Kecamatan Wiradesa
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>132,500,000</b>						12 bulan	<b>155,750,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor (unit/buah)				15 Unit	2,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	15 Unit	2,750,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	38,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	33,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				200 kali	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	200 kali	38,500,000	Kecamatan Wiradesa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD (Bulan)				12 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	10,000,000	Kecamatan Wiradesa
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit		unit	8 unit	<b>135,000,000</b>						8 unit	<b>348,500,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				1 Unit	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	1 Unit	38,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				5 Unit	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	5 Unit	22,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				6 Unit	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	6 Unit	82,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	0 Unit	200,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 Unit	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	1 Unit	5,500,000	Kecamatan Wiradesa
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>130,500,000</b>						12 bulan	<b>143,550,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	33,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	36,300,000	Kecamatan Wiradesa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				4 Orang	97,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	4 Orang	107,250,000	Kecamatan Wiradesa
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	bulan		bulan	12 bulan	<b>245,000,000</b>						12 bulan	<b>269,500,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BMD Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	33,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				0 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BMD Kecamatan Wiradesa	0 Bulan	0	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				0 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BMD Kecamatan Wiradesa	0 Bulan	0	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BMD Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (bulan)				12 Bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	BMD Kecamatan Wiradesa	12 Bulan	220,000,000	Kecamatan Wiradesa
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%		%	100 %	<b>357,500,000</b>						100 %	<b>222,750,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	kali		kali	2 kali	<b>10,000,000</b>						2 kali	<b>11,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 kali	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	2 kali	11,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	bulan		bulan	12 bulan	<b>215,000,000</b>						12 bulan	<b>66,000,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rapat koordinasi Standar Pelayanan Minimal wilayah kecamatan				4 kali	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	4 kali	11,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				5 Kegiatan	205,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	5 Kegiatan	55,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	<b>132,500,000</b>						12 bulan	<b>145,750,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan Pelayanan paten				2 Kegiatan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	2 Kegiatan	44,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, grebek syawalan, festival durian lolong, Gema Setia dsb)				5 Kegiatan	92,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	5 Kegiatan	101,750,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	JPersentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	<b>175,000,000</b>						100 %	<b>192,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menghasilkan rekomendasi	desa/Kel/Kec		desa/Kel/Kec	17 desa/Kel/Kec	110,000,000						17 desa/Kel/Kec	121,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan				17 Kegiatan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamatan Wiradesa	17 Kegiatan	27,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran, Jumlah TP PKK Desa/ Kel/ Kec yang dibina dan Jumlah Fasilitasi Pembinaan UMKM yang dilaksanakan				3 Kegiatan	85,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat Kecamatan Wiradesa	3 Kegiatan	93,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak ) yang dibina	keg		keg	4 keg	65,000,000						4 keg	71,500,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak ) yang dibina				4 lembaga	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wiradesa	4 lembaga	71,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif Persentase LINMAS (Kecamatan dan Desa/ Kelurahan) Aktif	- %		- %	-- 100 %	70,000,000						-- 100 %	77,000,000	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah LINMAS (Kecamatan dan Desa/ Kelurahan) Aktif	%		%	100 %	70,000,000						100 %	77,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Forkompimcam dalam rangka penanganan Bencana ,hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan, Patroli Kemanan Wilayah dan aduan yang terselesaikan				4 Kegiatan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat kecamatan Wiradesa	4 Kegiatan	77,000,000	Kecamatan Wiradesa



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>90,000,000</b>						100 %	<b>99,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Desa/ke		Desa/ke	16 Desa/ke	<b>90,000,000</b>						16 Desa/ke	<b>99,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Kesaktian Pancasila)				4 Kegiatan	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	4 Kegiatan	99,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	Desa/ke		Desa/ke	16 Desa/ke	<b>115,000,000</b>						16 Desa/ke	<b>126,500,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa/ Kelurahan yang tertib administrasi	Desa/ke		Desa/ke	16 Desa/ke	<b>115,000,000</b>						16 Desa/ke	<b>126,500,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				11 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	11 Desa	16,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Desa dan Desa yang melaksanakan Lomba Desa				11 Desa	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	11 Desa	33,000,000	Kecamatan Wiradesa

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				11 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	11 Desa	16,500,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah fasilitasi anggota BPD yang Dilaksanakan				11 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	11 Desa	22,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan pendampingan desa dan Evaluasi APDes yang dilaksanakan				15 Kegiatan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wiradesa	15 Kegiatan	38,500,000	Kecamatan Wiradesa
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>1,200,000,000</b>						100 %	<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi lembaga di Kelurahan dan jumlah terbangunnya paket pekerjaan di kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,200,000,000</b>						12 bulan	<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Kelurahan Kepatihan				5 Paket	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Kepatihan	5 Paket	880,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepatihan				7 Lembaga	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Kepatihan	7 Lembaga	440,000,000	Kecamatan Wiradesa
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>1,200,000,000</b>						100 %	<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi lembaga di Kelurahan dan jumlah terbangunnya paket pekerjaan di kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,200,000,000</b>						12 bulan	<b>1,320,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan Mayangan				5 Paket	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Mayangan	5 Paket	880,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Mayangan				7 Lembaga	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Mayangan	7 Lembaga	440,000,000	Kecamatan Wiradesa
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga Masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>1,200,000,000</b>						100 %	<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi lembaga di Kelurahan dan jumlah terbangunnya paket pekerjaan di kelurahan  Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam kondisi baik	bulan %		bulan %	12 bulan 100 %	<b>1,200,000,000</b>						12 bulan 100 %	<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Kelurahan Bener				5 Paket	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Bener	5 Paket	880,000,000	Kecamatan Wiradesa
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener				7 Lembaga	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Bener	7 Lembaga	440,000,000	Kecamatan Wiradesa
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga Masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>1,200,000,000</b>						100 %	<b>1,320,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi lembaga di Kelurahan dan jumlah terbangunnya paket pekerjaan di kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,200,000,000</b>						12 bulan	<b>1,320,000,000</b>		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan Gumawang				5 Paket	800,000,000	Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Gumawang	5 Paket	880,000,000	Kecamatan Wiradesa	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Gumawang				7 Lembaga	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Gumawang	7 Lembaga	440,000,000	Kecamatan Wiradesa	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,320,000,000</b>		
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga Masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>1,200,000,000</b>							100 %	<b>1,320,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan</b>	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi lembaga di Kelurahan dan jumlah terbangunnya paket pekerjaan di kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	<b>1,200,000,000</b>						12 bulan	<b>1,320,000,000</b>		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Kelurahan Pekuncen				5 Paket	800,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kelurahan Pekuncen	5 Paket	880,000,000	Kecamatan Wiradesa	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pekuncen				7 Lembaga	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelurahan Pekuncen	7 Lembaga	440,000,000	Kecamatan Wiradesa	
<b>TOTAL</b>							<b>13,560,500,000</b>							<b>14,966,050,000</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01				<b>KECAMATAN</b>															
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan Administrasi Perkantoran Selama Lima Tahun	%		%		100 %	<b>5,807,053,350</b>						100 %	<b>7,900,429,830</b>	
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan	<b>30,000,000</b>						2 Kegiatan	<b>33,000,000</b>	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Tepat Waktu					10 dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	10 dokumen	22,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu					5 dokumen	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	5 dokumen	11,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Kegiatan Pemenuhan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Bulan Kegiatan		Bulan Kegiatan		12 Bulan 2 Kegiatan	<b>4,860,504,600</b>						12 Bulan 2 Kegiatan	<b>5,103,529,830</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhnya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	4,790,154,600	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	5,029,662,330	Kecamatan Kedungwuni
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Bulan	70,350,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	73,867,500	Kecamatan Kedungwuni
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan	<b>10,000,000</b>						1 Kegiatan	<b>12,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Orang	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Kedungwuni	2 Orang	12,500,000	Kecamatan Kedungwuni
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan pemenuhan pengelolaan administrasi umum	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	<b>184,448,750</b>						5 kegiatan	<b>198,000,000</b>	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	27,893,250	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	29,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 Bulan	42,466,250	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	46,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor				12 Bulan	8,489,250	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	9,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu				12 Bulan	48,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	54,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				384 kali	57,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Kedungwuni	384 kali	60,000,000	Kecamatan Kedungwuni
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>115,000,000</b>						2 Kegiatan	<b>60,000,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				2 Unit	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan Mesin Kantor	2 Unit	0	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya				10 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan Mesin Kantor	10 Unit	60,000,000	Kecamatan Kedungwuni

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>402,900,000</b>						2 Kegiatan	<b>434,400,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	44,100,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Outsourcing Kebersihan Kawasan Gemek dan Kantor Kecamatan Kedungwuni, Sopir serta Penjaga Malam; Kebutuhan Listrik, Telepon, Surat Kabar dan Internet Kantor Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	46,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pengadaan jasa pelayanan umum				13 orang	358,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Outsourcing Kebersihan Kawasan Gemek dan Kantor Kecamatan Kedungwuni, Sopir serta Penjaga Malam; Kebutuhan Listrik, Telepon, Surat Kabar dan Internet Kantor Kecamatan Kedungwuni	13 orang	388,400,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	<b>204,200,000</b>						5 Kegiatan	<b>2,059,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	37,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor, Mebel Kantor dan Kendaraan Dinas Kecamatan Kedungwuni	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Kedungwuni

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				6 bulan	3,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor, Mebel Kantor dan Kendaraan Dinas Kecamatan Kedungwuni	6 bulan	4,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya				12 bulan	13,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor, Mebel Kantor dan Kendaraan Dinas Kecamatan Kedungwuni	12 bulan	15,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan direhabilitasi Jumlah Paket Penyusunan DED Kantor Kecamatan				2 Unit 1 Paket	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Peralatan dan Mesin Kantor, Mebel Kantor dan Kendaraan Dinas Kecamatan Kedungwuni	2 Unit 1 Paket	2,000,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP	%		%	100 %	<b>180,000,000</b>						100 %	<b>157,000,000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>80,000,000</b>						2 Kegiatan	<b>52,500,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tertentu				24 Kegiatan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Muspika, Masyarakat, Kelompok Seni dan Instansi Vertikal Lainnya	24 Kegiatan	12,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas				50 Orang	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Muspika, Masyarakat, Kelompok Seni dan Instansi Vertikal Lainnya	50 Orang	40,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>100,000,000</b>						1 Kegiatan	<b>104,500,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat				1 Kegiatan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengguna Layanan PATEN, Peserta MTQ, Kelompok seni, Budaya Syawalan, Petani Durian dll	1 Kegiatan	22,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksnakan				5 Kegiatan	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pengguna Layanan PATEN, Peserta MTQ, Kelompok seni, Budaya Syawalan, Petani Durian dll	5 Kegiatan	82,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	%		%	100 %	<b>180,000,000</b>						100 %	<b>115,500,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>165,000,000</b>						2 Kegiatan	<b>98,500,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang desa/kelurahan/kecamatan yang dilaksanakan				20 Kegiatan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Desa/Kelurahan , Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedungwuni, Pelaku UMKM	20 Kegiatan	16,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang dibina Jumlah TPP PKK Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dibina Jumlah UMKM yang dbina				19 desa/keurahan 20 orang 19 desa/keurahan 19 desa/keurahan	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Desa/Kelurahan , Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedungwuni, Pelaku UMKM	19 desa/keurahan 20 orang 19 desa/keurahan 19 desa/keurahan	82,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>15,000,000</b>						1 Kegiatan	<b>17,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina				1 lembaga	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Karang Taruna	1 lembaga	17,000,000	Kecamatan Kedungwuni

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) aktif  Persentase linmas kecamatan desa kelurahan aktif	%  %		%  %	100 %  100 %	<b>34,000,000</b>						100 %  100 %	<b>40,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah kegiatan pemenuhan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	<b>34,000,000</b>						1 kegiatan	<b>40,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang dibina  Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				20 Orang 4 Kegiatan	34,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Linmas Inti Kecamatan	20 Orang 4 Kegiatan	40,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%		%	100 %	<b>75,000,000</b>						100 %	<b>80,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>75,000,000</b>						1 Kegiatan	<b>80,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional				4 Kegiatan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Wilayah Kecamatan Kedungwuni dan Masyarakat Lingkungan Sekitar	4 Kegiatan	80,000,000	Kecamatan Kedungwuni

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	%		%	100 %	<b>232,000,000</b>						100 %	<b>150,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	<b>232,000,000</b>						7 Kegiatan	<b>150,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pendampingan dalam pembuatan produk hukum desa/kelurahan				19 desa/keurahan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni	19 desa/keurahan	12,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan				19 desa/keurahan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni	19 desa/keurahan	80,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 06 2.01 05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa yang mendapatkan pembinaan mengenai tugas kepala desa dan perangkat desa				16 desa	35,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni	16 desa	12,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 06 2.01 06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa				2 desa	17,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni	2 desa	20,000,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 06 2.01 07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa				16 desa	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni	16 desa	12,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7 01 06 2.01 09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Bimbinga Teknis Perencanaan Pembangunan Desa  Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas penyusunan RAPBDes				16 desa 16 desa	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kedungwuni	16 desa 16 desa	12,500,000	Kecamatan Kedungwuni
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,600,000,000</b>						<b>1,750,000,000</b>		
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang terbangun dan tersedia	%		%	100 %	<b>1,600,000,000</b>						100 %	<b>1,750,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemenuhan pemberdayaan kelurahan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	1,600,000,000					2 kegiatan	1,750,000,000			
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terbangun				5 paket	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga Masyarakat yang ada di Kelurahan	5 paket	1,100,000,000	Kecamatan Kedungwuni	
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang memperoleh insentif				20 lembaga	600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga Masyarakat yang ada di Kelurahan	20 lembaga	650,000,000	Kecamatan Kedungwuni	
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01					<b>KECAMATAN</b>					1,500,000,000								1,650,000,000		
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	%		%	100 %	1,500,000,000							100 %	1,650,000,000	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemenuhan pemberdayaan kelurahan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	1,500,000,000							2 kegiatan	1,650,000,000	
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terbangun				5 paket	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga masyarakat dan sarana prasarana yang ada di kelurahan	5 paket	1,100,000,000	Kecamatan Kedungwuni	
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang memperoleh insentif				20 lembaga	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga masyarakat dan sarana prasarana yang ada di kelurahan	20 lembaga	550,000,000	Kecamatan Kedungwuni	
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01					<b>KECAMATAN</b>					1,500,000,000								1,650,000,000		
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%		%	100 %	1,500,000,000							100 %	1,650,000,000	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sub kegiatan pemenuhan pemberdayaan kelurahan	sub kegiatan		sub kegiatan	2 sub kegiatan	1,500,000,000							2 sub kegiatan	1,650,000,000	
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terbangun				5 Paket	1,000,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga masyarakat yang ada di kelurahan	5 Paket	1,100,000,000	Kecamatan Kedungwuni	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang memperoleh insentif				20 lembaga	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga masyarakat yang ada di kelurahan	20 lembaga	550,000,000	Kecamatan Kedungwuni
<b>TOTAL</b>							<b>11,108,053,350</b>						<b>13,492,929,830</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				2 orang	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Buaran	2 orang	20,000,000	Kecamatan Buaran
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>100,000,000</b>						100 Persen	<b>113,200,000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)				8 unit	1,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	8 unit	1,700,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 bulan	36,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	40,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	12,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 bulan	8,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	9,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 bulan	9,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	10,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				51 kali	30,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	51 kali	35,000,000	Kecamatan Buaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinami Pada OPD (Bulan)				12 bulan	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	5,500,000	Kecamatan Buaran
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>587,000,000</b>						100 Persen	<b>790,000,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				2 unit	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	2 unit	140,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				3 unit	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	3 unit	10,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				5 unit	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	5 unit	65,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 unit	400,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	1 unit	500,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	1 unit	75,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>100,000,000</b>						100 Persen	<b>110,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	45,000,000	Kecamatan Buaran



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				2 orang	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	2 orang	65,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>287,000,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>300,000,000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	55,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 bulan	17,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	18,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	12,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	12 bulan	15,000,000	Kecamatan Buaran
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				2 unit	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	2 unit	200,000,000	Kecamatan Buaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	persen		persen	100 persen	<b>111,400,000</b>						100 persen	<b>121,340,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilakukan oleh unit kerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>45,000,000</b>						100 Persen	<b>48,000,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rapat koordinasi Standar Pelayanan Minimal wilayah kecamatan				53 kali	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	53 kali	8,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				4 kegiatan	38,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Buaran	4 kegiatan	40,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Kegiatan Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan ke kecamatan	Kegiatan Persen		Kegiatan Persen	7 Kegiatan 100 Persen	<b>66,400,000</b>						7 Kegiatan 100 Persen	<b>73,340,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				53 kali	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Buaran	53 kali	8,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, grebek syawalan, festival durian lolong, Gema Setia dsb)				6 kegiatan	59,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Buaran	6 kegiatan	65,340,000	Kecamatan Buaran
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>133,216,900</b>						--	<b>58,388,590</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Prosentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>103,216,900</b>						100 Persen	<b>18,388,590</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan				11 kegiatan	16,716,900	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Buaran	11 kegiatan	18,388,590	Kecamatan Buaran
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran				1 kegiatan	86,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Buaran	1 kegiatan	0	Kecamatan Buaran
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah perizinan non usaha yang diterbitkan	kali		kali	51 kali	<b>30,000,000</b>						51 kali	<b>40,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak dsb) yang dibina				3 lembaga	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Buaran	3 lembaga	40,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-		-	--	<b>62,000,000</b>						--	<b>69,450,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dari TNI/POLRI di wilayah kecamatan	orang		orang	50 orang	<b>62,000,000</b>						50 orang	<b>69,450,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi permasalahan dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				12 kegiatan	62,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Masyarakat Kecamatan Buaran	12 kegiatan	69,450,000	Kecamatan Buaran
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	persen		persen	100 persen	<b>75,000,000</b>						100 persen	<b>80,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	<b>75,000,000</b>						100 Persen	<b>80,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dsb)				4 kegiatan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Buaran	4 kegiatan	80,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	persen		persen	100 persen	<b>296,000,000</b>						100 persen	<b>120,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase desa yang tertib administrasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>296,000,000</b>						100 Persen	<b>120,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				7 desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tujuh desa yang ada di Kecamatan Buaran	7 desa	25,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				7 desa	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tujuh desa yang ada di Kecamatan Buaran	7 desa	60,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				1 kali	6,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tujuh desa yang ada di Kecamatan Buaran	1 kali	0	Kecamatan Buaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				21 orang	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tujuh desa yang ada di Kecamatan Buaran	21 orang	35,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan pendampingan desa				0 0	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tujuh desa yang ada di Kecamatan Buaran	0 0	0	Kecamatan Buaran
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,956,540,800</b>							<b>2,009,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>1,956,540,800</b>						--	<b>2,009,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	kali		kali	11 kali	<b>1,956,540,800</b>						11 kali	<b>2,009,000,000</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan				26 Paket	1,220,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kelurahan Sapugarut	26 Paket	1,230,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan				15 lembaga	736,540,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan Sapugarut	15 lembaga	779,000,000	Kecamatan Buaran
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,958,632,000</b>							<b>2,029,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>1,958,632,000</b>						--	<b>2,029,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	kali		kali	11 kali	<b>1,958,632,000</b>						11 kali	<b>2,029,000,000</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan				26 paket	1,240,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon	26 paket	1,250,000,000	Kecamatan Buaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan				15 lembaga	718,632,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon	15 lembaga	779,000,000	Kecamatan Buaran
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7 01	<b>KECAMATAN</b>						<b>1,849,088,000</b>							<b>1,960,000,000</b>	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>1,849,088,000</b>						--	<b>1,960,000,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	kali		kali	11 kali	<b>1,849,088,000</b>						11 kali	<b>1,960,000,000</b>	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan				26 paket	1,220,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kelurahan Bligo	26 paket	1,230,000,000	Kecamatan Buaran
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan				15 lembaga	629,088,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan Bligo	15 lembaga	730,000,000	Kecamatan Buaran
<b>TOTAL</b>							<b>11,440,877,700</b>							<b>12,220,878,590</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01						<b>3,666,222,894</b>							<b>3,130,533,604</b>		
7	01	01					<b>2,766,008,194</b>							<b>2,845,533,604</b>		
7	01	01	2.01				<b>3,000,000</b>						12 Bulan	<b>3,100,000</b>		
7	01	01	2.01	01				12 bulan	3,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Asn Kecamatan Tirto Dan Desa Se- Kecamatan Tirto	12 bulan	3,100,000	Kecamatan Tirto
7	01	01	2.02				<b>2,108,508,194</b>						1 Tahun	<b>2,216,433,604</b>		
7	01	01	2.02	01				12 bulan	2,058,508,194	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		ASN Kecamatan Tirto	12 bulan	2,161,433,604	Kecamatan Tirto
7	01	01	2.02	04				12 bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Tirto	12 bulan	55,000,000	Kecamatan Tirto
7	01	01	2.06				<b>133,500,000</b>						12 Bulan	<b>142,000,000</b>		
7	01	01	2.06	03				12 bulan	4,500,000	Kab. Pekalongan		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Tirto Dan Desa Se- Kecamatan Tirto	12 bulan	5,000,000	Kecamatan Tirto
7	01	01	2.06	04				12 bulan	35,000,000				ASN Kecamatan Tirto Dan Desa Se- Kecamatan Tirto	12 bulan	40,000,000	Kecamatan Tirto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan dalam penyediaan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat				12 bulan	38,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Tirta Dan Desa Se- Kecamatan Tirta	12 bulan	39,000,000	Kecamatan Tirta
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	56,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tirta Dan Desa Se- Kecamatan Tirta	12 bulan	58,000,000	Kecamatan Tirta
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional lapangan, Jumlah bulan dalam penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, presentase terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya, presentase terpeliharanya sarpras gedung kantor/bangunan lainnya	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>240,000,000</b>						12 Bulan	<b>156,000,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit dalam pengadaan kendaraan dinas				3 unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Tirta	3 unit	0	Kecamatan Tirta
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit dalam pengadaan mebel				10 unit	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Tirta	10 unit	50,000,000	Kecamatan Tirta
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesinya lainnya				5 unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Tirta	5 unit	35,000,000	Kecamatan Tirta
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya				5 unit	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Tirta	5 unit	36,000,000	Kecamatan Tirta
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				5 unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Tirta	5 unit	35,000,000	Kecamatan Tirta



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik, Jumlah bulan dalam penyediaan jasa tenaga kebersihan dan jasa keamanan Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan jumlah layanan yang diterbitkan, Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan pentas seni,festival durian,MTQ dan syawalan	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	<b>152,000,000</b>						12 Bulan 12 Bulan	<b>160,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				12 bulan	42,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Outsorsing Kecamatan Tirto Kantor Kecamatan Tirto	12 bulan	45,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa tenaga kebersihan dan jasa keamanan				12 bulan	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Outsorsing Kecamatan Tirto Kantor Kecamatan Tirto	12 bulan	115,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah unit dalam pengadaan kendaraan dinas, umlah unit dalam pengadaan mebel, Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya, Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya, Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>129,000,000</b>						12 Bulan	<b>168,000,000</b>	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional lapangan				12 bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan			Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Tirto	12 bulan	33,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	9,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Tirto	12 bulan	10,000,000	Kecamatan Tirto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	presentase terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya				100 persen	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Tirto	100 persen	50,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase terpeliharanya sarpras gedung/kantor/bangunan lainnya				100 persen	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Tirto	100 persen	75,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-	-	-	--	<b>73,000,000</b>						--	<b>77,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah pemuda yang dibina di tingkat kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>12,000,000</b>						12 Bulan	<b>14,000,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah pemuda yang dibina di tingkat kecamatan				180 org	12,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa Se-Kecamatan Tirto	180 org	14,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan jumlah layanan yang diterbitkan, Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan pentas seni, festival durian, MTQ dan syawalan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>61,000,000</b>						12 Bulan	<b>63,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan jumlah layanan yang diterbitkan				10 jenis	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa Se-Kecamatan Tirto	10 jenis	21,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan pentas seni, festival durian, MTQ dan syawalan				4 keg	41,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	4 keg	42,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	0 0 Persentase lembaga masyarakat aktif	- 0 -	- 0 -	- 0 -	-- 0 0 --	<b>80,000,000</b>						-- 0 0 --	<b>85,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	a1. Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan musrenbangdes dan musrenbangkec a2. Jumlah TP PKK desa yang dibina dan jumlah desa yang melaksanakan promosi produk unggulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>68,000,000</b>						12 Bulan	<b>72,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan musrenbangdes dan musrenbangkec				17 keg	28,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Desa Se-Kecamatan Tirto	17 keg	30,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah TP PKK desa yang dibina dan jumlah desa yang melaksanakan promosi produk unggulan				17 keg	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Desa Se-Kecamatan Tirto	17 keg	42,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan taruna,PIKR,dan forum anak	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>12,000,000</b>						12 Bulan	<b>13,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan taruna,PIKR,dan forum anak				3 keg	12,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	3 keg	13,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-		-	--	<b>12,000,000</b>						--	<b>12,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>12,000,000</b>						12 Bulan	<b>12,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan				4 keg	12,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	4 keg	12,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	<b>65,000,000</b>						--	<b>67,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah peringatan hari besar nasional (HUT RI,Sumpahh Prmuda dan Hari Pahlawan)	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>65,000,000</b>						12 Bulan	<b>67,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan)				3 keg	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto Dan Asn Kecamatan Tirto	3 keg	67,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	- -		- -	-- --	<b>670,214,700</b>						-- --	<b>44,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan, Jumlah desa dalam pendampingan pembinaan dan pengawasan Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pilkades, Jumlah desa yang tertib administrasi desa, perdes dan pilkades	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>670,214,700</b>						12 Bulan	<b>44,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perdes dan pilkades				16 desa	5,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	16 desa	6,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi desa				16 desa	6,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	16 desa	7,000,000	Kecamatan Tirto
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pilkades				5 desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	5 desa	0	Kecamatan Tirto
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa dalam pendampingan pembinaan dan pengawasan				16 desa	639,214,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa Se-Kecamatan Tirto	16 desa	31,000,000	Kecamatan Tirto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
<b>TOTAL</b>							<b>3,666,222,894</b>						<b>3,130,533,604</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
															Nasional					Daerah	
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01					<b>KECAMATAN</b>					4,555,500,000							4,203,500,000			
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	<b>3,745,500,000</b>							100 %	<b>3,591,000,000</b>	
7	01	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%		%	100 %	<b>20,000,000</b>							100 %	<b>27,500,000</b>	
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)				8 Dokumen	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	8 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Bojong	
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	2 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Bojong	
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	<b>2,795,000,000</b>							100 %	<b>2,900,000,000</b>	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				12 Bulan	2,750,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	2,850,000,000	Kecamatan Bojong	
7	01	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				12 Bulan	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Bojong	
7	01	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	%		%	100 %	<b>15,000,000</b>							100 %	<b>22,500,000</b>	
7	01	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	2 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Bojong	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				4 Orang	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	4 Orang	15,000,000	Kecamatan Bojong
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	<b>130,000,000</b>						100 %	<b>152,500,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor (unti/buah)				15 Unit/Buah	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	15 Unit/Buah	7,500,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	12,500,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	12,500,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				300 Kali	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	300 Kali	45,000,000	Kecamatan Bojong
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	<b>330,000,000</b>						100 %	<b>205,000,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				2 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	2 Unit	75,000,000	Kecamatan Bojong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				8 Unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	8 Unit	30,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				8 Unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	8 Unit	50,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				2 Unit	150,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	2 Unit	50,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	<b>138,000,000</b>						100 %	<b>155,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	55,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				3 Orang	88,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	3 Orang	100,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	<b>317,500,000</b>						100 %	<b>128,500,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 Bulan	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 Bulan	3,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	3,500,000	Kecamatan Bojong



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 Bulan	4,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	5,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	20,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (bulan)				12 Bulan	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di kecamatan	%		%	100 %	<b>445,000,000</b>						100 %	<b>167,500,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaluka oleh unit kerja perangkat daerah	%		%	100 %	<b>375,000,000</b>						100 %	<b>85,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				12 Bulan	375,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	85,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	<b>70,000,000</b>						100 %	<b>82,500,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				1 Kali	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	1 Kali	12,500,000	Kecamatan Bojong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, grebek syawalan, festival durian lolong, Gema Setia, IVA Test				12 Bulan	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	12 Bulan	70,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%		%	100 %	<b>125,000,000</b>						100 %	<b>150,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	<b>100,000,000</b>						100 %	<b>115,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan				23 Kali	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Bojong	23 Kali	40,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran dan Jumlah TP PKK Desa/kecamatan yang dibina				23 Kec/Desa	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Bojong	23 Kec/Desa	75,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	Lembaga		Lembaga	4 Lembaga	<b>25,000,000</b>						4 Lembaga	<b>35,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak dsb) yang dibina				4 Lembaga	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga Desa	4 Lembaga	35,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase jenias layanan di kecamatan	%		%	100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>35,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%		%	100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>35,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				12 Kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Bojong	12 Kegiatan	35,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>75,000,000</b>						100 %	<b>85,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembeinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>75,000,000</b>						100 %	<b>85,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dsb)				1 Upacara	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	1 Upacara	85,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Presentase desa dengan tertib administrasi	%		%	100 %	<b>135,000,000</b>						100 %	<b>175,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	%		%	100 %	<b>135,000,000</b>						100 %	<b>175,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				22 Desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	22 Desa	25,000,000	Kecamatan Bojong

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				22 Desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	22 Desa	25,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				5 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	5 Desa	50,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				88 Orang	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	88 Orang	20,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan				10 Dokumen	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	10 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Bojong
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang didampingi				22 Desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Bojong	22 Desa	35,000,000	Kecamatan Bojong
<b>TOTAL</b>							<b>4,555,500,000</b>							<b>4,203,500,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan Bulan				12 bulan 12 Bulan	11,120,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 bulan 12 Bulan	12,232,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan Bulan				12 bulan 12 Bulan	33,394,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 bulan 12 Bulan	36,733,400	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan Bulan				12 bulan 12 Bulan	53,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 bulan 12 Bulan	58,300,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan Bulan				12 bulan 12 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 bulan 12 Bulan	0	Kecamatan Wonopringgo
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%		%	100 %	<b>148,000,000</b>						100 %	<b>162,800,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan Unit				12 Bulan 0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 0 Unit	0	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Bulan Unit				12 Bulan 6 Unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 6 Unit	33,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan Unit				12 Bulan 4 Unit	43,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 4 Unit	47,300,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan Unit				12 Bulan 1 Unit	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 1 Unit	49,500,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan Unit				12 Bulan 4 Unit	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 4 Unit	33,000,000	Kecamatan Wonopringgo
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%		%	100 %	<b>122,807,980</b>						100 %	<b>135,088,778</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan				12 Bulan	47,807,980	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan	52,588,778	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan Orang				12 Bulan 3 Orang	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 3 Orang	82,500,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%		%	100 %	<b>91,227,890</b>						100 %	<b>100,350,679</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan	44,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan				12 Bulan	2,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan	2,200,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Bulan				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan	11,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan				12 Bulan	19,227,890	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan	21,150,679	Kecamatan Wonopringgo
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan				12 Bulan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan	22,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-		-	--	<b>290,185,220</b>						--	<b>154,203,742</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100	%		%	100 %	<b>20,000,000</b>						100 %	<b>22,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bulan Kegiatan				12 Bulan 72 Kali	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 72 Kali	22,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	100	%		%	100 %	<b>166,800,000</b>						100 %	<b>18,480,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan Kegiatan				12 Bulan 24 Kali	8,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 24 Kali	8,800,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan Kegiatan				12 Bulan 6 Kali	158,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 6 Kali	9,680,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	100	%		%	100 %	<b>103,385,220</b>						100 %	<b>113,723,742</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kegiatan				12 Kali	10,285,220	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Kali	11,313,742	Kecamatan Wonopringgo
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bulan Kegiatan				12 Bulan 15 Kali	93,100,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 15 Kali	102,410,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>134,275,000</b>						--	<b>147,702,500</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100	%		%	100 %	<b>124,275,000</b>						100 %	<b>136,702,500</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan Kegiatan				12 Bulan 4 Kali	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 4 Kali	22,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan Desa Kecamatan Kegiatan				12 Bulan 14 Desa 1 Kec 8 Kegiatan	104,275,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa 1 Kec 8 Kegiatan	114,702,500	Kecamatan Wonopringgo



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	100	%		%	100 %	<b>10,000,000</b>						100 %	<b>11,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Bulan Kegiatan				12 Bulan 14 Kegiatan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Kegiatan	11,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-		-	--	<b>40,000,000</b>						--	<b>44,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100	Persen		Persen	100 Persen	<b>40,000,000</b>						100 Persen	<b>44,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bulan Desa Kegiatan				12 Bulan 14 Desa 5 Kegiatan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa 5 Kegiatan	44,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	<b>102,000,000</b>						--	<b>112,200,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100	%		%	100 %	<b>102,000,000</b>						100 %	<b>112,200,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bulan Kegiatan				12 Bulan 6 Kegiatan	102,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 6 Kegiatan	112,200,000	Kecamatan Wonopringgo

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi  Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-  -	-  -	-  -	--  --	<b>165,000,000</b>					--  --	<b>181,500,000</b>		
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100	%	%	100 %	<b>165,000,000</b>						100 %	<b>181,500,000</b>		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan Desa				12 Bulan 14 Desa	11,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa	12,100,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bulan Desa				12 Bulan 14 Desa	77,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa	84,700,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Bulan Desa				12 Bulan 14 Desa	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa	44,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Bulan Desa				12 Bulan 14 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa	22,000,000	Kecamatan Wonopringgo
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan Desa				12 Bulan 14 Desa	17,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	12 Bulan 14 Desa	18,700,000	Kecamatan Wonopringgo
<b>TOTAL</b>							<b>3,493,887,310</b>						<b>3,678,276,041</b>		



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya komponen listrik/kantor				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	11,000,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	24,476,200	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	26,923,800	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 bulan	17,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	19,030,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	11,000,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu				12 bulan	38,360,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	42,196,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	40,939,700	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	45,033,600	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penataan arsip dinamis pada OPD				12 bulan	6,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	6,600,000	Kecamatan Karanganyar
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>772,000,000</b>						12 bulan	<b>634,700,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				2 unit	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	2 unit	77,000,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				2 unit	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	2 unit	22,000,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya sarana peralatan perkantoran (laptop, komputer, AC dan Printer)				12 bulan	133,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	146,300,000	Kecamatan Karanganyar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (termasuk pengadaan tralis, pembuatan taman, tempat parkir dan tulisan kantor kecamatan dengan acrilik menyala)				12 bulan	549,000,000	Kab. Pekalongan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	389,400,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan		bulan	12 bulan	<b>114,780,000</b>						12 bulan	<b>126,258,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				12 bulan	36,630,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	40,293,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				3 orang	78,150,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	3 orang	85,965,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	<b>58,586,053</b>						12 bulan	<b>138,427,300</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				12 bulan	20,768,651	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	54,123,300	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan rutin/berkala dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				3 unit	2	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	3 unit	1,804,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebel				12 bulan	6,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	6,600,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				12 bulan	17,168,400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	12 bulan	26,400,000	Kecamatan Karanganyar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				3 unit	14,649,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan	3 unit	49,500,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-	-	-	--	<b>342,135,100</b>						--	<b>268,798,610</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah terselenggaranya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	<b>49,500,000</b>						2 kegiatan	<b>54,450,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerithan dengn perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				1 kegiatan	49,500,000	Kab. Pekalongan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	1 kegiatan	54,450,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	<b>160,635,100</b>						7 kegiatan	<b>105,198,610</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				7 kegiatan	160,635,100	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat	7 kegiatan	105,198,610	Kecamatan Karanganyar
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	<b>132,000,000</b>						7 kegiatan	<b>109,150,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				1 kali	12,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	1 kali	13,200,000	Kecamatan Karanganyar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				7 kegiatan	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Masyarakat	7 kegiatan	95,950,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	<b>116,576,800</b>						6 kegiatan	<b>56,734,200</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	<b>80,154,800</b>						6 kegiatan	<b>27,670,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah musrenbang kecamatan yang dilaksanakan				1 kegiatan	14,154,800	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat	1 kegiatan	15,570,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran dan pelatihan untuk menunjang kreatifitas sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat				5 kegiatan	66,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Masyarakat	5 kegiatan	12,100,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	jumlah lembaga mayarakat (karang taruna, PIK-R, Forum anak) yang dibina serta Pembinaan dan pelatihan organisasi keagamaan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	<b>36,422,000</b>						4 kegiatan	<b>29,064,200</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga mayarakat (karang taruna, PIK-R, Forum anak) yang dibina serta Pembinaan dan pelatihan organisasi keagamaan				4 kegiatan	36,422,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat	4 kegiatan	29,064,200	Kecamatan Karanganyar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	jumlah pelaksanaan koodinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan ( penjelasan : kegiatan terkait rapat koordinasi kebencanaan dan pengamanan Idul Fitri/Idul Adha, Natal dan tahun baru yang berkaitan dengan TNI / POLRI )	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	54,450,000						2 kegiatan	59,895,000	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	jumlah pelaksanaan koodinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan ( penjelasan : kegiatan terkait rapat koordinasi kebencanaan dan pengamanan Idul Fitri/Idul Adha, Natal dan tahun baru yang berkaitan dengan TNI / POLRI )	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	54,450,000						2 kegiatan	59,895,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah pelaksanaan koodinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan ( penjelasan : kegiatan terkait rapat koordinasi kebencanaan dan pengamanan Idul Fitri/Idul Adha, Natal dan tahun baru yang berkaitan dengan TNI / POLRI )				2 kegiatan	54,450,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	2 kegiatan	59,895,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	110,456,500						--	121,000,000	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Upacara tanggal 17) dan Pembekalan keterampilan Linmas Desa di Tingkat Kecamatan	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	<b>110,456,500</b>						5 kegiatan	<b>121,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Upacara tanggal 17) dan Pembekalan keterampilan Linmas Desa di Tingkat Kecamatan				5 kegiatan	110,456,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	5 kegiatan	121,000,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	- -		- -	-- --	<b>85,000,000</b>						-- --	<b>93,500,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang Terfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dalam Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	desa		desa	15 desa	<b>85,000,000</b>						15 desa	<b>93,500,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades				15 desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	15 desa	16,500,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				15 desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	15 desa	16,500,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades dan Perekrutan Perangkat desa				15 desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	15 desa	16,500,000	Kecamatan Karanganyar

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah desa yang anggota Badan Permusyawaratan Desa nya terbina				15 desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	15 desa	16,500,000	Kecamatan Karanganyar
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan pendampingan desa				15 desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat	15 desa	27,500,000	Kecamatan Karanganyar
<b>TOTAL</b>							<b>4,019,781,509</b>							<b>3,888,471,205</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit terpenuhinya komponen Listrik/Kantor				20 unit	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	20 unit	5,500,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan kantor				12 Bulan	12,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	13,200,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 Bulan	9,100,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	10,010,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor				12 Bulan	6,100,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	6,710,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu				12 Bulan	18,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	19,800,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				240 Kali	40,080,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	240 Kali	44,088,000	Kecamatan Doro
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	%		%	100 %	<b>216,600,000</b>						100 %	<b>238,260,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 unit	21,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	1 unit	23,100,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				28 unit	25,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	28 unit	28,160,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi				9 unit	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	9 unit	82,500,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				2 unit	95,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	2 unit	104,500,000	Kecamatan Doro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	100 %	<b>79,000,000</b>						100 %	<b>86,900,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	22,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	25,080,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pengadaan jasa Pelayanan umum				2 Orang	56,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	2 Orang	61,820,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%		%	100 %	<b>120,000,000</b>						100 %	<b>132,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	38,500,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	11,000,000	Kecamatan Doro
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi				12 Bulan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Doro	12 Bulan	82,500,000	Kecamatan Doro
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%		%	100 %	<b>170,000,000</b>						100 %	<b>187,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%		%	100 %	<b>20,000,000</b>						100 %	<b>22,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait				2 Kegiatan	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	2 Kegiatan	22,000,000	Kecamatan Doro
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%	%		100 %	<b>40,000,000</b>						100 %	<b>44,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (Seni budaya, pemuda, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				3 Kegiatan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	3 Kegiatan	44,000,000	Kecamatan Doro
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	%		100 %	<b>110,000,000</b>						100 %	<b>121,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan pelayanan Paten				1 Kali	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	1 Kali	22,000,000	Kecamatan Doro
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, Grebek Syawalan, Festival Durian, Gema Setia)				4 Kegiatan	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	4 Kegiatan	99,000,000	Kecamatan Doro
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	%		100 %	<b>130,000,000</b>						100 %	<b>143,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	%		100 %	<b>105,000,000</b>						100 %	<b>115,500,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa dan musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	1 Kegiatan	27,500,000	Kecamatan Doro

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (PKK, promosi wisata, promosi industri lokal, UMKM)				4 Kegiatan	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	4 Kegiatan	88,000,000	Kecamatan Doro
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	%		%	100 %	<b>25,000,000</b>						100 %	<b>27,500,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karangtaruna,PIKR,) yang dibina				2 Kegiatan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga Masyarakat Kecamatan Doro	2 Kegiatan	27,500,000	Kecamatan Doro
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	<b>65,000,000</b>						100 %	<b>71,500,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	<b>65,000,000</b>						100 %	<b>71,500,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan, Jumlah linmas yang dibina				2 Kegiatan	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	2 Kegiatan	71,500,000	Kecamatan Doro
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>80,000,000</b>						100 %	<b>88,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	<b>80,000,000</b>						100 %	<b>88,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional ( HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan )				3 Kegiatan	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Doro	3 Kegiatan	88,000,000	Kecamatan Doro
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	%		%	100 %	<b>330,000,000</b>						100 %	<b>143,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	%		%	100 %	<b>330,000,000</b>						100 %	<b>143,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				14 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa se-Kecamatan Doro	14 Desa	22,000,000	Kecamatan Doro
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				14 Desa	250,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa se-Kecamatan Doro	14 Desa	55,000,000	Kecamatan Doro
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				1 Desa	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa se-Kecamatan Doro	1 Desa	11,000,000	Kecamatan Doro
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				96 Orang	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa se-Kecamatan Doro	96 Orang	33,000,000	Kecamatan Doro
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa				3 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa se-Kecamatan Doro	3 Desa	22,000,000	Kecamatan Doro
<b>TOTAL</b>							<b>3,446,475,000</b>							<b>3,571,122,500</b>	





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)				8 Pegawai	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	8 Pegawai	11,000,000	Kecamatan Talun
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentasi Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>114,900,000</b>						100 Persen	<b>126,390,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor (unit / buah)				20 Unit	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	20 Unit	5,500,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	16,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	17,600,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 Bulan	8,900,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	9,790,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	11,000,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	38,500,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				300 Kali	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	300 Kali	44,000,000	Kecamatan Talun
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>55,000,000</b>						100 Persen	<b>60,500,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				1 Unit	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	1 Unit	27,500,000	Kecamatan Talun

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				3 Unit	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	3 Unit	16,500,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				3 Unit	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	3 Unit	16,500,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>123,000,000</b>						100 Persen	<b>135,300,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	38,500,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				2 Orang	88,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	2 Orang	96,800,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>80,000,000</b>						100 Persen	<b>88,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	44,000,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 Bulan	2,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	2,200,000	Kecamatan Talun
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 Bulan	4,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	4,400,000	Kecamatan Talun

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 Bulan	7,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	7,700,000	Kecamatan Talun
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (bulan)				12 Bulan	27,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	12 Bulan	29,700,000	Kecamatan Talun
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak dilakukan oleh unit kerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>86,500,000</b>						100 Persen	<b>95,150,000</b>	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan dan dapat dilaksanakan dibagi jumlah urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan dikali 100	Persen		Persen	100 Persen	<b>10,000,000</b>						100 Persen	<b>11,000,000</b>	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan, dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				1 Kegiatan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	1 Kegiatan	11,000,000	Kecamatan Talun
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah urusan Pemerintah yang dilaksanakan dibagi jumlah yang dilimpahkan dikali 100	Persen		Persen	100 Persen	<b>76,500,000</b>						100 Persen	<b>84,150,000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				1 Kali	16,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	1 Kali	18,150,000	Kecamatan Talun
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, grebek syawalan, festival durian lolong, Gema Setia, IVA Test				5 Kegiatan	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	5 Kegiatan	66,000,000	Kecamatan Talun

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase lembaga masyarakat aktif Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen desa		Persen desa	100 Persen 10 desa	<b>80,000,000</b>						100 Persen 10 desa	<b>88,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	desa		desa	10 desa	<b>55,000,000</b>						10 desa	<b>60,500,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun		12,100,000	Kecamatan Talun
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran dan Jumlah TP PKK Desa/Kecamatan Yang dibina				10 Desa	44,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	10 Desa	48,400,000	Kecamatan Talun
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah lembaga Masyarakat (Karang Taruna, PIKR, Forum anak, dsb) yang dibina Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Kegiatan Persen		Kegiatan Persen	2 Kegiatan 100 Persen	<b>25,000,000</b>						2 Kegiatan 100 Persen	<b>27,500,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat (Karang Taruna dan PIKR) yang dibina				2 Lembaga	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	2 Lembaga	27,500,000	Kecamatan Talun
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	<b>19,250,000</b>						100 Persen	<b>21,175,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	<b>19,250,000</b>						100 Persen	<b>21,175,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				2 Kegiatan	19,250,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	2 Kegiatan	21,175,000	Kecamatan Talun

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas koordinasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	<b>49,500,000</b>						100 Persen	<b>54,450,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan dikali 100	Persen		Persen	100 Persen	<b>49,500,000</b>						100 Persen	<b>54,450,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dsb)				4 Upacara	49,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	4 Upacara	54,450,000	Kecamatan Talun
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>217,160,000</b>						100 Persen	<b>90,200,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen		Persen	100 Persen	<b>217,160,000</b>						100 Persen	<b>90,200,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				10 Desa	11,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	10 Desa	12,100,000	Kecamatan Talun
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi				10 Desa	175,160,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	10 Desa	44,000,000	Kecamatan Talun

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				1 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	1 Desa	16,500,000	Kecamatan Talun
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				40 Orang	8,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	40 Orang	8,800,000	Kecamatan Talun
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan				1 Rekomendasi	8,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Talun	1 Rekomendasi	8,800,000	Kecamatan Talun
<b>TOTAL</b>							<b>2,770,288,000</b>							<b>2,898,640,800</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	01						<b>2,925,550,000</b>						<b>3,054,550,000</b>							
7	01	01					<b>2,598,450,000</b>					100 %	<b>2,787,100,000</b>							
7	01	01	2.01				<b>23,200,000</b>					100 %	<b>25,400,000</b>							
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu				5 dokumen	14,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD Kecamatan Lebakbarang	5 dokumen	15,400,000	Kecamatan Lebakbarang
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu				4 dokumen	9,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD Kecamatan Lebakbarang	4 dokumen	10,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	<b>2,057,500,000</b>							100 %	<b>2,262,450,000</b>	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	1,999,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	14 bulan	2,199,450,000	Kecamatan Lebakbarang
7	01	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 bulan	58,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	12 bulan	63,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7	01	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	<b>94,250,000</b>							100 %	<b>104,000,000</b>	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor				48 buah	2,750,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	48 buah	3,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	18,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	12 bulan	20,000,000	Kecamatan Lebakbarang



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	4,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	12 bulan	4,500,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor				12 bulan	7,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	12 bulan	8,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu				12 bulan	26,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	12 bulan	29,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				257 kali	35,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN Kecamatan Lebakbarang	257 kali	39,500,000	Kecamatan Lebakbarang
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>220,500,000</b>						100 %	<b>228,000,000</b>	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				6 unit	25,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD Kecamatan Lebakbarang	6 unit	28,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	195,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD Kecamatan Lebakbarang	1 unit	200,000,000	Kecamatan Lebakbarang
<b>7 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>86,500,000</b>						100 %	<b>96,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	23,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD Kecamatan Lebakbarang	12 bulan	26,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				2 orang	63,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	OPD Kecamatan Lebakbarang	2 orang	70,000,000	Kecamatan Lebakbarang
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>116,500,000</b>						100 %	<b>71,250,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	39,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	43,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 bulan	1,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	1,650,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor				12 bulan	6,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	6,600,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				12 bulan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Barang Milik Daerah	12 bulan	20,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%		%	100 %	<b>87,700,000</b>						100 %	<b>108,000,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%		%	100 %	<b>6,400,000</b>						100 %	<b>7,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 kegiatan	6,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Koordinasi Lintas Sektor	12 kegiatan	7,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	<b>81,300,000</b>						100 %	<b>101,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan Pelayanan PATEN				2 kegiatan	9,900,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat, OPD Kecamatan Lebakbarng	2 kegiatan	11,000,000	Kecamatan Lebakbarang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, gunungan syawalan, festival durian lolong, Gema Setia, Turnamen olahraga, KUDU Sekolah)				5 kegiatan	71,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Masyarakat, OPD Kecamatan Lebakbarang	5 kegiatan	90,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	- %	- %	-- 100 %		<b>136,700,000</b>						-- 100 %	<b>62,300,000</b>	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	% %	% %	100 % 100 %		<b>133,000,000</b>						100 % 100 %	<b>58,300,000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan				12 kegiatan	16,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelompok Masyarakat, Musrenbangdes, Musrenbangkec	12 kegiatan	18,150,000	Kecamatan Lebakbarang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk industri lokal unggulan/pariwisata dalam pameran, jumlah TP PKK Desa dan Kecamatan yang dibina dan jumlah UMKM yang dibina				3 kegiatan	116,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	Kelompok Masyarakat, Musrenbangdes, Musrenbangkec	3 kegiatan	40,150,000	Kecamatan Lebakbarang
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang mendapatkan pembinaan	%	%	100 %		<b>3,700,000</b>						100 %	<b>4,000,000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				1 kegiatan	3,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan	4,000,000	Kecamatan Lebakbarang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan. Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- - %	- - %	-- -- 100 %		<b>16,400,000</b>						-- -- 100 %	<b>18,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	%	100 %		<b>16,400,000</b>						100 %	<b>18,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Forkompimcam dalam rangka penanganan bencana, penanganan aduan masyarakat, patroli keamanan dan pembinaan Linmas			4 kegiatan		16,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	4 kegiatan	18,000,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	%	100 %		<b>41,500,000</b>						100 %	<b>45,650,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	%	100 %		<b>41,500,000</b>						100 %	<b>45,650,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dsb)			1 kegiatan		41,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kelompok masyarakat	1 kegiatan	45,650,000	Kecamatan Lebakbarang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	%		100 %	<b>44,800,000</b>						100 %	<b>33,500,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	%		100 %	<b>44,800,000</b>						100 %	<b>33,500,000</b>	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				11 desa	14,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa	11 desa	15,500,000	Kecamatan Lebakbarang
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				3 desa	11,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa	3 desa	0	Kecamatan Lebakbarang
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa				2 desa	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa	2 desa	0	Kecamatan Lebakbarang
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan desa				11 desa	14,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa	11 desa	18,000,000	Kecamatan Lebakbarang
<b>TOTAL</b>							<b>2,925,550,000</b>							<b>3,054,550,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01						<b>2,750,484,000</b>							<b>2,677,870,000</b>		
7	01	01					<b>2,291,884,000</b>						--	<b>2,318,870,000</b>		
7	01	01	2.01										1 tahun	<b>20,000,000</b>		
7	01	01	2.01	01			8 Dokumen	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN kecamatan	8 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.01	07			2 Dokumen	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN kecamatan	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.02				12 bulan	<b>1,804,370,000</b>					12 bulan	<b>1,804,370,000</b>		
7	01	01	2.02	01			12 Bulan	1,759,370,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemabayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,759,370,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.02	04			12 bulan	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemabayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	45,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.05				1 tahun	<b>15,000,000</b>					1 tahun	<b>15,000,000</b>		
7	01	01	2.05	05			2 Dokumen	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Kecamatan Kandangserang	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.05	09			4 Pegawai	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Kecamatan Kandangserang	4 Pegawai	10,000,000	Kecamatan Kandangserang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Tata Pemerintahan baik dan benar	bulan		bulan	12 bulan	<b>130,000,000</b>					12 bulan	<b>130,000,000</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor (unit/buah)				1 tahun	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Kandangserang	1 tahun	5,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				12 Bulan	32,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Kandangserang	12 Bulan	32,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				12 bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Kandangserang	12 bulan	10,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor (bulan)				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Kandangserang	12 Bulan	10,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (bulan)				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Kandangserang	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				1 tahun	38,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Kandangserang	1 tahun	38,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penagdaan Sarana Dan Prasarana Kantor	tahun		tahun	1 tahun	<b>50,000,000</b>						1 tahun	<b>50,000,000</b>	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (unit)				8 Unit	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan prasarana penunjang	8 Unit	20,000,000	Kecamatan Kandangserang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinlainya yang terpenuhi (unit)				3 unit	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan prasarana penunjang	3 unit	20,000,000	Kecamatan Kandangserang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				2 unit	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan prasarana penunjang	2 unit	10,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	tersedianya jasa Penunjang Kantor	tahun		tahun	1 tahun	<b>136,000,000</b>						1 tahun	<b>136,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	38,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	38,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (orang)				12 bulan	98,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	98,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Aset milik Daerah	tahun		tahun	1 tahun	<b>136,514,000</b>						1 tahun	<b>163,500,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan )				12 Bulan	33,614,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan Barang milik Daerah	12 Bulan	45,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atao Lapangan (bulan)				5 unit	2,900,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan Barang milik Daerah	5 unit	3,500,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				1 paket	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan Barang milik Daerah	1 paket	5,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				1 tahun	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pemeliharaan Barang milik Daerah	1 tahun	10,000,000	Kecamatan Kandangserang



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab				1 Kegiatan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Barang milik Daerah	1 Kegiatan	100,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>190,000,000</b>							<b>90,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>						<b>140,000,000</b>							<b>40,000,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda,olahraga,kehatan,pendidikan,dsb.) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				2 Kegiatan	140,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah		2 Kegiatan	40,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	pelayanan masyarakat	tahun		tahun	1 tahun	<b>50,000,000</b>						1 tahun	<b>50,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Surve Kepuasan Masyarakat				1 Kali	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat di wilayah Kecamatan kandangserang	1 Kali	10,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, Apresiasi seni, lomba sekolah sehat,grebek syawalan,festival durian lolong.IVA TES)				1 Kegiatan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat di wilayah Kecamatan kandangserang	1 Kegiatan	40,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>59,600,000</b>						--	<b>60,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Perencanaan Pembangunan Di Pedesaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	<b>44,600,000</b>						1 Kegiatan	<b>45,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pemberdayaan Masyarakat Di Pedesaan				14 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat 14 Desa di Wilayah Kecamatan Kandangserang	14 Desa	15,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Perempuan ( PKK )				14 desa	29,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat 14 Desa di Wilayah Kecamatan Kandangserang	14 desa	30,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Lembaga Kemasyarakatan	tahun		tahun	1 tahun	<b>15,000,000</b>						1 tahun	<b>15,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat (karang taruna, PIKR.Forum anak, dsb) yang di bina.				4 Lembaga	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lembaga Desa di Wilayah Kecamatan	4 Lembaga	15,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-		-	--	<b>24,000,000</b>						--	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Koordinasi Ketenteraman Masyarakat	tahun		tahun	1 tahun	<b>24,000,000</b>						1 tahun	<b>24,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan , hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				12 Bulan	24,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	masyarakat di wilayah kecamatan Kandangserang	12 Bulan	24,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	<b>45,000,000</b>						--	<b>45,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kegiatan masyarakat yang bersifat meningkatkan nasionalis	tahun		tahun	1 tahun	<b>45,000,000</b>						1 tahun	<b>45,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan hari-hari besar nasional (HUR RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dsb)				3 Upacara	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Masyarakat di wilayah Kecamatan Kandangserang	3 Upacara	45,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	- -		- -	-- --	<b>140,000,000</b>						-- --	<b>140,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Koordinasi dan pengawasan Desa	Desa		Desa	14 Desa	<b>140,000,000</b>						14 Desa	<b>140,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Perdes dan PerKades				14 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	14 Desa di wilayah Kecamatan Kandangserang	14 Desa	15,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		14 Desa di wilayah Kecamatan Kandangserang		15,000,000	Kecamatan Kandangserang
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				3 Desa	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		14 Desa di wilayah Kecamatan Kandangserang	3 Desa	60,000,000	Kecamatan Kandangserang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota BPD yang Terbina				74 Orang	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Desa di wilayah Kecamatan Kandangserang	74 Orang	15,000,000	Kecamatan Kandangserang	
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan				10 Rekomendasi	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Desa di wilayah Kecamatan Kandangserang	10 Rekomendasi	20,000,000	Kecamatan Kandangserang	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang di Dampingi				14 Desa	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Desa di wilayah Kecamatan Kandangserang	14 Desa	15,000,000	Kecamatan Kandangserang	
<b>TOTAL</b>							<b>2,750,484,000</b>						<b>2,677,870,000</b>		





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan JUmlah Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya JUmlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpenuhi	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit 5 Unit 2 Unit 4 Unit	<b>185,000,000</b>						1 Unit 5 Unit 2 Unit 4 Unit	<b>203,500,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kantor Kecamatan Paningggaran	1 Unit	38,500,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				5 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	5 Unit	55,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				4 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	4 Unit	55,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	2 Unit	55,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air JUmlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan Orang		Bulan Orang	12 Bulan 3 Orang	<b>110,600,000</b>						12 Bulan 3 Orang	<b>121,660,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan Air				12 Bulan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran, Outsourcing,	12 Bulan	33,000,000	Kecamatan Paningggaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Orang	80,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paninggaran, Outsourcing,	3 Orang	88,660,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan mebel Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor lainnya Jumlah gedung Kantor dan bangunan Lainnya Yang Terpelihara/direhabilitasi	Unit Bulan Bulan Bulan Unit		Unit Bulan Bulan Bulan Unit	6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Unit	<b>296,200,000</b>						6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Unit	<b>323,400,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan				6 Unit	44,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kantor Kecamatan Paninggaran	6 Unit	48,400,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kantor Kecamatan Paninggaran	12 Bulan	44,000,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebel				12 Bulan	2,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paninggaran	12 Bulan	0	Kecamatan Paninggaran



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya peliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	12 Bulan	11,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/direhabilitasi				1 Bulan	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	1 Bulan	220,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-	-	-	--	<b>235,000,000</b>						--	<b>181,500,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	<b>10,000,000</b>						12 Kegiatan	<b>11,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait				12 Kegiatan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor kecamatan, Desa, Forkompimcam	12 Kegiatan	11,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Yang Bukan Pelimpahan Unit Kerja	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>115,000,000</b>						3 Kegiatan	<b>49,500,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda olahraga, kesehatan, pendidikan dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				3 kegiatan	115,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa, Masyarakat, Kecamatan	3 kegiatan	49,500,000	Kecamatan Paningggaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Kegiatan pelimpahan Kewenangan Yang dilaksanakan ( MTQ, Apresiasi Seni Budaya, Lomba Sekolah Sehat, Grebeg Syawakan, Festival Durian Lolong, Gema Setia dsb.) Pelaksanaan Survey Keuasan Masyarakat	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	4 Kegiatan 1 Kegiatan	<b>110,000,000</b>						4 Kegiatan 1 Kegiatan	<b>121,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				1 kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	1 kegiatan	33,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, grebeg syawakan, festival durian lolong, gema setya, dsb )				4 kegiatan	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kantor Kecamatan Paningggaran	4 kegiatan	88,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	- %		- %	-- 100 %	<b>125,000,000</b>						-- 100 %	<b>137,500,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Desa Yang Mempromosikan Produk Unggulanya dalam Pameran Jumlah TP.PKK Desa/Kecamatan yang dibina Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Kegiatan %		Kegiatan Kegiatan %	1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %	<b>95,000,000</b>						1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %	<b>104,500,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah musrenbang desa/ kelurahan dan kecamatan yang dilaksanakan				1 kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa, Masyarakat, OPD Kecamatan	1 kegiatan	33,000,000	Kecamatan Paningggaran
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mempromosikan produk unggulanya dalam pameran JUmlah TP.PKK Desa/Kelurahan/Kecamatan yang di bina				1 kegiatan 1 Desa	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa, Masyarakat, OPD Kecamatan	1 kegiatan 1 Desa	71,500,000	Kecamatan Paningggaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat ( Karang Taruna, PIKR, Forum Anak ) yang dibina	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>30,000,000</b>						3 Kegiatan	<b>33,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat ( Karang Taruna, PIKR, Forum Anak ) yang di Bina				3 kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 Desa , Kecamatan	3 kegiatan	33,000,000	Kecamatan Paninggarran
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	JUmlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan %		Kegiatan %	4 Kegiatan 100 %	<b>50,000,000</b>						4 Kegiatan 100 %	<b>55,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>50,000,000</b>						4 Kegiatan	<b>55,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				4 kegiatan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa, Masyarakat, Forkompimcam , Kantor Kecamatan	4 kegiatan	55,000,000	Kecamatan Paninggarran
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	<b>70,000,000</b>						--	<b>77,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	<b>70,000,000</b>						4 Kegiatan	<b>77,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional ( HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan				4 kegiatan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa, Masyarakat, Kecamatan, Fork ompimcam	4 kegiatan	77,000,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	- -		- -	-- --	<b>195,000,000</b>						-- --	<b>137,500,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Desa Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa Desa	15 Desa 1 Desa 5 Desa 15 Desa 5 Desa	<b>195,000,000</b>						15 Desa 1 Desa 5 Desa 15 Desa 5 Desa	<b>137,500,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi penyusunan perdes dan perkades				15 Desa	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 Desa, Kecamatan	15 Desa	11,000,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa				15 Desa	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 Desa, Kecamatan	15 Desa	44,000,000	Kecamatan Paninggaran

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah bulan terlaksananya pelaksanaan pemilihan kepala desa				15 Desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 Desa, Kecamatan	15 Desa	27,500,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang di bina				5 Desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 Desa, Kecamatan	5 Desa	27,500,000	Kecamatan Paninggaran
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pendampingan Desa				5 Desa	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	15 Desa, Kecamatan	5 Desa	27,500,000	Kecamatan Paninggaran
<b>TOTAL</b>							<b>3,529,995,800</b>							<b>3,726,575,380</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi				6 Orang	5,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ASN di lingkungan Kecamatan Kesesi	6 Orang	6,050,000	Kecamatan Kesesi
<b>7 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	<b>115,500,000</b>						100 %	<b>127,050,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	0 Unit	0	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	26,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	29,040,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	7,700,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	8,470,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Pengadaan Kantor				12 Bulan	4,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	4,840,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	41,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	45,980,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	35,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	38,720,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD				12 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan ASN di Lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	0	Kecamatan Kesesi
<b>7 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Presentase Ketercapaian Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perintah Daerah	%		%	100 %	<b>142,000,000</b>						100 %	<b>156,200,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				4 Unit	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	4 Unit	132,000,000	Kecamatan Kesesi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	0 Unit	0	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Terpenuhi				4 Unit	22,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	4 Unit	24,200,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	0 Unit	0	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				0 Unit	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	0 Unit	0	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	<b>129,875,000</b>						100 %	<b>142,862,500</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	33,275,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lingkungan Kantor Kecamatan Kesesi	12 Bulan	36,602,500	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				4 Orang	96,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Lingkungan Kantor Kecamatan Kesesi	4 Orang	106,260,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	<b>964,900,000</b>						100 %	<b>841,390,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	30,800,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	33,880,000	Kecamatan Kesesi



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				12 Bulan	16,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	18,150,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler				0 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	0 Bulan	0	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				12 Bulan	17,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	19,360,000	Kecamatan Kesesi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	900,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kecamatan Kesesi	12 Bulan	770,000,000	Kecamatan Kesesi
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-	-	-	--	<b>188,000,000</b>						--	<b>96,800,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%	%	%	100 %	<b>0</b>						100 %	<b>0</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait				0 Kegiatan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan dengan instansi vertikal	0 Kegiatan	0	Kecamatan Kesesi
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	<b>113,200,000</b>						100 %	<b>14,520,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pemuda Yang Dibina Di Tingkat Kecamatan				230 Orang	13,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Semua Desa di Kecamatan Kesesi	230 Orang	14,520,000	Kecamatan Kesesi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat (Seni Budaya, Pemuda, Olahraga, Kesehatan, Pendidikan, dsb) Yang Bukan Pelimpahan Unit Kerja Lain				0 Kegiatan	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Semua Desa di Kecamatan Kesesi	0 Kegiatan	0	Kecamatan Kesesi
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%		%	100 %	<b>74,800,000</b>						100 %	<b>82,280,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat				1 Kali	16,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Kesesi	1 Kali	18,150,000	Kecamatan Kesesi
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Yang Dilaksanakan (MTQ, Festival Durian, Syawalan, Pentas Seni Dan Karnaval)				5 Kegiatan	58,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat Kecamatan Kesesi	5 Kegiatan	64,130,000	Kecamatan Kesesi
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-		-	--	<b>97,900,000</b>						--	<b>107,690,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	<b>97,900,000</b>						100 %	<b>107,690,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa/Kelurahan Dan Kecamatan Yang Dilaksanakan				24 Kegiatan	16,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	24 Kegiatan	18,150,000	Kecamatan Kesesi
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mempromosikan Produk Unggulannya Dalam Pameran Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan/Kecamatan Yang Dibina				23 Desa 24 Desa & Kecamatan	81,400,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	23 Desa 24 Desa & Kecamatan	89,540,000	Kecamatan Kesesi
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	%		%	100 %	<b>0</b>						100 %	<b>0</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat (Karang Taruna, PIKR, Forum Anak dsb) Yang Dibina				0 Lembaga	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Karang Taruna, PIKR, Forum Anak se-Kecamatan Kesesi	0 Lembaga	0	Kecamatan Kesesi
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-		-	--	55,000,000						--	60,500,000	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	55,000,000						100 %	60,500,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengamanan Kebencanaan, Hari-Hari Besar Keagamaan Dan Tahun Baru Yang Dilaksanakan				8 Kegiatan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Semua Wilayah Kecamatan Kesesi	8 Kegiatan	60,500,000	Kecamatan Kesesi
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-		-	--	77,000,000						--	84,700,000	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%		%	100 %	77,000,000						100 %	84,700,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba 17 an, Pelatihan Paskibra, Upacara HUT RI, Karnaval dan Upacara Hari Besar Nasional				6 Kegiatan	77,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat di Kecamatan Kesesi	6 Kegiatan	84,700,000	Kecamatan Kesesi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi  Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-  -	-  -	-  -	--  --	<b>76,800,000</b>					--  --	<b>84,480,000</b>		
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang tertib administrasi	%	%		100 %	<b>76,800,000</b>					100 %	<b>84,480,000</b>		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyusunan Perdes Dan Perkades				23 Desa	9,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	23 Desa	9,900,000	Kecamatan Kesesi
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi				23 Desa	11,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	23 Desa	12,650,000	Kecamatan Kesesi
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Pelaksanaan Pilkades				2 Desa	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	2 Desa	11,000,000	Kecamatan Kesesi
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota BPD Yang Terbina				115 Orang	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	115 Orang	11,000,000	Kecamatan Kesesi
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Dalam Pendampingan Dan Pengawasan Desa				23 Desa	36,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa di Lingkungan Kecamatan Kesesi	23 Desa	39,930,000	Kecamatan Kesesi
<b>TOTAL</b>							<b>4,728,869,300</b>						<b>4,871,756,230</b>		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01						<b>4,025,050,070</b>						<b>4,022,500,000</b>						
7	01	01					<b>3,040,070,070</b>					100 %	<b>3,278,000,000</b>						
7	01	01	2.01				<b>30,000,000</b>					100 %	<b>34,000,000</b>						
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)			1 Tahun	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	17,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , EvaluasiPerangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)			1 Tahun	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	17,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN beserta Administrasi Akutansi Perangkat Daerah dalam 1 Tahun Tercapai di Kecamatan Petungkriyono	%	%	100 %	<b>1,811,070,070</b>						100 %	<b>2,010,000,000</b>	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)			1 Tahun	1,752,993,070	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN beserta Administrasi Akutansi Perangkat Daerah dalam 1 Tahun Tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	1,950,000,000	Kecamatan Petungkriyono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)				1 Tahun	58,077,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN beserta Administrasi Akutansi Perangkat Daerah dalam 1 Tahun Tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	60,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	%		%	100 %	<b>230,000,000</b>						100 %	<b>242,000,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	1 Tahun	27,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)				1 Tahun	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	1 Tahun	37,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (bulan)				1 Tahun	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	1 Tahun	42,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	JumlahBulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	1 Tahun	27,000,000	Kecamatan Petungkriyono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu (Bulan)				1 Tahun	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	1 Tahun	82,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah Seperti Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, Kunjungan Tamu tercapai	1 Tahun	27,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>670,000,000</b>						100 %	<b>679,000,000</b>	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				1 Tahun	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	70,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				1 Tahun	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	32,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				1 Tahun	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	77,000,000	Kecamatan Petungkriyono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)				1 Tahun	500,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	500,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>114,000,000</b>						100 %	<b>116,000,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				1 Tahun	24,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	26,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				1 Tahun	90,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	90,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>185,000,000</b>						100 %	<b>197,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				1 Tahun	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	70,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	27,000,000	Kecamatan Petungkriyono



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				1 Tahun	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	17,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				1 Tahun	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	17,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				1 Tahun	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	66,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>240,000,000</b>						100 %	<b>256,000,000</b>	
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	<b>95,000,000</b>						100 %	<b>105,000,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah koordinasi Standar Pelayanan Minimal wilayah kecamatan				1 Tahun	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Tahun	33,000,000	Kecamatan Petungkriyono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Tahun	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Tahun	72,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tercapai di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>145,000,000</b>						100 %	<b>151,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan erizinan Non Usaha				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	28,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, grebek syawalan, festival durian lolong, dsb)				1 Tahun	120,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tercapai di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	123,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif Presentase Lembaga Aktif tercapai	- %		- %	-- 100 %	<b>459,980,000</b>						-- 100 %	<b>178,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrembang Desa di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>459,980,000</b>						100 %	<b>178,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlaj Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Tahun	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrembang Desa di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	28,000,000	Kecamatan Petungkriyono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Tahun	434,980,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrembang Desa di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	150,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Petungkriyono tercapai Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Petungkriyono tercapai Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	% - -		% - -	100 % -- --	<b>30,000,000</b>						100 % -- --	<b>33,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Tercapainya Sinergitas Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan	%		%	100 %	<b>30,000,000</b>						100 %	<b>33,000,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi permasalahan dan pengamanan kebakaran, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan (Penjelasan: Kegiatan terkait rapat koordinasi kebakaran, pengamanan natal dan tahun baru, lebaran yang berkaitan dengan TNI/ POLRI)				1 Tahun	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	ketertiban Masyarakat di Daerah Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	33,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah seperti Upacara Bendera dan Kegiatan Nasional Lainnya di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>45,000,000</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah seperti Upacara Bendera dan Kegiatan Nasional Lainnya di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>45,000,000</b>						100 %	<b>50,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Tahun	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah seperti Upacara Bendera dan Kegiatan Nasional Lainnya di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	50,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Tercapainya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>210,000,000</b>						100 %	<b>227,500,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Tercapainya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	%		%	100 %	<b>210,000,000</b>						100 %	<b>227,500,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				9 Desa	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	9 Desa	33,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				9 Desa	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	9 Desa	33,000,000	Kecamatan Petungkriyono

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				1 Desa	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	1 Desa	40,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				1 Tahun	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	33,000,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan				1 Tahun	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	38,500,000	Kecamatan Petungkriyono
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Tahun	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Petungkriyono	1 Tahun	50,000,000	Kecamatan Petungkriyono
<b>TOTAL</b>							<b>4,025,050,070</b>							<b>4,022,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
7	01						<b>4,032,251,650</b>						<b>3,448,072,000</b>			
7	01	01					<b>3,328,742,150</b>						100 Persen	<b>3,126,510,000</b>		
7	01	01	2.01				<b>11,750,000</b>						100 Persen	<b>12,150,000</b>		
7	01	01	2.01	01			2 Dokumen	11,750,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	2 Dokumen	12,150,000	Kecamatan Wonokerto
7	01	01	2.02				12 Bulan	<b>2,089,900,000</b>					12 Bulan	<b>2,296,000,000</b>		
7	01	01	2.02	01			1 Tahun	2,055,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	1 Tahun	2,260,000,000	Kecamatan Wonokerto
7	01	01	2.02	04			1 Tahun 12 bulan	34,900,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	1 Tahun 12 bulan	36,000,000	Kecamatan Wonokerto
7	01	01	2.06				12 Bulan	<b>184,643,000</b>					12 Bulan	<b>204,900,000</b>		
7	01	01	2.06	01			2 Dokumen 2 Unit	3,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Wonokerto	2 Dokumen 2 Unit	5,000,000	Kecamatan Wonokerto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun Jumlah unit terpenuhinya komponen listrik/kantor				12 bulan 2 Dokumen 2 Unit	100,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 2 Dokumen 2 Unit	110,000,000	Kecamatan Wonokerto
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga				12 bulan	5,500,000	Kab. Pekalongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan	6,500,000	Kecamatan Wonokerto
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu				12 bulan 12 bulan	25,143,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan	26,700,000	Kecamatan Wonokerto
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu				12 bulan 12 bulan 12 bulan	51,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan	56,700,000	Kecamatan Wonokerto
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	15 Unit	<b>780,000,000</b>						15 Unit	<b>355,000,000</b>	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit	160,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit	0	Kecamatan Wonokerto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Persentase terlaksananya pengadaan meubel				12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 100 persen	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 100 persen	60,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi Persentase terlaksananya pengadaan meubel				12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen	45,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen	50,000,000	Kecamatan Wonokerto



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi persentase terlaksananya pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya Persentase terlaksananya pengadaan meubel				12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen	350,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen	165,000,000	Kecamatan Wonokerto
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi persentase terlaksananya pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya Persentase terlaksananya pengadaan meubel Persentase terlaksananya pengadaan sarpras pendukung gedung kantor dan bangunan				12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	175,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	80,000,000	Kecamatan Wonokerto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan dalam Pembayaran Jaskom dan Jasa Tenaga Outsourcing	Bulan		Bulan	12 Bulan	92,849,150						12 Bulan	104,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam penyediaan jaskom Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi persentase terlaksananya pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya Persentase terlaksananya pengadaan meubel Persentase terlaksananya pengadaan sarpras pendukung gedung kantor dan bangunan				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	27,849,150	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	28,000,000	Kecamatan Wonokerto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa tenaga kebersihan dan tenaga lainnya Jumlah bulan dalam penyediaan jaskom Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi persentase terlaksananya pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya Persentase terlaksananya pengadaan meubel Persentase terlaksananya pengadaan sarpras pendukung gedung kantor dan bangunan				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	76,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Bulan dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>169,600,000</b>						12 Bulan	<b>154,460,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan dalam penyediaan jasa tenaga kebersihan dan tenaga lainnya Jumlah bulan dalam penyediaan jaskom Jumlah bulan dalam penyedia peralatan rumah tangga Jumlah bulan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Tamu Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas jabatan Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi persentase terlaksananya pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya Persentase terlaksananya pengadaan meubel Persentase terlaksananya pengadaan sarpras pendukung gedung kantor dan bangunan				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	44,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Unit 3 Unit 100 persen 100 persen 100 persen	45,230,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan yang terpenuhinya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapanagan				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 Bulan	26,000,000	Kecamatan Wonokerto

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan Mebel Jumlah bulan yang terpenuhinya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapanagan				12 Bulan 12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 Bulan 12 Bulan	12,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan Mebel Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor Jumlah bulan yang terpenuhinya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapanagan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	15,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	16,230,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan Mebel Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin kantor Jumlah bulan yang terpenuhinya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapanagan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	75,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Wonokerto	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	55,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Jumlah Bulan dalam Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>245,290,000</b>						12 Bulan	<b>164,774,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Bulan dalam Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>18,750,000</b>						12 Bulan	<b>19,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah bulan dalam pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi				12 Bulan	18,750,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Kecamatan Wonokerto	12 Bulan	19,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Bulan dalam Pelaksanaan Pembinaan,Pelayanan yang terkait dengan Perizinan maupun non Perizinan Di Dalam Pelayanan Masyarakat	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>191,940,000</b>						12 Bulan	<b>102,254,000</b>	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah pemuda yang dibina				100 orang	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Kecamatan Wonokerto	100 orang	17,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan dalam pembinaan PKK Desa				12 bulan	37,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan	40,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah persentase kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di tingkat kecamatan				100 persen	139,940,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Kecamatan Wonokerto	100 persen	45,254,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah persentase dalam Pelaksanaan Pelayanan yang terkait dengan Pelayanan perizinan non usaha maupun non perizinan	Persen		Persen	100 Persen	<b>34,600,000</b>						100 Persen	<b>43,520,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah bulan dalam urusan pemerintahan dalam pelaksanaan non perizinan				12 bulan	19,600,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan	23,520,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah bulan dalam urusan pemerintahan dalam pelaksanaan nonperizinan				12 bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 bulan	20,000,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbangkec	Desa		Desa	11 Desa	<b>26,694,000</b>						11 Desa	<b>30,698,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbangkec	Desa		Desa	11 Desa	<b>26,694,000</b>						11 Desa	<b>30,698,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Persentase dalam pelaksanaan Musyawarah pelaksanaan pembangunan Desa				100 persen	26,694,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Wonokerto	100 persen	30,698,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-	-	-	--	<b>175,075,500</b>						--	<b>30,690,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Bulan dalam Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	bulan		bulan	12 bulan	<b>175,075,500</b>						12 bulan	<b>30,690,000</b>	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan dalam penanganan pengaduan masyarakat				12 Bulan	175,075,500	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	12 Bulan	30,690,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan Upacara pada hari hari Besar Nasional	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>35,750,000</b>						3 Kegiatan	<b>42,900,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan Upacara pada hari hari Besar Nasional	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	<b>35,750,000</b>						3 Kegiatan	<b>42,900,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional				100 persen	35,750,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	100 persen	42,900,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Jumlah Bulan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>220,700,000</b>						12 Bulan	<b>52,500,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	bulan		bulan	12 bulan	220,700,000						12 bulan	52,500,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Desa yang Mengikuti Bintek aparatur Desa sehingga desa mampu melaksanakan Tupoksi dengan baik				11 desa	164,200,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	11 desa	16,750,000	Kecamatan Wonokerto
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa				8 desa	23,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	8 desa	0	Kecamatan Wonokerto
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah bulan dalam pelaksanaan fasilitasi desa yang dibina di tingkat kecamatan				11 desa	33,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Wonokerto	11 desa	35,750,000	Kecamatan Wonokerto
<b>TOTAL</b>							<b>4,032,251,650</b>							<b>3,448,072,000</b>	



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	01					<b>KECAMATAN</b>												<b>4,427,830,000</b>		
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	<b>3,425,300,000</b>						-	<b>3,767,830,000</b>	
7	01	01	2.01			<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	<b>12,300,000</b>						2 Dokumen	<b>13,530,000</b>	
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			2 Dokumen	12,300,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	13,530,000	Kecamatan Siwalan	
7	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Jumlah bulan terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	<b>2,650,000,000</b>						12 Bulan 12 Bulan	<b>2,915,000,000</b>	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	2,600,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	2,860,000,000	Kecamatan Siwalan	
7	01	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Bulan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pegawai Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	55,000,000	Kecamatan Siwalan	
7	01	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang		Orang	2 Orang	<b>3,500,000</b>						2 Orang	<b>3,850,000</b>	
7	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2 Pegawai	3,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Pejabat Pengawas di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Pegawai	3,850,000	Kecamatan Siwalan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah unit terlenuhinya komponen listrik/kantor	Bulan Bulan Bulan Bulan Kali Buah		Bulan Bulan Bulan Bulan Kali Buah	12 Bulan 11 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 48 Kali 21 Buah	<b>117,000,000</b>						12 Bulan 11 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 48 Kali 21 Buah	<b>128,700,000</b>	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik				21 Buah	5,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	21 Buah	5,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	27,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor				12 Bulan	12,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	13,200,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu				11 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	11 Bulan	38,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Kali	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	48 Kali	27,500,000	Kecamatan Siwalan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah pengadaan mebel Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi	Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit	1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 8 Unit	<b>441,000,000</b>						1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 8 Unit	<b>485,100,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Unit	77,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				11 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	11 Unit	55,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				8 Unit	71,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	8 Unit	78,100,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	1 Unit	55,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Unit	220,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah orang pengadaan jasa pelayanan umum	Bulan Orang		Bulan Orang	12 Bulan 2 Orang	<b>83,000,000</b>						12 Bulan 2 Orang	<b>91,300,000</b>	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	33,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	36,300,000	Kecamatan Siwalan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				2 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Orang	55,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebel Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan	<b>118,500,000</b>						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Bulan	<b>130,350,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	38,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan				12 Bulan	15,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	6,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	6,600,000	Kecamatan Siwalan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan dan Mesin Kantor				12 Bulan	7,500,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	8,250,000	Kecamatan Siwalan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				6 Bulan	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	6 Bulan	60,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	-		-	--	<b>165,000,000</b>						--	<b>181,500,000</b>	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Keg		Keg	12 Keg	<b>10,000,000</b>						12 Keg	<b>11,000,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait				12 Kegiatan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	12 Kegiatan	11,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat yang bukan pelimpahan unit kerja lain	Keg		Keg	3 Keg	<b>45,000,000</b>						3 Keg	<b>49,500,000</b>	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat yang bukan pelimpahan unit kerja lain				3 Kegiatan	45,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	3 Kegiatan	49,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Keg Kali		Keg Kali	3 Keg 2 Kali	<b>110,000,000</b>						3 Keg 2 Kali	<b>121,000,000</b>	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat				2 Kali	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Kali	33,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan				3 Kegiatan	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	3 Kegiatan	88,000,000	Kecamatan Siwalan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	-	-	-	--	<b>135,000,000</b>						--	<b>148,500,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran Jumlah Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan Jumlah TP PKK Desa/Kecamatan yang dibina	Keg Keg Keg		Keg Keg Keg	1 Keg 2 Keg 1 Keg	<b>105,000,000</b>						1 Keg 2 Keg 1 Keg	<b>115,500,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan				2 Kegiatan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Kegiatan	44,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran Jumlah TP PKK desa/Kelurahan/Kecamatan yang dibina				1 Kegiatan 1 Kegiatan	65,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	71,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	Keg		Keg	4 Keg	<b>30,000,000</b>						4 Keg	<b>33,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina				4 Kegiatan	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	33,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	-	-	-	--	<b>50,000,000</b>						--	<b>55,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Keg %		Keg %	4 Keg 100 %	<b>50,000,000</b>						4 Keg 100 %	<b>55,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan				4 Kegiatan	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	55,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	-	-	-	--	<b>70,000,000</b>						--	<b>77,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional	Keg		Keg	4 Keg	<b>70,000,000</b>						4 Keg	<b>77,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional				4 Kegiatan	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	4 Kegiatan	77,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	-	-	-	--	<b>322,000,000</b>						--	<b>198,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah anggota BPD yang terbina Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Jumlah Desa yang tertib administrasi Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang diterbitkan	Orang Desa Desa Desa Rekomendasi		Orang Desa Desa Desa Rekomendasi	120 Orang 2 Desa 13 Desa 13 Desa 5 Rekomendasi	<b>322,000,000</b>						120 Orang 2 Desa 13 Desa 13 Desa 5 Rekomendasi	<b>198,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades				13 Desa	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	13 Desa	11,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				13 Desa	177,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	13 Desa	38,500,000	Kecamatan Siwalan
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pikades				2 Desa	50,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	2 Desa	55,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD terbina				120 Orang	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	120 Orang	66,000,000	Kecamatan Siwalan
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan				5 Rekomendasi	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	13 Desa di Wilayah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	5 Rekomendasi	27,500,000	Kecamatan Siwalan
<b>TOTAL</b>							<b>4,167,300,000</b>							<b>4,427,830,000</b>	





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 Bulan	18,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	22,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya cetak penggandaan kantor				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	12,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan tamu				12 Bulan	38,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	40,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				270 Kali	39,180,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	270 Kali	45,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarpras pendukung capaian kinerja	Persen		Persen	100 Persen	<b>335,000,000</b>						100 Persen	<b>385,000,000</b>	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	70,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	2 Unit	90,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				3 Unit	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	3 Unit	35,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang terpenuhi				5 Unit	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	5 Unit	60,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya				3 Unit	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Karangdadap	3 Unit	200,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	<b>110,000,000</b>						100 Persen	<b>145,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi (Bhn Bacaan,Majalah,Telp, Internet), Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum				4 Orang	110,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	4 Orang	110,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>263,000,000</b>						100 Persen	<b>335,000,000</b>	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan				12 Bulan	40,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 Bulan	3,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	5,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebel				4 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	4 Bulan	15,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor				12 Bulan	10,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	12 Bulan	15,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	200,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Kecamatan Karangdadap	4 Unit	250,000,000	Kecamatan Karangdadap

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	Persen		Persen	100 Persen	25,000,000						100 Persen	175,000,000	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan yang menghasilkan rekomendasi	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	20,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				2 keg	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Forkompinda se-Kecamatan Karangdadap	2 keg	20,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh unit kerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	25,000,000						100 Persen	30,000,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat (seni budaya, pemuda, olahraga, kesehatan, pendidikan dsb) yang bukan pelimpahan unit kerja lain				4 keg	25,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se Kecamatan Karangdadap	4 keg	30,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	125,000,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat				2 Kali	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	2 Kali	25,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, Apresiasi Seni, grebek Syawalan, Festival Durian Lolong)				4 keg	0	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kecamatan Karangdadap	4 keg	100,000,000	Kecamatan Karangdadap

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif dan pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa Prosentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	<b>195,000,000</b>						100 Persen 100 Persen	<b>165,000,000</b>	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Prosentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	<b>160,000,000</b>						100 Persen	<b>125,000,000</b>	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangdesa dan kecamatan yang dilaksanakan				2 keg	30,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	2 keg	35,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran, Jumlah TP PKK Desa yang dibina, jumlah kelompok bank sampah yang di bina dan UMKM yang dibina				4 keg	130,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	4 keg	90,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah lembaga masyarakat (Karang Taruna, PIKR) yang di bina	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	<b>35,000,000</b>						2 Kegiatan	<b>40,000,000</b>	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum Anak dsb) yang dibina				2 keg	35,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Karang Taruna, PIKR di 11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	2 keg	40,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa) yang terbina/aktif	Persen		Persen	100 Persen	<b>105,000,000</b>						100 Persen	<b>58,000,000</b>	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Linmas yang dibina dan, penanganan pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan dan hari hari besar	Desa		Desa	11 Desa	<b>105,000,000</b>						11 Desa	<b>58,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, aduan dan pengamanan kebencanaan, hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan (Linmas yang dibina)				2 keg	105,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se-Kecamatan Karangdadap	2 keg	58,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	<b>80,000,000</b>						100 Persen	<b>90,000,000</b>	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	<b>80,000,000</b>						100 Persen	<b>90,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dll)				5 keg	80,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Desa se-Kecamatan Karangdadap	5 keg	90,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan tertib Administrasi dan Jenis layanan yang sudah menerapkan SOP tetap	Persen		Persen	100 Persen	<b>210,000,000</b>						100 Persen	<b>126,000,000</b>	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa tertib administrasi dan desa yang sudah menerapkan layanan SOP tetap	Desa		Desa	11 Desa	<b>210,000,000</b>						11 Desa	<b>126,000,000</b>	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades				11 Desa	60,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se-Kecamatan Karangdadap	11 Desa	25,000,000	Kecamatan Karangdadap

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi				11 Desa	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	11 Desa	35,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades				1 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	1 Desa	22,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina				100 Orang	55,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	100 Orang	22,000,000	Kecamatan Karangdadap
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa				3 Desa	20,000,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	11 Desa se- Kecamatan Karangdadap	3 Desa	22,000,000	Kecamatan Karangdadap
<b>TOTAL</b>							<b>3,306,906,800</b>							<b>3,603,000,000</b>	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pemilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)sanaan Akuntansi SKPD (bulan)			1 th	5.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 th	5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (pegawai)			7 org	15.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 org	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %						100 %	<b>308.500.000</b>		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Terpenuhiya Komponen Listerik/Kantor (unti/buah)			12 bl	7.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)			12 bl	30.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	35.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga (bulan)			12 bl	7.500.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhiya Cetak Penggandaan kantor (Bulan)			12 bl	27.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhiya Kunjungan Tamu (Bulan)			12 bl	30.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	32.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)			12 bl	181.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	183.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD (Bulan)			12 bl	10.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bl	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%		%	100 %	249.000.000						100 %	190.500.000	
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)				4 unit	88.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	4 unit	69.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Unit)				38 bh	71.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	38 bh	62.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)				12 unit	90.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 unit	59.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	110.000.000						100 %	135.000.000	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 bl	35.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bl	35.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang)				12 bl	75.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bl	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	%		%	100 %	126.500.000						100 %	136.500.000	
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhi Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)				12 bl	34.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bl	35.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhi Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)				12 bl	37.500.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bl	39.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebeler(bulan)				12 bl	10.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapaiannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bl	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)				12 bl	15.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapaiannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bl	17.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)				12 bl	30.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Tercapaiannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bl	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase masyarakat yang memperoleh Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%		%	23 %	<b>1.037.555.000</b>						23 %	<b>1.050.000.000</b>	
8 01 02 2,01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	23 %	<b>1.037.555.000</b>						23 %	<b>1.050.000.000</b>	
8 01 02 2,01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				103000 orang	1,037,555,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	103000 orang	1,050,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Berpolitik	%		%	23 %	<b>1.965.643.000</b>						23 %	<b>1.484.890.880</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Persentase Fasilitasi kelembagaan pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Masyarakat yang mengikuti Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	% %		% %	100 % 23 %	1.965.643.000						100 % 23 %	1.484.890.880	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Budaya Politik. Jumlah Pemantauan situasi politik di daerah Prosentase bantuan keuangan Parpol yang tersalurkan				90000 orang 180 kali 100 persen	1,965,643,000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat yang mengikuti Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	90000 orang 180 kali 100 persen	1,484,890,880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg diberdayakan dan mendapatkan pengawasan	-		-	31 -	1.400.000.000						31 -	1.400.000.000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dibagi Jumlah Ormas keseluruhan dikali 100	%		%	24 %	1.400.000.000						24 %	1.400.000.000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang mengikuti Pendaftaran , Pemberdayaan , Evaluasi, Mediasi Sengketa dan Pengawasan dan Ormas Asing				30 ormas	1.400.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Ormas yang mendapatkan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 ormas	1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa	%		%	6 %	150.000.000						6 %	200.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang memperoleh Pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%		%	6 %	150.000.000						6 %	200.000.000	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	%		%	24000 orang	150.000.000	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Masyarakat yang memperoleh Pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	24000 orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pekalongan	%		%	100 %	2.072.554.400						100 %	2.172.554.400	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan situasi daerah	%		%	100 %	2.072.554.400						100 %	2.172.554.400	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Fasilitas Komunikasi dan Koordinasi Forkopimda Jumlah Pemantauan wilayah	%		%	12 kali 365 kl	2.072.554.400	Kab. Pekalongan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Laporan situasi daerah	12 kali 365 kl	2.172.554.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL</b>							<b>10.742.252.400</b>							<b>10.509.945.280</b>	

**BUPATI PEKALONGAN**  
**TTD**  
**FADIA ARAFIQ**

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 7 Juli 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD  
BUDI SANTOSO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 24  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001